



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



RKPD 2026



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional serta kaidah pelaksanaannya.

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2026, terdiri atas:

- a. BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
4. Maksud dan Tujuan
5. Sistematika Penulisan
6. Pendekatan Baru
7. Rujukan Kebijakan

- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai Tahun Berjalan dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

- c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
 - 1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3. Arah Kebijakan Keuangan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - 2. Prioritas Pembangunan Daerah
- e. BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA
- f. BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
- g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - 1. Indikator Kinerja Utama
 - 2. Indikator Kinerja Daerah
 - 3. Indikator Kinerja Lainnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
- h. BAB VIII PENUTUP

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah :

- a. wajib melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan urusan masing-masing dengan mempedomani Peraturan Gubernur ini; dan

- b. melakukan penyesuaian/revisi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

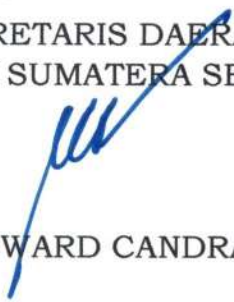
Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 28 Juli 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 26

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 6
1.3.1 RKPD dengan RKP Tahun 2026	I - 6
1.3.2 RKPD dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan	I - 8
1.3.3 RKPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	I - 9
1.3.4 RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	I - 10
1.3.5 RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah	I - 11
1.4 Maksud dan Tujuan	I - 11
1.4.1 Maksud	I - 11
1.4.2 Tujuan dan Sasaran	I - 11
1.5 Sistematika Penulisan	I - 12
1.6 Pendekatan Baru	I - 13
1.7 Pendekatan Proses	I - 14
1.8 Rujukan Kebijakan	I - 16

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II - 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 41
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II - 81
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II - 291
2.1.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	II - 302
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD	II - 345
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan	II - 382
2.3.1. Permasalahan Pembangunan	II - 382
2.3.2. Isu Strategis	II - 399

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
3.1.1. Analisis Perekonomian Nasional	III - 2
3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah	III - 14
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 61
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III - 62
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III - 77
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III - 84
3.3. Arah Kebijakan Keuangan Non APBD Prov. Sumatera Selatan	III - 85
3.3.1. APBD Kabupaten/Kota	III - 85
3.3.2. APBN	III - 87
3.3.3. Pendanaan Alternatif Lainnya	III - 88

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV - 2

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah IV - 7

 4.2.1. Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya IV - 9

 4.2.1.1. Telaah Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 IV - 9

 4.2.1.2. Telaahan Rancangan RKP Tahun 2026 IV - 17

 4.2.1.3. Telaah RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044..... IV - 39

 4.2.1.4. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)..... IV - 50

 4.2.1.5. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV - 61

 4.2.1.6. Telaah Isu Strategis Daerah IV - 67

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1. Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan..... V - 1

5.2. Indikator Makro dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota V - 25

 5.2.1. Kota Palembang V - 26

 5.2.2. Kabupaten Banyuasin V - 31

 5.2.3. Kabupaten Ogan Ilir V - 39

 5.2.4. Kabupaten Ogan Komering Ilir..... V - 44

 5.2.5. Kabupaten Musi Banyuasin..... V - 50

 5.2.6. Kota Lubuk Linggau V - 56

 5.2.7. Kabupaten Musi Rawas V - 60

 5.2.8. Kabupaten Musi Rawas Utara V - 65

 5.2.9. Kota Pagar Alam..... V - 70

 5.2.10. Kabupaten Lahat..... V - 75

 5.2.11. Kabupaten Empat Lawang..... V - 80

 5.2.12. Kabupaten Muara Enim V - 85

 5.2.13. Kota Prabumulih V - 91

 5.2.14. Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir V - 96

 5.2.15. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur V - 100

 5.2.16. Kabupaten Ogan Komering Ulu..... V - 106

 5.2.17. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan V - 112

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah VI - 1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.1. Indikator Makro Pembangunan VII - 1

7.2. Indikator Kinerja Utama VII - 2

7.3. Indikator Kinerja Daerah VII - 3

BAB VIII PENUTUP

VIII - 1

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Keterkaitan Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Daerah Tahun 2025-2029	I - 6
Tabel 1.2	Keterkaitan Target Indikator Makro Provinsi dengan Nasional	I - 8
Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	II - 2
Tabel 2.2	Jumlah dan Distribusi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan, 2019-2024	II - 3
Tabel 2.3	Luas Kawasan Hutan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Ha).....	II - 11
Tabel 2.4	Rekapitulasi Kejadian Bencana di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2014-2023	II - 26
Tabel 2.5	Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan .	II - 29
Tabel 2.6	Data Sebaran Hotspot Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 32
Tabel 2.7	Perbandingan Jumlah Sebaran Hotspot dari Tahun 2015-2023.....	II - 32
Tabel 2.8	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024.....	II - 33
Tabel 2.9	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 33
Tabel 2.10	Data Desa Rawan dan Sangat Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.....	II - 34
Tabel 2.11	Data Desa Tangguh di BPBD Kabupaten di Sumatera Selatan	II - 35
Tabel 2.12	Potensi Gerakan Tanah di Provinsi Sumatera Selatan	II - 38
Tabel 2.13	Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2023.....	II - 42
Tabel 2.14	Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2023	II - 43
Tabel 2.15	PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 (Miliar Rupiah) (ADHB) ...	II - 44
Tabel 2.16	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2018-2023 (Miliar Rupiah).....	II - 45
Tabel 2.17	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran, 2018-2023 (Miliar Rupiah).....	II - 45
Tabel 2.18	Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan menurut Tempat Tinggal Tahun 2020-2024	II - 52
Tabel 2.19	Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024	II - 53
Tabel 2.20	Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem per Provinsi Tahun 2023-2024.....	II - 58
Tabel 2.21	Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Pada Tahun 2017-2024 (tahun)	II - 61
Tabel 2.22	Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2024 (tahun)	II - 62
Tabel 2.23	Daftar Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 64
Tabel 2.24	Warisan Budaya Tak Benda Sumatera Selatan yang sudah disertifikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI	II - 78
Tabel 2.25	Jumlah Sanggar Seni di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 - 2023	II - 80
Tabel 2.26	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024	II - 92

Tabel 2.27	Pencapaian Realisasi SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	II - 93
Tabel 2.28	Angka Harapan Hidup (LF SP2020) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024.....	II - 100
Tabel 2.29	Persentase Case Detection Rate Penyakit TBC di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 106
Tabel 2.30	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Sumatera Selatan Yang Terakreditasi Tahun 2019 – 2024	II - 111
Tabel 2.31	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 – 2024.....	II - 113
Tabel 2.32	Persentase Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024	II - 114
Tabel 2.33	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	II - 114
Tabel 2.34	Tabel Kondisi Jalan Nasional di Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2023	II - 119
Tabel 2.35	Tabel Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2023	II - 120
Tabel 2.36	Tabel Kondisi Jalan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023	II - 121
Tabel 2.37	Daftar Ruas Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2023	II - 122
Tabel 2.38	Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 124
Tabel 2.39	Daerah Irigasi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat	II - 126
Tabel 2.40	Daerah Irigasi Rawa di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat	II - 126
Tabel 2.41	Kondisi Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 127
Tabel 2.42	Kondisi Jaringan Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 129
Tabel 2.43	Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan ...	II - 130
Tabel 2.44	Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	II - 131
Tabel 2.45	Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2036 ..	II - 135
Tabel 2.46	Status Perda RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	II - 136
Tabel 2.47	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2016-2023	II - 143
Tabel 2.48	Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2023	II - 145
Tabel 2.49	Jumlah Kepala Keluarga Kekurangan Rumah (<i>Backlog</i>) di Provinsi Sumatera Selatan, 2023	II - 148
Tabel 2.50	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	II - 150
Tabel 2.51	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Permukiman Rakyat Tahun 2024.....	II - 150
Tabel 2.52	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	II - 151

Tabel 2.53	Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	II - 152
Tabel 2.54	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Selatan Tahun 2024 ..	II - 162
Tabel 2.55	Target dan Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	II - 162
Tabel 2.56	Rekapitulasi DTKS, BPNT, PKH dan PBI-JKN Provinsi Sumatera Selatan Periode September 2024	II - 168
Tabel 2.57	Neraca Ketersediaan Pangan Provinsi Sumatera Selatan, 2024 (ASEM) .	II - 177
Tabel 2.58	Harga Pangan Pokok Strategis Tingkat Eceran Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 178
Tabel 2.59	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dan Tahun 2023	II - 179
Tabel 2.60	Target dan Realisasi Produksi Peternakan Tahun 2024	II - 181
Tabel 2.61	Sandingan Target RPJMD Terhadap Realisasi Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2020 - 2021	II - 183
Tabel 2.62	Capaian Persentase Luas Tanah Bersertifikat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 - 2023	II - 189
Tabel 2.63	Capaian Pengendalian Peningkatan Emisi GRK Provinsi Sumatera Selatan (2019-2023)	II - 191
Tabel 2.64	Capaian Pengendalian Peningkatan Emisi GRK Provinsi Sumatera Selatan (2019-2023)	II - 191
Tabel 2.65	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan serta Jumlah Hotspot di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024	II - 193
Tabel 2.66	Cakupan KTP-El Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan per 31 Desember 2024	II - 195
Tabel 2.67	Kategori Desa di Sumatera Selatan berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2024	II - 196
Tabel 2.68	Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2023	II - 199
Tabel 2.69	Unmet Need KB di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2022	II - 203
Tabel 2.70	Data Terminal di Provinsi Sumatera Selatan	II - 205
Tabel 2.71	Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel	II - 206
Tabel 2.72	Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023	II - 206
Tabel 2.73	Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan	II - 207
Tabel 2.74	Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai	II - 209
Tabel 2.75	Daftar Dermaga Sungai dan Danau di Sumatera Selatan	II - 210
Tabel 2.76	Daftar Tambatan Perahu Bantuan Bersifat Khusus untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin	II - 212
Tabel 2.77	Produktivitas Angkutan Penyebrangan Tanjung Api – Api	II - 215
Tabel 2.78	Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan	II - 215
Tabel 2.79	Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui Bandara SMB II Palembang	II - 216
Tabel 2.80	Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui Bandara Silampari Lubuk Linggau	II - 217
Tabel 2.81	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah Ada PPID	II - 221
Tabel 2.82	Perkembangan Koperasi di Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun 2017-2023	II - 223

Tabel 2.83	Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2023	II - 225
Tabel 2.84	Perkembangan Investasi di Sumatera Selatan (Triliun Rupiah)	II - 226
Tabel 2.85	Perkembangan Kepemudaan di Sumatera Selatan	II - 228
Tabel 2.86	Perkembangan Keolahragaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2023	II - 230
Tabel 2.87	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	II - 232
Tabel 2.88	Daftar Computer Security Insident Response Team (CSIRT) yang telah dibentuk di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan	II - 234
Tabel 2.89	Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	II - 235
Tabel 2.90	Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023 per dimensi ..	II - 237
Tabel 2.91	Rekapitulasi Objek Pemajuan Kebudayaan Sumatera Selatan	II - 238
Tabel 2.92	Jumlah Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2023	II - 240
Tabel 2.93	Jumlah Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Tahun 2021-2023.....	II - 240
Tabel 2.94	Jumlah Buku Koleksi Umum dan Referensi di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023.....	II - 242
Tabel 2.95	Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023	II - 243
Tabel 2.96	Produksi Ikan Tangkap dan Budidaya (ton) Provinsi Sumatera Selatan 2021-2024	II - 247
Tabel 2.97	Konsumsi Ikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2024	II - 248
Tabel 2.98	Produksi Benur dan Nener (Ribu) Provinsi Sumatera Selatan 2020-2023	II - 248
Tabel 2.99	Data Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten/Kota Tahun 2022	II - 263
Tabel 2.100	Data Lahan Kritis UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	II - 263
Tabel 2.101	Data Perkembangan Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan	II - 264
Tabel 2.102	Lahan Kritis yang Direhabilitas di Provinsi Sumatera Selatan	II - 265
Tabel 2.103	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)	II - 266
Tabel 2.104	Capaian Kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 – 2023	II - 268
Tabel 2.105	Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024	II - 270
Tabel 2.106	Negara Tujuan Utama Ekspor Komoditas Sumatera Selatan	II - 271
Tabel 2.107	Nilai Impor beberapa Komoditi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2024	II - 272
Tabel 2.108	Jumlah Industri Kecil Formal di Sumatera Selatan Tahun 2024	II - 274
Tabel 2.109	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (Persen) Tahun 2020-2024	II - 275
Tabel 2.110	Realisasi Penempatan Transmigran Tahun 2022	II - 276
Tabel 2.111	Rencana Kawasan Transmigrasi yang telah Ditetapkan di Provinsi Sumatera Selatan	II - 276

Tabel 2.112	Beban Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	II - 278
Tabel 2.113	Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	II - 283
Tabel 2.114	Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	II - 284
Tabel 2.115	Nilai LKJIP (SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2022	II - 285
Tabel 2.116	Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2024	II - 286
Tabel 2.117	Capaian Kinerja Inkubator Teknologi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2024	II - 287
Tabel 2.118	Capaian Kinerja Kebun Raya Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2024	II - 288
Tabel 2.119	Capaian Kinerja Science Techno Park Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2024	II - 289
Tabel 2.120	Kegiatan Demo/Unjuk Rasa, Audiensi dan Aspirasi Tertulis 2014-2022	II – 289
Tabel 2.121	Rapat-Rapat Komisi dan Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021.....	II - 290
Tabel 2.122	Rapat Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 s.d 2022	II - 290
Tabel 2.123	Rapat Paripurna dan Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 s.d 2022	II - 290
Tabel 2.124	Persentase Risalah Rapat yang Tepat Waktu Tahun 2014-2022	II - 291
Tabel 2.125	Fasilitasi Penyelesaian Produk Hukum Tahun 2014 – 2022	II - 291
Tabel 2.126	Perkembangan pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	II - 292
Tabel 2.127	Perkembangan Nilai Tukar Petani	II - 294
Tabel 2.128	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Non Makanan Tahun 2018-2021	II - 294
Tabel 2.129	Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Sumatera Selatan Tahun 2022	II - 295
Tabel 2.130	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2016 – 2023	II - 297
Tabel 2.131	Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2023	II - 299
Tabel 2.132	Tingkat Kriminalitas di Sumatera Selatan Tahun 2015-2021	II - 301
Tabel 2.133	Tingkat Pendidikan Penduduk di Sumatera Selatan Tahun 2017 - 2022	II - 302
Tabel 2.134	Tingkat Ketergantungan Penduduk di Sumatera Selatan Tahun 2016 - 2022	II - 302
Tabel 2.135	Kategori Penilaian SDGs	II - 305
Tabel 2.136	Capaian per Indikator TPB Tanpa Kemiskinan Tahun 2022	II - 305
Tabel 2.137	Capaian TPB Tanpa Kemiskinan Tahun 2022	II - 308
Tabel 2.138	Capaian Per Indikator TPB Tanpa Kelaparan Tahun 2022	II - 309
Tabel 2.139	Capaian TPB Tanpa Kelaparan Tahun 2022	II - 310
Tabel 2.140	Capaian Per Indikator TPB Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2022	II - 310
Tabel 2.141	Capaian TPB Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2022	II - 313
Tabel 2.142	Capaian Per Indikator TPB Pendidikan Berkualitas Tahun 2022	II - 314

Tabel 2.143	Capaian TPB Pendidikan Berkualitas Tahun 2022	II - 316
Tabel 2.144	Capaian Per Indikator TPB Kesenjangan Gender Tahun 2022	II - 316
Tabel 2.145	Capaian TPB Kesenjangan Gender Tahun 2022	II - 319
Tabel 2.146	Capaian Per Indikator TPB Air Bersih dan Sanitasi Layak Tahun 2023 .	II - 320
Tabel 2.147	Capaian TPB Air bersih dan Sanitasi Layak Tahun 2023	II - 322
Tabel 2.148	Capaian Per Indikator TPB Energi Bersih dan Terjangkau Tahun 2022	II - 322
Tabel 2.149	Capaian TPB Energi Bersih dan Terjangkau Tahun 2022	II - 323
Tabel 2.150	Capaian Per Indikator Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022	II - 324
Tabel 2.151	Capaian TPB Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022	II - 326
Tabel 2.152	Capaian TPB Per Indikator Industri, Inovasi dan Infrastruktur Tahun 2023	II - 326
Tabel 2.153	Capaian TPB Industri, Inovasi dan Infrastruktur Tahun 2023	II - 328
Tabel 2.154	Capaian Per Indikator TPB Mengurangi Kesenjangan Tahun 2022	II - 328
Tabel 2.155	Capaian TPB Mengurangi Kesenjangan Tahun 2022	II - 329
Tabel 2.156	Capaian Per Indikator TPB Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Tahun 2023	II - 330
Tabel 2.157	Capaian TPB Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Tahun 2023 ...	II - 332
Tabel 2.158	Capaian TPB Per Indikator Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan Tahun 2023	II - 332
Tabel 2.159	Capaian TPB Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan Tahun 2022	II - 333
Tabel 2.160	Capaian Per Indikator TPB Penanganan Perubahan Iklim Tahun 2023	II - 333
Tabel 2.161	Capaian TPB Per Indikator Penanganan Perubahan Iklim Tahun 2023	II - 334
Tabel 2.162	Capaian Per Indikator TPB Ekosistem Lautan Tahun 2022	II - 334
Tabel 2.163	Capaian TPB Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan Tahun 2022	II - 336
Tabel 2.164	Capaian Per Indikator TPB Ekosistem Daratan Tahun 2022	II - 337
Tabel 2.165	Capaian TPB Ekosistem Daratan Tahun 2022	II - 340
Tabel 2.166	Capaian Per Indikator TPB Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Tahun 2022	II - 340
Tabel 2.167	Capaian TPB Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Tahun 2022	II - 343
Tabel 2.168	Capaian Per Indikator TPB Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Tahun 2022	II - 344
Tabel 2.169	Capaian TPB Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Tahun 2022	II - 345
Tabel 2.170	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2024	II - 367
Tabel 3.1	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026	III - 12
Tabel 3.2	Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2024.....	III - 15
Tabel 3.3	Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut lapangan usaha, 2018 - 2024	III - 16
Tabel 3.4	PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024 (Milyar Rupiah) (ADHB)...	III - 17
Tabel 3.5	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2018-2024 (Miliar Rupiah).....	III - 18

Tabel 3.6	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran, 2018-2024 (Miliar Rupiah)	III - 19
Tabel 3.7	Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan Desember 2024 ...	III - 20
Tabel 3.8	Nilai Ekspor Sepuluh Golongan Barang Utama Nonmigas Sumatera Selatan, Desember 2024	III - 21
Tabel 3.9	Nilai Ekspor Sumatera Selatan Menurut Sektor, 2024	III - 22
Tabel 3.10	Nilai Impor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan Januari-Desember 2023	III - 23
Tabel 3.11	Nilai Impor Sepuluh Golongan Barang Nonmigas Sumatera Selatan	III - 24
Tabel 3.12	Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan menurut Tempat Tinggal Tahun 2020-2024	III - 32
Tabel 3.13	Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024	III - 33
Tabel 3.14	Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Per Provinsi Tahun 2023 – 2024	III - 39
Tabel 3.15	Kerangka Ekonomi Makro Sumatera Selatan.....	III - 61
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 – 2026.....	III - 77
Tabel 3.17	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 – 2026.....	III - 84
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2026.....	III - 85
Tabel 3.22	Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2023.....	III - 86
Tabel 3.23	APBD 17 Kabupaten/Kota Tahun 2024-2025 di Provinsi Sumatera Selatan.....	III - 87
Tabel 3.24	Rincian Kegiatan Infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026	III - 88
Tabel 3.25	Rekapitulasi Pendanaan KPBU di Provinsi Sumatera Selatan.....	III - 89
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026	IV - 3
Tabel 4.2	Isu Strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.....	IV - 8
Tabel 4.3	Keterkaitan Misi dan Program Strategis HDCU RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	IV - 12
Tabel 4.4	Sinkronisasi Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2026 dan Tema serta Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2026	IV - 15
Tabel 4.5	Sasaran Pembangunan RKP dan RKPD Tahun 2026.....	IV - 18
Tabel 4.6	Keterkaitan Prioritas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2026.....	IV - 19
Tabel 4.7	Sandingan Indikator Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional RKP Tahun 2026 dengan Indikator Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.....	IV - 21
Tabel 4.8	Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional RKP 2026.....	IV - 27
Tabel 4.9	Isu Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan	IV - 52
Tabel 4.10	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2026 dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026	IV - 64

Tabel 4.11	Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2026 dengan Isu Strategis Tahun 2026	IV - 67
Tabel 5.1	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029	V - 4
Tabel 5.2	Progres Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan	V - 6
Tabel 5.3	Capaian dan Target Indikator Makro dan Kota Palembang	V - 26
Tabel 5.4	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Banyuasin	V - 31
Tabel 5.5	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Ilir	V - 39
Tabel 5.6	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	V - 44
Tabel 5.7	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Banyuasin.....	V - 50
Tabel 5.8	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Lubuk Linggau	V - 56
Tabel 5.9	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas	V - 60
Tabel 5.10	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Utara.....	V - 65
Tabel 5.11	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Kota Pagar Alam	V - 70
Tabel 5.12	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Lahat.....	V - 75
Tabel 5.13	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Empat Lawang.....	V - 80
Tabel 5.14	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Muara Enim	V - 85
Tabel 5.15	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Prabumulih	V - 92
Tabel 5.16	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	V - 96
Tabel 5.17	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	V - 101
Tabel 5.18	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu....	V - 106
Tabel 5.19	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten OKU Selatan	V - 112
Tabel 6.1	Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026	VI - 2
Tabel 6.2	Pagu Anggaran per Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026	VI - 3
Tabel 7.1	Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026	VII - 1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2026	VII - 2
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Daerah RKPD Tahun 2026	VII - 3

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Inovasi Siklus Penyusunan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2026	I - 12
Gambar 2.1 Peta Provinsi Sumatera Selatan.....	II - 1
Gambar 2.2 Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas Provinsi Sumatera Selatan	II - 6
Gambar 2.3 Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Tetap Provinsi Sumatera Selatan	II - 8
Gambar 2.4 Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Konversi Provinsi Sumatera Selatan	II - 10
Gambar 2.5 Peta Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	II - 13
Gambar 2.6 Peta Kawasan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.....	II - 15
Gambar 2.7 Peta Kawasan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	II - 17
Gambar 2.8 Peta Kawasan Peruntukan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.....	II - 19
Gambar 2.9 Peta Kawasan Peruntukan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	II - 21
Gambar 2.10 Peta Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Sumatera Selatan	II - 23
Gambar 2.11 Peta Kawasan Peruntukan Lainnya Provinsi Sumatera Selatan	II - 25
Gambar 2.12 Sebaran Kejadian Bencana di Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	II - 27
Gambar 2.13 Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Sumsel, 2022	II - 31
Gambar 2.14 Peta Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.....	II - 37
Gambar 2.15 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2023	II - 41
Gambar 2.16 Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2012-2023	II - 49
Gambar 2.17 Gini Ratio Sumatera Selatan Tahun 2018-2023	II - 49
Gambar 2.18 Perkembangan Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2020-2024....	II - 50
Gambar 2.19 Perkembangan Tingkat Kemiskinan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	II - 51
Gambar 2.20 Tren Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	II - 54
Gambar 2.21 Tren Perkembangan Indeks Keparahan (P2) Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	II - 55
Gambar 2.22 Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	II - 56
Gambar 2.23 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem per Provinsi di Indonesia Tahun 2024.....	II - 57
Gambar 2.24 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem per Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2024	II - 59
Gambar 2.25 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024.....	II - 60
Gambar 2.26 Batu Megalitik di situs Tinggi Hari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan	II - 63
Gambar 2.27 Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya	II - 64
Gambar 2.28 Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD/MI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 82
Gambar 2.29 Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SLTP/MTs/Paket B Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 83

Gambar 2.30	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 83
Gambar 2.31	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD Kab/Kota Tahun 2022-2023.....	II - 84
Gambar 2.32	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMP Kab/Kota Tahun 2022-2023.....	II - 85
Gambar 2.33	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMA Kab/Kota Tahun 2022-2023.....	II - 85
Gambar 2.34	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi Tahun 2018-2024	II - 86
Gambar 2.35	Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SD/Sederajat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 88
Gambar 2.36	Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMP/Sederajat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 88
Gambar 2.37	Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMA/Sederajat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024.....	II - 89
Gambar 2.38	Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	II - 89
Gambar 2.39	Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat Menurut Kab/Kota Tahun 2023	II - 90
Gambar 2.40	Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMA/Sederajat Kabupaten/Kota Tahun 2023	II - 91
Gambar 2.41	Angka Harapan Hidup (LF SP2020) Sumsel dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II - 100
Gambar 2.42	Jumlah Kematian Ibu Tahun 2019-2024 di Provinsi Sumatera Selatan	II - 101
Gambar 2.43	Jumlah Kematian bayi Tahun 2019-2024 di Provinsi Sumatera Selatan	II - 102
Gambar 2.44	Tren prevalensi balita stunting Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023	II - 103
Gambar 2.45	Tren Prevalensi Balita Stunting per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 103
Gambar 2.46	Persentase Gizi Buruk pada Balita di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024.....	II - 104
Gambar 2.47	Cakupan ASI Eksklusif di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 104
Gambar 2.48	Persentase Desa Yang Melaksanakn STBM di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 105
Gambar 2.49	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 105
Gambar 2.50	Annual Parasit Incidence (API) Malaria Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2024.....	II - 106
Gambar 2.51	Cakupan Pengobatan HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) Tahun 2019-2024	II - 107
Gambar 2.52	Jumlah Kasus DBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 108
Gambar 2.53	Persentase Puskesmas yang Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar 9 Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024.....	II - 109

Gambar 2.54	Pesentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Kebutuhan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024	II - 110
Gambar 2.55	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024	II - 111
Gambar 2.56	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024	II - 112
Gambar 2.57	Peta Rencana Struktur Ruang di Provinsi Sumatera Selatan	II - 134
Gambar 2.58	Peta Rencana Pola Ruang di Provinsi Sumatera Selatan	II - 136
Gambar 2.59	Tampilan Portal Kebijakan Satu Peta (KSP)	II - 138
Gambar 2.60	Portal Tanah Air Indonesia	II - 142
Gambar 2.61	Persentase Akses Sanitasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023	II - 143
Gambar 2.62	Peta Sebaran Capaian RT Akses Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 144
Gambar 2.63	Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2023	II - 145
Gambar 2.64	Sebaran Capaian RT Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Sumatera Selatan, 2023	II - 146
Gambar 2.65	Jumlah Kepala Keluarga MBR yang tidak memiliki Rumah di Provinsi Sumatera Selatan, 2023	II - 149
Gambar 2.66	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2023	II - 156
Gambar 2.67	Perkembangan Nilai Pilar Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2023	II - 156
Gambar 2.68	Penghargaan Pembinaan Terbaik dalam Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Tahun 2022	II - 157
Gambar 2.69	Penghargaan Pembinaan Terbaik dalam Tata Operasional Sarana dan Prasarana POL PP Tahun 2022	II - 158
Gambar 2.70	Penghargaan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satpol PP Tahun 2022	II - 158
Gambar 2.71	Piagam BNPB Tahun 2017-2018	II - 159
Gambar 2.72	Penyerahan Piagam BNPB	II - 160
Gambar 2.73	Tren Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023	II - 164
Gambar 2.74	Tren Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II - 165
Gambar 2.75	Persentase PSKS perorangan yang Berperan Aktif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023	II - 167
Gambar 2.76	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Selatan Tahun 2010-2024	II - 169
Gambar 2.77	Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan	II - 171
Gambar 2.78	Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Formal dan Informal Provinsi Sumatera Selatan	II - 172
Gambar 2.79	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	II - 174
Gambar 2.80	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2023	II - 175

Gambar 2.81	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2023	II - 176
Gambar 2.82	Indeks Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023	II - 176
Gambar 2.83	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.....	II - 180
Gambar 2.84	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2023.....	II - 192
Gambar 2.85	Perkembangan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2019- 2024 di Provinsi Sumsel.....	II - 197
Gambar 2.86	Persentase Pemakaian Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) .	II - 202
Gambar 2.87	Total Fertility Rate (TFR)	II - 203
Gambar 2.88	Angkutan Sungai di Sungai Musi	II - 209
Gambar 2.89	Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Api-api	II - 216
Gambar 2.80	Penghargaan Smart Society Smart Province	II - 218
Gambar 2.81	Penghargaan tingkat Nasional Top Digital Award dan kategori Top Digital Implementation 2022 on Province Government Tahun 2022	II - 219
Gambar 2.82	Nilai Indeks SPBE Sumatera Selatan	II - 220
Gambar 2.83	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	II - 220
Gambar 2.84	Jumlah Perolehan Medali Sumsel pada PON	II - 230
Gambar 2.85	Launching Computer Security Insident Responses Team (CSIRT) 11 Kabupaten/Kota se-Sumsel dan 7 Pergurua Tinggi di Palembang dan Lampung	II - 234
Gambar 2.86	Penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara	II - 235
Gambar 2.87	Jumlah Sanggar Seni yang Berkembang	II - 236
Gambar 2.88	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2024	II - 237
Gambar 2.89	Foto Ikan Patin, salah satu Komoditas Unggulan Sumatera Selatan ...	II - 247
Gambar 2.90	Peta Promosi Wisata Religi di Sumatera Selatan	II - 249
Gambar 2.91	Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin	II - 250
Gambar 2.92	Pulau Kemaro	II - 251
Gambar 2.93	Museum Al Quran Raksasa	II - 252
Gambar 2.94	Rumah di Kampung Arab Al-Munawar	II - 253
Gambar 2.95	Enam Rumah Ibadah Terpadu di Jakabaring	II - 254
Gambar 2.96	Data Tenaga Kerja Usaha Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 256
Gambar 2.97	Politeknik Pariwisata Palembang	II - 257
Gambar 2.98	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara di Sumsel Tahun 2016-2023	II - 258
Gambar 2.99	Target dan Realisasi Produksi Padi Tahun 2020-2024 (Ton)	II - 259
Gambar 2.100	Target dan Realisasi Produksi Jagung Tahun 2020-2024 (Ton)	II - 260
Gambar 2.101	Target dan Realisasi Produksi Kedelai Tahun 2020-2024 (Ton)	II - 261
Gambar 2.102	Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 (US\$)	II - 270
Gambar 2.103	Sertifikat ISO yang diterima Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	II - 280
Gambar 2.104	Kebun Raya Sriwijaya	II - 288
Gambar 2.105	Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2024	II - 293

Gambar 2.106	Persentase Akses Sanitasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2023	II - 297
Gambar 2.107	Peta Sebaran Capaian RT Akses Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	II - 298
Gambar 2.108	Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2023	II - 299
Gambar 2.109	Sebaran Capaian RT Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Sumatera Selatan, 2023	II - 300
Gambar 2.110	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs)	II - 303
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, 2018 – 2023	III - 14
Gambar 3.2	Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan, Desember 2024	III - 20
Gambar 3.3	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan	III - 23
Gambar 3.4	Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2014-2024.....	III - 28
Gambar 3.5	Gini Ratio Sumatera Selatan Tahun 2019-2024.....	III - 29
Gambar 3.6	Perkembangan Kemiskinan di Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	III - 30
Gambar 3.7	Perkembangan Tingkat Kemiskinan per- Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2024	III - 31
Gambar 3.8	Tren Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	III - 34
Gambar 3.9	Tren Perkembangan Indeks Keparahan (P2) Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	III - 35
Gambar 3.10	Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	III - 37
Gambar 3.11	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Per Provinsi di Indonesia Tahun 2024.....	III - 38
Gambar 3.12	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	III - 40
Gambar 3.13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2024	III - 41
Gambar 3.14	Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan	III - 42
Gambar 3.15	Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Formal dan Informal Provinsi Sumatera Selatan	III - 43
Gambar 3.16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	III - 45
Gambar 4.1	Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026.....	IV - 7
Gambar 4.2	Rangkaian Kegiatan Penyusunan RKPD Tahun 2026	IV - 7
Gambar 4.3	Prioritas Nasional RKP Tahun 2026.....	IV - 19
Gambar 4.4	KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya	IV - 42
Gambar 4.5	KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya.....	IV - 43
Gambar 4.6	KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya	IV - 45
Gambar 4.7	KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya.....	IV - 47
Gambar 4.8	KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya	IV - 47

Gambar 4.9	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Develpoment Goals</i> (TPB/SDGs)	IV – 51
Gambar 4.10	Pemetaan Goals, Target dan Indikator TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan	IV - 52
Gambar 5.1	Peta Kawasan di Provinsi Sumatera Selatan	V - 2
Gambar 5.2	Peta Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Selatan	V - 6
Gambar 5.3	Lingkup Wilayah Patungraya Agung	V - 14
Gambar 5.4	Peta Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan	V - 15
Gambar 5.5	KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya	V - 16
Gambar 5.6	KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya.....	V - 18
Gambar 5.7	KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya	V - 19
Gambar 5.8	KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya.....	V - 21
Gambar 5.9	KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya	V - 23
Gambar 5.10	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kota Palembang	V - 27
Gambar 5.11	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Banyuasin	V - 32
Gambar 5.12	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Ilir	V - 40
Gambar 5.13	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir...	V - 45
Gambar 5.14	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	V - 51
Gambar 5.15	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kota Lubuk Linggau	V - 57
Gambar 5.16	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas	V - 61
Gambar 5.17	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara ...	V - 66
Gambar 5.18	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kota Pagar Alam.....	V - 71
Gambar 5.19	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Lahat.....	V - 76
Gambar 5.20	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Empat Lawang.....	V - 81
Gambar 5.21	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Muara Enim	V - 86
Gambar 5.22	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kota Prabumulih	V - 93
Gambar 5.23	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir	V - 97
Gambar 5.24	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulur Timur	V - 102
Gambar 5.25	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu .	V - 107
Gambar 5.26	Peta Arahana Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	V - 113

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah untuk jangka waktu satu tahun. RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. RKPD disusun dengan berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sesuai dengan kewenangannya maka, pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan prinsip yang meliputi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peranan dan kewenangan masing-masing, terintegrasi dengan rencana tata ruang dan laksanakan sesuai dengan kondisi daerah serta dinamika daerah dan nasional.

Dalam prosesnya perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas bawah dan bawah atas. Selain itu terkait dengan substansi maka perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial, yang lebih dikenal dengan istilah THIS.

Penyusunan rencana pembangunan daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan. RKPD yang sudah ditetapkan menjadi acuan dalam penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah dan

sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Seluruh tahapan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 diinput secara sistematis melalui aplikasi SIPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
 33. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
 34. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang RPIP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 18);

- 35. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
- 36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06);
- 37. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07);

1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026, penyusunan RKPD ini mempedomani RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, RPJMD Teknokratik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 dan kebijakan dan isu strategis RPJPN Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2026. Secara detail keterkaitan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 ini, dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1. RKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 mengacu pada dokumen RKP 2026 terutama menyangkut prioritas, sasaran dan arah kebijakan. Keterkaitan RKPD Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kebijakan Pemerintah Pusat seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Keterkaitan Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 dengan
Prioritas Daerah Tahun 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL 2025-2029	PRIORITAS DAERAH SUMATERA SELATAN 2025-2029
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	6. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal,

PRIORITAS NASIONAL 2025-2029	PRIORITAS DAERAH SUMATERA SELATAN 2025-2029
	transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	2 Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
	3 Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2 Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
	4 Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1 Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2 Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
	5 Kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4 Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	6 Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	7 Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, berorientasi pada kearifan lokal

Prioritas Daerah Tahun 2025-2029 tersebut disusun berdasarkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, hasil evaluasi kinerja RKPD

Tahun 2024, target RKP Tahun 2026 serta mempertimbangkan situasi terkini sehingga didapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu:

1. Perlindungan sosial dan pemberdayaan peningkatan pendapatan masyarakat belum optimal
2. Hilirisasi sektor unggulan daerah belum optimal
3. SDM berbasis kompetensi belum optimal
4. Kinerja pelayanan publik berbasis digital belum optimal
5. Akses, Kualitas, dan Kuantitas Infrastruktur Layanan Pendidikan dan Kesehatan belum optimal
6. Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Dasar belum optimal
7. Pengelolaan SDA dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung.

Tabel 1.2
Keterkaitan Target Indikator Makro Provinsi dengan Nasional

INDIKATOR MAKRO	NASIONAL	PROVINSI
% Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,0 – 6,4	5,8 – 6,3
PDRB per Kapita (ADHB)	n/a	94,00
Kontribusi PDRB Provinsi	n/a	3,09
Tingkat Kemiskinan	9,07-10,07*	9,07-10,07*
Rasio Gini	0,304-0,307	0,312 - 0,316*
Indeks Modal Manusia	n/a	0,5475
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	68,68*	65,48-68,68
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	n/a	68,44
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,29-3,83	3,75 – 3,90

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2026

Keterangan: ^{a)} Kesepakatan pada Pembahasan Rakortekrenbangnas Penyusunan RKP Tahun 2026

Tabel diatas menunjukkan target indikator makro Provinsi yang harus dicapai di tahun 2026 untuk mendukung capaian nasional.

1.3.2. RKPD dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2025-2029. Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, isu strategis daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan Stunting yang Masih Tinggi
2. Produktivitas Pertanian dan Hilirasi Komoditi Unggulan Belum Optimal
3. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal
4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal
5. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal
6. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal
7. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah

8. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan
9. Reformasi Birokrasi

1.3.3. RKPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Wilayah Sumatera dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Adapun kebijakan pengembangan struktur ruang yaitu:

1. Menciptakan keterpaduan sistem perkotaan,
2. Pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan,
3. Pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah,
4. Mendorong terlaksananya peran Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.

Sementara itu kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi Kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi:

1. Memantapkan fungsi kawasan lindung pada kawasan yang memenuhi kriteria kawasan lindung,
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung.

Sementara itu Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:

1. Meningkatkan produktivitas lahan tidur atau lahan non produktif serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan dan menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional,
2. Mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan,
3. Meningkatkan fungsi kawasan budidaya untuk pertahanan dan keamanan.

Sinkronisasi dan sinergi RKPD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan dapat lebih terarah serta mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah. Selain itu, sinkronisasi dan sinergi RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan juga diarahkan:

- (1) Mewujudkan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat;
- (2) Memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- (3) Meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- (4) Meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang kabupaten/kota dengan wilayah nasional dan provinsi;
- (5) Mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- (6) Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta
- (7) Menjaga keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian kegiatan antar sektor dan antar Perangkat Daerah.

Dalam menyusun RKPD, selain berpedoman pada RTRWP, juga perlu memperhatikan RTRW Nasional. Hal ini untuk melihat posisi Provinsi Sumatera Selatan dalam tataran perencanaan ruang di tingkat nasional. Beberapa wilayah Sumatera Selatan dalam konstelasi tata ruang nasional masuk ke dalam Pusat Kawasan Nasional, Pusat Kawasan Wilayah dan Kawasan Andalan.

Selain itu RKPD Sumatera Selatan mencoba melihat arahan RTRW daerah/provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini adalah Provinsi: Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Telaah terhadap RTRW provinsi yang berbatasan tersebut diarahkan untuk: (1) tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi; (2) keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota; (3) dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.4. RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota

Capaian pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya adalah akumulasi dari capaian pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota. Oleh karena itu sinergitas perencanaan pembangunan

yang disusun di tiap tingkatan menjadi sangat penting untuk mencapai target-target pembangunan. Secara detail dijelaskan pada Bab V.

1.3.5. RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

RKPD tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berwawasan tahunan. Renja PD merupakan penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. Untuk detail Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dijelaskan lebih lanjut di Bab VI.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi para pihak dalam rangka terjaganya konsistensi perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan, sebagaimana diamanatkan baik dalam dokumen perencanaan tingkat nasional, regional maupun provinsi.

1.4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- (1) Mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dalam menjembantani pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada masa jabatan kepala daerah pada tahun 2026, dengan fokus tahun 2026 pada Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan untuk menyempurnakan dan memaksimalkan capaian-capaian yang sudah diraih untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah bagi masyarakat. Pembangunan akan dilaksanakan dengan menitikberatkan pembangunan yang merata diseluruh bidang.
- (2) Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh pihak yang akan memerlukan panduan dalam rangka keselerasan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan;
- (3) Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu pembangunan serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat

berorientasi pada pencapaian kinerja yang didasari oleh analisis data yang terkini dan akurat;

- (4) Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan potensi daerah secara optimal.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

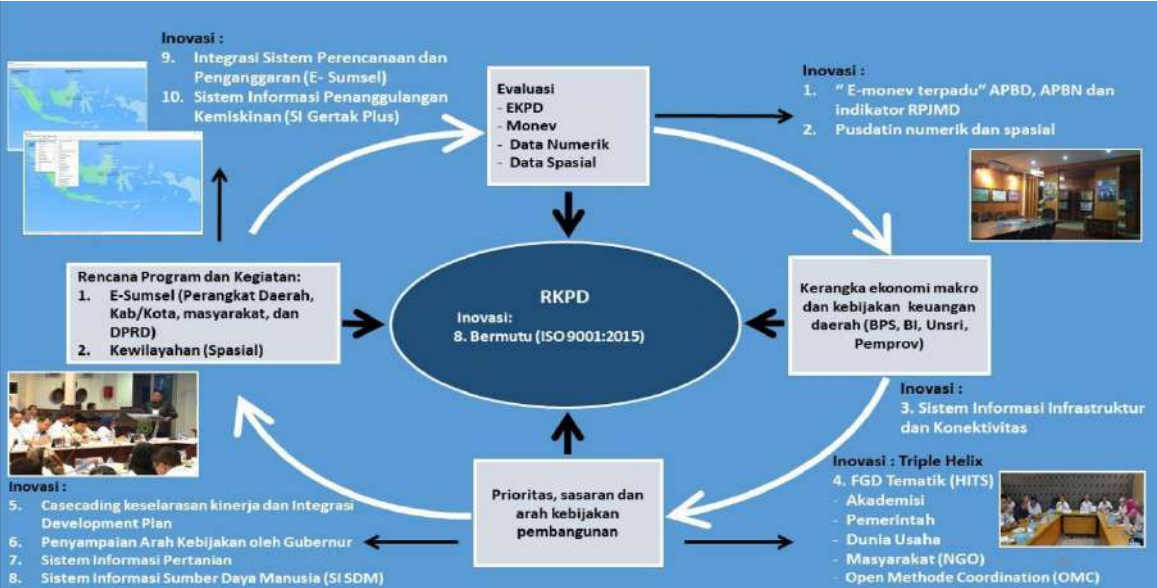
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII PENUTUP

1.6. Pendekatan Baru

Penyusunan RKPD 2026 dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan baru serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program dan program follows result* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat untuk mencapai target kinerja yang akan dialokasikan anggarannya dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Inovasi Siklus Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Inovasi Siklus Penyusunan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2026



Pendekatan Substansi yang digunakan adalah:

1. Tematik : Merupakan pendekatan perencanaan dimana difokuskan sampai dengan program prioritas daerah.
2. Holistik : Untuk mencapai sasaran prioritas daerah dilaksanakan mulai dari hulu ke hilir misalnya dalam penanggulangan kemiskinan, program yang dilaksanakan tidak hanya memberikan bantuan langsung tetapi juga dengan memberikan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan kepemilikan asset, sehingga penduduk miskin dapat lepas dari jerat kemiskinan
3. Integratif : Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi, harus jelas siapa melakukan apa serta integrasi anggaran. Sebagai contoh, dalam hal pencapaian Pembangunan Pertanian Dinas Pertanian dan Hortikultura melakukan program kegiatan peningkatan produktivitas lahan, Dinas Pengelolaan Sumber Air melakukan perbaikan atau pembangunan saluran irigasi, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan melakukan upaya penghentian konversi lahan produktif dan reforma agrarian yang merupakan kombinasi berbagai program/kegiatan.
4. Spasial : Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus

menunjukkan lokasi secara jelas dan spesifik. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokasi harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan.

1.7. Pendekatan Proses

1). Pendekatan SIPD

Dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan telah dilakukan melalui SIPD yang diatur melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 274, 391 sampai 395. Kemudian turunan berupa Permendagri Nomor 70 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 178, dimana seluruh usulan Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, Kabupaten/Kota dan Pokok-pokok pikiran DPRD/hasil penjangkaran aspirasi masyarakat bersumber dari APBD dan seluruh pembuatan dokumen perencanaan daerah (dokrenda) termasuk RKPD tahun 2026 dilakukan melalui aplikasi SIPD.

Guna memenuhi amanat peraturan-peraturan diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan aplikasi SIPD untuk perencanaan tahun 2026. Di dalam aplikasi SIPD terdapat 3 informasi pemerintah daerah yaitu :

1. Informasi Pembangunan Daerah
Kaitan dengan data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Informasi Keuangan Daerah
Terdiri dari Informasi Perencanaan Anggaran Daerah, informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, informasi barang milik daerah, dan informasi keuangan daerah lainnya.
3. Informasi Pemerintah Daerah lainnya
Terdiri dari informasi LPPD, EPPD, Perda, dan Binwas/Audit, dst.

Proses verifikasi pokok pikiran anggota dewan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. *Inputting* usulan pikir melalui akun anggota dewan
2. Validasi oleh Sekretariat DPRD
3. Validasi oleh Mitra Bappeda
4. Validasi oleh OPD Tujuan
5. Validasi TAPD

2). Pendekatan Partisipatif

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk membahas permasalahan yang ada serta menyepakati solusi yang akan dilaksanakan bersama-sama dan menciptakan rasa memiliki, melalui beberapa kegiatan yaitu:

1. Forum Konsultasi Publik,
2. Rapat Stakeholder Provinsi, dan
3. Musrenbang.

3). Pendekatan Teknokratik

Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam setiap tahapan proses penyusunan, yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pertemuan tematik yang dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dengan mengikut sertakan unsur akademisi, praktisi, ahli, dan tenaga fungsional perencana yang telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

4). Pendekatan *Bottom Up* dan *Top Down*

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Sejalan dengan semangat untuk memperbaiki kualitas dokumen RKPD tahun 2026 dan proses perencanaan Provinsi Sumatera Selatan maka Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat/Umum, dan Perangkat Daerah telah dapat menyampaikan usulan kegiatan tahun 2026 melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Secara detil dapat dijelaskan sebagai berikut : Musrenbang Sektorial (Ratek Trilateral Meeting) yang dihadiri oleh *stakeholder* untuk memfokuskan dan mempermudah memfollow-up usulan dari Kabupaten/Kota yang akan diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Usulan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk RKPD Tahun 2026 yang diinput oleh Kabupaten/Kota melalui SIPD. Selanjutnya usulan kegiatan ini dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dan sinkron dengan target RPD Provinsi Sumatera Selatan dan skala prioritas arah kebijakan RKPD Tahun 2026 dapat diakomodir menjadi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026.

a. Usulan Masyarakat

Ada beberapa inovasi yang dilaksanakan pada pendekatan ini yaitu:

1. Sosialisasi untuk mekanisme pengusulan kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial (facebook, instagram, twitter), dan secara langsung melalui penyebaran brosur/flyer di mall, sekolah, perguruan tinggi.
2. Masyarakat dapat menyampaikan usulan pembangunan melalui datang langsung (tatap muka), usulan/proposal, melalui website www.bappeda.sumselprov.go.id dan melalui SIPD.
3. Penjaringan aspirasi masyarakat secara interaktif melalui radio.
4. Usulan dapat dilakukan juga dengan Proposal dan melalui reses DPRD yang nantinya diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Usulan didistribusikan ke Perangkat Daerah oleh Bappeda untuk selanjutnya diverifikasikan oleh Perangkat Daerah.

5). Pendekatan Politik

Rekomendasi kebijakan dari DPRD yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD diarahkan untuk sejalan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran provinsi yang ditempatkan pada pos belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.

1.8. Rujukan Kebijakan

Arah kebijakan pada RKPD 2026 merujuk kepada beberapa hal yaitu:

1. Kemajuan yang telah dicapai pada periode 2014-2023;
2. Analisis Masalah dan Isu Strategis Tahun 2025;
3. RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
4. Evaluasi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
5. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
6. Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025;
7. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's); dan
8. Draft Revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai posisi geografis terletak antara 1^o 25' 13" sampai 4^o 55' 17" Lintang Selatan dan antara 102^o 3' 52" dan 106^o 19' 45" Bujur Timur, yang berbatasan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung dan di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Peta Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1
Peta Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : geoportal.sumseprov.go.id, 2017

Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 86.771,68 Km² dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Ogan Komering Ulu	3.774,50	13	157	101,63
2	Ogan Komering Ilir	17.071,33	18	327	45,68
3	Muara Enim	6.763,91	22	255	94,65
4	Lahat	4.333,07	24	378	102,00
5	Musi Rawas	6.122,59	14	199	68,85
6	Musi Banyuasin	14.550,79	15	242	48,61
7	Banyuasin	12.262,76	21	313	69,32
8	OKU Selatan	3.412,72	19	312	200,59
9	OKU Timur	4.369,25	20	259	96,36
10	Ogan Ilir	2.302,86	16	241	190,84
11	Empat Lawang	2.234,10	10	156	150,71
12	PALI	1.842,56	5	71	113,85
13	Musi Rawas Utara	5.937,80	7	89	33,63
14	Palembang	352,51	18	107	5.028,26
15	Prabumulih	625,91	6	35	241,06
16	Pagar Alam	367,73	5	72	657,81
17	Lubuk Linggau	447,31	8	45	467,17
Sumatera Selatan		91.592,43	86.771,68	241	3.258

Sumber : Hasil Konsolidasi dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Jika dilihat dari kepadatan penduduk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan maka Kota Palembang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 5.028,26 jiwa per Km2. Sedangkan Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 33,63 jiwa per Km2. Secara rinci dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.1 di atas.

Total jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 sebanyak 8.889.913 jiwa yang tersebar di 17 (tujuhbelas) kabupaten/kota. Jumlah penduduk terbesar pada tahun 2023 berada di Kota Palembang sebanyak 1.772.492 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di Kota Pagar Alam sebanyak 150.881 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 2
Jumlah dan Distribusi Penduduk
Provinsi Sumatera Selatan 2019-2024

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ogan Komering Ulu	366.889	369.567	372.272	376.977	379.130	383.039
Ogan Komering Ilir	730.399	734.354	740.346	767.821	797.429	807.085
Muara Enim	580.608	593.769	615.720	630.809	633.779	640.962
Lahat	434.904	435.375	435.419	436.489	444.949	450.281
Musi Rawas	403.993	406.196	410.210	414.009	407.694	411.787
Musi Banyuasin	588.782	620.229	651.861	688.969	644.386	651.950
Banyuasin	814.492	818.766	824.551	837.062	874.210	885.902
OKU Timur	643.603	647.225	655.703	673.966	668.035	429.535
OKU Selatan	415.971	417.201	417.424	418.040	424.190	674.184
Ogan Ilir	414.036	420.783	428.108	431.558	431.043	436.141
Empat Lawang	333.857	334.809	335.024	335.506	342.178	345.641
Pali	182.402	195.729	200.855	204.473	202.681	205.384
Musi Rawas Utara	193.630	194.507	194.799	195.475	195.962	198.413
Palembang	1.619.533	1.668.164	1.704.538	1.754.437	1.706.371	1.718.440
Pagar Alam	196.460	146.889	147.640	148.264	147.836	203.312
Lubuk Linggau	227.330	229.063	232.739	237.576	242.976	149.199
Prabumulih	146.128	197.641	198.605	203.643	200.673	246.046
Sumatera Selatan	8.293.017	8.430.267	8.565.814	8.755.074	8.743.522	8.837.301

Sumber: Data Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan, 2022 & BPS, 2024

Kondisi Geologi

Sumatera Selatan menempati cekungan belakang busur Paleogen yang dikenal sebagai Cekungan Sumatera Selatan di bagian timur, dan mendala busur vulkanik yang membentang secara regional di sepanjang Bukit Barisan bagian barat. Batuan yang mendasari Cekungan Sumatera Selatan merupakan kompleks batuan berumur pra-tersier, yang terdiri dari batu gamping, andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit. Jenis batuan yang terdapat di Sumatera Selatan adalah (1) formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara; (2) formasi Talang Akar terdiri dari batu pasir berukuran butir kasar-sangat kasar, serpih, batu lanau dan batubara; (3) formasi Baturaja terdiri dari batu gamping terumbu, serpih gampingan dan napal atau batu lempung gampingan; (4) formasi Baturaja terdiri dari serpih gampingan dan serpih lempungan; (5) formasi Air Benakat dengan penyusun utama batu pasir; (6) formasi Muara Enim terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu lempung dan batubara; dan (7) formasi Kasai terdiri dari batu pasir tufaan dan tufa.

Kondisi Hidrologi

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumberdaya air dengan sumber air utama dari Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang. Persediaan air di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sangat tergantung dari sungai- sungai utama, yakni Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Keberadaan air permukaan di wilayah WS Musi juga dipengaruhi keberadaan lebak, embung dan rawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial sehingga ketinggian tanahnya relatif seragam. Kondisi yang datar demikian menyebabkan pengaturan air kurang lancar sehingga timbul daerah genangan pada wilayah yang ketinggiannya hampir sejajar sungai. Lebak yang berada di wilayah ini fluktuasi luasannya sangat tinggi bila dibandingkan antara musim penghujan dan musim kemarau.

Kondisi Klimatologi

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan per hari 61,0/17- 634,4/22 mm sepanjang tahun. Setiap bulan hujan cenderung turun dan bulan November merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak. Provinsi Sumatera Selatan memiliki suhu yang cenderung panas berkisar antara 26,4°C hingga 27,8°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 26,8°C. Suhu terendah/minimum terjadi pada bulan Agustus, sedangkan suhu tertinggi/maksimum terjadi pada bulan Juni, dimana merupakan salah satu pemicu timbulnya hotspot (titik api) yang menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan. Sedangkan kelembapannya bervariasi antara 81 sampai dengan 88 persen.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Jika dilihat dari deskripsi karakteristik wilayah Provinsi Sumatera Selatan maka dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung (konservasi). Hingga tahun 2015, luas kawasan budidaya sebesar 7.779.146,89 Ha atau 84,93% sedangkan luas kawasan lindung sebesar 1.380.096,11 Ha atau 15,06%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036, kawasan budidaya di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

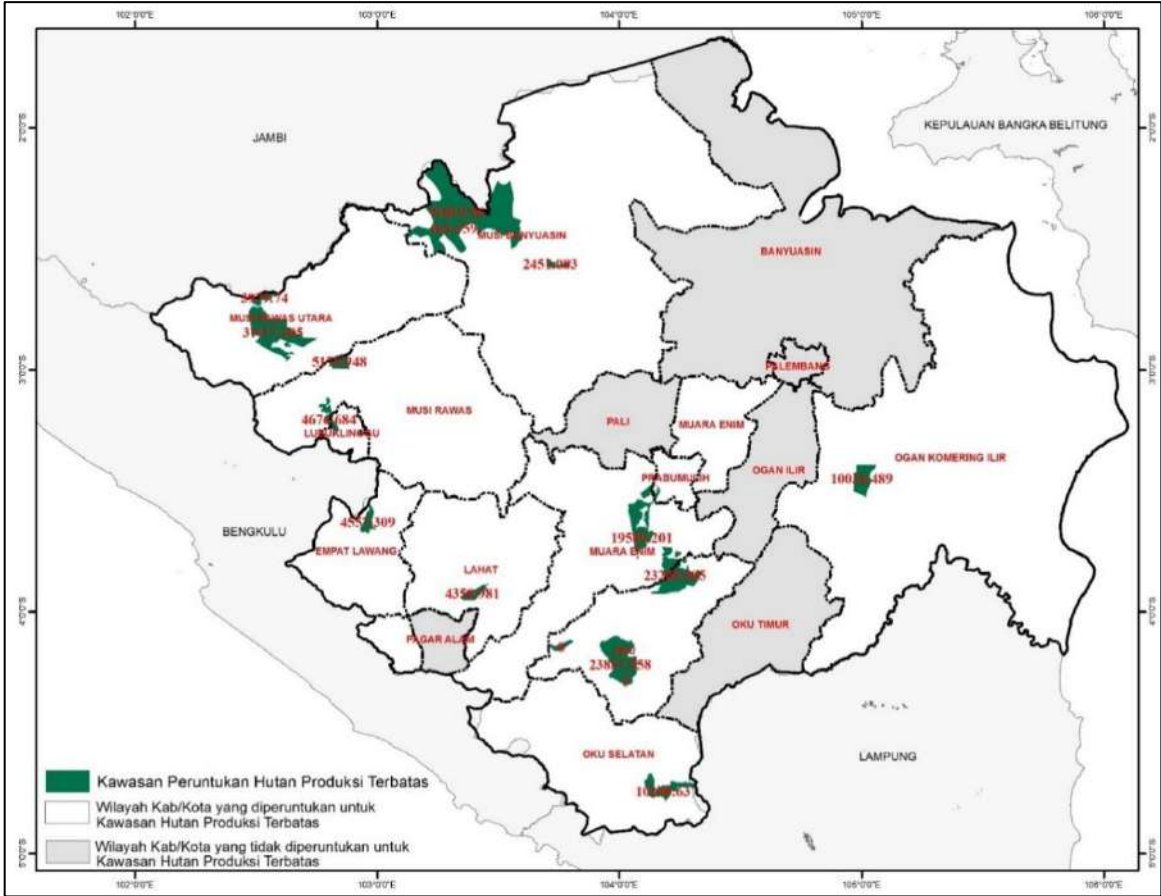
Pengembangan Kawasan Hutan Produksi ditujukan untuk menciptakan pemanfaatan hasil hutan yang optimal, terkendali, serta tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rencana kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:

a. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 213.688,39 Ha, meliputi:

- 1) Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 94.301,17 Ha;
- 2) Kabupaten Musi Rawas Utara dengan luas 36.511,59 Ha;
- 3) Kabupaten Muara Enim dengan luas 25.498,07 Ha;
- 4) Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan luas 18.646,99 Ha;
- 5) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan luas 10.238,82 Ha; dan
- 6) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 10.034,54 Ha;
- 7) Kabupaten Musi Rawas dengan luas 7.385,84 Ha;
- 8) Kabupaten Empat Lawang dengan luas 4.555,02 Ha;
- 9) Kabupaten Lahat dengan luas 4.350,98 Ha;
- 10) Kota Lubuk Linggau dengan luas 1.096,22 Ha;
- 11) Kota Prabumulih dengan luas 1.069,14 Ha.

Peta mengenai peruntukan kawasan hutan produksi terbatas diatas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 2
Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas Provinsi Sumatera Selatan



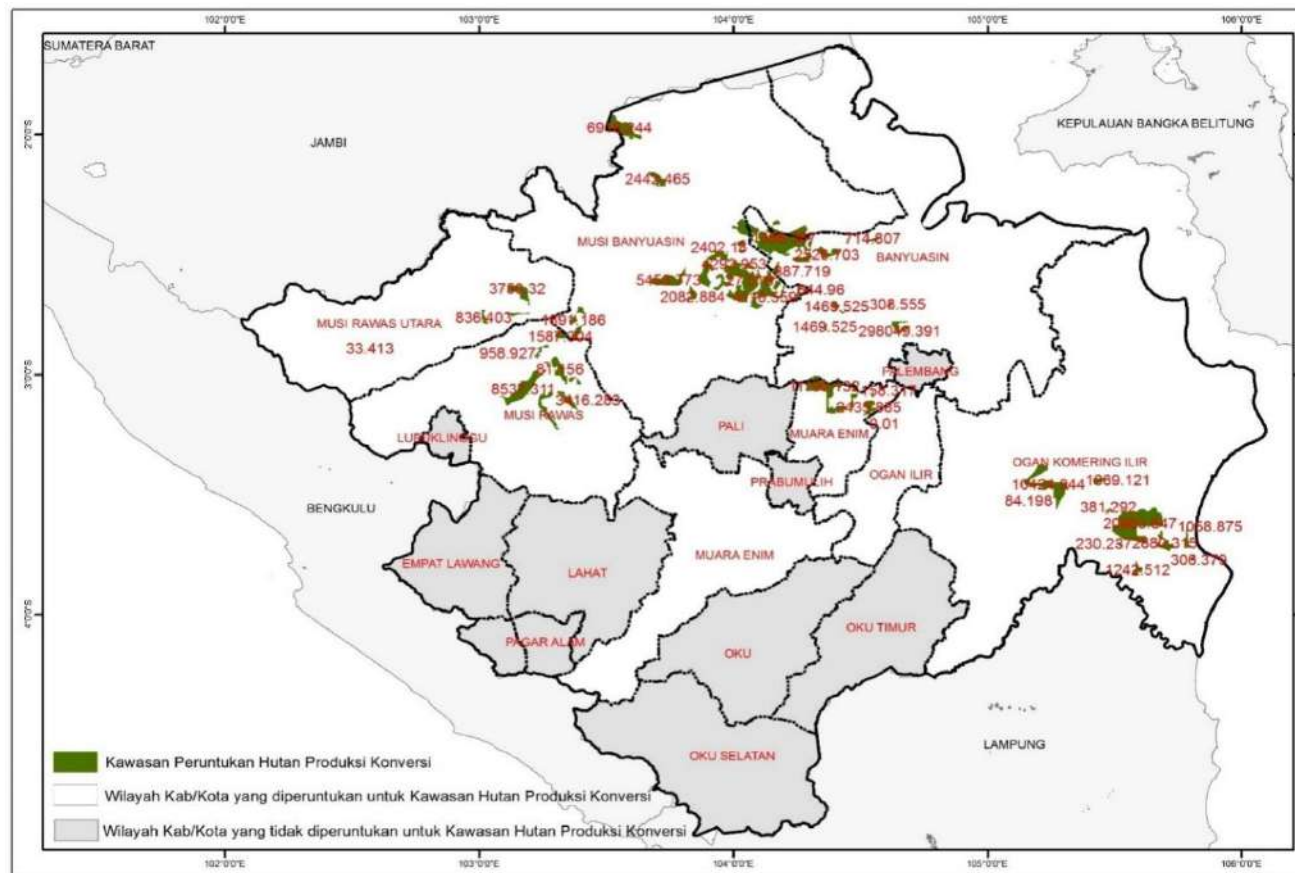
Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

- b. Kawasan hutan produksi tetap merupakan kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi tetap, dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam, dengan luas 1.690.839,50 Ha.
- 1) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 642.534,22 Ha;
 - 2) Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 398.493,87 Ha;
 - 3) Kabupaten Musi Rawas dengan luas 167.044,67 Ha;
 - 4) Kabupaten Muara Enim dengan luas 156.139,89 Ha;
 - 5) Kabupaten Musi Rawas Utara dengan luas 109.927,10 Ha;
 - 6) Kabupaten Banyuasin dengan luas 70.757,90 Ha;
 - 7) Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan luas 54.958,68 Ha;
 - 8) Kabupaten Lahat dengan luas 27.160,94 Ha;
 - 9) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan luas 23.168,03 Ha;
 - 10) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan luas 19.475,77 Ha;
 - 11) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan luas 17.845,18 Ha;
 - 12) Kabupaten Empat Lawang dengan luas 3.233,26 Ha; dan
 - 13) Kabupaten Ogan Ilir dengan luas 100,00 Ha.

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

- c. Kawasan hutan produksi konversi merupakan kawasan yang dapat diubah peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan perluasan pengembangan wilayah di luar bidang kehutanan, misalnya transmigrasi, pertanian, perkebunan, industri, pemukiman dan lain-lain, dengan luas 145.356,92 hektar :
- 1) Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 59.986,87 Ha;
 - 2) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 24.069,55 Ha;
 - 3) Kabupaten Banyuasin dengan luas 27.248,50 Ha;
 - 4) Kabupaten Musi Rawas dengan luas 19.795,43 Ha;
 - 5) Kabupaten Muara Enim dengan luas 13.105,27 Ha;
 - 6) Kabupaten Musi Rawas Utara dengan luas 1.136,57 Ha;
- dan
- 7) Kabupaten Ogan Ilir dengan luas 14,73 Ha.

Gambar 2. 4
Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Konversi Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

Tabel 2. 3
Luas Kawasan Hutan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Ha)

No	Kabupaten /Kota	HPT	HP	HPK	Keterangan
1	Banyuasin	-	70.757,90	27.248,50	HPT = Hutan Produksi Terbatas HP = Hutan Produksi Tetap HPK = Hutan Produksi yang dapat diKonversi
2	Empat Lawang	4.555,02	3.233,26	-	
3	Lahat	4.350,98	27.160,94	-	
4	Muara Enim	25.498,07	156.139,89	13.105,27	
5	Musi Banyuasin	94.301,17	398.493,87	59.986,87	
6	Musi Rawas	7.385,84	167.044,67	19.795,43	
7	Musi Rawas Utara	36.511,59	109.927,10	1.136,57	
8	Ogan Ilir	-	100,00	14,73	
9	Ogan Komering Ilir	10.034,54	642.534,22	24.069,55	
10	Ogan Komering Ulu	18.646,99	54.958,68	-	
11	Ogan Komering Ulu Selatan	10.238,82	17.845,18	-	
12	Ogan Komering Ulu Timur	-	19.475,77	-	
13	Penukal Abab Lematang Ilir	-	23.168,03	-	
14	Lubuk Linggau	1.096,22	-	-	
15	Pagar Alam	-	-	-	
16	Palembang	-	-	-	
17	Prabumulih	1.069,14	-	-	
	Jumlah	213.688,39	1.690.839,50	145.356,92	

Catatan

Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan KepMenLHK Nomor : SK.8094/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tanggal 23 November 2018

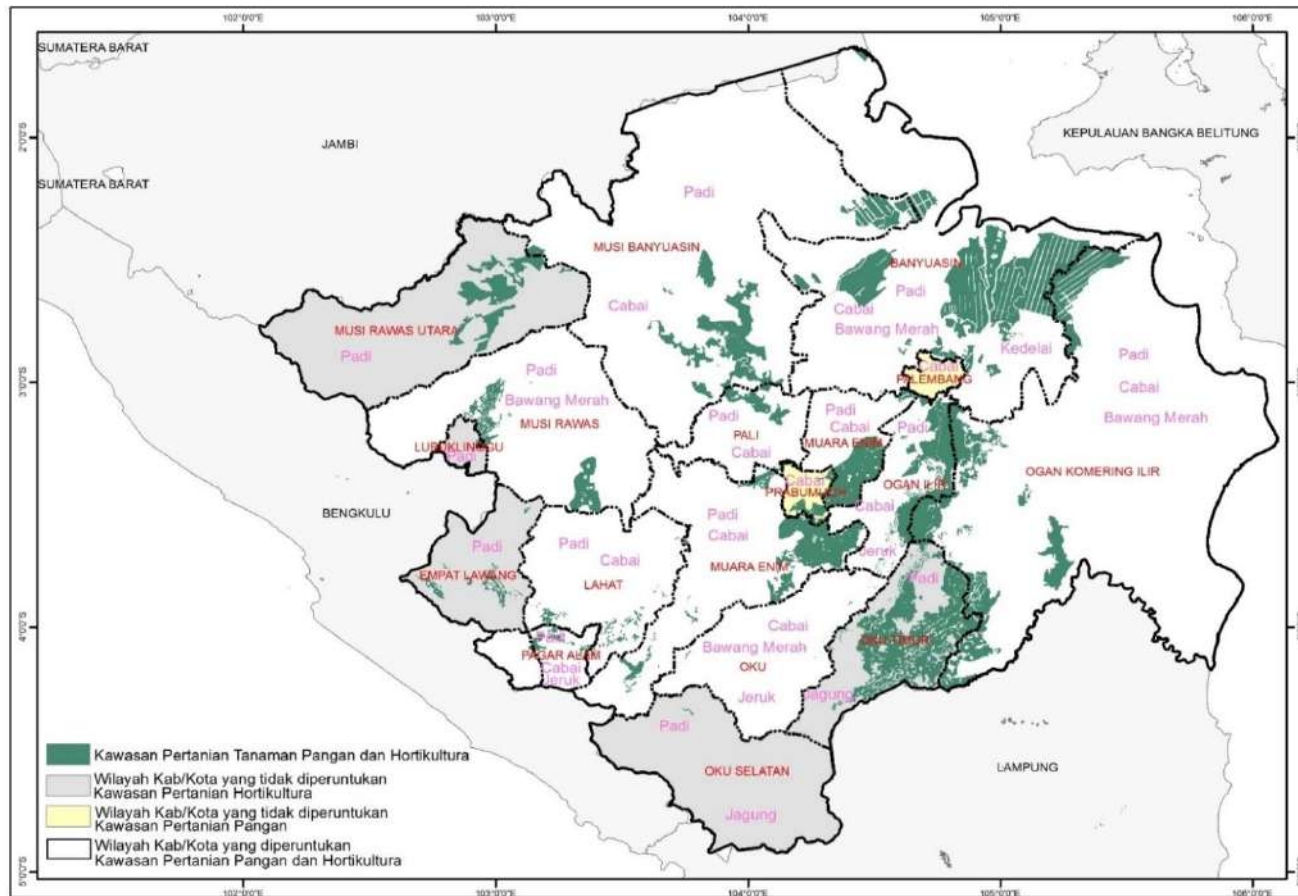
2. Kawasan peruntukan pertanian

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertanian adalah pengendalian alih fungsi pertanian khususnya pada lahan produktif yang memiliki irigasi dipertahankan fungsi dan peruntukannya guna menunjang program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mempertahankan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Pengembangan kawasan pertanian ditujukan untuk mengembangkan area produksi pertanian dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan dengan kemungkinan dukungan prasarana pengairan.

Rencana kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:

- a. Kawasan pertanian pangan yang dikembangkan di seluruh kabupaten/kota dengan jenis komoditas unggulan diantaranya:
 - 1) Padi (terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Ilir);
 - 2) Jagung (terutama di Kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan); dan
 - 3) Kedelai (terutama di Kabupaten Banyuasin).
- b. Kawasan pertanian hortikultura yang dikembangkan di seluruh kabupaten/kota dengan jenis komoditas unggulan diantaranya:
 - 1) Cabai (terutama di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten PALI, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Palembang)
 - 2) Bawang merah (terutama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Banyuasin); dan
 - 3) Jeruk (terutama di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam).

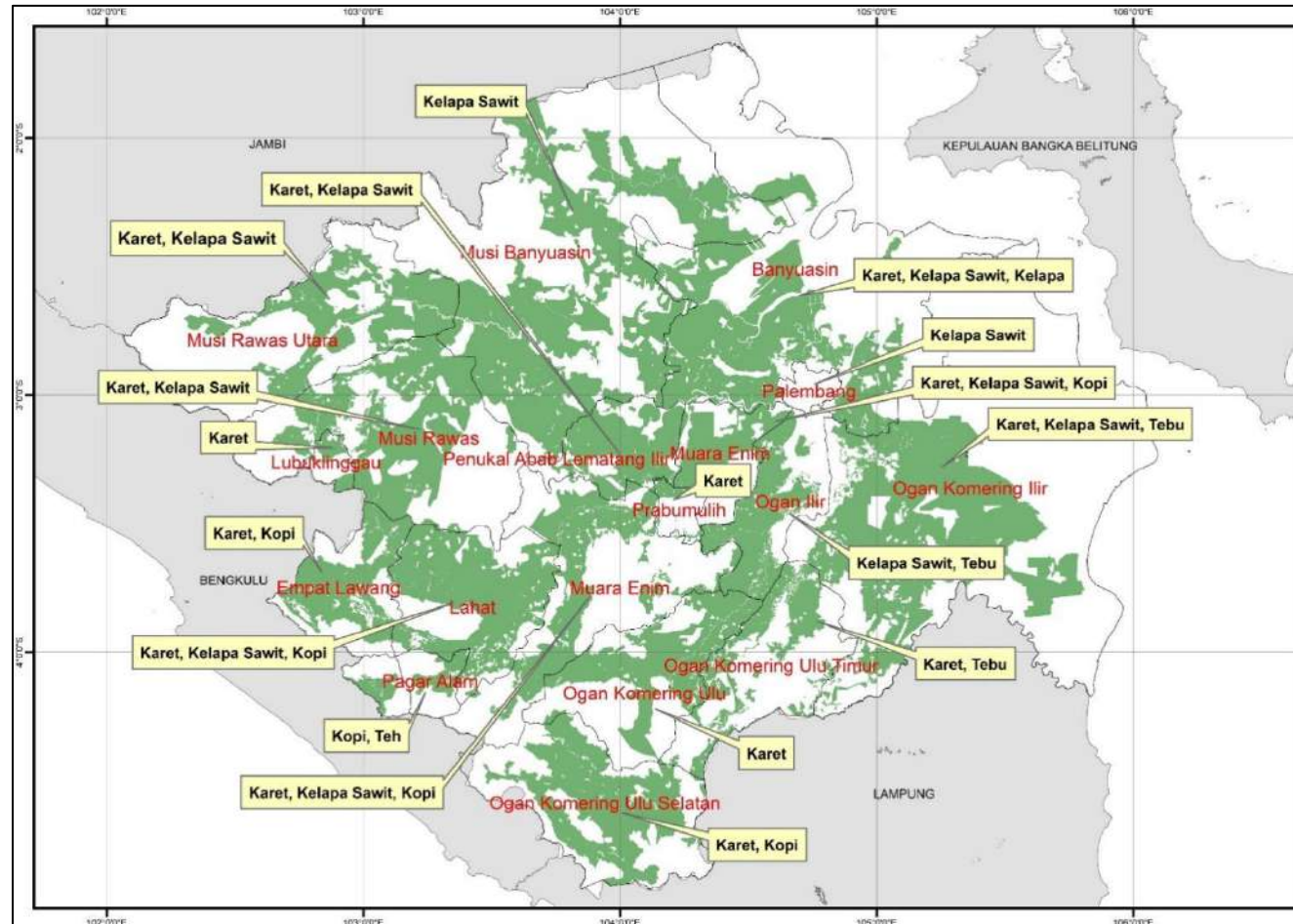
Gambar 2. 5
Peta Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

- c. Kawasan perkebunan yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, peremajaan areal tanaman perkebunan, serta pengembangan sentra produksi perkebunan di seluruh wilayah Provinsi dengan jenis komoditi unggulan, meliputi:
- 1) Karet (terutama di Kabupaten Musi Rawas, Muara Enim, Lahat OKU Selatan, Banyuasin, Musi Rawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih, Empat Lawang dan Kota Lubuk Linggau);
 - 2) Kelapa sawit (terutama di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir);
 - 3) Kopi (terutama di Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim dan Kota Pagar Alam);
 - 4) Kelapa (terutama di Kabupaten Banyuasin; dan Kabupaten Ogan Ilir);
 - 5) Tebu (terutama di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir); dan
 - 6) Teh (terutama di Kota Pagar Alam).

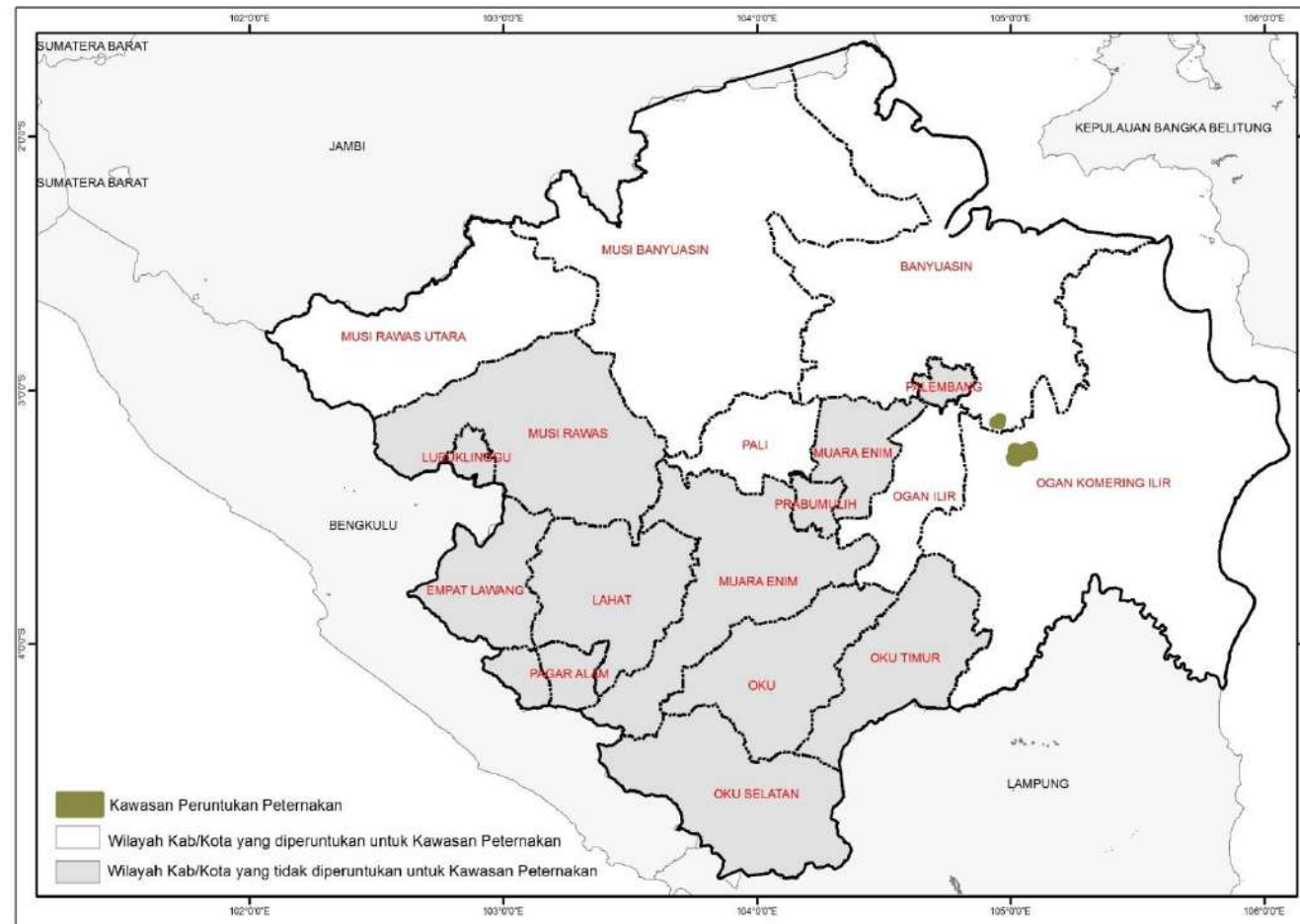
Gambar 2. 6
Peta Kawasan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

- d. Kawasan peternakan yang dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi terutama di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Gambar 2. 7
Peta Kawasan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan



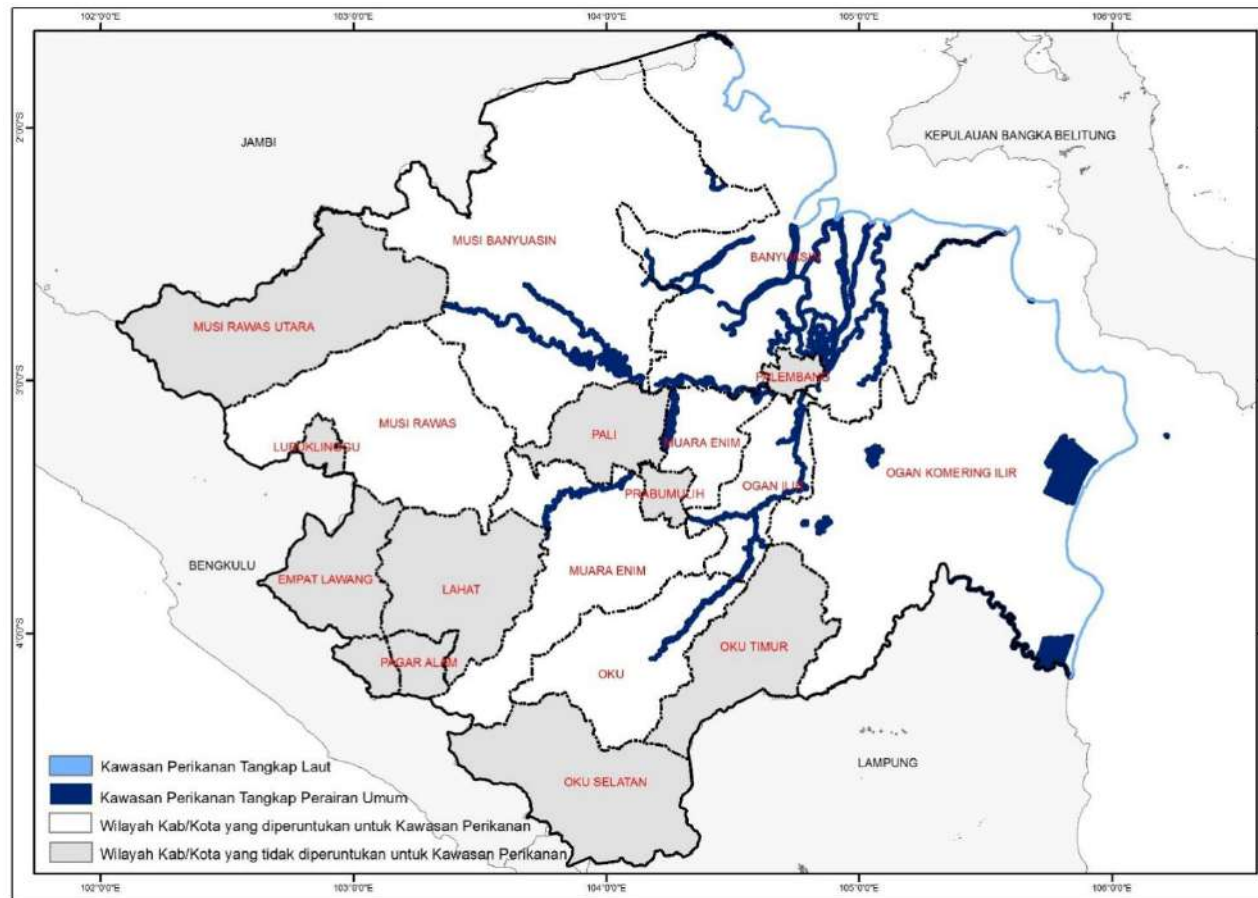
Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

3. Kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan perikanan tangkap meliputi:

- a. Perikanan Tangkap Laut, terutama dikembangkan di sepanjang Pantai Timur Sumatera (wilayah pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin); dan
- b. Perikanan Tangkap Perairan Umum, diarahkan di seluruh kabupaten/kota terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas dan Ogan Ilir.

Gambar 2. 8
Peta Kawasan Peruntukan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

4. Kawasan peruntukan permukiman

Pengembangan Kawasan Permukiman ditujukan untuk menciptakan pemusatan permukiman penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan beserta sarana prasarana dan fasilitas pendukung bagi kegiatan masyarakat.

Arahan pengembangan permukiman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung;
- b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat; dan
- c. Memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.

5. Kawasan peruntukan pariwisata

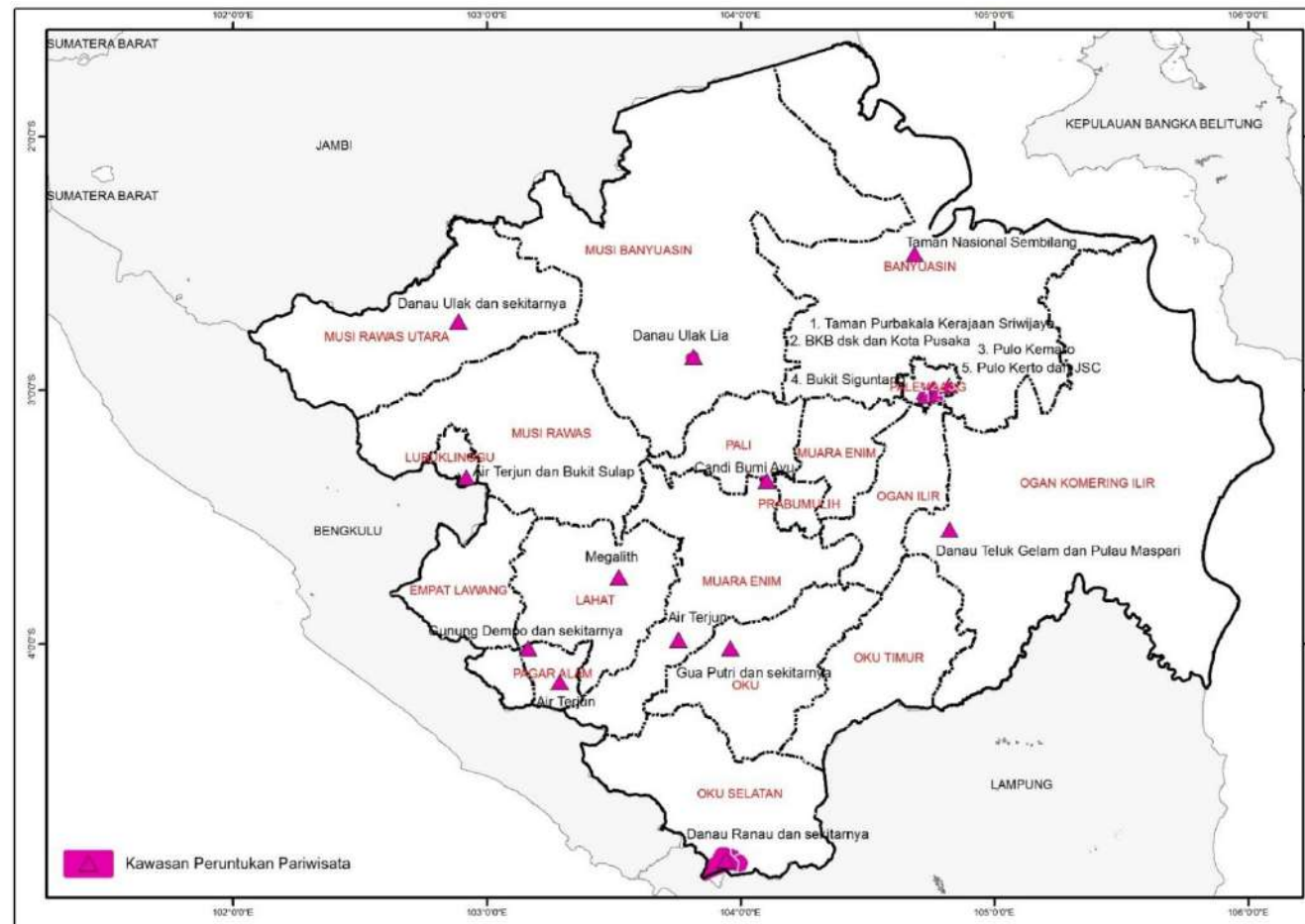
Kriteria dalam penetapan kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki:

- a. Keindahan alam dan keindahan panorama;
- b. Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan; dan
- c. Bangunan peninggalan budaya atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi.

Pengembangan pariwisata diarahkan di setiap kabupaten/kota, dengan prioritas pengembangan pada:

- a. Benteng Kuto Besak dan sekitarnya, Bukit Siguntang, Kota Pusaka Palembang, Pulau Kemaro, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Pulo Kerto dan Jakabaring Sport City (Palembang);
- b. Megalith dan Air Terjun (Lahat dan Pagar Alam);
- c. Danau Ranau dan sekitarnya (OKU Selatan);
- d. Gunung Dempo dan sekitarnya (Pagar Alam);
- e. Gua Putri dan Sekitarnya (OKU);
- f. Danau Teluk Gelam dan Pulau Maspari (OKI);
- g. Taman Nasional Sembilang (Banyuasin);
- h. Air Terjun dan Bukit Sulap (Lubuk Linggau);
- i. Air Terjun (Muara Enim);
- j. Danau Ulak Lia (Musi Banyuasin);
- k. Danau Raya dan sekitarnya (Musi Rawas Utara); dan
- l. Candi Bumi Ayu (Penukal Abab Lematang Ilir).

Gambar 2. 9
Peta Kawasan Peruntukan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

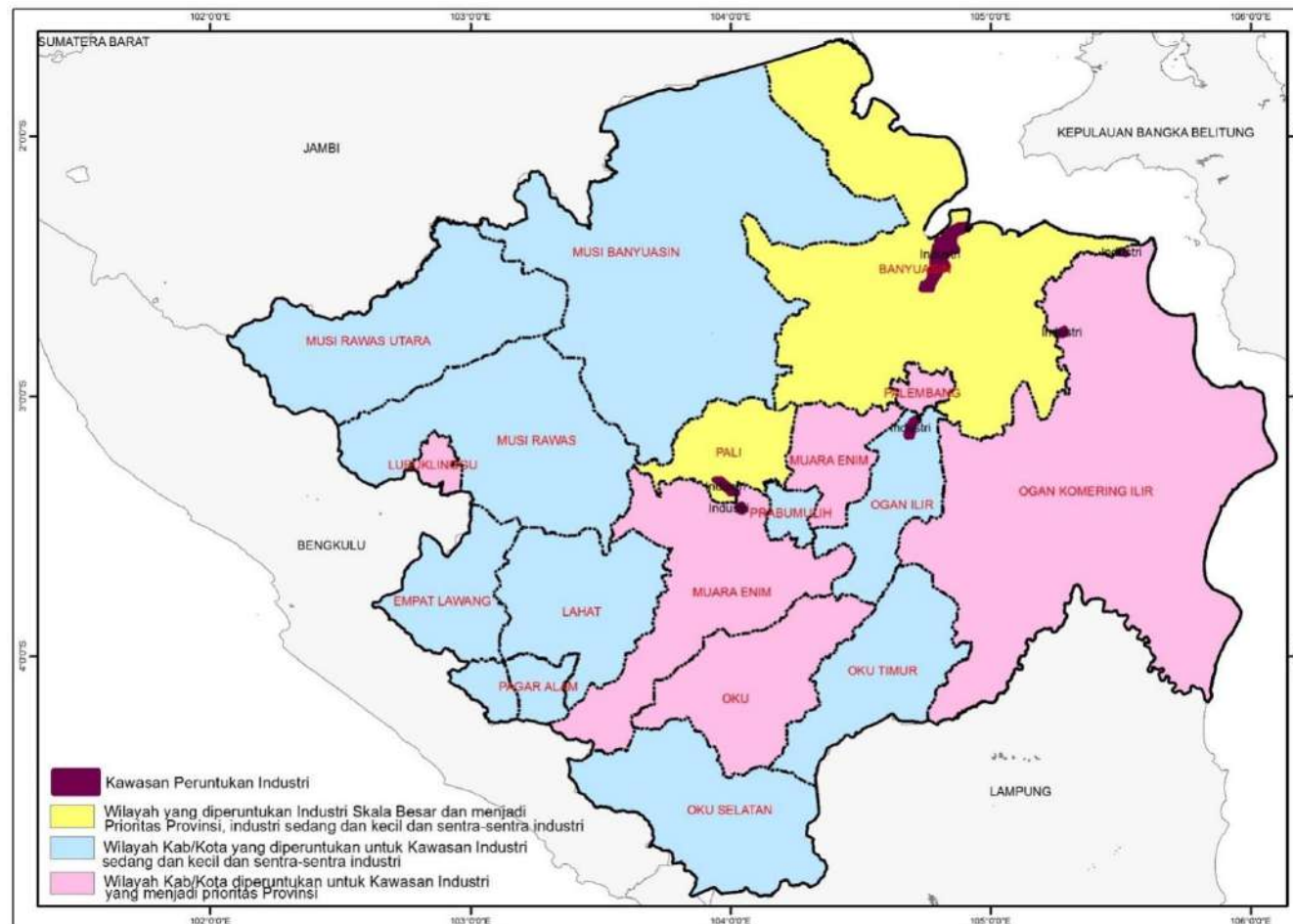
6. Kawasan peruntukan industri

Arahan Pengembangan Kawasan Industri ditekankan pada pengembangan kawasan industri sebagai tempat pemusatan industri yang dilengkapi sarana, prasarana dan fasilitas penunjang.

Pengembangan kawasan industri dikelompokkan berdasarkan jenis industri yang terdapat di Provinsi, yaitu:

- a. Industri skala besar direncanakan dikembangkan di Tanjung Api-Api (Kabupaten Banyuasin) dan Pendopo (Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir);
- b. Industri sedang dan industri kecil dan sentra-sentra industri direncanakan tersebar di setiap kabupaten/ kota; dan
- c. Industri yang menjadi prioritas Provinsi terdapat di Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ilir.

Gambar 2. 10
Peta Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Sumatera Selatan



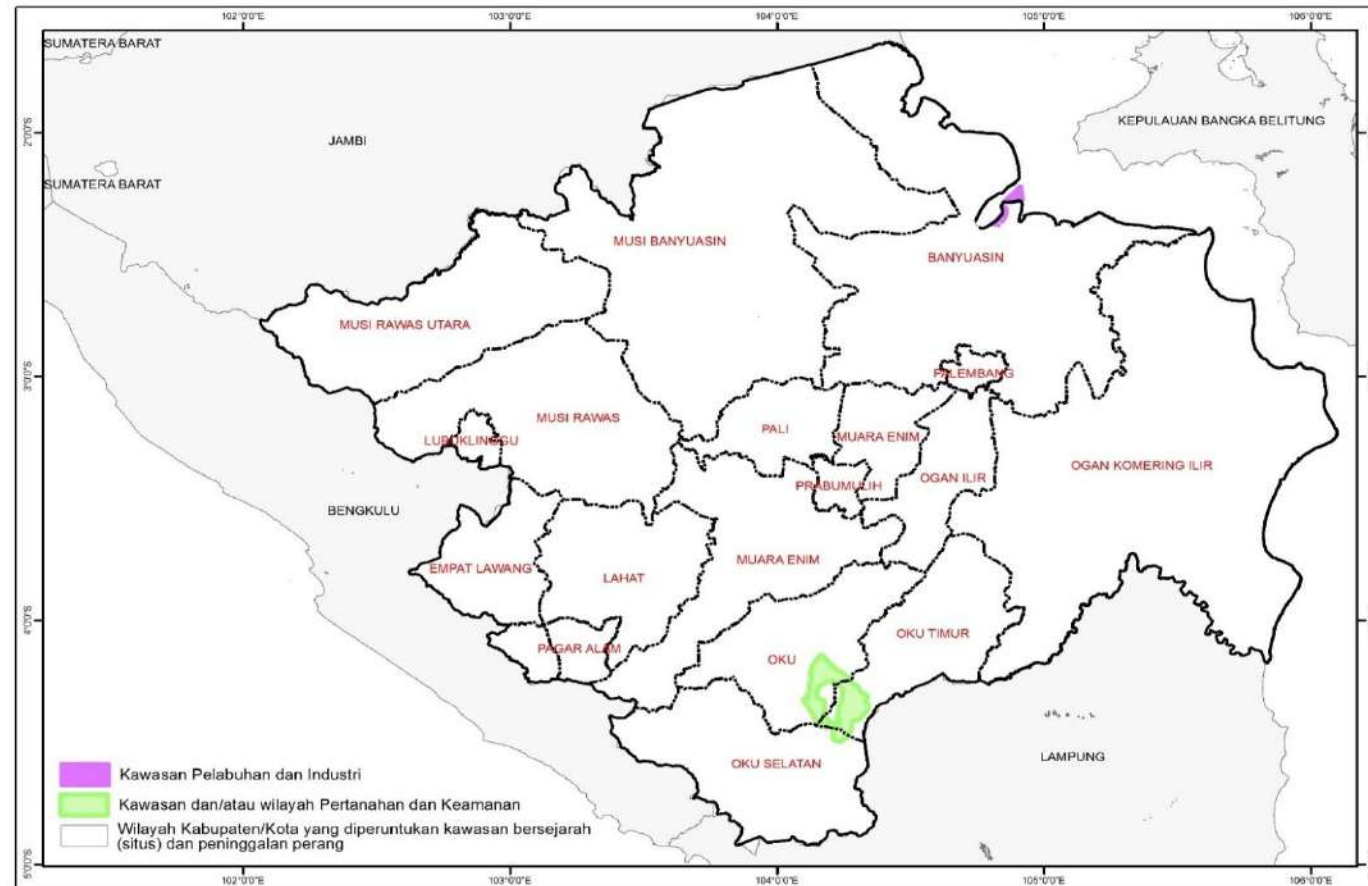
Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

7. Kawasan peruntukan lainnya

Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya ditujukan bagi peruntukan kawasan yang meliputi :

- a. Kawasan dan/atau wilayah pertahanan dan keamanan diarahkan di seluruh wilayah provinsi terutama Daerah Latihan Militer di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Kawasan bersejarah (situs) dan peninggalan perang diarahkan di seluruh wilayah Provinsi; dan
- c. Kawasan pelabuhan dan industri di Kabupaten Banyuasin, meliputi areal reklamasi pantai yang diarahkan peruntukannya sebagai kawasan pelabuhan/ terminal dan industri, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-API, Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Laut/Peti Kemas dan Pusat Distribusi Regional (PDR).

Gambar 2. 11
Peta Kawasan Peruntukan Lainnya Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

2.1.1.1. Wilayah Rawan Bencana

Jumlah kejadian bencana alam dan non alam di Sumatera Selatan pada kurun tahun 2014 sampai tahun 2023 berjumlah 1.392 kejadian. Kejadian bencana terbagi atas bencana banjir, kebakaran, tanah longsor, angin puting beliung, banjir bandang, kecelakaan kapal, semburan lumpur dan Hujan Es. Jumlah kejadian bencana terbesar adalah bencana kebakaran sebanyak 775 kejadian dari tahun 2014 sampai tahun 2023.

Tabel 2. 4
Rekapitulasi Kejadian Bencana di Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2014 – 2023

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2014 - 2023										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1	Banjir	24	22	29	22	34	31	47	22	43	90	364
2	Kebakaran	91	90	25	91	99	117	88	98	52		775
3	Tanah longsor	19	19	9	18	18	14	17	7	17	28	166
4	Puting Beliung	7	5	11	25	20	11	12	21	30	85	227
5	Banjir Bandang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
6	Kecelakaan Kapal	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
7	Semburan Lumpur	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
8	Hujan Es	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
9	Erosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
10	Tersambar petir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Total	141	136	74	156	171	173	164	148	147	219	1.553

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Bencana yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan adalah Bencana asap akibat dari kebakaran hutan yang disebabkan oleh alam dan ulah dari perbuatan manusia seperti pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar hutan, sistem tanam padi sonor dan berbagai kegiatan lainnya yang memicu terjadinya kebakaran hutan. Jumlah bencana banjir sebanyak 364 kejadian yang juga dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia. Jumlah kejadian bencana terkecil atau yang paling

sedikit adalah bencana semburan lumpur dan hujan es yaitu sebanyak 1 kejadian selama sembilan tahun terakhir pada periode 2014-2023.

Gambar 2. 12
Sebaran Kejadian Bencana di Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Rekapitulasi kejadian bencana alam di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 adalah sebanyak 141 kejadian yang terdiri dari bencana banjir, kebakaran, tanah longsor dan angin puting beliung. Pada tahun 2015 jumlah kejadian bencana alam di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 136 kejadian bencana. Pada tahun 2024 jumlah kejadian bencana alam sebanyak 304 kejadian dengan total kejadian bencana alam selama 10 (sepuluh) tahun terakhir adalah 1.553 kejadian. Berdasarkan sebaran kejadian bencana di provinsi sumatera selatan pada tahun 2024, ada 3 kabupaten/kota yang memiliki kejadian bencana paling banyak yaitu Kota Palembang berjumlah 61 kejadian bencana, kabupaten Ogan Ilir berjumlah 44 kejadian bencana dan kabupaten Muara Enim berjumlah 39 kejadian bencana.

Dilihat dari Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang sedang dan tinggi. Indeks Risiko bencana tersebut tiap tahunnya stabil dan berada dalam kategori yang rawan sedang dan tinggi. Adapun daerah yang memiliki risiko bencana yang paling tinggi adalah Kabupaten Empat Lawang, sedangkan yang memiliki risiko

bencana yang paling sedang adalah Kabupaten OKU Selatan. Meskipun demikian, Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan memiliki risiko bencana yang sedang dan tinggi sehingga perlu adanya upaya penanggulangan bencana dan penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2. 5
Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Risiko 2023
Empat Lawang	158,00	158,00	153,07	154,31	151,98	Tinggi
Muara Enim	155,20	155,20	155,20	152,86	148,92	Tinggi
Musi Rawas	155,20	155,20	145,27	146,94	148,80	Tinggi
Ogan Komering Ilir	153,20	153,20	153,20	146,36	145,52	Tinggi
Ogan Komering Ulu	155,20	155,20	155,20	145,51	144,08	Tinggi
Musi Rawas Utara	155,20	155,20	154,15	142,61	141,07	Sedang
Penukal Abab Lematang Ilir	155,20	155,20	155,20	142,57	136,76	Sedang
Prabumulih	132,40	132,40	132,40	132,40	132,40	Sedang
Palembang	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60	Sedang
Ogan Komering Ulu Timur	131,20	131,20	131,20	131,20	125,17	Sedang
Banyuasin	136,07	141,43	137,81	130,11	124,44	Sedang
Pagar Alam	126,40	126,40	126,40	126,40	123,96	Sedang
Lubuk Linggau	124,80	124,80	124,80	124,80	122,02	Sedang
Musi Banyuasin	132,40	132,40	125,53	117,86	120,98	Sedang
Ogan Ilir	132,40	120,56	116,43	117,60	115,97	Sedang
Lahat	109,07	109,07	116,55	111,56	111,09	Sedang
Ogan Komering Ulu Selatan	130,00	130,00	120,26	106,15	105,47	Sedang
Sumatera Selatan	139,62	139,24	137,31	132,99	131,24	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2023

2.1.1.1.1. Bencana Banjir

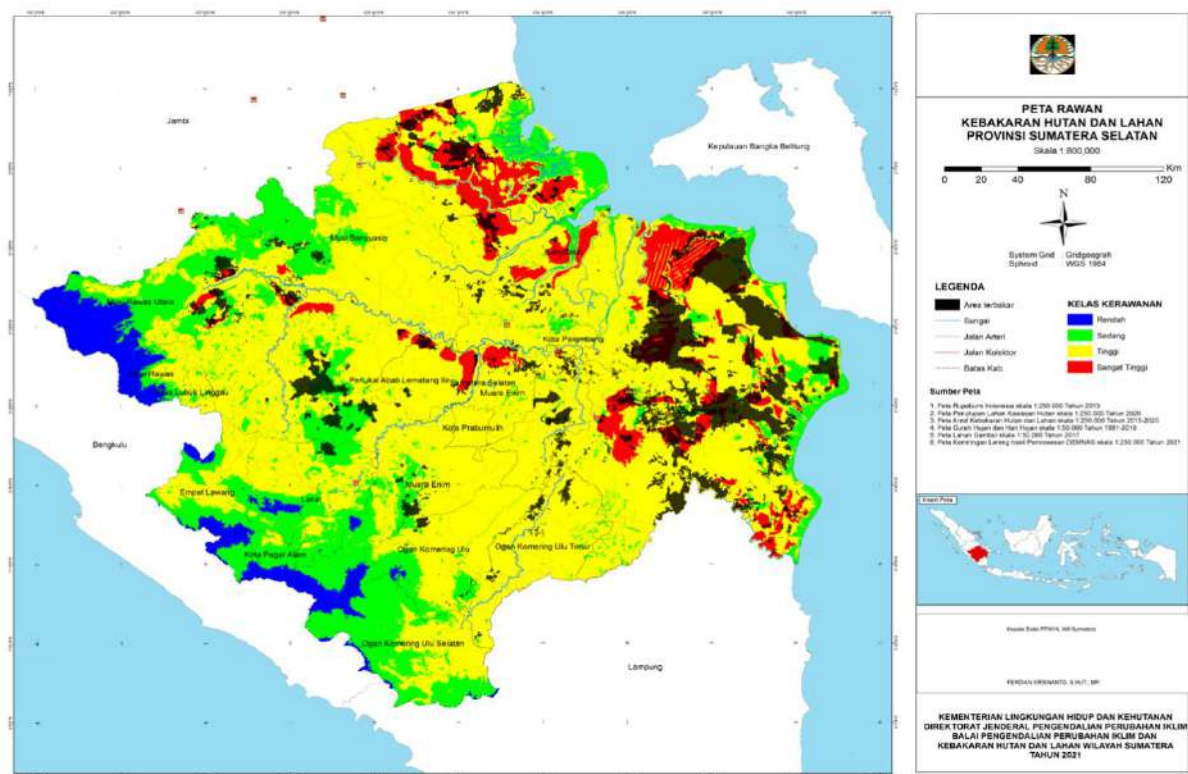
Bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Selama kurun waktu dari tahun 2014 hingga Tahun 2023 tercatat 364 kejadian banjir di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu penyebab banjir adalah semakin berkurangnya kawasan hutan lindung di daerah hulu dan merupakan penyebab yang paling dominan di wilayah ini. Berikut adalah kondisi banjir di DAS Musi :

- Di Sub DAS Musi banjir bandang sering terjadi. Pada tahun 1999 di Talang Padang beberapa rumah roboh diterjang banjir. Di Sub DAS Batang Harileko banjir terjadi dipertemuan dengan Sungai Musi.
- Di Sub DAS Rawas banjir terjadi Bingin Teluk dan Noman.
- Di Sub DAS Lematang banjir di Belimbing dan Pagar Alam.
- Di Sub DAS Ogan banjir terjadi Muara Kuang.
- Di Sub DAS Komerling banjir terjadi di Muaradua.
- Di pertemuan Sungai Musi - Sungai Kelingi, Sungai Musi - Sungai Lakitan dan Sungai Musi - Sungai Rawas terjadi pada saat debit puncak sungai-sungai.
- Wilayah kota di hilir seperti Palembang dan Sekayu.

2.1.1.1.2. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Tercatat 20.547 sebaran hotspot bencana kebakaran hutan dan lahan menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 (Januari-Desember). Hal ini menunjukkan bahwa potensi bencana kebakaran sangat tinggi terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga diperlukan penanganan dan upaya antisipasi kebakaran di daerah rawan kebakaran.

Gambar 2. 13
Peta Rawan Kebakaran Hutan Dan Lahan Sumsel, 2022



Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Pada Peta Rawan Bencana Kebakaran hutan dan lahan Tahun 2022, terlihat bahwa wilayah timur laut Sumatera Selatan yang masuk ke area terbakar dan kategori kerawanan sangat tinggi, meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Banyuasin, diikuti oleh wilayah Sumatera Selatan bagian tengah yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi. Wilayah timur seperti Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Pagar Alam, dan Lahat tergolong sedang dan rendah.

Di bawah ini merupakan lokasi sebaran hotspot kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 berdasarkan data tim monitoring hotspot Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2. 6
Data Sebaran Hotspot Sumatera Selatan Tahun 2023

NO	KOTA/KABUPATEN	SEBARAN PER BULAN 2022												JMLH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Palembang							2	2	24	26	4		58
2	Pagaralam			1	1			1	1	2	5			11
3	Lubuk Linggau		1							8	5	2	1	17
4	Prabumulih	2	2	1	5	3	6		1	5	30	4	8	67
5	Ogan Ilir			4	6	5	12	14	69	292	359	43	8	812
6	Ogan Komering Ilir	6	7	7	11	10	20	36	216	3131	6113	1054	25	10636
7	Ogan Komering Ulu	3	3	3	12	6	10	1	52	283	203	27	4	607
8	Oku Timur				3	5	6	8	27	216	406	47	4	722
9	Oku Selatan	2	5	2	15	3	11	5	30	91	173	65	23	425
10	Musi Rawas	14	12	10	59	15	27	16	107	202	245	27	15	766
11	Musi Banyuasin	11	9	20	38	59	43	30	97	453	611	92	18	1457
12	Banyuasin	2	8	14	5	38	14	26	96	717	982	136	5	2019
13	Empat Lawang	4	3	1	18	5	7	15	38	69	62	5	6	231
14	Lahat	2	7	4	14	18	21	19	110	163	178	10	11	557
15	Muara Enim	4	7	7	24	16	26	13	53	255	317	43	46	811
16	Muratara	9	12	13	41	47	20	19	84	277	439	37	10	1008
17	Pali		6	6	10	29	12	6	25	139	92	8	10	343
TOTAL/BULAN		59	82	93	262	226	235	211	1008	6327	10246	1604	194	20547

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Tabel 2. 7
Perbandingan Jumlah Sebaran Hotspot dari Tahun 2015-2023

TAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JMLH
2015	13	35	42	29	137	229	656	1.800	11.285	11.584	1.182	51	27.043
2016	23	13	29	19	28	98	121	317	218	70	25	4	965
2017	9	4	22	26	61	92	148	232	418	130	39	33	1.214
2018	36	20	13	38	42	52	198	264	673	663	51	31	2.081
2019	12	16	15	35	138	95	256	1.308	6.829	6.973	1.347	367	17.391
2020	380	138	457	350	291	354	388	1.121	473	279	238	67	4.536
2021	11	17	49	122	139	217	556	403	642	357	121	160	2.794
2022	66	80	180	212	351	197	328	345	331	92	117	13	2.312
2023	59	82	93	262	226	235	211	1008	6327	10246	1604	194	20547

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Berikut ini adalah data luas sebaran kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021-2024 berdasarkan jenis lahan yaitu lahan mineral dan lahan gambut di masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 2.8
Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2021-2024 (dalam Ha)

No	Kabupaten	2021			2022			2023			2024		
		Mineral	Gambut	Total	Mineral	Gambut	Total	Mineral	Gambut	Total	Mineral	Gambut	Total
1	Banyuasin	181	35	216	11		11	14981	11469	26450	2231	456	2687
2	Kota Lubuk Linggau	7		7			-			-			-
3	Kota Prabumulih	4		4	1		1			-	10		10
4	Lahat	66		66	19		19	321		321	4		4
5	Muara Enim	128	2	130	128		128	2844	227	3071	1086	567	1652
6	Musi Banyuasin	527		527	191	10	201	2247	2007	4255	1957	2054	4011
7	Musi Rawas	760		760	433		433	1174	176	1350	1187	21	1209
8	Musi Rawas Utara	225	9	234	625	6	631	2785	2118	4903	413	445	859
9	Ogan Ilir	998		998	1443		1443	7497		7497	717		717
10	Ogan Komering Ilir	786	248	1035	219	28	247	35221	35636	70857	1145	411	1556
11	Ogan Komering Ulu	330		330	262		262	19		19	676		676
12	Ogan Komering Ulu Timur	65		65	96		96	1372		1372	80		80
13	Ogan Komering Ulu Selatan	44		44	5		5	3		3	211		211
14	Penukal Abab Lematang Ilir	446		446	61		61	311	144	455	248	28	276
15	Kota Palembang	0			24		24	1079		1079	1		1
16	Kab. Empat Lawang	49		49	9		9	23		23	10		10
17	Kota Pagar Alam												
	Jumlah	4.615	295	4.910	3.525	43	3.568	69.877	51.776	121.653	9.976	3.982	13.957

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Dari data di atas dapat terlihat bahwa tahun 2021 luas karhutla mencapai 4.910 ha, pada tahun 2022 luasan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan turun menjadi 3.568 ha. Untuk tahun 2024 luasan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan menurun menjadi 13.957 ha.

Tabel 2.9
Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

No.	Kabupaten	Gambut (Ha)	Mineral (Ha)	Grand Total (Ha)
1	Ogan Komering Ilir	40.459,94	39.566,02	80.025,96
2	Banyuasin	11.975,62	15.050,33	27.025,95
3	Ogan Ilir		7.853,53	7.853,53
4	Musi Rawas Utara	2.117,72	2.933,14	5.050,86
5	Musi Banyuasin	2.007,32	2.247,19	4.254,51
6	Muara Enim	226,96	2.989,30	3.216,26
7	Musi Rawas	175,88	1.204,05	1.379,93
8	Ogan Komering Ulu Timur		1.373,26	1.373,26
9	Kota Palembang		1.079,16	1.079,16
10	Penukal Abab Lematang Ilir	143,90	310,66	454,56
11	Lahat		324,28	324,28
12	Empat Lawang		23,21	23,21
13	Ogan Komering Ulu		18,84	18,84
14	Ogan Komering Ulu Selatan		2,53	2,53
	Grand Total	57.107,34	74.975,52	132.082,86

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Dari data di atas dapat terlihat bahwa tahun 2019 luas karhutla mencapai lebih dari 329.484 ha, dan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir semakin berangsur menurun hingga pada tahun 2022 luasan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan turun menjadi 3.720 ha. Untuk tahun 2023 luasan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan cukup meningkat menjadi 132.082,86.

Tabel 2.10
Data Desa Rawan dan Sangat Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten	Kecamatan		Desa		Jumlah
		Rawan	Sangat Rawan	Rawan	Sangat Rawan	
1	Ogan Komering Ilir	18	14	63	87	150
2	Banyuasin	19	14	111	35	146
3	Musi Banyuasin	14	12	68	66	134
4	Ogan Ilir	13	7	57	15	72
5	Muara Enim	18	12	102	39	141
6	Penukal Lematang Abab Ilir	5	5	34	11	45
7	Musirawas	13	8	88	27	115
8	Musirawas Utara	7	7	43	21	64
9	Empat Lawang	7	3	47	5	52
10	Lahat	18	7	80	12	92
11	Ogan Komering Ulu	12	7	68	23	91
12	Ogan Komering Ulu Selatan	17	8	83	20	103
13	Ogan Komering Ulu Timur	12	na	22	25	47
14	Pagaralam	4	8	5	1	6
15	Palembang	8	1	10	1	11
16	Lubuk Linggau	5	2	9	4	13
17	Prabumulih	5	2	10	4	14
JUMLAH		195	118	900	396	1.296

Sumber: Dinas BPBD Provinsi Sumatera Selatan,

Dari tabel di atas dapat dilihat desa rawan dan sangat rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015, Kabupaten/Kota yang memiliki desa terbanyak rawan kebakaran hutan dan lahan adalah Kabupaten Banyuasin dengan jumlah 111 desa, sedangkan Kabupaten/Kota yang paling sedikit memiliki desa rawan kebakaran hutan dan bencana adalah Kota Pagaralam yaitu hanya 5 desa.

Kemudian untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai desa terbanyak dengan kategori sangat rawan kebakn hutan dan lahan adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jumlah 87 desa, sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki desa paling sedikit dengan kategori sangat rawan kebakaran

hutan dan lahan adalah Kota Pagaralam dan Kota Palembang yaitu hanya satu desa.

Untuk mengantisipasi adanya potensi kebakaran hutan dan lahan yang semakin luas, dibentuk adanya program desa tangguh di BPBD Kabupaten di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian sebaran sebagai berikut.

Tabel 2.11
Data Desa Tangguh di BPBD Kabupaten di Sumatera Selatan

No	Kabupaten	Desa	Kecamatan	Ket
1	Ogan Ilir	Rambutan	Indralaya Utara	
		Tanjung Pering	Indralaya Utara	
2	Ogan Komering Ilir	Riding	Pangkalan Lampan	
		Sumber Makmur	Lempuing	
		Suka Putih	Pedamaran	
		Cinta Jaya	Pedamaran	
		Tanjung Beringin	Tanjung Lubuk	
		Kota Bumi	Tanjung Lubuk	
3	Banyuasin	Lebung	Rantau Bayur	
4	Musi Banyuasin	Mangsang	Bayung Lincir	
		Muara Medak	Bayung Lincir	
5	Lahat	Gunung Kembang	Kikim Timur	
6	Muara Enim	Seganit,	Kecamatan SDU	
		Kota Padang	Kecamatan SDT	
		Lubuk Nipis	Panang Enim	
7	OKU Timur	Banuayu	Buay Pe,muka	
8	Prabumulih	Jungai	Rambang Kapak	
9	PALI	Pengabuan	Abab	
		Air Itam Timur	Penukal	
		Benakat Minyak	Talang Ubi	

Sumber: Sumber: Dinas BPBD Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui desa tangguh di BPBD Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Pada Kabupaten Ogan Ilir terdapat dua desa yang masuk dalam data Desa Tangguh yaitu, Desa Rambutan dan Desa Tanjung Pering yang terletak di Kecamatan Indralaya Utara. Selanjutnya pada Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki enam desa yaitu, Desa Riding, Desa Suka Putih, Desa Cinta Jaya, Desa Tanjung Beringin, dan Desa Kota Bumi.

Selanjutnya pada Kabupaten Banyuasin hanya terdapat di Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur, dan yang terakhir adalah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tiga Desa Tangguh yaitu, Desa Mangsang, Desa Muara Medak, dan Desa Mendes yang terletak di Kecamatan Bayung Lincir, pada kabupaten lahat desa Gunung Kembang, Pada Desa Muara Enim Desa Seganit,

Tanjung sirih, kota padang, lubuk nipis, pada kabupaten OKU timur desa banuayu, Pada Kota Prabumulih Desa Jungai, dan Kabupaten Pali desa Pengabuan, Desa Air Itam Timur, dan Desa Benakat minyak.

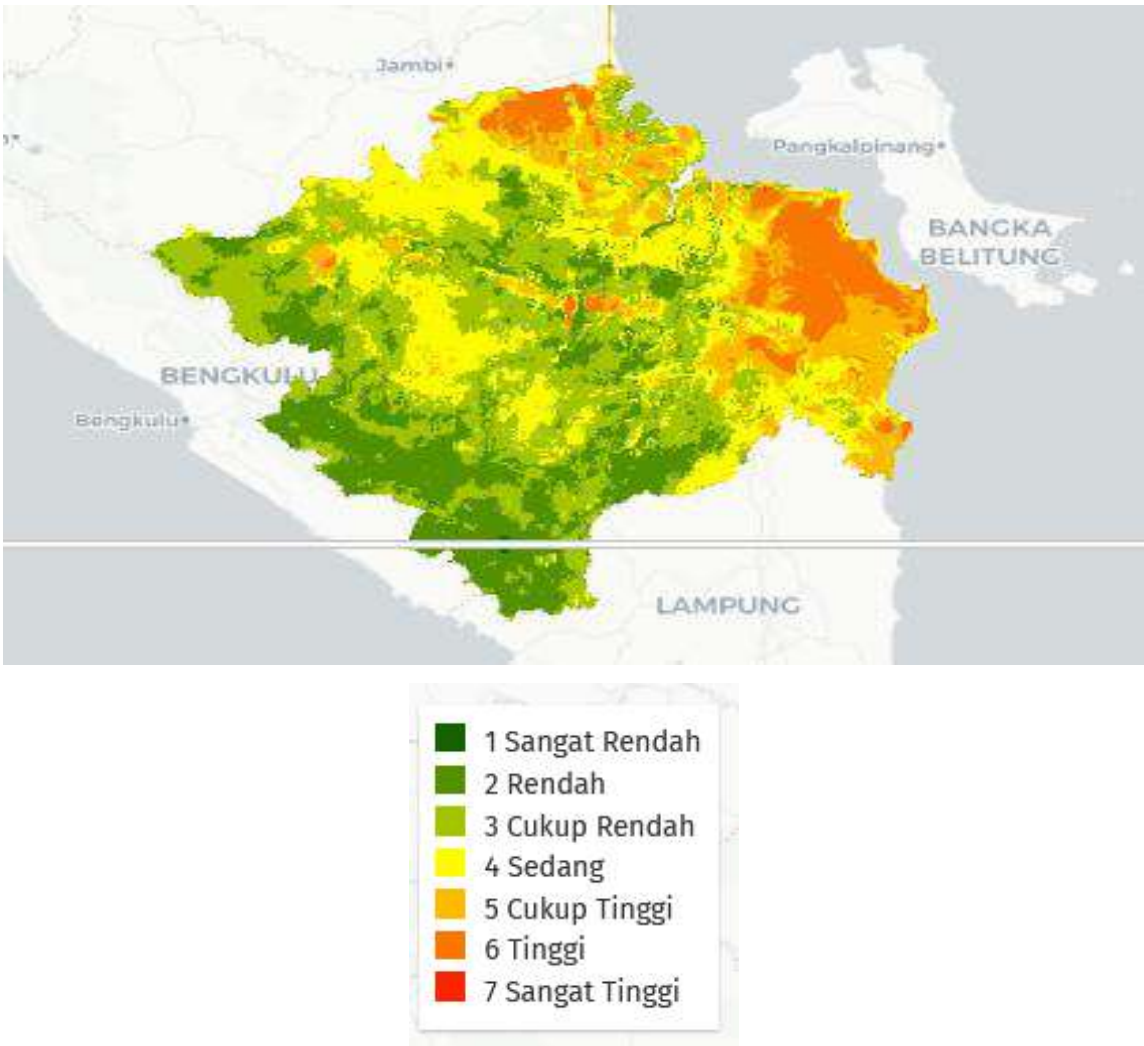
Selain desa tangguh, dibentuk pula regulasi/kebijakan untuk menangani dan mengantisipasi adanya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya adalah :

1. Peraturan Daerah Sumatera Selatan, Nomor : 8 Tahun 2016, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Peraturan Daerah Sumatera Selatan, Nomor : 1 Tahun 2018, tentang Pengelolaan dan Perlindungan Gambut;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 35 Tahun 2023, tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 11 Tahun 2015, tentang Prosedur Tetap Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan;
5. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatanm Nomor : 115/KPTS/DLHP/2021, tanggal 10 Pebruari 2021, tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Propinsi Sumatera Selatan;
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 180/KPTS/BPBD-SS/2021, tanggal 9 Maret 2021, tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla di Propinsi Sumatera Selatan;
7. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 235/KPTS/BPBD-SS/2021, tanggal 1 April , tentang Pembentukan POSKO SATGAS Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutbunla di Provinsi Sumatera Selatan;
8. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 346/KPTS/DISHUT/2021, tanggal 19 Mei, tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Pencegahan dan Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan lahan Berbasis Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu (SONGKET) Provinsi sumatera Selatan;

9. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Gubernur Sumsel No.596/KPTS/DISHUT/2021 tanggal 20 September 2021, tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rapergub tentang Pengendalian Kebakaran Pada Lahan Tidak Produktif dan Tanah Terlantar.

Potensi resiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan pada tahun 2023 berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Sumatera Selatan dibuat melalui peta prakiraan risiko kebakaran untuk mengetahui gambaran tingkat risiko berdasarkan matriks risiko yang menghubungkan antara tingkat kerentanan dengan peluang terjadinya kejadian hujan bawah normal. Tingkat risiko sangat tinggi artinya wilayah tersebut memiliki kerentanan tinggi dan peluang mendapatkan hujan di bawah normal melebihi 0,6. Tingkat risiko sangat rendah artinya wilayah tersebut memiliki kerentanan rendah dan peluang mendapatkan hujan di bawah normal kurang dari 0,4. Berikut ini adalah peta potensi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 berdasarkan prakiraan BMKG.

Gambar 2. 14
Peta Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023



Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk antisipasi dini antara lain :

- Sosialisasi
- Penyebarluasan Maklumat Larangan Membakar
- Aktivasi Posko
- Patroli Terpadu
- Pelatihan, Peningkatan Kapasitas, Pembinaan Kelompok, Relawan, RPK Perusahaan
- Patroli Udara
- Teknologi Modifikasi Cuaca
- Pembuatan Kanal Bloking

Audit Kepatuhan Perusahaan dalam Kesiapsiagaan Pencegahan dan Pengendalian Karhutla.

2.1.1.1.3. Bencana Tanah Longsor

Tercatat 142 kejadian longsor di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 9 tahun yaitu dari Tahun 2014 hingga Tahun 2023. Berdasarkan dari data hasil pemetaan gerakan tanah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumatera Selatan, dapat diketahui bahwa potensi gerakan tanah yang melanda Provinsi Sumatera Selatan relatif cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari data yang tercatat bahwa terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki potensi gerakan tanah, dimana lokasi yang memiliki potensi sebagian besar berada pada jaringan jalan dengan jenis potensi bencana berupa longsor. Kabupaten/kota yang rawan mengalami longsor adalah Kabupaten Musi Rawas, Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam, Muara Enim, OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.

Tabel 2.12
Potensi Gerakan Tanah di Provinsi Sumatera Selatan

No	Daerah Yang Berpotensi			Jenis	Keterangan
	Kab/Kota	Kecamatan	Desa		
1	Musi Rawas	Surulangun		Longsor	Jalan raya
		Muara Rupit	Madang	Longsor	Jalan raya
			Bingin rupit	Longsor	Jalan raya
			Tanjung Beringin	Longsor	Jalan raya
		Muara Kelingi			
		Muara Beliti			
		Terawas			
2	Lahat	Pendopo	Lingge	Longsor	Kebun kopi & buah

No	Daerah Yang Berpotensi			Jenis	Keterangan
	Kab/Kota	Kecamatan	Desa		
		Tanjung Sakti	Tanjung Raya	Longsor	Kebun kopi & buah
			Tebing S. Manna	Runtuh	Jalan raya, km 10
			Pulau panas	Longsor Batu	Jalan raya, km 19,5
			Sindang Panjang	Runtuh Batu	Jalan raya, km 27
			Tanjung Sakti Lama	Longsor Batu	Jalan raya, km 2
			Ds Pulau Timun	Longsor	Jalan raya, km 8
		Pulau Pinang	Ds Tj. Mulak	Amblesan	Badan jalan 5 m
				Gejala runtuh	km 17
			Tanjung Sirih	aliran batu	Jalan raya, km 14
			Muara Seban	kompleks	Jalan raya, km 3
			Jati	longsoran	Jalan raya, km 3,3
			Kuba	longsoran	Jalan raya, km 6,4
		Kikim	Saung Naga	longsoran	Jalan raya, km 63
			Bungamas	longsoran	Jalan raya, km 15
			Gunung Kerto	longsoran	Jalan raya, km 40
			Paduraksa	longsoran	Jalan raya, km 34,5
			Gn. Kembang	longsoran	Jalan raya, km 25
		Lahat	Sugiharas	longsoran	Jalan raya, km 19,5
			Sukarame	longsoran	Jalan raya, km 18,5
		Kota Agung	Tj. Tebat	longsoran	Jalan raya, km 31,5
3	Empat Lawang	Ulu Musi	Bandaraji	Longsor	Jalan raya
			Karang Jaya	Longsor	Jalan raya
			Tangga Rasa	Longsor	Jalan raya
			Karang Dapo	Longsor	Tebing sungai
4	Pagar Alam	Tebing tinggi	Penanggungan	kompleks	Jalan raya, km 72
			Paharudipo	gejala runtuh	Jalan raya, km 56
		Dempo selatan	Sukajadi	gejala runtuh	Jalan raya, km 57
			Air Betung	gejala runtuh	Jalan raya, km 5 PA
			Mingkik	gejala runtuh	Jalan raya, km 37,5
			Krinjing	longsor	Jalan raya, km 15-18
		Dempo Utara	Krinjing	longsor	Jalan raya, km 15-18

No	Daerah Yang Berpotensi			Jenis	Keterangan
	Kab/Kota	Kecamatan	Desa		
5	Muara Enim	G. Megang	Ujanmas	longsor	Jalan raya
		Tanjung Enim	Tanjung Raja	longsor	Jalan raya
		Tanjung Agung	Darmo	longsor	Jalan raya
			Seleman	longsor	Jalan raya
			Paduraksa	longsor	Jalan raya
			Padang Bindu	longsor	Jalan raya, km 4-9
			Talang T. Benawa	Aliran tanah	Jalan raya, km 13
			Talang T. Semen	Aliran tanah	Jalan raya, km 16
		Semedo Darat Laut	Talang habibnuh	longsor	Jalan raya, km 19
			Talang keli	longsor	Jalan raya, km 23
			talang P.Rinkeh	longsor	Jalan raya, km 27-30
			Pulau Panggung	Runtuh	Jalan raya
			Padang Bindu	Runtuh	Jalan raya
			Sukaraya	Aliran tanah	Jalan raya
			Penyandingan	Aliran tanah	kebun
			Talang Gudang	longsor	Jalan raya, km 35
			Ds. P Panggung	longsor	Jalan raya, km 3 - 3,2
			Ds. Batusurau	Runtuh	Jalan raya, km 4,3
			Ds. Muarobanau	longsor	Jalan raya, km 3
			Ds. Penyandingan	longsor	Jalan raya, km 72
			Karang raja	longsor	Jalan raya, km 6
			Lingga	longsor	Jalan raya, km 12
		Semedo Darat Tengah	Ds. Sri Tanjung	longsor	Jalan raya, km 11
			Ds. Muara Tenang	longsor	Jalan raya, km 14
		Muara Enim	Karang raja	longsor	Jalan raya, km 6
			Lingga	longsor	Jalan raya, km 12
		Lawang Kidul	Karang asam	longsor	Jalan raya, km 16
		Tanjung Agung	Penyandingan	longsor	Jalan raya, km 29
			Pandan enim	Runtuh	Jalan raya, km 49
			Pulau Pinang	Runtuh	Jalan raya, km 51
			Pandan Dulang	Runtuh	Jalan raya, km 52

No	Daerah Yang Berpotensi			Jenis	Keterangan
	Kab/Kota	Kecamatan	Desa		
			Simpang Meo	longsor	Jalan raya, km 56
6	OKU	Pengandonan		longsor	Jalan raya
7	OKU Timur	Martapura		longsor	Jalan raya
8	OKU Selatan	Muara dua		longsor	Jalan raya
		Banding agung	Ds Mekakau hilir	Aliran tanah	Jalan Desa
		Pulau beringin	P Bgin- Ulu Danau	Aliran tanah	Jalan raya
			Gunung Batu	Runtuh Batu	Jalan raya
			Pagar agung	longsoran	Jalan raya
			Wates	Runtuh Batu	Jalan Desa

Sumber : Pemetaan Gerakan Tanah Dinas Pertambangan dan Energi

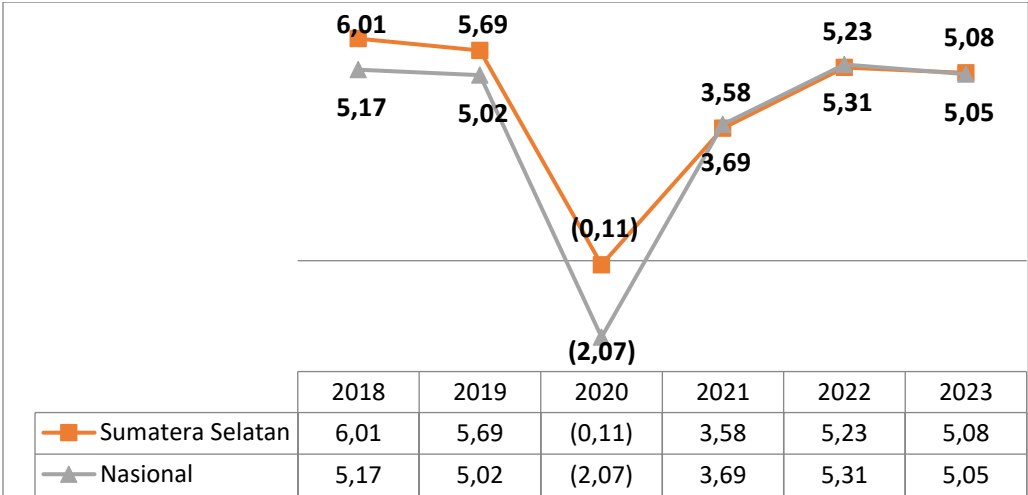
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,08 persen tetap tumbuh kuat kendati melambat dibandingkan dengan tahun 2022 yang tumbur sebesar 5,23 persen. Hal ini sejalan dengan peningkatan mobilitas yang signifikan pada tahun 2022 setelah kondisi pandemic Covid-19 mulai terkendali. Pertumbuhan tahun 2023 ini berada diatas nasional yang sebesar 5,05 persen.

Gambar 2.15
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2023



Sumber: BPS Tahun 2024

Terlihat hampir seluruh kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan tertinggi. Pertumbuhan sektoral tertinggi terjadi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencapai 13,14 persen. Adapun kategori

yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sektoral adalah kategori jasa Kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi -0,02 persen.

Pada kategori yang mendominasi perekonomian yakni kategori pertambangan dan penggalian memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik yakni sebesar 7,89 persen dan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceranm reparasi mobil dan sepeda motor yang menyumbang kontribusi ekonomi daerah terbesar kedua memiliki capaian 5,04 persen.

Tabel 2.13
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2018-2023

KATEGORI	Lapangan Usaha	Pertumbuhan						Distribusi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,33	3,34	1,75	2,91	3,82	2,15	14,84	14,48	15,22	15,12	13,23	13,10
B	Pertambangan dan Penggalian	9,09	8,11	-4,08	5,35	6,27	7,89	20,17	20,33	18,35	19,92	27,64	26,61
C	Industri Pengolahan	5,4	4,82	0,72	2,3	4,39	3,69	19,51	19,37	19,81	19,46	17,5	17,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,85	10,29	14,67	5,76	1,46	4,4	0,13	0,13	0,15	0,15	0,13	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,96	7,46	4,83	-4,69	0,66	0,33	0,12	0,12	0,13	0,12	0,10	0,10
F	Konstruksi	5,59	3,34	-0,01	-0,02	1,27	3,55	12,99	12,55	12,5	12	10,64	10,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,09	8,22	-1,34	5,79	10,41	7,60	12,95	13,54	13,65	13,52	12,95	13,45
H	Transportasi dan Pergudangan	7,36	8,3	-5,91	-1,86	11,73	7,48	2,37	2,48	2,34	2,14	2,21	2,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,15	15,34	-7,21	4,43	14,67	13,14	1,76	1,97	1,88	1,83	1,77	1,91
J	Informasi dan Komunikasi	7,73	8,15	12,79	6,04	8,12	6,35	2,85	2,91	3,27	3,22	2,90	2,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,78	-1,44	1,64	4,19	-0,6	4,60	2,54	2,36	2,38	2,39	2,08	2,07
L	Real Estate	7,95	8,03	2,24	5,81	5,23	4,28	3,08	3,19	3,33	3,31	2,9	2,87
M,N	Jasa Perusahaan	9,51	9,57	-2,08	0,6	2,9	2,03	0,13	0,14	0,14	0,13	0,11	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,7	1,09	4,17	3,88	3,7	3,73	2,85	2,67	2,89	2,79	2,46	2,43
P	Jasa Pendidikan	2,72	4,73	-1,5	6,57	2,24	2,23	2,36	2,35	2,4	2,39	2,07	2,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,56	9,57	10,14	5,63	4,15	-0,02	0,59	0,62	0,71	0,71	0,62	0,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,06	7,77	5,23	0,93	2,05	1,95	0,76	0,79	0,85	0,8	0,7	0,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,01	5,69	-0,11	3,58	5,23	5,08	5,23	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2023

Pada tahun 2023, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah:

- 1) Pertambangan dan Penggalian sebesar 26,61 persen;
- 2) Industri Pengolahan sebesar 17,84 persen;
- 3) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor sebesar 13,45 persen

- 4) Pertanian, Kehutanan an Perikanan sebesar 13,10 persen; dan
- 5) Konstruksi sebesar 10,69 persen.

Pergeseran lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2018-2023

Rankin g	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terbesar Tahun 2018-2023					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Pertambanga n dan Penggalian (20,17%)	Pertambanga n dan Penggalian (20,33%)	Industri Pengolahan (19,81%)	Pertambanga n dan Penggalian (19,92%)	Pertambanga n dan Penggalian (27,64%)	Pertambanga n dan Penggalian (26,61%)
II	Industri Pengolahan (19,51%)	Industri Pengolahan (19,37%)	Pertambanga n dan Penggalian (18,35%)	Industri Pengolahan (19,46%)	Industri Pengolahan (17,50%)	Industri Pengolahan (17,84%)
III	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,84%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,48%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,22%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,12%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,23%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,45%)
IV	Konstruksi (12,99%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,54%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,65%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,52%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,10%)
V	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Konstruksi (12,55%)	Konstruksi (12,50%)	Konstruksi (12,00%)	Konstruksi (10,64%)	Konstruksi (10,69%)

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2023

Berdasarkan Tabel di atas, pertumbuhan ekonomi dan distribusi menurut lapangan usaha Tahun 2018-2023, dimana dari tahun 2018 sampai dengan 2019 posisi tertinggi berada di sektor pertambangan dan penggalian dan sempat tergantikan menjadi sektor industri pengolahan pada tahun 2020 yang dikarenakan gejolak ekonomi global pada masa

Pandemi Covid-19. Adapun pada tahun 2021-2023, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian juga meningkat signifikan akan tetapi di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 26,61 persen.

Tabel 2.15
PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 (Milyar Rupiah) (ADHB)

Lapangan Usaha Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Milyar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	65.661,81	68.961,23	72.602,28	78.261,41	82.409,97
B. Pertambangan dan Penggalian	92.166,09	83.282,99	103.801,70	163.503,49	167.379,23
C. Industri Pengolahan	87.834,52	89.705,82	94.212,92	103.515,14	112.204,81
D. Pengadaan Listrik dan Gas	575,06	673,04	727,68	751,15	800,02
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	557,98	606,00	594,96	604,09	614,14
F. Konstruksi	56.906,62	56.977,95	58.864,44	62.954,78	67.278,81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	61.412,85	62.324,46	66.480,85	76.631,82	84.643,23
H. Transportasi dan Pergudangan	11.223,42	10.668,95	10.495,41	13.081,86	15.482,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.937,50	8.519,35	8.933,41	10.470,48	12.044,55
J. Informasi dan Komunikasi	13.177,44	14.936,51	15.852,29	17.142,47	18.257,14
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10.716,05	10.878,28	11.728,23	12.283,33	13.028,56
L. Real Estat	14.462,11	15.202,63	15.984,21	17.127,44	18.072,53
M,N. Jasa Perusahaan	615,14	616,52	623,07	663,62	698,52
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	12.100,89	13.181,31	13.653,40	14.530,97	15.276,58
P. Jasa Pendidikan	10.636,67	10.928,19	11.676,22	12.222,59	12.746,35
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.820,44	3.254,87	3.473,37	3.691,86	3.799,28
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3.598,13	3.889,29	3.947,37	4.166,98	4.363,52
Produk Domestik Regional Bruto	453.402,71	454.607,40	493.651,91	591.603,48	629.099,66

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Jika dilihat dari perkembangan PDRB sektoral atas dasar harga berlaku dari tahun 2019-2023, dari sisi nilai terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tujuh belas sektoral lapangan usaha. Tahun 2019 nilai PDRB ADHB sebesar 453.402,71 Miliar Rupiah meningkat menjadi 629.099,66 Miliar Rupiah tahun 2023.

Tabel 2.16
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2018-2023 (Miliar Rupiah)

Kategori	ADHB Per Kategori (Miliar Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	277.771,06	296.904,98	296.555,35	307.655,30	347.794,20	381.441,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.358,15	7.240,99	6.748,58	7.130,46	8.067,44	8.968,84
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	32.460,27	36.686,87	31.995,00	34.055,60	34.163,92	37.028,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	157.634,55	160.152,72	162.651,12	165.435,57	182.083,24	191.036,81
5. Perubahan Inventori	-972,55	-731,37	-1.972,33	380,65	-2,48	2,51
6. Net Ekspor Brang dan Jasa	-53.859,32	-46.851,48	-40.420,32	-22.000,73	17.960,79	10.622,20
Produk Domestik Regional Bruto	419.392,16	453.402,71	456.607,40	493.636,85	590.067,10	629.099,66

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Selatan tahun 2018-2022 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 277.771,06 miliar rupiah dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 381.441,02 miliar rupiah. Komponen penyumbang terbesar kedua adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang pada tahun 2018 sebesar 157.634,55 miliar rupiah dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 191.036,81 miliar rupiah namun komponen ini kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Tabel 2.17
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran, 2018-2023 (Miliar Rupiah)

Kategori	ADHK Per Kategori (Miliar Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	183.420,98	190.641,45	186.943,08	190.560,72	201.978,44	212.618,53
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4.563,10	5.009,23	4.710,91	4.806,55	5.067,13	5.410,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21.604,63	22.801,46	19.869,06	20.444,95	20.691,85	21.746,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	111.301,18	113.186,34	114.605,19	111.007,10	108.306,92	110.986,58
5. Perubahan Inventori	-227,60	-319,38	-1.331,43	54,85	-108,83	10,21
6. Net Ekspor Brang dan Jasa	-22.178,22	-15.854,35	-9.667,59	-468,99	7.524,36	10.138,55
PDRB	298.484,07	315.464,75	315.129,22	326.405,18	343.459,88	360.911,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sumatera Selatan tahun 2018-2023 memiliki tren positif dan selalu mengalami

peningkatan tiap tahunnya, sama seperti halnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB juga adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 183.420,98 miliar rupiah pada tahun 2023 meningkat menjadi 212.618,53 miliar rupiah. Begitu juga dengan komponen penyumbang terbesar kedua yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto dimana pada tahun 2018 sebesar 111.301,18 miliar rupiah dan pada tahun 2023 menjadi 110.986,58.

Laju Inflasi

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 2 kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Desember 2023 terjadi inflasi yoy sebesar 3,17 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 116,48 pada Desember 2023. Adapun tingkat inflasi *month to month* (mtm) Desember 2023 sebesar 0,15 persen dan tingkat inflasi *year to date* (ytd) Desember 2023 sama dengan inflasi yoy sebesar 3,17 persen.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 7,22 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 115,35 pada Desember 2022 menjadi 123,68 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 2,20 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: beras sebesar 0,781 persen; cabai merah sebesar 0,416 persen; dan rokok kretek filter sebesar 0,209 persen.

Kelompok pakaian dan alas kaki pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 1,42 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 110,08 pada Desember 2022 menjadi 111,64 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,08 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: seragam sekolah anak sebesar 0,013 persen; sepatu wanita sebesar 0,009 persen; dan sepatu anak sebesar 0,008 persen.

Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 1,77 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 107,32 pada Desember 2022 menjadi 109,22 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,31 persen. Komoditas yang

dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: tarif air minum PDAM sebesar 0,300 persen; sewa rumah sebesar 0,063 persen; dan kontrak rumah sebesar 0,013 persen.

Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 0,44 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 113,42 pada Desember 2022 menjadi 113,92 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,02 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: pengharum cucian/pelembut sebesar 0,014 persen; panci dan lemari pakaian masing-masing sebesar 0,008 persen.

Kelompok kesehatan pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 1,34 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 108,52 pada Desember 2022 menjadi 109,97 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,04 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: obat dengan resep sebesar 0,035 persen; tarif *check up* sebesar 0,005 persen; obat batuk dan alat KB lainnya masing-masing sebesar 0,001 persen.

Kelompok transportasi pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 0,07 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 120,34 pada Desember 2022 menjadi 120,43 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,01 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: tarif kendaraan travel sebesar 0,015 persen; mobil sebesar 0,007 persen; dan angkutan antar kota sebesar 0,006 persen.

Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 0,39 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 101,80 pada Desember 2022 menjadi 102,20 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,02 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: biaya pulsa ponsel sebesar 0,017 persen; biaya jaringan saluran TV dan telpon selular masing-masing sebesar 0,001 persen.

Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 0,53 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 116,25

pada Desember 2022 menjadi 116,87 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,01 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: kertas HVS dan buku tulis bergaris masing-masing sebesar 0,003 persen; pulpen/ballpoint dan pensil hitam masing-masing sebesar 0,002 persen.

Kelompok pendidikan pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 2,85 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 114,86 pada Desember 2022 menjadi 118,13 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,15 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu: sekolah menengah atas sebesar 0,076 persen; bimbingan belajar sebesar 0,047 persen; dan kursus bahasa asing sebesar 0,011 persen.

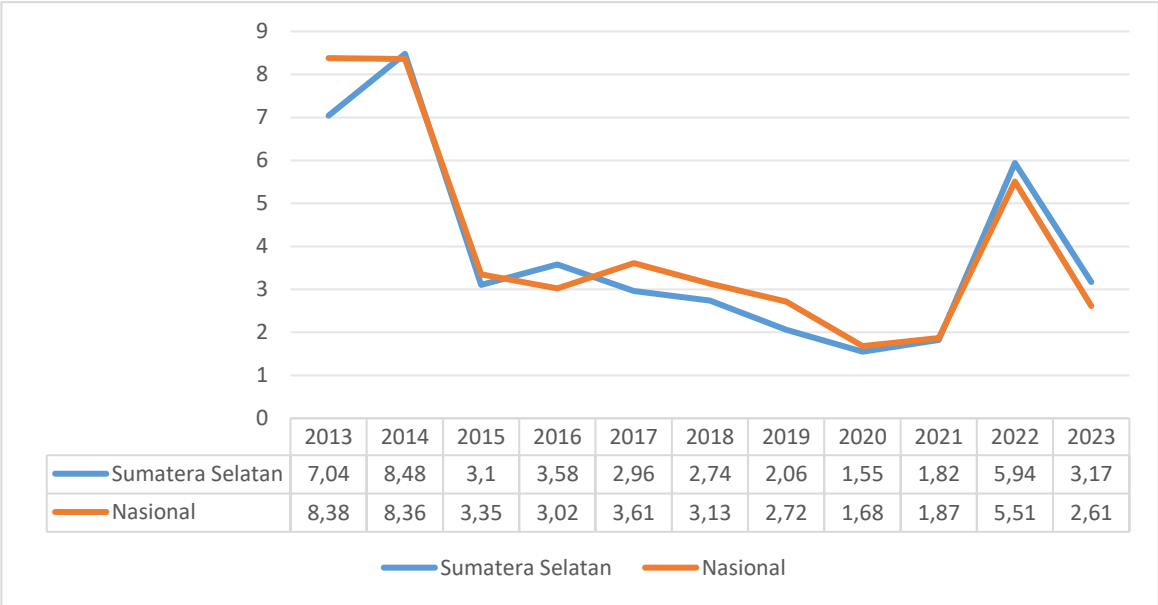
Kelompok penyediaan makanan dan minuman pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 1,28 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 110,90 pada Desember 2022 menjadi 112,32 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2023 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,10 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu : pempek sebesar 0,020 persen; ayam goreng dan kue kering berminyak masing-masing sebesar 0,014 persen.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 3,74 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 119,11 pada Desember 2022 menjadi 123,56 pada Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 0,23 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu : emas perhiasan sebesar 0,108 persen; sabun mandi sebesar 0,038 persen; dan pasta gigi sebesar 0,022 persen.

Tren inflasi Provinsi Sumatera Selatan mayoritas selalu berada di bawah inflasi nasional tetapi di tahun 2022 dan 2023 angka inflasi berada diatas nasional. Puncak inflasi tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,48 persen (*yoy*), khusus tahun 2014 kenaikan inflasi Sumsel meningkat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi di pertengahan triwulan IV 2014. Pada tahun 2015 inflasi menurun menjadi 3,10 persen hingga tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup pesat dari tahun 2021 sebesar 1,82 persen hingga mencapai angka 5,94 dan pada tahun 2023 sebesar 3,17

persen Angka Inflasi Sumatera Selatan telah melebihi angka Inflasi di Nasional.

Gambar 2.16
Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2012-2023

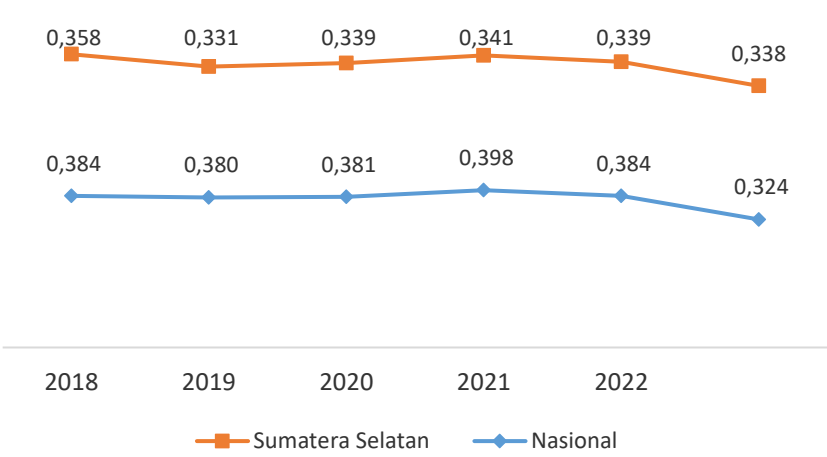


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Gini Ratio

Gini Ratio Sumatera Selatan pada kurun waktu 2018-2023 mengalami fluktuasi dan masih tergolong tinggi, tetapi dalam satu tahun terakhir atau pada periode September 2021-September 2023 angka gini ratio mengalami penurunan menjadi sebesar 0,338.

Gambar 2.17
Gini Ratio Sumatera Selatan Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

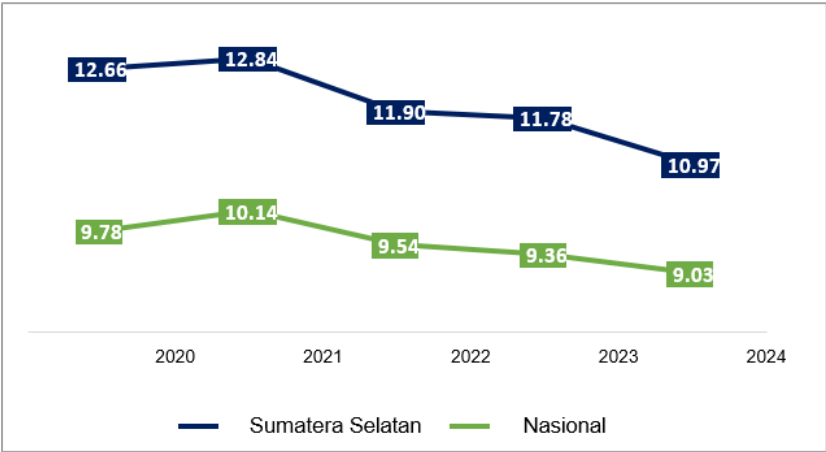
Gini Ratio Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 0,339 keadaan September 2022 menjadi 0,338 keadaan September 2023 atau turun 0,001 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Sumatera Selatan melalui program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat telah mulai menampakkan hasil walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan cukup berfluktuatif dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari 12,66 persen pada tahun 2020 menjadi 10,97 persen pada tahun 2024. Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,081 juta penduduk pada tahun 2020 menjadi 0,984 juta penduduk pada tahun 2024. Meskipun angka kemiskinan menurun, upaya pengentasan kemiskinan masih terus dilakukan agar Provinsi Sumatera Selatan terlepas dari masalah kemiskinan. Dalam target RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026, pada tahun akhir perodesasi RPD persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ditargetkan menurun menjadi satu digit. Sehingga, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus bersinergi untuk menjalankan berbagai program dalam upaya pengentasan kemiskinan agar tercapai target “*zero poverty*”.

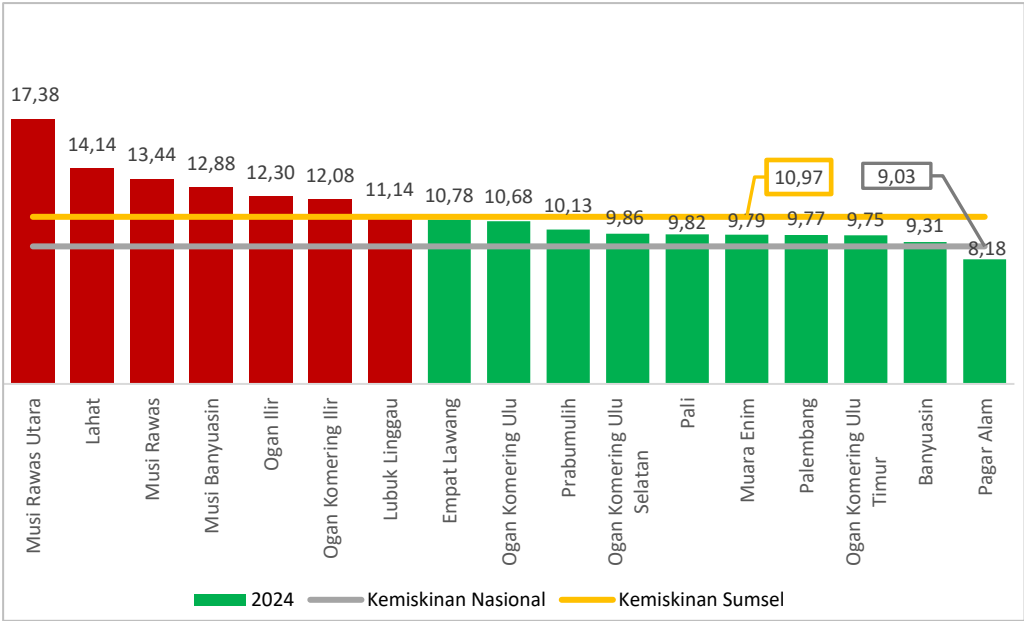
Gambar 2.18
Perkembangan Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Berdasarkan data BPS, terdapat 7 (tujuh) kabupaten/ kota yang tingkat kemiskinannya dibawah 1 digit pada tahun 2024 yaitu Kabupaten OKU Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir, Muara Enim, Palembang, OKU Timur, Banyuasin dan Pagar Alam. Tingkat kemiskinan kabupaten Musi Rawas Utara menjadi yang tertinggi yaitu 17,38 persen. Sedangkan kabupaten/ kota yang tingkat kemiskinan lebih baik dari capaian Nasional dan Provinsi adalah Kota Pagar Alam yaitu 8,18 persen.

Gambar 2.19
Perkembangan Tingkat Kemiskinan per- Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 tercatat sebanyak 984 ribu jiwa mengalami penurunan sebanyak 61,44 ribu jiwa dibandingkan tahun 2023. Angka ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi terjadi pada tahun 2020 yang tercatat sebesar 1.081,58 ribu jiwa. Sedangkan persentase penduduk miskin pada tahun 2024 mengalami penurunan setelah dua tahun sebelumnya mengalami peningkatan akibat pandemi *coronavirus disease* 2019 (covid- 19). Persentase penduduk miskin pada awal *covid-19* pada tahun 2020 sebesar 12,66 persen dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 12,84 persen. Tetapi dengan adanya pelanggaran pembatasan aktivitas masyarakat oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan penularan *Covid-19*, memicu perekonomian daerah kembali menggeliat sehingga pada tahun 2022 persentase penduduk miskin menjadi 11,90 persen dan mengalami penurunan kembali sebesar 10,97persen pada tahun 2024.

Tabel 2.18
Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan menurut
Tempat Tinggal Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2020	387,80	693,78	1.081,58	12,16	12,96	12,66
2021	402,25	711,51	1.113,76	12,36	13,12	12,84
2022	371,50	673,18	1.044,69	11,23	12,31	11,90
2023	371,75	673,93	1.045,68	11,07	12,21	11,78
2024	342,34	641,9	984,24	10,04	11,53	10,97

Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Persentase kemiskinan di perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan perkotaan baik sebelum dan saat terjadinya covid-19. Pada periode satu tahun terakhir persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,03 persen poin, begitu pula di perdesaan penduduk miskinnya menurun sebesar 0,68 persen poin. Pada tahun 2020 persentase kemiskinan di perdesaan sebesar 12,96 persen menjadi 11,53 persen pada tahun 2024, sedangkan persentase kemiskinan di perkotaan sebesar 12,16 persen pada tahun 2020 menjadi 10,04 persen pada tahun 2024.

Pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19 mampu memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa pandemi covid-19 lebih berpengaruh terhadap aktivitas dan pemulihan ekonomi di perkotaan daripada di perdesaan. Kebijakan pengetatan mobilitas dan kebijakan lainnya yang berkenan dengan mitigasi penularan covid-19 lebih terasa di perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis daripada di perdesaan.

Upaya penanggulangan kemiskinan secara Nasional sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dengan berbagai pendekatan dan kebijakan. Sebagaimana amanat konstitusi demi terciptanya masyarakat adil dan makmur, program-program pembangunan yang telah terlaksana juga selalu memberikan perhatian besar dalam pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan itu, pembangunan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan pun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Distribusi penduduk miskin menurut kabupaten/kota tidak kalah penting untuk ditelaah. Hal tersebut sangat krusial untuk melihat bagaimana sebaran penduduk miskin serta ketimpangan kemiskinan antar kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin terbesar di Kota Palembang dengan jumlah mencapai 173,59 ribu jiwa. Angka tersebut menurun sebesar 5,86 ribu dibanding tahun 2023. Persoalan kemiskinan di Kota Palembang memang terbilang lebih kompleks karena sebagai ibukota provinsi, tentu kota ini menjadi daerah tujuan migrasi dari berbagai kabupaten/ kota di Sumatera Selatan bahkan dari luar Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.19
Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota 17	Jumlah Penduduk Miskin Maret Menurut Kab/Kota (Ribu Jiwa)		Persentase Penduduk Miskin Maret Menurut Kab/Kota (Ribu Jiwa)	
	2023	2024	2023	2024
Ogan Komering Ulu	44,11	41,54	11,46	10,68
Ogan Komering Ilir	114,48	106,37	13,15	12,08
Muara Enim	73,24	66,42	10,93	9,79
Lahat	63,36	60,19	15,00	14,14
Musi Rawas	59,75	57,44	14,13	13,44
Musi Banyuasin	101,63	88,94	14,90	12,88
Banyuasin	85,88	84,36	9,58	9,31
Ogan Komering Ulu Selatan	39,3	37,81	10,36	9,86
Ogan Komering Ulu Timur	69,91	68,74	9,99	9,75
Ogan Ilir	59,33	55,49	13,28	12,30
Empat Lawang	30,78	28,42	11,80	10,78
Pali	21,72	19,79	10,91	9,82
Musi Rawas Utara	36,68	35,49	18,26	17,38
Palembang	179,45	173,59	10,22	9,77
Prabumulih	22,33	20,41	11,23	10,13
Pagar Alam	12,73	11,82	8,88	8,18
Lubuk Linggau	31,02	27,65	12,65	11,14
Sumatera Selatan	1.045,68	984,24	11,78	10,97
Nasional	25.898,55	25.219,20	9,36	9,03

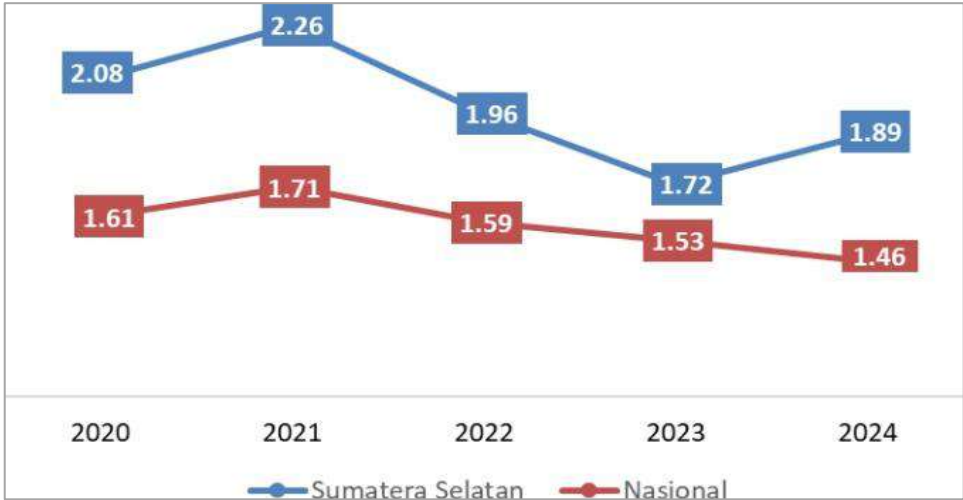
Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Selanjutnya ditinjau dari signifikansi penurunan persentase penduduk miskin antar kabupaten/ kota tidaklah sama. Hal tersebut menjadi suatu gambaran bahwa ada ketidakmerataan kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan hendaknya ditempuh melalui perbaikan ketiga komponen secara tersinergi yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Persoalan kemiskinan tidak hanya seputar jumlah dan persentase

penduduk miskin. Dimensi yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Secara umum, indeks P1 pada periode 2020- 2024 berfluktuasi. Indeks P1 mengalami penurunan dari sebesar 2,08 di tahun 2020 menjadi 1,89 di tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan P1 di tahun 2024, namun tren indeks P1 pasca adanya pandemi Covid-19 cenderung membaik. Penurunan nilai indeks P1 ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk miskin sudah mulai membaik pasca terjadi pandemi yang melanda Indonesia dan dunia.

Gambar 2.20
Tren Perkembangan Indeks Kedalaman (P1)
Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

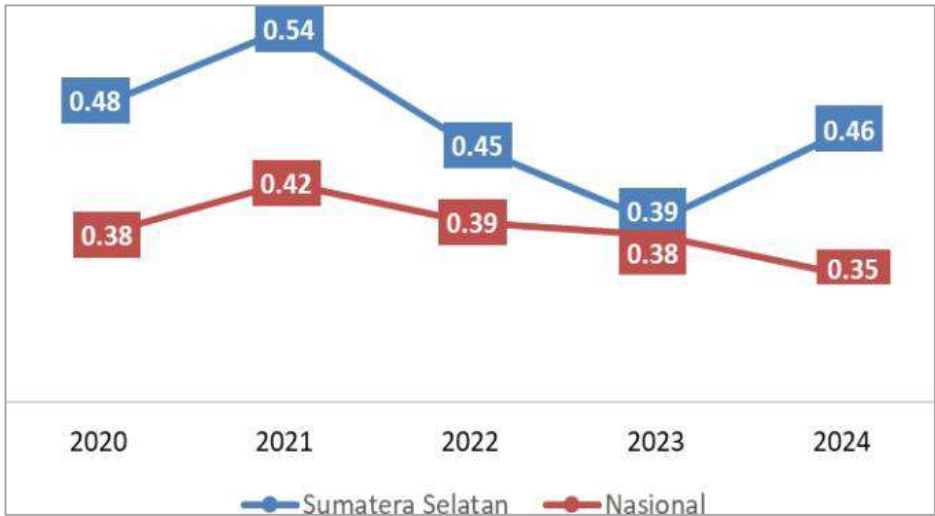


Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Demikian pula dengan indeks keparahan (P2) yang turut menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu dari 0,48 menjadi 0,46 di tahun 2024. Sama hal nya dengan indeks P1, meskipun indeks P2 Provinsi Sumatera Selatan juga menunjukkan peningkatan di tahun 2024 ini, namun sudah menunjukkan perbaikan dibandingkan pada saat adanya pandemi. Penurunan indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin semakin menurun. Fenomena itu dapat mengindikasikan bahwa intervensi program pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan cukup dinikmati secara merata di antara penduduk miskin sehingga ketimpangan pendapatan/pengeluaran di

antara mereka semakin mendekat. Namun memang masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengingat penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan yang relatif lambat turun.

Gambar 2.21
Tren Perkembangan Indeks Keparahan (P2)
Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Keadaan maret 2024, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,69 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 2,02. Sementara itu nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) untuk perkotaan sebesar 0,39 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,49. Fenomena ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap GK di perkotaan relatif lebih jauh dibandingkan daerah perdesaan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perdesaan. Dengan demikian dibutuhkan intervensi program pengentasan kemiskinan yang lebih intensif di daerah perkotaan khususnya dalam menjaga daya beli penduduk miskin.

Peningkatan nilai P1 dan P2 tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga cenderung meningkat. Fenomena ini

mengungkapkan bahwa meskipun secara persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan namun jika kita melihat lebih detil bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat miskin di dalamnya masih perlu perbaikan.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu : kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

Gambar 2.22
Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

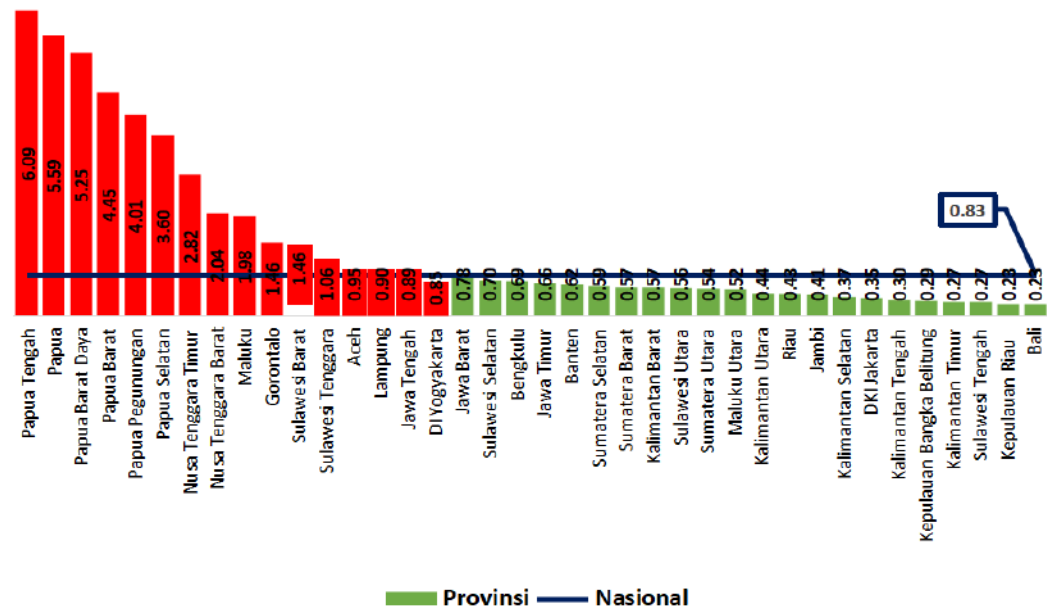


Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Untuk mengetahui jumlah dan angka miskin ekstrem setiap tahunnya digunakan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Tingkat kemiskinan ekstrem Nasional terus mengalami penurunan yang cukup baik yaitu dari tahun 2020 sebesar 2,25 persen menjadi 0,83 persen pada tahun 2024. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem per Provinsi juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Untuk Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan cukup besar yaitu 4,72 persen poin dari tahun 2020 sebesar 5,31 persen menjadi 0,59 persen pada

tahun 2024. Dengan demikian, tingkat kemiskinan ekstrem baik Nasional maupun Provinsi Sumatera Selatan sudah dibawah satu persen dan telah sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di Indonesia pada tahun 2024.

Gambar 2.23
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Per Provinsi di Indonesia Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Jika dibandingkan dengan provinsi penurunan kemiskinan ekstrem tercepat perpulau di Indonesia pada tahun 2023 sampai tahun 2024 yaitu di kawasan Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Selatan (0,70 persen poin), di kawasan Pulau Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Selatan (0,10 persen poin), di kawasan Pulau Jawa adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,39 persen poin), di kawasan Pulau Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Tengah (1,17 persen poin), di kawasan Pulau Maluku dan Papua adalah Provinsi Papua (2,08 persen poin), dan di kawasan Pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (1,11 persen poin).

Tabel 2.20
Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Per Provinsi Tahun 2023 – 2024

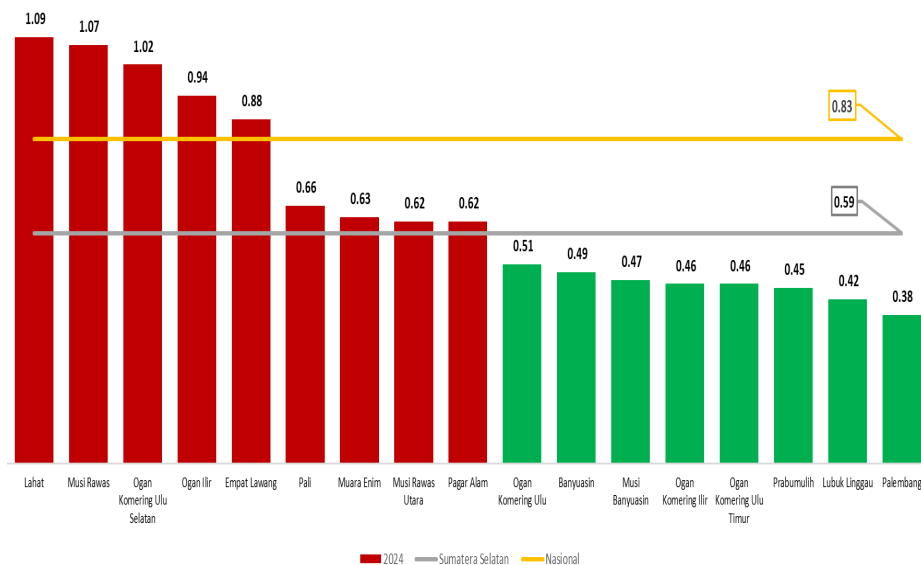
Provinsi	Maret 2023	Maret 2024	Provinsi	Maret 2023	Maret 2024
Papua Tengah		6,09	Sumatera Selatan	1,29	0,59
Papua	7,67	5,59	Sumatera Barat	0,41	0,57
Papua Barat Daya		5,25	Kalimantan Barat	0,99	0,57
Papua Barat	6,43	4,45	Sulawesi Utara	0,78	0,56
Papua Pegunungan		4,01	Sumatera Utara	0,78	0,54
Papua Selatan		3,60	Maluku Utara	0,67	0,52
Nusa Tenggara Timur	3,93	2,82	Kalimantan Utara	0,34	0,44
Nusa Tenggara Barat	2,64	2,04	Riau	0,67	0,43
Maluku	2,59	1,98	Jambi	0,81	0,41
Gorontalo	2,44	1,46	Kalimantan Selatan	0,47	0,37
Sulawesi Barat	0,75	1,46	DKI Jakarta	0,57	0,35
Sulawesi Tenggara	1,65	1,06	Kalimantan Tengah	0,35	0,30
Aceh	1,83	0,95	Kepulauan Bangka Belitung	0,24	0,29
Lampung	1,32	0,90	Kalimantan Timur	0,10	0,27
Jawa Tengah	1,11	0,89	Sulawesi Tengah	1,44	0,27
DI Yogyakarta	1,24	0,85	Kepulauan Riau	0,35	0,23
Jawa Barat	0,79	0,78	Bali	0,19	0,23
Sulawesi Selatan	1,01	0,70	Indonesia	0,83	0,83
Bengkulu	2,08	0,69			
Jawa Timur	0,82	0,66			
Banten	1,12	0,62			

Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Provinsi Sumatera Selatan masuk kedalam 26 (dua puluh enam) Provinsi yang tingkat kemiskinan ekstrem di bawah satu persen atau sekitar 68,42 persen dari total Provinsi di Indonesia dan 12 (dua belas) Provinsi yang berada diatas 1 persen kemiskinan ekstrem atau sekitar 31,58 persen total Provinsi di Indonesia.

Pada tahun 2024 hampir semua kabupaten/ kota yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari tahun 2023 kecuali Kabupaten OKU Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir, OKU Timur, Prabumulih, yang mengalami peningkatan tingkat kemiskinan ekstrem. Ada 9 kabupaten/ kota yang berada di atas capaian Nasional dan Provinsi yaitu Kabupaten Lahat, Musi Rawas, OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, Muara Enim, Musi Rawas Utara dan Pagar Alam. Sedangkan 8 Kabupaten/Kota lainnya, tingkat kemiskinan ekstremnya sudah berada di bawah capaian Nasional dan Provinsi yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Kota Prabumulih, Lubuk Linggau dan Palembang.

Gambar 2.24
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem per- Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

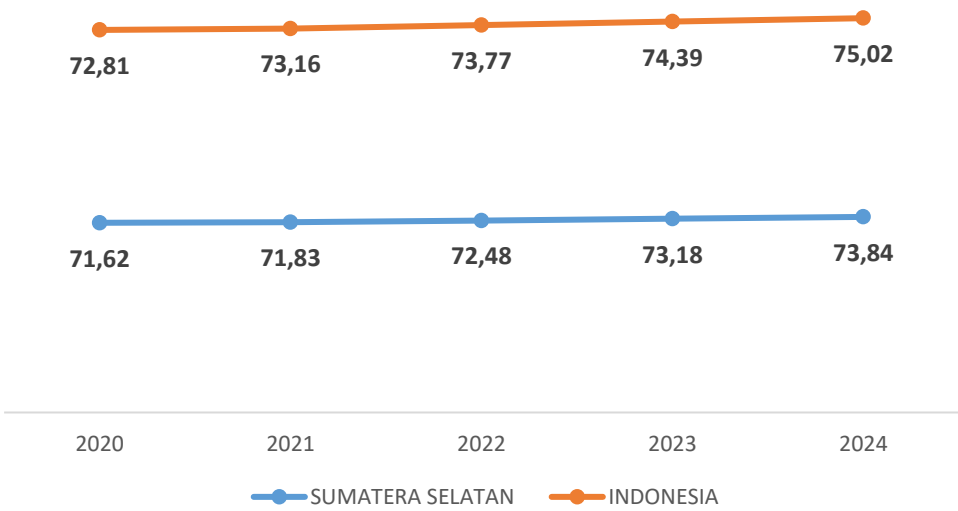


Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami kemajuan. Selama 2020-2024, IPM Sumatera Selatan rata-rata meningkat sebesar 0,77 persen per tahun, dari 71,62 pada 2020 menjadi 73,84 pada 2024 dan merupakan status IPM kategori “tinggi” walaupun capaian Provinsi masih di bawah capaian Nasional sebesar 75,02.

Gambar 2.25
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024



Sumber: BRS BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah diukur pada penduduk usia 25 tahun ke atas sebagaimana perhitungan IPM Metode baru dimana rata rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani (tidak termasuk tahun mengulang). Berdasarkan data dari BPS rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Selatan cenderung meningkat. Namun capaian Provinsi Sumatera Selatan masih di bawah capaian Nasional.

Menurut kabupaten/kota angka rata-rata lama sekolah yang tersingkat pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berada pada angka 7,19 tahun dan 7,27 tahun atau setara tahun pertama pada SMP. Sementara Kota Palembang dan Kota Prabumulih sudah mencapai rata-rata kelas 1 SMA menyusul kemudian Kota Lubuk Linggau dan Kota Pagar Alam yang sudah mencapai kelas 3 SMP. Untuk kabupaten/kota lainnya, angka rata-rata lama sekolah masih setara dengan kelas 1 sampai dengan kelas 2 SMP.

Tabel 2.21
Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota
Pada Tahun 2017-2024 (tahun)

No	Kab/kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ogan Komering Ulu	8,67	8,68	8,69	8,70	8,71	8,73	8,85	8,86
2	Ogan Komering Ilir	7,01	7,02	7,03	7,04	7,05	7,07	7,08	7,19
3	Muara Enim	7,49	7,60	7,78	7,79	7,80	7,90	8,14	8,27
4	Lahat	8,43	8,44	8,45	8,46	8,52	8,53	8,56	8,69
5	Musi Rawas	7,18	7,28	7,51	7,52	7,53	7,55	7,56	7,57
6	Musi Banyuasin	7,59	7,60	7,61	7,62	7,63	7,65	7,68	7,95
7	Banyu Asin	7,16	7,17	7,19	7,20	7,44	7,45	7,46	7,48
8	Ogan Komering Ulu Selatan	7,66	7,82	7,83	7,84	7,85	7,86	8,05	8,25
9	Ogan Komering Ulu Timur	7,12	7,27	7,54	7,55	7,56	7,80	8,07	8,08
10	Ogan Ilir	7,37	7,58	7,85	7,86	7,87	7,91	8,08	8,09
11	Empat Lawang	7,37	7,38	7,39	7,60	7,64	7,65	7,66	7,68
12	Penukal Abab Lematang Ilir	6,57	6,58	6,75	7,04	7,05	7,06	7,08	7,27
13	Musi Rawas Utara	6,44	6,45	6,50	6,84	7,09	7,26	7,50	7,51
14	Kota Palembang	10,36	10,37	10,52	10,53	10,75	10,91	10,92	10,93
15	Kota Prabumulih	9,68	9,71	9,72	9,96	9,97	10,20	10,35	10,36
16	Kota Pagar Alam	8,93	9,08	9,14	9,39	9,40	9,41	9,43	9,44
17	Kota Lubuklinggau	9,50	9,51	9,81	9,89	9,90	9,91	9,93	9,94
Sumatera Selatan		7,99	8,00	8,18	8,24	8,30	8,37	8,50	8,57
Nasional		8,10	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah pada Provinsi Sumatera selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 12,45 tahun sedangkan pada tahun 2024 sebesar 12,64 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Sementara itu, di tingkat Kabupaten/Kota, angka harapan lama sekolah yang tersingkat pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu baru 11,82 tahun dan

11,9 tahun. Sementara angka harapan lama sekolah yang terlama berada di Kota Palembang sudah mencapai 14,46 tahun.

Tabel 2.22
Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan,
2020-2024 (tahun)

Kabupaten/Kota	(Metode Baru) Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ogan Komering Ulu	12,60	12,83	12,84	12,99	13,00
Ogan Komering Ilir	11,42	11,68	11,89	11,97	11,98
Muara Enim	11,97	11,98	11,99	12,01	12,02
Lahat	12,34	12,35	12,43	12,44	12,45
Musi Rawas	12,08	12,19	12,21	12,22	12,23
Musi Banyuasin	12,00	12,29	12,30	12,31	12,33
Banyu Asin	11,75	11,77	11,95	12,09	12,34
Ogan Komering Ulu Selatan	11,75	11,76	11,78	11,79	11,82
Ogan Komering Ulu Timur	12,23	12,45	12,46	12,47	12,49
Ogan Ilir	12,30	12,31	12,32	12,41	12,42
Empat Lawang	12,06	12,07	12,08	12,10	12,11
Penukal Abab Lematang Ilir	12,05	12,17	12,30	12,49	12,50
Musi Rawas Utara	11,57	11,58	11,61	11,70	11,90
Kota Palembang	14,41	14,42	14,43	14,45	14,46
Kota Prabumulih	12,91	12,92	13,03	13,31	13,41
Kota Pagar Alam	12,85	13,05	13,24	13,49	13,50
Kota Lubuklinggau	13,37	13,38	13,39	13,55	13,69
Sumatera Selatan	12,45	12,54	12,55	12,63	12,64
Indonesia	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

C.Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni Budaya

Ragam budaya di Sumatera Selatan, secara umum terbagi dalam jenis rumah adat, pakaian, tarian juga kuliner, selain itu tata kehidupan pun memiliki kekhasan. Sebagaimana daerah lain di Pulau Sumatera, kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi juga oleh budaya melayu, Agama Islam, Agama Hindu dan yang tak bisa lepas adalah keberadaan eksistensi Kerajaan Sriwijaya.

Sejarah, Kepurbakalaan dan museum

Menilik sejarah Sumatera Selatan maka sesungguhnya di daerah ini sudah ada peradaban yang tinggi di masa pra sejarah. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya prasasti peninggalan masa pra sejarah. Ditemukannya batu megalit berumur ribuan tahun di daerah Kota

Pagaralam dan Kabupaten Lahat merupakan indikasi, berkembangnya kebudayaan masa itu. Kabupaten Lahat sendiri kini dikenal dengan sebutan daerah “sejuta megalit”.

Situs yang paling banyak dikenal adalah Situs Tinggi Hari di Kecamatan Pulau Pinang. Selain itu beberapa situs tersebar secara acak di beberapa kecamatan, hingga ke Kota Pagaralam. Situs-situs ini menarik wisatawan dengan minat khusus, diantaranya sejarawan dan peneliti. Diduga masih ada peninggalan lainnya yang masih belum ditemukan, mengingat sebaran situs yang ditemukan berada di beberapa tempat.

Kehidupan masa lalu di Provinsi Sumatera Selatan semakin diperkuat dengan ditemukannya Situs Gua Harimau yang terletak di Desa Padang Bindu, berjarak sekitar 35 kilometer dari Kota Baturaja. Situs Gua Harimau ditemukan pada tahun 2008 dan mulai dilakukan penelitian di situs ini mulai tahun 2009. Gua Harimau memiliki kondisi yang sangat ideal sebagai hunian bagi manusia masa lalu, sehingga ada banyak temuan yang didapatkan ketika meneliti Situs Gua Harimau, seperti sisa hunian, perbengkelan dan kuburan dari kebudayaan pada zaman Neolitik. Di sini juga ditemukan adanya 81 kubur manusia masa lalu. Temuan ini semakin memperkuat bahwa Sumatera Selatan kaya akan kehidupan masa purbakala.

Gambar 2.26
Batu Megalitik di situs Tinggi Hari Kabupaten Lahat,
Sumatera Selatan



Sumber foto : kompasiana.com dan mongabay.co.id

Untuk melestarikan situs dan bangunan cagar budaya, khususnya peninggalan arkeologi dari masa Kerajaan Sriwijaya, khususnya di Kawasan

Karanganyar (Palembang), Pemerintah Provinisi Sumatera Selatan sudah membangun sebuah taman yang dikenal dengan sebutan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, seluas 20 Ha yang berada dalam kawasan Karanganyar yang merupakan situs yang paling penting dalam perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Taman ini menyajikan data lengkap Kerajaan Sriwijaya mulai artefak, replika, foto, peta dan koleksi etnografi.

Gambar 2.27
Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya



Sumber foto : kamerabudaya.com

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sudah berupaya melakukan peningkatan peranan seni dan budaya terutama untuk meningkatkan pariwisata di Sumatera Selatan. Tahun 2023 sudah dilakukan pendataan terhadap bangunan sebagai cagar budaya. Dari hasil pendataan terdapat 771 Cagar Budaya baik situs maupun bangunan yang berupa gedung kantor, rumah, museum, bunker peninggalan jepang, rumah ibadah, pemakaman, candi dan lain-lain.

Tabel 2.23
Daftar Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
1.	Masjid Lawang kidul
2.	Gedung Ledeng/ Kantor Walikota
3.	Balai Prajurit
4.	Masjid Jamik Sungai Lumpur
5.	Masjid Kiyai Merogan
6.	Kampung Kapitan
7.	Kampung Arab Al Munawar

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
8.	Museum Tekstil
9.	SMP Negeri 1 Palembang
10.	Masjid Suro (Al- Mahmudiyah)
11.	Rumah Residen Palembang
12.	Bunker Jepang AKBP H. Umar
13.	Pasar Cinde
14.	Kantor Pos Palembang
15.	R.S. Ak. Gani
16.	Rumah Assegaf 7
17.	Rumah Assegaf 6
18.	Rumah Kolonial 4
19.	Rumah Kolonial 3
20.	Rumah Assegaf 5
21.	<i>Tower Signal</i> Stasiun Kertapati
22.	Rumah Assegaf 4
23.	Rumah Assegaf 3
24.	Rumah Assegaf 2
25.	Rumah Walikota
26.	Rumah Kolonial 2
27.	Rumah Kolonial 1
28.	Kantor PT. Alwi Assegaf
29.	Rumah Tradisional 5 Ulu No.1
30.	Bunker Jakabaring
31.	Rumah Dinas PT. KAI
32.	Rumah Dinas PT. KAI
33.	Balai Diklat Rendang PT. KAI Drive III
34.	Mess Diponegoro No. 12
35.	Mess Diponegoro No. 10
36.	Resort Listrik Umum III. Kertapati
37.	Rumah Assegaf 1
38.	MONPERA (Monumen Perjuangan Rakyat)
39.	Dipo Lokomotif
40.	StasiunKertapati
41.	Balai Pertemuan
42.	Bunker Charitas
43.	Rumah Al Munawar 7
44.	Rumah Al Munawar 6
45.	Rumah Al Munawar 5
46.	Rumah Al Munawar 4
47.	Rumah Al Munawar 3
48.	Rumah Al Munawar 1
49.	Rumah Kapitan 5
50.	Rumah Kapitan 4
51.	Rumah Kapitan 3
52.	Rumah Kapitan 2
53.	Rumah Kapitan 1
54.	Kantor Telkom
55.	Bangunan Jacobson Van Den Berg
56.	RS. Charitas
57.	Gereja PIB Immanuel
58.	Bangunan Pasar Kuto Batu 4
59.	Bangunan Pasar Kuto Batu 3
60.	Bangunan Pasar Kuto Batu 2
61.	Bangunan Pasar Kuto Batu 1
62.	Bunker Jepang Yayasan Karya Ibu
63.	Bunker Jepang Sumisno
64.	Rumah Batu 5
65.	Rumah Batu 4
66.	Rumah Batu 3
67.	Rumah Batu 2
68.	Rumah Batu 1

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
69.	Rumah Tua 3 Seberang Ulu
70.	Rumah Tua 2 Seberang Ulu
71.	Rumah Tua 1 Seberang Ulu
72.	Bangunan Sekanak 14
73.	Bangunan Sekanak 13
74.	Bangunan Sekanak 12
75.	Bangunan Sekanak 11 / Bangunan Gudang
76.	BangunanSekanak 10 / Rumah Samtung
77.	Bangunan Sekanak 9
78.	Bangunan Sekanak 8
79.	Bangunan Sekanak 7
80.	Bangunan Sekanak 6 / Toko Pisang
81.	Bangunan Sekanak 5 / Bank BRI
82.	BangunanSekanak 4 / PT.HOKTONG
83.	Rumah Samping Museum SMB II
84.	Bangunan Sekanak 3
85.	Bangunan Sekanak 2
86.	Bangunan Sekanak 1
87.	Rumah Tradisional Temon 4
88.	Rumah Tradisional Temon 3 / Hasyim Ning
89.	Bunker Joko
90.	Bangunan Temon 3
91.	Bangunan Temon 2
92.	Bangunan Temon 1
93.	Rumah Limas Cek Mas / NyimasZuchro
94.	Klenteng Tri Dharma Chandra Nadi (SoeiGoeat Kiong)
95.	Rumah Limas Jaya Laksana
96.	Hotel Musi
97.	Pasar Cinde
98.	Benteng Kuto Besak
99.	Masjid Agung Palembang
100.	Makam Keramat Kiai Marogan atau Kiai Muara Ogan
101.	Masjid Kiai Marogan
102.	Rumah Ulu
103.	Rumah Limas ‘ PangeranSyarif Abdulrachaman Alhabsi ‘
104.	Rumah Limas Masayu Hj. Imna
105.	Rumah Gudang Mgs H. Anang Akib
106.	Rumah Limas Rumah Bari
107.	Gedung PD Budiman 1940
108.	Masjid Sultan Agung
109.	Rumah Limas PangeranSyarif Ali
110.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrاد dan Al-Balajam(Rumah 7)
111.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrاد dan Al-Balajam(Rumah 6)
112.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrاد dan Al-Balajam(Rumah 5) , Ibu Bariah
113.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrاد dan Al-Balajam(Rumah 4) Jamaludin Basuaid
114.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrاد dan Al-Balajam (Rumah 3)
115.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrاد dan Al-Balajam(Rumah 2), Samsuri
116.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrاد dan Al-Balajam(Rumah 1)
117.	Museum Pahlawan Nasional Mayor Jend TNI (Purn) Dr. AK. Gani
118.	Bekas Gedung BP-7 Palembang
119.	Rumah Kapiten Cina Coa Ham Hin
120.	Museum Sultan Mahmud Badaruddin II
121.	Bangunan 1930
122.	Toko Bangunan Maju jaya
123.	Toko Surya
124.	Toko BesiSaudara
125.	Rumah Limas Lamo
126.	Rumah Limas H. Murod
127.	Masjid Al-Amanah

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
128.	Rumah Limas Hj. Ningyu
129.	Rumah Limas Nangcik Hasan
130.	Rumah limas A. Tholib Abu bakar
131.	Rumah Limas Kaakapudin
132.	Rumah singgah Soekarno
133.	Rumah Limas HjNurjanah
134.	Rumah Limas Abdul karim
135.	Rumah Limas Cikya
136.	Rumah Tinggal (Rumah Bari / Rumah Lama)
137.	Rumah Markas Jepang
138.	Rumah Limas
139.	Rumah Tinggal Kampung Al – Bahrad dan Al- Balajam Rumah 2 Samsuri
140.	Makam Candi Welan (Makam Susuhunan Abdurrachman)
141.	Makam Kambang Koci
142.	Makam Candi Angsoko
143.	Makam Ratu Bagus Kuning
144.	Jembatan Ampera
145.	Makam Ahmad bin Syech
146.	Makam Pangeran Syarif Ali
147.	Kompleks Makam Sabokingking
148.	Makam Pangeran Prabu Diradja H. Abdullah Bin Susuhunan Mahmud Badarrudin Raden Hasan
149.	Makam Ki Ronggo Wirosentiko
150.	Makam Kemas Haji Muhammad Alim (Mertuo SMB II) Pahlawan Nasional Indonesia
151.	Makam Pangeran Ario Subekti Bin PangeranSuryoWikromoSubekti
152.	Makam Putro Dinato Ali
153.	Makam Ratu Pembayun
154.	Makam Sultan Agung Komarrudin Sri Teruno
155.	Makam Pangeran Mangkubumi Nebing Kapal
156.	Makam PangeranKramajayo Perdana Menteri
157.	Jembatan Kertapati Tahun 1939
158.	Kompleks Makam Sabokingking
159.	Situs Karanganyar
160.	Makam Putri Kembang Dadar
161.	Makam Raja Batu Api
162.	Makam Raja Sigentar Alam
163.	Candi Gede Ing Suro 6
164.	Candi Gede Ing Suro 5
165.	Candi Gede Ing Suro 4
166.	Candi Gede Ing Suro 3 / Bagian Bawah
167.	Candi Gede Ing Suro 3 / Bagian Atas
168.	Candi Gede Ing Suro 2
169.	Candi Gede Ing Suro 1
170.	Pemakaman Mansyur
171.	Makam Raden Nangling
172.	Makam Panembahan
173.	Kompleks Makam Kesultanan Palembang
174.	Kompleks Makam Gede Ing Suro
175.	Komplek Makam Kesultanan Palembang Kawah Tekurep
176.	Kompleks Makam Sabokingking
177.	Makam Madi Alit dan Goa Jepang
178.	Masjid Agung Palembang
179.	Klenteng Tri Darma Chandra Nadi (Goei Goeat Kiong)
180.	Bangunan Pasar Kuto Batu I
181.	Bangunan Jacobson Van Den Berg
182.	Bangunan Pasar Kuto Batu III
183.	Rumah Limas Cek Mas/Nyim as Zuchro
184.	Hotel Musi
185.	Bangunan Pasar Kuto Batu IV
186.	Bangunan Temon I

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
187.	Bangunan Temon II
188.	Bangunan Temon III
189.	Bangunan Pasar Kuto Batu II
190.	Rumah Tradisiona l Temon 3/ Hasyim Ning
191.	Rumah Limas Jaya Laksana
192.	Bunker Joko
193.	Gereja BIP Immanuel
194.	RS. Charitas
195.	BangunanSekanak 1
196.	Rumah Tradisiona l Temon 4
197.	Kantor Telkom
198.	Makam Ahmad bin Syech
199.	Makam Pangeran Syarif Ali
200.	Kompleks Makam Kesultanan Palembang
201.	Makam Panembah an
202.	BangunanSekanak 3
203.	BangunanSekanak 2
204.	Rumah Samping Museum SMB II
205.	Candi Gede Ing Suro 5
206.	Makam Raden Nangling
207.	BangunanSekanak 4/ PT. HOKTONG
208.	Bangunan Sekanak 5/ Bank BRI
209.	Bangunan Sekanak 6/Toko Pisang
210.	BangunanSekanak 7
211.	Bangunan Sekanak 10/Rumah Samtung
212.	Bangunan Sekanak 9
213.	Bangunan Sekanak 8
214.	Kepala Arca Boddhisatwa
215.	BangunanSekanak II/ Bangunan Gudang
216.	JembatanKertapatiTahun 1939
217.	Rumah Tinggal Kampung Al – Bahrad dan Al- Balajam Rumah 2 Samsuri
218.	Bangunan Sekanak 14
219.	Palung Batu
220.	Makam Keramat Kiai Marogan atau Kiai Muara Ogan
221.	Prasasti Swarnnapattra No. Inv. 04.13
222.	Masjid Kiai Marogan
223.	Prasasti Boom Baru
224.	Rumah Tua 3 Seberang Ulu
225.	Celengan Makam
226.	Arca Budha Bingin Jungut
227.	Mimbar
228.	Arca Budha Wairocana
229.	Celengan Masjid
230.	Rumah Limas PangeranSyarif Ali
231.	Satu Set peralatan makan hadiah dari ibu wakil Presiden Ibu Rachmi Hatta
232.	Lampu Gantung
233.	Setrika Arang
234.	Tempatminum Bir Putih
235.	Mesin Singer Duduk (MesinJahittangan)
236.	Bokor
237.	Selendang Padang Warna Merah
238.	Bangunan Sekanak 13
239.	Rumah Tua 2 Seberang Ulu
240.	Sandaran Tiang Bendera dan Sandaran Tongkat Khotib
241.	Arca Ibu Mendukung Anak
242.	Makam Candi Angsoko
243.	Tepak Sirih
244.	Radio
245.	Satu Set Keramikdari Istana Negara
246.	Lukisan Sungai Sekanak

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
247.	Rumah Batu 1
248.	Bangunan Sekanak 12
249.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al- Balajam(Rumah 7)
250.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al- Balajam(Rumah 5) , Ibu Bariah
251.	Museum Pahlawan Nasional Mayor Jend TNI (Purn) Dr. AK. Gani
252.	Rumah Kapiten Cina Coa Ham Hin
253.	Lukisan Gunung Jempol
254.	Mobil Jeep
255.	Lukisan Memotong Padi
256.	Kepala Arca Awalokiteswara No. Inv. 04.87
257.	Prasasti SwarnnapaTtra No. Inv.04.13
258.	Bekas Gedung BP-7
259.	Sepeda
260.	Pemakaman Mansyur
261.	Meja Kerja
262.	Koper Bekas
263.	Rumah Tua 1 Seberang Ulu
264.	CupuTembako
265.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al- Balajam(Rumah 6)
266.	Dua Kursi Tamu
267.	Kain Batik Tulis Motif Naga
268.	Arca Buddha Wairocana
269.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al- Balajam(Rumah 4) Jamaludin Basuaid
270.	Lukisan Puteri
271.	Rumah Limas Masayu Hj. Imna
272.	Peluru
273.	Rumah Batu 2
274.	Meriam Lela 9
275.	Bukit Siguntang
276.	Meriam Lela 13
277.	Gedung PD Budiman 1940
278.	Arca Budha Tingkip
279.	Makam Pangeran Mangkubu mi Nebing Kapal
280.	BunkerJepang
281.	Bunker jepang Yayasan Karya Ibu
282.	Makam PutroDinato Ali
283.	Meriam Lela 8
284.	Rumah Gudang Mgs H. Anang Akib
285.	Meriam (ke 1)
286.	Makam Kemas Haji Muhammad Alim (Mertua SMB II) Pahlawan Nasional Indonesia
287.	Meriam Lela 4
288.	Kantor Pos Palembang
289.	Makam Pangeran Ario Subekti Bin Pangeran Suryo Wikromo Subekti
290.	Masjid Lawang Kidul
291.	Rumah Limas Rumah Bari
292.	Rumah Batu 3
293.	Meriam Lela 14
294.	Meriam Lela 11
295.	Meriam Lela 7
296.	Rumah Batu 4
297.	Rumah Batu 5
298.	R.S. Ak. Gani
299.	Makam Sultan Agung Komarrudi n Sri Teruno
300.	Gedung Ledeng/Ka ntorWalikota
301.	Makam Pangeran Prabu Diradja H. Abdullah Bin Susuhunan Mahmud Badarrudi n Raden Hasan
302.	Meriam (ke 4)
303.	Meriam Lela 3

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
304.	Makam Candi Welan (Makam SusuhunanAbdurrach man)
305.	Makam Putri Kembang Dadar
306.	Meriam Lela 12
307.	Mata Uang Logam 1 Sen Tahun 1945
308.	Makam Kambang Koci
309.	Bunker Jepang Sumisno
310.	Jalan Talang Keranggo
311.	Situs Karanganyar
312.	Makam Ki Ronggo Wirosentiko
313.	Meriam Lela 12
314.	Meriam Lela 5
315.	BangunanSekanak 13
316.	Meriam Lela 6
317.	Komplek Makam Kesultana n Palembang
318.	SMP Negeri 1 Palembang
319.	Satu Set Keramikdari Istana Negara
320.	Museum Tekstil
321.	Jembatan Ampera
322.	Bunker Jepang AKBP H. Umar
323.	Kampung Arab Al Munawar
324.	Makam Ratu Bagus Kuning
325.	Masjid Suro (Al- Mahmudiy ah)
326.	Kitab Shirotol Mustaqim
327.	Masjid Sultan Agung
328.	5 Sen
329.	Rumah Assegaf 6
330.	Lampu Gantung
331.	Rumah Asessgaf 7
332.	Kitab Tauhid
333.	Rumah Asessegaf 4
334.	Al-Quran Kuno
335.	Rumah Residen Palembang
336.	Kampung kapitan
337.	NaskahTanduk
338.	Masjid Jamik Sungai Lumpur
339.	Rumah Kolonial 3
340.	5 Sen
341.	Tower Signal StasiunKertapati
342.	Rumah Asessegaf 5
343.	Meriam Lela 2
344.	GELUMP AI
345.	Rumah Asessegaf 3
346.	Rumah Kolonial 1
347.	Rumah Kolonial 4
348.	Meriam Lela 1
349.	Kantor PT. Alwi Assegaf
350.	Surat Bolo
351.	Meriam Besar 1
352.	Rumah Walikota
353.	Kitab Undang – Undang Simbur Cahaya
354.	Gelumpai Billah
355.	Khahas
356.	Rumah Assegaf 2
357.	Arca Singa
358.	Meriam Besar 2
359.	Hikayat Dewa Mendu
360.	Naskah Jaya Sampurna
361.	Rumah Kolonial 2
362.	Piagam Padang Ratu
363.	Gelumpai BikuSuci
364.	Kitab Smaradahana
365.	Kitab Syahwatain

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
366.	Makam Raja Sigentar Alam
367.	Kitab Sejarah Nabi Muhammad
368.	Rumah Tradisiona l 5 Ulu No.1
369.	Arca Ganesha tidaksempurna
370.	Makam Raja Batu Api
371.	Hidayatus As-salikin
372.	Naskah Islam
373.	Kitab Maulud
374.	Kitab Hidayatul Mujahid
375.	Kitab Sairu Salikin II
376.	Kitab At- Takafur Wal'iktibar
377.	Balai Pertemuan
378.	Kitab Sejarah Islam
379.	Kitab Nawawi I
380.	Gelumpai
381.	Arca Budha Siguntang
382.	Sejarah Islam
383.	Depo Lokomotif
384.	Balai Diklat Rendang PT.KAI Drive III
385.	Naskah Matan Jurumiyah
386.	Mess Diponegor o No. 10
387.	Resort Listrik Umum III. Kertapati
388.	Rumah Assegap 1
389.	Kitab Nawawi II
390.	Kitab Riyadhatu n Nafsi Wat Tahzibil Khalqi
391.	Bunker Jepang
392.	Rumah Dinas PT. KAI
393.	Silsilah Tarekat
394.	StasiunKertapati
395.	Kitab Berzanzi
396.	Kitab Matan Jurumiah II
397.	Mess Diponegoro No.12
398.	Kitab Hidayatul Salikin
399.	Kitab adabun nikah
400.	MONPER A (MonumenPerjuangan Rakyat)
401.	Kitab Perukunan
402.	Kitab Zakat
403.	Kamus Arab
404.	Kitab Tahlil Amsir Ila Perempuan
405.	Kitab Dammud Dunia
406.	Kitab Hadist ShohihTumizi
407.	Kitab Dammil Wal Ujub
408.	Bunker Charitas
409.	Kitab Assimak Wal-Wujud
410.	Hidayatus As-Salikin
411.	Rumah Al Munawar 7
412.	Kitab Assimak Wal- Wujud
413.	Makam Ahmad bin Syech
414.	Rumah Al-Munawar 1
415.	Rumah Al-Munawar 6
416.	Kitab Al- khaufur Raja
417.	Rumah Al-Munawar 3
418.	Kitab Al- Azkar Wal-fawa'i
419.	Rumah Kapitan 4
420.	Rumah Al-Munawar 5
421.	Rumah Al-Munawar 4
422.	Rumah Kapitan 2
423.	Suro 6
424.	Kitab Manakif
425.	Rumah Kapitan 1
426.	Kitab Israris Shalah
427.	Rumah Kapitan 5

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
428.	Rumah Kapitan 3
429.	Rumah tradisional temon 4
430.	Klenteng tri dharma chandra nadi (soel goeat kiong)
431.	Bangunan pasar kuto batu 1
432.	Bangunan pasar kuto batu 3
433.	Rumah tradisional temon 3 / hasyim ning
434.	Makam Panglima Batu Api
435.	Prasasti-prasasti Sriwijaya (Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, Telaga Batu, Lima Prasasti Sidayatra, Palas Pesemah dan Boom Baru)
436.	Arca-arca Budha Bukit Siguntang (Arca Budha Bukit Siguntang dan Arca Budha Wairocama)
437.	Gedung Sekolah (Sekolah SD,SMP,SMA Muhammadiyah Tanjung enim)
438.	Rumah Tradisional Pulau Panggung
439.	Gedung Aula SMA TABA (SMA Bukit Asam)
440.	Elektrik Centre (Sentral Listrik)
441.	Tiang Jembatan Motik
442.	Penyaringan Batu Bara “Lorge” (Penyaringan)
443.	Kamar Bola
444.	Gedung Kantor SMAN 1 Muara Enim
445.	Perumahan Pegawai PT. Bukit Asam (Kantor KoperasiPensiun)
446.	Rumah Kepala BAM (Kantor CSR PT.Bukit Asam)
447.	Kolam Renang (Antrasita)
448.	Sentral Telepon
449.	Jembatan Lama
450.	Gereja Santo Yosep Tanjung Enim
451.	SD Emanuel (SD Xaverius Emanuel)
452.	Kantor Yonkav 5/DPC
453.	Rumah Pangeran Lubai
454.	Rumah Tradisional Semendo Perapau
455.	Makam Puyang Bang Bengok
456.	Keris, Tombak dan Meriam Puyang Bang Bengok
457.	Eks Rumah Sakit Lama Daerah Kayuagung
458.	Lapangan Bola Saringan
459.	Rumah Limas SeratusTiang
460.	Makam Pangeran Rejet Wira Laksana
461.	Rumah Depati Bahar
462.	Rumah Pangeran Djaja Pati Kerama Djaja
463.	Makam Puyang Bucit
464.	Makam Ratu Jimat
465.	Makam PetoriSeriam Kuning
466.	Rumah Haji Bahri
467.	Rumah Depati M Nur
468.	Masjid Jamik
469.	Rumah Tokeh Jahri
470.	Rumah Pangeran Haji Toyut
471.	Rumah Depati Amir Hamzah
472.	Batu Paso
473.	Rumah Depati Tjoekronegoro (A. Ambon)
474.	Makam Buyut Bedendang (Petori Kulit Bening)
475.	Rumah Depati Baridun
476.	Candi 1 Bumi Ayu
477.	Candi 2 Bumi Ayu
478.	Candi 3 Bumi Ayu
479.	Candi 4 Bumi Ayu
480.	Candi 5 Bumi Ayu
481.	Candi 6 Bumi Ayu
482.	Candi 7 Bumi Ayu
483.	Candi 8 Bumi Ayu

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
484.	Candi 9 Bumi Ayu
485.	Candi 10 Bumi Ayu
486.	Candi 11 Bumi Ayu
487.	Tugu Bor Minyak
488.	Perumahan Pertamina
489.	Goa Harimau
490.	Goa Putri
491.	Goa Selabe
492.	Jembatan Ogan I
493.	Stasiun Kereta Api Baturaja
494.	Rumah Sakit Antonio
495.	Rumah Tradisional Dusun Baturaje
496.	Situs Megalitik Tanjung Aro
497.	Situs Megalitik Tegur Wangi
498.	Situs Megalitik Tebing Tinggi
499.	Kubur Batu, Arca Manusia Dibelit Ular Tanjung
500.	Situs Belumai
501.	Kubur Batu Pematang Bangao
502.	Arca Manusia, Kubur Batu dan Pahatan Bukit Selatan
503.	Arca Manusia dan MegalitTebing Tinggi
504.	Komplek Megalitik Talang Batu Gong
505.	Komplek Megalit Cawing Lama
506.	Danau Candi
507.	Makam Serunting Sakti (siPahitLidah)
508.	Arca Manusia dibelit Ular
509.	Kubur Batu/Rumah Batu Tanjung Aro
510.	Kubur Batu/Rumah Batu Belumai
511.	Arca Manusia Belumai
512.	Batu Dakon Belumai 1
513.	Batu Dakon Belumai 2
514.	Arca Manusia Menunggang Kerbau Belumai
515.	Kubur Batu/Rumah Batu Talang Kecepol 1
516.	Kubur Batu/Rumah Batu Talang Kecepol 2
517.	Kubur Batu/Rumah Batu Talang Kecepol 3
518.	Kubur Batu/ Rumah Batu Tegur Wangi 1
519.	Arca Manusia Tegur Wangi 1
520.	Arca Manusia Tegur Wangi 2
521.	Arca Manusia Tegur Wangi 3
522.	Arca Manusia Tegur Wangi 4
523.	Kubur Batu/Rumah Batu Tegur Wangi
524.	Batu Balai/Dinding Bergambar
525.	Batu Berelief Cawang Baru 1
526.	Batu Berelief Cawang Baru 2
527.	Batu Dalkon Tebing Tinggi
528.	Batu Datar Tebing Tinggi
529.	Arca Manusia Menunggang Kerbau Tebing Tinggi
530.	Arca Manusia di Belit Ular
531.	Menhir Tebing Tinggi
532.	Arca Manusia Jambat Akar
533.	Arca Manusia Talang Batu Gong
534.	Meja Batu/Dolmen Talang Batu Gong
535.	Tetralith Talang Batu Gong 1
536.	Arca Manusia Talang Batu Gong 1
537.	Arca Manusia Talang Batu Gong 2
538.	Batu Datar Talang Batu Gong
539.	Tetralith Talang Batu Gong 2
540.	Batu Tulis Agung Lawang

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
541.	Batu Betangkup Agung Lawang
542.	Arca Gajah Beringin Jaya
543.	Batu Dalkon/Batu Berlubang Beringin Jaya
544.	Lumpang Batu Beringin Jaya
545.	Pahatann Kepala Manusia di Dinding Batu Burung Dinang
546.	Arca Manusia Muara Siban
547.	Arca Manusia tanpa Kepala Burung Dinang
548.	Relief Manusia dan Burung Hantu Sungai Kukuy
549.	Arca Manusia Talang Ternak
550.	Dolmen Dusun Belumai
551.	Rumah Baghi Tatahan
552.	Nisan Berelief
553.	Arca Kepala Manusia
554.	Makam Puyang Mambang Sakti
555.	Makam Puyang Minak Balak Seribu
556.	Makam Puyang Putri
557.	Makam Puyang H. Abdullah
558.	Makam Puyang Empu Serawan
559.	Makam Puyang Sekuntai
560.	Terowongan 5 Km
561.	Batu Badak
562.	Makam Puyang Sembrani Sakti
563.	Batu Pasir Beras Pasir
564.	Batu Perahu Telungkup
565.	Batu Ciuman
566.	Goa Ratu
567.	Gua Asmara
568.	Gua Kelambit
569.	Gua Kelambit
570.	Gua Sarang Burung Walet
571.	Menher
572.	Tebing Batu
573.	Air Panas Kembuhak
574.	Kembuhak Badas
575.	Kembuhak Malu
576.	Kembuhak Bubuw
577.	Patung Main Sindi
578.	Patung Gajah
579.	Patung Anjing
580.	Lesung Batu
581.	Makam Puyang Bale Seribu
582.	Makam Puyang Raje Kuase
583.	Makam Puyang Meruhum
584.	Makam Puyang Dewi Itam Manis
585.	Makam Puyang Gerizak
586.	Makam Ratu Nengkuse
587.	Senjata Pusaka Keris Sakti
588.	Benteng Tinggi
589.	Makam Puyang Serunting Sakti
590.	Piano Tue
591.	Lemari Tue
592.	Rumah Adat Suku Semendo
593.	Makam Si Pahit Lidah
594.	Makam Puyang Seranjang

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
595.	Makam Puyang Umpu Batin Tuha
596.	Makam Puyang Tanjung Kedatun
597.	Lamban Tuha
598.	Batu Tapal
599.	Batu Lesung
600.	Batu Kursi
601.	Batu Bersusun
602.	Luang Betung
603.	Batu Bertangkup
604.	Sumber Air Panas
605.	Batu Peti
606.	Batu Sejajar
607.	Batu Tapak Puyang
608.	Batu Marmer
609.	Candi Jepara
610.	Lamban Tuha
611.	Batu Kebayan
612.	Batu Mega
613.	Rumah Adat
614.	Rumah Adat
615.	Makam Puyang Air Rambutan
616.	Makam Puyang Rakse Baya
617.	Batu Jung
618.	Batu Meriam
619.	Batu Tapak Seribu
620.	Batu Lesung
621.	Makam Puyang Naga Berisang
622.	Batu Lesung
623.	Batu Situs Tapak Kerbau
624.	Benteng Perang Pauh
625.	Sumur Putri
626.	Batu Pengaringan
627.	Kereta Kencana
628.	Rumah Pangeran Ba'sir
629.	Rumah Pangeran Abdul Hamid
630.	Makam Puyang Umpuan Ratu
631.	Makam Puyang Guru Sakti
632.	Makam Puyang Syeh Umar Shihab
633.	Makam Puyang Tuan Tanda Woli
634.	Makam Puyang Markodum
635.	Makam Puyang Tanda Tuan Abdul Rahman
636.	Makam Puyang BP. Peliung
637.	Makam Puyang Tanjung Darussalam
638.	Makam Puyang Tuan Junjungan Ahmad Badar
639.	Rumah Haji Khotib Nawawi
640.	Makam Puyang Batin Puluh
641.	Makam Puyang Tuan Dipulau
642.	Makam Puyang Ratu Bagus Baginda Ali
643.	Megalitik batu Beghamben
644.	Situs Tinggihari
645.	Komplek Megalit Tanjung Mulak
646.	Menhir Batu Aji Karang Dalam Ulu
647.	Megalitik Batu Macan
648.	Megalitik Nek Nambeng
649.	Komplek Megalit Rindu Hati
650.	Megalitik Batu Kerbau

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
651.	Megalitik Bilik Batu Kota Raya
652.	Megalitik Batu Putri
653.	Kubur Batu Talang Pagar Agung
654.	Area Megalitik dan Dolmen
655.	Megalitik Baturang
656.	Arca Manusia, Dolmen dan Arca Batu Gunung Kaya
657.	Area Megalitik Tanjung Beringin
658.	Megalitik Tanssjung Raja
659.	Arca Megalitik Muara Dua
660.	Megalitik Batu Lebuhan
661.	Balai Yasa
662.	Gereja St. Michael
663.	Sungai Lematang
664.	Sungai Perigi
665.	Batu Gajah
666.	Batu Pengantin
667.	Rumah Limas H. Braksan
668.	Rumah DepatiAhmak
669.	Rumah Depati Ahmad
670.	Makam Keluarga Penghulu Kiai Haji Abdul Mukti
671.	Rumah Limas Depati Suut
672.	Situs Batu Bergores Jarakan
673.	Situs Megalitik Manggilan
674.	Batu Menhir Lingge
675.	Meja Batu/Dolmen Situs Umo Jati
676.	Makam Puyang Gadis
677.	Tempayan Kubur
678.	Naskah kuno
679.	Makam Pesirah Sembilan
680.	Makam Puyang Goak
681.	Rumah Adat
682.	Tempayan Kubur
683.	Samurai
684.	Rutan
685.	Terowongan Kereta api
686.	Rumah Benteng
687.	Makam Puyang Jagalambu
688.	Komplek Rumah Pangeran H. Anng Mahidin
689.	Kawasan Teluk Kijing
690.	Rumah Pangeran Epil
691.	Watervang
692.	Senjata CIS
693.	Jubah Malea
694.	Pedang Pucuk Umbai
695.	Haligi Mupe
696.	Tombak
697.	Keris Moneng Keregak
698.	Lemari Besi Kecil
699.	Lemari Besi Besar
700.	Guci
701.	Rumah Panggung Tradisional
702.	Makam Keramat Lebai seketi
703.	Makam Bidan Aye
704.	Masjid Al Marhamah
705.	Makam Keramat Koneng Kerengak
706.	Makam Keramat Koneng Klepa

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
707.	Makam Keramat Kejora
708.	Makam Keramat Krio Mambul
709.	Makam Keramat Satang Temberas
710.	Makam Kuno Sekitar Makam Keramat
711.	Makam Kuno sekitar Makam Koneng Klepa
712.	Makam Istri Pangeran Sembilan Dewa
713.	Makam Keramat Bisu
714.	Makam Kuno (LDR 3)
715.	Makam Kuno (LDR 4)
716.	Senapan
717.	Keris
718.	Bendera Indonesia Lama
719.	Jeep
720.	Mesin Ketik
721.	Puing Pesawat
722.	Kereta Api
723.	Al Quran Tulis Tangan
724.	Seragam Tentara
725.	Tombak
726.	Monumen Perjuangan Letkol Atmo
727.	Makam Keramat Depati Kuning
728.	Menhir sekitar Makam Keramat Depati Kuning
729.	Makam Keramat Depati Bodo
730.	Benteng Tanah Ulak Lebar
731.	Makam Keramat Bukang kurap
732.	Makam Kuno Ulak Lebar
733.	Pecahan Keramik Cina dan Gerabah
734.	Masjid raya
735.	Kompleks bangunan Belanda
736.	Batu Djong
737.	Bisokop Gelora
738.	Patung Budha Maitreya
739.	Makam Moneng Sepati
740.	Masjid agung Al Basri
741.	Keramat Meja Batu
742.	Makam Paku Alam
743.	Makam Depati Kecil
744.	Makam Puyang Ketol
745.	Keramat Kriyo Grudo
746.	Makam Peserah
747.	Rumah Belanda
748.	Batu Dulang Meja Batu
749.	Keramat Haji Besar
750.	Batu Bercorak
751.	Patung Naga
752.	Candi Lesung Batu
753.	Makam Pangeran Emas
754.	Makam Raja Empedu
755.	Makam Putri Daro Putih
756.	Situs Batu Merah
757.	Dayung Biduk
758.	Mariam Naga
759.	Pedang Bersejarah
760.	Selendang Sutra 7 Meter

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA
761.	Sabuk Kain Mas
762.	Makam Depati Kurus
763.	Makam Depati Said
764.	Batu Moning
765.	Piagam Kulit Kayu
766.	Rumah Tuo
767.	Alun Alun Desa
768.	Makam Kuno
769.	Sedekah Bumi
770.	Rumah Bari Pangkalan Balai
771.	Rumah Tradisional Sungsang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Sementara itu juga telah ditetapkan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Sumatera Selatan yang memperoleh sertifikat sampai dengan tahun 2023, yaitu Tari Erai-Erai, Sedekah Balaq, Telok Abang Palembang, Incang-Incang Pedamara, dan Musik Jidur Pedamaran. Adapun 49 Warisan Budaya Tak Benda berikut sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tabel 2.24
Warisan Budaya Tak Benda Sumatera Selatan yang sudah disertifikasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

No.	Tahun	Nama Wbtb	Asal Daerah	Domian
1.	2013	Songket	Palembang	Songket
2.		Dulmuluk	Palembang	Dulmuluk
3.		Rumah Ulu	Oku	Rumah Ulu
4.	2014	Rumah Limas	Palembang	Rumah Limas
5.		Pempek	Palembang	Pempek
6.		Tari Gending Sriwijaya	Palembang	Tari Gending Sriwijaya
7.		Guritan	Pagaralam	Guritan
8.		Irama Batang Hari Sembilan	Pagaralam	Irama Batang Hari Sembilan
9.	2015	Senjang	Musi Banyuasin	Senjang
10.		Bolu Delapan Jam	Palembang	Bolu Delapan Jam
11.	2016	Bidar	Palembang	Bidar
12.		Warahan	Oku Timur	Warahan
13.		Ande-Ande	Banyuasin	Ande-Ande
14.		Rejung	Musirawas	Rejung
15.	2017	Kerajinan Lak	Palembang	Kerajinan Lak
16.		Tari Penguton	Oki	Tari Penguton
17.		Rumah Baghi	Pagaralam	Rumah Baghi
18.		Surat Ulu	Sumsel	Surat Ulu
19.		Timbang Kepala Kebo	Banyuasin	Timbang Kepala Kebo

No.	Tahun	Nama Wbtb	Asal Daerah	Domian
20.	2018	Tikar Purun	OKI	Tikar Purun
21.		Tari Kebargh	Pagaralam	Tari Kebargh
22.		Tari Silampari Kayangan Tinggi	Musirawas	Tari Silampari Kayangan Tinggi
23.		Pindang	Palembang	Pindang
24.		Idangan/Ngobeng	Palembang	Ngobeng
25.	2019	Midang		Midang
26.		Tanjak	Palembang	Tanjak
27.		Cak Ingkling	Sumsel	Cak Ingkling
28.		Musik Kelentangan	Musi Banyuasin	Musik Kelentangan
29.		Tempoyak	Palembang	Tempoyak
30.		Tam-Tam Duku	Musi Rawas	Tam-Tam Duku
31.		Benteng- Bentengan	Musi Rawas	Benteng- Bentengan
32.		Tari Sambut Muara Enim	Muara Enim	Tari Sambut Muara Enim
33.	2020	Adat Perkawinan Mabang Handak	Kab. OKI	Adat Perkawinan Mabang Handak
34.		Lelang Lebak Lebung	Kab. OKI	Lelang Lebak Lebung
35.	2021	Jejuluk	OKU Timur/ OKI	Jejuluk
36.		Sedekah Serabi	Empat Lawang	Sedekah Serabi
37.		Tari Lading	PALI	Tari Lading
38.		Sagarurung	PALI	Sagarurung
39.		Gulo Puan	OKI	Gulo Puan
40.		Tepung Tawar Perdamian	Palembang	Tepung Tawar Perdamian
41.		Burgo	Palembang	Burgo
42.		Selendang Mudawaroh Sulaman Kelengkang	Palembang	Selendang Mudawaroh Sulaman Kelengkang
43.		Sedekah Rame	Lubuk Linggau	Sedekah Rame
44.	2022	Serambe Banyuasin	Banyuasin	Serambe Banyuasin
45.	2023	Telok Abang Palembang	Palembang	Telok Abang Palembang
46.		Icang-Incang Pedamaran	OKI	Icang-Incang Pedamaran
47.		Musik Jidur	OKI	Musik Jidur
48.		Tari Erai-Erai	Lahat	Tari Erai-Erai
49.		Sedekah Balaq	OKU Timur	Sedekah Balaq

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, 2023 (data termutakhir)

Kesenian Sumatera Selatan terus dipacu, disamping untuk meningkatkan daya kreasi masyarakat juga diharapkan dapat memacu kegiatan perekonomian. Pertumbuhan Sanggar seni di Sumatera Selatan, walaupun tidak terlalu pesat namun tetap memperlihatkan pertumbuhan. Hal ini sedikit banyak memperlihatkan adanya kegiatan seni di masyarakat.

Jumlah sanggar seni di Sumatera Selatan tahun 2023 secara keseluruhan sebanyak 1.116 sanggar seni, jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun 2022 jumlah sanggar seni sebanyak 1.090 sanggar seni, seiring dengan meningkatnya jumlah sanggar seni di Sumatera Selatan, dibeberapa Kabupaten maupun Kota ada yang mengalami peningkatan dan ada pula yang mengalami penurunan, hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.25
Jumlah Sanggar Seni di Provinsi Sumatera Selatan
tahun 2015 - 2023

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Sanggar Seni								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Palembang	57	57	57	57	57	57	57	57	57
2	Ogan Ilir	13	13	13	13	13	15	15	151	15
3	Ogan Komering Ilir	24	41	41	41	41	41	41	71	71
4	Muara Enim	-	593	593	593	593	593	598	598	598
5	Ogan Komering Ulu	63	82	82	82	82	82	28	28	28
6	OKU Selatan	17	17	17	17	17	27	27	28	29
7	OKU Timur	6	6	6	6	6	6	6	6	6
8	Prabumulih	10	10	10	13	13	11	11	11	11
9	Empat Lawang	18	18	19	19	19	27	28	28	28
10	Musi Banyuasin	11	13	41	41	41	45	45	45	41
11	Banyuasin	24	24	21	35	35	35	35	55	55
12	Musi Rawas	22	33	33	33	33	58	58	65	71
13	Lahat	18	18	18	23	23	23	24	24	24
14	Pagaralam	-	22	24	24	24	23	23	24	47
15	Lubuk Linggau	25	41	55	52	52	52	0	0	0
16	Musirawas Utara	4	4	4	4	4	4	4	10	10
17	PALI	5	5	8	8	25	25	25	25	25
	Jumlah	317	997	1042	1061	1061	1124	1026	1090	1116

Sumber : Statistik Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, diolah, 2023

Olahraga

Provinsi Sumatera Selatan telah menyelenggarakan event-event olahraga yang bertaraf nasional maupun internasional, diantaranya Kejuaraan Internasional MX GP, Qubica AMF Bowling World Cup ke-55, Sriwijaya Ranau Gran Fondo, Kejuaraan Nasional PBSI 2019, International Triathlon 2020, dan yang paling fenomenal adalah terlaksananya gelaran ASIAN GAMES tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan. Suksesnya penyelenggaraan event-event olahraga ini salah satunya karena didukung oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang ada. Salah satu fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang terlengkap dan terancang serta berstandar Internasional yang dimiliki oleh

Provinsi Sumatera Selatan, terbentang luas di kawasan *Jakabaring Sport City*, yang semuanya terkoneksi pada suatu wilayah sehingga Sumatera Selatan menjadi surganya pencinta olahraga dan terciptanya industri-industri olahraga, jasa services, peralatan dan partisipasi masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

1) Urusan Pendidikan

Implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimulai tahun 2017. Berdasarkan regulasi tersebut, kewenangan Pemerintah Provinsi adalah pendidikan menengah, sedangkan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk penyelenggaraannya. Namun demikian, kinerja pendidikan dasar masih menjadi ukuran kinerja pemerintah provinsi sesuai RPJMD. Pemerintah provinsi bertugas membina dan mendorong pencapaian kinerja tersebut.

Angka Partisipasi Kasar

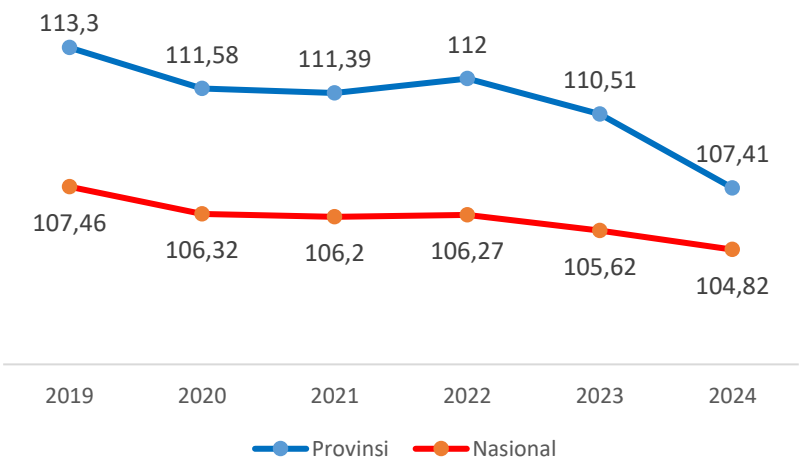
Angka Partisipasi Kasar (APK) di semua jenjang pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun bergerak fluktuatif. APK SD/MI di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2019-2024 berada pada nilai diatas 100 persen dan mengalami tren penurunan, dari 111,39 persen pada tahun 2019 turun 1,91 poin persen menjadi 111,39 persen pada tahun 2021, sempat mengalami kenaikan pada tahun 2022 namun kembali menurun sebesar 4,59 persen poin menjadi 107,41 persen pada tahun 2024. APK Jenjang SD/MI Nasional masih di bawah APK Provinsi Sumatera Selatan dan juga mengalami tren penurunan yaitu 107,46 persen pada tahun 2019 dan mengalami penurunan 2,64 poin persen pada tahun 2024 menjadi 104,82 persen.

APK jenjang SMP/MTs Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional selama periode 2019-2023 pada umumnya menunjukkan tren peningkatan walaupun APK Provinsi masih di bawah APK Nasional. Pada periode tahun 2019-2021, APK Nasional dan APK Provinsi Sumatera Selatan mengalami tren peningkatan masing-masing sebesar 2,47 poin persen untuk APK Provinsi dan 2,23 poin persen untuk APK Nasional. Namun pada tahun 2022 APK Nasional dan APK Provinsi Sumatera

Selatan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,03 poin persen APK Provinsi dan 0,69 poin persen APK Nasional. Tren peningkatan jenjang SMP/MTs Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional tahun 2023 yaitu menjadi 89,78 persen APK Provinsi sementara APK Nasional sebesar 92,51 persen. Nilai APK jenjang SMP/MTs Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 sebesar 89,78 persen mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024 yaitu turun 4,32 poin persen menjadi 85,46 persen. Walaupun APK jenjang SMP/MTs Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional mengalami fluktuatif, persentasenya masih di bawah 100 persen, hal ini disebabkan masih terdapat anak usia sekolah SMP/MTs yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/MTs.

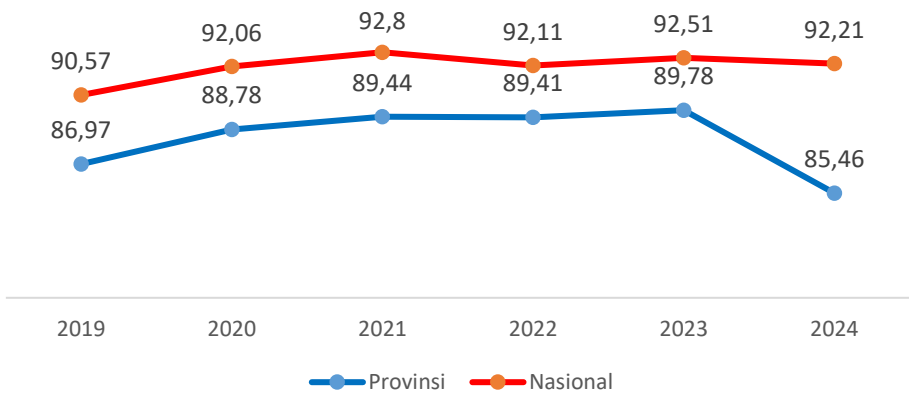
Untuk APK jenjang SMA/SMK/MA nasional periode 2020-2024 mengalami tren kenaikan, sementara di tingkat provinsi pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami kenaikan. Mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 81,11 persen dan pada tahun 2024 APK tingkat Provinsi mengalami kenaikan menjadi 85,2 persen walaupun angka ini masih di bawah capaian Nasional. Hal ini disebabkan adanya penurunan anak usia SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK/MA.

Gambar 2.28
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD/MI
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024



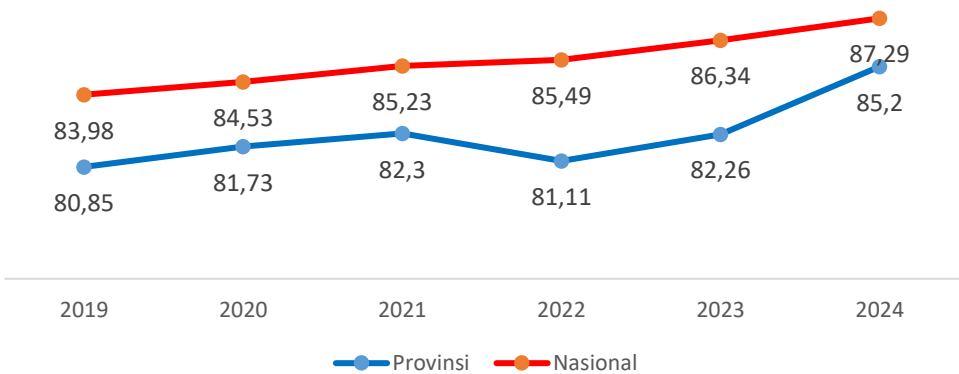
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.29
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SLTP/MTs/Paket B
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.30
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024

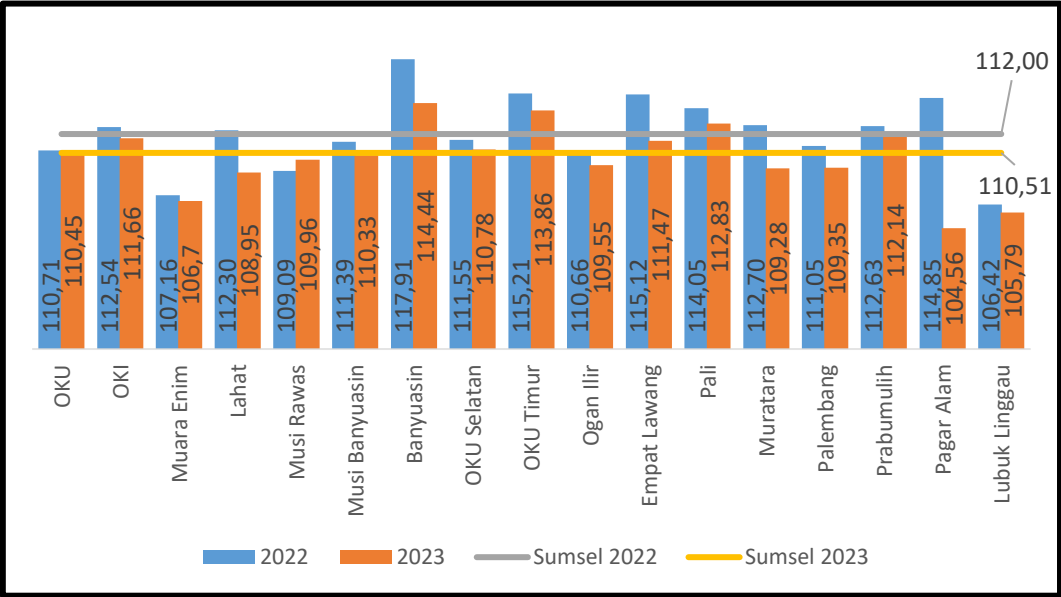


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Menurut data BPS, pada tahun 2023 terdapat 7 kab/kota yang capaian APK tingkat SD yang melampaui APK Provinsi, yaitu Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, Empat Lawang, Pagar Alam, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih, Ogan Komering Ilir. Kota Pagar Alam menjadi penyumbang APK tingkat SD terendah di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 104,56 persen.

Menurut data BPS, pada tahun 2022 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai kabupaten yang menyumbang APK tertinggi tingkat SLTP yaitu sebesar 113,39 persen. Sedangkan pada tahun 2023 kabupaten/kota yang memiliki APK tertinggi yaitu Kabupaten Empat Lawang sebesar 107,22 persen.

Gambar 2.31
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD Kab/Kota
Tahun 2022-2023

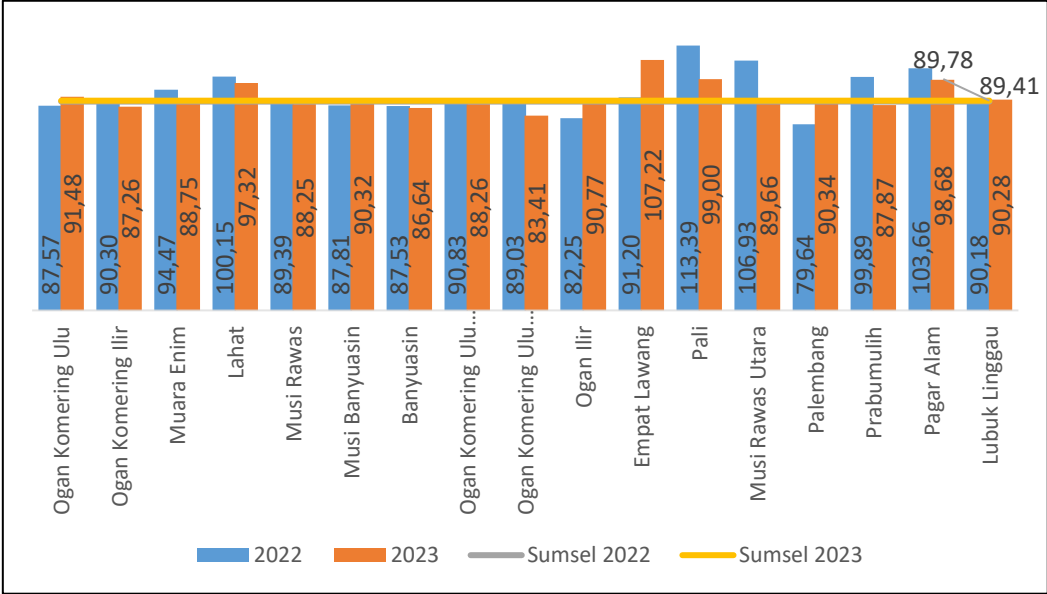


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Menurut data BPS, pada tahun 2023 terdapat 7 kab/kota yang capaian APK tingkat SD yang melampaui APK Provinsi, yaitu Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, Empat Lawang, Pagar Alam, Penukal Abab Lematang Ilir, Prabumulih, Ogan Komering Ilir. Kota Pagar Alam menjadi penyumbang APK tingkat SD terendah di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 104,56 persen.

Menurut data BPS, pada tahun 2022 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai kabupaten yang menyumbang APK tertinggi tingkat SLTP yaitu sebesar 113,39 persen. Sedangkan pada tahun 2023 kabupaten/kota yang memiliki APK tertinggi yaitu Kabupaten Empat Lawang sebesar 107,22 persen.

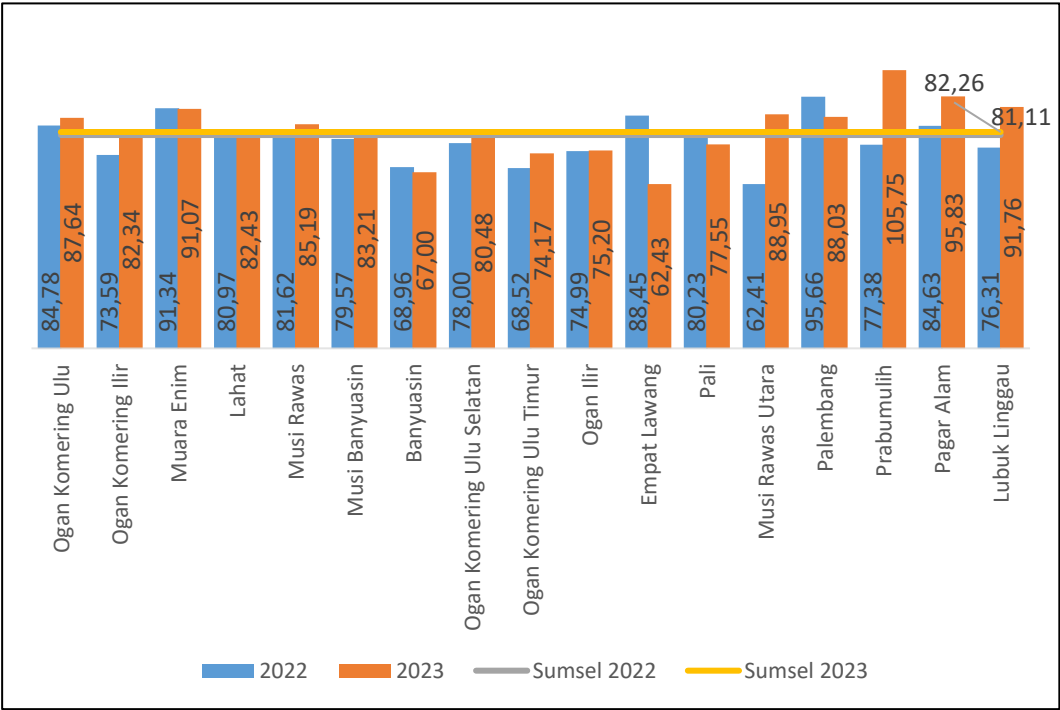
Gambar 2.32
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMP
Kab/Kota Tahun 2022-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Menurut data BPS, pada tahun 2022 Kota Palembang sebagai kabupaten/kota yang menyumbang APK tingkat SLTA tertinggi yaitu sebesar 95,66 persen dan terendah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 62,41 persen. Sementara pada tahun 2024 kabupaten/kota yang memiliki APK tertinggi yaitu Kota Prabumulih sebesar 105,75 persen dan terendah adalah Kabupaten Empat Lawang sebesar 62,43 persen.

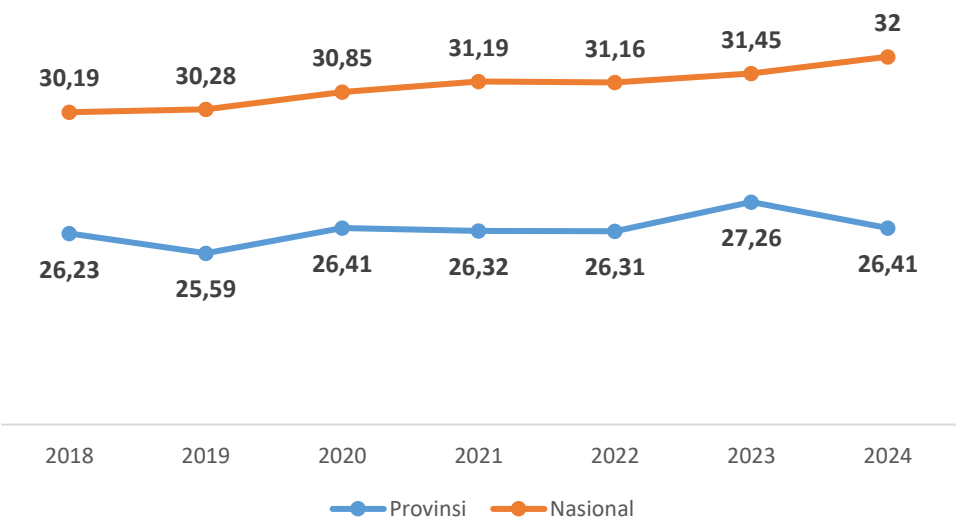
Gambar 2.33
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMA
Kab/Kota Tahun 2022-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan dari tahun 2018-2024 memperlihatkan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2019, capaian APK Perguruan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan turun sebesar 25,59 dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi sebesar 26,41 persen, namun pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan pada angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Sumatera Selatan yaitu menjadi 26,32 persen dan 26,31 persen. Pada tahun 2023, capaian APK Perguruan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan kembali mengalami peningkatan menjadi 27,26 persen, dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 26,41 persen. Capaian tahun 2024 ini masih di bawah capaian nasional sebesar 32,00. Hal ini disebabkan karena beban biaya kuliah di perguruan tinggi masih memberatkan masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu perlu dilakukan banyak terobosan, antara lain peningkatan jumlah dan akses Siswa tamatan SMA/SMK masuk ke Perguruan Tinggi misalnya melalui Program Kuliah Gratis.

Gambar 2.34
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi Tahun 2018-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

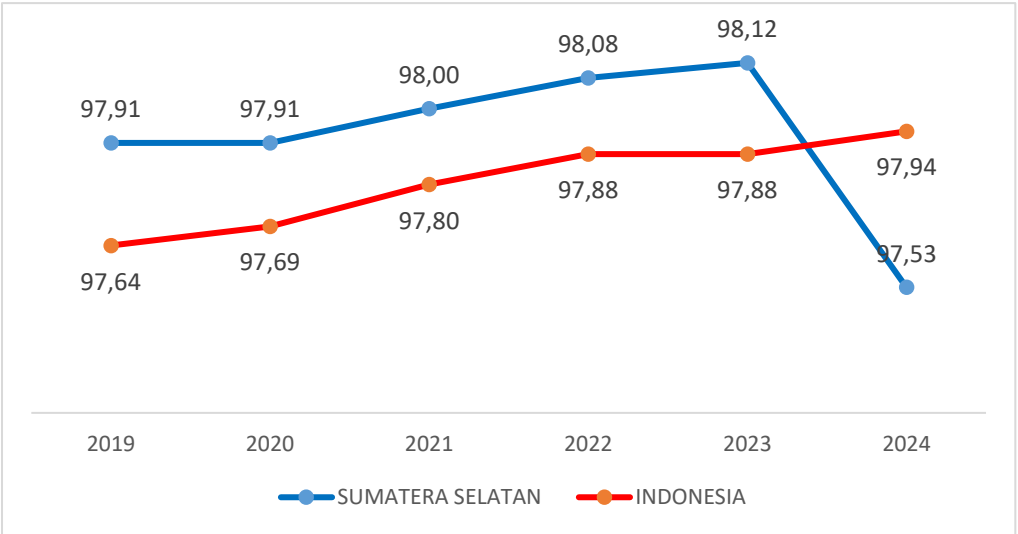
Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100 persen, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu sesuai dengan umurnya. Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Selatan jenjang SD/Sederajat sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 telah melampaui capaian Nasional walaupun pada tahun 2024 mengalami penurunan 0,59 poin persen. Pada tahun 2024 capaian Provinsi Sumatera Selatan sebesar 97.53 persen dan capaian Nasional 97.94 persen. Angka ini menunjukkan hampir 100 persen anak yang bersekolah di jenjang SD/ sederajat sesuai dengan usia sekolahnya.

Jika melihat tren capaian Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat dan SM/Sederajat Provinsi Sumatera Selatan, capaian Provinsi Sumatera Selatan belum pernah melebihi capaian Nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak yang sekolah di jenjang tersebut masih tidak sesuai dengan usia sekolahnya. APM dapat disebabkan oleh rendahnya akses terhadap fasilitas pendidikan yang ditimbulkan akibat kondisi geografi yang beragam dan sulit dijangkau, budaya yang belum mendukung untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya dan kondisi ekonomi keluarga yang memaksa anak membantu keuangan keluarga dan lain-lain.

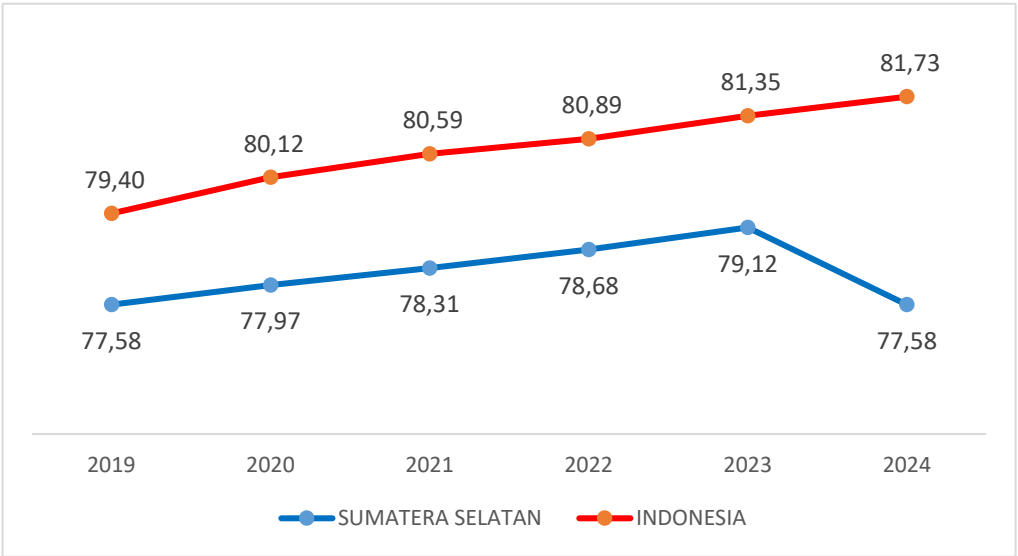
APM jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masih dibawah angka nasional, hal tersebut menunjukkan bahwa anak yang sekolah di jenjang tersebut masih tidak sesuai dengan usia sekolahnya. APM dapat disebabkan oleh rendahnya akses terhadap fasilitas pendidikan yang ditimbulkan akibat kondisi geografi yang beragam dan sulit dijangkau, budaya yang belum mendukung untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya dan kondisi ekonomi keluarga yang memaksa anak membantu keuangan keluarga, dan lain-lain.

Gambar 2.35
Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SD/Sederajat
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024



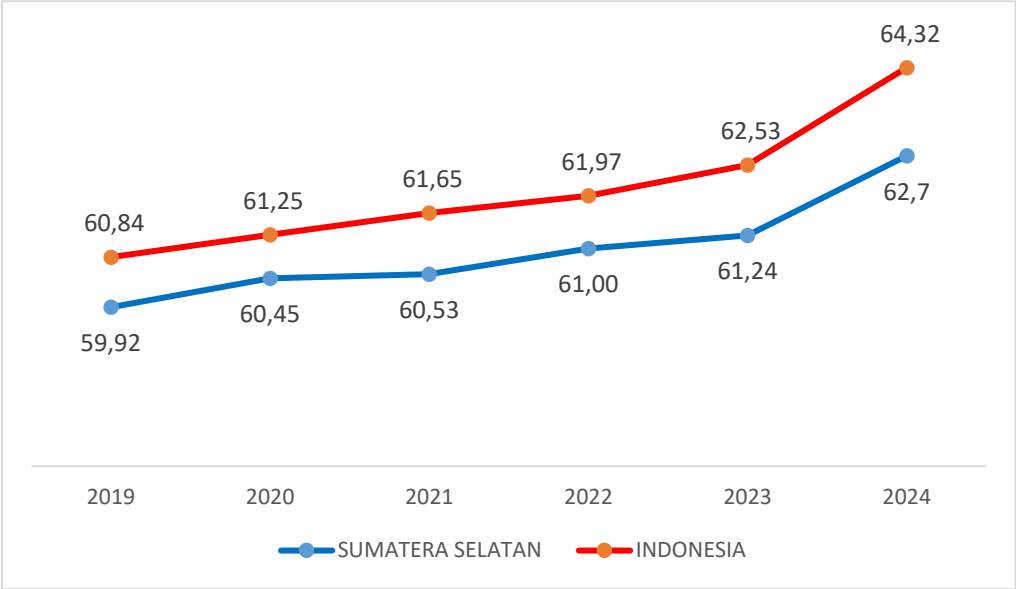
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.36
Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMP/Sederajat
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

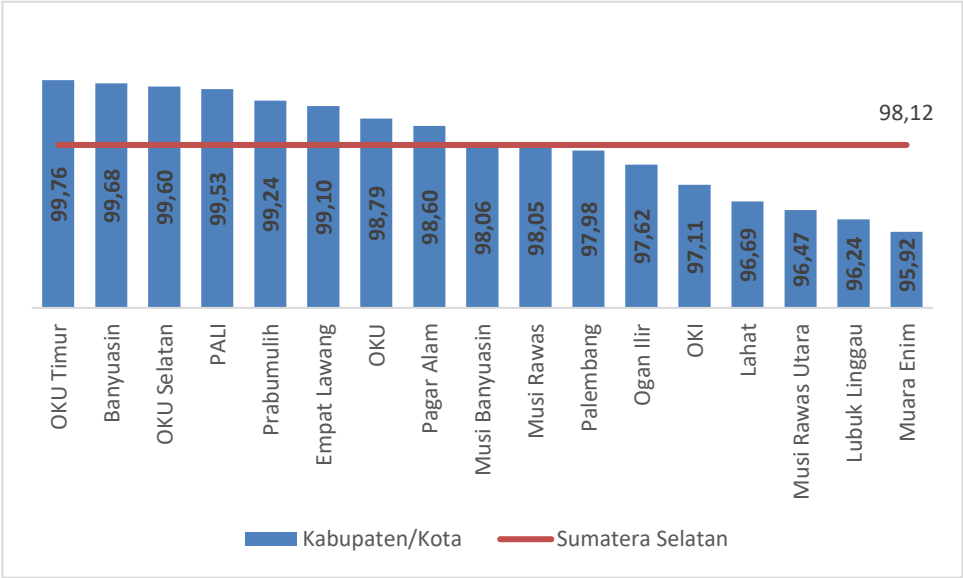
Gambar 2.37
Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMA/Sederajat
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari grafik di bawah ini terlihat bahwa pada tahun 2022, APM SD Kabupaten/Kota bervariasi. APM tertinggi dicapai oleh Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Empat Lawang sebesar 99,96 persen. Sedangkan yang terendah dicapai oleh Kabupaten Muara Enim yaitu 96,06 persen. Sementara pada Tahun 2023 APM SD Kabupaten/Kota tertinggi adalah Kabupaten OKU Timur yaitu sebesar 99,76 persen.

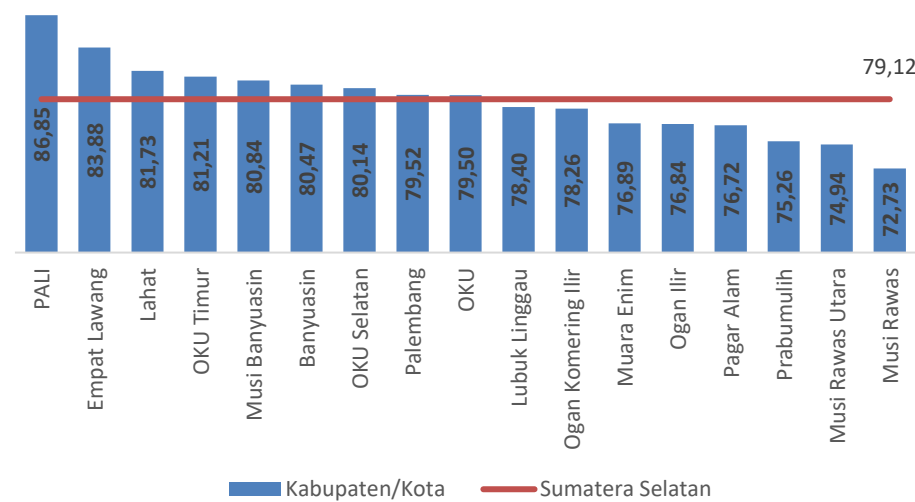
Gambar 2.38
Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2023, APM SD Kabupaten/Kota bervariasi. APM tertinggi dicapai oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Banyuasin. Sedangkan yang terendah dicapai oleh Kabupaten Muara Enim. APM rendah di Kabupaten Muara Enim ini dipengaruhi banyak hal, antara lain siswa SD/MI di Muara Enim banyak yang usianya bukan usia Sekolah dasar sehingga tidak dihitung pada perhitungan APM.

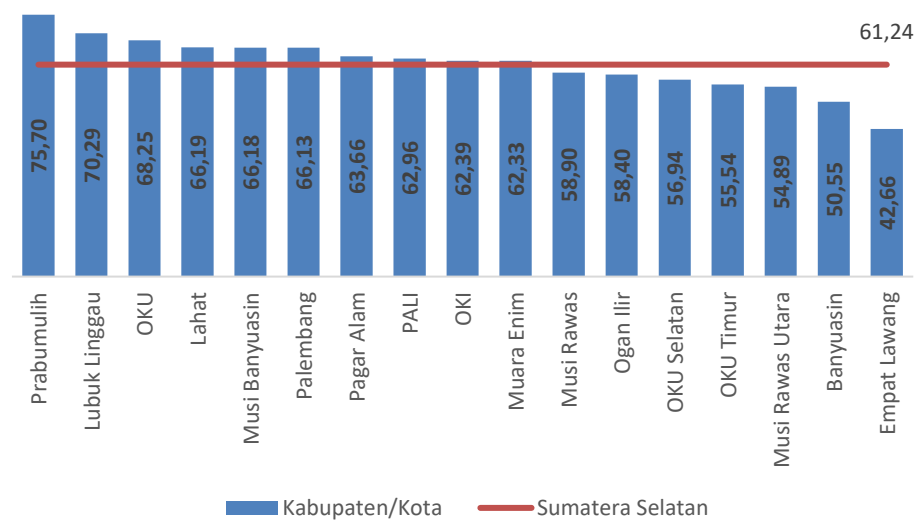
Gambar 2.39
Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat
Menurut Kab/Kota Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2023, APM SMP/Sederajat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan bervariasi. Terdapat 9 Kabupaten/Kota yang telah melebihi capaian Provisi namun hanya 3 kabupaten/Kota yang melampaui capaian nasional yaitu Pali, Empat Lawang dan Lahat. Kabupaten yang memiliki capaian yang rendah yaitu Musi Rawas sebesar 72.73. Dilhat dari metodologi perhitungan karena di Kabupaten Musi Rawas banyak siswa yang usianya lebih atau kurang dari usia SMP/MTs (13-15 tahun) yang menduduki bangku SMP/MTs, sehingga tidak terhitung pada APM SMP/MTs.

Gambar 2.40
Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMA/Sederajat
Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar tersebut menggambarkan APM jenjang SMA/Sederajat Kabupaten/Kota juga bervariasi. Pada Tahun 2023 terdapat 10 Kabupaten/Kota yang melebihi capaian Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota yang melebihi capaian Nasional. APM tertinggi dicapai oleh Kota Prabumulih sebesar 75.70 dan APM SMA/ sederajat terendah ada di Kabupaten Empat Lawang yaitu 42.66

Capaian SPM Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Provinsi terdiri dari Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Tabel 2.26
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Siswa Usia 16 - 18 Tahun yang Sudah Tamat atau Sedang Belajar di Pendidikan Menengah	100	95,67
		= 417.165 orang siswa		
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa Usia 4 -18 Tahun yang Sudah Tamat atau Sedang Belajar di Pendidikan Khusus	100	67,54
		= 2.798 orang siswa		

Sumber : Laporan SPM Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Prov. Sumsel 2024

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah dilakukan dengan cara menghitung perbandingan persentase antara jumlah penduduk usia 16-18 tahun terhadap jumlah anak usia 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan menengah, dengan target SPM sebesar 100%. Jumlah penduduk usia 16 sampai 18 tahun yang menjadi target dalam pemenuhan capaian SPM Pendidikan Menengah pada tahun 2024 sebesar 422.304 orang, sedangkan jumlah siswa usia 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar pada Pendidikan menengah pada tahun 2024 hanya sebesar 417.165 orang. Berdasarkan data tersebut, didapati bahwa capaian SPM Pendidikan Pendidikan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebesar 95,67%.

Sedangkan pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Khusus dilakukan dengan cara menghitung perbandingan persentase antara jumlah penduduk usia 4-18 tahun (Disabilitas) terhadap jumlah anak usia 4-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus, dengan target SPM sebesar 100%. Jumlah penduduk usia 4 sampai 18 tahun yang masuk dalam kelompok Disabilitas adalah sebesar

2.798 atau sebesar 67,54 %.

Di bawah ini adalah haisl pencapaian realisasi SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024:

Tabel 2.27
Pencapaian Realisasi SPM Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian		Batas Waktu Capaian
		Tahun 2023	Tahun 2024	
1	SPM BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	63,11 %	81,61 %	TAHUN 2024 (1 Tahun)

Sumber : Laporan SPM Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Prov. Sumsel 2023

Pada tahun 2023, Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Khususnya Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Sumatera Selatan 63,11% atau tuntas muda, **sedangkan pada Tahun 2024 capaian SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan bidang pendidikan adalah 81,61% (TUNTAS MADYA)**. Dengan Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dan Pemenuhan Anggaran serta Realisasi Target Fisik serta Anggaran untuk pelayanan pendidikan diharapkan dapat menjadi tolak ukur pencapaian target hasil capaian SPM Bidang Pendidikan yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya serta melakukan berbagai langkah Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Sekolah Menengah (SMA-SMK) dan Pendidikan Khusus, seperti penyediaan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan biaya personil untuk siswa sekolah, serta peningkatan mutu SDM (Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Penunjang dengan mengadakan peningkatan kompetensi dan berbagai diklat serta pembinaan secara terencana.

Permasalahan dan Solusi pada SPM bidang Pendidikan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah

Pada tahun 2024, Angka Partisipasi Sekolah (APS) berdasarkan Rapor Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk tingkat SMA dan SMK adalah 61,90 %, untuk tingkat Pendidikan Khusus adalah sebesar 61,24 %.

Rekomendasi : Perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama untuk

pendataan khusus jumlah usia penduduk terhadap usia siswa sekolah di provinsi Sumatera Selatan serta sinkronisasi data antara Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Data dari Dinas Catatan Sipil dan Dapodik setiap tahunnya, sehingga Data untuk Jumlah Penduduk Usia Sekolah dan Data Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan lebih update dan sinkron sehingga Data Rasio untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) , Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Jumlah penduduk berdasarkan usia lebih baik dan akurat.

2. Kemampuan Literasi

Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefeksi dalam memahami beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) Nilai Rapor Pendidikan untuk siswa di Provinsi Sumatera Selatan untuk Kemampuan Literasi pada tahun 2024 pada tingkat SMA adalah 60,17 % sedangkan di tingkat SMK tercapai sebesar 56,72 % dan tingkat pendidikan Khusus (SLB) sebesar 33,32 %. sehingga masih ada sedikit kesenjangan dari target capaian yang ditetapkan (peringkat menengah bawah (61-80%).

Rekomendasi : Pada tahun 2024 kemampuan literasi sudah tercapai 40 % - 70 % Peserta Didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun masih diperlukan upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum dalam kemampuan Literasi siswa tingkat sekolah menengah dan sekolah khusus..

3. Kemampuan Numerasi

Persentase Kemampuan Numerasi pada tahun 2024 untuk Tingkat SMA adalah 58,78 % atau naik 19,74 % dari tahun sebelumnya (tahun 2023 sebesar 39,04 %). sedangkan untuk tingkat SMK kemampuan Numerasi mencapai 54,39% naik dari tahun 2023 yang hanya 34,06 %, dan untuk Pendidikan Khusus Kemampuan Numerasi pada tahun 2024 adalah 53,85% yang sebelumnya pada tahun 2023 adalah 32 %.

Rekomendasi : Perlu upaya mendorong peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum untuk kemampuan numerasi di tingkat sekolah menengah karena kurang dari 40 % peserta didik yang mencapai kompetensi minimum. Perlu ditingkatkan budaya membaca

disekolah-sekolah serta Perlu disiapkan dan dibangun Perpustakaan digital dengan akses internet yang memadai untuk masing-masing sekolah di kabupaten kota Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan minat siswa ke perpustakaan

4. Perbedaan Skor Literasi

Rata-rata Nilai Literasi tingkat Sekolah Menengah (SMA- SMK/PAket C/MA dan MAK) di Tahun 2024 (Tahun N) semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi Tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional adalah turun 4,53 dimana rata-rata nilai literasi Tahun N-1 semua peserta asesmen nasional adalah 63,45. sedangkan untuk Pendidikan Khusus turun 0,08 dari rata-rata nilai literasi Tahun N-1 semua peserta asesmen nasional 3,18.

Rekomendasi:

Provinsi Sumatera Selatan untuk Kesenjangan Literasi Sekolah Menengah masih dalam capaian Rendah sehingga perlu ditingkatkan agar dapat mencapai peringkat menengah. walaupun Tidak ada perbedaan capaian literasi baik berdasarkan kelompok gender, kelompok sosial ekonomi maupun antar wilayah urban dan rural.

5. Perbedaan Skor Numerasi

Tidak ada perbedaan capaian numerasi baik berdasarkan kelompok gender, kelompok sosial ekonomi, maupun antar wilayah urban dan rural. Untuk tingkat SMA nilai mutu yang terlayani adalah 55,04 sedangkan untuk nilai perbedaan skor numerasi tingkat SMK adalah 54,39 sedangkan untuk Sekolah khusus pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian yaitu mencapai nilai 2,6 dan naik dari tahun sebelumnya dengan nilai 1,82.

Rekomendasi:

Perlu dorongan lebih kepada satuan sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan khususnya mampu meningkatkan kemampuan siswa dengan program gemar membaca dan berhitung peserta didik, juga meningkatkan gairah serta kemampuan peserta didik dalam mengakses buku literasi dan numerasi seperti dari internet ataupun perpustakaan digital sehingga capaian literasi dan numerasi di sekolah yang capaian Rendah bisa lebih ditingkatkan.

6. Indeks Iklim Keamanan.

Capaian untuk indek iklim keamanan pada tahun 2024 di tingkat sekolah menengah termasuk Baik, dimana Satuan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu 70,98 dan di SMK dengan nilai mencapai 68,84 artinya memiliki lingkungan sekolah yang aman, Capaian untuk indek iklim keamanan pada tahun 2024 di tingkat sekolah menengah termasuk Baik, dimana Satuan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu 70,98 dan di SMK dengan nilai mencapai 68,84 artinya memiliki lingkungan sekolah yang aman,

Rekomendasi:

Capaian perlu ditingkatkan dan tetap dijaga sehingga warga sekolah merasakan nyaman dalam berproses belajar dilingkungan sekolah. Tetap perlu diberikan edukasi kepada para guru/tendik terutama peserta didik tentang pentingnya menjaga keselarasan dan menjaga kemandirian meningkatkan toleransi serta keberagaman dan meningkatkan rasa saling hormat menghormati antar sesama di satuan pendidikan tingkat sekolah menengah.

7. Indeks Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas

Pada tahun 2024, Indeks iklim kebhinekaan di SMA mencapai 72,48 sedangkan di SMK nilainya mencapai 70,28. Indeks iklim inklusivitas di SMA mencapai nilai 58,07 sedangkan di SMK adalah 56,35 dan di tingkat pendidikan khusus/SLB indeks iklim inklusivitasnya mencapai nilai 63,89.

Satuan Sekolah sudah mampu menghadirkan proses pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai toleransi agama kepercayaan dan budaya, sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, budaya serta memperkuat nasionalisme. Kepala sekolah dan guru/tendik juga telah mampu menerapkan sikap dan perilaku yang mengutamakan keberagaman serta toleransi dengan Baik.

Rekomendasi:

Kondisi sekolah, komitmen kebangsaan, toleransi, rasa saling menghormati dan menghargai keberagaman di antara warga sekolah tetap perlu dijaga dan ditingkatkan sehingga rasa kenyamanan dalam proses belajar dirasakan oleh semua pihak dengan baik. Perlu

ditingkatkan pelayanan dan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik di sekolah menengah dan pendidikan khusus terutama bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.

8. Kecukupan Formasi Guru ASN

Provinsi/kabupaten/kota cukup mampu dalam pemenuhan formasi guru.

Rekomendasi:

Jumlah formasi guru ASN yang diajukan dibagi dengan jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan berdasarkan data dari kemendikbut dan rasio kebutuhan guru di satuan pendidikan sehingga pemenuhan dan rasio guru ASN tiap sekolah terpenuhi dengan pengangkatan PPPK pada tahun 2024.

9. Indeks Distribusi Guru

Provinsi/kabupaten/kota cukup mampu dalam pemenuhan distribusi guru tetapi masih ada di daerah kabupaten/ kota belum melakukan pendistribusi guru secara merata di beberapa satuan sekolah, dimana sebaran guru masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Rekomendasi:

Pada Tahun 2024 sudah dilakukan penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan dengan Status PPPK di seluruh kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan, tetapi masih Perlu dilakukan perhitungan tertentu yang sesuai sehingga distribusi guru dapat dilakukan secara merata terutama pada kabupaten atau daerah di satuan sekolah yang capaian rasio kebutuhan guru masih rendah agar distribusi guru lebih maksimal dan merata di tingkat satuan sekolah yang membutuhkan.

10. Proporsi PTK Bersertifikat

Provinsi Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan pada tahun 2024 di tingkat SMA mencapai 26,32 % dari total guru yang ada, sedangkan di SMK proporsi PTK bersertifikat mencapai 76,56 % artinya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di prov.Sumsel. Sedangkan untuk tingkat pendidikan khusus/SLB mencapai nilai 16,96 % yang telah memiliki tersertifikasi/memiliki sertifikat.

Rekomendasi:

Kepala Sekolah dan Guru yang belum memiliki sertifikat agar dapat segera didata untuk mengikuti pelatihan/guru penggerak bagi pendidik dan kepala sekolah. Untuk mengatasi kesenjangan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang terSertifikasi maka Perlu Program Peningkatan Kualifikasi Guru S.1 dan agar Guru dapat mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), Sehingga guru berstatus PNS atau Guru yang bersangkutan tersebut dapat memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru/ mengikuti program guru penggerak.

11. Proporsi PTK Penggerak

Untuk Provinsi Sumatera Selatan keikutsertaan guru penggerak dalam tahap pelaksanaan dan merintis sehingga belum semua guru terdata pada tahun 2024. Dalam kelulusan Program Pendidikan Guru Penggerak terdata Predikat Lulusan Baik dan Sedang.

Rekomendasi :

Masih dibutuhkan Peningkatan Koordinasi dan Dokumentasi data penunjang antar Dinas atau Bidang terkait untuk Meningkatkan Mutu dan Pelayanan SPM khususnya bidang pendidikan yang melibatkan Kanwil/Departemen Agama yang menaungi Pendidikan Sekolah Madrasah di Provinsi Sumatera Selatan untuk capaian SPM 100%. Perlu ditingkatkan dan jumlah keikutsertaan guru dalam program PTK penggerak diseluruh kabupaten kota perlu ditambah agar tujuan PTK Penggerak dapat tercapai.

12. Pengalaman Pelatihan Guru

Proporsi Guru dan Kepala Sekolah yang pernah mengikuti pelatihan melalui platform Merdeka Mengajar (PMM) dan Non PMM pada pelatihan kurikulum dan ataua bidang pengetahuan bidang studi, pedagogi, manajerial atau pelatihan lainnya untuk provinsi Sumatera Selatan/ Kabupaten/Kota/Satuan Pendidikan berkembang dalam keikutsertaan guru dalam kegiatan pelatihan. Pada tahun 2024, program guru penggerak masih sangat terbatas untuk kuota peserta serta belum terencana dan terjadwal dengan baik sehingga para guru dan kepala sekolah masih menunggu informasi selanjutnya untuk dapat mengikuti program tersebut.

Rekomendasi:

Perlu ditingkatkan dan jumlah keikutsertaan guru dalam pelatihan untuk peningkatan mutu PTK masih perlu ditambah sehingga setiap PTK dapat mengikuti program pelatihan guru dan tujuan pelatihan guru dapat terealisasi dengan lebih baik lagi terutam program guru penggerak agar dapat lebih disosialisasikan dan ditingkatkan jumlah kepesertaannya.

2) Urusan Kesehatan

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan menurut pendataan Long Form Tahun 2020-2024 menunjukkan trend yang meningkat. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup antara lain akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, status gizi, kesehatan lingkungan dan gaya hidup. Pada tahun 2024 terdapat 7 Kabupaten/Kota yang memiliki angka usia harapan hidup diatas rata-rata Provinsi. Angka Harapan Hidup yang tertinggi adalah di Kota Palembang yaitu 75,77 Tahun dan Kota Lubuk Linggau 74,97 Tahun. Hal tersebut disebabkan antara lain bahwa akses terhadap fasilitas kesehatan di perkotaan lebih baik dibanding pedesaan.

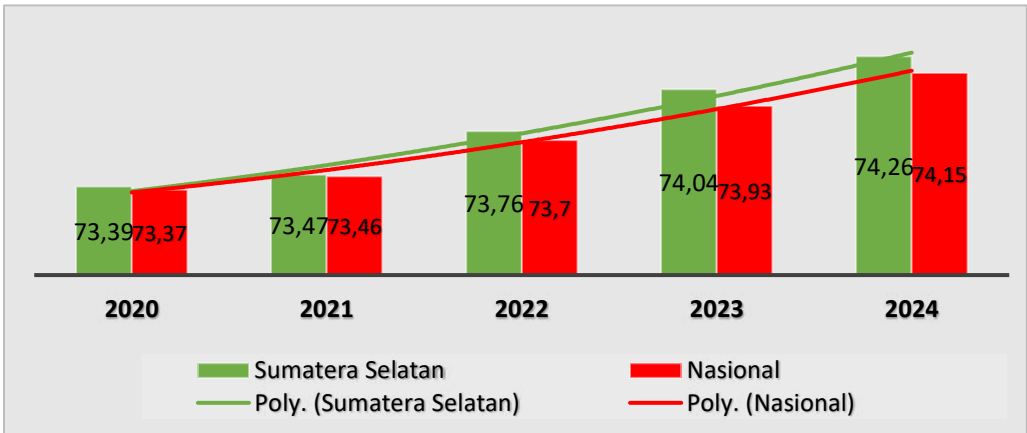
Secara umum tren Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan meningkat dan pada tahun 2024 capaian Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 74,26 Tahun telah diatas rata-rata capaian Nasional sebesar 74,15 Tahun.

Tabel 2.28
Angka Harapan Hidup (LF SP2020) Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
	Kab/Kota					
1	Ogan Komering Ulu	72,88	72,92	73,19	73,44	73,59
2	Ogan Komering Ilir	73,44	73,50	73,81	74,09	74,23
3	Muara Enim	73,52	73,63	73,97	74,29	74,49
4	Lahat	72,56	72,68	73,02	73,36	73,58
5	Musi Rawas	73,19	73,30	73,65	73,96	74,16
6	Musi Banyuasin	73,52	73,60	73,92	74,22	74,42
7	Banyuasin	73,55	73,64	73,98	74,29	74,47
8	OKU Selatan	72,69	72,70	72,88	73,21	73,44
9	OKU Timur	73,70	73,76	74,04	74,31	74,51
10	Ogan Ilir	72,37	72,49	72,86	73,20	73,43
11	Empat Lawang	70,21	70,25	70,55	70,81	70,93
12	PALI	73,22	73,28	73,56	73,84	74,02
13	Musi Rawas Utara	72,34	72,42	72,73	73,01	73,17
14	Kota Palembang	74,27	74,47	74,91	75,37	75,77
15	Kota Prabumulih	73,72	73,85	74,22	74,58	74,87
16	Kota Pagar Alam	72,66	72,80	73,22	73,61	73,88
17	Kota Lubuk Linggau	73,75	73,88	74,27	74,67	74,97
	Sumatera Selatan	73,39	73,47	73,76	74,04	74,26
	Nasional	73,37	73,46	73,7	73,93	74,15

Sumber: BPS 2025

Gambar 2.41
Angka Harapan Hidup (LF SP2020) Sumsel dan Nasional
Tahun 2020-2024

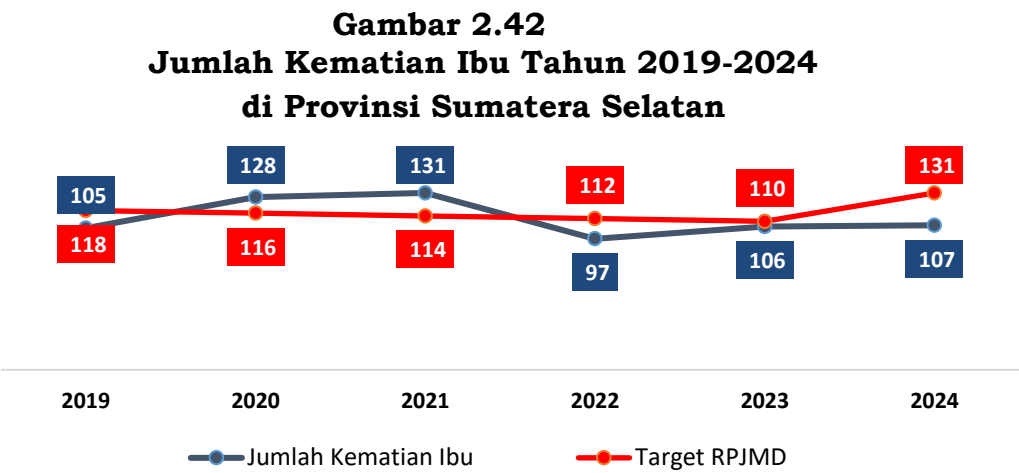


Sumber: BPS 2025

Jumlah Kematian Ibu

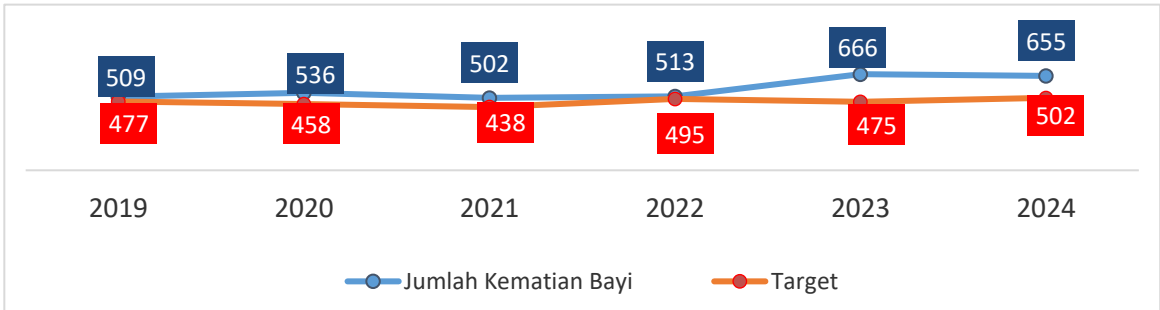
Jumlah kematian ibu di Provinsi Sumatera Selatan berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terdapat 105 kejadian dan mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021 menjadi 128 kejadian dan 131 kejadian, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 97 kejadian, namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 106

kejadian. Pada tahun 2024 jumlah kematian ibu kembali meningkat menjadi 107 kejadian namun angka ini telah mencapai target RPD yang sebesar 131 kejadian.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Gambar 2.43
Jumlah Kematian bayi Tahun 2019-2024
di Provinsi Sumatera Selatan



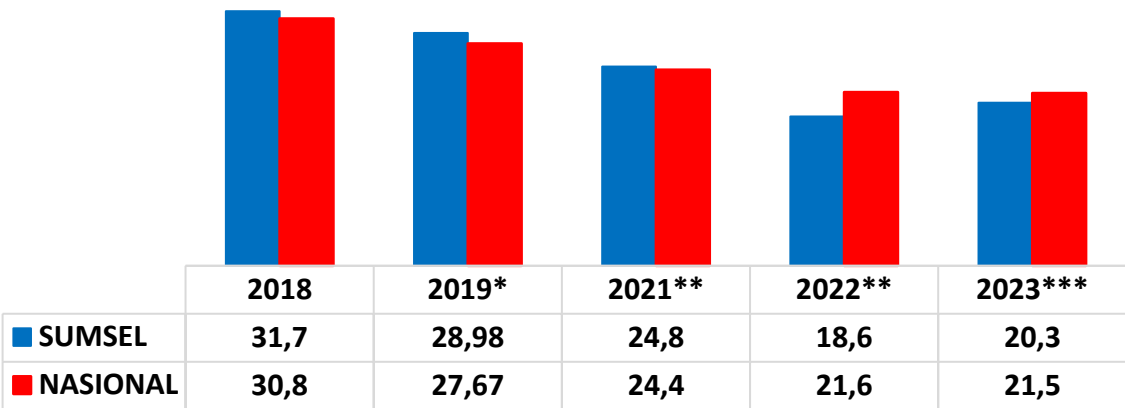
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Kematian Bayi selalu berfluktuatif, pada tahun 2019 sebesar 509 kasus pada 2020 mengalami peningkatan menjadi 536 kasus, pada tahun 2021 kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 502 kasus dan kembali meningkat menjadi 513 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlah kematian bayi kembali meningkat cukup signifikan menjadi 666 kasus, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 655 kasus. Tingginya kasus kematian bayi ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya belum semua tenaga Kesehatan di fasilitas Kesehatan mampu menangani kasus kegawatdaruratan neonatal dan rujukan ke Rumah Sakit masih belum sesuai standar (kompetensi dan sarana prasarana) serta masih kurangnya kewaspadaan petugas dalam mendeteksi secara dini factor resiko atau masalah yang akan terjadi dalam persalinan.

Prevalensi Balita Stunting

Prevalensi balita stunting Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun yaitu 18,6 persen pada tahun 2022 (data SSGI, 2022), capaian ini sudah berada diatas capaian nasional yaitu 21,6 persen. Namun pada tahun 2023 prevalensi balita stunting Provinsi Sumatera Selatan kembali meningkat menjadi 20,3 persen atau mengalami peningkatan sebesar 1,7 persen dari tahun 2022. Untuk mencapai target nasional sebesar 14% pada tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan masih perlu meningkatkan upaya percepatan pencegahan stunting terintegrasi dan konvergensi. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi sehingga membutuhkan pendekatan mutisektor dalam pencegahan stunting terintegrasi dan konvergensi.

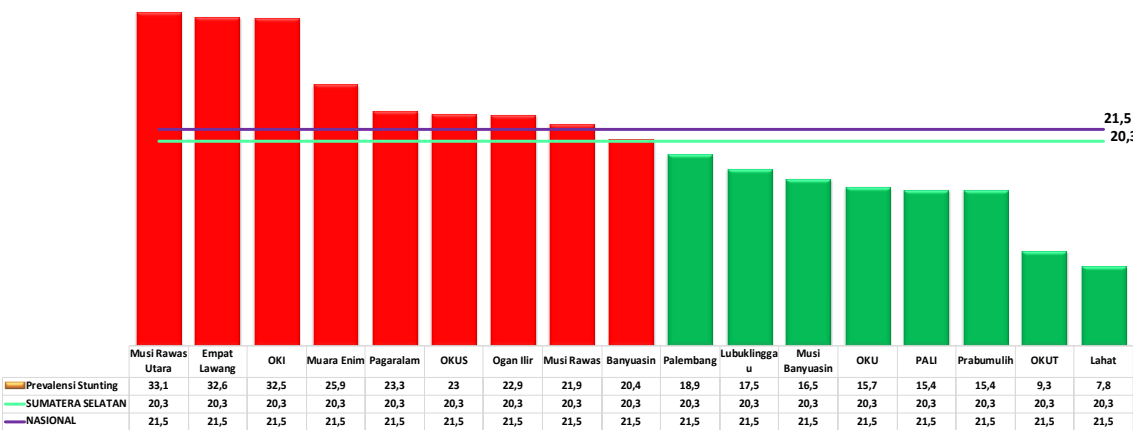
Gambar 2.44
Tren Prevalensi Balita Stunting Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018-2023



Sumber: Riset Kesehatan Dasar RI;
*Laporan Integrasi (Susenas) Maret 2019 dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019
** Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 dan 2022
*** Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023

Jika melihat capaian prevalensi balita stunting menurut kabupaten/kota pada tahun 2023, masih ada 9 kabupaten/kota yang berada diatas capaian Provinsi dan 8 kabupaten/kota yang berada diatas capaian nasional. Prevalensi balita stunting menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tren dibawah ini :

Gambar 2.45
Tren Prevalensi Balita Stunting Per Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023



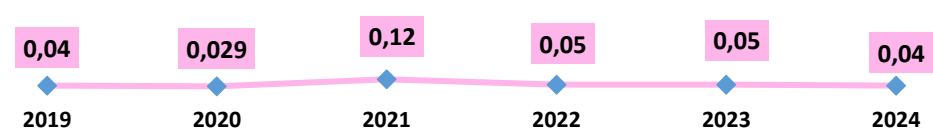
Sumber: Survei Kesehatan Indonesia (SKI 2023)

Angka Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk di Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuatif pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2019 Persentase balita gizi buruk sebesar 0,04 persen menurun menjadi

0,029 persen pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,12 persen dan kembali menurun pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 0,05 persen. Pada tahun 2024 peresentase balita gizi buruk mengalami penurunan kembali menjadi 0,04 persen.

Gambar 2.46
Persentase Gizi Buruk pada Balita di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2019-2024

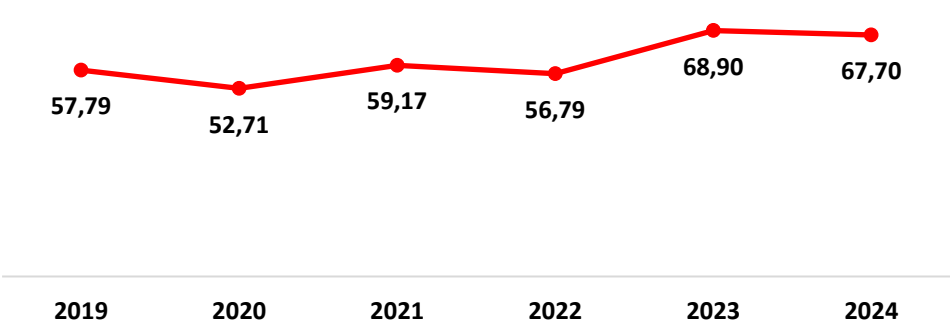


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Cakupan ASI Eksklusif

Cakupan ASI Eksklusif di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019-2024 berfluktuatif, pada tahun 2020 sebesar 52,71 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 57,79 persen. Namun pada tahun 2021 cakupan asi eksklusif di Provinsi Sumatera Selatan kembali membaik dan meningkat menjadi 59,17 persen dan tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 56,79 persen. Pada tahun 2023 kembali meningkat dan cukup signifikan menjadi 68,90 persen, dan tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 67,70 persen

Gambar 2.47
Cakupan ASI Eksklusif di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2019-2024

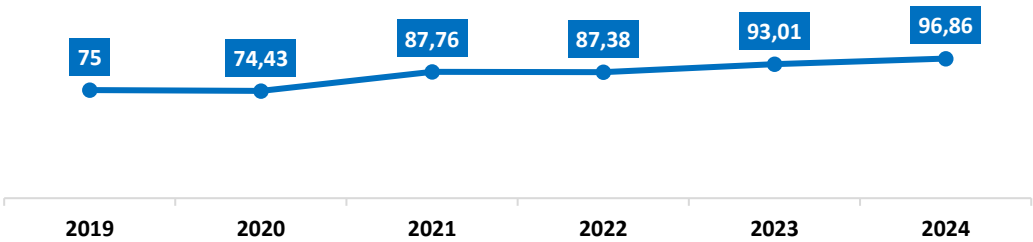


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM

Persentase desa yang melaksanakan STBM di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019-2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 Desa yang telah melaksanakan STBM sebesar 74,43 persen menurun dari tahun 2019 yang sebesar 75 persen, namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 87,76 persen dan sedikit menurun pada tahun 2022 yang menjadi 87,38 persen. Pada tahun 2023 persentase desa yang melaksanakan STBM kembali meningkat menjadi 93,01 persen dan terus meningkat pada tahun 2024 menjadi 96,86 persen

Gambar 2.48
Persentase Desa Yang Melaksanakn STBM
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024

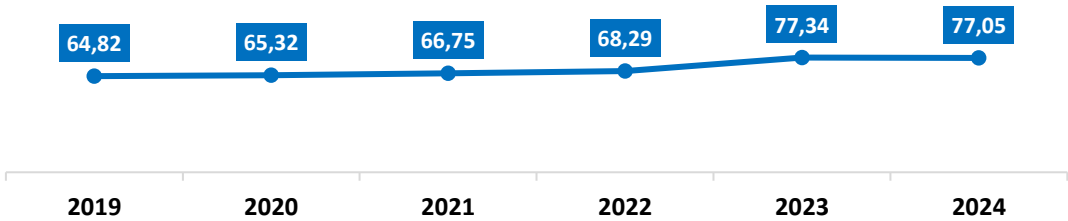


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

Persentase rumah tangga ber-PHBS di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019-2024 secara keseluruhan juga menunjukkan tren yang meningkat, pada tahun 2019 rumah tangga ber-PHBS di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 64,82 persen dan terus meningkat sampai dengan tahun 2023 menjadi 77,34 persen. Namun pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan menjdi 77,05 persen. Namun hal ini dapat menggambarkan bahwa pemahaman untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat sudah lebih baik dan meningkat.

Gambar 2.49
Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024

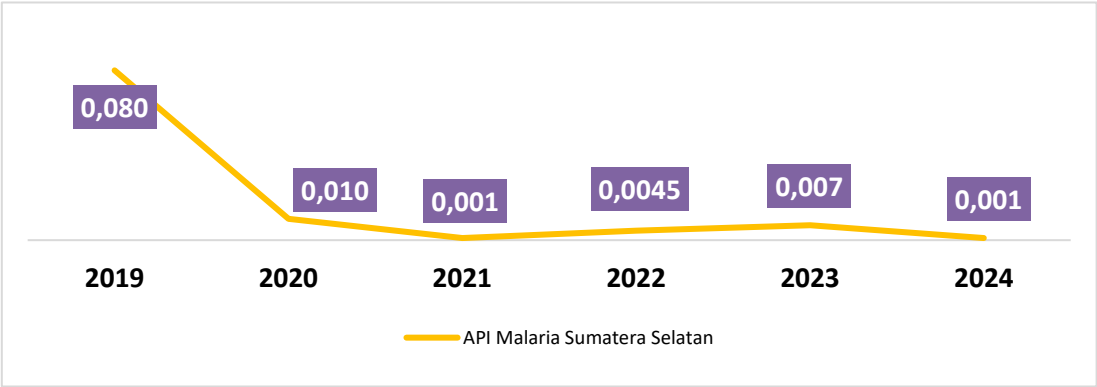


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Penyakit Menular

Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Annual Parasit Incidence (API) Malaria mengalami fluktuatif dari 0,08 persen pada tahun 2019 menurun menjadi 0,01 persen pada tahun 2020 dan menurun menjadi 0,001 persen pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,0045 persen dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 0,007 persen. Dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,001 persen. Demikian hal ini juga menunjukkan bahwa kasus malaria di Sumatera Selatan sangat sedikit.

Gambar 2.50
Annual Parasit Incidence (API) Malaria
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

TB Paru

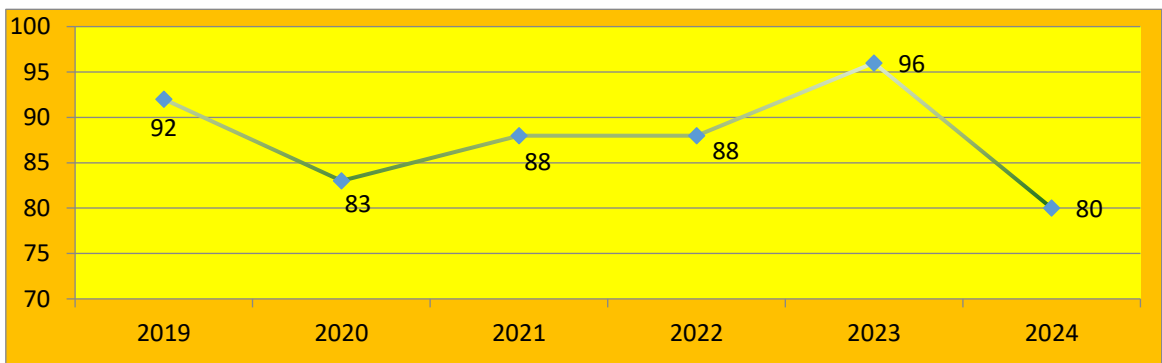
Angka penemuan pasien baru TB BTA Positif (Case Detection Rate) di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 berfluktuasi. Pada tahun 2019 sebesar 67 persen menurun menjadi 28 persen pada tahun 2020, namun meningkat menjadi 40 persen pada tahun 2021 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2023 dengan capaian sebesar 62,3 persen. Namun pada tahun 2024 menurun cukup signifikan menjadi 33,21 persen. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Case Detection Rate masih banyak pasien baru TB BTA Positif yang belum terdeteksi, Hal ini memerlukan perhatian kabupaten/kota dan Puskesmas untuk meningkatkan program deteksi/penemuan kasus TB baru.

Tabel 2.29
Persentase Case Detection Rate Penyakit TBC
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Case Detection Rate Penyakit TBC	67	28	40	53,04	62,3	33,21

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Gambar 2.51
Cakupan Pengobatan HIV / AIDS
Di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) Tahun 2019-2024



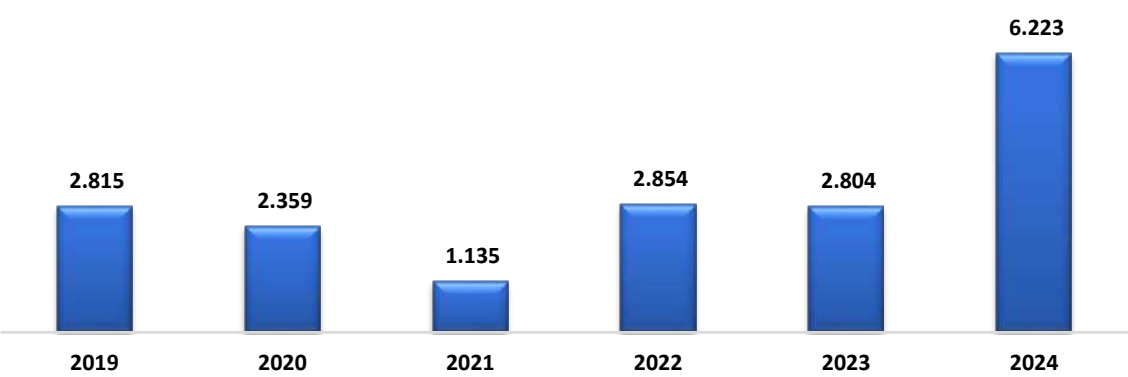
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Dilihat dari grafik diatas dalam 6 (enam) tahun terakhir, cakupan pengobatan HIV/AIDS mengalami fluaktif, tahun 2019 sebesar 92 persen menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 83 persen, pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 88 persen dan tahun 2022 tidak mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 96 persen dan mengalami penurunan menjadi 80 persen pada tahun 2024. Permasalahan yang terjadi pada pengobatan HIV/AIDS antara lain;

1. Tidak semua layanan kesehatan mampu tes dan Pengobatan HIV dan PIMS (*one stop service*)
2. Adanya gap antara jumlah yang dites HIV dengan reagen yang didistribusikan dan jumlah pasien yang memulai pengobatan HIV.Masih minimnya APBD II di Perangkat Daerah Pengampuh Kabupaten/Kota untuk program HIV-AIDS dan IMS, terutama untuk *sharing* reagen rapid tes HIV, reagen IMS dan obat-obatan IMS sebagai penunjang operasional layanan KTS dan IMS.
3. Keterbatasan logistik reagen HIV dan RPR Sifilis
4. Angka *Lost to follow up* yang cukup tinggi dari data kumulatif yang pernah memulai pengobatan HIV.
5. Banyaknya pasien yang putus makan obat.

Demam Berdarah Dengue (DBD)

Gambar 2.52
Jumlah Kasus DBD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2019 - 2024

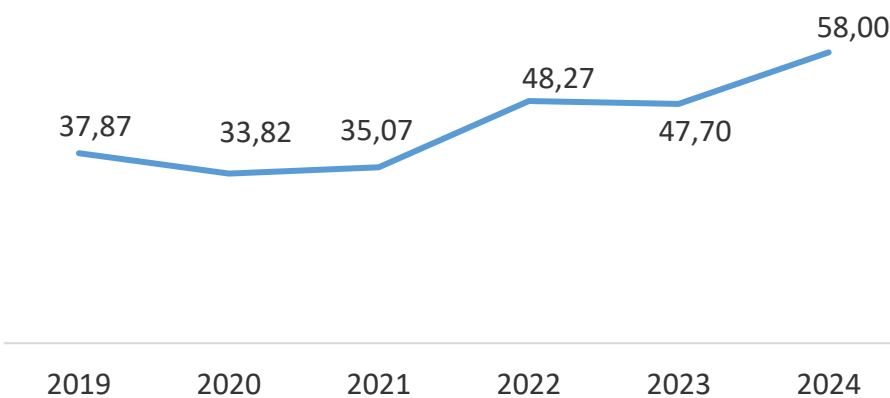


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Bila diperhatikan grafik diatas, dari tahun ke tahun kasus DBD mengalami fluktuasi, Situasi Demam Berdarah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 terjadi penurunan kasus dibandingkan tahun 2019, Pada tahun 2020 jumlah kasus mencapai 2.359 kasus dan tahun 2019 jumlah penderita DBD sebanyak 2.815 kasus. Dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 1.135 kasus. Akan tetapi pada Tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah kasus pada tahun 2021 yaitu sebanyak 2.854 kasus. Pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan menjadi 2.803 kasus. Dan pada tahun 2024, jumlah kasus DBD di Provinsi Sumatera Selatan cukup tinggi yaitu sebanyak 6.223 kasus.

Persentase Puskesmas Yang Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (9) Jenis Tenaga Kesehatan

Gambar 2.53
Persentase Puskesmas Yang Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar 9 Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024

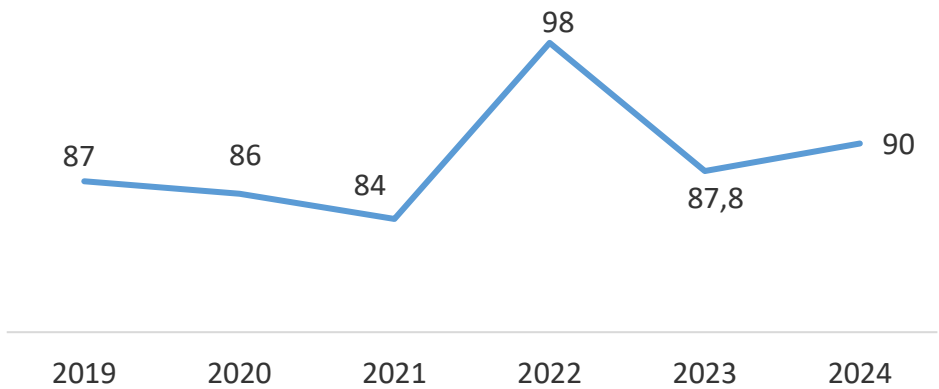


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Berdasarkan tren diatas, persentase puskesmas yang memiliki tenaga Kesehatan sesuai standar 9 jenis tenaga Kesehatan pada tahun 2019-2024 berfluktuatif. Pada tahun 2019 sudah 37,87% puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga Kesehatan namun menurun pada tahun 2020 menjadi 33,82%. Pada tahun 2021 dan 2022 persentase puskesmas yang memiliki tenaga Kesehatan sesuai standar 9 jenis tenaga Kesehatan kembali meningkat menjadi 35,07% dan 48,27%. Namun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 47,70% dan meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 58% dari total 353 puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun 9 jenis tenaga Kesehatan tersebut yaitu terdiri dari dokter, dokter gigi, bidan, perawat, kesehatan lingkungan (sanitarian), apoteker, tenaga gizi, kesehatan masyarakat dan ahli teknologi laboratorium medik (ATLM).

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Kebutuhan (Esensial)

Gambar 2.54
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Kebutuhan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024

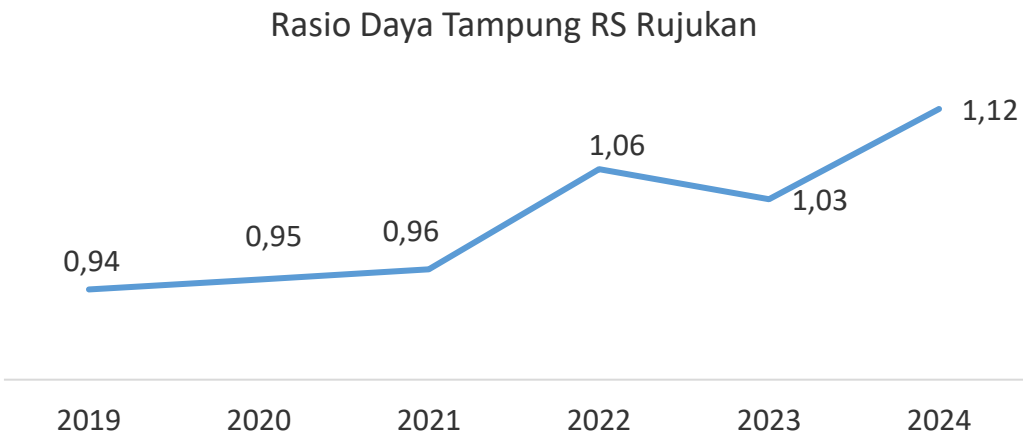


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Ketersediaan obat dan vaksin sesuai kebutuhan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019-2024 berfluktuatif. Pada tahun 2019 persentase ketersediaan obat dan vaksi sesuai kebutuhan mencapai 87% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 (86%) dan tahun 2021 (84%). Sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 98%, namun menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 87,8% dan meningkat kembali menjadi 90% pada tahun 2024. Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin sesuai kebutuhan (esensial) agar mencapai 100%.

Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

Gambar 2.55
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Berdasarkan tren grafik diatas, dapat dilihat bahwa daya tampung Rumah Sakit rujukan Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2019 angka daya tampung rumah sakit yaitu berada pada 0,94 artinya satu tempat tidur masih melayani lebih dari 1000 orang penduduk sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 daya tampung rumah sakit rujukan mengalami peningkatan menjadi 0,95 dan 0,96 namun masih belum memenuhi standar bahwa satu tempat tidur untuk 1000 orang penduduk. Pada tahun 2022 daya tampung rumah sakit mengalami peningkatan kembali menjadi 1,06 dan angkanya telah berada diatas satu yang artinya bahwa satu tempat tidur telah memenuhi standar dan dapat menampung kurang dari 1000 orang penduduk, begitu juga pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 1,03 dan 1,12 telah berada di atas satu dan telah mengalami peningkatan.

Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi

Tabel 2.30
Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Sumatera Selatan
Yang Terakreditasi Tahun 2019 – 2024

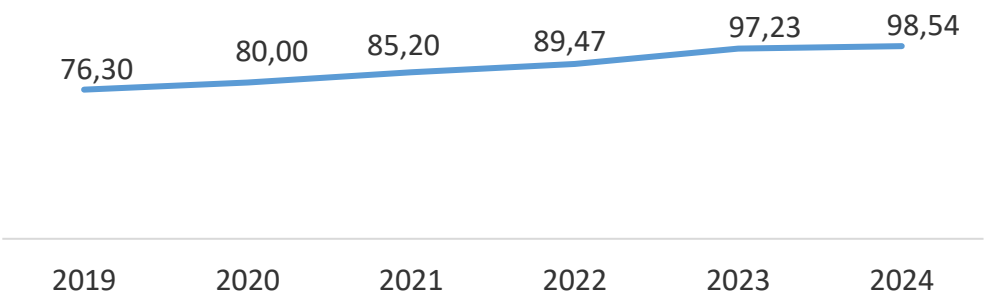
Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Provinsi Sumatera Selatan baru memiliki satu rumah sakit yang menjadi Rumah Sakit rujukan provinsi dalam arti rumah sakit umum daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah dan telah terakreditasi, dengan kata lain rumah sakit rujukan Provinsi Sumatera Selatan telah terakreditasi 100% dari tahun 2019 sampai tahun 2024 dengan akreditasi paripurna.

Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan

Gambar 2.56
Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Tren persentase penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Provinsi tahun 2019-2024 mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2019 penduduk yang telah memiliki jaminan Kesehatan sebanyak 76,30%, meningkat pada tahun 2020 menjadi 80% dan terus meningkat pada tahun 2021 dan 2020 menjadi 85,20% dan 89,47%. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 97,23% dan terus mengalami peningkatan menjadi 98,54% pada tahun 2024. Dari data diatas pada tahun 2024 masih terdapat sekitar 1,46% penduduk yang belum memiliki jaminan Kesehatan, untuk itu Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya dan mendorong Universal Healthy Coverage menuju 100% diantaranya yaitu melalui peningkatan masyarakat miskin dapat dicover melalui PBI JK dan program Sumsel Berobat Pakai KTP (Sumsel Berkat) yang mulai dirilis pada September tahun 2023 serta mendorong masyarakat untuk dapat menjadi kepesertaan jaminan Kesehatan secara mandiri.

Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Target capaian Pemerintah daerah provinsi untuk indikator ini adalah 100%. Adapun capaian Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 100% setiap tahunnya.

Tabel 2.31
Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 – 2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB. Indikator ini juga merupakan indikator provinsi dalam menerapkan SPM Kesehatan.

Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB di provinsi, dinilai dari persentase Jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah penduduk kondisi KLB. Adapun capaian Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019-2024 telah mencapai 100%.

Tabel 2.32
Persentase Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Capaian SPM bidang Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan sangat tergantung dari dukungan pelaksana program/kegiatan pembangunan kesehatan. Pada tahun 2024, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan didukung sejumlah tim kesehatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten/kota, serta Puskesmas kabupaten/kota.

Tabel 2.33
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100
		Jumlah = 6.917 orang		
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk terdampak akibat KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100
		Jumlah = 156 orang		

Sumber : Laporan SPM Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Prov. Sumsel 2025

Pada tahun 2024, terdapat 6.917 orang yang terdampak krisis bencana dan/atau berpotensi bencana dan mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan dengan jumlah lokasi kejadian sebanyak 575 lokasi/desa/kelurahan kejadian.

Pada tahun 2024, terdapat 73 kejadian KLB di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan frekuensi KLB paling banyak yaitu kasus Pertusis sebanyak 62 kali, kejadian keracunan makanan sebanyak 4 kali, Rabies 4 kali, Tetanus

Neonatorum 2 kali dan campak 1 kali. Jumlah penduduk yang terdampak KLB yang dilayani pada tahun 2023 adalah sebesar 156 orang.

Upaya pencapaian target Indikator SPM tahun 2024 memiliki beberapa kendala dan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. SPM, Pelayanan Krisis Kesehatan Akibat bencana hanya berlaku di Provinsi sehingga mengalami kesulitan bagi kabupaten/kota untuk mengusulkan kegiatan penanganan krisis kesehatan di kabupaten/kota
2. Sulitnya menyusun kebutuhan anggaran (unit cost) karena perlu melibatkan lintas sektor, khususnya mekanisme pencairan dana pasca bencana yang sifatnya sewaktu-waktu dan memerlukan pencairan dana yang sifatnya segera
3. Upaya pembinaan pada masyarakat terdampak/beresiko bencana belum dilakukan secara maksimal hanya dilakukan pada saat terjadi bencana dan pasca bencana saja. Sehingga masyarakat yang beresiko dan tinggal di wilayah bencana seperti daerah aliran sungai, rawan longsor dan daerah resiko kabut asap belum mendapatkan pembinaan dan advokasi cara pencegahan dan pertolongan dampak krisis bencana secara maksimal.
4. Kejadian bencana yang sering terjadi di wilayah provinsi Sumatera Selatan, merupakan kejadian bencana yang selalu berulang, seperti banjir, kabut asap, kecelakaan air kebakaran rumah penduduk dan banjir bandang, untuk itu diperlukan upaya bersama meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dan dapat mencegah terjadinya bencana
5. Baru sebagian kabupaten/kota belum mempunyai rencana kontijensi dan rencana operasi sehingga menyulitkan upaya penanggulangan dan pencegahan krisis kesehatan
6. Badan Penanggulangan Jaminan Sosial bidang Kesehatan tidak menanggung masyarakat terkait bencana.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan Tim Penerapan SPM bidang kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sehingga memudahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan SPM bidang kesehatan.
2. Meningkatkan kemampuan kapasitas sumber daya manusia di lapangan

dalam menghadapi bencana, terutama terkait pembinaan dalam pencatatan dan pelaporan.

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal penyusunan perencanaan dan perhitungan kebutuhan anggaran per unit cost untuk kebutuhan pelaksanaan SPM kesehatan.
4. Memberikan pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat terutama daerah rawan bencana/resiko tinggi, berdasarkan rencana operasi, mitigasi, dan kontijensi, serta memberikan materi upaya pemahaman serta mencegah terjadi bencana dan cara pertolongan dirinya sendiri (P3K) masyarakat yang beresiko tinggi.
5. Mensosialisasikan (Standar Pelayanan Minimum) SPM, ke pengelola program sampai ketingkat PUSTU, Puskesmas dan dinas kesehatan Kabupaten/Kota, upaya memberikan pemahaman dan tanggung jawab dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada pra, saat dan pasca krisis bencana, untuk memastikan semua korban/warga yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terlayani di pos kesehatan, pelayanan kesehatan swasta, puskesmas dan rumah sakit.
6. Membuat rencana kontijensi, dan peta resiko mulai dari unit terkecil, desa, kecamatan per kejadian bencana untuk memudahkan operasi penanganan bencana saat terjadi bencana krisis kesehatan.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum

Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, peruntukan Jalan dibagi atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sedangkan Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan statusnya, jalan umum dikelompokkan menjadi beberapa bagian :

1. Jalan Nasional merupakan jalan Arteri dan jalan Kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota Provinsi, jalan strategis Nasional, serta jalan tol.

2. Jalan Provinsi merupakan jalan Kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antaribukota Kabupaten/ kota, dan jalan strategis Provinsi.
3. Jalan Kabupaten merupakan jalan Lokal dalam sistem jaringan jalan Primer yang tidak termasuk dalam Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antaribukota Kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan Sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten.
4. Jalan Kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan Sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
5. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan, jalan umum menurut fungsinya terdiri dari :

1. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi.
2. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 3 (tiga) ruas jalan utama, dimana 2 (dua) diantaranya memiliki fungsi strategis dan sangat vital sebagai penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Adapun ketiga ruas jalan utama tersebut adalah :

(a) Lintas Timur Sumatera

Membentang dari Batas Lampung – Pematang Panggang – Simpang Penyandingan – Kayu Agung – Simpang Indralaya – Palembang –

Betung – Batas Jambi sepanjang 405,32 Km dan melewati 5 (lima) kabupaten/kota dan pada umumnya terletak pada daerah dataran rendah serta rawa-rawa.

(b) Lintas Barat Sumatera

Membentang dari batas Lampung Martapura – Baturaja – Simpang Sugiwaras – Muara Enim – Lahat – Tebing Tinggi – Lubuk Linggau – Terawas – Batas Jambi sepanjang 472,35 Km dan melewati 6 (enam) kabupaten/kota. Pada umumnya terletak pada daerah dataran tinggi (pegunungan) dan permukaan bergelombang.

(c) Penghubung Antar Jalan Lintas

Pada saat ini jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan penghubung antar jalan lintas terdiri dari 2 (dua) jalan penghubung:

(1) Simpang Indralaya – Prabumulih – Muara Enim

Jalan ini sepanjang 147,46 Km melewati 3 (tiga) kabupaten/kota. Secara umum ruas jalan ini terletak pada daerah dataran rendah.

(2) Betung – Sekayu – Muara Beliti

Sepanjang 253,43 Km dan melewati 2 (dua) kabupaten. Secara umum ruas ini terletak pada daerah dataran rendah dan juga berada di pinggiran Sungai Musi.

(d) Penghubung Alternatif Bagian Timur

Jalan penghubung alternatif antar 2 (dua) jalan lintas utama (Lintas Timur dan Lintas Tengah) di bagian sebelah timur wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilayani ruas jalan Simpang Penyandingan – Simpang Kepuh – Kurungan Nyawa – Martapura sepanjang 138,74 Km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,50 meter.

(e) Penghubung Alternatif Bagian Tengah

Jalan penghubung alternatif ini dilayani ruas Prabumulih – Simpang Prabumulih – Simpang Beringin – Baturaja sepanjang 106,14 Km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,50 meter.

(f) Penghubung Alternatif Bagian Barat (Tengah Barat)

(1) Ruas Jalan Martapura – Ujan Mas – Batas Bengkulu

Penanganan jalan ini masih secara terus menerus dilaksanakan peningkatannya. Pada ruas jalan ini kondisi geometriknya belum memenuhi persyaratan, sebagian besar alignment vertikal masih bergelombang karena berada di daerah perbukitan.

(2) Ruas Jalan Lahat – Pagar Alam – Tanjung Sakti – Batas Bengkulu

Jalan ini terletak di dataran tinggi yang rawan longsor dan patahan dengan kondisi jalan dari Pagar Alam menuju Tanjung Sakti – Batas Bengkulu dalam kondisi relatif dengan lebar jalan antara 3,5 – 4,5 meter.

(3) Ruas Jalan Pagar Alam – Tanjung Raya – Batas Bengkulu

Panjang ruas jalan ini adalah 52,7 km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,5 meter dengan jenis perkerasan lapisan aspal dengan kondisi 60% baik. Trase jalan terletak di daerah perbukitan dan menyusuri sungai. Lokasi rawan longsor dan daerah patahan.

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan tentu saja mempengaruhi mobilitas orang maupun barang. Salah satu Infrastruktur penentu ialah infrastruktur jalan yang dituntut supaya mampu memfasilitasi. Keberadaan infrastruktur jalan menjadi sangat vital karena fungsinya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin aksesibilitas antar wilayah. Jalan di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan statusnya dikategorikan dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota. Total panjang jalan sampai dengan tahun 2023 sebesar 17.876,27 km, dengan komposisi Jalan Nasional sepanjang 1.581,148 km (8,84%), Jalan Provinsi sepanjang 1.779,27 Km (9,95%) dan Jalan Kabupaten/Kota sepanjang 14.515,85 Km (81,20%). Adapun kondisi jalan nasional dan kondisi jalan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 – 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.34
Tabel Kondisi Jalan Nasional di Sumatera Selatan Tahun 2022 - 2023

		TAHUN 2022	TAHUN 2023
PANJANG JALAN		1.600,16	1.581,148
KONDISI BAIK	Km	807,22	844,598
	%	50,45	53,42
KONDISI SEDANG	Km	705,08	690,61
	%	44,06	43,68
KONDISI RUSAK RINGAN	Km	78,45	40,86
	%	4,90	2,58

		TAHUN 2022	TAHUN 2023
PANJANG JALAN		1.600,16	1.581,148
KONDISI RUSAK BERAT	Km	9,42	5,08
	%	0,59	0,32
KONDISI JALAN MANTAP	Km	1.512,3	1.535,208
	%	94,51	97,09

Sumber : <https://data.pu.go.id/>, 2023

Tabel 2.35
Tabel Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Tahun 2022 - 2023

		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		Kabupaten	Kota	Kabupaten	Kota
PANJANG JALAN		13.747,64	1.905,93	12.609,92	1.905,93
KONDISI BAIK	Km	4.663,11	578,83	5.137,19	663,47
	%	33,92	30,37	40,74	34,81
KONDISI SEDANG	Km	2.191,94	827,22	2.123,45	801,63
	%	15,94	43,40	16,84	42,06
KONDISI RUSAK RINGAN	Km	3.701,19	224,66	2.316,36	143,56
	%	26,92	11,79	18,37	7,53
KONDISI RUSAK BERAT	Km	3.191,39	275,22	3.032,90	297,27
	%	23,21	14,44	24,05	15,60
KONDISI JALAN MANTAP	Km	6.855,05	1.406,05	7.260,64	1.465,10
	%	49,86	73,77	57,58	76,87

Sumber : <https://data.pu.go.id/>, 2023

Kondisi transportasi darat atau jalan tidak terlepas dari kondisi kinerja jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2021 realisasi kondisi kemantapan jalan provinsi menggunakan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 nomor 130/KPTS/DIS PU BM/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan primer menurut fungsinya sebagai jalan kolektor-2 dengan panjang sebesar1.513,653 Km, dan untuk tahun 2022 menggunakan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 nomor 902/KPTS/DIS.PUBMTR/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Primer Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi dengan panjang jalan 2.113,747 Km, sedangkan untuk tahun 2023 menggunakan

SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan primer menurut statusnya sebagai jalan statusnya sebagai jalan provinsi dengan panjang jalan sebesar 1.779,27 Km. Adapun kondisi jalan provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 – 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.36
Tabel Kondisi Jalan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023

		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Jalan Provinsi	Jalan Provinsi	Jalan Provinsi	Jalan Provinsi	Jalan Provinsi
PANJANG JALAN		1.513,653	1.513,653	1.513,653	2.113,75	1.779,27
KONDISI BAIK	Km	857,29	938,15	1.322,02	1.609,01	1.121,60
	%	56,64	61,98	87,34	76,12	63,04
KONDISI SEDANG	Km	341,02	424,50	99,89	222,78	446,85
	%	22,53	28,04	6,60	10,54	25,11
KONDISI RUSAK RINGAN	Km	163,80	64,42	30,74	56,57	140,13
	%	10,82	4,26	2,03	2,68	7,88
KONDISI RUSAK BERAT	Km	151,53	86,58	61,00	225,29	70,71
	%	10,01	5,72	4,03	10,66	3,97
KONDISI JALAN MANTAP	Km	1.198,31	1.362,65	1.421,91	1.831,79	1.568,45
	%	79,17	90,02	93,94	86,66	88,15

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel, 2023

Ruas jalan berdasarkan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan primer menurut statusnya sebagai jalan statusnya sebagai jalan provinsi dengan panjang jalan sebesar 1.779,27 Km (88 ruas) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.37
Daftar Ruas Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2023

NO	NO RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS (Km)	KETERANGAN
1	1	1	K	JLN. LINGKAR MASJID AGUNG (PALEMBANG)	0,36	PALEMBANG
2	1	2	K	JLN. MERDEKA (PALEMBANG)	1,40	PALEMBANG
3	1	3	K	JLN. KOL ATMO (PALEMBANG)	1,00	PALEMBANG
4	1	4	K	JLN. BRIGJEN. HM. DHANNY EFFENDY (PALEMBANG)	1,20	PALEMBANG
5	1	5	K	JLN. KOL. AHMAD BADARUDDIN - JLN. LETKOL. ISKANDAR (PALEMBANG)	1,23	PALEMBANG
6	1	6	K	JLN. PSW. SUBEKTI (PALEMBANG)	0,40	PALEMBANG
7	1	7	K	JLN. DIPONEGORO (PALEMBANG)	1,00	PALEMBANG
8	1	8	K	JLN. KAPTEN A. RIVAI (PALEMBANG)	1,70	PALEMBANG
9	1	9	K	JLN. WALIKOTA H. HUSNI (PALEMBANG)	0,80	PALEMBANG
10	1	10	K	JLN. JAKSA AGUNG R. SOEPRAPTO (PALEMBANG)	1,14	PALEMBANG
11	1	11	K	JLN. M. ISA (PALEMBANG)	2,18	PALEMBANG
12	1	12	K	JLN. ANGKATAN 45 (PALEMBANG)	2,00	PALEMBANG
13	1	13	K	JLN. SULTAN M. MANSYUR (PALEMBANG)	4,22	PALEMBANG
14	1	14	K	JLN. SRIJAYA NEGARA (PALEMBANG)	1,69	PALEMBANG
15	1	15	K	JLN. AKBP CEK AGUS (PALEMBANG)	1,31	PALEMBANG
16	1	16	K	JLN. PANGERAN RATU - PASAR INDUK – SP. JL. PENDIDIKAN (PALEMBANG)	5,10	PALEMBANG
17	1	17	K	JLN. DI PANJAITAN (PALEMBANG)	3,40	PALEMBANG
18	1	18	K	JLN. MP. MANGKUNEGARA (PALEMBANG)	2,58	PALEMBANG
19	1	19	K	JLN. MAYOR ZEN (PALEMBANG)	5,00	PALEMBANG
20	1	20	K	JLN.PANGERAN AYIN (KOTA PALEMBANG) - BTS. BANYUASIN	1,40	PALEMBANG
21	1	21	K	JL. PENDIDIKAN - JLN. LINGKAR SELATAN (PALEMBANG)	2,40	PALEMBANG
22	1	22	K	JLN. KAPT. ABDULLAH - JLN. ROBANI KADIR	5,40	PALEMBANG
23	1	23	K	JLN. LETTU KARIM KADIR (GANDUS) - BTS. KAB. BANYUASIN	12,00	PALEMBANG
24	1	24	K	JLN. NOERDIN PANDJI (PALEMBANG)	5,25	PALEMBANG
25	1	25	K	BTS. KOTA PALEMBANG - KENTEN LAUT (BANYUASIN)	2,70	BANYUASIN
26	1	26	K	JLN. TALANG KERAMAT (BANYUASIN)	5,60	BANYUASIN
27	1	27	K	JLN. TAQWA MATA MERAH (PALEMBANG) - MERAH MATA (BTS. KAB. BANYUASIN)	7,70	PALEMBANG
28	1	28	K	JLN. ADI SUCIPTO – BTS. KAB. BANYUASIN (PALEMBANG)	2,23	PALEMBANG
29	2			BTS. KOTA PALEMBANG – SUKAJADI (BANYU ASIN)	5,75	BANYUASIN
30	3			BTS. KOTA PALEMBANG – SUKOMORO (BANYUASIN)	8,78	BANYUASIN

NO	NO RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS (Km)	KETERANGAN
31	4			PLAJU – SP. SUNGAI PINANG - BTS. KAB OKI	19,75	PALEMBANG
32	5			JLN. KTM. RAMBUTAN – SP. LOROK	21,33	BANYUASIN
33	6			SP. OPI - BABATAN SAUDAGAR - SRIJABO	35,00	BANYUASIN
34	7			JLN. AKSES MENUJU KEBUN RAYA SRIWIJAYA – SP. LOROK	11,00	OGAN ILIR
35	8			BTS. KAB. BANYUASIN – CELIKAH (KAYU AGUNG)	40,40	OKI
36	9			SP. MERANJAT – BTS KAB. MUARA ENIM	50,60	OGAN ILIR
37	10			BTS. KAB. MUARA ENIM – PAYARAMAN	8,25	OGAN ILIR
38	11			TANJUNG RAJA – SP. TAMBANG RAMBANG	59,20	OGAN ILIR
39	12			SP. PENYANDINGAN – BTS. KAB. OKUT	24,20	OGAN ILIR
40	13			JLN. AKSES TPI SUNGSANG (BANYUASIN)	11,10	BANYUASIN
41	14			TRANS SP. 1 - SP. TANAH ABANG	6,80	OKUT
42	15			CEMPAKA - TRANS SP. 1	12,51	OKUT
43	16			SP. TAMBANG RAMBANG – BTS. KAB. OKU	23,50	OKI
44	17			LUBUK SEBERUK - SUMBU SARI - MATARAM JAYA	22,28	OKI
45	18			BTS. KAB. OKI – SP. KEPUH	50,95	OKUT
46	19			BTS. KAB. OGAN ILIR- PENINJAUAN (SP. BATUMARTA UNIT XII)	28,30	OKUT
47	20			SEKAYU – BTS. KAB. PALI	40,84	MUBA
48	21			BETUNG - PETANGGAN	21,30	OKUT
49	22			DABUK REJO – BTS. KAB. OKUT	15,30	OKUT
50	23			PETANGGAN – TJ. KEMUNING – BTS. KAB. OKI	18,90	OKUT
51	24			GUMAWANG - RASUAN (SP. KEPUH)	23,55	OKUT
52	25			PENINJAUAN (SP. BATUMARTA UNIT XII) - SP. LUBUK BATANG	21,05	OKUT
53	26			GUMAWANG – PETANGGAN	21,40	OKUT
54	27			SP. KEPUH – KURUNGAN NYAWA	41,70	OKUT
55	28			KURUNGAN NYAWA – GUMAWANG	28,60	OKUT
56	29			KURUNGAN NYAWA – MARTAPURA	21,40	OKUT
57	30			MARTAPURA – SP. MARTAPURA	29,15	OKUT
58	31			SP. SUKAJADI (BATURAJA) - SP. LENGKITI	31,25	OKU
59	32			SP. LENGKITI - SP MARTAPURA	21,05	OKU
60	33			SP. MARTAPURA – MUARA DUA	25,40	OKUS
61	34			MUARA DUA – SP. HAJI	11,00	OKUS
62	35			SP. HAJI – SP. CAMPANG	35,00	OKUS
63	36			SP. CAMPANG - SP. MUARA SINDANG	35,60	OKUS
64	37			SP. MUARA SINDANG - BTS. PROV. BENGKULU	25,40	OKUS
65	38			MUARA DUA - SP. SENDER	41,75	OKUS
66	39			SP. SENDER - BTS. PROV. LAMPUNG	18,03	OKUS
67	40			LEmbak – BTS. KAB. OGAN ILIR	20,45	MUARA ENIM
68	41			LEmbak - MODONG (BTS. KAB. PALI)	16,90	MUARA ENIM
69	42			BTS. KAB. OGAN ILIR – BERINGIN	24,10	MUARA ENIM
70	43			SP. RAJA - MODONG (BTS. KAB. MUARA ENIM)	46,10	MUARA ENIM
71	44			SP. AIR ITAM – SP. TALANG BULANG	36,50	PALI
72	45			BTS. KAB. MUBA-SP. AIR ITAM	36,40	PALI
73	46			JLN. SP. BELIMBING – PENDOPO (PALI)	35,00	PALI
74	47			SP. LIMA PENDOPO (KAB. PALI) - BTS. KAB. MURA	32,00	PALI
75	48			SP. 9 BANGUN JAYA - SP. KULIM (BTS. PALI)	39,00	PALI
76	49			SP. SUGIHWARAS – BTS. KAB. LAHAT	51,03	OKI
77	50			SP. SEMAMBANG - SP. 9 BANGUN JAYA (MUSIRAWAS)	37,50	LAHAT
78	51			BTS. KAB. MUARA ENIM – SP. AIR DINGIN	35,17	LAHAT
79	52			MUARA SIBAN – SP. EMBACANG	48,00	LAHAT
80	53			KEBAN AGUNG - SP. TJ.ARO (PAGARALAM)	6,80	PAGAR ALAM
81	54			TJ. CERMIN - PERANDONAN (PAGARALAM)	7,30	PAGAR ALAM
82	55			TEBING TINGGI - PENDOPO (EMPAT LAWANG)	27,60	EMPAT LAWANG
83	56	K		JLN. HANDAYANI (KOTA LUBUK LINGGAU) - TUGUMULYO (KAB. MUSI RAWAS)	13,62	LUBUK LINGGAU DAN MUSI RAWAS
84	57			TEBING TINGGI – TANJUNG RAYA	40,03	EMPAT LAWANG
85	58			SP. PERIUK – TUGU MULYO – TERAWAS	36,95	MUSI RAWAS
86	59			PAGARALAM – TANJUNG RAYA	47,00	PAGAR ALAM
87	60			TERAWAS – TABATINGGI – MAUR	59,86	EMPAT LAWANG
88	61			TANJUNG RAYA – BTS. PROV. BENGKULU	32,23	EMPAT LAWANG
				TOTAL	1779,27	

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel, 2023

Persentase kondisi jalan mantap merupakan hal penting untuk memperlancar arus pergerakan kendaraan dalam mendukung pelayanan transportasi masyarakat. Kemantapan jalan memungkinkan kendaraan untuk mencapai kecepatan yang optimal untuk mempersingkat waktu tempuh. Jalan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi baik dan sedang, sedangkan kondisi tidak mantap jika keadaan jalan tersebut dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Adapun rasio kemantapan jalan provinsi Tahun 2023 yaitu sebesar 88,15%. Kondisi jalan mantap provinsi di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2.38
Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya
di Sumatera Selatan Tahun 2023

NO	KAB/KOTA	PANJANG	KONDISI JALAN PROVINSI							
			BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)
1	PALEMBANG	74,08	59,55	80,39	9,48	12,80	4,80	6,48	0,25	0,34
2	BANYUASIN	53,68	12,78	23,81	29,30	54,58	7,70	14,34	3,9	7,27
3	MUBA	40,84	8,39	20,54	20,60	50,44	11,85	29,02	0,00	0,00
4	OGAN ILIR	102,18	36,61	35,83	48,39	47,36	14,67	14,36	2,51	2,46
5	OKI	204,68	60,02	29,32	87,21	42,61	30,05	14,68	27,4	13,39
6	OKU	101,65	29,35	28,87	56,20	55,29	15,3	15,05	0,80	0,79
7	OKUT	269,46	199,34	73,98	42,52	15,78	16,00	5,94	11,60	4,30
8	OKUS	192,18	148,36	77,2	34,47	17,94	5,75	2,99	3,60	1,87
9	MUARA ENIM	123,48	98,53	79,79	14,26	11,55	3,69	2,99	7,00	5,67
10	PALI	186,00	152,5	81,99	21,42	11,52	7,88	4,24	4,20	2,26
11	PAGARALAM	14,10	6,63	44,89	4,75	33,69	2,97	21,06	0,05	0,35
12	LAHAT	83,17	50,57	60,80	27,00	32,46	5,60	6,73	0,00	0,00
13	EMPAT LAWANG	146,86	104,26	70,99	28,85	19,64	6,75	4,60	7,00	4,77
14	MURA	113,45	94,93	83,68	11,6	10,22	4,52	3,98	2,40	2,12
15	MURATARA	59,86	51,66	86,30	6,80	11,36	1,40	2,34	0,00	0,00
16	LUBUKLINGGAU	13,62	8,42	61,82	4,00	29,37	1,20	8,81	0,00	0,00
TOTAL		1.779,27	1.121,60	63,04	446,85	25,11	140,13	7,88	70,71	3,97
% KONDISI			88,15 (JALAN DALAM KONDISI MANTAP)				11,85 (JALAN DALAM KONDISI RUSAK)			

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel, 2023.

Untuk meningkatkan nilai rasio kemantapan jalan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan fokus dalam penanganan infrastruktur jalan yaitu penanganan jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan. Sementara untuk mempertahankan nilai rasio kemantapan jalan difokuskan pada pemeliharaan jalan dalam kondisi baik dan sedang. Indikator tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, juga dukungan pendanaan dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk melebarkan jalan menuju standar dan mempertahankan kondisi jalan mantap.

Analisis perbandingan kinerja dan capaian tahun lalu dapat dijadikan pertimbangan untuk dijadikan *baseline* pengukuran target kinerja di tahun berikutnya. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan handal, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta pemanfaatan pendanaan di luar APBD Provinsi Sumatera Selatan harus dioptimalkan untuk mencapai target rasio persentase kemantapan jalan. Penanganan jalan Provinsi Sumatera Selatan juga harus fokus pada peningkatan kualitas jalan agar tercapainya umur rencana jalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan terciptanya keselamatan bagi pengguna jalan. Selain itu, pengembangan jaringan jalan juga berguna untuk mendukung terwujudnya konektivitas antar wilayah. Selain itu untuk mendukung tujuan ekonomi dan sosial infrastruktur sumber daya air juga penting antara lain infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.

Selain itu, untuk mendukung tujuan ekonomi dan sosial, infrastruktur sumber daya air juga penting antara lain infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.

Berikut ini Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015.

Tabel 2.39
Daerah Irigasi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

No.	Nama Daerah Irigasi (DI)	Kabupaten/Kota	Luasan (Ha)
1	D.I. Komering Selatan/Way Komering	Kab. Ogan Komering Ilir dan Kab. OKU Timur	57.488
2	D.I. Kelingi Tugu Mulyo	Kab. Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau	10.163
3	D.I. Air Keruh	Kab. Empat Lawang	3.152
4	D.I. Lintang Kanan	Kab. Empat Lawang	3.054
5	D.I. Lintang Kiri	Kab. Empat Lawang	3.038
6	D.I. Air Lakitan	Kab. Musi Rawas	9.500
7	D.I. Muara Riben	Kota Pagar Alam	3.050
	JUMLAH		89.445

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015

Tabel 2.40
Daerah Irigasi Rawa di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

No.	Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR)	Luasan (Ha)
Kab. Banyuasin		
1	D.I.R. Air Saleh	17.011
2	D.I.R. Air Senda	4.711
3	D.I.R. Delta Air Sugihan Kiri	34.690
4	D.I.R. Delta Cinta Manis	5.554
5	D.I.R. Delta Upang	5.896
6	D.I.R. Gasing Puntian	4.830
7	D.I.R. Ka. Agung Hilir	9.777
8	D.I.R. Karang Agung I	6.300
9	D.I.R. Kr. Agung Tengah	4.001
10	D.I.R. Kumbang Padang	4.268
11	D.I.R. Padang Sugihan	10.200
12	D.I.R. Pulau Rimau	28.184
13	D.I.R. Telang I	18.676

No.	Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR)	Luasan (Ha)
14	D.I.R. Telang II	9.660
Kab. Musi Banyuasin		
15	D.I.R. Air Tenggulang	6.156
16	D.I.R. Kr. Agung Hilir	6.350
17	D.I.R. Kr. Agung II/Tengah	17.000
Kab. Ogan Ilir		
18	D.I.R. Lbk. Tanjung Seteko	3.876
19	D.I.R. Ogan Keramasan I + II	9.660
Kab. Ogan Komering Ilir		
20	D.I.R. M. Gajah Mati	5.950
21	D.I.R. Sugihan Kanan	20.885
22	D.I.R. Sungai Lumpur	3.500
	JUMLAH	237.133

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015

Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015, memiliki luasan total sebesar 41.541 Ha untuk Daerah Irigasi dan 49.509 Ha untuk Daerah Irigasi Rawa.

Pada tahun 2023, Kondisi Jaringan Daerah Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi Sumsel 2023 dengan kondisi baik 77,99%, rusak berat 1,74%.

Tabel 2.41
Kondisi Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (Ha) Daerah Irigasi	Kondisi (%) TA 2023			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Kab. Empat Lawang						
1	D.I. Air Keban	1.500	89,37	9,55	1,08	0,00
Kab. Lahat						
2	D.I. Air Gohong	1.200	63,87	16,17	18,74	1,23
3	D.I. Air Makim	1.000	98,09	0,00	0,00	0,00
4	D.I. Air Manna I	1.500	87,17	5,43	7,40	0,00
5	D.I. Air Merendang	1.341	95,22	4,78	0,00	0,00

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (Ha) Daerah Irigasi	Kondisi (%) TA 2023			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
6	D.I. Air Mulak (total lost karena faktor bencana longsor)	1.645	0,00	0,00	0,00	0,00
7	D.I. Air Pangi	1.001	75,88	16,08	8,04	0,00
8	D.I. Masam Bulau	1.500	98,29	1,71	0,00	0,00
9	D.I. Tebing Panjang	1.256	99,30	0,70	0,00	0,00
Kab. Muara Enim						
10	D.I. Ataran Sungai Air Deras (Cahaya Alam)	1.000	62,58	21,00	13,00	3,42
11	D.I. Danau Tampang	2.690	49,44	21,00	25,84	3,72
12	D.I. Endikat Bengkok /T.Bute	1.500	82,61	17,39	0,00	0,00
13	D.I. Lecah Paye	1.295	46,33	22,01	9,58	22,08
14	D.I. Tunggul Bute	2.400	51,00	25,00	13,00	11,00
Kab. Musi Rawas						
15	D.I. Air Deras I	1.461	85,67	6,37	7,96	0,00
16	D.I. Air Gegas	2.300	60,00	21,00	13,00	6,00
17	D.I. Air Satan	1.175	84,19	10,31	5,50	0,00
18	D.I. Megang Tikip	1.077	70,20	22,93	6,87	0,00
Kota Pagaralam						
19	D.I. Air Merah	1.500	58,00	21,00	13,00	8,00
20	D.I. Pasemah	1.107	89,55	10,45	0,00	0,00
21	D.I. Selangis Besar/ Jemair	1.020	86,49	13,51	0,00	0,00
22	D.I. Selangis Kecil	1.352	58,00	21,00	13,00	8,00
Kab. OKU Selatan						
23	D.I. Air Pius	1.600	100,00	0,00	0,00	0,00
24	D.I. Air Sungkai	1.500	100,00	0,00	0,00	0,00
25	D.I. Air Sunur	1.701	100,00	0,00	0,00	0,00
Kab. OKU Timur						
26	D.I. Air Gilas	1.050	58,00	21,00	13,00	8,00
27	D.I. Lebak Datuk	2.102	99,45	0,55	0,00	0,00
28	D.I. Lebak Semendawai	1.768	63,04	19,27	10,89	6,80
	JUMLAH	41.541	77,99	11,37	5,77	1,74

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Sedangkan kondisi jaringan irigasi rawa kewenangan provinsi di Sumatera Selatan pada tahun 2023 dengan kondisi baik sebesar 15,52% dan rusak berat sebesar 84,48%.

Tabel 2.42
Kondisi Jaringan Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi
di Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR)	Luas DIR (Ha) (Permen PUPR No. 14 Tahun 2015)	Kondisi (%) TA 2023			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Kab. Muara Enim						
1	D.I.R Air Putak	1.200	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Musi Banyuasin						
2	D.I. R Bailangu	2.150	0,00	0,00	0,00	100,00
3	D.I. R Buntiale	2.000	0,00	0,00	0,00	100,00
4	D.I. R Danau Cala	1.769	5,65	0,00	0,00	94,35
5	D.I.R Lumpatan	1.300	0,00	0,00	0,00	100,00
6	D.I.R Pinang Banjar	1.000	47,82	0,00	0,00	52,18
7	D.I.R Rantau Panjang	1.922	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Banyuasin						
8	D.I.R Rantau Bayur	1.500	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Ogan Ilir						
9	D.I.R Lbk Bakung	2.975	0,00	0,00	0,00	100,00
10	D.I.R Lbk Lorok	1.681	0,00	0,00	0,00	100,00
11	D.I.R Lbk Parit	1.575	0,00	0,00	0,00	100,00
12	D.I.R Lbk Purna Jaya	2.002	0,00	0,00	0,00	100,00
13	D.I.R Lbk Tj Pering	2.559	25,43	0,00	0,00	74,57
14	D.I.R Lbk Palas	2.450	44,76	0,00	0,00	55,24
15	D.I.R Lbk Tiang Bilik	1.750	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Ogan Komering Ilir						
16	D.I.R Bumi Agung	1.750	46,63	0,00	0,00	53,37
17	D.I.R Doros	1.400	17,86	0,00	0,00	82,14
18	D.I.R Jejawi	1.400	73,02	0,00	0,00	31,97
19	D.I.R Mesuji Ilir/ S. Buaya	2.916	0,00	0,00	0,00	100,00
20	D.I.R Pancur	2.450	10,20	0,00	0,00	90,80
21	D.I.R Sangkaji	1.400	83,29	0,00	0,00	16,71
22	D.I.R Suka Pulih	1.750	24,99	0,00	0,00	75,01
23	D.I.R Ulak Jermun/Jermal	1.050	9,52	0,00	0,00	90,48
Kab. OKU Timur						

No	Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR)	Luas DIR (Ha) (Permen PUPR No. 14 Tahun 2015)	Kondisi (%) TA 2023			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
24	D.I.R Lebak Datuk	1.960	0,00	0,00	0,00	100,00
25	D.I.R Lebak Pauh	2.100	0,00	0,00	0,00	100,00
26	D.I.R Lebak Semendawai	1.400	70,71	0,00	0,00	29,29
27	D.I.R Lebak Tobong	2.100	0,00	0,00	0,00	100,00
		49.509	15,52	0,00	0,00	84,48

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Berikut ini rekapitulasi Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015.

Tabel 2.43
Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah D.I.	Luasan Total (Ha)
1	Kab. Empat Lawang	18	5.614
2	Kab. Lahat	214	13.348
3	Kab. Muara Enim	241	24.327
4	Kab. Musi Rawas	43	7.203
5	Kab. Ogan Komering Ulu	34	3.824
6	Kab. OKU Selatan	41	5.179
7	Kab. OKU Timur	1	650
8	Kota Lubuk Linggau	5	1.529
9	Kota Pagar Alam	99	5.025
	JUMLAH		66.699

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015

Tabel 2.44
Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah D.I.R	Luasan Total (Ha)
1	Kab. Banyuasin	3	2.066
2	Kab. Muara Enim	4	2.757
3	Kab. Musi Banyuasin	56	17.812
4	Kab. Ogan Ilir	50	14.704
5	Kab. Ogan Komering Ilir	3	1.019
6	Kab. OKU Timur	1	700
7	Kota Palembang	2	341
	JUMLAH		39.398

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015

Penataan Ruang

Penataan Penataan ruang Provinsi mengacu pada peraturan daerah Nomor 11 tahun 2016-2036, yang merupakan arahan atau dasar dalam pembangunan, baik perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai matra spasial yang bersifat strategis, sehingga perlu dipertimbangkan kondisi capaian dan permasalahan penataan ruang yang ada yaitu :

1. Perlu menetapkan kawasan-kawasan yang potensial dengan nilai pengaruh terhadap provinsi untuk diprioritaskan penanganannya.
2. Percepatan penetapan RTRW Provinsi yang telah memasuki masa 5 tahun pertama.
3. Mendorong revisi RTRW kabupaten/kota dan penyusunan RDTR Kabupaten/kota.
4. Integrasi RTRW kedalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan utamanya kebijakan strategs nasional, Ruang Terbuka Hijau perkotaan, kawasan dengan fungsi lindung, dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
6. Percepatan penyelesaian tumpang tindih RTRW, Kawasan hutan

dan batas wilayah.

7. Integrasi RZWP-3-K kedalam RTRW Provinsi.

8. Arahan struktur ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2022 perlu diakomodir dalam RKPD tahun 2023.

Penataan ruang sebagai matra spasial mengatur pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi dengan memberikan arah peruntukkan sesuai dengan peraturan yang ada tidak terlepas dari pemanfaatan, penggunaan dan penyebarluasan informasi gesospasial.

Arahan struktur ruang di Provinsi Sumatera Selatan meliputi arahan sistem perkotaan yang terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Palembang yang merupakan 132omesti perkotaan yang fungsinya akan melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang merupakan 132omesti perkotaan yang fungsinya melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kesebelas 132 omesti perkotaan yang termasuk kedalam PKW tersebut, tujuh diantaranya sudah ditetapkan dalam RTRW Nasional terdiri dari:
 - (1) Prabumulih (Kota Prabumulih); PKW
 - (2) Lubuklinggau (KotaLubuklinggau); PKW
 - (3) Muara Enim (Kabupaten Muara Enim); PKW
 - (4) Baturaja (Kabupaten OKU); PKW
 - (5) Lahat (Kabupaten Lahat); PKW
 - (6) Sekayu (Kabupaten Musi Banyuasin); PKW
 - (7) Kayu Agung (Kabupaten OKI); PKW
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan 132omesti perkotaan yang fungsinya melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
 - (1) Sungai Lilin (Kabupaten Musi Banyuasin);
 - (2) Tebing Tinggi (Kabupaten Empat Lawang);
 - (3) Muara Beliti (Kabupaten Musi Rawas);
 - (4) Muara Dua (Kabupaten OKU Selatan);
 - (5) Pangkalan Balai (Kabupaten Banyuasin);
 - (6) Gumawang (Kabupaten OKU Timur);

- (7) Tugumulyo (Kabupaten OKI);
- (8) Talang Ubi (kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir);
- (9) Peninjauan (Kabupaten OKU);
- (10) Muara Rupit (Kabupaten Musi Rawas Utara);
- (11) Bayung Lencir (Kabupaten Musi Banyuasin);
- (12) Tanjung Raja (Kabupaten Ogan Ilir);
- (13) Muara Lakitan (Kabupaten Musi Rawas);
- (14) Pengandonan (Kabupaten Ogan Komering Ulu).

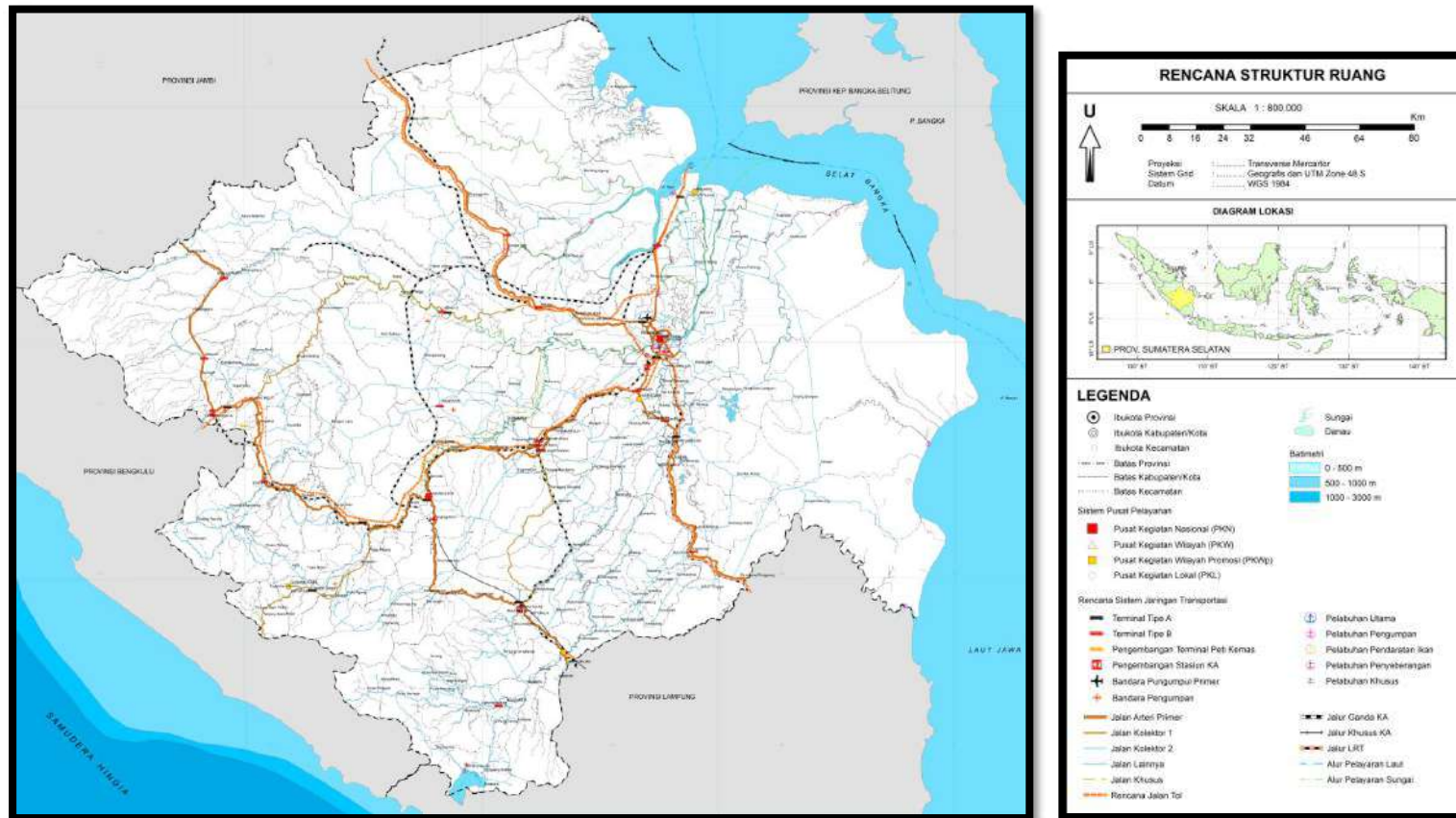
Pengembangan sistem jaringan konektivitas utama, meliputi Pengembangan sarana dan prasarana Sistem Transportasi berupa:

- a. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan (jalan tol) di Sumatera Selatan meliputi : Palembang – Indralaya, Betung-Tempino-Jambi; Betung-Palembang-Kayu Agung; Sp. Indralaya-Muara Enim; Muara Enim-Lahat; Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu; Pematang Panggang-Kayu Agung; Palembang-Tanjung Api Api dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang.
- b. Jaringan rel kereta api di Provinsi Sumatera Selatan menghubungkan beberapa wilayah, yaitu : Palembang – Prabumulih – Muara Enim – Lahat – Lubuklinggau dan Palembang – Prabumulih – Baturaja – Tanjung Karang (Provinsi Lampung) dan Palembang – Betung – Jambi.

Pengembangan Pelabuhan sebagai Simpul Transportasi Laut Nasional meliputi : Boom Baru Palembang sebagai Pelabuhan Utama, Tanjung Api-Api dalam satu sistem dengan Palembang sebagai Pelabuhan Pengumpul, Sungai Lumpur sebagai Pelabuhan Pengumpul, Kertapati sebagai Pelabuhan Pengumpul dan pengembangan 133 omestic 133 angkutan penyeberangan Tanjung Api-Api.

Peta struktur ruang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2036 dapat dilihat pada gambar dibawah

Gambar 2.57
Peta Rencana Struktur Ruang di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

Arahan peruntukkan 135omestic135g pengembangan 135omesti lindung dan pengembangan 135omesti budidaya di Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas:

Tabel 2.45
Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2036

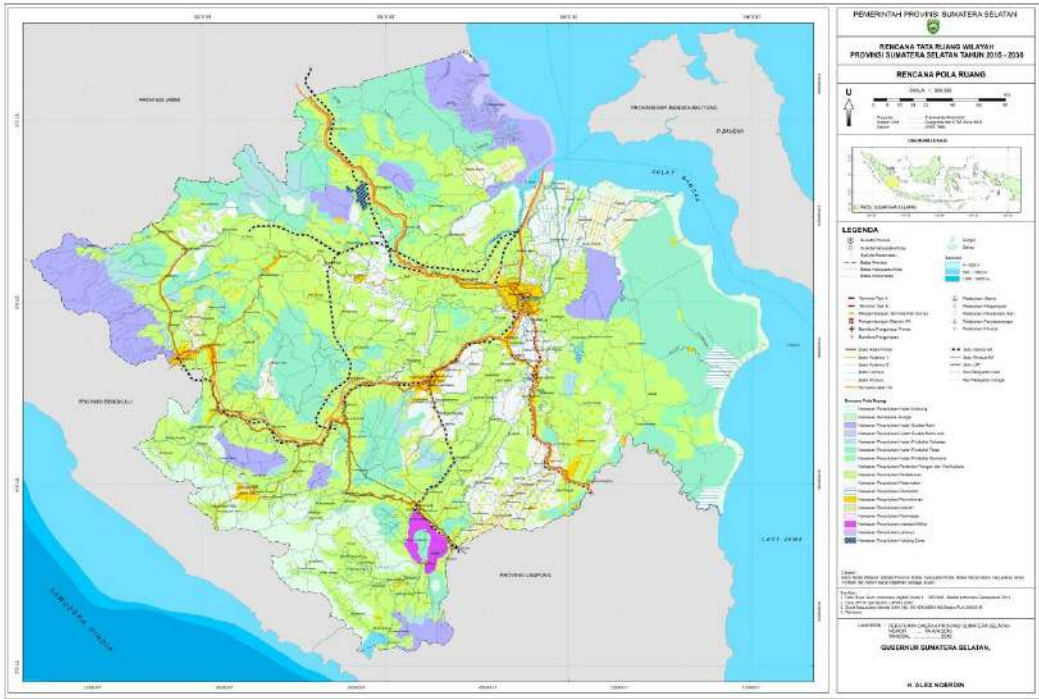
RENCANA POLA RUANG			LUAS (Ha)	%
A	KAWASAN LINDUNNG			
	1	Hutan Lindung	577.327,00	6,63
	2	Sempadan Sungai, Sempadan Danau	13.143,92	0,14
	3	KPA, KSA dan Cagar Budaya	790.625,19	9,09
	4	Kawasan Rawan Bencana*		
	5	Kawasan Lindung Geologi*		
	Jumlah		1.380.096.11	15.06
B	KAWASAN BUDIDAYA			
1	Kawasan Hutan Produksi :			
	1	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	208.724,00	2,40
	2	Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.713.581,00	19,69
	3	Kawasan Hutan Produksi Konversi	176.694,00	2,03
2	Kawasan Pertanian :			
	1	Kawasan Pertanian Pangan dan Hortikultura	936.074,00	10,76
	2	Kawasan Perkebunan	3.802.422.21	43,70
	3	Kawasan Perikanan	543.022,32	5,92
	4	Kawasan Peternakan	2.297,31	0,03
3	Kawasan Permukiman		320.924,67	3,69
4	Kawasan Pertambangan*		1.231.361,13	13,4
5	Kawasan Pariwisata		9.933,12	0,11
6	Kawasan Industri		17.072,28	0,20
7	Kawasan Peruntukan Daerah Latihan Militer		45.000,00	0,52
8	Kawasan Peruntukan Lainnya			
	1	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	45.000,00	0,52
	2	Kawasan Reklamasi	3.000,00	0,03
	Jumlah		7.779.146,89	84,93
Total = A + B			9.159.243,00	100,00

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

Catatan :
KPA = Kawasan Pelestarian Alam
KSA = Kawasan Suaka Alam
* Luasan tidak dijumlahkan, yaitu :
a. Kawasan Rawan Bencana
b. Kawasan Lindung Geologi
c. Kawasan Pertambangan

Peta Pola ruang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2036 dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini.

Gambar 2.58
Peta Rencana Pola Ruang di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

Status Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan semua telah menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tabel 2.46
Status-Perda RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

No	Wilayah	Nomor Perda RTRW	Tanggal Perda RTRW
	Sumatera Selatan	No. 11 Tahun 2016	24-Okt-16
1	Banyuasin	No.6 Tahun 2019	24-Okt-18
2	Empat Lawang	No. 09 Tahun 2012	27-Jul-12
3	Lahat	No. 11 Tahun 2012	21-Des-18
4	Muara Enim	No. 13 Tahun 2018	21-Des-18
5	Musi Banyuasin	No. 08 Tahun 2016	30-Sep-16
6	Musi Rawas	No. 02 Tahun 2013	21-Okt-13
7	Musi Rawas Utara	No. 12 Tahun 2018	31-Des-18
8	Ogan Ilir	No. 01 Tahun 2012	24-Jan-12
9	Ogan Komering Ilir	No. 09 Tahun 2013	09-Jul-13
10	Ogan Komering Ulu	No. 22 Tahun 2012	27-Des-12
11	OKU Selatan	No. 3 Tahun 2021	16-Mar-21
12	OKU Timur	No. 7 Tahun 2021	9-Jul-21
13	PALI	No. 01 Tahun 2018	20-Jul-18
14	Lubuk Linggau	No. 01 Tahun 2012	31-Agust-12

No	Wilayah	Nomor Perda RTRW	Tanggal Perda RTRW
15	Pagar Alam	No. 07 Tahun 2012	19-Nop-12
16	Palembang	No. 15 Tahun 2012	27-Des-12
17	Prabumulih	No. 01 Tahun 2014	02-Apr-14

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Kota Se Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan *one map policy* melalui Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 19 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 18 Tahun 2017 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 719/KPTS/BAPPEDA/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Pelaksana Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, telah dibentuk kelembagaan Informasi Geospasial Daerah (IGD) sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Ada beberapa kegiatan utama *one map policy*, yaitu 1) kompilasi; 2) integrasi; dan 3) sinkronisasi. Saat ini, Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) di Provinsi Sumatera Selatan telah terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) di Badan Informasi Geospasial (BIG).

Kebijakan Satu Peta (KSP) & (JIGD) Sumatera Selatan

Kegiatan KSP di Sumatera Selatan pada awalnya diawali dengan menyusun “*Roadmap*” Kebijakan Satu Peta pada Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan, menyusun Petunjuk teknis dan Standar Operasional (SOP), mengidentifikasi sebanyak 75 Peta Tematik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan (dari 85 tematik yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 9 Tahun 2016 dengan ketelitian Skala 1:50.000), serta 10 peta tematik sektor yang lainnya sesuai kondisi di Sumatera Selatan seperti Peta : Persebaran fasiliitas Pendidikan, Kesehatan, Perkebunan, Desa, Kawasan Kumuh, Air Bersih, Sanitasi, Kemiskinan, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Ekoregion serta peta tematik peta irigasi/ sawa beririgasi sehinga Sumatera Selatan saat ini

mengidentifikasi sebanyak 95 peta tematik dengan jumlah layer peta sebanyak 1187.

Selanjutnya, bahwa dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dan memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi serta perizinan pemanfaatan ruang maka diperlukan data yang data yang akurat, update, terintegrasi, akuntabel, dinamis, handal, sah, ayng ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif serta dapat diakses secara luas, yang diwujudkan dalam bentuk peta.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dengan mengakomodir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Provinsi Sumatera Selatan memang benar benar mendukung pembangunan dan untuk kemudahan dalam berinvestasi serta perizinan pemanfaatan ruang.

Adapun portal Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonimian dapat diakses melalui alamat <https://onemap.big.go.id/peta>.

Gambar 2.59
Tampilan Portal Kebijakan Satu Peta (KSP)



Sumber : <https://onemap.big.go.id/peta>

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, diamanatkan bahwa data dan informasi geospasial yang sebelumnya diperuntukan untuk pemegang akses yang terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial, Menteri atau Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota, untuk saat ini ditambahkan “Masyarakat” selaku pemegang akses yang terdiri dari orang-perseorangan, Badan Hukum dan Badan Usaha. Walaupun sekarang akses ke 139omest belum dibuka, akan tetapi setelah peluncuran Geoportal 2.0 akses ke Publik akan dibuka, walaupun akan tetap diatur tentang hak akses untuk data data khusus 139omest.

Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Sumatera Selatan sejak November 2017 telah memiliki geoportal tersendiri, data diakses melalui (<http://geoportal.sumselprov.go.id>) terkoneksi dengan geoportal pusat <http://tanahair.indonesia.go.id>. Pelaksanaan Kegiatan JIGD Prov sumsel melalui beberapa pilar antara lain:

Elemen Kebijakan, menjadi landasan bagi pelaksanaan seluruh proses kegiatan dalam penyelenggaraan kebijakan yang tepat diharapkan akan menghasilkan proses penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) yang efektif dan efisien serta mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada.

Elemen Kelembagaan, berkaitan dengan peraturan atau dasar hukum penyelenggaraan IG, rencana kerja, dan anggaran dalam penyelenggaraan IG.

Elemen Teknologi, berkaitan dengan teknologi yang digunakan dalam membangun simpul jaringan.

Elemen Standar Data, berkaitan dengan ketersediaan data geospasial dan informasi geospasial serta manajemen data spasial untuk mendukung sarana berbagi pakai data.

Elemen Sumber Daya Manusia, berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) bidang IG dalam pengelolaan simpul jaringan.

Penghargaan

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 mendapatkan 2 penghargaan *Bhumandala Award* dari Badan Informasi Geospasial dengan katagori sebagai berikut:

- 1) Bhumandala Rajata yakni penghargaan pembangunan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.
- 2) Bhumandala Kencana yaitu penghargaan pemanfaatan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kembali mendapatkan 2 penghargaan Bhumandala Award yaitu kategori :

- 1) Bhumandala Rajata yakni penghargaan pembangunan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.
- 2) Bhumandala Kanaka yaitu penghargaan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.

Kemudian di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kembali mendapatkan 2 penghargaan Bhumandala Award yaitu kategori :

- 1) Bhumandala Kanaka yaitu penghargaan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.
- 2) Bhumandala Kencana yaitu penghargaan pemanfaatan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.

Kemudian di tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kembali mendapatkan penghargaan Bhumandala Award yaitu kategori :

- 1) Bhumandala Rajata yaitu penghargaan Simpul Jaringan Terbaik kategori Tingkat Provinsi.

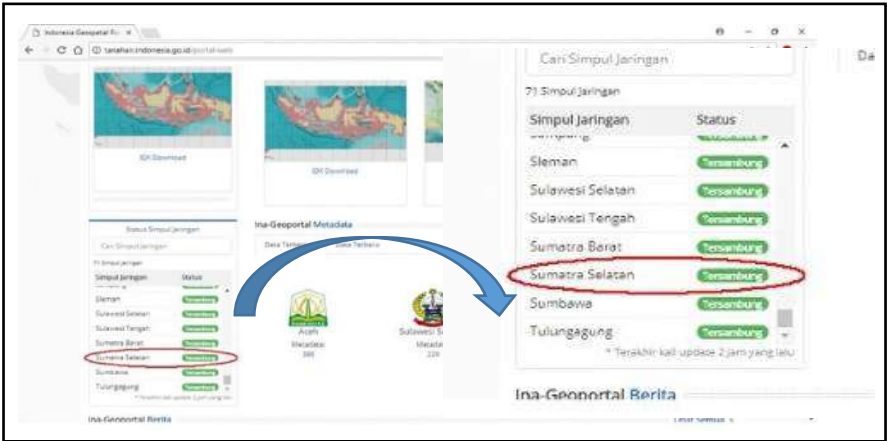
- 2) Bhumandala Kanaka yaitu penghargaan Simpul Jaringan Terbaik kategori Tingkat Kabupaten/Kota, yaitu Kota Palembang.

Pada tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih Penghargaan Bhumandala yang terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) Penghargaan Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
- 2) Bhumandala Kanaka (Medali Emas) diberikan kepada Kementrian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang berhasil mengoptimalkan peran Geoportalnya dalam mekanisme berbagi pakai data spasial baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Selain itu penilaian juga dilakukan Pedoman Penghargaan Simpul Jaringan Tahun 2024 berdasarkan konten data, kelengkapan data lainnya (kelengkapan atribut, metadata, dan kesesuaian dengan Katalog Unsur Geografi Indonesia).
- 3) Penghargaan Bhumandala Nama Rupabumi
Bhumandala Ariti (medali perunggu) diberikan kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) yang telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemetaan, perencanaan dan navigasi di Indonesia.
- 4) Penghargaan Geoportal Terbaik
Penghargaan diberikan kepada Kementrian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang berhasil mengembangkan Geoportal dengan dalam tampilan yang menarik, kecepatan akses yang tinggi, dan konten data yang lengkap.

Sumatera Selatan telah melakukan sinkronisasi Peta Indikatip Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) melalui proses validasi dan verifikasi teknis tematik dan rancangan PITTI terhadap 18 IGT antara lain peta : Penunjukan (DISHUT dan BPKH II), Penetapan (DISHUT dan BPKH II), RTRWP (DPUBMTR), KHDTK (DISHUT dan BPKH II), IUPHHK HA (DISHUT dan BPKH II), IUPHHK HTI, IUPHHK RE, IUPHHK HTR, IUP (ESDM), HGU (DISBUN dan ATR/BPN), HPL (ATR/BPN) (Tipologi Izin), Lokais Transmigrasi , sebanyak 6603 tipologi yang terindikasi tumpang tindih yang tersebar 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

Gambar 2.60
Portal Tanah Air Indonesia



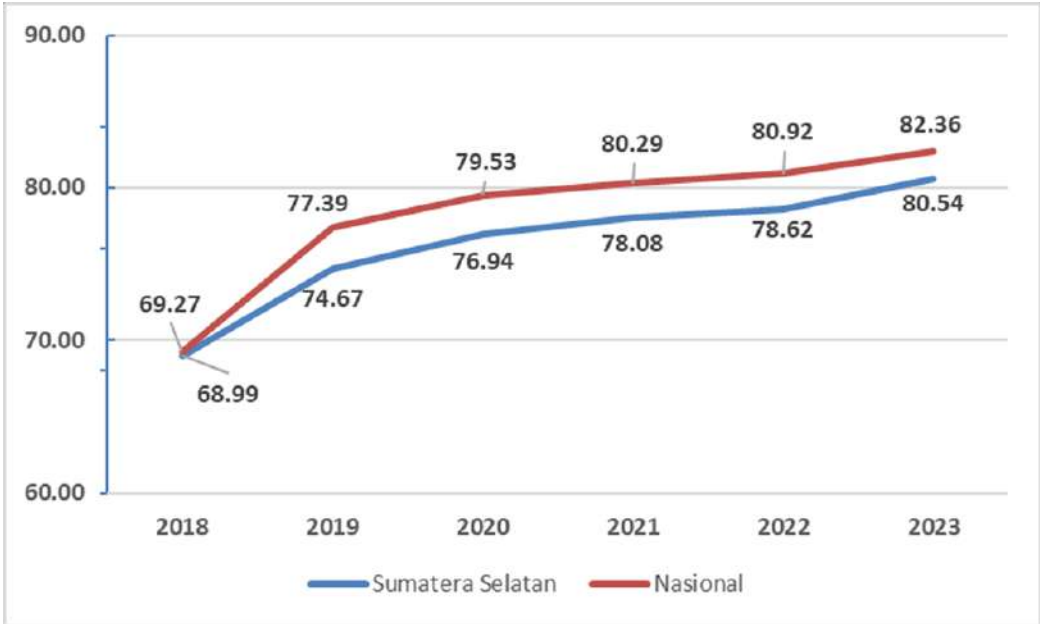
d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Akses Sanitasi

Akses sanitasi yang layak Provinsi Sumatera Selatan sebesar 80,54 persen pada tahun 2023. Kondisi lahan basah di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Selatan menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan sanitasi yang layak. Diperlukan biaya yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur sanitasi di daerah lahan basah dibandingkan di daerah lahan kering. Dengan memperhatikan kecenderungan capaian akses sanitasi layak selama ini, Pemerintah Sumatera Selatan harus memberikan perhatian khusus, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi layak, guna mencapai target RPD Sumatera Selatan pada tahun 2024 sebesar 80,62 persen.

Target nasional pada RPJPN untuk Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah) Aman pada tahun 2025 adalah sebesar 12,5% dan Timbulan sampah terolah di fasilitasi pengelolaan sampah sebesar 15 % (13 % terdaur ulang). Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan SPAL Regional.

Tantangan yang dihadapi yaitu meningkatkan keterpaduan penanganan sanitasi antar Kabupaten/Kota. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.

Gambar 2.61
Persentase Akses Sanitasi di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018 – 2023



Sumber : BPS Sumsel, 2023

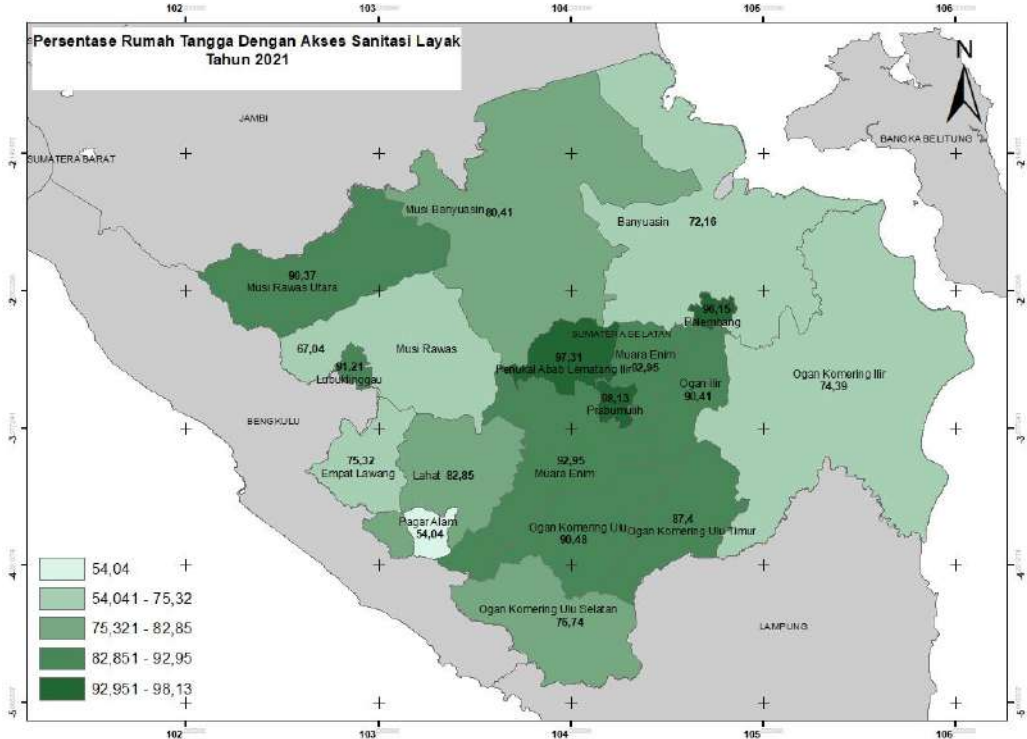
Tabel 2.47
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak
Tahun 2016 – 2023

No.	Kabupaten/Kota	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	-(14)
1	Ogan Komering Ulu	76.29	80.15	82.94	84.39	80.78
2	Ogan Komering Ilir	67.48	74.72	68.93	63.95	69.73
3	Muara Enim	77.37	84.99	84.80	84.16	85.58
4	Lahat	66.06	69.34	70.52	70.35	70.19
5	Musi Rawas	71.41	71.78	69.34	73.69	74.50
6	Musi Banyuasin	72.41	74.85	71.81	80.71	83.52
7	Banyu Asin	64.63	73.06	72.12	72.80	74.53
8	Ogan Komering Ulu Selatan	57.95	53.86	57.68	57.54	63.20
9	Ogan Komering Ulu Timur	84.57	78.80	84.63	87.48	88.25
10	Ogan Ilir	70.92	73.28	68.52	71.55	76.17
11	Empat Lawang	58.36	57.60	53.52	66.93	67.81
12	Penukal Abab Lematang Ilir	89.29	90.49	94.38	89.40	95.22
13	Musi Rawas Utara	60.69	58.13	66.05	65.73	68.57
14	Kota Palembang	88.35	89.63	94.48	92.66	95.16

15	Kota Prabumulih	92.34	91.23	95.20	97.61	96.44
16	Kota Pagar Alam	58.91	52.71	58.20	62.11	61.28
17	Kota Lubuklinggau	87.58	85.87	85.85	87.64	86.05
Sumatera Selatan		74.67	76.94	78.08	78.62	80.54
Nasional		77.39	79.53	80.29	80.92	82.36

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Gambar 2.62
Peta Sebaran Capaian RT Akses Sanitasi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023



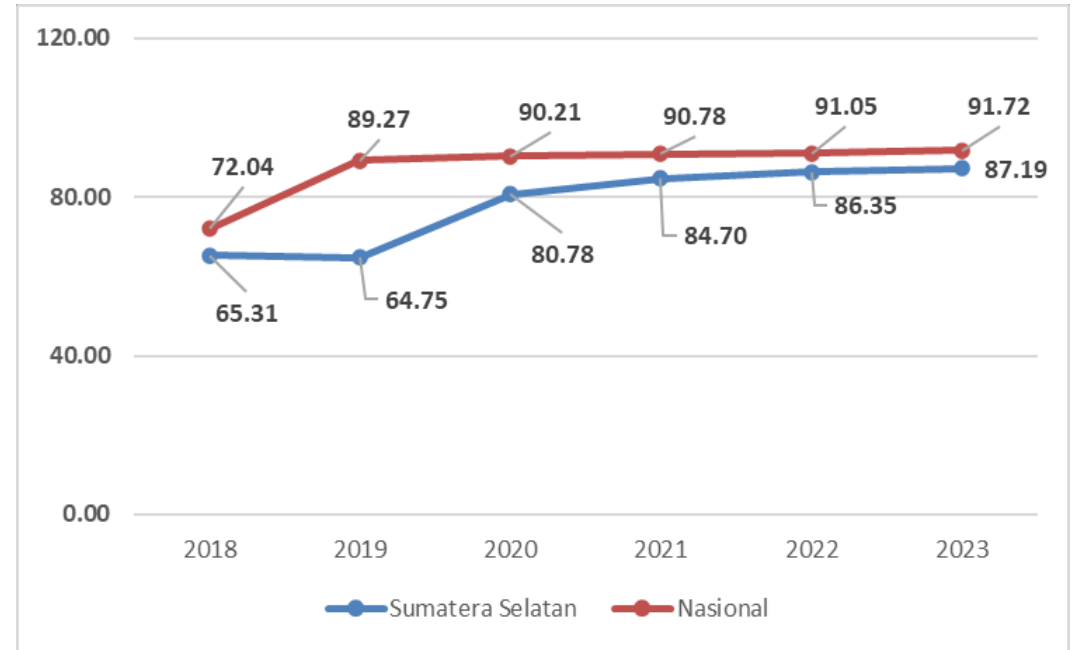
Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2023—diolah

Akses Air Bersih

Berdasarkan Data Susenas BPS, akses rumah tangga terhadap fasilitas air bersih layak di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2019 sebesar 64,75 persen menjadi 87,19 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023, akses capaian tertinggi dicapai Kota Lubuk Linggau sebesar 97,52% dan terendah di Kabupaten Empat Lawang sebesar 65,94%. Tantangan yang cukup berat untuk mencapai target RPD 2024- 2026 Sumatera Selatan di tahun 2025 sebesar 89,35 persen. Capaian nasional Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak pada tahun 2023 adalah sebesar 91,72 % dimana target yang harus dipenuhi pada akhir periode RPJMN 2020-2024 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut,

pemerintah pusat telah menentukan kegiatan prioritas strategis berupa Akses Air Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) dimana pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha (*Sumber : RPJMN 2020-2024*). Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan SPAM Regional yaitu jaringan air bersih perpipaan yang melintasi dua Kabupaten/Kota dimana untuk pemenuhan kebutuhan 145 omestic agar masyarakat menikmati air minum berkualitas. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu jarak antar kabupaten yang cukup jauh dan 145omestic besar berupa hutan-hutan dan rawa.

Gambar 2.63
Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Sumsel, 2023

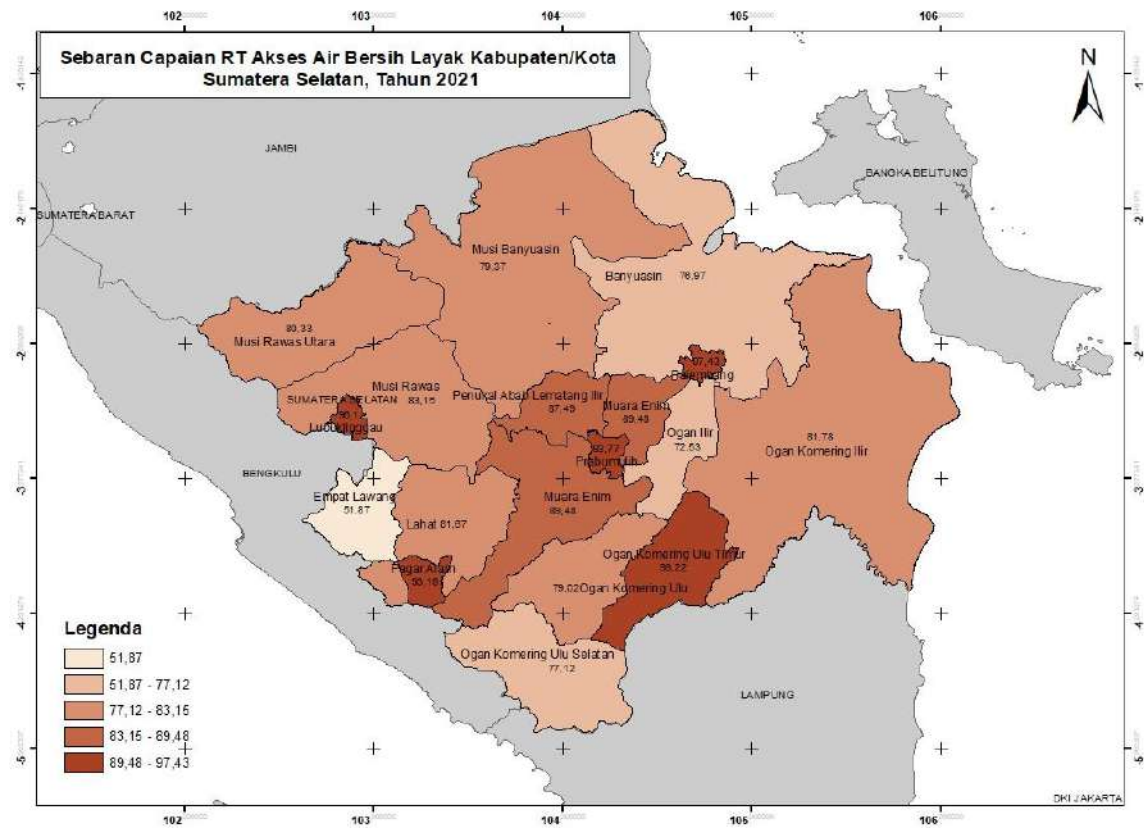
Tabel 2.48
Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2023

No.	Kabupaten/Kota	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	-(14)
1	Ogan Komering Ulu	67.69	78,98	81.78	82.76	82.33
2	Ogan Komering Ilir	55.67	84,23	79.02	78.52	80.59
3	Muara Enim	60.51	82,15	89.48	91.51	90.78
4	Lahat	47.57	67,44	81.67	84.35	86.16

5	Musi Rawas	67.10	77,08	83.15	93.22	89.34
6	Musi Banyuasin	64.32	84,72	79.37	81.75	85.58
7	Banyu Asin	72.21	70,38	76.97	78.25	80.66
8	Ogan Komering Ulu Selatan	42.77	67,75	77.12	76.52	80.18
9	Ogan Komering Ulu Timur	59.71	89,91	93.32	94.15	96.92
10	Ogan Ilir	55.33	73,08	72.53	71.88	75.10
11	Empat Lawang	21.28	31,41	51.87	64.85	65.94
12	Penukal Abab Lematang Ilir	63.14	83,90	87.49	85.78	91.18
13	Musi Rawas Utara	49.87	73,24	80.33	87.13	86.25
14	Kota Palembang	92.78	92,40	97.43	97.96	96.71
15	Kota Prabumulih	69.54	96,40	93.77	98.42	95.69
16	Kota Pagar Alam	51.78	88,95	93.16	85.76	88.58
17	Kota Lubuklinggau	62.50	97,10	96.10	96.41	97.52
Sumatera Selatan		64.75	80.78	84.70	86.35	87.19
Nasional		89.27	90.21	90.78	91.05	91.72

Sumber : BPS Sumsel, 2023

Gambar 2.64
Sebaran Capaian RT Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota
Sumatera Selatan, 2023



Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2022—diolah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mendorong dalam peningkatan Akses Air minum dan Sanitasi ada beberapa terobosan antara lain;

- a. Melakukan pemetaan untuk daerah-daerah yang masih rendah aksesnya terhadap air minum dan sanitasi guna untuk memacu kabupaten/kota untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat.
- b. Melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota melalui POKJA AMPL Provinsi dalam pembuatan regulasi agar seluruh stakeholder terlibat secara 147omesti-sama.
- c. Melakukan Pelaksanaan pembangunan sanitasi serentak untuk memacu kabupaten/Kota berinovasi dalam akselerasi pembangunan Air Minum, Sanitasi dan penanganan 147omesti kumuh, yang bertujuan; 1) mendorong Kabupaten/Kota meningkatkan Akses air minum, sanitasi dan Kawasan Kumuh, 2) Menurunkan Presentasi rumah tidak layak huni, 3) Melaksanakan fungsi POKJA AMPL/Sanitasi Provinsi dalam aspek advokasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi, 4) Meningkatkan Pelibatan multistakeholder dalam pembangunan Air minum, sanitasi, Penanggulangan Kawasan kumuh, dan Perumahan, 5) Mendorong Inovasi daerah dalam Pembangunan Air Minum, sanitasi dan penanganan Kawasan Kumuh, 6) Mencari sumber-sumber pendanaan lainnya seperti CSR, BAZNAS.

Akses Kepemilikan Rumah

Untuk mendukung Program Sejuta Rumah (PSR). Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pembangunan perumahan berbasis komunitas. Perumahan Berbasis Komunitas merupakan program pemerintah yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam hal ini adalah komunitas masyarakat yang memiliki pekerjaan tertentu. MBR yang tergabung dalam komunitas ini akan membeli lahan perumahan yang telah disediakan dan difasilitasi oleh komunitasnya, sedangkan untuk bahan bangunan rumah dan upah dibantu oleh pemerintah.

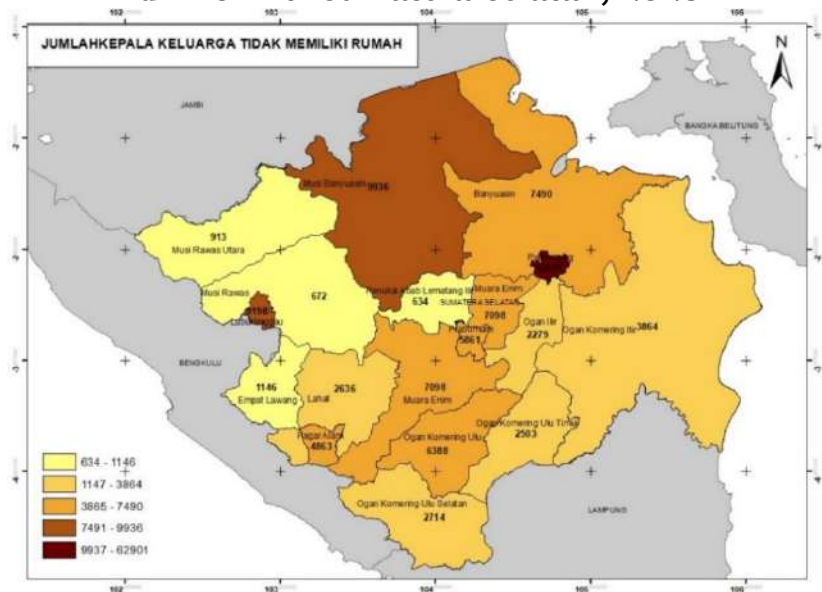
Berdasarkan Data Statistik kesejahteraan rakyat tahun 2023 BPS, Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang tidak memiliki rumah pada tahun 2023 sebanyak 2,773,719 KK dan jumlah KK yang memiliki rumah sendiri pada tahun 2023 sebanyak 2.345.422 KK.

Tabel 2.49
Jumlah Kepala Keluarga Kekurangan Rumah (*Backlog*)
di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

NO	WILAYAH	JML PENDUDUK TAHUN 2023	JUMLAH KK	Persentase Status Kepemilikan Rumah (%)			
				Milik sendiri	Kontrak/sewa	Bebas Sewa	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogan Komering Ulu	383,039	116,687	81.16	4.87	13.39	0.58
2	Ogan Komering Ilir	807,085	263,200	89.60	0.87	9.53	-
3	Muara Enim	640,962	200,314	86.85	1.97	10.40	0.78
4	Lahat	450,281	137,318	84.64	3.26	11.56	0.54
5	Musi Rawas	411,787	135,040	90.91	0.36	8.83	-
6	Musi Banyuasin	651,950	222,445	88.25	2.54	8.89	0.33
7	Banyuasin	885,902	277,476	90.57	2.77	5.04	1.61
8	OKU Selatan	429,535	124,857	85.56	4.56	9.87	-
9	OKU Timur	674,184	218,197	97.48	-	2.52	-
10	Ogan Ilir	436,141	136,952	89.87	1.01	8.78	0.34
11	Empat Lawang	345,641	102,374	81.71	2.54	15.75	-
12	Pali	205,384	63,199	89.04	0.91	9.71	0.34
13	Muratara	198,413	62,961	86.05	2.00	10.32	1.63
14	Kota Palembang	1,718,440	530,007	69.65	9.23	20.05	1.08
15	Kota Prabumulih	203,312	62,573	84.36	8.47	7.16	-
16	Kota Pagar Alam	149,199	45,797	75.84	6.95	14.65	2.56
17	Kota Lubuk Linggau	246,046	74,320	81.99	7.44	10.57	-
Sumatera Selatan		8,837,301	2,773,719	85.50	3.51	10.41	0.58

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Gambar 2.65
Jumlah Kepala Keluarga MBR yang tidak memiliki Rumah
di Provinsi Sumatera Selatan, 2023



Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2023—diolah

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat

Terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi terdiri atas:

Jenis Pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum yaitu :

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota.

Jenis Pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat yaitu :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Realisasi capaian jenis pelayanan dasar dalam pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah terlaksana sepenuhnya walaupun dengan berbagai kendala dan permasalahan. Adapun realisasi capaian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.50
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	100
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100	100

Sumber : Laporan SPM Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel 2024

SPM terkait pemenuhan kebutuhan air minum Curah lintas Kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota sampai dengan saat ini belum ada melayani rumah tangga lintas kabupaten/kota. Provinsi Sumsel sudah memiliki Perseroda Tirta Sriwijaya Maju (TSM) yang akan melayani penyediaan air minum curah lintas Kabupaten/kota dan kedepan akan mengembangkan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.

Tabel 2.51
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Permukiman Rakyat
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100

Sumber : Laporan SPM Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel 2024

Alokasi anggaran dalam pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman tahun anggaran 2024 untuk kegiatan fisik belum dapat dilaksanakan, namun untuk tahapan pendataan dan penyusunan dokumen pada pemenuhan SPM urusan Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebagai berikut :

Tabel 2.52
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	230.000.000,-	223.144.920,-	97.02
2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	620.040.972,-	547.777.122,-	88.35
3	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Kabupaten/Kota	100.000.000,-	74.122.175,-	74.12
4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	300.000.000,-	269.565.754,-	89.86
5	Fasilitasi Kerjasama Penyelenggaraan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	100.000.000,-	72.079.140,-	72.08

Sumber : Laporan SPM Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel 2024

untuk tahapan pendataan dan penyusunan dokumen pada pemenuhan SPM urusan Bidang Perumahan Rakyat pada saat penganggaran awal RKPD telah dianggarkan namun di efisiensi dikarenakan refocusing anggaran untuk covid 19. Pagu anggaran dan realisasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.53
Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	173.541.360,-	170.151.510,-	98.05
2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	75.000.000,-	70.853.000,-	94,47
3	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	89.184.625,-	84.784.625,-	95.07
4	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	10.000.000,-	10.000.000,-	100

Sumber : Laporan SPM Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel 2024

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan rakyat antara lain:

- SPAM Regional / Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota antara lain :
 - Jarak antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan yang cukup jauh serta kondisi topografi dan areal lintasan untuk jaringan perpipaan air minum curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masih dominan hutan dan perbukitan dinilai kurang efektif untuk dibangunnya SPAM regional;
 - Kondisi saat ini pembangunan SPAM Regional dirasakan belum efisien dan efktif mengingat masing-masing kab/kota memiliki PDAM yang dapat mencakup pelayanan wilayahnya serta terdapat sungai/anak sungai yang melintas antar kab/kota yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi masyarakat setempat;
 - Pelayanan air minum di wilayah regional sebagian masih dapat dilayani Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) yang sudah terbangun di masing-masing Kabupaten/Kota;
 - Belum jelasnya SDM dan Manajemen dalam pengelolaan SPAM Regional; dan
 - Diperlukan anggaran yang cukup besar utuk merealisasikan

pembangunan SPAM Regional.

2. Air Limbah Domestik Regional lintas Kab/Kota antara lain :

- Jarak antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan yang cukup jauh serta kondisi topografi dan areal lintasan untuk jaringan perpipaan air minum curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masih dominan hutan dan perbukitan dinilai kurang efektif untuk dibangunnya IPAL Regional;
- Tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL) yang sudah terbangun di masing-masing Kabupaten/Kota;
- Belum jelasnya SDM dan Manajemen dalam pengelolaan Air Limbah Domestik Regional; dan
- Diperlukan anggaran yang cukup besar untuk merealisasikan pembangunan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

3. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi antara lain adalah kondisi dan letak geografis Sumatera Selatan yang jarang terjadi bencana alam yang dampaknya lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota sehingga jika terjadi bencana jarang ditetapkan sebagai bencana provinsi.

Solusi yang diharapkan untuk memecahkan permasalahan diatas antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten/Kota terkait kewenangan, permasalahan dan kendala dalam penerapan dan pencapaian SPM;
2. Menyusun strategi dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait dalam rangka Pengembangan Air Minum Curah dan Air Limbah Domestik Regional lintas Kabupaten/Kota;
3. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota dan Instansi terkait seperti Sekretariat Daerah, BPBD, Dinas PUPR dan Dinas Perkim terkait status penetapan bencana ,pendataan dan kebutuhan pemenuhan;

4. Melaksanakan penelitian dan kajian lebih mendalam serta melakukan identifikasi, fasilitasi, sosialisasi dan pendataan/survey pendahuluan terkait kegiatan-kegiatan dalam pencapaian SPM.

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Rumah Tangga Bersanitasi

Akses sanitasi yang layak Provinsi Sumatera Selatan sebesar 80,54 persen pada tahun 2023. Kondisi lahan basah di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Selatan menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan sanitasi yang layak. Diperlukan biaya yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur sanitasi di daerah lahan basah dibandingkan di daerah lahan kering. Dengan memperhatikan kecenderungan capaian akses sanitasi layak selama ini, Pemerintah Sumatera Selatan harus memberikan perhatian khusus, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi layak, guna mencapai target RPD Sumatera Selatan pada tahun 2024 sebesar 80,62 persen.

Target nasional pada RPJPN untuk Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah) Aman pada tahun 2025 adalah sebesar 12,5% dan Timbulan sampah terolah di fasilitasi pengelolaan sampah sebesar 15 % (13 % terdaur ulang). Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan SPAL Regional.

Tantangan yang dihadapi yaitu meningkatkan keterpaduan penanganan sanitasi antar Kabupaten/Kota. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada tahun 2024 ada 10 jenis Perda dan 2 jenis Pergub yang ditegakkan. Dari 12 Perda dan Perkada tersebut semuanya dapat

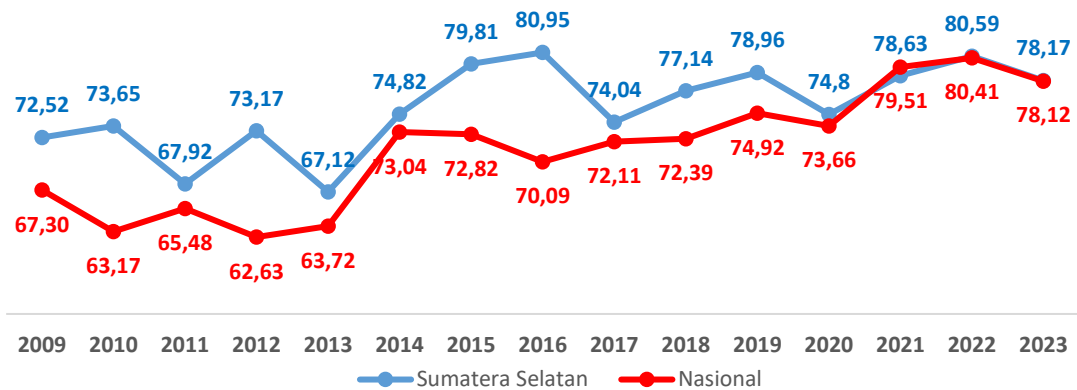
ditegakkan dengan capaian sebesar 105% dari target 95% Perda dan Perkada yang ditegakkan.

Dalam rangka menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2024 terdapat 35.908 anggota Satlinmas yang tersebar 3.240 desa/kelurahan di 17 Kabupaten/Kota, sedangkan gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 100% dengan target 100%. Dengan terjaminnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka diharapkan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara maksimal.

Di samping itu, guna mencegah terjadinya konflik baik antar masyarakat, antar suku maupun antar agama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala melakukan rapat-rapat koordinasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Pimpinan Kecamatan se-Sumatera Selatan, Forum Komunitas Intelijen Daerah maupun Tim Kewaspadaan Dini dimana hasil rekomendasi dari rapat-rapat tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan untuk mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi. Selain itu Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa koordinasi bersama Forum Komunikasi Umat Beragama, Tokoh-tokoh Masyarakat, Tokoh-tokoh Pemuda dan Mahasiswa, penyuluhan bahaya Narkoba, peningkatan wawasan kebangsaan, Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat terus digalakkan, sehingga pada tahun 2021 kasus-kasus yang berpotensi konflik tidak berkembang menjadi konflik (zero konflik).

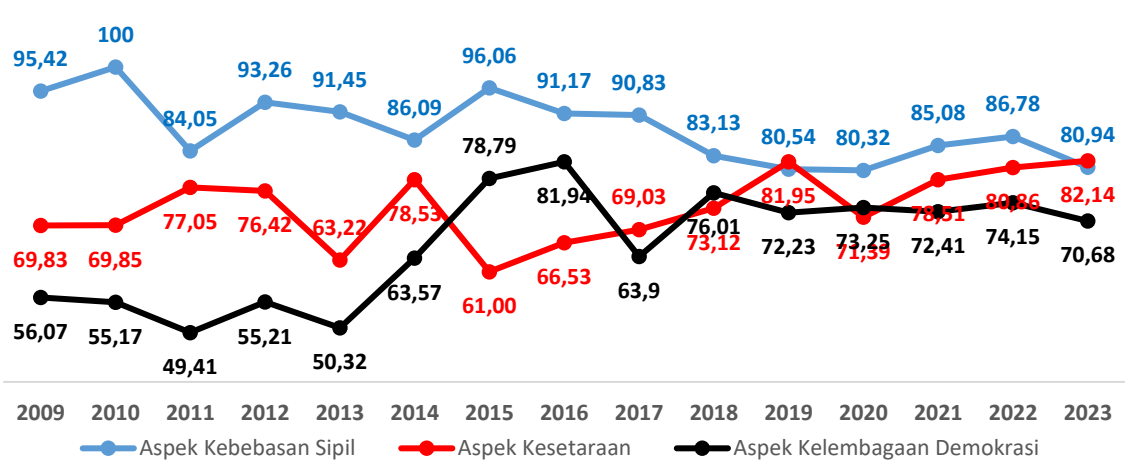
Dari sisi Demokrasi, nilai Indeks Demokrasi Sumatera Selatan sejak 2009 hingga 2023 selalu mengalami fluktuasi namun pada tingkat demokrasi dengan kategori “sedang” dengan kisaran nilai indeks 67 – 80, tetapi nilai Indeks Demokrasi Sumatera Selatan selalu berada di atas rata-rata nilai Indeks Demokrasi Nasional. Jika dilihat capaian nilai indeks tahun 2023 sebesar 78,17 dan terjadi penurunan sebesar 2,42 point dibandingkan dengan nilai indeks tahun 2022 sebesar 80,59 walaupun tetap berada diatas rata-rata Nasional sebesar 78,12.

Gambar 2.66
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2023



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Gambar 2.67
Perkembangan Nilai Pilar Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2023



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

tael
Berbagai Prestasi yang diraih oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan dan menjaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan antara lain dengan diterimanya penghargaan "Pembinaan Terbaik dalam Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Tahun 2022", “Pembinaan Terbaik Dalam Tata Operasional Sarana dan Prasarana POL PP Tahun 2022” dan “Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satpol PP Tahun 2022”

dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Piagam penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri RI.

Gambar 2.68
Penghargaan Pembinaan Terbaik dalam Penyelenggaraan
Pelindungan Masyarakat Tahun 2022



Gambar 2.69
Penghargaan Pembinaan Terbaik Dalam tata Operasional Sarana dan Prasarana POL PP tahun 2022



Gambar 2.70
Penghargaan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satpol PP Tahun 2022



Terkait dengan kondisi kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh banyak Prestasi yang telah dicapai yaitu:

1. Penghargaan BPBD Provinsi kategori Akuntabilitas sebagai Juara I tahun 2014

2. Penghargaan dan ucapan terima kasih sebagai pembicara dalam Training Psychology First Aid, topik “Usir Traumatik Paska Bencana di UIN Raden Patah” tahun 2015.
3. Penganugerahan BPBD Provinsi Terbaik Wilayah II (Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera) tahun 2016.
4. Penghargaan untuk Pelatihan Penguatan Kapasitas LPB PWM Sumsel dan Kaji Kebutuhan dalam Tanggap Darurat tahun 2016.
5. Sertifikat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas kerja bersama dalam aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui operasi pencegahan, patroli terpadu, deteksi dini, pelaporan pemantauan, pemadaman dan penanganan paska kebakaran hutan dan lahan semester I tahun 2016.
6. Penghargaan Pengelola Data Bencana dan Pusdalops Tingkat Provinsi 2016
7. Penganugerahan BPBD Provinsi Terbaik 2 wilayah Barat Tahun 2017
8. Penganugerahan BPBD Provinsi Terbaik I Wilayah 3 Tahun 2018

Gambar 2.71
Piagam BNPB Tahun 2017 – 2018



Kerja keras Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait dalam menanggulangi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berbuah manis. Sumatera Selatan dinobatkan menjadi yang terbaik di wilayah tiga mengalahkan Kalimantan dan Jawa dalam Penganugerahan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Award di Bali, Kamis, 22 Februari 2018. Penghargaan diserahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei kepada Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah mewakili Gubernur Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan mendapatkan peringkat pertama karena dianggap berhasil menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan berhasil mencegah terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak 2015. kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2015 lalu di beberapa daerah di Sumsel menjadi pelajaran hebat Pemerintah Provinsi dan *stakeholder* terkait. Provinsi Sumatera Selatan sangat mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terlebih Sumsel resmi ditunjuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

Sumatera Selatan telah berkomitmen dalam penanggulangan bencana khususnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 2.72
Penyerahan Piagam BNPB





Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umm Provinsi.

Tabel 2.54
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 %	Setiap Tahun

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU				PELAYANAN GANTI RUGI		CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/ PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5 = 4/3x100	6	7	8 = 7/6x100	9 = (5+8)/2 x 100	10
1	TRANTIBUM LINMAS	26	26	100%	0,00	0,00	0	50%	-

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel

Tabel 2.55
Target dan Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95%	100%	105%
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100%	100%	100
3	Persentase Satlinmas yang Aktif	%	98%	100%	102

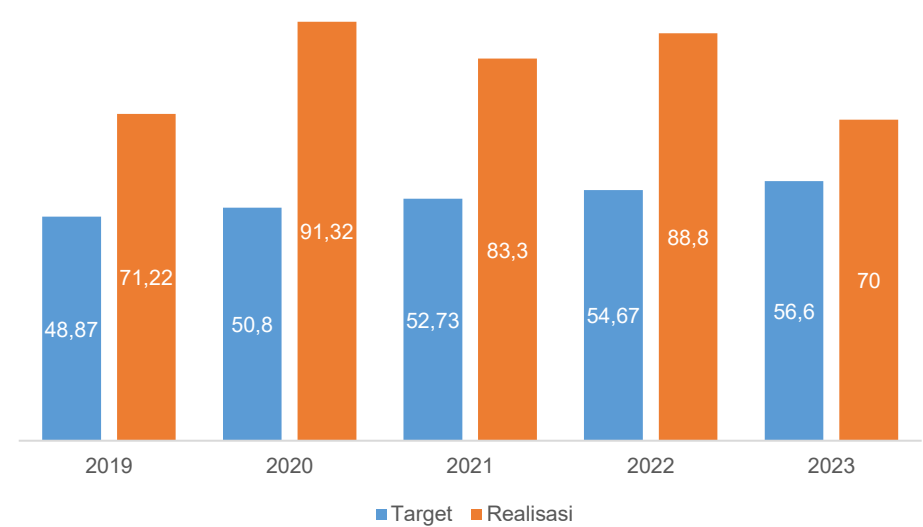
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan ketentraman, ketertiban umum diantaranya adalah masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang ada, serta belum maksimalnya Perangkat Daerah terkait untuk menjalankan Perda yang dipangku. Selain itu, berdasarkan data dilapangan tidak terdapat warga negara yang terkena dampak atas penegakan Perda dan Perkada yang berhak mendapat layanan dan tidak terdapat warga negara yang terlayani terkait pelayanan ganti rugi maupun pengobatan dikarenakan tidak adanya warga negara yang terkena dampak atas penegakan Perda dan Perkada baik cedera dan kerusakan aset milik warga negara, sehingga pencapaian SPM Trantibumlinmas belum maksimal.

6) Urusan Sosial

Panti Sosial

PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Dalam Permensos nomor 8 tahun 2012, terdapat 26 jenis PMKS yaitu 1) Anak balita terlantar, 2) Anak terlantar, 3) Anak yang berhadapan dengan hukum, 4) Anak jalanan, 5) Anak dengan disabilitas, 6) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, 7) Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), 8) Lanjut usia terlantar, 9) Penyandang disabilitas, 10) Tunasusila, 11) Gelandangan, 12) Pengemis, 13) Pemulung, 14) Kelompok minoritas, 15) Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, 16) Orang dengan HIV/AIDS, 17) Korban penyalahgunaan NAPZA, 18) Korban trafficking, 19) Korban tindak kekerasan, 20) Pekerja migran bermasalah sosial, 21) Korban bencana alam, 22) Korban bencana sosial, 23) Perempuan rawan sosial ekonomi, 24) Fakir miskin, 25) Keluarga bermasalah sosial psikologis dan 26) Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Gambar 2.73
Tren Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

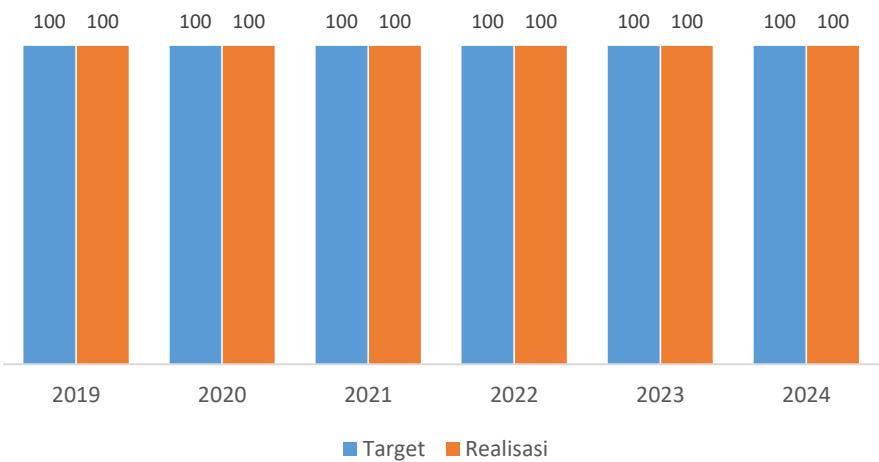
Grafik diatas menunjukkan persentase PMKS yang telah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah. Dalam kurun waktu 2019-2023, persentase PMKS yang memperoleh bantuan ditargetkan meningkat setiap tahun, namun capaiannya cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2023 ini, persentase PMKS yang mendapat bantuan tergolong rendah dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya walaupun capaiannya sudah melampaui targetnya yakni sebesar 70 persen. Sementara persentase PMKS tertinggi yang mendapat bantuan terjadi di tahun 2020 yakni sebesar 91,52 persen. Ke depan perlu ditingkatkan kembali persentase PMKS yang memperoleh bantuan mengingat kelompok tersebut sangat membutuhkan bantuan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya serta kaitannya dengan capaian angka kemiskinan di Sumatera Selatan nantinya.

Sesuai amanat UU 23 tahun 2014, pengelolaan seluruh Panti milik Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi mulai tahun 2017, dimana semula berjumlah 4 panti menjadi 16 panti atau bertambah sebanyak 12 panti yang sebelumnya dikelola oleh Kabupaten/Kota. Namun hingga pada tahun 2021 jumlah panti yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi telah berkurang menjadi 13 panti. Hal ini dikarenakan adanya penggabungan beberapa panti

yang disebabkan oleh kepemilikan gedung panti masih milik kabupaten yang akan dipergunakan untuk keperluan kabupaten, kepemilikan tanah dan gedung panti milik yayasan / masyarakat sehingga panti tersebut diserahkan kembali, dan jumlah klien salah satu panti tidak banyak sehingga untuk efektifitas maka digabung dengan panti lain yang masih dalam satu kategori panti.

Selain panti-panti yang semuanya telah dikelola oleh Pemerintah Provinsi, masih ada 1 Panti yang dikelola Pemerintah Pusat yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa sehingga total berjumlah 13 Panti milik Pemerintah di Sumatera Selatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan, uraian tugas, dan fungsi unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, 12 Panti yang ada di Provinsi Sumatera Selatan tersebut dikelola oleh 6 UPTD yaitu : UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, dan orang dengan gangguan jiwa; UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak membutuhkan perlindungan khusus, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak berhadapan dengan hukum, UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita. Lokasi panti-panti sosial tersebut hanya berada di 6 Kabupaten/Kota dengan jumlah klien yang berbeda, dengan jumlah klien paling sedikit 25 orang dan jumlah klien paling banyak 180 orang.

Gambar 2.74
Tren Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024



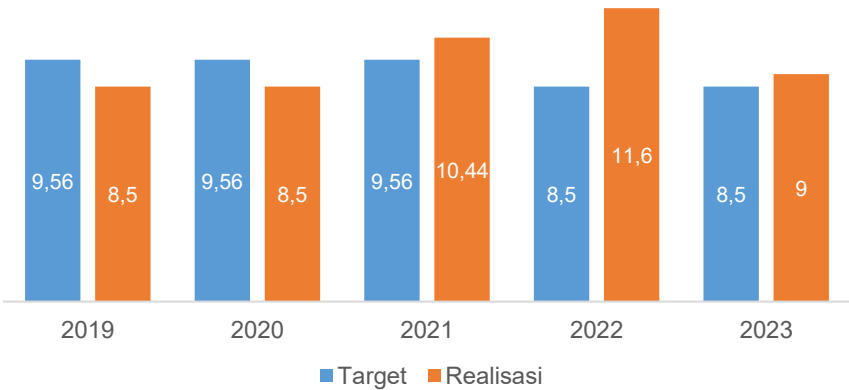
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Sebanyak 13 panti sosial yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut telah dilengkapi dengan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.2 diatas dimana telah 100 persen panti sosial di Provinsi Sumatera Selatan telah tersedia sarpras yang memadai.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial atau PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Terdapat 12 jenis PSKS berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 tahun 2012 yaitu: 1) Pekerja Sosial Profesional, 2) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), 3) Taruna Siaga Bencana (Tagana), 4) Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS), 5) Karang Taruna, 6) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), 7) Keluarga Pioner, 8) Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM), 9) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, 10) Penyuluh Sosial, 11) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan 12) Dunia Usaha.

Pemberdayaan PSKS secara optimal perlu dilakukan karena merupakan salah satu fokus sekaligus upaya mewujudkan kemandirian bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui penanganan dan pembinaan khususnya bagi masyarakat yang tergolong miskin agar lebih mandiri dan memiliki usaha sendiri. Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengubah pola pikir dan membentuk jiwa agar mau berubah menjadi lebih baik. Sementara pembinaan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha dimaksudkan agar PMKS mampu memiliki penghasilan.

Gambar 2.75
Persentase PSKS perorangan yang Berperan Aktif
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Gambar di atas menunjukkan bahwa persentase PSKS perorangan yang berperan aktif masih relatif kecil. Pada tahun 2013 hanya sekitar 9 persen saja, dengan target sebesar 8,5 persen. Meskipun capaian di tahun 2023 sudah melampaui target, namun dibandingkan dengan tahun 2022, capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 2,6 persen dari 11,6 persen menjadi 9 persen. Jika kita melihat pada tahun 2021 pun, capaian di tahun 2023 juga tergolong lebih rendah sehingga menjadi tugas kita bersama dalam mengoptimalkan peran PSKS tersebut.

Berdasarkan data DTKS per September 2024, jumlah penduduk yang termasuk dalam DTKS sebanyak 4.198.702 jiwa atau 1.577.057 KK. Sedangkan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan PKH sebanyak 228.230 dan BPNT sebanyak 424.495 keluarga.

Tabel 2.56
Rekapitulasi DTKS, BPNT, PKH dan PBI-JKN Provinsi Sumatera
Selatan Periode September 2024

NO.	NAMA KABUPATEN / KOTA	DTKS		PKH	BPNT	PBI-JKN/KIS
		JIWA	KK	KPM	KPM	JIWA
1	BANYUASIN	413.682	172.842	19.943	41.181	294.415
2	EMPAT LAWANG	127.702	47.591	6.303	13.141	113.416
3	KOTA LUBUK LINGGAU	141.033	48.733	7.778	13.269	111.738
4	KOTA PAGAR ALAM	51.221	19.644	3.270	6.373	44.753
5	KOTA PALEMBANG	769.137	301.358	31.580	47.572	651.511
6	KOTA PRABUMULIH	82.105	29.591	4.997	8.027	70.252
7	LAHAT	220.079	81.440	14.569	26.198	196.664
8	MUARA ENIM	297.740	106.348	21.633	40.455	256.022
9	MUSI BANYUASIN	412.984	154.258	14.831	30.335	322.277
10	MUSI RAWAS	237.610	87.763	18.187	32.262	206.724
11	MUSI RAWAS UTARA	114.834	44.777	4.242	8.590	97.724
12	OGAN ILIR	237.681	80.561	18.672	34.332	200.425
13	OGAN KOMERING ILIR	392.568	156.105	18.082	39.550	361.063
14	OGAN KOMERING ULU	157.927	52.480	8.769	20.973	142.626
15	OGAN KOMERING ULU SELATAN	190.649	65.283	14.737	26.416	165.689
16	OGAN KOMERING ULU TIMUR	287.828	102.239	16.991	29.237	269.704
17	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	63.922	26.044	3.646	6.584	54.628
JUMLAH		4.198.702	1.577.057	228.230	424.495	3.559.631

Sumber: Dinas Sosial Prov. Sumsel

Berikut ini tabel realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Realisasi 2024 (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Dalam Panti	100,00	100,00
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya dalam panti	100,00	100,00
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Dalam Panti	100,00	100,00
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Dalam Panti	100,00	100,00
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosia yang Terpenuhi Kebutuh	100,00	100,00

	Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi	Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi		

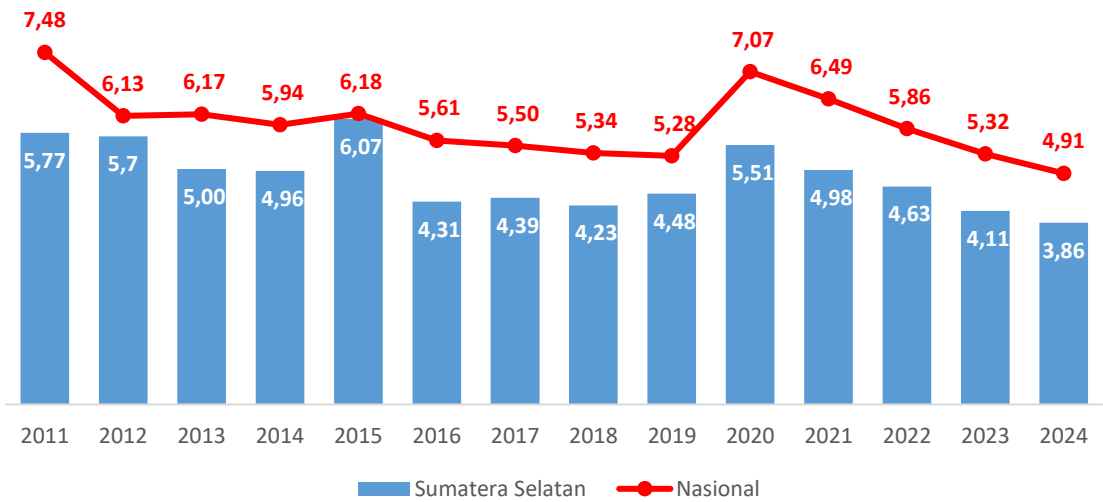
Sumber: Laporan SPM Dinas Sosial Prov. Sumsel Tahun 2024

7) Urusan Tenaga Kerja

7.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara keseluruhan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan bila dilihat dari tahun 2010 hingga tahun 2024 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, angka pengangguran di Sumsel mencapai 4,48 persen, berkurang sebesar 2,17 persen dibandingkan angka pengangguran di tahun 2010. Namun di tahun 2020, tingkat pengangguran meningkat menjadi 5,51% sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Di tahun 2021, Sumsel berhasil menurunkan angka TPT menjadi 4,98%. Angka TPT berhasil diturunkan kembali menjadi 4,74% di tahun 2022, 4,11% di tahun 2023 dan tahun 2024 3,86%. Hal tersebut seiring dengan capaian TPT nasional di tahun 2022 dan 2024 yang juga mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2011-2024 capaian TPT Sumsel lebih rendah dibandingkan capaian TPT nasional.

Gambar 2.76
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Selatan
Tahun 2010-2024



Sumber: BPS, 2024

Secara absolut jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2023 sebanyak 188,51 ribu orang atau berkurang sebanyak 19,75 ribu orang dari Agustus 2022 sebesar 208,26 ribu orang.

7.2. Kondisi Angkatan Kerja

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri atas 4,39 juta orang penduduk yang bekerja dan 188,51 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 90,21 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 109,96 ribu orang sedangkan pengangguran juga mengalami penurunan sebanyak 19,75 ribu orang. Sementara itu apabila dibandingkan kondisi Agustus 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 189,26 ribu orang. Penduduk bekerja bertambah sebesar 219,95 ribu orang dan pengangguran berkurang sebesar 30,69 ribu orang.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 mengalami peningkatan sebanyak 90,21 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2022. Seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat menjadi 70,72 persen pada Agustus 2023 dibandingkan Agustus 2022 (69,31 persen). Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur.

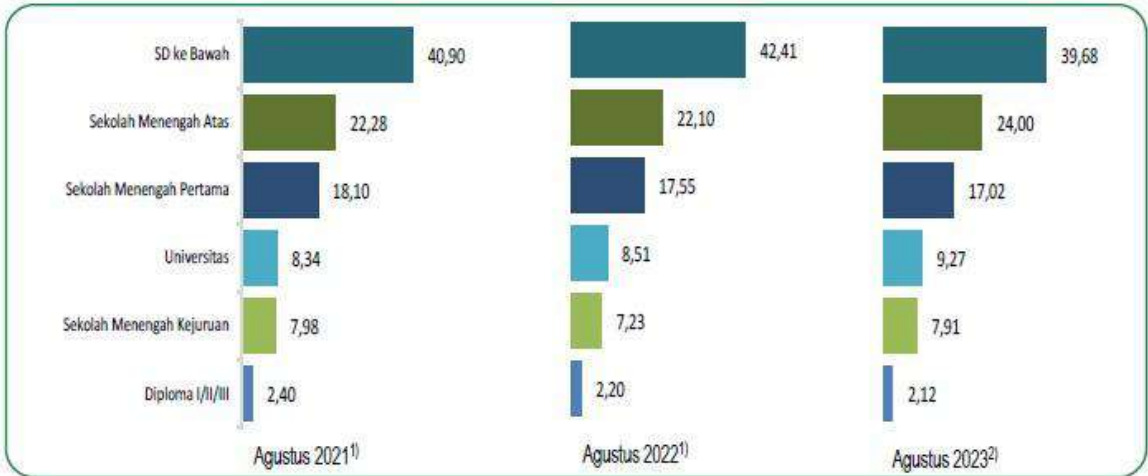
Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 85,39 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,54 persen. Apabila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2022, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan.

7.3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 39,68 persen. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 11,39 persen. Kontribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama baik pada Agustus 2021 maupun

Agustus 2022. Dibandingkan dengan Agustus 2022, kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja mengalami penurunan pada pendidikan SD ke bawah (2,73 persen poin), SMP (0,53 persen poin), dan Diploma (0,08 persen poin).

Gambar 2.77
Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan

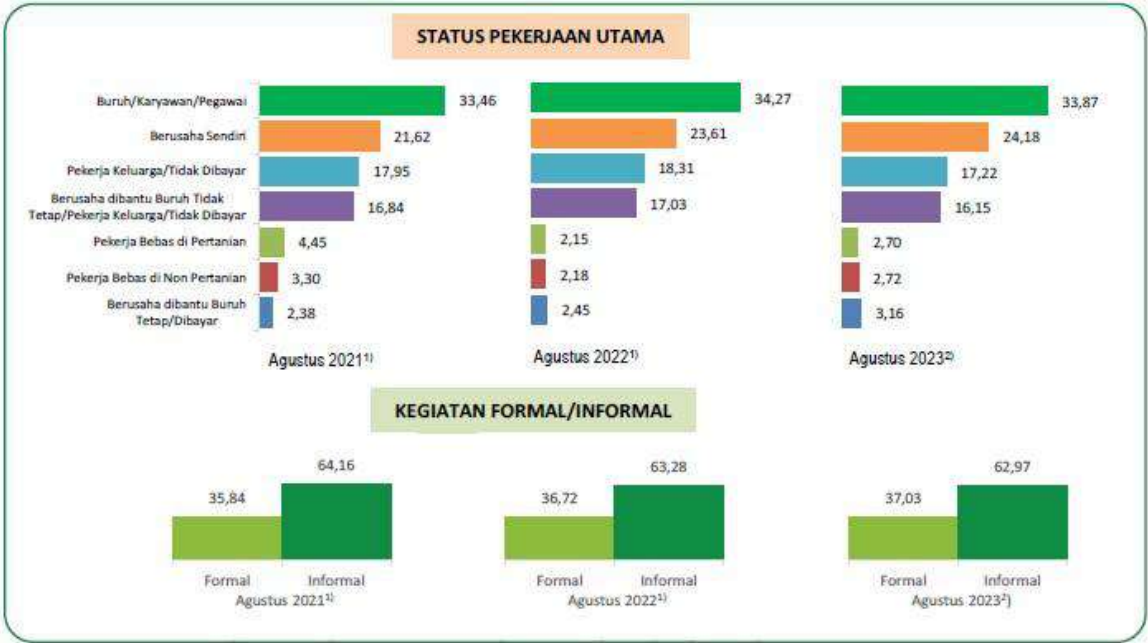


Sumber: BPS Sumsel, 2023

Bila dibandingkan Agustus 2021 kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja juga turun pada pendidikan SD (1,22 persen poin), SMP (1,08 persen poin), SMK (0,07 persen poin) dan Diploma (0,28 persen poin). Peningkatan kontribusi yang cukup besar terdapat pada penduduk bekerja dengan pendidikan SMA sebesar 1,72 persen dan Universitas dengan peningkatan sebesar 0,93 persen.

Selain itu kurangnya keterampilan pencari kerja juga menyebabkan persentase penduduk yang bekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan penduduk yang bekerja di sektor formal. Berdasarkan status pekerjaan utamanya tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Gambar 2.78
Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Formal dan Informal
Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Sumsel, 2023

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2,77 juta orang (62,97 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,63 juta orang (37,03 persen). Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan 0,31 persen.

7.4. Tingginya Jumlah Pengangguran Terdidik

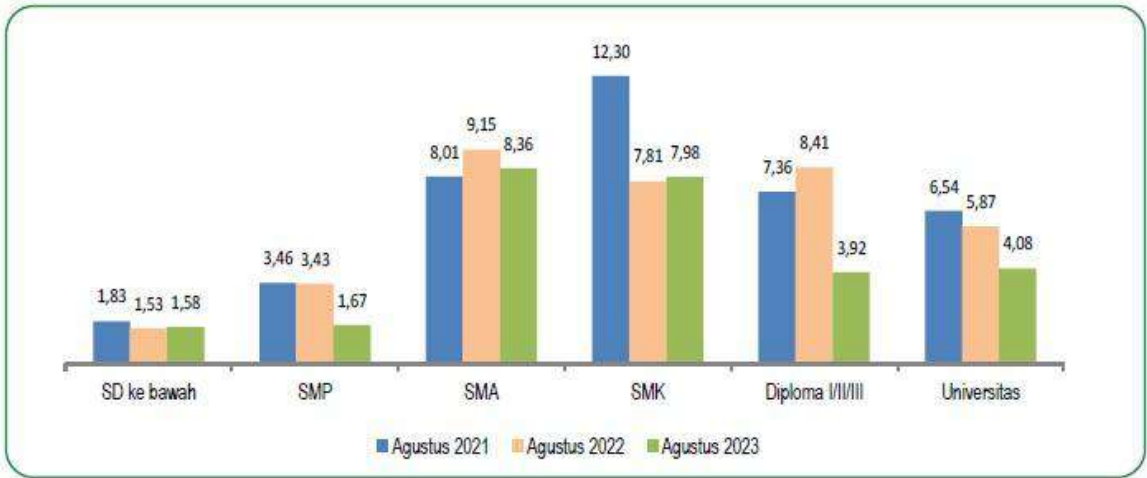
Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, pengangguran di Sumatera Selatan didominasi oleh pengangguran terdidik terutama di daerah perkotaan. TPT menurut kategori pendidikan mempunyai pola yang hampir sama pada Agustus 2023, Agustus 2022, dan Agustus 2021. Pada Agustus 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibanding tamatan

jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 8,36 dan 7.98 persen meskipun terus mengalami penurunan sejak tahun 2021. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1,58 persen.

Dibandingkan Agustus 2022, TPT hampir semua kategori mengalami penurunan kecuali untuk tamatan SD yaitu naik sebesar 0,05 persen poin dan SMK yang naik sebesar 0,17 persen poin. Namun jika dibanding Agustus 2021, kategori yang mengalami peningkatan yaitu tamatan SMA sebesar 0,35 persen poin, sedangkan kategori lain mengalami penurunan.

Beberapa penyebab yang mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran terdidik adalah terbatasnya lapangan kerja yang tidak diminati oleh tenaga kerja terdidik. Dengan pendidikan yang relatif tinggi menyebabkan para pencari kerja merasa enggan untuk bekerja di kegiatan ekonomi informal. Pilihan utama biasanya adalah bekerja di sektor formal atau sektor ekonomi produktif. Padahal lapangan kerja di sektor tersebut sangat terbatas sehingga mereka terpaksa menganggur. Tingginya angka pengangguran terdidik lebih disebabkan faktor eksternal pendidikan misalnya budaya priyayi, atau pola pikir masyarakat yang menganggap pekerjaan formal lebih bonafit dibandingkan pekerjaan informal.

Gambar 2.79
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan



Sumber: BPS Sumsel 2023

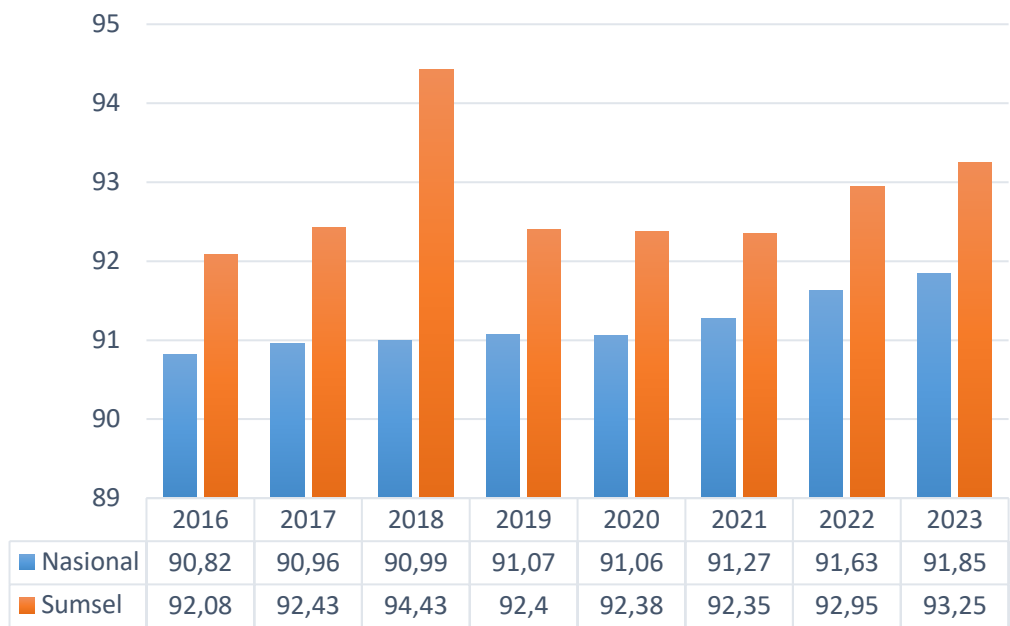
Dalam mengatasi fenomena tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk menurunkan angka pengangguran terdidik, antara lain melalui pengembangan informasi pasar kerja dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. Dalam penyebarluasan informasi bursa kerja, pemerintah daerah membangun sistem informasi pasar kerja karena dilatarbelakangi oleh minimnya akses informasi lowongan kerja bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja tersebut belum mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya penyebarluasan informasi bursa kerja tersebut diharapkan para pencari kerja mendapatkan akses lowongan kerja dengan cepat. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja juga telah melaksanakan pelatihan-pelatihan kerja bagi para pencari kerja. Kedepan, Balai Latihan Kerja harus diperkuat peran dan fungsinya agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, bukan hanya mampu menciptakan tenaga kerja yang handal, tetapi juga fokus sesuai dengan kebutuhan pasar.

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Capaian IPG Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 92,95 persen. Capaian tersebut menempatkan Provinsi Sumatera Selatan berada di atas angka nasional yaitu sebesar 91,63 persen atau nomor 10 tertinggi di Indonesia. Capaian pada tahun 2023 sebesar 93,25 persen dan masih berada di atas angka nasional

sebesar 91,85 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa GAP pembangunan manusia perempuan dan laki-laki di Sumatera Selatan setiap tahun membaik, dimana prestasi pembangunan manusia perempuannya relatif besar dibandingkan laki-laki.

Gambar 2.80
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016 – 2023



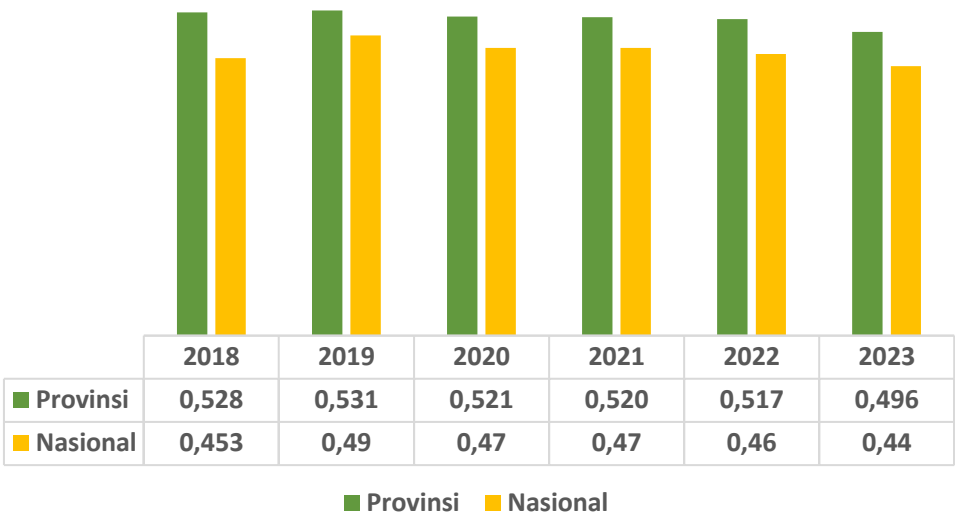
Sumber: BPS Republik Indonesia, 2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

IKG adalah adopsi dari Gender Inequality Index (GII) yang diaplikasikan di tingkat nasional dan daerah, menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Ketimpangan Gender di Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun terakhir secara konsisten menurun. Sejak tahun 2018 hingga 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkurang sebesar 0,032 poin, rata-rata turun 0,006 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Provinsi Sumatera Selatan semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik.

Gambar 2.81
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018-2023

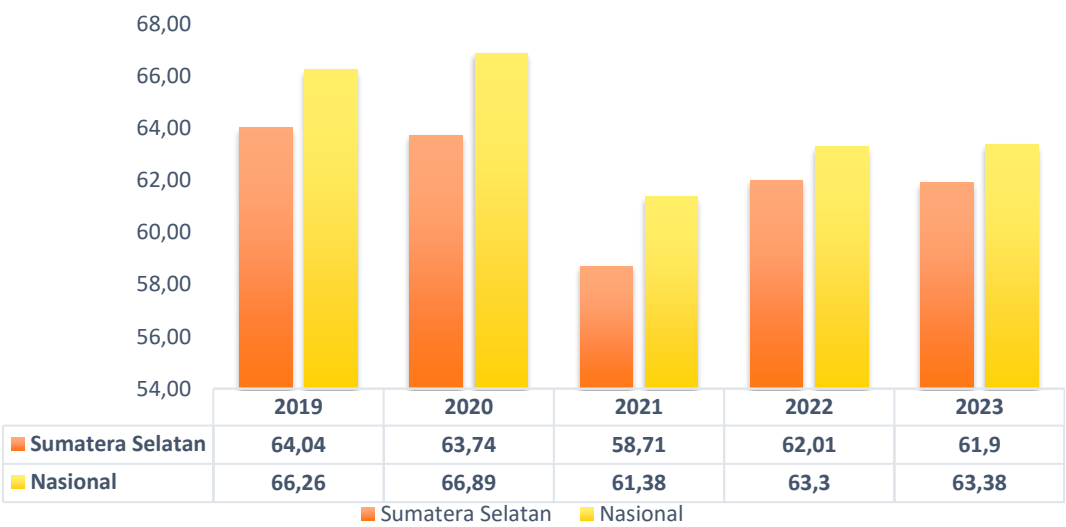


Sumber: BPS Republik Indonesia, 2024

Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Hasil Capaian Indeks Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 62,01 tetapi masih berada di bawah capaian nasional. Ini menunjukkan bahwa masih diperlukan kerja keras bersama agar Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan lebih Optimal.

Gambar 2.82
Indeks Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas PPPA Sumsel

9) **Urusan Pangan**

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan tercermin dari ketersesedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Kondisi ketahanan pangan tercermin dari 3 pilar utamanya yaitu :

- 1. Aspek Ketersediaan Pangan
- 2. Aspek Keterjangkauan Pangan
- 3. Aspek Pemanfaatan Pangan

a. **Aspek Ketersediaan Pangan**

Aspek ketersediaan pangan strategis di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 2.57
Neraca Ketersediaan Pangan Provinsi Sumatera Selatan,
2024 (ASEM)

No.	Komoditi	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Surplus/Minus (Ton)
1	Beras	1.797.460,93	852.069,65	945.391,28
2	Jagung	332.333,83	146.810,53	185.523,30
3	Kedelai	3.882,99	64.050,52	-60.167,53
4	Bawang Merah	27.145,70	26.803,61	342,10
5	Bawang Putih	21.984,42	22.014,80	-30,38
6	Cabai Besar	42.347,75	42.122,28	225,47
7	Cabai Rawit	30.085,27	29.918,87	166,40
8	Daging Ruminansia	47.103,79	13.875,27	33.228,53
9	Daging Unggas	150.614,35	120.432,32	30.182,03
10	Telur Ayam	215.017,37	95.243,64	119.773,73
11	Gula Pasir Konsumsi	126.843,67	106.708,62	20.135,05
12	Minyak Goreng/Sawit	164.496,65	100.740,17	63.756,48

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, 2024

Berdasarkan dari data ketersediaan dan kebutuhan pangan di Provinsi Sumatera Selatan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Kebutuhan 12 (dua belas) komoditi pangan di Provinsi Sumatera Selatan dapat terpenuhi, baik dengan produksi sendiri maupun impor;

- 2. Ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan komoditi pangan beras, jagung, telur ayam dan daging ruminansia dapat terpenuhi dari hasil produksi sendiri;
- 3. Ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan komoditi pangan bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, dan gula pasir dilakukan melalui produksi sendiri ditambah dengan impor dari luar provinsi.
- 4. Ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan Kedelai dan Bawang Putih dilakukan melalui produksi sendiri, impor dan juga ekspor beberapa produk tertentu.
- 5. Ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan komoditi minyak goreng/sawit dilakukan melalui impor.

b. Aspek Keterjangkauan Pangan

Aspek keterjangkauan pangan di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.58
Harga Pangan Pokok Strategis Tingkat Eceran Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Komoditi	Harga Rata-rata (Rp/kg)												RATA-RATA	MIN	MAX	CV
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec				
Beras Premium	12,459	12,695	12,599	12,565	12,633	12,725	12,806	13,102	13,998	14,555	14,648	14,449	13,275	12,459	14,648	6.56
Beras Medium	10,967	11,219	11,215	11,188	11,277	11,316	11,396	11,585	12,692	13,258	13,332	13,178	11,891	10,967	13,332	7.83
Kedelai Biji Kering (Impor)	14,323	14,444	14,449	14,364	12,927	11,932	11,978	12,062	12,014	12,119	12,371	12,334	12,881	11,932	14,449	8.57
Bawang Merah	37,988	39,726	35,432	34,085	37,854	36,952	33,830	27,218	22,072	21,931	27,517	33,108	32,255	21,931	39,726	19.08
Bawang Putih Bonggol	25,766	27,520	31,119	31,478	35,336	36,561	38,569	36,569	35,157	34,422	33,413	34,673	33,430	25,766	38,569	11.34
Cabai Merah Keriting	45,126	44,335	43,061	36,469	27,887	30,559	36,840	37,317	36,147	41,645	75,784	71,329	43,889	27,887	75,784	33.79
Cabai Rawit Merah	57,017	55,313	59,566	43,987	33,501	36,423	35,578	39,342	34,052	46,056	79,860	78,985	49,969	33,501	79,860	32.97
Daging Sapi Murni	135,524	134,968	137,180	140,903	135,078	135,582	134,630	134,498	134,773	134,576	134,649	134,420	135,538	134,420	140,903	1.36
Daging Ayam Ras	30,341	27,955	29,882	30,393	33,567	35,412	35,724	31,507	31,600	31,220	30,595	30,604	31,594	27,955	35,724	7.19
Telur Ayam Ras	27,302	26,444	27,219	27,763	29,165	29,622	30,054	29,098	26,604	25,638	26,309	26,653	27,665	25,638	30,054	5.31
Gula Pasir Curah/Lokal	13,837	13,753	13,766	13,779	13,729	13,915	14,143	14,241	14,450	15,039	16,258	16,901	14,492	13,729	16,901	7.31
Minyak Goreng Kemasan	16,500	17,067	16,876	16,981	17,017	16,717	16,316	16,043	16,017	16,003	15,998	16,104	16,463	15,998	17,067	2.67
Tepung Terigu (Curah)	10,650	10,578	10,451	10,300	10,311	10,299	10,199	10,314	10,162	10,081	9,979	9,927	10,269	9,927	10,650	2.14
Minyak Goreng Curah	15,391	15,820	15,497	15,311	15,262	14,969	14,673	14,466	14,170	14,147	14,210	14,268	14,824	14,147	15,820	4.03
Jagung tk peternak	5,177	5,500	6,419	6,657	6,952	6,533	6,500	6,529	6,927	7,113	7,588	7,797	6,647	5,177	7,797	11.27
Ikan Kembung	33,213	34,398	36,081	36,548	36,024	39,347	38,615	38,327	37,256	36,503	36,527	36,395	36,620	33,213	39,347	4.66
Ikan Tongkol	29,225	28,709	29,422	29,759	29,393	29,160	28,569	28,658	28,396	28,593	28,505	28,265	28,877	28,265	29,759	1.66
Ikan Bandeng	28,599	28,646	28,462	28,657	29,185	29,249	28,776	29,094	28,368	28,463	28,779	28,609	28,751	28,368	29,249	1.01
Garam				10,757	10,959	11,311	11,594	11,580	11,440	11,197	10,994	11,204	11,244	10,757	11,594	2.55
Tepung Terigu				13,548	13,208	13,077	13,138	13,214	13,177	13,193	13,279	13,222	13,217	13,077	13,548	1.00
RATA-RATA CV																8.62

Sumber: Aplikasi Panel Harga BKP Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa Koefisien Harga Pangan Strategis telah tercapai 100% sudah sesuai target yang diharapkan. Pemantauan dan evaluasi harga pangan strategis untuk tahun 2023 dilakukan pada 15 komoditi strategis di 17 kabupaten/kota dan sudah terealisasi mencapai angka rata - rata 8,62 %. Berdasarkan hasil analisis, Perkembangan Harga Komoditi pangan Pokok

Strategis di tingkat konsumen/eceran sepanjang Tahun 2023 cukup stabil terutama untuk komoditi kedelai biji kering, bawang merah, bawang putih (bonggol), daging sapi murni, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, garam, ikan kembung, ikan tongkol dan ikan bandeng. Terkecuali untuk komoditi 5 (lima komoditi) yaitu beras medium CV 7,83 (CV>5 %), beras premium CV 6,56 (CV>5 %), cabe merah keriting CV 33,79 (CV>30 %), cabe rawit merah CV 32,97 (CV>30 %), dan Jagung Tingkat Peternak CV 11,27 (CV>10 %). Tetapi secara rata-rata Koefisien Varian (CV) Harga Pangan Strategis (%) ≤ 15 % yaitu 8,62 %.

1. .

c. Aspek Pemanfaatan Pangan

Aspek keterjangkauan pangan di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.59
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Penduduk
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	KelompokPangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi		
		Ideal	Aktual	
			2022	2023
1.	Padi-padian	25,0	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	2,5	1,6	1,7
3.	PanganHewani	24,0	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0
5.	Buah/Bijiberminyak	1,0	0,3	0,3
6.	Kacang-kacangan	10,0	5,7	6,1
7.	Gula	2,5	2,3	0,1
8.	Sayur dan Buah	30,0	30,0	30,0
9.	Lain-lain	-	-	-
Total		100	93,9	94,2

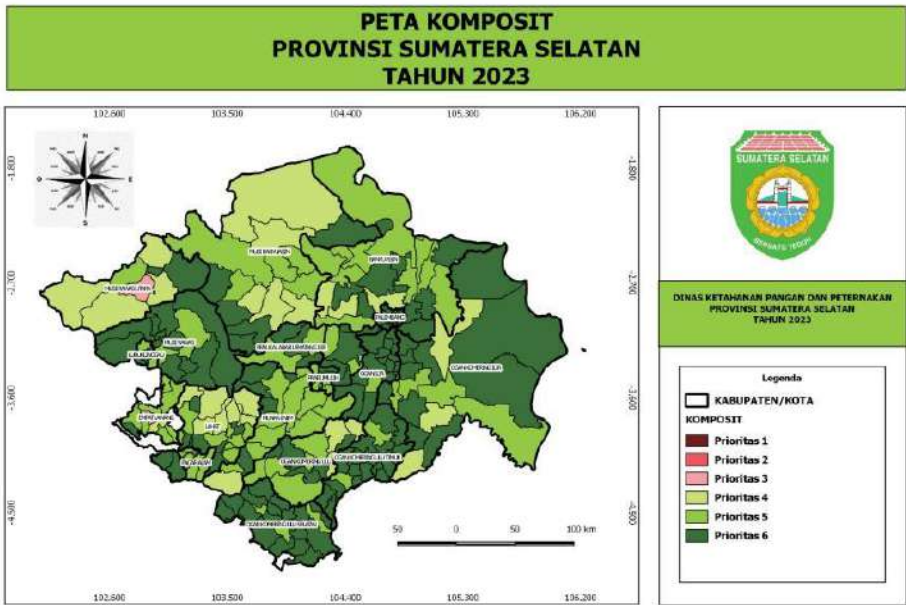
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, 2024

Dari hasil perhitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebesar 93,9 dan Tahun 2023 sebesar 94,2. Hal ini dapat diartikan bahwa mutu/kualitas konsumsi pangan masyarakat Sumatera Selatan hampir memenuhi standar beragam, bergizi dan

seimbang (B2SA), pola konsumsi masyarakat masih didominasi pada padi-padian dan lemak.

Selain itu kondisi ketahanan pangan Provinsi Sumatera Selatan 2023 dapat dilihat dari peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023:

Gambar 2.83
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, 2024

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan indikator FSVA 2023 terhadap Peta Komposit Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 mendapatkan hasil sebagai berikut :

1. Tidak ada daerah/kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam Kategori Prioritas 1 dan 2;
2. Daerah Prioritas 3 adalah sebagai berikut:
 - Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang; dan
 - Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Daerah Prioritas 4 adalah sebagai berikut:
 - Kabupaten OKU ada 3 Kecamatan yaitu Peninjauan, Kedaton Peninjauan Raya, dan Lubuk Raja;
 - Kabupaten OKI ada 3 Kecamatan yaitu Mesuji Makmur, Mesuji Raya, dan Pangkalan Lampam;
 - Kabupaten Muara Enim ada 1 Kecamatan yaitu Semendo Darat Ulu;
 - Kabupaten Lahat ada 7 Kecamatan yaitu Kikim Barat, Kikim

- Timur, Lahat, Gumay Talang,
Pseksu, Merapi Barat, dan Merapi Timur;
- Kabupaten Musi Banyuasin ada 5 Kecamatan yaitu Lawang Wetan, Sekayu, Lais, Bayung Lencir, dan Tungkal Jaya;
 - Kabupaten Banyuasin ada 3 Kecamatan yaitu Betung, Banyuasin III, dan Talang Kelapa;
 - Kabupaten Empat Lawang ada 1 Kecamatan yaitu Pendopo;
 - Kabupaten Musi Rawas Utara ada 4 Kecamatan yaitu Ulu Rawas, Karang Jaya, Karang Dapo, Dan Nibung.

Tabel 2.60
Target dan Realisasi Produksi Peternakan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KIERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2024	REALISASI	PERSEN
1	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pendapatan peternak	PRODUKSI DAGING (Ton)*	149.142	167.514	112,31
		1. Sapi	13.370	11.811	88,33
		2. Kerbau	660	679	102,87
		3. Kambing	1.710	1.216	71,11
		4. Domba	121	48	39,66
		5. Babi	196	110	56,12
		6. Ayam Buras	5.822	5.793	99,50
		7. Ayam Ras Petelur	12.315	11.710	95,08
		8. Ayam Ras Pedaging	112.547	134.257	119,28
		9. Itik	2.401	1.890	78,71
		PRODUKSI SUSU (Liter)*	33	10	30,30
		1. Sapi Perah	-	-	-
		2. Kerbau Perah	3	-	-
		3. Kambing PE.	30	10	33,33
		PRODUKSI TELUR (Ton)*	232.762	248.538	106,77
		1. Ayam Buras	3.484	8.474	243,22
		2. Ayam Ras Petelur	221.889	226.105	101,90
		3. Itik	4.946	12.997	262,77
		4. Puyuh	200	59	29,5
		5. Itik Manila	2.243	903	40,25

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. SUMSEL, 2025

Produksi daging pada tahun 2024 di targetkan sebesar 149.142 ton dan terealisasi sebesar 167.514 ton (112,31%), dari hasil realisasi yang diperoleh, produksi daging tercapai melebihi target yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun capaian produksi daging sebesar 167.514 ton tersebut terdiri dari daging sapi sebesar 11.811 ton, daging kerbau 679 ton, daging kambing 1.216 ton, daging domba 48 ton, daging babi 110

ton, daging ayam buras 5.793 ton, daging ayam ras petelur 11.710 ton, daging ayam ras pedaging 134.257 ton dan daging itik sebesar 1.890 ton.

Untuk capaian total produksi daging ternak ini diperoleh melalui pengembangan perbibitan didaerah sentra antara lain berupa usaha penggemukan sapi potong dan SIKOMANDAN, jalinan kerjasama kemitraan dengan perusahaan unggas dan peningkatan skala usaha pemeliharaan ternak (Laporan Perunggasan Nasional). Pencapaian produksi daging ini didukung potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang memadai baik kualitas pelayanan petugas maupun kualitas peternak itu sendiri.

Produksi susu pada tahun 2024 di targetkan sebesar 33 liter dan terealisasi hanya mencapai 10 liter. Adapun produksi susu sebanyak 10 liter tersebut hanya terdiri dari susu Kambing PE, sedangkan susu kerbau perah dan susu sapi perah di Sumatera selatan sudah tidak terdata lagi. Tidak terealisasinya Produksi Susu Kerbau Perah dan Sapi Perah dikarenakan tidak adanya data susu Kerbau dan Sapi dari Kabupaten/Kota, hal ini terjadi karena sedikitnya peminat atau yang mengkonsumsi susu Kerbau dan Sapi, kebanyakan hanya untuk konsumsi sendiri/rumah tangga. sehingga untuk produksi susu kerbau dan Sapi tidak terdata. Penurunan Produksi Susu Sapi segar pada tahun 2023 mengakibatkan kebutuhan susu dalam provinsi tidak terpenuhi.

Produksi Telur pada tahun 2024 di targetkan 232.762 ton dan terealisasi mencapai 248.538 ton (106,77%). Adapun produksi telur sebanyak 248.538 ton tersebut terdiri dari telur ayam buras sebesar 8.474 ton, telur ayam ras petelur 226.105 ton, telur Itik sebesar 12.997 ton, Puyuh sebesar 59 ton, dan Itik Manila sebesar 903 ton.

Produksi Telur sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam provinsi. Dari hasil pengumpulan data diketahui ada peningkatan pada produksi Ayam Ras Petelur, Ayam Buras dan Itik. Dimana realisasi produksi telur Ayam Ras Petelur, Ayam Buras dan Itik melebihi target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Produksi Padi, Jagung, Kedelai

Untuk capaian produksi padi, jagung dan kedelai Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, produksi padi, jagung dan kedelai belum mencapai target yang ditetapkan di RPJMD. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Sandingan Target RPJMD Terhadap Realisasi Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2020 - 2021

Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Produksi Padi	Ton	5.325.825	2.743.061	5.450.825	2.552.443*)
Produksi Jagung	Ton	1.136.025	927.757	1.164.426	951.679**)
Produksi Kedelai	Ton	15.084	1.065	15.234	392**)

*) Data Kerangka Sampel Area (KSA) Tahun 2021

**) Data Angka Ramalan II (ARAM II) Tahun 2021

Berdasarkan Data Kerangka Sampel Area (KSA) Padi Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan, capaian kinerja produksi padi tahun 2021 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan luas panen dan luas tanam. Luas panen padi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 turun seluas 59.284 Ha (10,75%), disebabkan karena adanya curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan banyak petani yang tidak melakukan penanaman di IP 200 dan adanya alih fungsi tanam ke komoditi lain yaitu komoditi jagung sehingga penanaman jagung di tahun 2021 mengalami peningkatan.

Jika dibandingkan dengan target, capaian produksi padi tahun 2020 dan 2021 belum melampaui target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Tidak tercapainya target produksi tersebut dikarenakan banyak yang tidak melakukan penanaman di Indeks Pertanaman (IP) 200 karena curah hujan tinggi, adanya alih fungsi tanam ke komoditi lain seperti komoditi jagung, adanya pengurangan luas Lahan Baku Sawah (LBS), dan adanya perubahan metode pendekatan penghitungan produksi menjadi Kerangka Sampel Area (KSA).

Terkait dengan adanya pengurangan luas lahan baku sawah di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota, Dinas PUPR dalam kegiatan *Updating* Luas Baku Lahan Sawah Provinsi Sumatera Selatan dari tanggal 03 September sampai dengan 15 Desember 2021 melalui rapat koordinasi pembaruan data dan informasi luas lahan baku sawah baik secara *offline* maupun via *zoom meeting*. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memvalidasi dan pemutakhiran data dan informasi luas lahan baku sawah tahun 2021 di Provinsi Sumatera Selatan dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan penyusunan program strategis pertanian.

Melalui kegiatan updating luas lahan baku sawah tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan diharapkan lahan-lahan sawah existing yang belum termasuk di dalam ATR/ BPN dapat dimasukkan ke dalam luas lahan baku sawah sehingga keberadaan lahan-lahan sawah yang dimiliki oleh petani di Sumatera Selatan dapat dilindungi dan diakui keberadaannya. Berdasarkan hasil verifikasi luas lahan baku sawah kabupaten/ kota, maka dari luas baku lahan sawah ATR/BPN seluas 470.602,37 menjadi seluas 593.945,33 ha. Hal ini menunjukkan bahwa terkoreksi adanya penambahan lahan baku sawah di Provinsi Sumatera Selatan seluas 69.075,29 ha pada tahun 2020 dan seluas 54.267,68 ha pada tahun 2021. Hasil penetapan lahan baku sawah tahun 2021 seluas 54.267,68 ha akan disampaikan melalui surat pengusulan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Kementerian/ Lembaga terkait (namun akan diputuskan lebih lanjut) untuk mendapatkan penetapan perubahan lahan baku sawah Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan adanya perubahan metode pendekatan penghitungan produksi juga sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait melalui kegiatan

optimalisasi peningkatan produksi dan produktivitas padi berbasis segmen Kerangka Sampel Area (KSA).

Capaian produksi jagung tahun 2021 berdasarkan ARAM II adalah 951.680 ton atau 2,58% lebih besar dari capaian Produksi Jagung Tahun 2020. Adanya peningkatan capaian produksi dikarenakan adanya peningkatan luas tanam dan luas panen di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021, banyak petani yang lahannya beralih fungsi ke komoditi jagung sehingga terjadi peningkatan luas tanam di tahun 2021. Luas tanam ini diikuti juga dengan peningkatan luas panen.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, capaian produksi jagung belum mencapai target. Salah satu penyebab dari rendahnya capaian itu yaitu penetapan target berdasarkan tahun dasar 2018 yang terlalu tinggi karena di tahun sebelumnya ada program/kegiatan yang mendukung peningkatan produksi jagung (UPSUS/Upaya Khusus), sedangkan keadaan sebaliknya yang terjadi di tahun berikutnya. Selain itu, sebagian besar usahatani hanya mengandalkan swadaya petani jagung.

Capaian produksi kedelai tahun 2021 berdasarkan ARAM II adalah 393 ton atau jauh menurun 63,13% dibandingkan dengan Capaian Produksi Kedelai Tahun 2020. Adanya penurunan capaian produksi dikarenakan adanya penurunan luas tanam dan luas panen. Luas tanam kedelai di tahun 2021 sebesar 341 ha yang mengalami penurunan sebesar 53,17% dibandingkan dengan luas tanam kedelai di tahun 2020. Begitu juga dengan luas panen kedelai di tahun 2021 yang mengalami penurunan sebesar 61,63% dibandingkan dengan tahun 2020.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, capaian produksi kedelai belum mencapai target. Tidak tercapainya target produksi 2021 disebabkan selain karena penetapan target yang terlalu besar, petani juga tidak bergairah untuk menanam kedelai karena benih tidak tersedia dan perlu didatangkan dari luar Sumatera Selatan, belum adanya jaminan harga, kualitas benih yang diuji coba di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah.

Terkait dengan pembangunan pertanian di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dievaluasi, yaitu :

1. Masih rendahnya produktivitas padi
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluh Pertanian semakin berkurang
3. Luas Baku Lahan Sawah (LBS) masih belum optimal
4. Kepemilikan lahan pasang surut lebih dari 2 ha
5. Belum semua kelompok tani terdata di dalam aplikasi Simluhtan
6. Ketersediaan benih di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah
7. Serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih rendah
8. Baru Kabupaten OKU Timur dan Banyuasin yang sudah ada PERDA LP2B
9. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) belum optimal
10. Belum semua kelompok tani di dalam aplikasi Simluhtan terdata di dalam aplikasi e-RDKK

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan juga telah melakukan tindak lanjut dari program terobosan yang dilaksanakan di tahun 2021, diantaranya :

1. Dengan dukungan program/ kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021 baik yang bersumber dana APBD maupun APBN, produktivitas padi Sumatera Selatan tahun 2021 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020.
2. Telah diangkatnya 1.000 orang tenaga PPEP di akhir tahun 2020 dan mulai ditempatkan di desa/ kelurahan yang menjadi wilayah binaan petugas pendamping peningkatan ekonomi pertanian (PPEP) di awal tahun 2021, dan ditambah pengangkatan kembali petugas PPEP sebanyak 400 orang di akhir tahun 2021 untuk memenuhi desa/ kelurahan yang belum ada penyuluh lapangannya sehingga dapat mewujudkan kondisi ideal 1 desa 1 penyuluh.
3. Tahun 2021 melalui SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 590/KPTS/DIS.PTPH/2021 tanggal 17 September 2021 dibentuklah Tim Kelompok Kerja Pembaharuan Data dan Informasi Luas Lahan Baku Sawah (LBS) Tahun 2021, dengan hasil didapatkannya penambahan updating polygon sawah

sebesar 54.267,68 ha di luar LS tahun 2019 dan hasil verifikasi tahun 2020 sehingga total LBS Sumatera Selatan menjadi 593.945,33 ha dan telah diusulkan kepada Kementerian ATR/BPN agar dapat diupdate pada rilis LBS tahun 2023 yang akan datang.

4. Kebanyakan petani di daerah pasang surut mempunyai lahan usaha lebih dari 2 ha sehingga di dalam penngajuan pupuk bersubsidi hanya bisa dipenuhi untuk luasan 2 ha.
5. Berdasarkan data Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) tahun 2021 jumlah kelompok tani yang terdata sebanyak 34.789 kelompok dimana terjadi peningkatan sebanyak 1.882 kelompok dari tahun 2020. Hal ini ditujukan agar data yang ada valid karena saat sekarang semua bantuan yang dikeluarkan pemerintah harus melalui kelompok tani yang terdaftar di aplikasi Simluhtan.
6. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui UPTD BPSB TPH Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan upaya kembali peningkatan ketersediaan benih unggul bermutu bersertifikat, yaitu dengan melakukan sosialisasi aktivasi Desa Mandiri Benih di Kabupaten Banyuasin dan OKU Selatan, serta dengan melakukan pendampingan calon penyedia E-Katalog yang saat ini dalam tahap penerbitan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kementerian Perindustrian pada 3 (tiga) calon penyedia benih baru.
7. Naiknya realisasi kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian dari tahun ke tahun tidak lepas dari peran penyuluh lapangan, Petugas Dinas Pertanian Kabupaten, Petugas Dinas Pertanian Provinsi maupun petugas PPEP yang terus mensosialisasikan untuk tidak menggunakan jasa rentenir, pemerintah saat ini mencoba membantu petani untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan yang dapat digunakan. Petani sudah dapat mengakses pinjaman KUR dengan aneka skemanya yang dibuat sangat ramah untuk petani di Sumatera Selatan. Untuk Sumatera Selatan KUR Pertanian dapat diakses di 4 perbankan besar yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Sumsel Babel dengan suku bunga 6 % per tahun.

8. Untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari 17 kabupaten/ kota, 5 kabupaten (Banyuasin, Empat Lawang, Muaraenim, OKU Selatan dan Musi Rawas) sudah tersedia, 5 kabupaten/ kota (OKU Timur, OKI, Ogan Ilir, Musi Banyuasin dan Lubuklinggau) sedang dalam proses RTRW. Sedangkan 7 kabupaten/ kota lagi belum ada dukungan dana APBN maupun APBD (Prabumulih, Lahat, Muratara, Pali, Pagaram, Palembang dan OKU). Secara administrasi, Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan sudah bersurat ke kabupaten/ kota untuk menetapkan LP2B.
9. Tahun 2021 telah dilakukan kolaborasi antara Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten serta Badan Pusat Statistik untuk mengevaluasi titik segmen KSA yang bukan padi dan menentukan lokasi pemindahan titik segmen KSA tersebut ke sub segmen baru yang ditanami padi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh BPS untuk Kabupaten OKU Timur, Banyuasin dan OKI.
10. Tahun 2021 telah dilakukan penambahan fitur pada aplikasi Simluhtan dimana data e-RDKK dapat terkoneksi langsung dengan data Simluhtan. Dengan adanya fitur baru ini diharapkan seluruh data petani di Simluhtan dapat langsung otomatis terdata dalam e-RDKK. Penyuluh menggerakkan kelompok tani untuk melengkapi kelengkapan dokumen dokumen yang di persyaratkan sehingga dapat terdata dalam e-RDKK

10) Urusan Pertanahan

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum salah satunya diperoleh melalui pembebasan/ganti rugi tanah. Pengadaan tanah tersebut termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, terutama berkaitan dengan pengadaan tanah.

Pelaksanaan pembebasan lahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun

2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Adapun capaian luas tanah bersertifikat di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Capaian Persentase Luas tanah Bersertifikat
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2023

No	Tahun	Tanah Terdaftar		Tanah Belum Terdaftar	
		Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)
1	2012	20.472	148.097	3.750.108	3.041.872
2	2013	71.057	1.111.385	3.679.051	1.930.487
3	2014	53.150	66.640	3.657.005	1.863.846
4	2015	28.104	19.955	3.628.901	1.843.891
5	2016	20.373	623.052	3.608.528	1.220.838
6	2017	201.324	98.182	3.477.727	1.832.305
7	2018	117.789	50.153	3.359.938	1.782.152
8	2019	92.709	37.717	3.267.229	1.744.434
9	2020	53.965	29.010	3.213.264	1.715.425
10	2021	129.615	89.325	3.083.649	1.626.100
11	2022	79.206	50.006	3.004.443	1.576.094
12	2023	200.893	70.962	2.803.550	1.505.132
Jumlah		1.068.657	2.394.484	40.533.393	21.682.576

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian, 2023 (data termutakhir)
Ket. Lahan yang disertifikasi merupakan bukan kawasan hutan

Berdasarkan data diatas masih terdapat 40.533.393 bidang tanah yang belum terdaftar, dan untuk tanah yang terdaftar baru 2.394.484 bidang tananh, dapat dilihat selisih yang cukup jauh antara bidang tanah yang terdaftar dan tanah yang belum terdaftar. Tidak hanya capaian bidang tanah yang terdaftar saja, tetapi juga masih adanya beberapa konflik lahan yang belum diselesaikan di Sumatera Selatan, 66 kasus pada 15 Kabupaten/Kota dan 2 kasus pada Provinsi Sumatera Selatan. Total keseluruhan terdapat 68 kasus yang harus diselelsaikan.

11) Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Selatan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian

Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sangatlah strategis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Dan di lain pihak tuntutan dunia internasional akan kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan suatu perwujudan keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang berfungsi sebagai penyeimbang kegiatan ataupun aktifitas pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan. Adapun keberhasilan yang diperoleh Provinsi Sumatera Selatan mendapat penghargaan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Terbaik Nasional. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) adalah penghargaan dari Pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Dinilai berdasarkan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), yaitu Dokumen yang menyatakan kondisi, permasalahan, dan kebijakan dan/atau program yang ditetapkan dan diterapkan oleh Daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya. Penghargaan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo pada saat Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Istana Bogor.

Kondisi Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data yang ada pada Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sesuai Pergub Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Capaian Pengendalian Peningkatan Emisi GRK
Provinsi Sumatera Selatan (2019-2023)

No	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
		(Ton CO2-eq)				
1	Lahan dan Gambut	198.947	563.967	82.705,00	82.705,00	27.078.090,00
2	Pertanian dan Peternakan	190.911	2.035	-	-	-
3	Energi dan Transportasi	13.274	-	204,135	204,135	-
4	Pengelolaan Limbah	2.943	9.198	16.375,43	48,068	44.509,762
Total		406.075	575.200	99.284,57	82.957,20	27,122,600

Sumber : Data olahan dari Sistem Pelaporan online AKSARA

Tabel 2.64
Capaian Pengendalian Peningkatan Emisi GRK
Provinsi Sumatera Selatan (2019-2023)

Tahun	Capaian Penurunan	Target Penurunan
2019	4,39%	4,95 %
2020	5,56%	5,56 %
2021	11,61%	6,18 %
2022	17,60%	6,80 %
2023	49.57%	7,14 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa walaupun capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sudah baik apabila dibandingkan dengan target dan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

Nilai emisi GRK di Provinsi Sumatera Selatan juga sudah baik karena Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (POKJA) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sudah berperan aktif melaksanakan kegiatan konservasi karbon dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

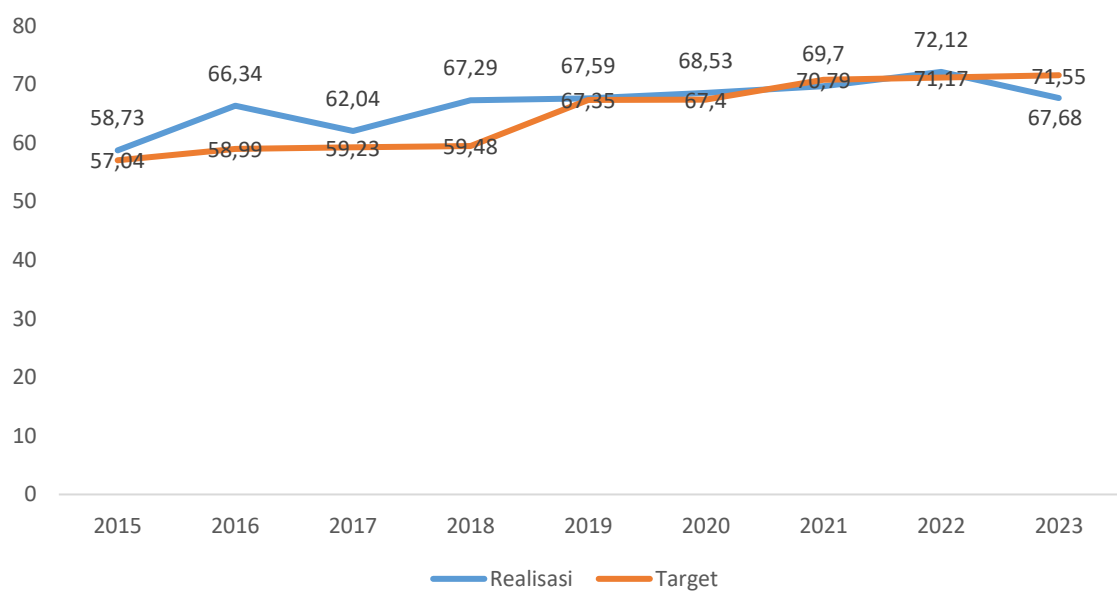
Pada tahun 2023, Nilai Emisi GRK di Provinsi Sumatera Selatan Jika dikaitkan dengan revisi target penurunan nasional dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Nationally Determined Contribution (NDC) Provinsi Sumatera Selatan yang berubah dari 27,3% di tahun 2024 menjadi 29% di tahun 2030 sudah melampaui target tersebut. Sektor Hutan dan Lahan, sub Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut Mendominasi Aksi mitigasi ini.

Dengan upaya Peningkatan Cadangan Karbon melalui Pembinaan pengembangan hutan tanaman industri dan produksi kayu kepada Perusahaan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 masih masuk di dalam kategori sedang yaitu berkisar antara 50 sampai dengan 70. Untuk tahun 2022, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masuk dalam kategori Bagus yaitu berkisar antara 70 sampai dengan 90. Akan tetapi terjadi lagi penurunan Nilai IKLH pada tahun 2023, yaitu sebesar 67.68 jika dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 72,12, Hal ini juga disebabkan oleh adanya perubahan perhitungan indikator IKLH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pertanian Republik Indonesia. Perubahan perhitungan indikator IKLH ini melibatkan perubahan perhitungan indikator penyusunnya yaitu Indeks kualitas udara (IKU), Indeks kualitas air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Gambar 2.84
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2015-2023



Sumber: LKPJ Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Indeks kualitas udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. Sebelum adanya perubahan perhitungan Indikator IKLH, IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu Sulfur

Dioksida (SO2) dan Nitrogen dioksida (NO2), akan tetapi setelah adanya perubahan perhitungan, ada penambahan parameter PM2.5 (Particulate Matter 2.5 mikron).

Sebelum adanya perubahan perhitungan indikator IKLH, Indeks kualitas air (IKA) dihitung menggunakan status mutu dengan metode Indeks Pencemaran, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003, setelah adanya perubahan perhitungan indikator IKLH, IKA dihitung dengan tidak membandingkan kualitas air (modifikasi dari metode NSF – WQI, National Sanitation Foundation – Water Quality Index). Nilai Maksimum IKA pada perubahan perhitungan indikator IKLH ini adalah 100.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), hutan merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim dan tempat tumbuhnya plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menghitung indeks tutupan hutan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Pada perubahan perhitungan indikator IKLH, IKTL dihitung dengan mengakomodir semua jenis tutupan lahan (23 klasifikasi tutupan lahan) yang sebelumnya hanya 9 jenis tutupan lahan.

Kebakaran Hutan dan Lahan

Titik kebakaran hutan dan lahan tahun 2024 mengalami pengurangan dari tahun 2023 yaitu sebesar 15.886 titik kebakaran (hotspot). Semula 20.547 titik kebakaran di tahun 2022, menurun menjadi 4.661 titik kebakaran (hotspot) pada tahun 2021. Begitupun untuk luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2024 terjadi penurunan luas lahan yang terbakar dibandingkan tahun 2023, yaitu berkurang dari 121.653 hektar pada tahun 2023 menjadi 13.957 hektar lahan terbakar pada tahun 2024.

Tabel 2.65
Luas Kebakaran Hutan dan Lahan serta jumlah hotspot di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024

NO	Kabupaten	2021		2022		2023		2024	
		hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)
1	Ogan Komering Ilir	400	1035	144	247	10636	70.857	364	1.556
2	Banyuasin	196	216	113	11	2.019	26.450	404	2.687
3	Musi Banyuasin	365	527	366	201	1457	4.255	980	4.011

4	Musi Rawas	286	760	366	433	766	1.350	539	1.209
5	Muara Enim	153	130	170	128	811	3.071	729	1.652
6	Musi Rawas Utara	163	234	317	631	1008	4.903	499	859
7	Ogan Ilir	110	998	35	1443	812	7.497	87	717
8	Penukal Abab Lematang Ilir	225	446	238	61	343	455	126	276
9	OKU Timur	114	65	49	96	722	1.372	127	80
10	Lahat	291	66	121	19	557	321	277	4
11	Ogan Komering Ulu/OKU	165	330	115	262	607	19	185	676
12	Empat Lawang	92	49	90	9	231	23	117	10
13	Palembang	4	na	2	24	58	1.079	8	1
14	OKU Selatan	196	44	151	5	425	3	166	211
15	Pagaralam	6	na	5	na	11	na	4	na
16	Lubuk Linggau	18	7	14	na	17	na	11	na
17	Prabumulih	10	4	94	1	67	na	38	10
	Total	2794	4.910	2390	3.568	20547	121.653	4661	13.957

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2024

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan wajib pelayanan dasar yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan bersama antara pusat dan daerah. Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan juga menjadi wewenang provinsi.

Sampai dengan 31 Desember 2024 jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 9.064.690 jiwa dan yang sudah wajib KTP sebanyak 6.432.793 jiwa dan yang sudah berhasil memperoleh cetak KTP-El sebanyak 6.235.945 atau 96,94% .

Di tingkat Kabupaten dan Kota, sudah Cetak KTP-El yang sudah mencapai di atas 99 persen adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 99,65%, Kabupaten Muara Enim sebesar 99,82%, Kabupaten Musi banyuasin sebesar 99,02%, Kabupaten Banyuasin sebesar 99,32%, Kabupaten Ogan Ilir sebesar 99,03% Kota Palembang sebesar 99,89% dan Kota Lubuklingga sebesar 99,49%. Sementara ada 2 kabupaten yang paling rendah pencapaian Ctak KTP-Elnya adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 83,14% dan Kabupaten Empat Lawang 63,67%.

Kendala yang terjadi dalam pencapaian perekaman dan cetak KTP-El antara lain karena kendala jaringan listrik, sarana dan

prasarana terbatas, alat rekam yang rusak, dan lokasi jauh dari jangkauan serta banyaknya blanko KTP-El yang rusak.

Tabel 2.66
Cakupan KTP-El Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan
Per 31 Desember 2024

No	Kabupaten/Kota		Jumlah Penduduk	JML Wajib KTP	Sudah Cetak	
					Jumlah	%
1	1601	OGAN KOMERING ULU	390.048	277.148	271.261	97,88
2	1602	OGAN KOMERING ILIR	801.059	566.581	564.616	99,65
3	1603	MUARA ENIM	653.731	459.974	459.126	99,82
4	1604	LAHAT	448.141	323.205	317.232	98,15
5	1605	MUSI RAWAS	427.723	306.603	301.806	98,44
6	1606	MUSI BANYUASIN	736.897	505.563	500.624	99,02
7	1607	BANYUASIN	888.324	619.710	615.503	99,32
8	1608	OGAN KOMERING ULU TIMUR	694.832	501.308	492.910	98,32
9	1609	OGAN KOMERING ULU SELATAN	406.938	298.767	248.383	83,14
10	1610	OGAN ILIR	446.020	315.263	312.220	99,03
11	1611	EMPAT LAWANG	336.783	262.604	167.191	63,67
12	1612	PALI	214.795	146.026	144.443	98,92
13	1613	MUSI RAWAS UTARA	203.688	141.221	137.519	97,38
14	1671	PALEMBANG	1.801.367	1.275.639	1.274.243	99,89
15	1672	PAGAR ALAM	153.271	110.850	109.664	98,93
16	1673	LUBUKLINGGAU	247.550	173.370	172.494	99,49
17	1674	PRABUMULIH	213.523	148.961	146.710	98,49
		PROVINSI SUMATERA SELATAN	9.064.690	6.432.793	6.235.945	96,94

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumsel, 2024

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Permendes & PDT Nomor 2 Tahun 2016, total desa dengan kategori desa tertinggal sebanyak 865 desa dan desa sangat tertinggal sebanyak 30 desa. Saat ini di Sumatera Selatan hanya memiliki desa dengan kategori desa tertinggal. Penetapan kategori serta jumlah desa berdasarkan statusnya dirilis oleh Kemendes PDT melalui “Indeks Desa Membangun” (IDM). Data IDM merupakan salah satu dasar bagi Kementerian Keuangan untuk menetapkan pengalokasian Dana Desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal dan Desa sangat Tertinggal dengan jumlah penduduk miskin (JPM) tertinggi sebesar 1% dan Alokasi Kinerja untuk Desa Berkembang, Maju dan Mandiri serta indikator lainnya sebesar 4% dari total Dana Desa.

Indeks Desa membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Masing-masing indeks tersebut terdiri dari beberapa dimensi yang terdiri dari banyak indikator.

IDM mengklasifikasikan desa menjadi 5 status desa, yaitu :

- Desa Mandiri
- Desa Maju
- Desa Berkembang
- Desa Tertinggal
- Desa Sangat Tertinggal

Tabel 2.67
Kategori Desa di Sumatera Selatan berdasarkan Indeks Desa
Membangun Tahun 2024

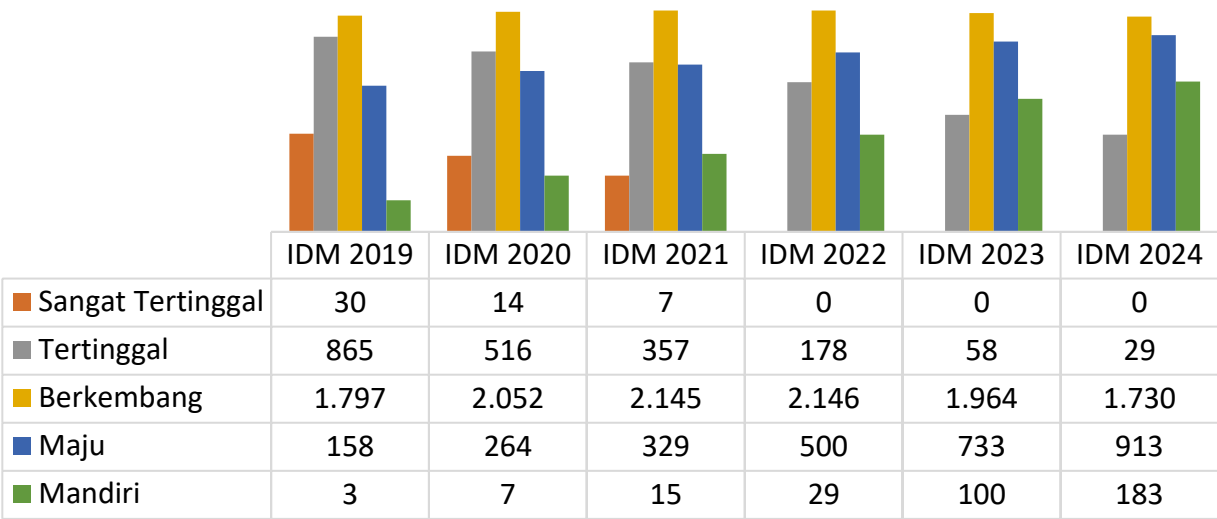
No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Kategori					
				Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	Tanpa Keterangan
1	Ogan Komering Ulu	13	143	0	4	82	44	13	
2	Ogan Komering Ilir	18	314	0	0	252	59	3	
3	Muara Enim	22	245	0	0	128	99	18	
4	Lahat	24	360	0	2	199	146	15	
5	Musi Rawas	14	186	0	0	99	82	5	
6	Musi Banyuasin	15	229	0	1	34	91	103	
7	Banyuasin	21	288	0	0	171	106	11	
8	OKU Selatan	19	252	0	24	189	39	0	
9	OKU Timur	20	305	0	0	156	145	4	
10	Ogan Ilir	16	227	0	0	181	44	2	
11	Empat Lawang	10	147	0	0	127	17	3	
12	Pali	5	65	0	0	37	22	6	
13	Muratara	7	82	0	0	69	13	0	
15	Kota Prabumulih	4	12	0	0	6	6	0	
Total		208	2.855	0	29	1.730	913	183	

Sumber : Indeks Desa Membangun- Kemendesa Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dari total jumlah desa di Sumatera Selatan sebanyak 2.855 desa. Dari tahun 2022-2024 sudah tidak terdapat kategori desa dengan status desa sangat tertinggal. Namun dari 2.855 desa sekitar 1.01% atau 29 desa masih merupakan desa tertinggal. Jumlah tersebut sudah sangat berkurang dibandingkan dengan Indeks Desa Membangun Tahun 2023, meskipun demikian

tetap diharapkan ada intervensi dari Pemerintah Daerah berupa Program/Kegiatan yang diharapkan dapat terus mengurangi jumlah desa tertinggal atau meningkatkan statusnya menjadi desa maju dan mandiri.

Gambar 2.85
Perkembangan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2019- 2024 di Provinsi Sumsel



Sumber : Indeks Desa Membangun-Kemendesa Tahun 2024

Tren capaian Indeks Desa Membangun dari tahun 2019-2024, menunjukkan capaian positif dimana tidak terdapat lagi desa sangat tertinggal pada tahun 2022-2024. Untuk status desa tertinggal terus mengalami penurunan yang semula 58 desa pada tahun 2023 menjadi 29 desa pada tahun 2024 atau berkurang sebanyak 29 desa. Pada tahun 2024 desa berkembang dan desa maju juga menunjukkan capaian positif, desa berkembang yang semula 1.964 desa berkurang menjadi 1.730 desa dimana statusnya meningkat menjadi desa maju. Untuk desa maju semula 733 desa bertambah 180 desa menjadi 913 desa.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2024 dari 2.855 desa di Sumatera Selatan, komposisi paling banyak adalah desa berkembang yaitu 60,60% atau 1.730 desa, yang kedua adalah desa maju yaitu 31,98% atau 913 desa.

Peraturan Menteri Desa PPDT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa PPDT Tahun 2020-2024 mengamanatkan Lokasi Prioritas Nasional dimana dari 271 kawasan perdesaan ditetapkan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian (Non KPPN).

Serta menetapkan juga 62 daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden No 63 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024.

Dari lokus 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Selatan terdapat 1 kawasan yaitu Kawasan Perdesaan Agropolitan Tanjung Lago yang berada di Kabupaten Banyuasin dengan status Kawasan Mandiri. Sedangkan untuk Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian (Non KPPN), Provinsi Sumatera Selatan terdapat di 3 Kawasan yaitu Kawasan Perdesaan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Musi Rawas, Kawasan Perdesaan Sentra Produksi Padi Organik Penunjang Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kawasan Perdesaan Sikap Dalam di Kabupaten Empat Lawang. Selain itu juga Provinsi Sumatera Selatan 1 lokus daerah tertinggal yaitu berada di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penetapan kawasan perdesaan sebagai salah satu prioritas nasional berdasarkan kebijakan pembangunan nasional yang berada dalam koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Salah satu strategi pembangunan kawasan perdesaan untuk menuju kawasan perdesaan yang mandiri dan berdaya saing, melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, sarana dan prasarana ekonomi, pengembangan usaha kecil dan menengah, revitalisasi Bumdes dan Bumdesa Bersama, pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan, dan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan mitra pembangunan lainnya. Sedangkan salah satu strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui pendekatan koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah; dan koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga (*hinterland*) di sekitar pusat pertumbuhan, pengembangan potensi unggulan daerah dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di daerah tertinggal.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan mempunyai 4 (empat) ruang lingkup yang salah satunya adalah perlombaan desa dan kelurahan. Pelaksanaan lomba desa dan kelurahan ini dilakukan

secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan regional.

Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan mempunyai 2 (dua) rangkaian kegiatan pokok yaitu penilaian dan temu karya nasional. Penilaian perlombaan desa dan kelurahan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang meliputi beberapa aspek yaitu pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan dengan membandingkan data atau kondisi desa atau kelurahan selama 2 (dua) tahun terakhir, data profil Desa dan kelurahan serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau dokumen perencanaan kelurahan.

Tabel 2.68
Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2023

PEMENANG	NAMA DESA / KELURAHAN							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Juara I	Desa Ngadirejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas	Desa Mekar Sari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas	Desa Marga Bhakti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU	Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI	<i>*Tidak dilaksa nakan perlom baan akan dikaren akan Pande mi COVID-19</i>	Desa Tanjung Makmur Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU	Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKUS	Desa Sri Mulya Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU
	Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Kota Palembang	Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih	Kelurahan Kalidoni Kecamatan Lubuk Kalidoni Kota Palembang	Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuk Linggau I Kota Lubuk Linggau		Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuk Linggau Utara Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Dempo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam	Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang
Juara II		Desa Purwodadi Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin	Desa Mataram Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas	Desa Kayu Ara Sakti Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim		Desa Enggal Rajo Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin	Desa Sidomulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKUT	Desa Kurangan Nyawa II Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKUT

		Kelurahan Keputran Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Puncak Sekuning Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam				
Juara III		Desa Sido Mulyo Kecamatan Kabupaten Muara Enim	Desa Dangku Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim	Desa Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU		Desa Sukamaju Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI	Desa Sumber Sari Kecamatan Nibung Kabupaten Muratara	Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim
		Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam	Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih	Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih				
Juara Harapan I		Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU	Desa Pematang Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI	Desa Purwakarya Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas		Desa Sidomulyo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim	Desa Sido Mulyo 20 Kecamatan Muarapadang Kabupaten Banyuasin	Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKUS
Juara Harapan II		Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin	Desa Bukit Jaya Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin	Desa Mekar Jadi Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin		Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin	Desa Mendala Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU	Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin
Juara Harapan III		Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Muratara	Desa Pulau Panggun Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKUS	Desa Pulau Harapan Kecamatan Semba wa Kabupaten Banyuasin			Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten OKU	Desa Giri Mulya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat

Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan di tingkat provinsi dilaksanakan untuk menyaring desa dan kelurahan terbaik di setiap Kabupaten/Kota, pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan setiap tahun. Penilaian lomba tersebut mempertimbangkan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, perkembangan profil desa dan kelurahan, tingkat kepatuhan kepala desa dan lurah terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, serta upaya desa dan kelurahan dalam melestarikan adat dan budaya setempat.

Sebagai bentuk motivasi, para juara 1 perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi akan diikutsertakan pada lomba desa dan kelurahan tingkat nasional/regional. Serta akan diundang pada acara temu karya nasional di ibukota negara dan diberikan penghargaan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Pusat atas prestasi yang telah diraih.

Pada tingkat regional (nasional) telah mendapatkan peringkat selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Di Tahun 2016 mendapatkan juara II tingkat regional I untuk kategori desa perwakilan dari Desa Ngadirejo Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas dan kelurahan diwakili oleh Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Kota Palembang. Dan di tahun 2017 Provinsi Sumatera Selatan kembali mendapatkan juara II tingkat regional I untuk Kategori Kelurahan yang diwakili oleh Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan untuk Kategori Desa hanya masuk nominasi 5 (lima) besar tingkat Regional I.

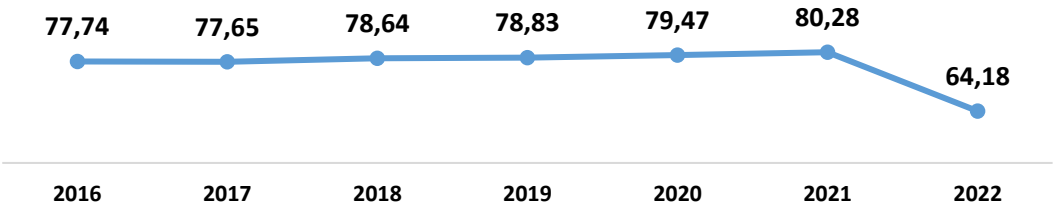
Sedangkan untuk tahun 2018 hanya diadakan pekan inovasi desa dan kelurahan yang tergabung bersama kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna ke XX Tahun 2018 di Bali, namun juara desa dan kelurahan tingkat Provinsi tetap mendapatkan penghargaan berupa plakat, piagam dan trophy dari Kementerian Dalam Negeri. Juara Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2018 adalah Desa Marga Bhakti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

Pada Tahun 2019 kembali mendapatkan juara pada tingkat regional I untuk kategori desa perwakilan dari Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan peringkat juara III dan kelurahan diwakili oleh Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau dengan peringkat juara Harapan I. Sedangkan pada tahun 2020 tidak dilaksanakan perlombaan desa dan kelurahan karena pandemi Covid-19.

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bersama BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Badan atau Dinas Keluarga Berencana Kabupaten/Kota.

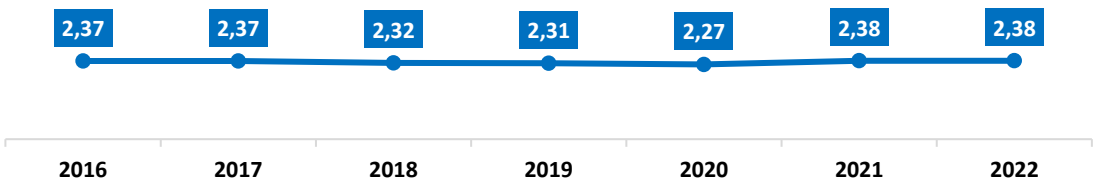
Gambar 2.86
Persentase Pemakaian Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS)



Sumber : BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Selama beberapa tahun terakhir persentase pemakaian kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) terus meningkat. Capaian pemakaian kontrasepsi bagi PUS tahun 2016 sebesar 77,74%, angka tersebut mengalami penurunan dari capaian tahun 2017 sebesar 77,65%. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga Tahun 2021 terus meningkat berturut-turut menjadi 78,64% tahun 2018, sebesar 78,83% tahun 2019, 79,47% di tahun 2020 dan 80,28% pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 persentase pemakaian kontrasepsi bagi PUS menurun menjadi 64,18%.

Gambar 2.87
Total Fertility Rate (TFR)



Sumber : BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Capaian Total angka kelahiran (*Total Fertility Rate*/TFR) selama lima tahun terakhir (Tahun 2016-2020) secara umum mengalami tren penurunan. Tahun 2016 sebesar 2,37 terus menurun sampai tahun 2020 menjadi 2,27. Namun pada tahun 2021 dan 2022 kembali meningkat dengan angka yang sama yaitu menjadi 2,38.

Tabel 2.69
Unmet Need KB di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016-2022

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah (org)	Unmet Need KB(%)
1	2016	1.650.420	194.402	11,78
2	2017	1.685.705	202.742	12,03
3	2018	1.726.165	192.363	11,14
4	2019	1.778.618	197.893	11,13
5	2020	1.788.136	225.305	12,6
6	2021	1.740.923	262.880	15,1
7	2022	1.262.814	188.160	14,9

Sumber : BKKBN Provinsi Sumatera Selatan,2023

Perkembangan unmet need KB dari tahun 2016-2022 secara umum mengalami tren naik turun, untuk tahun 2016 dari jumlah orang yang mengalamai Unmet Need sebesar 11,78% (194.402 orang) dari Jumlah PUS 1.650.420. Pada tahun 2017 dari Jumlah PUS sebesar 1.685.705 orang mengalami unmet need sebesar 12,03% (202.742 orang). Pada tahun 2018 terdapat penurunan dari tahun sebelumnya, Jumlah PUS 1.726.165 orang sehingga persentase unmet neednya 11.14% (192.363 orang), sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi 11,13% (197.893 orang) dari Jumlah PUS

yang terdata 1.778.618 orang namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 12,6% dari jumlah PUS sebanyak 1.788.136 orang dengan 225.305 orang. Pada tahun 2021 jumlah PUS yang mengalami unmet need meningkat kembali menjadi 262.880 orang atau 15,1% dari jumlah PUS sebanyak 1.740.923 orang dan pada tahun 2022 menurun menjadi 188.160 orang atau sebesar 14,9% dari 1.262.814 orang.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi unmet need KB antara lain melalui penggerakan kesertaan KB bersama mitra kerja dan institusi masyarakat, advokasi kabupaten/kota yang persentase unmet need KB nya tinggi, optimaliasasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dan fasilitas pelaksanaan kampung KB.

15) Urusan Perhubungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya mendorong terciptanya transportasi yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau melalui penyediaan fasilitas keamanan transportasi, tersedianya moda yang cukup dan ramah lingkungan serta penerapan aturan keselamatan transportasi bagi semua pengguna dan penyedia jasa transportasi dan didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik. Perilaku sebagian besar pemakai jalan yang masih kurang memperdulikan keselamatan diri sendiri dan pemakai jalan lainnya harus ditingkatkan, budaya dan disiplin pengguna jalan dari sebagian pengemudi kendaraan belum berjalan baik. Ditambah lagi dengan masih adanya sarana dan prasarana transportasi yang belum memenuhi standar keselamatan.

Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan maka masalah keselamatan transportasi jalan harus mendapat perhatian serius dan mendapat prioritas dalam pembangunan ataupun pengembangan sektor transportasi

Transportasi Darat

Prasarana pendukung yang saat ini telah dimiliki oleh Sumatera Selatan adalah **36 terminal** angkutan umum yang terdiri dari terminal tipe A sebanyak 8 terminal atau sebesar **22,2 persen**, tipe B sebanyak 7 terminal atau sebesar **19,4 persen** dan tipe C

sebanyak **21 terminal** atau sebesar **58,3 persen**. Semakin banyak angkutan antar kabupaten/kota dalam provinsi dan angkutan antar provinsi yang berplat hitam (travel) dan beroperasinya jalan TOL berdampak terhadap semakin berkurangnya angkutan umum (berplat kuning) pada jurusan yang sama dan pada akhirnya akan berdampak pada semakin berkurangnya angkutan umum yang masuk ke terminal.

Tabel 2.70
Data Terminal di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Nama Terminal	Tipe Terminal		
1	Palembang	1. Karya Jaya 2. Alang-Alang Lebar 3. Plaju 4. Jakabaring 5. Tangga Buntung 6. Lemabang 7. Sako	A A	B	C C C C
2	Prabumulih	1. Prabumulih 2. Kota Prabumulih			C C
3	Pagaralam	1. Nendagung 2. Pagar Gading			C C
4	Lubuk Linggau	1. Petanang 2. Muara 3. Kalimantan 4. Watas 5. Satelit		B	C C C C
5	Banyuasin	1. Betung	A		
6	Musi Banyuasin	1. Randik		B	
7	Ogan Ilir	1. Km 32 Indralaya		B	
8	Ogan Komering Ilir	1. Kayu Agung 2. Tanjung Raja 3. Tulung Selapan	A		C C
9	Ogan Komering Ulu	1. Baturaja	A		
10	OKU Timur	1. Kota Baru 2. Lubuk Harjo		B B	
11	OKU Selatan	1. Muara Dua		B	
12	Muara Enim	1. Muara Enim 2. Simpang Kodim 3. Bantingan 4. Talang Ubi	A		C C C
13	Musi Rawas	1. Simpang Periuk 2. Lakitan 3. Trawas	A		C C
14	Lahat	1. Batay 2. Muara Siban 3. Lembayung	A		C C
15	Empat Lawang	-	-	-	-
16	PALI	-	-	-	-
17	Muratara	-	-	-	-
	Jumlah		8	7	21

Sumber: Statistik Dishub Sumsel, 2023 (data termutakhir)

Pengangkutan barang dalam volume besar dan dengan jarak yang cukup jauh diangkut dengan menggunakan kereta api atau kapal. Di Sumatera Selatan jalur kereta api yang dimiliki adalah untuk rute Palembang-Lampung dan Palembang-Lubuk Linggau. Dari 675,95 km jalan kereta api yang ada di Sumatera Bagian Selatan sebagian besar (89%) merupakan *single track* dan sisanya sepanjang 75 km merupakan jalur *double track*. Dari sisi kemampuan beban gandar sebagian besar jalan kereta api di Sumatera Selatan mempunyai kemampuan maksimal 13 ton dan baru sebagian kecil (32%) yang mempunyai beban gandar mencapai 18 ton.

Tabel 2.71
Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel

No	Lintasan	Panjang (Km)	Beban Gandar (Ton)
1	Kertapati-Prabumulih	77,8	13
2	Prabumulih-Baturaja	96	13
3	Baturaja-Martapura	32	18
4	Martapura-Kota Bumi	98	18
5	Kota Bumi-Tanjung Karang	86	18
6	Prabumulih-Tanjung Karang	74	13
7	Muara Enim-Lahat	38,3	13
8	Lahat-Tebing Tinggi	66	13
9	Tebing Tinggi-Lubuk Linggau	49	13
10	Lintasan Lainnya	58,85	13
Total		675,95	

Sumber: PT. KA Divre III Wilayah Sumbagsel, 2023

Tabel 2.72
Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2023

No	URAIAN	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	BARANG (TON)	10,276,778	12,761,827	14,934,008	18,678,576	22,574,537	26,029,055
2	PENUMPANG (ORANG)	1,097,656	1.132.815	302,896	184,709	661.626	765,764

Sumber: PT. KA Divre III Wilayah Sumbagsel, 2023

Light Rail Transit (LRT) atau kereta api ringan merupakan salah satu angkutan massal yang ada di Suamtera Selatan dan menjadi LRT Pertama yang ada di Indonesia. Sejak diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 15 Juli 2018 dan mulai operasional pada tanggal 23 Juli 2018, di mana pengoperasional LRT dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia.

Manfaat dari LRT bagi Suamtera Selatan adalah peningkatan mutu pelayanan transportasi perkotaan Palembang melalui percepatan waktu tempuh, mengurai kemacetan, serta peningkatan

keselamatan transportasi. Gambaran peningkatan kelas dan wajah Kota Palembang, moda transportasi ramah lingkungan, dan menjadi potensi ekonomi untuk menarik kepercayaan investor untuk berinvestasi.

Dalam hal ketersediaan stasiun, LRT Sumatera Selatan dengan jalurnya sepanjang 23,4 km terdapat 13 stasiun, yakni stasiun Bandara SMB II, Asrama Haji, Punti Kayu, RSUD, Garuda Dempo, Demang Lebar Daun, Bumi Sriwijaya, Dishub, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, dan DJKA. Untuk Tarifnya, dapat dikatakan relatif murah dan cukup terjangkau, di mana untuk jarak jauh (dari Bandara SMB II ke Jakabaring) dikenakan sebesar Rp. 10.000,-, sedangkan untuk jarak dekat dikenakan sebesar Rp. 5.000,-. Berikut merupakan rekapitulasi data jumlah penumpang *Light Rail Transit* (LRT) Sumatera Selatan.

Tabel 2.73
Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan

NO.	BULAN	PENUMPANG		
		2021	2022	2023
1	Januari	102.919	193.990	316.521
2	Februari	91.648	156.520	261.581
3	Maret	117.297	195.842	279.622
4	April	112.398	156.521	361.765
5	Mei	147.850	355.840	336.260
6	Juni	159.642	260.710	355.364
7	Juli	102.552	245.984	370.468
8	Agustus	89.951	234.443	345.598
9	September	125.082	257.444	351.428
10	Oktober	178.517	310.270	344.388
11	November	173.679	310.171	342.228
12	Desember	197.598	410.000	417.496
	TOTAL	1.599.133	3.087.735	4.082.719

Sumber: PT. KA Divre III Wilayah Sumbagsel, 2023

Adapun dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang dalam menjaga keberlangsungan Operasional LRT bagi peningkatan pelayanan angkutan umum berbasis massa ke masyarakat yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau dilakukan dengan strategi pengembangan LRT Sumatera Selatan dengan mengupayakan agar masyarakat kota Palembang

mau beralih ke moda transportasi massal berbasis rel serta mengurangi beban subsidi APBN antara lain sebagai berikut:

1. Pengintegrasian layanan LRT dengan Damri dan *Bus Rapid Transit* (Trans Musi), dan angkutan Sungai (intermoda) menjadi satu jaringan layanan transportasi terpadu dimana LRT sebagai jaringan *backbonenya* yang akan di *supply* jaringan Transmusi dan Damri dari dan ke stasiun LRT melalui pengembangan integrasi moda *feeder* LRT;
2. Mengembangkan *Transit Oriented Development* (TOD) di beberapa stasiun LRT untuk menaikkan kinerja *performance* pendapatan operator dan meningkatkan *load factor* penumpang;
3. Mengembangkan park and ride di beberapa stasiun LRT serta mengembangkan *skybridge* sebagai transit *joint development*;
4. Menciptakan *public policy* dengan *stated preference* agar masyarakat mau beralih ke angkutan umum massal antara lain kebijakan pengaturan kendaraan genap ganjil, kawasan *three in one*;
5. Meningkatkan sosialisasi penyadaran kepada masyarakat melalui media massa, penyebaran dan pecetakan spanduk, pamflet, leaflet untuk menggunakan fasilitas LRT;
6. Membuat Surat edaran atau peraturan gubernur untuk ASN satu hari dalam satu minggu untuk menggunakan angkutan umum;
7. Sejak tanggal 9 Januari 2019 telah terbentuk Balai Pengelola Kerata Api Ringan Sumatera Selatan. dibawah Kemenhub untuk pengelolaan sarana/aset LRT sehingga memberikan hasil seperti *Advertising*, *Transit Joint Development* dan rencana TOD untuk mengurangi subsidi operasional kedepan, di mana saat ini operasional dilakukan oleh PT. KAI;

Terkait dengan penganggaran, maka anggaran subsidi masih melalui APBN karena aset masih tercatat di Pemerintah Pusat, sehingga strategi penganggaran operasional LRT, yakni perlu adanya subsidi karena masih perintis (UU 23 tahun 2007) dan Hak pengusahaan prasarana LRT melalui pengembangan TOD sebagai pendapatan *non fare box* diluar tiket penumpang seperti pendapatan *advertising*.

Transportasi Air

Sumatera Selatan mempunyai banyak aliran sungai yang juga dapat dimanfaatkan untuk moda transportasi. Daerah yang memiliki

akses ke alur sungai terdapat 8 kabupaten, 62 kecamatan, dan 356 desa/kelurahan atau 11,59 persen dari 3.079 desa di Sumatera Selatan.

Gambar 2.88
Angkutan Sungai di Sungai Musi



Tabel 2.74
Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai

No.	Sungai	Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik			
		Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1	Banyuasin	Banyuasin	Tanjung Lago	1	4
2	Batanghari	Musi Banyuasin	Batanghari Leko	1	10
3	Calik	Banyuasin	Pulau Rimau	1	10
4	Kelingi	Musi Rawas	Bulan Tengah Suku Ulu, Muara Kelingi, Muara Lakitan	3	5
5	Komerling	OKI	Kota Kayu Agung, Sirah Pulau Padang, Jejawi, Lempuing Jaya	4	29
		OKU Timur	Buay Pemuka Bangsa Raja, Buay Pemuka Peliung, Cempaka, Madang, Suku II, Semendawai Barat	5	11
6	Lalan	Musi Banyuasin	Bayung Lencir, Lalan	2	16
7	Lematang	Muara Enim	Rambang Dangku, Sungai Rotan, Muara Belida	3	23
		PALI	Penukal, Penukal Utara	2	6
8	Dawas	Banyuasin	Tungkal Ilir	1	2
		Musi Banyuasin	Sungai Lilin, Sanga Desa	2	3
9	Lumpur	OKI	Cengal, Pampangan, Tulung Selapan	3	23
10	Pedada	OKI	Tulung Selapan	1	1
11	Jeruju	OKI	Cengal	1	1
12	Menang	OKI	Sungai Menang	1	4

No.	Sungai	Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik			
		Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
13	Mesuji	OKI	Pedamaran Timur, Sungai Menang, Cengal	3	9
14	Musi	Banyuasin	Banyuasin I, Rantau Bayur	2	24
		PALI Musi Banyuasin Palembang	Abad	1	1
			Sanga Desa	1	3
			Gandus, Ilir Timur II, Kertapati, Seberang Ulu I	4	10
15	Ogan	Ogan Ilir	Lubuk keliat, Muara Kuang, Rantau Alai, Indralaya Utara, Kandis, Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Tanjung Batu, Tanjung Raja	1 2	65
16	Rawas	Musi Rawas	Karang Dapo, Rawas Ilir, Rawas Ulu, Rupit, Ulu Rawas	5	34
17	Saleh	Banyuasin	Air Saleh, Rambutan, Muara Sugihan	3	30
18	Sugihan	Banyuasin	Muara Sugihan	1	18
19	Telang	Banyuasin	Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Telang	3	27
	Total			62	355

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2023 (data mutakhir)

Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar yaitu 87 persen, dermaga-dermaga sungai tersebut dalam kondisi baik.

Tabel 2.75
Daftar Dermaga Sungai dan Danau di Sumatera Selatan

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan
1	Gandus	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006-2008	Pemprov
2	Tangga Buntung (35 Ilir)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1992/1993	Pemkot
3	Sekanak	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006	Pemkot
4	Benteng Kuto Besak (BKB)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1995	Pemkot
5	Bawah Ampera (7 ulu)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2014	Pemkot
6	16 Ilir	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot
7	16 Ilir (Bawah Ampera)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2004	Pemkot
8	Kertapati	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot
9	Kertapati (Samping Stasiun KA)	S. Ogan, Palembang	Beton	Baik	2011	Pemkot
10	10 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1998	Pemkot
11	Rumah Buruk	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
12	Pasar Kuto	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010	Pemkot

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan
13	1 Ilir	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
14	Tangga Takat	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
15	13 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
16	Padatuan	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
17	Padatuan 7 Ulu (a)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2009	Pemkot
18	Padatuan 7 Ulu (b)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2011	Pemkot
19	5 Ulu	S. Musi, Palembang	Beton	Baik	2012	Pemkot
20	4 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010	Pemkot
21	Sei Buaya	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot
22	Pegayut	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot
23	Ki Merogan	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot
24	Tangga Batu	S. Musi, Palembang	Ponton	Rusak	2000	Pemkot
25	Pasar Induk Jakabaring	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2003/2005	Pemkot
26	Sei Lais	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot
27	Bek Ang DAM (TNI)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010	Pemkot
28	Kampung Kapiten	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot
29	Lawang Kidul	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2008	Pemkot
30	3/4 Ulu	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2010	Pemkot
31	Masjid Jamik	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2010	Pemkot
32	Solok Betutu	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2009	Pemkot
33	Pemulutan(Pos Peng)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1990	Pemkot
34	Tanjung Raja	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1994	Pemkab
35	Muara Kuang	S. Ogan, Ogan Ilir	Kayu	Sedang	1990	Pemkab
36	Kuala Sugihan	S. Sugihan, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab
37	Lebong Hitam	S. Lebong Hitam, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab
38	Pelabuhan Laut Sungai Lumpur	S. Lumpur, OKI	Kayu	Baik	1990	Pemkab
39	Sungai Batang	S. Batang, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab
40	Tulung Selapan	S. Tulung Selapan, OKI	Beton	Baik	2000	Pemkab
41	Sugihan Kanan	Jalur 27, OKI	Kayu	Baik	2003	Pemkab
42	Kuala XII	S. Kuala, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab
43	Cengal	Cengal, OKI	Beton	Baik	2007	Pemkab
44	Pulau Padang	S. Lumpur, OKI	Beton	Baik	2006	Pemkab
45	Pampangan	S. Lumpur, OKI	Beton	Baik	2006	Pemkab
46	Sukodarmo (Jejawi)	S. Komering, OKI	Beton	Baik	2007	Pemkab
47	Muara Kumbang	S. Musi, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab
48	Upang	S. Sugihan, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab
49	Sungsang	S. Lilin, Banyuasin	Ponton	Baik	2004/2006	Pemkab
50	Makarti Jaya	S. Sebalik Jalur 9 (P9), Banyuasin	Ponton	Rusak	1983	Pemkab
51	Sugihan (Ma. Padang)	Jalur 20, Banyuasin	Ponton	Baik	1998	Pemkab
52	Sugihan Kiri (cendana)	Jalur 14, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab
53	Sugihan Kiri (Timbul Jaya)	Jalur 13, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab
54	Gasing	Gasing	Beton, Ponton	Baik	2003/2004	Pemkab
55	Muara Telang	Jalur 8, Banyuasin	Ponton	Baik	2003	Pemkab
56	Telang Jaya	Jalur 8, Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	1992	Pemkab
57	Simpang PU	S. Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	1997	Pemkab
58	Muara Telang	Jalur 4, 5 Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	2005	Pemkab
59	Sembilang	S. Sembilang, Banyuasin	Ponton	Baik	2003/2004	Pemkab

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan
60	Pengumbuk	S. Musi Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	2001	Pemkab
61	Teluk Betung	P. Rimau, Banyuasin	Ponton	Baik	1998	Pemkab
62	Muara Padang	S. Sebalik, Banyuasin	Beton	Baik	1998	Pemkab
63	Penuguan	S. Lilin, Banyuasin	Beton	Baik	1990	Pemkab
64	Karang Agung	S. Lalan, Muba	Beton	Baik	1985	Pemkab
65	Sungai Lilin	S. Lilin, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemprov
66	Sekayu	S. Musi, Muba	Beton	Baik	1993	Pemkab
67	Muara Lematang	S. Lematang, Muba	Ponton	Baik	1990	Pemkab
68	Bayung Lincir	S. Lalan, Muba	Ponton	Baik	2009	Pemkab
69	Babat	S. Musi, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemkab
70	Telang	S. Lalan, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemkab
71	Pangkalan Bulian	S. Batang Hari Leko, Muba	Ponton	Baik	2000	Pemkab
72	Muara Rawas	S. Kelingi, Muba	Ponton	Baik	2001	Pemkab
73	Teluk Kijing	S. Batang Hari Leko,	Ponton	Baik	1995	Pemkab
74	Muara Teladan	S. Batang Hari Leko,	Ponton	Baik	1995	Pemkab
75	Simpang	S. Komering, OKU	Ponton	Baik	2000	Pemkab
76	Banding Agung	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja	Baik	1993	Pemkab
77	Kota Batu	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja,Lantai Kayu	Rusak	1994	Pemkab
78	Talang Pangeran (Pemulutan)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	2006	Pemkab
79	Muara Rupit	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2005	Pemprov
80	Muara Kelinci	S. Kelinci, Musi Rawas	Beton	Baik	2008	Pemkab
81	Muara Lakitan	S. Kelinci, Musi Rawas	Beton	Baik	2011	Pemkab
82	Beringin Teluk	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2005	Pemkab
83	Pauh	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2000	Pemkab
84	Padang Tepung	S. Kelinci, Lahat	Beton	Baik	2000	Pemkab
85	Kota Agung	S. Lematang, Lahat	Beton	Baik	1998	Pemkab
86	Muara Enim	S.Lematang, Muara Enim	Beton	Baik	2000	Pemkab
87	Beringin	S. Ogan, Muara Enim	Beton	Baik	2000	Pemkab
88	Gunung Megang	S. Lematang, Muara Enim	Beton	Baik	2008	Pemkab
89	Muara Lematang	S. Musi, Muara Enim	Beton	Baik	2011	Pemkab

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel, 2023 (data mutakhir)

Selain Dermaga Sungai, terdapat juga tambatan perahu sebanyak 77 Unit yang dibangun melalui alokasi belanja bantuan Keuangan bersifat khusus untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Pada tahun 2020 jumlah tambatan perahu yang dibangun sebanyak 22 unit, Tahun 2021 sebanyak 25 Unit dan Tahun 2022 sebanyak 25 unit dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.76
Daftar Tambatan Perahu Bantuan Bersifat Khusus Untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Kontruksi
I	2020			
1	2020	Air Salek	Saleh Mukti	Beton
2	2020	Air Salek	Saleh Mulya	Beton
3	2020	Air Salek	Bintaran	Beton

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Kontruksi
4	2020	Air Salek	Air Solok Batu	Beton
5	2020	Muara Sugihan	Kuala Sugihan	Beton
6	2020	Muara Sugihan	Gilirang	Beton
7	2020	Muara Sugihan	Rejosari	Beton
8	2020	Muara Padang	Air Gading	Beton
9	2020	Muara Padang	Purwodadi	Beton
10	2020	Muara Padang	Karang Anyar	Beton
11	2020	Muara Telang	Telang Jaya	Beton
12	2020	Banyuasin II	Sungsang III	Beton
13	2020	Banyuasin II	Sungsang IV	Beton
14	2020	Selat Penuguan	Mekarsari	Beton
15	2020	Karang Agung Ilir	Tabala Jaya	Beton
16	2020	Karang Agung Ilir	Sumber Rejeki	Beton
17	2020	Sumber Muara Telang	Muara Telang	Beton
18	2020	Air Kumbang	Teluk Tenggirik	Beton
19	2020	Makarti Jaya	Makarti Jaya	Beton
20	2020	Makarti Jaya	Muara Baru	Beton
21	2020	Makarti Jaya	Pendowo Harjo	Beton
22	2020	Pulau Rimau	Dana Mulya	Beton
II	2021			
1	2021	Air Salek	Enggal Rejo	Beton
2	2021	Air Salek	Upang	Beton
3	2021	Air Salek	Salek Agung	Beton
4	2021	Banyuasin I	Pulau Borang	Beton
5	2021	Muara Padang	Tirta Jaya	Beton
6	2021	Muara Padang	Tirto Raharjo	Beton
7	2021	Muara Padang	Air Gading	Beton
8	2021	Muara Padang	Sumber Makmur	Beton
9	2021	Muara Padang	Daya Utama	Beton
10	2021	Muara Padang	Daya Makmur	Beton
11	2021	Muara Sugihan	Daya Bangun Harjo	Beton
12	2021	Muara Sugihan	Mekar Jaya	Beton
13	2021	Muara Sugihan	Cendana	Beton
14	2021	Muara Sugihan	Daya Murni	Beton
15	2021	Tanjung Lago	Bangun Sari	Beton
16	2021	Selat Penuguan	Karang Manunggal	Beton
17	2021	Selat Penuguan	Purwodadi	Beton
18	2021	Selat Penuguan	Ringin Harjo	Beton
19	2021	Muara Telang	Sumber Mulya	Beton
20	2021	Muara Telang	Upang Cemara	Beton
21	2021	Makarti Jaya	Upang Mulya	Beton
22	2021	Pulau Rimau	Rukun Makmur	Beton
23	2021	Banyuasin II	Sungsang	Beton
24	2021	Tanjung Lago	Gasing	Beton
25	2021	Sumber Marga Telang	Karang Baru	Beton
III	2022			
1	2022	Makarti Jaya	Tanjung Mas	Beton
2	2022	Makarti Jaya	Tirta Kencana	Beton
3	2022	Air Saleh	Saleh Agung	Beton
4	2022	Air Saleh	Srikaton	Beton
5	2022	Air Saleh	Air Solok Batu	Beton
6	2022	Air Saleh	Enggal Rejo	Beton
7	2022	Muara Padang	Tanjung Baru	Beton
8	2022	Karang Agung Ilir	Karang Sari Primer 10	Beton
9	2022	Karang Agung Ilir	Mekar Sari	Beton
10	2022	Muara Telang	Telaga Makmur	Beton
11	2022	Muara Telang	Upang Karya	Beton
12	2022	Sumber Marga Telang	Talang Lubuk	Beton
13	2022	Sumber Marga Telang	Terusan Dalam	Beton
14	2022	Sumber Marga Telang	Muara Telang Marga	Beton

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Konstruksi
15	2022	Sumber Marga Telang	Karang Anyar	Beton
16	2022	Rantau Bayur	Rantau Harapan	Beton
17	2022	Banyuasin III	Ujung Tanjung	Beton
18	2022	Muara Sugihan	Margo Mulyo 16	Beton
19	2022	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	Beton
20	2022	Banyuasin II	Teluk Payo	Beton
21	2022	Banyuasin II	Rimau Sungsang	Beton
22	2022	Selat Penuguan	Mekar Sari	Beton
23	2022	Tanjung Lago	Manggar Raya	Beton
24	2022	Talang Kelapa	Kenten Laut	Beton
25	2022	Air Kumbang	Sebubus	Beton

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Angkutan Sungai (Kapal) mengalami penurunan jumlah yang beroperasi antara lain dipengaruhi oleh pembukaan jalan baru dan pendangkalan pada alur pelayaran sungai sebagai dampak dari sedimentasi. Selain itu Pelabuhan Boom Baru Palembang yang saat ini sebagai outlet utama untuk pengangkutan barang melalui kapal juga memiliki beberapa kendala antara lain : sulit untuk dikembangkan karena berada ditengah pemukiman, kedalaman alur pelayaran relatif dangkal, sehingga pelayaran sangat tergantung dengan pasang surut sekitar 6 jam/hari dan panjang alur pelayaran sungai Musi (Kelas II dan Kelas III) sepanjang 221 Nautical Mile, Alur Sungai Banyuasin (Kelas II) sepanjang 11 Nautical Mile dan Alur Sungai Lematang 115 Nautical Mile.

Sumatera Selatan mempunyai banyak aliran sungai yang dimanfaatkan untuk moda transportasi. Daerah yang memiliki akses ke Alur Sungai terdapat 8 kabupaten, 62 kecamatan dan 356 desa/kelurahan atau 11,59 % dari 3.079 desa di Sumatera Selatan. Angkutan sungai yang beroperasi di Perairan Sumatera Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kenaikan sebesar 17% dengan jenis kapal antara lain : speedboat, tugboat, kapal gandeng/ tunda, tongkang, jukung dan ponton. Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar (87%) dermaga-dermaga Sungai tersebut dalam kondisi baik. Dermaga Penyeberangan TAA menuju Bangka sudah beroperasi sejak tahun 2017 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah penumpang dimana hal itu disebabkan oleh wabah covid 19 dimana jumlah penumpang sebanyak 99.189 orang penumpang dan kendaraan yang diangkut 127,785 unit.

Tabel 2.77
Produktivitas Angkutan Penyeberangan Tanjung Api - api

NO	URAIAN	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	JUMLAH TRIP	3,721	4,543	5,171	3.074	3.160
2	JUMLAH PENUMPANG	99,189	287,969	67,525	65.096	66.263
3	JUMLAH KENDARAAN	127,785	108,006	136,071	105.503	99.773

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Tabel 2.78
Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Gol I (Sepeda)	47	11	13	13	25
2	Gol II (Sepeda Motor)	27,066	17,881	14,849	17,934	19.695
3	Gol III (Bemo)	610	113	54	154	76
4	Gol IV (M.bus, Jeep dan sejenisnya)	46,213	36,605	45,781	43,181	37.891
5	Gol V (truck, bus dan sejenisnya)	46,864	53,311	64,060	36.788	34.779
6	Gol VI (truck Fuso)	5,889	5,725	9,401	6.557	6.531
7	Gol VII (truck tronton)	1,024	706	1,437	876	776

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023 (data mutakhir)

Sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional Darmaga Laut Regional Tanjung Api-Api ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpul. Pada tahun 2019 dermaga tersebut sudah diresmikan dan mulai beroperasi sebagai pelabuhan Pengumpul, Kementerian Perhubungan menunjuk PT. Pelindo dan KSOP untuk mengelolanya.

Gambar 2.89
Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Api-api



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

Transportasi Udara

Angkutan udara di Sumatera Selatan terus dikembangkan dan direvitalisasi, Jumlah Bandara yang Ada di Sumatera Selatan yang beroperasi ada 3 yaitu SMB II Palembang, Silampari Lubuk Linggau dan Atung Bungsu Pagaralam Selanjutnya akan dibangun oleh Pemerintah Pusat. Satu-satunya bandara terbesar di Sumatera Selatan adalah Bandara SMB II. Sepanjang tahun 2019 lalu Bandara SMB II Palembang telah berhasil memfasilitasi 3,966,122 orang penumpang datang atau berangkat menggunakan pesawat udara, baik rute domestik maupun internasional. Tren menurun keberangkatan penumpang domestik dan internasional menggunakan fasilitas Bandara SMB II tahun 2020 s.d. 2021 rata-rata dibawah 100% /tahun yang disebabkan wabah covid 19, dan perlahan meningkat di tahun 2022 dan 2023.

Tabel 2.79
Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui
Bandara SMB II Palembang

Datang/ berangkat	Trayek angkutan	Kondisi yang ada	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
BERANG KAT	Domestik	Pesawat	17,788	8,895	6,664	8,607	9,345
		Penump ang	1,832,673	697,787	530,551	977,362	1,322,376
	Internasio nal	Pesawat	859	0	0	0	73
		Penump ang	129,764	0	0	0	11,304

Datang/ berangkat	Trayek angkutan	Kondisi yang ada	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
DATANG	Domestik	Pesawat	17,758	8,775	6,634	8,540	9,349
		Penumpang	1,876,797	735,522	521,074	965,579	1,313,711
	Internasional	Pesawat	860	0	0	0	92
		Penumpang	126,888	0	0	0	15,169
TOTAL		Pesawat	37,265	17,670	13,298	17,147	18,694
		Penumpang	3,966,122	1,433,309	1,051,625	1,942,941	2,636,087

Sumber: PT. Angkasa Pura II Palembang, 2023

Tabel 2.80
Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui
Bandara Silampari Lubuk Linggau

TAHUN	JENIS PESAWAT	PESAWAT		PENUMPANG (Org)		BAGASI (Kg)		CARGO (Kg)	
		DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT
2019	ATR72	337	337	14,755	17,140	15,602	23,649	6,781	998
	B737-500	355	355	33,465	29,756	251,284	211,368	38,527	39,166
	A320	365	365	40,152	40,601	288,066	266,246	23,074	17,340
2020	ATR72	129	129	5,067	6,240	7,638	9,953	4,561	2,459
	B737-500	69	69	4,896	3,972	37,435	28,505	14,094	5,505
	A320	124	124	14,372	133,349	108,490	116,898	14,794	11,296
2021	ATR72	24	24	724	792	2,568	2,289	53	5
	B737-500	1	1	64	147	481	1,378	13	29
	A320	79	78	7,606	8,571	58,869	72,593	2,984	4,860
2022	A320	168	168	21,058	21,388	178,351	178,259	1,021	-
2023	A320	317	317	42,673	41,847	347,433	346,401	5,891	26

Sumber: Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Silampari, 2023

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka upaya mendorong percepatan Penyelenggaraan Sumsel *Smart Province*, maka di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sudah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2017, dan Provinsi Sumatera Selatan telah memperoleh prestasi dalam bidang pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang didukung lapisan Masyarakat dari *Smart Nation*, Sebagai : “*Smart Society Smart Province*”.

Gambar 2.80
Penghargaan Smart Society Smart Province



Pada tahun 2020 Pengendalian Infrastruktur TIK dioptimalkan melalui Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, *monitoring* dan pengendalian *bandwith* dan jaringan yang dilakukan pada masing-masing OPD yang telah tekoneksi dengan VPN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan total *bandwith* internet sebesar 600 Mbps.

Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian di Tahun 2022 menerima penghargaan tingkat Nasional *Top Digital Award* tahun 2022 yang diraih Gubernur Sumsel H. Herman Deru adalah untuk kategori *Top Leader on Digital Implementation 2022*. Dan juga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) juga meraih penghargaan kategori *Top Digital Implementation 2022 on Province Government* dari *It Works*. Penghargaan tersebut diserahkan Ketua Penyelenggara *Top Digital Awards 2022* sekaligus CEO PT Madani Solusi Internasional (*Madani Group*) dan Pemimpin Redaksi Majalah *It Works*.

Gambar 2.81
Penghargaan tingkat Nasional *Top Digital Award* dan kategori *Top Digital Implementation 2022 on Province Government Tahun 2022*



Kegiatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik, dengan dibentuknya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 676/Diskominfo/2021 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Selatan

Dalam pelaksanaan penilaian SPBE yang didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan Evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung, dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan telah mendapat nilai indeks SPBE : **2,62** dalam Predikat **Baik** pada tahun 2023 dan diharapkan menjadi lebih baik lagi di tahun berikutnya.

Gambar 2.82
Nilai Indeks SPBE Sumatera Selatan

NO	URAIAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	INDEKS SPBE	2.83 (BAIK)	2.83 (BAIK)	2.62 (BAIK)	2.62 (BAIK)	2.62 (BAIK)

Sumber : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi SPBE Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) maka peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu yang ada di OPD sangat diperlukan terutama dalam koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bidang Pengelolaa Informasi Publik melalui Komisi Informasi mendapatkan penghargaan Pemerintah Daerah dengan predikat Informatif. Penganugerahan diberikan Komisi Informasi Pusat dengan melaksanakan *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) kepada 348 Badan Publik di Indonesia.

Gambar 2.83
Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022



Tabel 2.81
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang Sudah Ada PPID

No	Nama Instansi / PD	NOMOR SK PPID	Tanggal
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	267/KPTS/DPP-PA/2020	3 Agustus 2020
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	194/KPTS/DISPORA/2020	3 Februari 2020
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	106/KPTS/BAPPEDA/2019	26 Februari 2019
4	Dinas Kesehatan	840/Kes/III/2019	25 Februari 2019
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	037/KPTS/DLHP/B.I/2019	19 Februari 2019
6	Badan Kepegawaian Daerah	753/KPTS/BKD.SEKR/2019	1 Maret 2019
7	Dinas Perdagangan	005/KPTS/DISDAG/SET.1/I/2019	4 Februari 2019
8	Badan Ketahanan Pangan	800SK/BAN.KETPANG.368/I/2016	1 Maret 2016
9	Biro Kesejahteraan Rakyat	118/KPTS/KESRA/VI/2016	Maret 2016
10	Biro Otonomi dan Kerjasama	157/TU.II/2016	8 Agustus 2016
11	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	353/KPTS/III/2016	19 Januari 2016
12	Biro Administrasi Pembangunan Setda	0568/KPTS/P.PPID/TU/V/03/2016	23 Maret 2016
13	Biro Pemerintah Setda	01/KPTS/PUM/2016	Maret 2016
14	Biro Perekonomian Setda	480/703/IV/2016	8 Agustus 2016
15	Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah	079/KPTS/IX/2016	8 Agustus 2016
16	Satuan Polisi Pamong Praja	1206/KPTS/SAT.POL.PP/2016	
17	Rumah Sakit Ernaldi Bahar	800/1724/RS.ERBA/2016	Maret 2016
18	Komisi Penyiaran Indonesia	800/177/KPTS/SKPID-SS/2016	12 Agustus 2016
19	DPRD	112/KPTS/SETWAN/2016	28 Maret 2016
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	061/521/BAN.KBP/2016	1 Agustus 2016
21	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1109/BANDIKLAT/2016	29 Juni 2016
22	Badan Lingkungan Hidup	51/KPTS/Ban.LH/2016	27 Juli 2016
23	Badan Perpustakaan	814/67/BANPUSTAKA/VIII.2016	1 Agustus 2016
24	Badan Kepegawaian Daerah	1632/KPTS/BKD.SEKR/2016	11 Agustus 2016
25	Badan Arsip Daerah	16/KPTS/BAN.ARDA/2016	20 Juli 2016

No	Nama Instansi /PD	NOMOR SK PPID	Tanggal
26	Badan Pendapatan Daerah	064/KPTS/BAPENDA/2020	24 Agustus 2020
27	Dinas Perkebunan	10/KPTS/800/2020	6 Februari 2020
28	Dinas Kehutanan	501/KPTS/VII/HUT/2016	25 Juli 2016
29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1596/SK/NAKERTRANS/2020	20 Juli 2020
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	622/KPTS/DISKOMINFO/2022	29 Agustus 2022
31	Dinas Peternakan	524.1/64/KPTS/Sekret.Disnak/ 2016	26 Februari 2016
32	Dinas Pendidikan	067/1786/Set.1/Disdik.SS/2016	Agustus 2016
33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24/DISKOP.UKM/2016	26 Juli 2016
34	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	201/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2016	11 Maret 2016
35	Dinas Pertambangan dan Energi	02.9/KPTS/DISPERTAMBEN/2016	20 Januari 2016
36	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal	010/SK/BP3MD/2016	8 Agustus 2016
37	Inspektorat	001/INSPEKTORAT/2015	5 Januari 2015
38	Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi	04/KPTS/BALITBANGNOVDA.SEKR/2015	3 Januari 2015
39	Dinas Sosial	050/76/SK/I-1/2020	20 Juli 2020

Sumber : dinas Komunikasi dan telekomunikasi Prov. Sumsel

Sampai dengan tahun 2023, sebanyak 39 Instansi unit kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk unit PPID.

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerjasama demi kesejahteraan bersama. Data perkembangan koperasi di Sumatera Selatan dari tahun 2017 sampai 2023 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023 jumlah koperasi yang ada di Sumatera Selatan sebanyak 7.032 unit dengan jumlah anggota sebanyak 254.958 orang, volume usaha Rp. 1.988.345.238.965, dan SHU sebesar Rp. 133.923.310.236

Tabel 2.82
Perkembangan Koperasi di Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan
Tahun 2017-2023

Kabupaten /Kota	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Palembang	Jumlah Koperasi	Unit	1.080	1.080	1.049	1078	1.102	1.113	1.122
	Koperasi Aktif	Unit	819	819	623	656	682	699	715
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	261	261	426	422	420	414	407
Banyuasin	Jumlah Koperasi	Unit	415	415	433	445	480	491	505
	Koperasi Aktif	Unit	294	294	316	328	129	148	164
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	121	121	117	117	351	343	341
Musi Banyuasin	Jumlah Koperasi	Unit	277	277	310	313	359	367	387
	Koperasi Aktif	Unit	265	265	299	302	348	356	376
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	12	12	11	11	11	11	11
Lubuk Linggau	Jumlah Koperasi	Unit	205	205	208	208	219	220	221
	Koperasi Aktif	Unit	102	102	109	109	122	123	124
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	103	103	99	99	97	97	97
Musi Rawas	Jumlah Koperasi	Unit	730	730	662	667	691	700	704
	Koperasi Aktif	Unit	599	599	516	521	545	554	560
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	131	131	146	146	146	146	144
Prabumulih	Jumlah Koperasi	Unit	168	168	132	132	146	148	149
	Koperasi Aktif	Unit	85	85	102	102	116	118	119
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	83	83	30	30	30	30	30
Muara Enim	Jumlah Koperasi	Unit	479	492	476	482	493	500	509
	Koperasi Aktif	Unit	315	333	281	287	298	306	316
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	164	159	195	195	195	194	193
Ogan Komering Ilir	Jumlah Koperasi	Unit	399	399	498	506	534	542	553
	Koperasi Aktif	Unit	267	267	411	420	449	458	465
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	132	132	87	86	85	84	88
Ogan Ilir	Jumlah Koperasi	Unit	204	217	227	227	184	188	192
	Koperasi Aktif	Unit	166	199	125	125	130	134	138
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	38	18	102	102	54	54	54
Ogan Komering Ulu	Jumlah Koperasi	Unit	377	377	377	382	392	394	396
	Koperasi Aktif	Unit	269	269	275	280	290	292	294
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	108	108	102	102	102	102	102
OKU Timur	Jumlah Koperasi	Unit	421	421	446	453	474	481	493

Kabupaten /Kota	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Koperasi Aktif	Unit	402	402	167	174	197	202	215
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	19	19	279	279	277	279	278
	Jumlah Koperasi	Unit	216	216	234	235	244	245	246
OKU Selatan	Koperasi Aktif	Unit	129	129	42	38	47	48	38
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	87	87	192	197	197	197	208
	Jumlah Koperasi	Unit	187	187	170	177	201	209	213
Empat Lawang	Koperasi Aktif	Unit	124	124	82	89	113	121	125
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	63	63	88	88	88	88	88
	Jumlah Koperasi	Unit	392	392	429	432	461	465	469
Lahat	Koperasi Aktif	Unit	293	293	179	148	140	147	155
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	99	99	250	284	321	318	314
	Jumlah Koperasi	Unit	109	113	127	128	133	136	140
Pagar Alam	Koperasi Aktif	Unit	43	47	65	54	34	36	43
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	66	66	62	74	99	100	97
	Jumlah Koperasi	Unit	365	365	309	311	336	336	341
Musi Rawas Utara	Koperasi Aktif	Unit	260	260	66	68	94	88	92
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	105	105	243	243	242	248	249
	Jumlah Koperasi	Unit	180	180	112	111	119	125	135
Penukal Abab Lematang Ilir	Koperasi Aktif	Unit	156	156	98	97	103	109	119
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	24	24	14	14	16	16	16
	Jumlah Koperasi	Unit	118	118	205	133	163	207	257
Provinsi	Koperasi Aktif	Unit	111	111	124	48	83	128	178
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	7	7	81	85	80	79	79
	Jumlah Koperasi	Unit	118	118	205	133	163	207	257
TOTAL JUMLAH KOPERASI		Unit	6.005	6.272	6.352	6.404	6.780	6.938	7.032

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan, 2024 (data mutakhir)

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Jumlah UMKM Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun ketahun, pada tahun 2016 jumlah UMKM Sumsel sebanyak 2.102.478 unit meningkat menjadi 2.372.692 unit di tahun 2023, begitu juga dengan modal kerja dan investasi dari Rp. 9.689.308.000.000 di tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 11.213.443.000.000 ditahun 2023. Sedangkan omzet usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2016-2023 juga terus mengalami peningkatan dari Rp.

25.528.906.000.000 tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 36.266.015.000.000 ditahun 2023, begitu juga dengan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2016 sebanyak 3.038.087 orang meningkat menjadi 3.246.953 orang ditahun 2023.

Tabel 2.83
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
di Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah UMKM	Unit	2,102,478	2,103,268	2,108,604	2,208,553	2,208,553	2,319,780	2,323,663	2,372,692
	Pengusaha Mikro Kecil	Unit	2,100,487	2,101,230	2,106,528	2,206,528	2,206,528	2,315,649	2,320,148	2,369,147
	Pengusaha Menengah	Unit	1,991	2,038	2,076	2,025	2,025	3,212	3,515	3,545
2	Modal Kerja dan Investasi	Rp. Juta	9,689,308	9,731,551	9,830,871	9,839,421	9,839,421	10,001,594	11,100,221	11,213,443
	Pengusaha Mikro Kecil	Rp. Juta	8,388,365	8,379,635	8,463,431	8,467,482	8,467,482	8,551,585	8,702,046	8,789,066
	Pengusaha Menengah	Rp. Juta	1,300,943	1,351,916	1,367,440	1,372,421	1,372,421	2,360,243	2,398,175	2,424,377
3	Omzet	Rp. Juta	25,528,906	25,531,333	30,467,638	31,426,812	31,426,812	31,961,421	32,819,923	36,266,015
	Pengusaha Mikro Kecil	Rp. Juta	20,548,074	20,402,754	26,184,781	27,113,005	27,113,005	28,020,549	28,080,814	31,169,704
	Pengusaha Menengah	Rp. Juta	4,980,832	5,128,579	4,312,857	4,313,812	4,313,812	4,740,485	4,739,109	5,096,311
4	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	3,038,087	3,059,356	3,066,587	3,082,040	3,082,040	3,117,847	3,239,179	3,246,953
	Pengusaha Mikro Kecil	Orang	3,010,997	3,031,704	3,042,461	3,054,117	3,054,117	3,088,430	3,207,309	3,214,733
	Pengusaha Menengah	Orang	27,090	27,652	28,792	27,923	27,923	30,493	31,870	32,220

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan, 2024

18) **Urusan Penanaman Modal**

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 adalah 21,88 Triliun dari target tahun 2023 sebesar 21,90 Triliun atau persentase capaian sebesar 99,90 persen, dengan rata-rata pertumbuhan realisasi selama 5 tahun (2018-2023) adalah sebesar 14,59 persen. Belum tercapainya target investasi untuk penanaman modal asing tahun 2023 disebabkan oleh adanya beberapa kendala teknis dari perusahaan seperti : terkendalanya masalah lahan, kendala akses lahan dan perusahaan yang berhenti beroperasi serta proyek yang tidak dapat dilanjutkan lagi.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2023 adalah

25,6 Triliun dari yang ditargetkan sebesar 10,47 Triliun. Capaian Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2023 sudah melebihi target dan meningkat dari tahun sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun (2018-2023) adalah sebesar 8,63 persen.

Tabel 2.84
Perkembangan Investasi di Sumatera Selatan (Triliun Rupiah)

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Reliasasi	Target	Reliasasi	Target	Reliasasi	Target	Reliasasi	Target	Reliasasi
1	Nilai Realisasi Investasi PMA (Triliun)	16,71	11,074	17,88	22,528	19,13	19,09	20,47	17,58	21,9	21,88
2	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Triliun)	7,99	16,921	8,55	15,825	9,14	16,27	9,79	23,53	10,47	25,6

Sumber: DPMPSTP Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2023 yakni dengan memberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada investor dan masyarakat pelaku usaha dalam bentuk:

- a. Pemberian Insentif berupa :
- Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah
 - Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah
 - Pemberian bantuan modal kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di Provinsi
 - Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di Provinsi
 - Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi dan/atau
 - Bunga pinjaman rendah bagi usaha mikro, usaha kecil, menengah dan/atau koperasi di Provinsi
- b. Pemberian Kemudahan berupa :
- Penyediaan data dan informasi dan peluang penanaman modal (penyusunan dokumen IPRO, SAI dll)
 - Penyediaan sarana dan prasarana

- Fasilitas penyediaan lahan atau lokasi
- Pemberian bantuan teknis
- Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu
- Kemudahan akses pemasaran hasil produksi
- Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah
- Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Provinsi
- Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil
- Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan Provinsi.

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tujuan pembinaan generasi muda adalah menghasilkan generasi muda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, berdaya saing, berjiwa kepemimpinan, berwirausaha, berjiwa kepeloporan, mempunyai kewarganegaraan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tahun 1945 dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Situasi di Sumatera Selatan semakin mengalami kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan.

Hal ini merupakan sistem yang semakin teradaptasi yang memungkinkan berkembangnya generasi muda di Sumatera Selatan, seperti adanya sarana dan prasarana bagi generasi muda, terlindungnya generasi muda dari dampak buruk narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang telah terlihat di lapangan, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan kegiatan pornografi, prostitusi, perdagangan manusia, risiko kemerosotan karakter moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, dan hilangnya komitmen dan sentimen nasional.

Peran pemuda juga didukung melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda yang memperkuat Program Peningkatan Partisipasi Pemuda dan upaya peningkatan kewirausahaan dan keterampilan hidup di kalangan generasi muda di daerah tertinggal dan teknologi pemuda dan manajemen HIV-AIDS. Upaya penguatan peran aktif dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan dilaksanakan melalui pembinaan kader wirausaha sesuai minat, bakat, dan potensi generasi muda serta potensi daerah. Kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan kader wirausaha meliputi pelatihan, pendampingan, pembinaan, dan akses permodalan.

Perkembangan kepemudaan selama tahun 2013 – 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.85
Perkembangan Kepemudaan di Sumatera Selatan

No.	Uraian	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya dan Olahraga)	Na	Na	Na	Na	25	31	34	26	Na	211	31
2	Jumlah Pemuda yang Berperan dalam Pembangunan	Na	Na	Na	Na	519	422	568	310	2.295	2.138	15.902
3	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	7	7	6	6	6	19	17	0	22	45	45
4	Jumlah Wirausaha Muda	60	40	40	40	-	40	40	0	52	51	120

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2024

Prestasi Olahraga dan Industri Olahraga menggambarkan kapasitas dan kapabilitas tenaga-tenaga olahraga (atlet-atlet) yang berperan serta secara aktif berprestasi dalam kejuaraan dan perlombaan Internasional, ini juga berkaitan dengan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang terlengkap dan terancangih serta berstandar Internasional, terbentang luas di kawasan Jakabaring Sport City, yang semuanya terkoneksi pada suatu wilayah sehingga Sumatera Selatan menjadi

surganya pencinta olahraga dan terciptanya industri-industri olahraga, jasa services, peralatan dan partisipasi masyarakat.

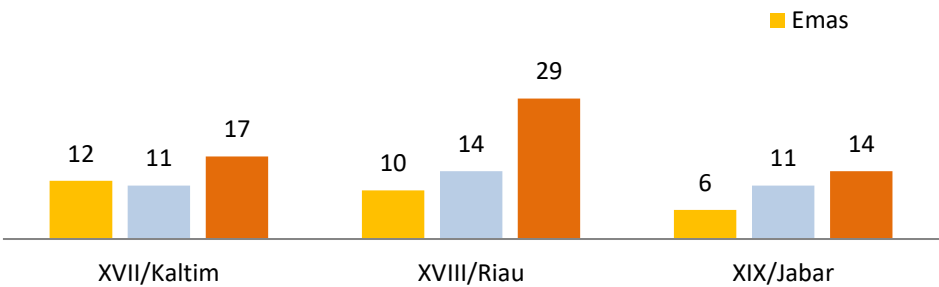
Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi yang bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial, dan olahragawan andalan daerah secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan serta memanfaatkan IPTEK olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Adanya semangat otonomi daerah (pengembangan olahraga sesuai dengan potensi dan karakter daerah) merupakan kekuatan bagi daerah untuk membangun dunia olahraga yang sesuai dengan potensi dan karakter daerah tersebut. Terselenggaranya event-event yang bertaraf Nasional bahkan Internasional merupakan bukti kepedulian Pemerintah terhadap perkembangan keolahragaan di Sumatera Selatan, yang paling fenomenal adalah terlaksananya gelaran ASIAN GAMES tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan.

Capaian hasil pembinaan Olahraga diketahui bahwa hasil yang dicapai oleh Kontingen Sumsel pada PON XVII 2008 di Kalimantan Timur, PON XVIII 2012 di Riau, PON XIX 2016 di Bandung kurang memuaskan, sedangkan pada PON XX 2020 Tahun 2021 di Papua yang menargetkan perbaikan peringkat dianggap cukup berhasil dengan perolehan 8 medali emas, 4 medali perak, dan 16 medali perunggu serta menempati peringkat 17 di klasemen akhir perolehan medali. Namun, yang menjadi kebanggaan adalah para Atlet yang memperkuat Sumsel merupakan Atlet Putra Daerah. Untuk itu, akan dioptimalkan pembinaan pada atlet muda berpotensi melalui pembinaan empat tahunan. Berikut perolehan Medali Sumsel pada PON disajikan pada grafik berikut.

Hasil medali Sumsel di PON terlihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.84
Jumlah Perolehan Medali Sumsel pada PON



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2024

Perkembangan keolahragaan selama tahun 2013 – 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.86
Perkembangan Keolahragaan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2023

No.	Uraian	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pelatih yang Bersertifikat	na	na	na	na	25 (APBD)	500 (APBN)	25	0	135	45	50
2	Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga	93	133	173	na	98	112	19	54	42	42	44
3	Jumlah Pembinaan Atlet Muda	78	79	731	94	298	232	232	260	250	262	223
4	Jumlah Atlet Berprestasi	28	36	38	50	50	30	22	0	35	50	129
5	Jumlah Prestasi Olahraga	16	18	22	44	39	4	15	0	12	18	34
6	Jumlah Medali Atlet Muda Sumatera Selatan	na	na	na	na	29	11	25	0	54	37	49
7	Peringkat Sumatera Selatan pada PON	na	na	na	na	21	na	na	na	17	na	na

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2024

Dari kedua tabel di atas terkait perkembangan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, khususnya jika dicermati pada capaian Tahun 2020 dan 2021, terlihat adanya penurunan capaian dari Tahun sebelumnya, hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor

bencana tak terduga yang melanda dunia yaitu adanya Covid-19 yang menjadi pandemi global dan sangat mempengaruhi berbagai sektor termasuk sektor pemuda dan olahraga. Dengan adanya pandemi Covid-19, berbagai capaian indikator menurun karena banyak program dan kegiatan yang ditunda bahkan dialihkan dananya untuk penanganan Covid-19. Namun seiring berangsur pulihnya keadaan dari pandemi Covid-19, capaian kinerja Kepemudaan dan Olahraga juga berangsur membaik kembali dan beberapa capaian mengalami peningkatan pesat. Secara total, capaian kinerja Kepemudaan dan Olahraga meningkat dari 88,77 % di Tahun 2021 menjadi 147 % di Tahun 2022.

Di Tahun 2023, rata-rata indikator kinerja capaian kepemudaan dan olahraga meningkat pesat. Hanya 2 indikator capaian yang mengalami penurunan yaitu jumlah pemuda berprestasi yang merupakan indikator kinerja kepemudaan yang menurun cukup jauh dari 211 di Tahun 2022 menjadi 31. Hal ini disebabkan karena sedikitnya jumlah event-event kepemudaan yang diikuti oleh Para Pemuda di Sumatera Selatan dan terdapat juga sejumlah event-event yang tidak tercatat secara resmi. Sedangkan dari indikator kinerja keolahragaan yaitu jumlah pembinaan atlet muda juga menurun dari 263 di Tahun 2022 menjadi 223 di Tahun 2023. Penyebabnya adalah jumlah atlet muda yang sebelumnya masih masuk pembinaan atlet level junior telah beralih ke level senior dan bertambah usia, sedangkan pencarian bakat atlet-atlet muda yang baru masih membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama.

20) Urusan Statistik

Urusan Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan terutama terkait ketersediaan Data statistik Sektoral; Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang statistik di lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola data dan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi. Arah penyediaan data harus dapat diakses semua lapisan Masyarakat dan Pemerintah secara terintegrasi dan selalu di update sesuai perkembangan untuk berbagai kebutuhan terutama bagi

pembangunan di Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Statistik di tahun 2020 telah melaunching Sistem Informasi Satu Data Sumsel (SIMATA). Kegiatan ini memperkenalkan Sistem Informasi Satu Data Sumsel (SIMATA) yang dilaunching pada tanggal 23 November 2020 dan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 31 Desember 2021 telah diterbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 892/KPTS/Diskominfo/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Satu Data Provinsi Sumatera Selata

Tabel 2.87
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-385.f/01000/ES/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Jakarta, 6 November 2023

Yth. Gubernur Sumatera Selatan
di - Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengatur bahwa kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah 2,00 dengan predikat "Cukup". Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan pada Lampiran.

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan penguatan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.



Pt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Amalia Adininggar Widayanti

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Menteri Dalam Negeri

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710, Kotak Pos 1003, Jakarta 10010, Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pinda kode QR di samping untuk menampilkan file asli

21) Urusan Persandian

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, pembinaan, pengawasan, diantaranya Pembinaan dan Pengawasan menara Telekomunikasi, Bimbingan Teknis Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk serta Pemberian Bimbingan Teknik Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO), maka diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan keamanan Siber, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/setting, penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal; layanan filtering konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah. Dalam rangka menjaga keamanan informasi maka diperlukan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang integrasi data dan keamanan informasi, supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pada Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika melaunching Kegiatan CSIRT (Computer Security Insident Response Team). Pada Tanggal 22 November 2021 telah diterbitkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 760/KPTS/Diskominfo/2021 tentang Pembentukan Tim Respon Tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumselprov-CSIRT).

Pada Tanggal 25 November 2023 bertempat di Griya Agung Palembang Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Launching Computer Security Insident Response Team (CSIRT) 11 Kabupaten/Kota Se-Sumsel dan 7 Perguruan Tinggi di Palembang dan Lampung, antara lain CSIRT Kab/Kota yang dilaunching antara lain, Prabumulih Kota CSIRT ; Ogan Ilir Kab - CSIRT ; OKU Kab - CSIRT; OKI Kab - CSIRT; OKU Timur Kab -CSIRT; OKU Selatan Kab -CSIRT; Muara Enim Kab-CISRT; Lahat Kab-CSIRT; Banyuasin Kab-CSIRT; MUBA Kab-CSIRT; dan MURA Kab-CSIRT. Sedangkan perguruan tinggi Palembang dan Lampung antara lain B CSIRT, CSIRT UMDP, ARMAJAYA CSIRT, UTI CSIRT, UMMETRO CSIRT serta AISYAH BEDA CSIRT.

Gambar 2.85
Launching Computer Security Insident Response Team (CSIRT) 11
Kabupaten/Kota Se-Sumsel dan 7 Perguruan Tinggi di Palembang dan Lampung



Tabel 2.88
Daftar Computer Security Insident Response Team (CSIRT)
yang telah dibentuk di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
1.	Kota Palembang	PalembangKota-CSIRT
2.	Kota Prabumulih	PrabumulihKota- CSIRT
3.	Kabupaten Banyuasin	BanyuasinKab- CSIRT
4.	Kabupaten Musi Banyuasin	MusiBanyuasinKab- CSIRT
5.	Kabupaten Musi Rawas	MusiRawasKab- CSIRT
6.	Kabupaten Ogan Ilir	OganIlirKab- CSIRT
7.	Kabupaten OKI	OKIKab- CSIRT
8.	Kabupaten Muara Enim	MuaraEnimKab- CSIRT
9.	Kabupaten Lahat	LahatKab- CSIRT
10.	Kabupaten OKU	OKUKab- CSIRT
11.	Kabupaten OKUT	OKUTKab- CSIRT
12.	Kabupaten OKUS	OKUSKab- CSIRT

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga mendapatkan Penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara dalam hal kontribusi dan dukungan bagi pembentukan CSIRT Organisasi sector Administrasi Pemerintahan dan Sektor Pendidikan Se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

Gambar 2.86
Penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara



Tabel 2.89
Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu Renja (Rp)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.429.365.817

22) Urusan Kebudayaan

Pada Bidang Kebudayaan secara umum program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut antara lain:

- 1. Program peningkatan keragaman budaya
- 2. Program pengembangan nilai budaya
- 3. Program pengelolaan kekayaan budaya
- 4. Program permuseuman dan nilai-nilai budaya Sumsel

Dari program tersebut, jumlah sanggar seni yang berkembang di provinsi sumatera selatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.87
Jumlah Sanggar Seni yang Berkembang



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel 2023 (data mutakhir)

Jumlah sanggar seni di Sumatera Selatan tahun 2023 secara keseluruhan sebanyak 1.116 sanggar seni, jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun 2022 jumlah sanggar seni sebanyak 1.090 sanggar seni. Peningkatan sanggar seni yang paling pesat terjadi pada tahun 2016.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) saat ini dirilis oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Capaian IPK dirilis pada tahun $n+1$. Perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) berdasarkan komponen dimensi kebudayaan yang terdiri dari Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Literasi Budaya, dan Gender. Data capaian 2023 menunjukkan bahwa capaian pembangunan kebudayaan di Indonesia masih bervariasi antar provinsi, dengan nilai rata-rata nasional berada di angka 57,13. Indeks Pembangunan

Kebudayaan Sumatera Selatan tahun 2018 sebesar 50,86 mengalami fluktuasi dan meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 57,51. Peningkatan ini didorong oleh adanya kemajuan dalam berbagai aspek kebudayaan suatu wilayah, namun masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Capaian terakhir IPK Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 57,51 berada sedikit di atas Nasional sebesar 57,13.

Gambar 2.88
Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional tahun 2018-2024



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel 2025 (data mutakhir)

Tabel 2.90
Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023 per dimensi

NO.	Dimensi	Capaian	
		Sumsel	Nasional
1.	Ekonomi Budaya	25,12	29,50
2.	Pendidikan	69,76	73,35
3.	Ketahanan Sosial Budaya	68,31	70,73
4.	Warisan Budaya	64,57	51,54
5.	Ekspresi Budaya	17,34	34,91
6.	Budaya Literasi	63,67	60,49
7.	Gender	62,84	58,71
JUMLAH		57,51	57,13

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel 2025 (data mutakhir)

Dari 7 Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan, Capaian 4 dimensi Sumatera Selatan masih lebih rendah dari nasional, yaitu pada Dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekspresi Budaya.

Masalah Utama pada capaian dimensi ekonomi budaya diantaranya adalah : Peluang kerja dan pendapatan pelaku seni pertunjukan tidak stabil, dukungan finansial dan pengakuan

keterampilan masih rendah, dan Stigma sosial terhadap profesi seni. Selanjutnya pada Dimensi Pendidikan, masalah yang dihadapi adalah : Keterbatasan ekonomi dan akses pembiayaan pendidikan, Rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan, dan masih ada stigma terhadap anak penyandang disabilitas. Kemudian pada dimensi ketahanan sosial budaya, masalah yang dihadapi adalah : Kurangnya pemahaman dan sikap toleransi antaragama dan antarsuku, menurunnya semangat gotong royong akibat gaya hidup individualistis, dan rendahnya rasa saling percaya di lingkungan masyarakat. Berikutnya masalah pada Dimensi Ekspresi Budaya adalah : Rendahnya kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi masyarakat, minimnya minat dan waktu untuk berorganisasi atau kegiatan budaya, dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang tradisi lokal.

Dari berbagai masalah pada 4 dimensi IPK Sumatera Selatan yang capaiannya masih dibawah nasional tersebut, dapat disimpulkan 3 tantangan utama yaitu : rendahnya partisipasi budaya dan sosial, ketimpangan akses pendidikan (terutama untuk kelompok rentan), dan melemahnya nilai gotong royong dan kepercayaan sosial. Dapat disimpulkan bahwa fokus strategi perbaikan kedepannya adalah melalui penguatan ekosistem budaya, peningkatan partisipasi masyarakat, dan inklusivitas dalam pendidikan serta kegiatan sosial-budaya.

Tabel 2.91
Rekapitulasi Objek Pemajuan Kebudayaan Sumatera Selatan

NO.	OPK	JUMLAH
1.	Manuskrip	66
2.	Tradisi Lisan	106
3.	Adat-istiadat	187
4.	Ritus	86
5	Pengetahuan Tradisional	153
6.	Teknologi Tradisional	93
7.	Seni	262
8.	Permainan Rakyat	200
9.	Olah raga Tradisional	41
10.	Bahasa	77
JUMLAH		1.271

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel 2025 (data mutakhir)

Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan di Sumatera Selatan secara keseluruhan sebanyak 1.271 objek. Jumlah terbanyak adalah Seni dengan 262 objek, selanjutnya permainan rakyat dengan 200 objek, dan pengetahuan tradisional dengan 153 objek.

23) Urusan Perpustakaan

Perpustakaan Provinsi Sumsel saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup baik ditandai dengan peningkatan pelayanan dari tahun ke tahun, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan. Berdasarkan hasil survey Tim Survey Kepuasan Masyarakat Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Nilai IKM untuk pelayanan di Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar 90,125 indeks dengan Mutu Pelayanan dengan Nilai A dan Kinerja Unit Pelayanan dalam kategori Sangat Baik. Nilai ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 86,66 dengan kategori Baik.

Tabel 2.92
Jumlah Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017-2023

Jenis Perpustakaan	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perpustakaan Umum	1.441	1.442	1.481	847	847	879	673
Perpustakaan Sekolah	9.014	9.233	13.908	8.353	8.353	8.416	5.690
Perpustakaan Perguruan Tinggi	121	128	132	94	94	171	138
Perpustakaan Khusus	765	780	783	783	783	46	263
Total	11.341	11.583	16.304	10.077	10.077	9.512	6.764

Sumber : Perpustakaan Nasional, 2023

Terkait dengan pengembangan dan pengelolaan di berbagai jenis perpustakaan di Sumatera Selatan, berdasarkan data Perpustakaan Nasional saat ini terdapat 6.764 perpustakaan. Terdiri dari Perpustakaan Umum sebanyak 673 perpustakaan, Perpustakaan Sekolah sebanyak 5.690 perpustakaan, Perpustakaan Perguruan Tinggi sebanyak 138 perpustakaan dan Perpustakaan Khusus sebanyak 263 perpustakaan. Sedangkan perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan yang telah terbina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) pada tahun 2023 sebanyak 3.086 perpustakaan. Standar nasional perpustakaan harus menjadi acuan di dalam pendirian sebuah perpustakaan baik dalam memenuhi standar koleksi, standar SDM, standar sarana prasarana, standar layanan dan standar penyelenggaraan serta pengelolaan perpustakaan.

Tabel 2.93
Jumlah Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yang sesuai dengan
Standar Nasional Perpustakaan tahun 2021-2023

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	TERDATA			TERBINA (SNP)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Perpustakaan Umum	817	427	2089	264	655	
2.	Perpustakaan Sekolah	4.514	4.819	5205	1.312	2.934	
3.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	138	118	110	29	38	
4.	Perpustakaan Khusus	8	226	262	2	39	
TOTAL		5.477	5.590	7666	1.607	3.666	

Sumber : data.perpusnas.go.id, data diolah 2025

Berdasarkan hasil kajian tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang dirilis oleh Perpustnas, bahwa Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Nasional pada tahun 2023 berada di kategori Sedang dengan nilai 66,77 meningkat 2,87 point dari tahun 2022 yaitu 63,90 indeks. Sedangkan TGM Masyarakat Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 64,15 meningkat sebesar 3,02 point dari tahun 2022 yakni sebesar 61,52. Adapun lima komponen alat ukur Tingkat Kegemaran membaca terdiri dari frekwensi membaca (kali/minggu), durasi/lama waktu membaca (hari/jam), banyaknya bahan bacaan/buku yang tamat dibaca (dalam 3 bulan), frekwensi membaca akses internet (kali/per minggu) dan durasi akses internet (jam/per hari).

Untuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Sumatera Selatan di tahun 2023 mencapai 68,64 indeks masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu 69,42 indeks. Kondisi ini dipengaruhi oleh 7 parameter pengukur yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat/hari, perpustakaan ber SNP, keterlibatan masyarakat di kegiatan sosialisasi dan anggota perpustakaan.

Keberadaan perpustakaan yang memenuhi standar di tengah-tengah masyarakat telah diatur di dalam Undang-Undang Nomr 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Untuk itu Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat dan memperkuat peran perpustakaan umum dalam peningkatan literasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan budaya literasi melalui sejumlah program/kegiatan/sub kegiatan diantaranya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta masyarakat (Talkshow, Road Show, Seminar, Lomba dll), pengembangan bahan bacaan baik konvensional maupun digital, pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi daerah kewenangan provinsi, memperluas layanan silang layan dan layanan perpustakaan keliling,

pendirian pojok baca di ruang-ruang publik, pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, meningkatnya kerjasama di dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan serta pengukuhan Bapak/ Bunda Literasi (BULE) Kabupaten/Kota sebagai motor penggerak literasi di kabupaten/kota.

Selain itu Perpustakaan Provinsi saat ini juga sedang menjalankan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dimana perpustakaan dapat diakses oleh masyarakat sesuai kebutuhannya dan berubahnya menjadi pusat belajar serta kegiatan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (inklusi sosial).

Tabel 2.94
Jumlah Buku Koleksi Umum dan Referensi di Dinas
Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Judul Buku	261.269	261.929	265.251	267.668	278.750
Jumlah Eksemplar	829.070	834.988	839.989	846.205	872.591

Sumber : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Pengembangan koleksi terus dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel baik melalui pengadaan, tukar menukar, hibah, sumbangan dan kerjasama mengingat kebutuhan masyarakat terhadap informasi terus meningkat. Sampai dengan tahun 2023, Koleksi Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan berupa Buku Konvensional sebanyak judul 275.627 judul, 867.578 eks. Koleksi Digital sebanyak 3.860 judul dan 6.860 copy. Terbitan Berseri (Majalah, Surat Kabar, Buletin, Jurnal, Brosur, Pamflet, Pet, Laporan) sebanyak 49 Judul, 853 eksemplar. Pustaka Kelabu (Skripsi, Tesis, Disertasi) sebanyak 138 Judul, 138 eksemplar. Kaset (CD, DVD, VCD) sebanyak 1.293 judul. Katalog Induk Daerah sebanyak 2.611 judul. Bibliografi Daerah sebanyak 739 judul. Koleksi Karya Cetak Karya Rekam (KCKR) Daerah sebanyak 1.002 judul dan Naskah Kuno/Manuscrip sebanyak 55 judul.

Ketersediaan dan kualitas layanan perpustakaan tidak terlepas dari keberadaan pustakawan di berbagai jenis perpustakaan, di lihat dari tingkat ketercukupan tenaga perpustakaan untuk pustakawan di Sumatera Selatan masih sangat terbatas jumlahnya. Sampai dengan tahun 2023 jumlah Pustakawan yang tersedia hanya sebanyak 185 orang dan Tenaga Teknis sebanyak 9.613 orang. Guna memenuhi keterbatasan tenaga fungsional pustakawan, maka keberadaan tenaga teknis pengelola perpustakaan diharapkan dapat mengambil perannya di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. Sesuai dengan Standar Internasional Federation of Library Associations dan Institutions (IFLA) bahwa 1 orang tenaga perpustakaan (pustakawan) melayani 2.500 orang penduduk.

Tabel 2.95
Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023

No	Sumber Daya Manusia Perpustakaan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pustakawan	78	88	147	185	189	185
	Provinsi	32	28	27	33	30	27
	Kab/kota	15	30	39	93	105	105
	Sekolah	3	2	2	3	2	-
	Perguruan Tinggi	28	28	62	39	40	40
	Khusus	-	-	6	17	12	13
2.	Tenaga Teknis	610	365	792	10.446	9.424	9.613
	Provinsi	56	54	45	72	59	90
	Kab/kota	65	123	123	412	170	275
	Kecamatan, desa, kelurahan	-	-	-	711	1.841	1.841
	Sekolah	430	109	540	8.807	6.286	6.287
	Perguruan Tinggi	59	79	79	381	103	143
	Khusus	-	-	5	63	965	977

Sumber : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 2024

24) Urusan Kearsipan

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kearsipan melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan dan pemeliharaan arsip dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu dengan :

- 1. Tingkat ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang sah dan Pertanggungjawaban Nasional
 - a. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan melalui Kegiatan Sosialisasi/Diklat/Bimbingan Teknis seperti:
 - Sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Versi 3

- Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Arsip Statis
- Sosialisasi Kode Klasifikasi Arsip yang diikuti oleh 50 Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

b. Melaksanakan Pendataan dan Penataan Arsip Dinamis (Pemusnahan Arsip)

Kegiatan Pemusnahan Arsip Inaktif Retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari Organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan telah dilakukan penilaian berdasarkan Undang – Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Kegiatan penyusutan arsip inaktif yang telah melalui beberapa penilaian oleh tim penilaian arsip inaktif. Penyusutan arsip adalah tindakan mengurangi volume arsip yang telah menurun frekuensi penggunaannya. Penyusutan terdiri dari kategori pemindahan, penyerahan dan pemusnahan.

Kegiatan pemusnahan bertujuan untuk :

- Mengurangi volume arsip yang tidak memiliki nilai guna dan telah habis masa retensinya dalam kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Anggaran.
- Terciptanya tata kelola yang efektif dan efisien sehingga ruang penyimpanan arsip atau record center dapat berfungsi untuk menyimpan arsip – arsip baru atau yang masih memiliki nilai guna.

Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun didapatkan jumlah arsip yang telah dinilai sebanyak **42.532** (Empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua) lembar .

c. Melaksanakan Pendataan dan Penataan Arsip Statis

Kegiatan pengelolaan (pendataan dan penataan arsip statis) yang dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain :

- Tersusunnya Daftar Arsip Statis Tahun 2024

Daftar Arsip Statis berjumlah 4635 lembar, yang terdiri dari arsip hasil akuisisi dari OPD, Perorangan, Ormas, dan BUMD.

- Tersusunnya Daftar Inventaris

Daftar Inventaris yang dihasilkan yaitu Daftar Inventaris Foto dan Daftar Inventaris Arsip.

- Tersusunnya Guide Arsip Statis

Guide Khazanah Arsip yang dihasilkan yaitu Guide Khazanah sejarah Pemimpin Marga Pemulutan “Pangeran Poento” dan Guide Tematik Yaitu Pelaksanaan Kegiatan Mutas yang di laksanakan Dinas Kearsipan Propinsi Sumatera Selatan.

- Tersusunnya Daftar Akses Arsip Statis

Laporan Tahunan kegiatan akuisisi dan Pengelolaan Arsip Statis Tahun 2024.

2. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

a. Nilai Kepatuhan Perangkat Daerah Provinsi dan LKD Kab/Kota Terhadap Kearsipan

Pada tahun 2024 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah melaksanakan Audit Kearsipan Eksternal terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang hasilnya disusun dalam Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala ANRI nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Adapun hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 telah diumumkan secara Nasional pada tanggal 18 Desember 2024, sesuai dengan Surat Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor AK.01.00/28/2024 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Peringkat 9 (sembilan) Nasional dengan **Kategori AA (Sangat Memuaskan)**.

Secara umum peringkat Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari peringkat 10 pada tahun 2023 menjadi peringkat 9 pada tahun 2024 dan nilai yang diperoleh mengalami peningkatan secara signifikan dari **A (Memuaskan)** menjadi **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Melaksanakan Layanan dan Pemanfaatan Arsip

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang kearsipan yaitu menyajikan, memberikan infomarsi kearsipan dan menyediakan akses dan layanan informasi kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD). Pada tahun 2024 Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang telah bergabung dalam aplikasi SIKN/JIKN versi 3 dengan total arsip yang telah didigitalisasi sebanyak 500 dokumen (100%) sesuai dengan target tahun 2024.

Total Seluruh Pengguna Layanan Sampai Desember 2024 adalah sebanyak :

SKM	: 995 Qusioner
Youtube	: 4273 Pengunjung
Pengunjung SIKN JIKN	: 646 Pengunujung
Helpdesk	: 405 Pengujung
Pameran	: 469 Pengunjung
Total Pengguna layanan : 66788 Pengguna (135.76%)	

c. Penyelamatan dan Pelestarian Arsip

Penyelamatan arsip adalah tindakan atau langkah-langkah penarikan atau pengambil alihan arsip secara sistematis dalam rangka penyelamatan arsip statis pada Lembaga Negara dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah sejak penggabungan atau pembubaran ditetapkan. Atau dengan kata lain penyelamatan arsip statis merupakan kegiatan penyelamatan baik fisik maupun informasi arsip yang bernilai guna permanen dengan cara penarikan atau pengambil alihan arsip secara sistematis. Pada Tahun 2024 Penyelamatan Arsip Statis dilaksanakan pada:

- 25 Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan
- Individu (Brigjen TNI Purnawirawan H. Robin Hud, MC, John, S. IP., M.M (Buku Pemimpin Marga Pangeran Poento)
- Organisasi Masyarakat (Ormas) / Organisasi Politik (Orpol) (Yayasan Aisyiah)

- BUMD (PT. Jamkrida Sumatera Selatan)

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

Total produksi perikanan tangkap dan budidaya pada tahun 2024 sebesar 722.954 ton meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 682.528 ton.

Tabel 2.96
Produksi Ikan Tangkap dan Budidaya (ton)
Provinsi Sumatera Selatan 2021-2024

Jenis Produksi	2021		2022		2023		2024*	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Ikan Tangkap (Ribuan Ton)	212.000	144.136	220.000	151.343,6	228.000	224.756	228.000	208.685
Ikan Budidaya (Ribuan Ton)	500.000	410.708	525.000	431.243,8	545.000	457.772	579.000	514.269

Sumber : *Angka Sementara Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Tahun 2025

Sedangkan konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2024 sebesar 44,25 kg/kapita/tahun naik dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 44,01 kg/kapita/tahun. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat didukung oleh meningkatnya produksi perikanan, serta didukung oleh promosi dan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota. Salah satu jenis ikan unggulan produksi Sumatera Selatan adalah ikan patin.

Gambar 2.89
Foto Ikan Patin, salah satu Komoditas Unggulan Sumatera Selatan



Tabel 2.97
Konsumsi Ikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2024

Konsumsi Ikan (Kg/kapita/th)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
	40.04	44,36	42.36	42.71	42.84	43.02	44,01	44,25

Sumber : *Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Tahun 2024 (Data belum Validasi Nasional)

Produksi benih udang windu (benur) pada tahun 2023 sebesar 700.000 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 1.300.000 dan terus menurun dari tahun ke tahun sehingga capaiannya sangat minim dari target yang telah diproyeksikan, terutama nener yang lebih rentan terhadap perubahan baku mutu air sehingga tidak lagi menjadi sasaran target produksi pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) hal ini dikarenakan baku mutu air di Kawasan tersebut kurang mendukung untuk kelangsungan produksi nener dan benur, untuk tetap mendukung kelangsungan produksi maka diperlukan treatment serta kualitas air dengan metode tertentu dengan biaya yang sangat tinggi serta keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola sangat minim ditambah jarak tempuh Pulau Maspari yang menjadi sentra Produksi Benur dan Nener sangat jauh dari daratan dan bukan merupakan lintasan transportasi umum. Jumlah produksi benur udang dan nener bandeng dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.98
Produksi Benur dan Nener (Ribu)
Provinsi Sumatera Selatan 2020-2023

Jenis Produksi	2020		2021		2022		2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Produksi benih udang windu (benur) (ekor)	10.000	2.000	15.000	2.000	18.000	1.300	18.000	700
Produksi benih bandeng (nener) (ekor)	7.000	-	11.000	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Tahun 2023 (data mutakhir)

Disamping produksi ikan dan benih ada beberapa masalah yang cukup krusial pada sektor perikanan Sumatera Selatan, antara lain Risiko pelanggaran hukum seperti pencemaran, penangkapan ikan ilegal, di wilayah peraian Sumatera Selatan.

Luasnya perairan Sumatera Selatan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya pengamanan wilayah laut dari tindakan pelanggaran hukum selain itu, terjadinya konflik kepentingan pemanfaatan zona ruang laut juga menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian pada sektor perikanan dan perairan.

23) Urusan Pariwisata

Sumatera Selatan kaya akan potensi wisata, selain wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan; Sumatera Selatan mengembangkan wisata olahraga yang potensi ini belum dilirik oleh Provinsi lain. Wisata olahraga ini berpusat di Jakabaring Sport City. Untuk mendukung wisata ini di Kota Palembang sudah dikembangkan paket wisata yang dapat dilihat pada peta dibawah:

Gambar 2.90
Peta Promosi Wisata Religi di Sumatera Selatan



Saat ini Sumatera Selatan juga menggiatkan pengembangan wisata religi. Tempat-tempat wisata religi di Sumatera Selatan yang ada dan akan dikembangkan adalah sebagai berikut: Masjid Agung pada mulanya disebut Masjid Sultan. Perletakan batu pertama pada tahun 1738, dan peresmiannya pada hari tanggal 28 Jumadil Awal 115 H atau 26 Mei 1748. Masjid Agung didirikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin I yang dikenal pula dengan Jayo Wikramo (tahun 1724-1758). Masjid Agung Palembang bagian dari

peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam, dan menjadi salah satu masjid tertua di Kota Palembang.

a. Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin

Masjid ini dipengaruhi oleh 3 arsitektur yakni Indonesia, China dan Eropa. Bentuk arsitektur Eropa terlihat dari pintu masuk di gedung baru masjid yang besar dan tinggi. Sedangkan arsitektur China dilihat dari masjid utama yang atapnya seperti kelenteng. Masjid ini berada di utara Istana Kesultanan Palembang, di belakang Benteng Kuto Besak yang berdekatan dengan aliran sungai Musi. Secara administratif, berada di Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, tepat di pertemuan Jalan Merdeka dan Jalan Sudirman, pusat Kota Palembang. Bentuk masjid yang ada sekarang adalah hasil renovasi tahun 2000 dan selesai tahun 2003.

Gambar 2.91
Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin



b. Pulau Kemaro

Pulau Kemaro terletak di tengah Sungai Musi, sekitar 6 KM dari Jembatan Ampera. Saat ini Pulau Kemaro adalah salah satu tempat wisata di Palembang yang paling terkenal. Di Pulau Kemaro terdapat sebuah vihara yang banyak didatangi oleh umat Buddha untuk berdoa dan berziarah. Di sini juga dapat ditemukan sebuah makam yang merupakan makam dari seorang putri Palembang. Putri ini mempunyai cerita tersendiri, yaitu dia menikah dengan anak raja dari China dengan mas kawin berupa 9 guci emas, namun pada akhirnya pasangan tersebut menerjunkan diri ke sungai dan tenggelam. Di Pulau Kemaro terdapat beberapa hal menarik, misalnya pagoda berlantai 9 yang dibangun pada tahun 2006, dan

pohon cinta. Masyarakat setempat percaya bahwa bila sepasang kekasih mengukir namanya di pohon cinta ini, maka hubungan cinta mereka akan berlanjut sampai dengan pernikahan.

Gambar 2.92
Pulau Kemaro



c. Museum Al Quran Raksasa

Al Quran Raksasa adalah hasil karya seni anak bangsa bernama Sofwatillah Mohzaib. Pria satu ini memang dikenal punya minat yang besar terhadap seni kaligrafi. Bahkan wakil rakyat di DPR RI ini menjadi salah satu tokoh yang memiliki perhatian besar terhadap Masjid Agung Palembang. Suatu hari, Opat sapaan akrabnya, baru saja terlelap tidur setelah selesai mengukir kaligrafi ornamen bagian pintu Masjid Agung Palembang. Dalam tidurnya ia bermimpi. Mimpi tersebut mengisyaratkan dirinya untuk membuat alquran terbesar di dunia. Dengan berbagai pertimbangan, disertai niat dan tekad yang bulat, ia pun mewujudkan mimpinya itu dengan mengawalinya dari surat Alfatiha. Lalu kemudian satu keping potongan Alquran tersebut dipamerkannya di masjid tersebut, dengan harapan ada donatur yang bersedia untuk mendukung niatnya. Dari isyarat melalui mimpi, mulai mengagas pembuatan Alquran Raksasa ini.

Gagasan pembuatan Alquran itu tercetus pada tahun 2002 silam, setelah Opat merampungkan pemasangan kaligrafi pintu dan ornamen Masjid Agung Palembang. Dari sana juga inspirasi membuat mushaf Alquran dengan ornamen khas Palembang. Satu keping mushaf Alquraan surat Alfatiha ditunjukkan kepada salah seorang toko masyarakat Palembang. Tentu saja dengan harapan untuk mengajak dermawan dan relasinya mensupport pembuatan alquran tersebut. Tepat pada 1 Muharram 1423 atau 15 Maret 2002

Alquran tersebut dipamerkan di bazar pada peringatan Tahun Baru Islam. Namun resmi diluncurkan pada 14 Mei 2009 di Masjid Agung Palembang. Di kota yang pernah menjadi pusat peradaban Kerajaan Sriwijaya ini juga terdapat banyak objek wisata bernilai tinggi. Salah satunya adalah Museum Al Quran Raksasa yang berlokasi di Jalan M Amin Fauzi, Soak Bujang, RT 03, RW 01, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Ornamen interior di Museum Al Quran Raksasa di Palembang. Bukan tanpa alasan, objek wisata religi ini disebut Alquran Wisata religi muslim. Sebab, Al Quran tersebut dipahat di permukaan kayu tembesu berukuran panjang 177 centimeter dengan lebar 140 centimeter dan ketebalan 2,5 centimeter.

Gambar 2.93
Museum Al Quran Raksasa



Alquran Al-Akbar atau yang juga sering disebut Alquran Raksasa ini terdapat 30 juz ayat suci Al-Quran yang berhasil dipahat/diukir ala khas Palembang dalam lembar kayu dan menghabiskan kurang lebih 40 meter kubik kayu trembesi dengan biaya tidak kurang Rp 2 miliar, dimana masing-masing lembar ukuran halamannya 177 x 140 x 2,5 sentimeter dan tebal keseluruhannya termasuk sampul mencapai 9 meter. Alquran yang terdiri dari 630 halaman ini juga dilengkapi dengan tajwid serta doa khataman bagi pemula. Setiap lembar terpahat ayat suci Alquran pada warna dasar kayu coklat dengan huruf Arab timbul warna kuning dengan ukiran motif kembang di bagian tepi ornamen khas Palembang yang sangat indah di pandang dan enak dibaca.

Proses pembuatannya sendiri memakan waktu relatif lama, sekitar tujuh tahunan. Alquran Raksasa ini terbesar dan pertama di dunia dalam bentuk Alquran 30 juz yang di buat pada media dari kayu jenis trembesi. Alquran terbesar ini sebelum resmi dipublikasikan, sengaja di pajang seluruh ayat-ayat suci di dalam

ruang pameran Masjid Agung Palembang selama tiga tahun untuk mendapat koreksi dari seluruh umat. Pada akhir 2011, Alquran ini dinilai layak untuk dipublikasikan dan pada Senin, 30 Januari 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama seluruh delegasi konferensi parlemen Organisasi Konferensi Islam (OKI) meresmikan penggunaan Alquran yang disebut sebagai Alquran terbesar yang dicetak di atas lembaran kayu trembesi. Sejumlah aset yang dimiliki Sumsel seperti Alquran raksasa yang hanya ada satu-satunya di dunia juga menjadi unggulan dalam menarik wisatawan. Selain itu asrama haji yang dilengkapi Ka'bah dan lintasan sa'i ukuran sebenarnya, *mock up* pesawat dan hotel syariah dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung. Mahakarya asli Wong Kito itu, tidak hanya menjadi alternatif tujuan wisata warga lokal. Bahkan turis dari mancanegara, terutama dari negara-negara Arab banyak yang sengaja berkunjung untuk membuktikan sendiri karya seni yang tiada duanya itu.

d. Kampung Arab Al-Munawar

Perkampungan yang terletak di kawasan 13 Ulu di tepian Sungai Musi dan Sungai Ketemenggungan. Di kompleks ini, terdapat paling kurang delapan rumah yang usianya diperkirakan lebih dari satu abad. Salah satunya, rumah permukiman Arab pertama di Kampung 13 Ulu, Habib Abdurrahman Al Munawar.

Gambar 2.94
Rumah di Kampung Arab Al-Munawar



Keseluruhan rumah berkonstruksi panggung dengan

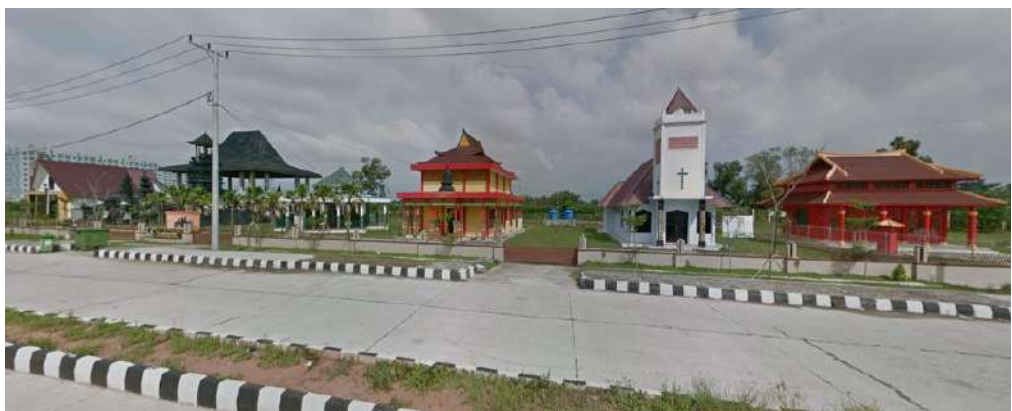
menggunakan bahan kayu unglen dan sebagian lagi menggunakan batu secara keseluruhan. Sebagian dari rumah itu berarsitektur limas seperti rumah Habib Abdurrahman dan sebagian lagi telah mendapat sentuhan Timur Tengah dan Eropa.

Di kampung ini, juga terdapat rumah Kapten Arab. Seperti halnya sukubangsa Cina dan India, pada tahun 1825, Pemerintah Belanda di Palembang melakukan pendekatan. Dari tiap sukubangsa itu, diangkatlah pemimpin kaum dengan pangkat Kapten. Kapten terakhir di Kampung Al Munawar ini bernama Ahmad Al Munawar yang wafat pada tahun 1970.

e. Komplek Rumah Ibadah Terpadu di Jakabaring

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membangun enam rumah ibadah di kawasan *venue* Asian Games di Kompleks Jakabaring *Sport City (JSC)* Palembang. enam rumah ibadah yang dibangun tersebut adalah Masjid, Gereja Katolik, Gereja Protestan, Pura, Vihara, dan Kelenteng di dalam satu lokasi. Selain untuk memudahkan para pemeluk agama tersebut dalam beribadah, lokasi tempat ibadah yang dibangun secara berdekatan juga menunjukkan bahwa masyarakat di Sumatera Selatan merupakan masyarakat yang rukun antar umat beragama, hal inilah yang menyebabkan Sumatera Selatan sebagai kawasan *zero conflict* antar suku, agama, ras, dan golongan.

Gambar 2.95
Enam Rumah Ibadah Terpadu di Jakabaring



f. Replika Sarana Prasarana Ibadah Umroh (Asrama Haji)

Asrama haji Palembang saat ini sudah berfungsi menjadi tempat untuk mempersiapkan segala urusan perjalanan bagi jama'ah

calon haji maupun umroh serta tempat wisata religi bagi masyarakat karena di area tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk pelatihan persiapan dalam menunaikan rukun Islam kelima.

Asrama haji tersebut dilengkapi replika Kabah, lintasan Sa'i dan fasilitas lainnya, selain itu di area asrama haji Palembang juga nantinya akan dilengkapi dengan unta, hotel syariah dan fasilitas lainnya seperti yang ada di tanah suci. Saat ini asrama haji Palembang telah dilengkapi miniatur pesawat supaya masyarakat yang akan pergi haji/umroh dapat mengetahui tata cara naik pesawat serta melaksanakan ibadah di dalam pesawat selama perjalanan tersebut. Nantinya calon jamaah haji/umroh yang akan menunaikan rukun Islam kelima ataupun umroh manasiknya dapat dilaksanakan di asrama haji Palembang. Dalam waktu dekat ini akan dibangun hotel syariah sehingga kawasan tersebut benar-benar menjadi tempat wisata religi terutama bagi umat Muslim. Dengan lengkapnya fasilitas untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut bukan saja untuk memudahkan calon jamaah pergi haji/umroh tetapi juga asrama haji Palembang bisa menjadi tempat wisata keagamaan bagi umat Islam.

g. Dukungan SDM Pariwisata melalui SMK Pariwisata dan Politeknik Pariwisata

Untuk Mewujudkan promosi dan pemasaran tersebut harus didukung oleh Sumberdaya Manusia yang handal. SDM Pariwisata yang ada di Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2023 antara lain :

- Jumlah pemandu wisata yang terdaftar di HPI (Himpunan Pramuwisma Indonesia) 70 orang, pemandu wisata yang aktif 10 orang, pemandu wisata yang menjadi profesi 6 orang, pemandu wisata yang berserifikat 30 orang (15 orang dari HPI), sedangkan pemandu wisata yang aktif berbahasa Inggris aktif sebanyak 4 orang.
- Tenaga kerja Usaha Pariwisata Sumatera Selatan 59.808 orang, yang terdiri dari 22.570 orang tenaga kerja usaha Sanggar Seni, 21.313 orang tenaga kerja usaha Rumah Makan, 8.333 orang tenaga kerja usaha Perhotelan, 1.916 usaha Daya Tarik Wisata (DTW), 1.758 orang tenaga kerja usaha Rekreasi, 1.371 orang

tenaga kerja usaha Perjalanan, 2.006 orang tenaga kerja usaha Cinderamata, dan 541 orang tenaga kerja Usaha SPA. Jika dilihat berdasarkan Gender maka diperoleh 51,71% tenaga kerja bergender laki-laki dan 48,29% perempuan.

Gambar 2.96
Data Tenaga Kerja Usaha Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023



Sumber : Buku Statistik Pariwisata Prov. Sumsel, 2023

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pariwisata yang meliputi pembinaan usaha pariwisata, standarisasi bidang pariwisata, penyelenggaraan promosi, pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata, dan pengembangan SDM kepariwisataan, yang dilaksanakan melalui program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan destinasi pariwisata. Provinsi Sumatera Selatan merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan, dimana keragaman tersebut tersebar di setiap kabupaten/kota destinasi dengan dukungan daya daya tarik wisatanya baik berupa wisata alam, wisata tirta, dan wisata sejarah/budaya, dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel berbintang, non bintang, restoran dan rumah makan, dan lain-lain.

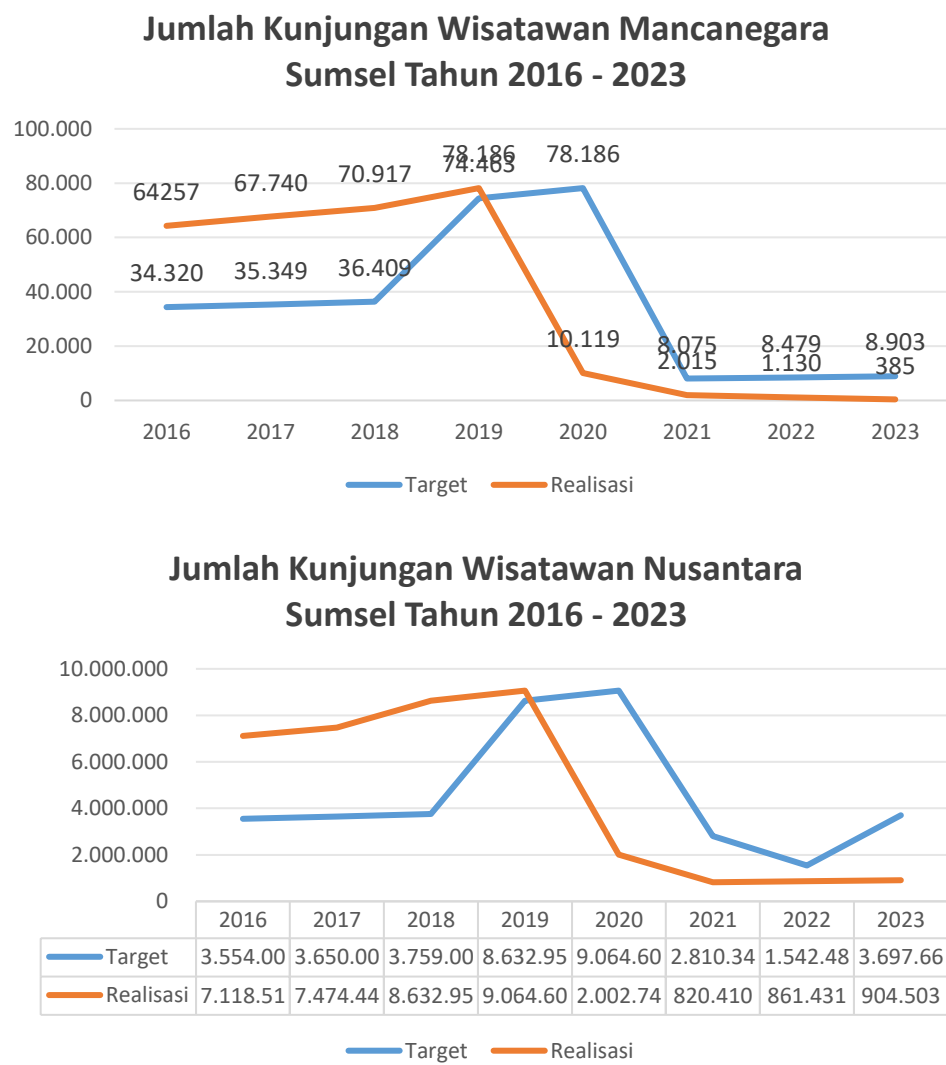
Gambar 2.97
Politeknik Pariwisata Palembang



Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera Selatan pada tahun 2023 sebanyak 385 orang sedangkan di tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1.130 orang. Jumlah wisman yang datang ke Sumatera Selatan pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar 65,92 %, selain karena tidak adanya event skala internasional pada tahun 2023, hal ini juga disebabkan belum dibukanya jalur penerbangan internasional dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, yang berdampak pada arus kunjungan wisatawan mancanegara.

Sedangkan jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 1,542,485 orang dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 3.697.666 orang atau mengalami kenaikan sebesar 139,72%. Dibukanya kembali akses kunjungan wisata dalam negeri setelah PPKN ditanggihkan menyebabkan arus wisatawan nusantara untuk melakukan perjalanan dalam negeri khususnya ke Sumatera Selatan meningkat signifikan.

Gambar 2.98
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara di Sumsel Tahun 2016-2023



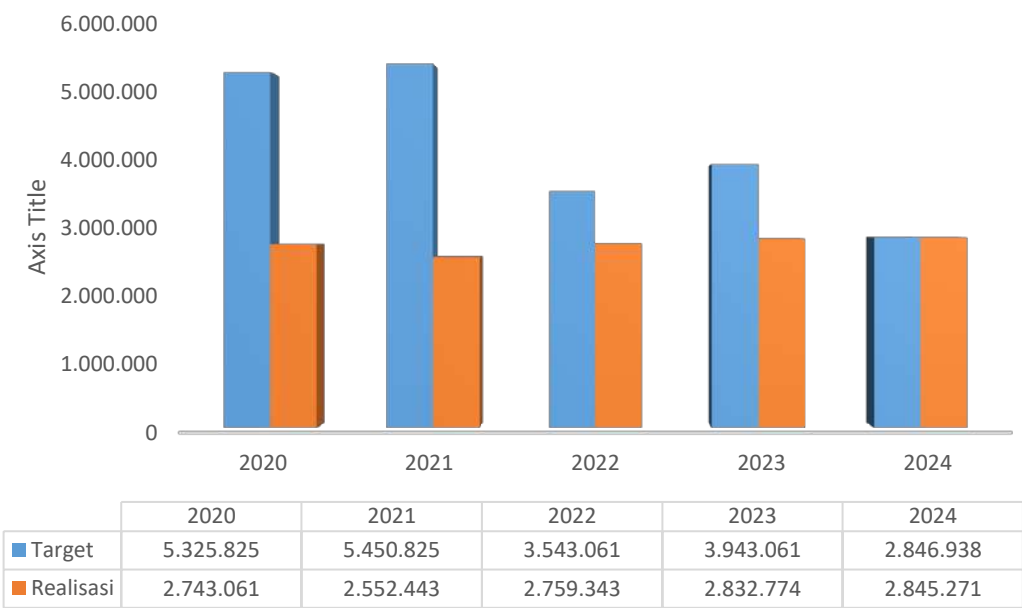
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel, 2023

3) Urusan Pertanian

Jika dilihat dari capaian di 3 (tiga) tahun terakhir, sebagian besar capaian produksi dan produktivitas petani tanaman pangan dan hortikultura mengalami peningkatan, terutama padi. Salah satu inovasi yang diprakarsai oleh Gubernur Sumatera Selatan Periode 2018-2023 yaitu rekrutmen Petugas Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP) sebanyak 1.000 orang pada tahun 2020, serta 400 orang petugas PPEP sebanyak 400 orang pada tahun 2021 menjadi salah satu pendorong dalam mengawal dan mendampingi petani/ kelompok tani untuk tetap mandiri dan berusaha tani dengan atau tanpa bantuan dari pemerintah. Capaian pada urusan pertanian Provinsi Sumatera Selatan antara lain pada produksi padi, jagung, dan kedelai. Grafik perbandingan capaian produksi padi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Produksi Padi

Gambar 2.99
Target dan Realisasi Produksi Padi Tahun 2020-2024 (Ton)



Sumber: BPS dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, 2024

Berdasarkan Data Angka Tetap Kerangka Sampel Area (KSA) Padi Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan, capaian kinerja produksi padi tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena dukungan dari sarana produksi yang diperbantukan ke petani baik melalui anggaran dari Pemerintah Pusat (APBN) maupun anggaran dari Pemerintah Daerah (APBD I) dalam bentuk benih unggul bermutu dan pupuk serta pestisida yang menyebabkan pertanaman padi lebih terpelihara dengan baik.

Jika dibandingkan dengan target, capaian produksi padi tahun 2024 dan 2023 belum melampaui target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Penetapan target produksi yang diperoleh dari bidang teknis yang berasal target kabupaten/ kota masih terlalu tinggi, padahal capaian setelah adanya penetapan angka luas baku lahan sawah yang jauh menurun dari luas sebelumnya mengakibatkan capaian produksi berkisar di bawah 3 juta ton. Selain itu, faktor iklim juga menjadi faktor yang menentukan capaian produksi padi di kabupaten/kota yang sebagian besar lahannya merupakan lahan rawa lebak dan pasang surut sehingga tinggi rendahnya curah hujan menentukan pertanaman/pemeliharaan padi. Disamping itu juga adanya penerapan teknologi spesifik lokasi, penggunaan alsintan pertanian untuk mempercepat proses produksi dan

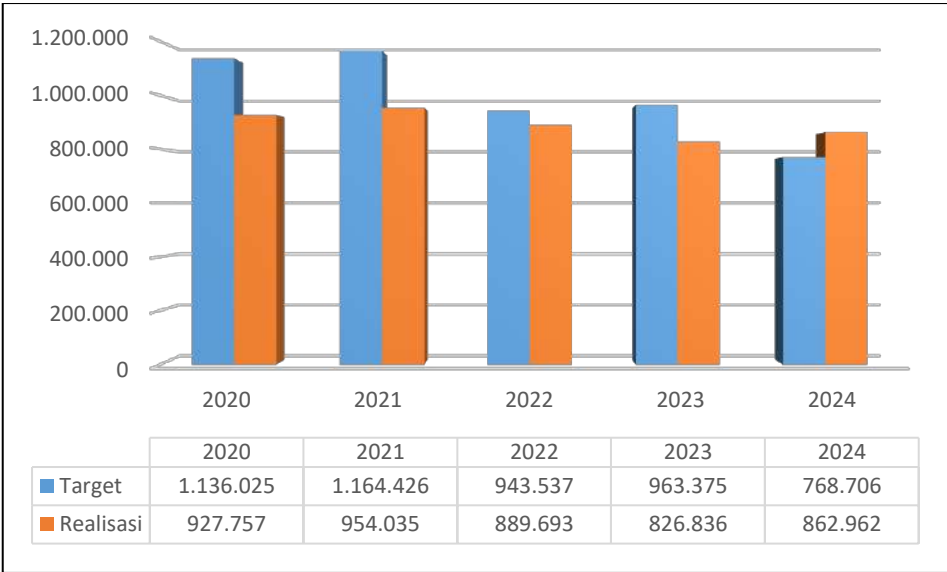
mengurangi susut hasil serta adanya pendampingan dari tenaga pendamping di Lapangan (PPEP).

Melalui kegiatan updating luas lahan baku sawah tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan diharapkan lahan-lahan sawah existing yang belum termasuk di dalam ATR/ BPN dapat dimasukkan ke dalam luas lahan baku sawah sehingga keberadaan lahan-lahan sawah yang dimiliki oleh petani di Sumatera Selatan dapat dilindungi dan diakui keberadaannya. Berdasarkan hasil verifikasi luas lahan baku sawah kabupaten/ kota, maka dari luas baku lahan sawah ATR/BPN seluas 470.602,37 menjadi seluas 593.945,33 ha. Hal ini menunjukkan bahwa terkoreksi adanya penambahan lahan baku sawah di Provinsi Sumatera Selatan seluas 69.075,29 ha pada tahun 2020 dan seluas 54.267,68 ha pada tahun 2021. Hasil penetapan lahan baku sawah tahun 2021 seluas 54.267,68 ha akan disampaikan melalui surat pengusulan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Kementerian/Lembaga terkait (namun akan diputuskan lebih lanjut) untuk mendapatkan penetapan perubahan lahan baku sawah Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan adanya perubahan metode pendekatan penghitungan produksi juga sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan isntansi terkait melalui kegiatan optimalisasi peningkatan produksi dan produktivitas padi berbasis segmen Kerangka Sampel Area (KSA).

Produksi Jagung

Gambar 2. 100
Realisasi Produksi Jagung Tahun 2020-2024 (Ton)

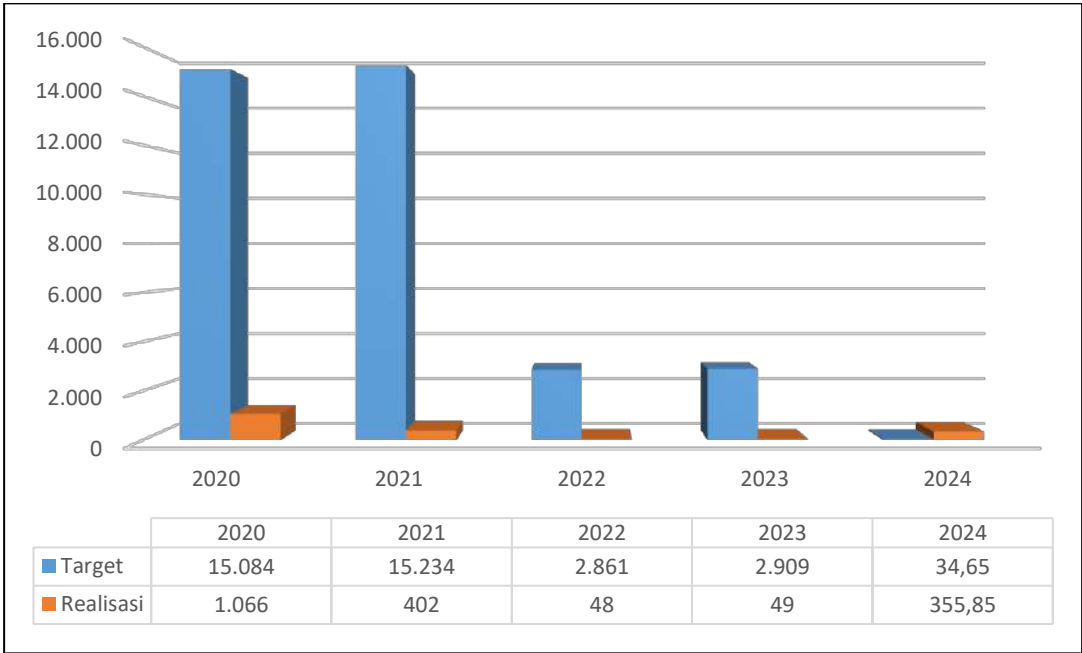


Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, 2023

Capaian produksi jagung tahun 2024 berdasarkan Angka Tetap (ATAP) adalah 862.962 ton lebih besar dari capaian Produksi Jagung Tahun 2023. Produksi jagung tahun 2024 melampaui target disebabkan karena sebagian besar pertanaman jagung pada tahun 2024 tidak dipengaruhi oleh perubahan iklim di tahun ini. Disamping itu juga peningkatan produksi jagung disebabkan oleh penanaman yang sesuai dengan bulan tanam yang dipersyaratkan untuk tanaman jagung sehingga untuk kebutuhan tanam jagung dapat terpenuhi dan tercukupi selama proses produksi jagung di seluruh lahan yang ditanami jagung oleh petani. Hal ini juga disebabkan karena adanya peningkatan alokasi bantuan dari Pemerintah Pusat melalui dana APBN (Tugas Pembantuan) di Tahun 2024 melalui Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan berupa Kawasan Jagung seluas 5.000 Ha antara lain di Kabupaten Empat Lawang seluas 600 Ha, Kabupaten Musi Banyuasin seluas 1.000 Ha, Kabupaten OKU seluas 1.000 Ha, Kabupaten OKUS seluas 1.000 Ha, Kabupaten OKI seluas 400 Ha, dan Kabupaten OKUT seluas 1.000 Ha.

Produksi Kedelai

Gambar 2. 101
Realisasi Produksi Kedelai Tahun 2020-2024 (Ton)



Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, 2023

Capaian kinerja produksi kedelai pada tahun 2024 lebih tinggi dari target tahun 2024. Yang menyebabkan capaian Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan capaian di Tahun 2023 karena adanya carry over kegiatan

di tahun 2023, kegiatan di Tahun 2023 baru ditanam di Bulan Oktober, November, Desember 2023, sehingga panen atau produksi di Tahun 2024. Disamping itu juga pada tahun 2024 iklim cukup mendukung dan rendahnya serangan OPT serta jadwal tanam yang sesuai, sehingga menyebabkan produktivitas kedelai bisa melebihi target yang telah ditetapkan sehingga produksi kedelai mengalami peningkatan yang sangat signifikan mencapai 1000%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan luas panen. Jika dibandingkan dengan target RPJMD, capaian produksi kedelai belum mencapai target. Pertanaman kedelai masih tergantung dengan adanya program bantuan pemerintah, sedangkan untuk pertanaman secara swadaya masih jarang dilaksanakan disebabkan petani lebih memilih komoditi lain yang lebih menguntungkan dan perawatan pertanaman yang lebih mudah serta pemasaran yang lebih baik.

4) Urusan Kehutanan

Pembangunan kehutanan harus sejalan dengan pembangunan yang berkelanjutan, walaupun dalam kenyataannya terdapat *trade off* antara pembangunan yang berorientasi terhadap pertumbuhan dengan pelestarian lingkungan terutama kehutanan. Luas lahan kritis merupakan salah satu indikator dari pembangunan kehutanan.

Lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai pengatur media pengatur tata air, unsur produksi pertanian, maupun unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Lahan kritis juga merupakan suatu lahan yang kondisi tanahnya telah mengalami proses kerusakan fisik, biologi atau kimia yang pada akhirnya bisa membahayakan fungsi hidrologi, produksi, orologi, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi di sekelilingnya.

Luas lahan kritis Provinsi Sumatera Selatan ±707.169 ha (sumber: SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022). Luas Kawasan Rehabilitasi pada tahun 2023 seluas ±4.750,17 Ha bekerjasama dengan Pemegang ijin IPPKH dan Ditjen PDASKHL KLHK, BRGM, Dimas Kehutanan dan Kerjasama Para Pihak.

Tabel 2.99
Data Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten/Kota Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	LAHAN KRITIS (Ha)				TOTAL LUAS LAHAN KRITIS DAN SANGAT KRITIS (Ha)		GRAND TOTAL (Ha)
		KRITIS		SANGAT KRITIS		DALAM KAWASAN	LUAR KAWASAN	
		DALAM KAWASAN	LUAR KAWASAN	DALAM KAWASAN	LUAR KAWASAN			
1	Banyuasin	9.974	22	0	0	9.974	22	9.996
2	Empat Lawang	11.903	17.839	37.385	19.068	49.288	36.907	86.195
3	Kota Lubuk Linggau	5.022	1.960	1.079	125	6.101	2.085	8.186
4	Kota Pagar Alam	1.358	1.342	5.590	7.487	6.948	8.829	15.777
5	Kota Palembang	0	0	0	0	0	0	0
6	Kota Prabumulih	0	0	0	0	0	0	0
7	Lahat	31.875	16.761	20.929	17.795	52.804	34.556	87.360
8	Muara Enim	16.858	21.459	19.991	9.478	36.849	30.937	67.786
9	Musi Banyuasin	100.749	3.932			100.749	3.932	104.681
10	Musi Rawas	32.729	5.377	3.812	412	36.541	5.789	42.330
11	Musi Rawas Utara	18.761	6.068	1.645	251	20.406	6.320	26.725
12	Ogan Ilir	0	0	0	0	0	0	0
13	Ogan Komering Ilir	8.905	833	0	0	8.905	833	9.738
14	Ogan Komering Ulu	31.067	16.930	7.328	340	38.395	17.270	55.665
15	Ogan Komering Ulu Selatan	66.124	71.936	31.307	13.455	97.431	85.391	182.822
16	Ogan Komering Ulu Timur	2.509	1.801	613	0	3.122	1.801	4.924
17	Penukal Abab Lematang Ilir	4.984	0	0	0	4.984	0	4.984
JUMLAH TOTAL		342.817	166.262	129.680	68.411	472.497	234.672	707.169
PENJUMLAHAN		509.078		198.090		707.169		

Sumber Data : Surat Keputusan Dirjen PDASRH Nomor : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022

Tabel 2.100
Data Lahan Kritis UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

No	UPTD KPH	KRITIS (Ha)		TOTAL KRITIS (Ha)	SANGAT KRITIS (Ha)		TOTAL SANGAT KRITIS	TOTAL KRITIS DAN SANGAT KRITIS (Ha)		GRAN TOTAL (Ha)
		DALAM KAWASAN	LUAR KAWASAN		DALAM KAWASAN	LUAR KAWASAN		DALAM KAWASAN	LUAR KAWASAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	UPTD KPH Wil I Meranti	31.036,75	475,68	31.512,44	0	0	0	31.036,75	475,68	31.512,44
2	UPTD KPH Wil II Lalan-Mendis	46.773,05	28,77	46.801,81	0	0	0	46.773,05	28,77	46.801,81
3	UPTD KPH Wil III Palembang-Banyuasin	1.534,92	8,15	1.543,07	0	0	0	1.534,92	8,15	1.543,07
4	UPTD KPH Wil IV Sungai Lumpur-Riding	1.381,00	0,80	1.381,80	0	0	0	1.381,00	0,80	1.381,80
5	UPTD KPH Wil V Lempuing-Mesuji	6.669,67	831,52	7.501,19	0	0	0	6.669,67	831,52	7.501,19
6	UPTD KPH Wil VI Bukit Nanti - Martapura	32.805,71	16.425,81	49.231,52	7.543,84	520,45	8.064,28	40.349,54	16.946,26	57.295,80
7	UPTD KPH Wil VII Mekakau-Saka	53.702,34	71.308,81	125.011,15	12.790,69	13.267,60	26.058,29	66.493,03	84.576,41	151.069,45
8	UPTD KPH Wil VIII Semendo	5.721,42	21.935,67	27.657,09	17.333,02	14.265,89	31.598,91	23.054,44	36.201,56	59.256,00
9	UPTD KPH Wil IX Suban Jeriji	9.468,88	1.714,00	11.182,88	8.425,93	796,41	9.222,34	17.894,80	2.510,41	20.405,22
10	UPTD KPH Wil X Dempo	1.365,05	1.335,17	2.700,22	5.618,64	7.513,16	13.131,81	6.983,69	8.848,33	15.832,02
11	UPTD KPH Wil XI Kikim-Pasemah	28.798,94	34.318,10	63.117,04	38.631,69	31.251,72	69.883,41	67.430,63	65.569,82	133.000,45
12	UPTD KPH Wil XII Benakat	18.456,29	95,37	18.551,66	60,37	8,65	69,02	18.516,66	104,02	18.620,68
13	UPTD KPH Wil XIII Lakitan-Bukit Cogong	19.017,70	6.833,70	25.851,40	672,26	397,91	1.070,17	19.689,96	7.231,61	26.921,57
14	UPTD KPH Wil XIV Rawas	6.509,24	6.147,96	12.657,20	1.042,85	251,80	1.294,65	7.552,09	6.399,76	13.951,85
15	Kawasan Konservasi	79.520,16	4.853,51	84.373,67	37.562,61	139,36	37.701,98	117.082,77	4.992,87	122.075,65
TOTAL		342.761,13	166.313,02	509.074,14	129.681,90	68.412,95	198.094,85	472.443,02	234.725,97	707.169,00

Sumber Data:

1. Surat Keputusan Dirjen PDASRH Nomor : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022
2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 41 Tahun 2017, tanggal 19 September 2017

Tabel 2.101
Data Perkembangan Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan

TAHUN	KRITIS (Ha)	SANGAT KRITIS (Ha)
2011	985.147,72	246.206,58
2013	299.172,00	13.692,00
2014	181.488,95	12.084,38
2015	187.482,80	12.828,63
2016	182.160,92	12.814,98
2017	182.160,92	12.814,96
2018	611.766,87	121.989,12
2019	611.766,87	121.989,12
2020	611.766,87	121.989,12
2021	611.766,87	121.989,12
2022	509.078	198.090
2023	509.078	198.090
2024	509.078	198.090

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), 2023 (data mutakhir)
Surat Keputusan Dirjen PDASRH Nomor :
SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022

Rehabilitasi lahan adalah suatu usaha memulihkan kembali, memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak supaya dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai lahan produksi, media pengatur tata air, ataupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang dilokasikan pada kerangka daerah aliran sungai. Kegiatan Rehabilitasi ini menempati posisi untuk mengisi kekosongan ketika sistem perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sistem budidaya lahan dan hutan, sehingga terjadi deforestasi serta degradasi fungsi hutan dan lahan.

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui kegiatan Penghijauan, Reboisasi, Pemeliharaan, Pengayaan tanaman atau Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Kegiatan reboisasi dan penghijauan pada umumnya dilakukan pada tanah kritis dan areal bekas penebangan liar atau pembalakan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut membutuhkan bibit dalam jumlah besar dan berkualitas baik.

Tabel 2.102
Lahan Kritis Yang Direhabilitas di Provinsi Sumatera Selatan

No	Pelaksana	Sumber Dana								JUMLAH (HA)	RINCIAN LOKASI REHABILITASI				JUMLAH (HA)
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		HP	HL	KK	APL	
1	Pemegang Kewajiban IPPKH	Pihak ke-3	742	963	863	478	849	2.317	4.756	10.968	300	8.770	1.898	-	10.968
2	Kementerian LHK / Balai PDASHL Musi	APBN	700	10.400	230	3.100	1.500	320	1003	17.253	300	16.912	-	41	17.253
3	Kementerian LHK / Balai PDASHL Ketahun	APBN	-	7.250	-	-	-	-	-	7.250	-	7.250	-	-	7.250
4	Badan Restorasi Gambut Mangrove	APBN	10	50	-	20	15	-	-	95	73	-	-	22	95
5	Dinas Kehutanan *)	APBD	-	2	-	4	25	29	43	103	60	-	-	43	103
6	PEN Rehabilitasi Mangrove (BRGM)	APBN	-	-	-	250	-	-	-	250	-	250	-	-	250
7	Kerjasama Para Pihak (PLN, SKK Migas, PT.PUSRI, dan Pihak Lainnya)	CSR BUMI	-	-	-	-	9	10	98	117	-	51	-	66	117
TOTAL PER TAHUN			1.452	18.665	1.093	3.852	2.398	2.676	5.900	36.036	733	33.233	1.898	172	36.036

Sumber: Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Dishut, 2024 (Data mutakhir)

Jika dilihat dari data diatas terdapat ketimpangan antara jumlah lahan kritis yang ada dengan jumlah lahan kritis yang direhabilitasi. Tidak hanya itu, ada beberapa masalah yang cukup menjadi perhatian pada sektor kehutanan yaitu :

- 1. Belum optimalnya pembinaan dan pengendalian terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
- 2. Belum optimalnya penyelesaian permasalahan hutan
- 3. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan hutan, magrove dalam kawasan hutan dan kawasan bernilai ekosistem tinggi.
- 4. Kurangnya tutupan vegetasi dan pengelolaan DAS.
- 5. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan kelompok perhutanan sosial.

Hal-hal tersebut menjadi fokus bagi Dinas Kehutanan dalam melaksanakan pembangunan pada sektor Kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan agar permasalahan diatas dapat teratasi.

5) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Bila dilihat dari kontribusi pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Selatan dari Sektor Pertambangan dan Penggalian tahun 2019 sebesar Rp. 92.166,09

milyar namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi Rp. 83.281,99 milyar. Tahun 2021-2023 kembali mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan tahun 2024 mengalami penurunan kembali.

Pada tahun 2021 kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 103.801,70 miliar, Pada tahun 2022 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian meningkat menjadi Rp 163.520,90 miliar, dan tahun 2023 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 167.372,90 miliar namun mengalami penurunan tahun 2024 menjadi Rp. 163.335 milyar. Pada tahun 2024 sub sektor yang paling besar kontribusinya terhadap sektor Pertambangan dan Penggalian adalah Sub Sektor Pertambangan Batubara dan Lignit sebesar Rp. 92.140,39 miliar, kemudian Sub Sektor Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi sebesar Rp. 38.943,45 miliar dan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya sebesar Rp. 32.251,18 miliar.

Tabel 2.103
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
(Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha per Sub Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
B. Pertambangan dan Penggalian	92.166,09	83.282,99	103.801,70	163.520,90	167.372,90	163.335
1. Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi	37.562,70	32.208,31	37.515,47	41.272,12	37.030,73	38.943,45
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	27.642,97	24.560,87	39.084,82	93.384,52	100.011,10	92.140,39
3. Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-	-
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	26.960,42	26.513,81	27.201,41	28.846,29	30.331,10	32.251,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumsel 2024 (data mutakhir)

Disamping kontribusi PDRB yang cukup besar, sektor pertambangan juga dihadapkan pada beberapa permasalahan yaitu :

1. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; jaringan listrik yang belum mencapai lokasi di pelosok dan pesisir, sehubungan dengan hal tersebut

mempunyai akar masalah yaitu :

- Belum optimalnya kajian, riset dan inovasi untuk pengembangan energi baru dan terbarukan;
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi surya di pesisir;
- Belum optimalnya penerapan teknologi PLTMH.
- Kurangnya gardu induk di provinsi Sumatera Selatan.

2. Belum maksimalnya pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, sehubungan dengan hal tersebut mempunyai akar masalah yaitu :

- Belum maksimalnya pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- Belum maksimalnya pengelolaan pemegang IUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- Belum maksimalnya pengelolaan pemegang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).
- Masih banyaknya praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Capaian sektor Energi dan Sumber Daya Mineral pada kurun waktu 2019-2023 sangat baik. Jumlah produksi batu gamping tahun 2024 sebanyak 2.792.344,85 ton, jumlah produksi clay stone tahun 2024 sebanyak 362.959,32 ton sedangkan jumlah produksi batubara meningkat dari tahun 2019 sebesar 54.827.794,89 ton menjadi 105.252.294,96 ton pada tahun 2024. Jumlah pemegang izin berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan) sebanyak 195 izin di tahun 2024. Kapasitas daya listrik yang tersedia di tahun 2024 sebesar 3.409 MW. Persentase rumah tangga yang memiliki akses listrik tahun 2024 sebesar 99,99% dan desa berlistrik 99,26% dimana persentase tahun 2024 ini meningkat dari tahun 2019 sebesar 98,12.

Jumlah industri yang melaksanakan manajemen industri tahun 2024 sebanyak 53 perusahaan. persentase PPM dari perusahaan tambang untuk masyarakat sekitar sebesar 30,91% dimana PPM berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 41 tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 11 ayat 2 : “masyarakat sekitar tambang dapat mengajukan usulan kegiatan dalam program PPM tahunan melalui Gubernur untuk diteruskan kepada Badan Usaha Pertambangan”.

Persentase peningkatan bauran energi tahun 2024 sebesar 24,18% dimana target tahun 2024 sebesar 21,06%. Jumlah PNPB sektor ESDM sebesar 1,250.22 Milyar. Sedangkan jumlah pendapatan retribusi sektor ESDM sebesar 5.482.900 juta dan pendapatan BLUD sebesar 202.895.735 juta.

Tabel 2.104
Capaian Kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2019-2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi : a. Batu Gamping b. Clay Stone c. Batubara	Ton Ton Ton	n/a n/a 54.827.794,89	n/a n/a 49.573.092,98	n/a n/a 65.794.032,13	n/a n/a 90.141.580,12	n/a n/a 105.833.200,11	2.792.344,85 362.959,32 105.252.294,96
2.	Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	Izin	110	117	112	129	99	195
3.	Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia	MW	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3.409
4.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	99,99
5.	Persentase Desa Berlistrik	%	98,12	98,64	98,98	99,01	99,26	99,26
6.	Jumlah Industri Melaksanakan Managemen Industri	Jumlah Perusahaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	53
7.	Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat Sekitar	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30,91
8.	Persentase Peningkatan Bauran Energi	%	19,46	20,82	20,82	23,14	23,14	24,18
9.	Jumlah PNPB Sektor ESDM	Milyar	849,49	928,41	504,44	930,03	1.455,409	1.250,22
10.	Jumlah Pendapatan Sektor ESDM	Juta Juta	812,56 n/a	593,95 n/a	145,75 n/a	1.050 n/a	898,648 n/a	

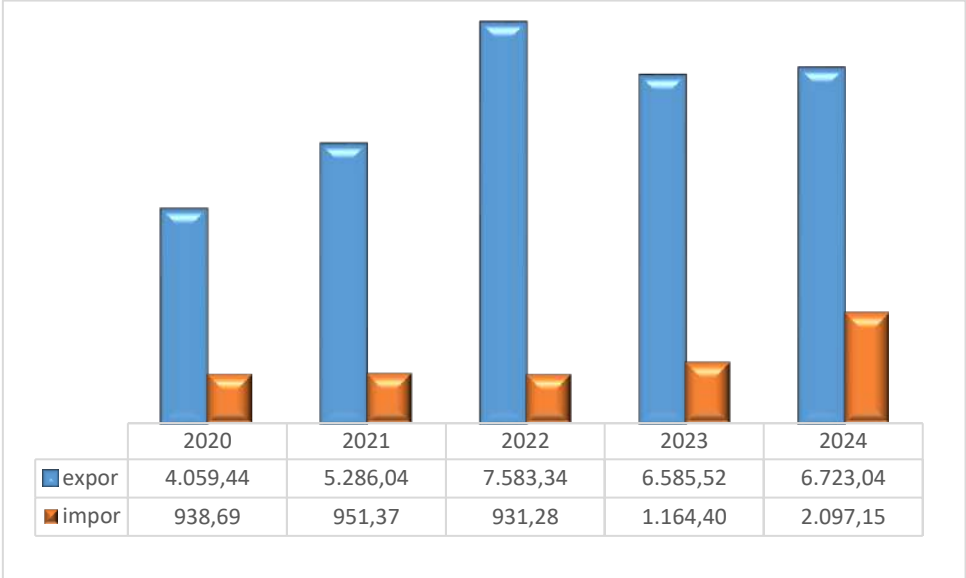
	a.Pendapatan Retribusi b.Pendapatan BLUD							5.482.000 202.895.735
11.	Jumlah Sambungan Gas Rumah Tangga	SR	6.034	40.932	6.889	8.498	0	n/a (tidak tercantum sebagai indikator ESDM berdasarkan Renstra Dinas ESDM)
12	Jumlah IUP OP yang berproduksi		3	2	3	3	4	n/a (tidak tercantum sebagai indikator ESDM berdasarkan Renstra Dinas ESDM)
13	Minimnya Jumlah Kecelakaan Tambang yang Mati	org	3	0	1	2	2	n/a (tidak tercantum sebagai indikator ESDM berdasarkan Renstra Dinas ESDM)
14	Persentase Usaha Tambang sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	100	100	100	100	100	n/a (tidak tercantum sebagai indikator ESDM berdasarkan Renstra Dinas ESDM)

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel 2024

6) Urusan Perdagangan

Kondisi neraca perdagangan di Sumatera Selatan periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 cukup fluktuaktif, bahkan nilai ekspor Sumatera Selatan sempat turun secara drastis pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh negara-negara di dunia. Pandemi *Covid-19* menyebabkan efek domino di berbagai sektor, salah satunya di sektor perdagangan. Kegiatan perdagangan luar negeri terdampak virus *Covid-19* terutama ke negara-negara yang terkena wabah tersebut, banyak negara-negara tujuan ekspor yang melakukan lockdown kurun waktu tersebut dan merupakan pasar andalan Sumatera Selatan, seperti China dan Amerika Serikat.

Gambar 2.102
Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020-2024, (US\$)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024 (data mutakhir)

Komponen ekspor dan impor memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada peningkatan capaian pertumbuhan ekonomi. Dari tahun 2020-2024, lebih dari separuh nilai ekspor Sumatera Selatan masih disumbang oleh produk-produk mentah dan setengah jadi, yaitu bubur kayu/pulp, karet, dan batubara. Namun sejak tahun 2024 nilai ekspor kembali meningkat. Hal ini juga memberikan dampak yang positif bagi nilai ekspor Provinsi Sumatera Selatan, walaupun di tahun 2023 ekspor Sumatera Selatan sempat mengalami penurunan sebesar 6,6 % dibandingkan tahun 2022, hal ini disebabkan oleh penurunan harga karet dunia yang berimbas pada penurunan ekspor karet Sumsel

Tabel 2.105
Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Jenis Komoditi Ekspor	Nilai FOB (Juta US\$)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karet Remah	1 114,13	1 577,23	-	-	-
Karet dan barang dari karet	704,00	1837,662	1048,107	1095,46	1349,77
Bubur Kayu/Pulp	1 082,16	1 210,29	1435,93	1282,92	1250,06
Batubara	579,69	1.547,14	3379	2872,5	-
Kertas Tisu	127,53	95,66	128	111,91	109,36

Jenis Komoditi Ekspor	Nilai FOB (Juta US\$)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Minyak Kelapa Sawit dan Fraksinya	137,5	212,85	322	432,46	264,65
Panel Kayu Lainnya	66,5	72,32	-		-
Kayu barang dari kayu	-	-	97	99,6	104,52
Pupuk	90,78	100,78	97	47,55	56,94
Karet Buatan	64,58	21,24	-	-	-
Bungkil dan Residu	16,31	22,41		42,71	53,11
Bahan kimia anorganik	-	-	66	26,4	25,08
Kimia dasar organic dari hasil pertanian	6,92	24,74	-	-	-
Produk Farmasi	18,7	18,35	29	-	-
Buah-buahan Tahunan	28,77	37,8	31	30,01	48,81

Sumber : Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Sumatera Selatan Tahun 2024, diolah (data mutakhir)

Nilai ekspor nonmigas Sumatera Selatan pada Tahun 2024 didominasi oleh komoditas karet dan barang dari karet yang mencapai nilai US\$ 1.349,77 juta, namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 didominasi ekspor komoditas batubara yang mencapai 2.87,5 juta . komoditas yang mengalami penurunan pada tahun 2024 adalah minyak kelapa sawit dan fraksinya sebesar 39 persen. Kemudian diikuti oleh komoditas bubur kayu/pulp sebesar US\$ 1.250,06 juta dan bahan kimia anorganik.

Tabel 2.106
Negara Tujuan Utama Ekspor Komoditas Sumatera Selatan

Negara Tujuan Utama Ekspor Komoditas					
Negara	2020	2021	2022	2023	2024
ASEAN		859,12	1713,27	1501,44	1598,05
Malaysia	322	299,7	538	477,13	455,95
Singapura	-	-	199	265,55	-
Philipina	-	70,88	277	261,87	307,83
ASEAN Lainnya		365,72	561,22	496,88	451,99
UNI EROPA		359,25	321,02	217,12	223,72
Jerman	61	82	-	39,29	30,90
Belanda		37,87	34,49	22,83	18,02
Belgia		33,73	53,94	21,73	-
Uni Eropa Lainnya		243,97	167,20	113,16	145,51
Negara Utama Lainnya		3394,65	4708,12	4349,25	4370,58
Tiongkok	1166	2080	2.324	2.634,15	2483,01
India	219	238	848	724,37	737,51
Korea selatan	146	131	326	494,52	516,65
Amerika Serikat	275	467	427	297,98	374,56

Jepang	49	110	337	198,22	258,85
Taiwan		140,85	153,64	124,25	-
Brazil	32	34	-	-	-
Thailand	55	106	262	-	-
Bangladesh	16	26	-	73,39	123,62
Vietnam	-	-	235	-	382,28
Lainnya	708	1111		1.023,61	1.004,57
Jumlah	3049	4684,7	5.773	6.585,52	6.723,04

Sumber : BPS Sumatera Selatan, 2024

Tujuan utama ekspor Sumatera Selatan pada tahun 2024 didominasi ke negara Tiongkok, Vietnam, Korea Selatan dan Philipina dimana masing-masing mencapai US\$250,01juta, US\$68,07 juta, US\$48,79 juta dan US40,84 juta. Kemudian jika dilihat dari Kawasan nilai ekspor ke negara ASEAN meningkat 22,63 persen atau US\$34,58 juta. Begitu juga ekspor negara Uni Eropa yang meningkat 29,19 persen atau US\$3,51 juta. Hal ini disebabkan peningkatan ekspor yang signifikan ke negara Vietnam, Filipina, Jepang dan Bangladesh serta kontribusi nilai ekspor paling besar diberikan oleh Tiongkok, India dan Korea Selatan.

Tabel 2.107
Nilai Impor beberapa komoditi Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018-2024

No	Deskripsi	NILAI CIF (Juta US\$)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mesin- Mesin/Pesawat Mekanik	450,17	414,91	283,64	628,54	1376,49
2	Pupuk	93,71	114,48	123,49	73,81	87,97
3	Benda-benda dari Besi dan Baja	33,26	23,65	20	47,03	63,60
4	Bubur Kayu/Pulp	11,78	23,47	23,02	20,46	28,61
5	Besi dan Baja	33,26	18,45	20,47	14,62	-
6	Plastik dan Barang Plastik	14,38	20,58	21,90	-	-
7	Mesin/Peralatan Listrik	166,57	76,91	61,59	23,19	121,25
8	Lokomotif dan Peralatan Kereta Api	32,95	63,04	83,92	40,18	35,63
9	Bahan Kimia Anorganik	16,64	17,81	-	-	-
10	Karet dan barang dari karet	11,03	34,53	66,15	82,79	62,87
11	Sereal	-	-	-	50,81	61,51

No	Deskripsi	NILAI CIF (Juta US\$)				
		2020	2021	2022	2023	2024
12	Barang dari batu, semen, dan peralatan mekanis dan bagiannya	-	16,94	17,97	40,21	-
13	Reactor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya	-	-	-	40,18	-
14	Kayu dan Barang dari kayu	-	-	-	0,53	62,64
15	Senjata dan Amunisi serta bagiannya	-	-	-	-	27,83
Total Gol Barang Utama		839,35	790,01	708,60	1.007,02	1.928,40
16	Lainnya	76,13	107,90	107,73	116,25	167,43
Total Impor Non Migas		915,49	897,92	816,33	1.123,26	2.067,83

Sumber : BPS Prov. Sumsel (data mutakhir)

Nilai impor non migas beberapa komoditi utama pada tahun 2023 secara umum mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2022. Dilihat dari peranan terhadap total impor nonmigas selama periode Januari-Desember 2023 mesin/pesawat mekanik memberikan peranan terbesar yaitu 628,52 Juta US\$, dan diikuti karet dan barang dari karet yang meningkat dari tahun 2022 menjadi sebesar 82,79 Juta US\$. Hal ini masih menjadi perhatian

7) Urusan Perindustrian

Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2024 merupakan sektor penyumbang PDRB (ADHB) tertinggi kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar Rp. 121.330,20 Miliar (18,35%). Kontribusi tertinggi pada Sektor Industri Pengolahan adalah subsektor Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar Rp. 62.762,76 Miliar dan subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas sebesar Rp. 22.515,25 Miliar .

Sentra IKM di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Tahun 2024 lebih banyak didominasi oleh industri-industri yang bergerak di bidang Pangan sebesar Rp. 270.574.864, Kimia dan Bahan Bangunan (KBB) sebesar Rp. 173.102.245, Industri Logam dan Jasa sebesar Rp. 107.672.292, Sandang Kulit dari Karet sebesar Rp. 35.109.338, serta Kerajinan dan Umum sebesar Rp. 19.643.273. Industri-industri ini sudah cukup lama berkembang dan dari awal memang berbasis

sumberdaya lokal dan sesuai dengan keterampilan tradisional turun menurun masyarakat setempat. Berbagai kegiatan dan pemberdayaan terhadap industri kecil skala rumah tangga telah lama dilakukan tidak hanya oleh Dinas Perindustrian dan jajarannya, melainkan juga oleh OPD yang terkait dengan produksi bahan bakunya, terutama untuk komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Produksi pangan olahan, pakan dan industri kecil primer lainnya cukup banyak yang telah dibantu dan diberdayakan oleh OPD hulunya.

Tabel 2.108
Jumlah Industri Kecil Formal di Sumatera Selatan Tahun 2024

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PANGAN			SANDANG DAN KULIT DARI KARET			KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN (KBE)			LOGAM DAN JASA			KERAJINAN DAN UMUM (KRALUM)			JUMLAH TOTAL PER KAB/ KOTA		
		UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)	UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)	UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)	UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)	UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)	UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PALEMBANG	688	5.087	18.922.620	327	3.366	8.908.707	558	4.010	14.626.171	584	3532	17.973.576	125	1.751	2.143.512	2.282	17.746	62.574.586
2	OGAN ILIR	425	2.272	20.793.550	147	1.429	3.149.100	197	706	15.326.175	175	1.591	7.192.470	105	375	3.968.600	1.049	6.373	50.329.895
3	OKI	1.637	8.475	40.895.620	381	2.429	6.114.500	857	4.116	18.246.600	249	681	8.244.300	266	1.452	3.982.725	3.390	17.153	77.483.745
4	BANYUASIN	318	2419	10.904.069	22	53	347.000	443	4.232	17.639.660	76	334	4.244.111	20	70	288.000	879	7.108	33.422.840
5	MUBA	330	1.111	6.219.800	108	297	1.896.150	570	2.443	18.358.066	656	1.343	15.097.740	23	56	500.000	1.687	5.250	42.071.756
6	PRABUMULIH	718	1.571	14.490.850	153	495	2.483.800	319	1.095	10.899.370	247	895	11.616.000	36	70	594.000	1.473	3.926	40.084.020
7	MUARA ENIM	775	2.251	14.524.030	103	263	1.910.000	286	1.333	13.618.811	215	610	7.098.466	79	279	2.879.550	1.458	4.736	40.030.857
8	OKU	111	526	1.881.605	16	88	377.154	316	1.572	9.014.310	109	424	2.744.245	12	47	139.500	564	2.657	14.156.814
9	OKU TIMUR	1.437	4.435	77.585.550	16	45	777.000	253	1.383	10.811.700	258	649	11.310.500	5	24	62.500	1.969	6.536	100.547.250
10	OKU SELATAN	507	1.291	13.035.500	17	74	509.050	107	539	4.671.000	89	237	2.908.000	3	11	54.000	723	2.152	21.177.550
11	LAHAT	466	1.588	17.660.000	32	104	905.000	201	1.438	15.694.500	177	637	5.888.000	32	100	515.170	908	3.867	40.662.670
12	PAGAR ALAM	378	1.261	5.376.500	27	49	646.500	5	15	313.000	66	163	1.787.500	138	496	1.270.800	614	1.984	9.394.300
13	EMPAT LAWANG	105	481	3.712.255	1	10	80.000	14	97	1.260.000	21	61	1.001.000	8	18	45.000	149	667	6.098.255
14	MUSI RAWAS	348	1.486	9.229.350	12	49	952.000	295	1.214	15.122.640	80	445	2.227.100	22	241	690.000	757	3.435	28.221.090
15	LUBUK LINGGAU	243	1.067	9.623.205	40	162	2.791.325	183	969	5.572.330	192	722	5.855.712	49	184	1.310.506	707	3.104	25.153.078
16	PALI	308	747	4.037.080	22	57	282.000	41	179	1.009.212	88	253	1.729.862	37	80	649.500	496	1.316	7.707.634
17	MURATARA	153	396	1.683.300	159	324	2.980.052	48	188	918.700	27	89	753.710	48	101	649.910	435	1.098	6.965.672
	JUMLAH	8.947	36.464	270.574.864	1.583	9.294	35.109.338	4.693	25.529	173.102.245	3.309	12.466	107.672.292	1.008	5.355	19.643.273	19.540	89.108	606.102.012

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB ADHB pertumbuhan lapangan usaha sektor Industri Pengolahan secara keseluruhan sebesar 3,91 persen, merupakan sektor terbesar kedua penyumbang PDRB Sumatera Selatan tahun 2024 setelah sektor Pertambangan dan Penggalian. Pada sektor Industri Pengolahan ini, sub sektor Industri Makanan dan Minuman merupakan sub sektor yang tumbuh tertinggi pertama yaitu sebesar 4,68 persen disusul sub sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional sebesar 4,62 persen, sub sektor Industri Pengolahan Tembakau sebesar 4,23 persen serta Sub sektor Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik sebesar 2,9 persen.

Berdasarkan analisa potensi, industri sandang yang mempunyai banyak ragam (songket, jumputan dan tajung) mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan sentuhan pembinaan pada IKM dan pengrajin-pengrajin serta promosi yang baik dengan didukung even-even olahraga berskala internasional dan

even pariwisata yang masif maka akan menaikkan angka pertumbuhannya.

Tabel 2.109
Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Industri
Pengolahan (Persen) Tahun 2020-2024

Industri Pengolahan/Manufacturing		2020	2021	2022	2023	2024
Lapangan Usaha		1.40	2.78	4.90	4.89	3.13
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-3.50	-0.16	7.67	8.77	-1,38
2	Industri Makanan dan Minuman	4.31	4.30	3.66	3.93	4,68
3	Industri Pengolahan Tembakau	0.67	2.07	2.63	8.05	4,23
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.72	1.03	1.88	2.99	2,04
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	1.05	1.20	2.93	3.06	2,27
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	0.23	0.72	3.12	2.44	1,62
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1.39	2.95	5.27	2.92	2,47
8	Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional	1.42	2.51	7.30	4.13	4,62
9	Industri Karet; Barang dari Karet dan Plastik	-0.52	2.36	4.64	1.58	2,9
10	Industri Barang Galian bukan Logam	0.18	1.02	3.56	3.07	2,18
11	Industri Logam Dasar	0.46	1.70	4.10	2.44	1,49
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	-0.06	1.95	3.74	0.75	0,78
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	1.86	1.22	1.52	1.77	1,6
14	Industri Alat Angkutan	1.23	1.22	3.85	2.28	2,74
15	Industri Furnitur	1.24	0.93	2.56	2.69	1,12
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1.83	0.79	1.76	2.48	1,72

Sumber : BPS Provinsi Sumsel Tahun 2020-2024

8) Urusan Transmigrasi

Penempatan transmigran di Sumatera Selatan telah berlangsung selama 80 tahun bila dihitung dari pertama kali Belanda/Kolonial melaksanakan kolonisasi, yaitu pada tahun 1937

hingga tahun 2017. Transmigran yang telah ditempatkan hingga tahun 2022 telah mencapai 993.996 jiwa yang terdiri dari 178.438 KK dan 734.045 jiwa dari Penempatteen Transmigrasi Asal (PTA) dan sebesar 57.510 KK dan 259.951 jiwa dari Penempatan Transmigrasi Setempat.

Tabel 2.110
Realisasi Penempatan Transmigran Tahun 2022

NO.	KABUPATEN	PTA		PTS		JUMLAH	
		KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA
1	Ogan Komering Ulu	6.016	25.461	2.986	13.385	9.002	38.846
2	Ogan Komering Ilir	26.182	104.894	12.324	55.560	38.506	160.454
3	Muara Enim	6.403	24.540	5.000	24.577	11.403	49.117
4	Lahat	6.313	26.538	2.831	12.103	9.144	38.641
5	Musi Banyuasin	24.872	107.464	13.908	61.565	38.780	169.029
6	Banyuasin	45.989	188.087	9.978	47.160	55.967	235.247
7	Musi Rawas	19.490	77.836	5.881	27.355	25.371	105.191
8	OKU Timur	42.017	174.889	3.272	12.629	45.289	187.518
9	OKU Selatan	0	0	300	1.208	300	1.208
10	Ogan Ilir	630	2.152	820	3.448	1.450	5.600
11	Empat Lawang	517	2.151	198	904	715	3.055
12	PALI	9	33	12	57	21	90
Jumlah		178.438	734.045	57.510	259.951	235.948	993.996

Sumber: Database Ketrasmigrasian Sumsel, 2023

Adapun kawasan transmigrasi yang tercatat di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 10 kawasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 111
Rencana Kawasan Transmigrasi yang Telah Ditetapkan
Di Provinsi Sumatera Selatan

NO	NAMA KAWASAN TRANSMIGRASI	KABUPATEN	NO PENETAPAN	LUAS KAWASAN (Ha)	JUMLAH KECAMATAN /DESA
1.	Belitang	Ogan Komering Ulu Timur	No. 9 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 No. 9 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016	109.617,61	13/151
2.	Telang	Banyuasin	No. 9 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016	83.136,19	4/30
3.	Karang Agung Ilir	Banyuasin	No. 91 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016	55.480,57	1/11
4.	Kikim	Lahat	No. 91 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016	165.549,48	6/92
5.	Parit Rambutan	Ogan Ilir	No. 104 Tahun 2017 Tanggal 3 November 2017	19.281,76	3/16
6.	Simpang Rimau	Musi Rawas	No. 118 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017	145.636,11	2/44

NO	NAMA KAWASAN TRANSMIGRASI	KABUPATEN	NO PENETAPAN	LUAS KAWASAN (Ha)	JUMLAH KECAMATAN /DESA
7.	PETATA (Penukal Abab, Penukal Utara Dan Talang Ubi)	Penukal Abab Lematang Ilir	No. 71 Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018	66.693,56	4/40
8.	Muara Kuang	Ogan Ilir	No. 115 Tahun 2018 Tanggal 5 Desember 2018	27.400	1/15
9.	Air Balui - Jud Nganti	Musi Banyuasin	No. 87 Tahun 2019 Tanggal 16 Agustus 2019	51.450	1/18
10.	Tulung Selapan	Ogan Komering Ilir	Masih dalam proses di Kementerian Desa, PDT DAN Transmigrasi	21.650	1/?

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel, 2022

Dari kawasan transmigrasi tersebut, terdapat 9 lokus kawasan transmigrasi prioritas yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi yaitu:

- 1) Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan Kabupaten Ogan Ilir
- 2) Kawasan Transmigrasi Telang Kabupaten Banyuasin
- 3) Kawasan Transmigrasi Kikim Kabupaten Lahat
- 4) Kawasan Transmigrasi Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin
- 5) Kawasan Transmigrasi Simpang Rimau Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas
- 6) Kawasan Transmigrasi Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir
- 7) Kawasan Transmigrasi Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 8) Kawasan Transmigrasi Petata Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 9) Kawasan Transmigrasi Air Balui-Jud Nganti Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain dukungan anggaran pemerintah provinsi yang masih minim, masih ada beberapa permasalahan yang krusial yang terjadi perihal masalah pertahanan dalam penyelenggaraan transmigrasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan antara lain kurangnya infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan permukiman di kawasan transmigrasi dan permasalahan sengketa pertanahan terkait transmigrasi. Sampai dengan tahun 2021, masih ada permasalahan sengketa pertanahan di 5 Kabupaten terdiri dari permasalahan tumpang tindih dengan HGU perusahaan di Kabupaten Lahat, Banyuasin dan Musi Banyuasin serta permasalahan tumpang tindih dengan kawasan hutan di Kabupaten OKI, Musi Banyuasin dan Musi Rawas. Hingga saat ini telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa pertanahan di lahan kawasan transmigrasi baik oleh Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota terkait dan Provinsi melalui upaya mediasi dan tinjauan ke lapangan.

Hak Milik Atas Tanah Transmigrasi yang berkekuatan hukum /berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Agraria/Badan Pertanahan Nasional belum seluruhnya diterima oleh warga transmigrasi, hal ini menjadi beban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Transmigran setiap tahun sangat rendah dikarenakan keterbatasan anggaran, sampai tahun 2021 beban tunggakan penerbitan SHM atas tanah transmigran dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.112
Beban Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

NO.	KABUPATEN	JUMLAH UPT	TARGET (PSL)	REALISASI (PSL)	SISA (PSL)	KET
1	MUSI BANYUASIN	84	106,751	102,872	3,679	-
2	BANYUASIN	131	169,966	168,986	980	-
3	OGAN KOMERING ILIR	97	99,748	98,095	1,653	-
4	MUSI RAWAS	68	49,859	47,430	2,429	-
5	OGAN KOMERING ULU	22	28,730	28,411	419	-
6	OKU TIMUR	138	144,595	142,727	1,868	-
7	LAHAT	39	31,202	29,206	1,996	-
8	MUARA ENIM	34	25,680	25,680	-	-
9	OGAN ILIR	9	5,050	4,411	639	-
10	OKU SELATAN	4	1,680	-	1,680	-
11	EMPAT LAWANG	4	1,279	1,246	33	-
12	PALI	3	1,378	766	612	-
13	PRABUMULIH	2	1,680	1,680	-	-
14	MUSI RAWAS UTARA	17	12,936	11,513	1,423	-
15.	LUBUK LINGGAU	1	300	300	-	-
	JUMLAH TOTAL	653	680,834	663,323	17,411	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Sumatera Selatan Tahun 2023

C. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Era reformasi telah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan melalui otonomi daerah, tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mencapai prestasi, khususnya dalam pelayanan publik, termasuk di bidang perencanaan.

Untuk memastikan mutu pelayanan yang dihasilkan, BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2015 menggunakan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang merupakan standar yang diakui secara internasional dan memiliki sertifikasi. Standar ini merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan mutu dalam menerapkan **Total Quality Control** yang mampu menjawab perkembangan globalisasi dimana tujuan akhirnya adalah mencapai efektifitas dan efisiensi organisasi. Sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 yang didapat BAPPEDA mulai tahun 2015 sampai dengan 2017 bukanlah suatu yang didapat dalam sekejap, namun hasil dari usaha perbaikan oleh semua pejabat maupun personil di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. Sertifikasi ISO 9001:2008 yang didapat BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan merupakan bentuk pengakuan dari pihak independen terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD.

Gambar 2.103
Sertifikat ISO yang diterima Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan adalah rangkaian proses kegiatan dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan, yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah mempunyai isu, karakteristik dan kapasitas yang berbeda dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan. Salah satu langkah untuk meningkatkan mutu rencana pembangunan adalah memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berhasil menyusun dokumen rencana pembangunan secara baik. Penilaian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi masing-masing daerah untuk meningkatkan mutu dokumen rencana pembangunan.

Penganugerahan Pangripta Nusantara kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terbaik bertujuan mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan; serta sekaligus menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu.

Pemberian Anugerah Pangripta Nusantara telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS sejak tahun 2011. Prestasi Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2011 : Provinsi Terbaik I (Penilaian RPJMD)
2. Tahun 2012 : Provinsi Terbaik III
3. Tahun 2013 : Provinsi Terbaik I APN Pratama Kelompok B
4. Tahun 2014 : Provinsi Terbaik II APN Utama Kelompok B
5. Tahun 2017 : Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik III
6. Tahun 2018 : Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik II
7. Tahun 2019 : Kategori Provinsi dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik III

2) Urusan Keuangan

Pada urusan keuangan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2022 kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan yang menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat akuntabilitas instansi pemerintah. Dengan demikian Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil memperoleh predikat WTP tersebut delapan tahun berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2022. Opini WTP ini merupakan penghargaan Tertinggi Akuntabilitas Keuangan dari Kementerian Keuangan RI.

3) Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Kepegawaian

Pada tahun 2024 Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Kepegawaian sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 pada OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin) merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Target nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 adalah 76 dengan realisasi kinerja 81,36 atau lebih tinggi 5,36 poin dari target

yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2023 sebesar 67,14 maka terdapat peningkatan sebesar 14,22 poin pada tahun 2024.

2. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) merupakan perbandingan dari Jumlah Pegawai (PNS) yang memiliki Pendidikan Tinggi (PT) ke atas berbanding dengan Jumlah Pegawai (PNS) yang memiliki Pendidikan SMA kebawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Capaian indikator kinerja ini adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA kebawah}} \times 100\% \\
 &= \frac{4.221}{662} \times 100\% \\
 &= 636,65\% \\
 &= \text{Capaian Kinerjanya } 636,65\% / 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

3. Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Capaian Indikator ini adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Pegawai PNS Fungsional (diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)}} \times 100\% \\
 &= \frac{746}{4.884} \times 100\% \\
 &= \text{Capaian Kinerjanya } 15,27\% / 9\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Target tahun 2024 sebesar 9% dengan realisasi sebesar 15,27%. Menunjukkan bahwa persentase Pegawai dengan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Prov. Sumsel meningkat dari sebelumnya pada Tahun 2023 sebesar 14,21% atau meningkat 1,06 persen poin.

4. Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) telah sesuai target, Tahun 2024 target 100% dengan realisasi 100%. Capaian Kinerja urusan Kepegawaian tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.113
Capaian Target Indikator Kinerja urusan Kepegawaian
pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian
1	Nilai IP ASN	%	76	81,36	100
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	636,65	100
3	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	9	15,27	100
4	Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100

Sumber : BKD Provinsi Sumsel, 2025

b. Pendidikan dan Pelatihan

Sedangkan Capaian kinerja urusan Pendidikan dan Pelatihan, pada OPD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial dari target 92% terealisasi sebesar 72% sehingga persentase capaian hanya mencapai 79%. Capaian yang hanya mencapai 79 persen, hal ini dikarenakan Pelatihan kepemimpinan masih belum menjadi syarat mutlak untuk menduduki jabatan struktural sehingga masih banyak pejabat yang telah menduduki jabatan tetapi belum mengikuti pelatihan kepemimpinan yang sesuai dengan jabatannya.
2. Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, dari target 80% terealisasi sebesar 82% sehingga capaiannya mencapai 102,5%. Hal ini juga dikarenakan adanya kegiatan kediklatan dengan menggunakan sumber dana APBD dan BLUD.
3. Persentase Peningkatan Program Pelatihan yang terakreditasi, Indikator ini diukur dengan cara membandingkan Jumlah Program Pelatihan yang mengalami peningkatan akreditasi pada tahun berjalan dibandingkan dengan total program pelatihan yang terakreditasi dikali 100%. Pada tahun 2024, terdapat 6 program akreditasi diantaranya Akreditasi Program

Pelatihan Barang/Jasa dari LKPP, Akreditasi Lembaga Pelatihan serta Akreditasi Program Pelatihan Manajerial dari LAN RI. Dari total 6 program akreditasi, terdapat 2 program yang mengalami peningkatan akreditasi yaitu sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Barang/Jasa dari LKPP dan Lembaga Pelatihan dari LAN RI.

Tabel 2.114
Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi	Ket.
1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	Persen	92%	72%	
2	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintah	Persen	80%	82%	
3	Persentase Peningkatan Program Pelatihan yang terakreditasi	Persen	15%	33%	

Sumber : BPSDMD Provinsi Sumsel, 2024

Urusan Pengawasan

Salah satu alat ukur akuntabilitas adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sejak tahun 2013 sampai tahun 2017, predikat SAKIP Provinsi Sumatera Selatan yang diterima terus meningkat dan dapat mencapai Kategori A. Tetapi pada Tahun 2018 terjadi sedikit penurunan Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Selatan. Hingga pada tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan tetap berupaya berkomitmen dan memperbaiki Capaian Nilai SAKIP agar dapat Kembali mencapai Kategori A.

Tabel 2.115
Nilai LKJIP (SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2022

Tahun	Nilai Angka	Kategori	Predikat
2013	68,20	B	Baik
2014	70,66	B	Baik
2015	75,11	BB	Sangat Baik
2016	76,19	BB	Sangat Baik
2017	80,01	A	Memuaskan
2018	78,71	BB	Memuaskan
2019	78,84	BB	Memuaskan
2020	78,98	BB	Memuaskan
2021	79,76	BB	Memuaskan
2022	78,06	BB	Memuaskan

Sumber : LKPJ Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel, 2022

Secara spesifik, peningkatan skor SAKIP dipengaruhi antara lain: (1) keterlibatan langsung pimpinan daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, melalui kegiatan telaah realisasi anggaran dan kinerja secara triwulanan yang semakin meningkat; (2) turunan (cascading) sasaran nasional ke dalam visi-misi organisasi sampai pada tingkatan terendah (indikator kinerja individu) telah diperbaiki; (3) penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan yang mulai optimal. Dimana 3 (tiga) hal tersebut harus dijadikan prinsip bagi Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai Predikat A pada SAKIP Provinsi.

4) Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kebutuhan akan lembaga Litbang IPTEK adalah sejalan dengan konstruksi pembangunan Sumatera Selatan yang dirancang berbasis Iptek. Keberadaan Balitbangda dan Perguruan Tinggi, diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi dan inovasi yang dapat digunakan untuk mendukung Perangkat Daerah Provinsi Sumsel dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan – kebutuhan pelaku usaha/dunia usaha. Berdasarkan data Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2023, Inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh sejumlah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Akademisi, Pelaku Usaha serta masyarakat umum berjumlah 226 Inovasi. Disamping itu Balitbangda, Perguruan Tinggi

dan lembaga litbang lainnya diharapkan dapat menjadi leading sektor dalam pengembangan iptek dan inovasi di Sumatera Selatan. Salah satunya dengan cara pemanfaatan Iptek sebagai penghela pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan pada Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Penghargaan sebagai Provinsi Terinovatif Tingkat Nasional dengan skor Indeks Inovasi Daerah 75,79.

Tabel 2.116
Capaian Indikator Kinerja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2024

No	Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
1	Hasil Litbang yang dimanfaatkan	7 hasil litbang	20 hasil litbang	6 hasil Litbang
2	Indeks Inovasi Daerah	70,49	83,29	75,79
3	Indeks Ekosistem Inovasi	2,80	3,40	-

Sumber data : Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan

Hasil-hasil riset dan pengembangan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan ekonomi. Untuk itu diperlukan diseminasi atau sosialisasi terhadap inovasi-inovasi yang telah dihasilkan oleh para inovator. Inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh sejumlah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Akademisi, Pelaku Usaha serta masyarakat umum sejak Tahun 2021 sampai dengan 2024 yang di publikasi melalui Podcast “*One Day One Innovation*” berjumlah 997 Inovasi.

Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Sejak pertengahan tahun 2019, telah memberlakukan Retribusi Pemakaian Laboratorium melalui Inkubator Teknologi di Balitbangda Prov. Sumsel. Pendapatan Retribusi Pemakaian Laboratorium pada tahun 2024 mencapai Rp. 5.275.000,-.

Tabel 2.117
Capaian Kinerja Inkubator Teknologi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2024

No	Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
1	Produk inovasi hasil Inkubasi	3	4	4
2	Tenant yang diinkubasi	3	4	4

Sumber data : Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan

a. Kebun Raya Siwijaya

Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan berlokasi di Jalan Patra Tani, Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Diresmikan pada tanggal 27 Juli 2018. Gubernur Sumsel meresmikan Kebun raya yang perencanaan pembangunannya telah dimulai sejak 2010 lalu turut menggandeng LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai rekan dalam pelestarian lingkungan.

Kebun Raya Sriwijaya dibangun diatas lahan seluah 100 hektar yang berupa lahan gambut basah. Kebun Raya Sriwijaya merupakan kebun raya pertama di Indonesia yang berlokasi di lahan gambut, sekaligus kebun raya terluas yang ada di Indonesia. Kebun Raya sriwijaya dibangun dengan dukungan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.485/Menhut-II/2012 tentang penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan penelitian dan pengembangan serta pendidikan lingkungan.

Untuk meningkatkan pelayanan Kebun Raya Sriwijaya Prov. Sumsel telah melakukan peningkatan dan penambahan sarana prasarana /fasilitasi yang ada baik dibidang penelitian, edukasi, dan wisata di Kebun Raya Sriwijaya Prov. Sumsel antara lain yaitu Rumah Pewarna Alami, Taman Tematik, Spot Foto, Perbaikan Sarana & Prasarana Penunjang Lainnya.

Sejak pertengahan tahun 2019, Kebun Raya Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan telah memberlakukan Retribusi Pelayanan di UPTB Kebun Raya Sriwijaya. Retribusi ini diperuntukan untuk beberapa fasilitas dan pelayanan yang ada di

Kebun Raya Sriwijaya. Pendapatan Retribusi Kebun Raya Sriwijaya pada tahun 2023 mencapai Rp. 9.611.000,-.

Gambar 2.104
Kebun Raya Sriwijaya



Tabel 2.118
Capaian Kinerja Kebun Raya Sriwijaya
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2024

No	Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
1	Tanaman koleksi Kebun Raya Sriwijaya	697	715	700
2	Tanaman Koleksi Herbarium	30 Spesimen	30 Spesimen	30 Spesimen

Sumber data : Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan

b. Science Techno Park (STP) Sumsel

Science Techno Park (STP) Sumatera Selatan merupakan revitalisasi *Agrotecnopark (ATP)* Palembang. *Science Techno Park (STP)* dikembangkan pada lokasi ATP I yang terletak di Desa Bakung, Kec. Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir seluas 100 hektar dan ATP 3 terletak di Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim seluas 14 hektar.

Science Techno Park (STP) diharapkan dapat menjadi Kawasan Peternakan Terpadu Berbasis Inovasi Teknologi, yang mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan industri pertanian, perkebunan dan peternakan yang berdaya saing.

Tabel 2.119
Capaian Kinerja Science Techno Park
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2024

No	Indikator	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
1	Inovasi/teknologi yang diidifusikan	3	4	4

Sumber data : Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan

UPTB *Science Techno Park* Provinsi Sumatera Selatan sejak pertengahan tahun 2019, telah memberlakukan Retribusi Pelayanan di UPTB *Science Techno Park* Provinsi Sumatera Selatan. Retribusi ini diperuntukan untuk beberapa fasilitas dan pelayanan yang ada di UPTB STP. Pendapatan Retribusi STP terus meningkat dan pada tahun 2023 pendapatan Retribusi mencapai Rp. 47.100.000,-.

5) Urusan Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan Pelayanan publik dan Aspirasi Masyarakat meliputi kegiatan; persiapan, pencatatan, dan mengatur penyampaian aspirasi langsung (Demonstrasi), tertulis, dan melalui media cetak dan elektronik kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2014-2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.120
Kegiatan Demo/Unjuk Rasa, Audiensi dan Aspirasi Tertulis
2014-2022

No	Kegiatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1.	Aspirasi tertulis	128	173	192	35	124	102	102	56	6	918
2.	Demo/ Unjuk rasa	26	33	25	24	22	25	25	38	26	244
3.	Audiensi	40	43	48	80	49	20	24	89	83	476

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Sejalan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, antara lain memberikan Pelayanan Administratif dalam hal ini memfasilitasi Rapat-Rapat Anggota DPRD berupa Pelayanan Persidangan berikut rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2014 s.d 2021 yang telah difasilitasi oleh Sekeratriat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.121
Rapat-Rapat Komisi dan Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2021

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rapat internal (kali pertemuan)	87	183	150	145	146	27	134	127
2.	Rapat Dengar Pendapat	3	49	16	25	9	27	10	41
3.	Rapat Kerja	75	227	117	124	41	0	89	103
4.	Rapat lintas Komisi	0	0	0	50	0	0	0	0
5.	Kunker Dalam Provinsi (dalam hari)	26	21	56	68	58	15	170	261
6.	Kunker Luar Provinsi (dalam hari)	85	152	112	128	143	17	118	99
7.	Rapat pansus	11	0	42	50	37	3	4	8
8.	Kunker Khusus	-	-	-	-	1	0	1	0
9.	Kunker Pansus	-	18	45	52	19	9	36	33

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2021 (data mutakhir)

Tabel 2.122
Rapat Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 s.d 2022

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Badan Musyawarah	8	9	9	11	13	9	7	9	6
2.	Badan Anggaran	10	8	9	9	11	12	7	9	11
3.	Badan Kehormatan	1	9	5	4	2	2	1	1	2
4.	Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi	6	11	7	10	7	5	5	17	15
5.	Rapat Pimpinan	30	30	31	51	21	44	15	11	9

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Tabel 2.123
Rapat Paripurna dan Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 s.d 2022

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rapat paripurna/Paripurna Istimewa	30	30	31	51	48	39	43	44	40

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Persentase Risalah Rapat yang Tepat Waktu

Persentase risalah rapat yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan selama tahun 2014-2022 diperoleh berdasarkan hasil Rapat-Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa yang telah dirangkum dalam bentuk risalah, selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk buku risalah rapat. Pencapaian indikator kinerja persentase risalah rapat yang tepat waktu dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Selatan dalam memfasilitasi Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa dimana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Realisasi capaian indikator kinerja persentase risalah rapat yang tepat waktu selama tahun 2014 – 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.124
Persentase Risalah Rapat yang Tepat Waktu Tahun 2014 – 2022

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase risalah rapat yang tepat waktu.	%	97,3	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Selama tahun 2014 s.d 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi penyelesaian sejumlah produk hukum dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.125
Fasilitasi Penyelesaian Produk Hukum Tahun 2014 – 2022

No	Produk Hukum	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Peraturan Daerah	21	11	18	21	8	8	12	13	7
2.	Keputusan DPRD	15	10	11	22	50	16	16	19	22
3.	Keputusan Pimpinan DPRD	7	11	7	9	6	4	7	8	6
4.	Keputusan Bersama	13	11	10	14	10	3	8	8	5
	Jumlah	56	43	46	61	74	31	43	48	40

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2023

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam pengeluaran. Data berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2014-2022 rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong

terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.126
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

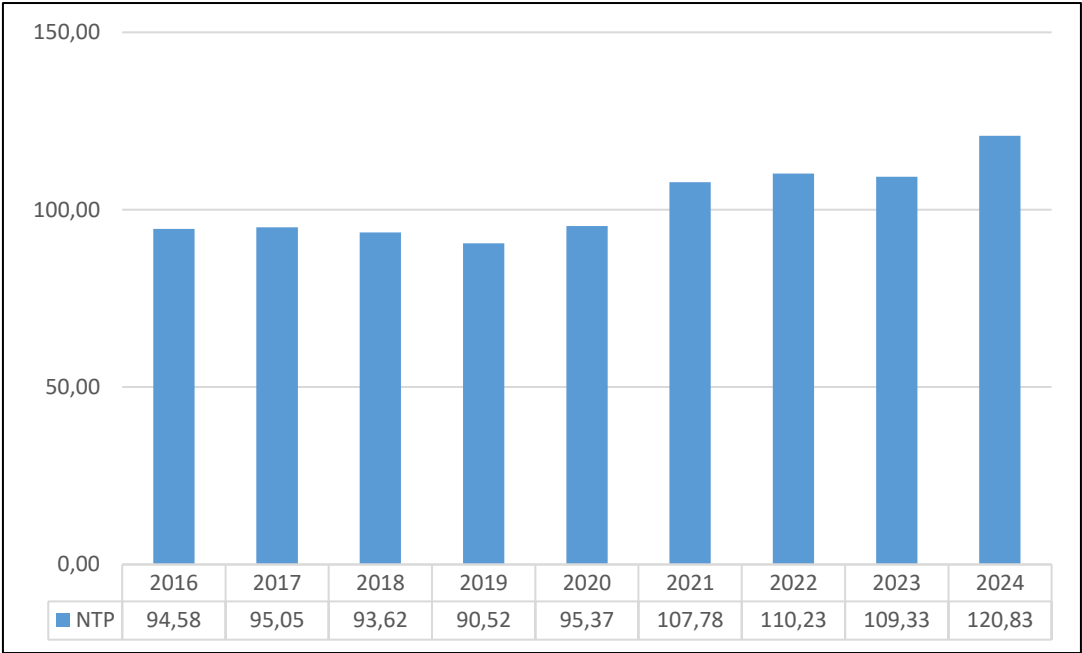
Total Konsumsi Rumah Tangga	2018	2019	2020	2021	2022
1. ADHB (Triliun Rp)	277,77	296,90	296,56	308,64	347,79
2. ADHK (Triliun Rp)	183,42	190,64	186,94	190,56	201,98
3. Proporsi thd PDRB ADHB (%)	66,23	65,45	64,69	62,58	58,79

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan indeks harga komoditas pertanian yang diproduksi oleh petani (It) terhadap indeks harga barang/ jasa yang dibayar petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di daerah perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*termtrade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani. Sebagian besar masyarakat Provinsi Sumatera Selatan adalah petani sehingga memerlukan perhatian agar Nilai Tukar Petani dapat terus meningkat. Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan indikator pengukur kemampuan tukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangganya dan untuk keperluan dalam memproduksi produk pertanian.

Gambar 2. 105
Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

NTP Umum Bila dilihat trennya pada 2016-2024 mengalami fluktuatif peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Di tahun 2024 NTP sebesar 120,83 naik dari tahun 2023 yang sebesar 109,33.

Sama halnya dengan capaian PDRB, program/ kegiatan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak secara langsung mengarah kepada indikator pencapaian kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) karena lebih kepada indikator kinerja utama (IKU) dinas berupa peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Untuk mencapai kinerja NTP tidak hanya dilihat dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura karena terdapat sub sektor lain berupa sub sektor perkebunan, peternakan, dan perikanan yang juga berpengaruh kepada capaian kinerja tersebut. Indeks harga yang dibayar petani berupa indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM).

1. NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
2. NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan

- persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
3. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relative lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 2.127
Perkembangan Nilai Tukar Petani

No	Sub Sektor	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	NTP Total (%)	107,78	110,23	109,33	128,53
2.	NTP Tanaman Pangan (%)	90,30	87,19	100,53	95,15
3.	NTP Hortikultura (%)	89,13	95,08	101,86	86,48
4.	NTP Perkebunan (%)	114,48	118,62	115,29	146,05
5.	NTP Peternakan (%)	102,93	104,92	99,45	101,36
6.	NTP Perikanan (%)	100,25	104,15	112,06	110,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pengeluaran per Kapita Non Makanan

Pengeluaran per kapita kelompok non makanan mengalami tren penurunan dalam kurun waktu 2018-2021. Selama tiga tahun terakhir, persentase pengeluaran per kapita non makanan lebih kecil daripada persentase pengeluaran per kapita untuk kelompok makanan. Persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan non makanan tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.128
Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Non Makanan Tahun 2018-2021

No	Pengeluaran Non Makanan	2018	2019	2020	2021
1.	Total Pengeluaran Per Kapita Sebulan Non Makanan	466.781	459.890	486.894	517.375
2.	Total pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan	970.078	958.819	1.022.030	579.031
3.	Rasio	48,12	47,96	47,64	89, 35

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan pergerakan dan aktivitas orang, barang dan jasa. Salah satu infrastruktur utama dalam menunjang aktivitas manusia maupun aktivitas perekonomian adalah jalan. Keberadaan infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta untuk menjamin aksesibilitas antar wilayah.

Total panjang jalan sampai dengan tahun 2022 sebesar 19.350,017 km, dengan komposisi Jalan Nasional sepanjang 1.580,69 km (8,17%), Jalan Provinsi sepanjang 2.113,747 Km (10,92%) dan Jalan Kabupaten/Kota sepanjang 15.655,58 Km (80,91%).

Tabel 2.129
Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di
Sumatera Selatan Tahun 2022

NO	KAB/KOTA	PANJANG	KONDISI JALAN PROVINSI							
			BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)
1	PALEMBANG	72,277	69,63	96,34	1,23	1,70	1,09	1,51	0,33	0,46
2	BANYUASIN	161,695	98,23	60,75	25,28	15,63	3,62	2,24	34,57	21,38
3	MUBA	39,850	36,45	91,47	3,00	7,53	0,40	1,00	0,00	0,00
4	OGAN ILIR	227,600	153,24	67,33	34,97	15,36	10,38	4,56	29,01	12,75
5	OKI	130,531	97,21	74,47	5,62	4,31	3,00	2,30	24,70	18,92
6	OKU	114,190	95,71	83,82	15,21	13,32	1,90	1,66	1,37	1,20
7	OKUT	261,260	229,04	87,67	23,52	9,00	5,35	2,05	3,35	1,28
8	OKUS	192,180	179,85	93,58	6,20	3,23	2,80	1,46	3,33	1,73
9	MUARA ENIM	227,910	117,70	51,64	21,58	9,47	11,68	5,12	76,95	33,76
10	PALI	186,000	167,50	90,05	13,50	7,26	2,90	1,56	2,10	1,13
11	PAGARALAM	14,100	5,70	40,43	6,70	47,52	1,30	9,22	0,40	2,84
12	LAHAT	83,170	71,15	85,55	12,02	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13	EMPAT LAWANG	153,160	108,52	70,85	33,86	22,11	5,48	3,58	5,30	3,46
14	MURA	142,645	81,05	56,82	9,60	6,73	8,60	6,03	43,40	30,43
15	MURATARA	93,560	78,36	83,75	7,60	8,12	0,20	0,21	7,40	7,91
16	LUBUKLINGGAU	13,619	13,619	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.113,747	1.602,959	75,83	219,890	10,40	58,700	2,78	232,210	10,99
% KONDISI			86,24 (JALAN DALAM KONDISI MANTAP)				13,76 (JALAN DALAM KONDISI RUSAK)			

Sumber: BBPJN III, Dinas PU Bina Marga Sumsel dan Data DAK Kab/Kota, 2023

Dilihat dari kondisi kemantapan jalan Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2018-2022 dapat dikatakan bahwa

kondisi jalan mantap mengalami Penurunan yaitu mencapai 86,24% (atau sepanjang 1.822,84 km) di tahun 2022, dikarenakan adanya penambahan ruas jalan baru sepanjang 600,094 Km dari jalan kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami rusak berat.

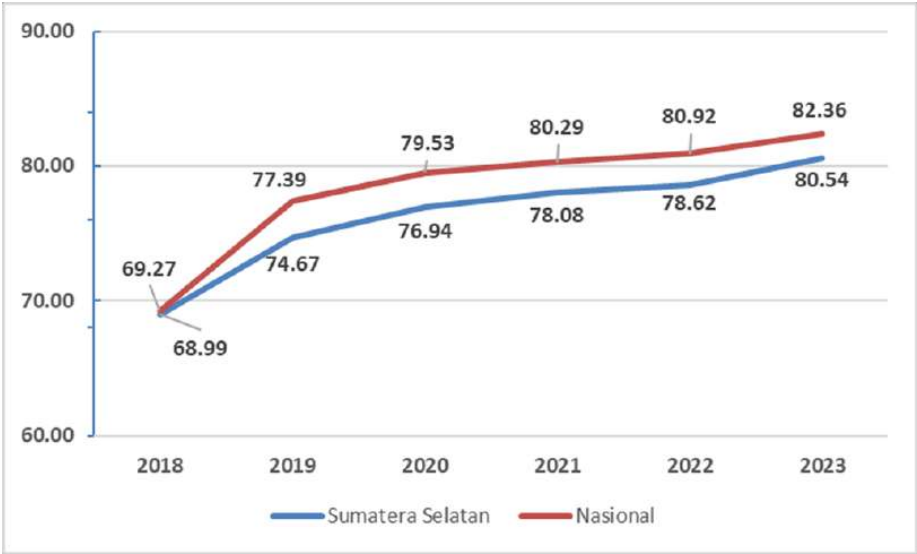
Rumah Tangga Bersanitasi

Akses sanitasi yang layak Provinsi Sumatera Selatan sebesar 80,54 persen pada tahun 2023. Kondisi lahan basah di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Selatan menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan sanitasi yang layak. Diperlukan biaya yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur sanitasi di daerah lahan basah dibandingkan di daerah lahan kering. Dengan memperhatikan kecenderungan capaian akses sanitasi layak selama ini, Pemerintah Sumatera Selatan harus memberikan perhatian khusus, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi layak, guna mencapai target RPD Sumatera Selatan pada tahun 2024 sebesar 80,62 persen.

Target nasional pada RPJPN untuk Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah) Aman pada tahun 2025 adalah sebesar 12,5% dan Timbulan sampah terolah di fasilitasi pengelolaan sampah sebesar 15 % (13 % terdaur ulang). Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan SPAL Regional.

Tantangan yang dihadapi yaitu meningkatkan keterpaduan penanganan sanitasi antar Kabupaten/Kota. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.

Gambar 2. 106
Persentase Akses Sanitasi di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018 – 2023



Sumber : BPS Sumsel, 2023

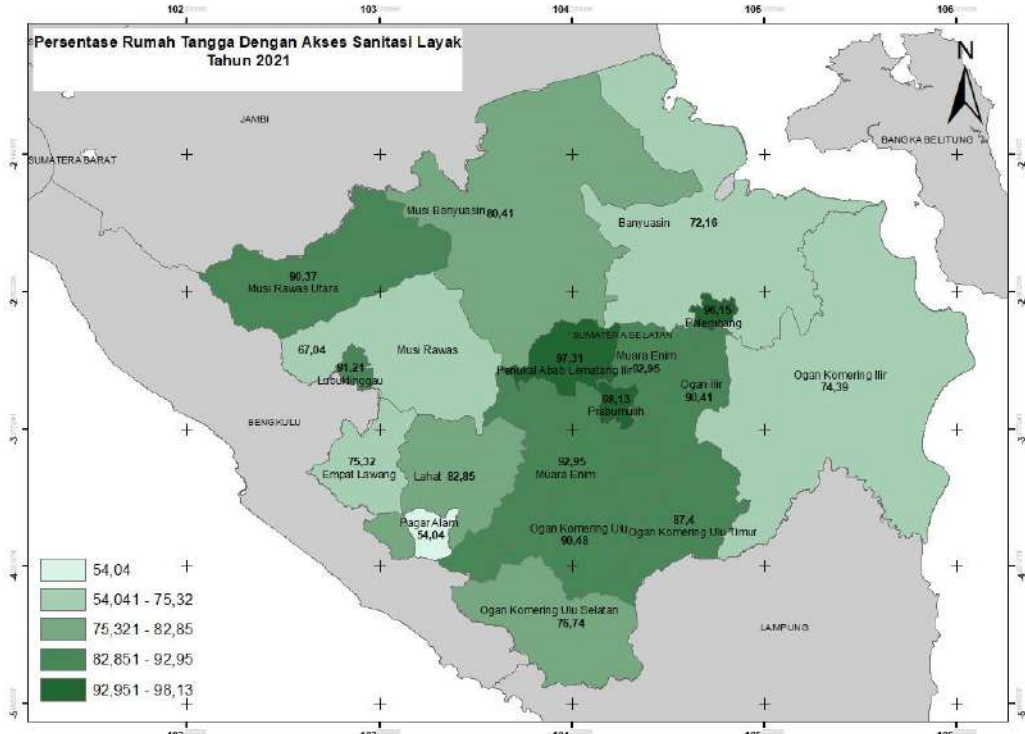
Tabel 2. 130
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak
Tahun 2016 – 2023

No.	Kabupaten/Kota	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	-(14)
1	Ogan Komering Ulu	76.29	80.15	82.94	84.39	80.78
2	Ogan Komering Ilir	67.48	74.72	68.93	63.95	69.73
3	Muara Enim	77.37	84.99	84.80	84.16	85.58
4	Lahat	66.06	69.34	70.52	70.35	70.19
5	Musi Rawas	71.41	71.78	69.34	73.69	74.50
6	Musi Banyuasin	72.41	74.85	71.81	80.71	83.52
7	Banyu Asin	64.63	73.06	72.12	72.80	74.53
8	Ogan Komering Ulu Selatan	57.95	53.86	57.68	57.54	63.20
9	Ogan Komering Ulu Timur	84.57	78.80	84.63	87.48	88.25
10	Ogan Ilir	70.92	73.28	68.52	71.55	76.17
11	Empat Lawang	58.36	57.60	53.52	66.93	67.81
12	Penukal Abab Lematang Ilir	89.29	90.49	94.38	89.40	95.22
13	Musi Rawas Utara	60.69	58.13	66.05	65.73	68.57
14	Kota Palembang	88.35	89.63	94.48	92.66	95.16
15	Kota Prabumulih	92.34	91.23	95.20	97.61	96.44
16	Kota Pagar Alam	58.91	52.71	58.20	62.11	61.28

17	Kota Lubuklinggau	87.58	85.87	85.85	87.64	86.05
Sumatera Selatan		74.67	76.94	78.08	78.62	80.54
Nasional		77.39	79.53	80.29	80.92	82.36

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Gambar 2.107
Peta Sebaran Capaian RT Akses Sanitasi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023



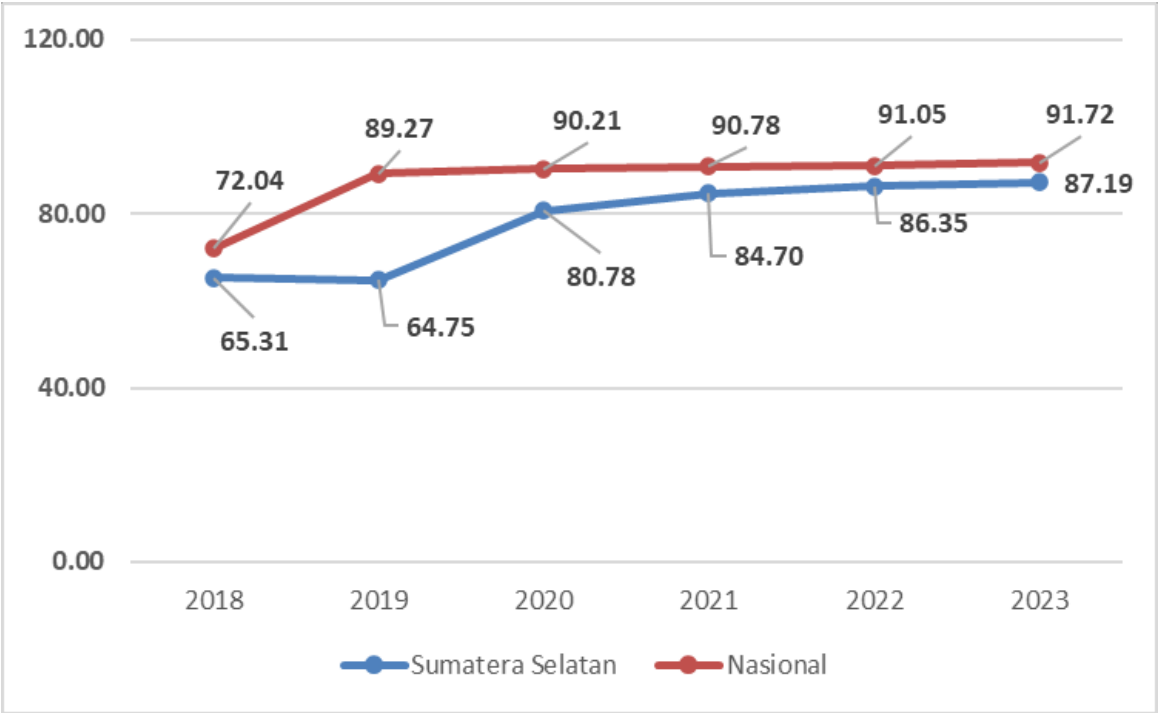
Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2023—diolah

Akses Air Bersih

Berdasarkan Data Susenas BPS, akses rumah tangga terhadap fasilitas air bersih layak di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2019 sebesar 64,75 persen menjadi 87,19 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023, akses capaian tertinggi dicapai Kota Lubuk Linggau sebesar 97,52% dan terendah di Kabupaten Empat Lawang sebesar 65,94%. Tantangan yang cukup berat untuk mencapai target RPD 2024- 2026 Sumatera Selatan di tahun 2025 sebesar 89,35 persen. Capaian nasional Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak pada tahun 2023 adalah sebesar 91,72 % dimana target yang harus dipenuhi pada akhir periode RPJMN 2020-2024 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pusat telah menentukan kegiatan prioritas strategis berupa Akses Air Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) dimana

pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha (*Sumber : RPJMN 2020-2024*). Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan SPAM Regional yaitu jaringan air bersih perpipaan yang melintasi dua Kabupaten/Kota dimana untuk pemenuhan kebutuhan domestik agar masyarakat menikmati air minum berkualitas. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu jarak antar kabupaten yang cukup jauh dan sebagian besar berupa hutan-hutan dan rawa.

Gambar 2.108
Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Sumsel, 2023

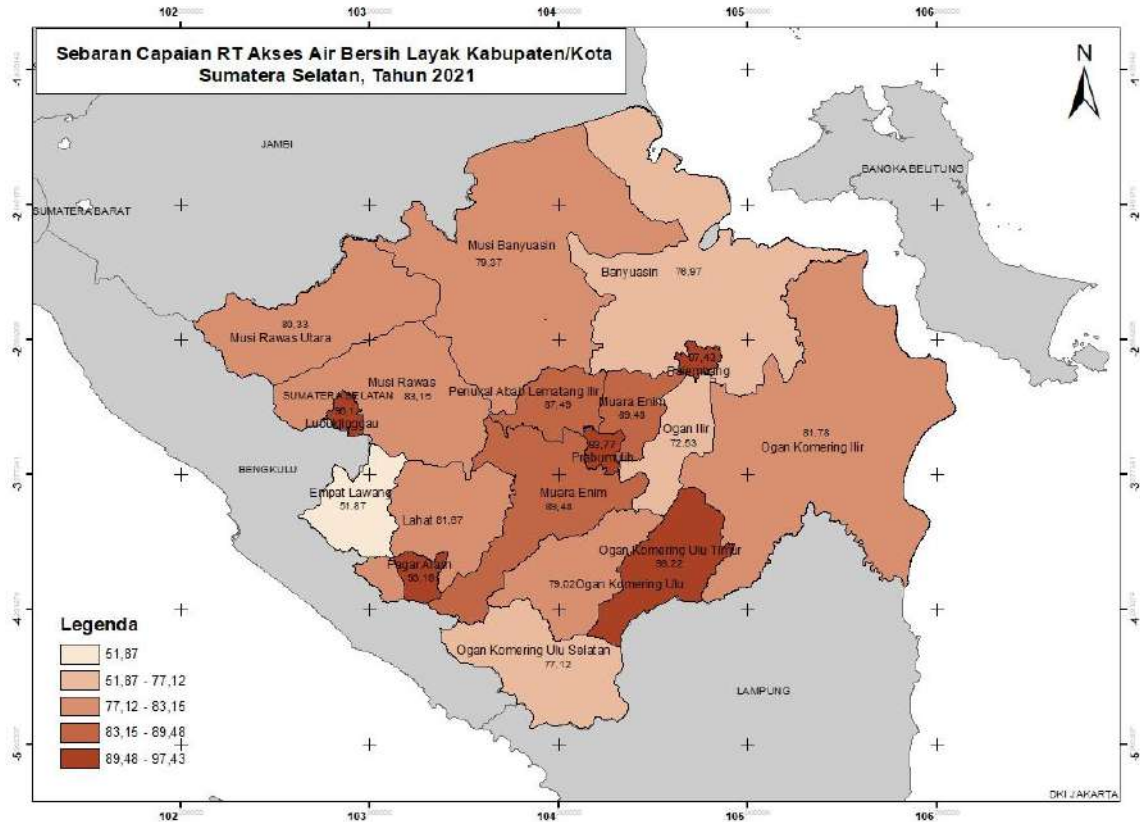
Tabel 2.131
Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016-2023

No.	Kabupaten/Kota	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	-(14)
1	Ogan Komering Ulu	67.69	78,98	81.78	82.76	82.33
2	Ogan Komering Ilir	55.67	84,23	79.02	78.52	80.59
3	Muara Enim	60.51	82,15	89.48	91.51	90.78
4	Lahat	47.57	67,44	81.67	84.35	86.16
5	Musi Rawas	67.10	77,08	83.15	93.22	89.34

6	Musi Banyuasin	64.32	84,72	79.37	81.75	85.58
7	Banyu Asin	72.21	70,38	76.97	78.25	80.66
8	Ogan Komering Ulu Selatan	42.77	67,75	77.12	76.52	80.18
9	Ogan Komering Ulu Timur	59.71	89,91	93.32	94.15	96.92
10	Ogan Ilir	55.33	73,08	72.53	71.88	75.10
11	Empat Lawang	21.28	31,41	51.87	64.85	65.94
12	Penukal Abab Lematang Ilir	63.14	83,90	87.49	85.78	91.18
13	Musi Rawas Utara	49.87	73,24	80.33	87.13	86.25
14	Kota Palembang	92.78	92,40	97.43	97.96	96.71
15	Kota Prabumulih	69.54	96,40	93.77	98.42	95.69
16	Kota Pagar Alam	51.78	88,95	93.16	85.76	88.58
17	Kota Lubuklinggau	62.50	97,10	96.10	96.41	97.52
Sumatera Selatan		64.75	80.78	84.70	86.35	87.19
Nasional		89.27	90.21	90.78	91.05	91.72

Sumber : BPS Sumsel, 2023

Gambar 2.109
Sebaran Capaian RT Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota
Sumatera Selatan, 2023



Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2022—diolah

C. Fokus Iklim Berinvestasi

Angka Kriminalitas

Tabel 2.132

Tingkat Kriminalitas di Sumatera Selatan Tahun 2015-2021

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kejahatan yang dilaporkan (<i>Crime Total</i>)	20.575	20.368	15.728	13.558	12.861	12.189	13.037
Jumlah Kejahatan yang diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	9.261	5.051	10.514	10.144	8.902	9.356	n/a
Persentase Penyelesaian Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>)	45,01	53,60	66,85	74,82	69,22	76,76	28,63
Resiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)	259	250	190	164	156	147	153
Jumlah kasus narkoba	1.207	1.443	1.640	1.768	1.621	2.554	4.055
Jumlah kasus pembunuhan	224	161	132	147	-	77	69
Jumlah kejahatan seksual	201	264	211	220	-	169	89
Jumlah kasus penganiayaan	2.629	2.734	2.528	2.043	-	1.708	1.253
Jumlah kasus pencurian	10.771	8.587	8.958	5.398	-	723	375
Jumlah kasus penipuan	3.086	2.939	2.828	1.127	-	1.989	1.768

Sumber : Statistik Kriminal, BPS RI 2022 (data mutakhir)

Selama periode 2015-2020 jumlah tindak kriminalitas di Sumatera Selatan cenderung menurun. Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2020 sebanyak 12.189 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 12.861 kasus. Selain itu, resiko penduduk terkena kejahatan (*crime rate*) juga mengalami penurunan, dari 156 pada tahun 2019 turun menjadi 147 pada tahun 2020. Untuk data tahun 2021 akan rilis pada bulan Desember 2022 mendatang.

D. Fokus Sumberdaya Manusia

Berdasarkan data, penduduk Sumatera Selatan tidak banyak yang mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA ke atas. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi penduduk lulusan SMA ke atas yang angkanya masih dibawah 25 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada persentase penduduk lulusan SD.

Kualitas Tenaga Kerja

Tabel 2.133
Tingkat Pendidikan Penduduk di Sumatera Selatan
Tahun 2017-2022

Ijazah yang dimiliki	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tidak Mempunyai Ijazah	15,17	17,59	16,33	15,32	13,63	12,72
SD/MI	32,78	28,12	28,14	27,00	27,87	27,96
SMP/MTs	21,68	20,99	21,39	20,83	21,18	20,44
SMA/MA	20,94	22,96	22,79	25,32	26,24	27,82
SMK/MAK	3,10	3,09	3,29	3,38	2,92	2,67
Diploma I/II	0,33	0,48	0,43	0,36	0,28	0,29
Akademi / DIII	1,39	1,63	1,46	1,47	1,28	1,49
Diploma IV/S1/S2/S3	4,31	4,59	5,74	6,33	6,57	6,57

Sumber : BPS Sumatera Selatan, 2022

Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tabel 2.134
Tingkat Ketergantungan Penduduk di Sumatera Selatan
Tahun 2016-2022

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio)	50,22	49,66	49,35	49,22	48,93	48,11	47,51
Persentase Penduduk Kelompok Umur 0- 14	29,17	28,73	28,47	27,10	26,68	26,93	26,54
Persentase Penduduk Kelompok Umur 15-64	66,57	66,82	66,96	67,62	67,99	67,52	67,79
Persentase Penduduk Kelompok Umur +65	4,26	4,46	4,57	5,27	5,33	5,56	5,67

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS RI (data mutakhir)

2.1.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Setelah berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs), dibentuklah agenda 2030 atau yang dikenal sebagai TPB/SDGs dimana agenda pembangunan ini lebih komprehensif dan inklusif dengan target yang lebih progresif. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda universal yang disusun bersama untuk menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menyusun rencana pembangunan yang mempunyai rencana rinci guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, menjaga keberlangsungan kegiatan sosial masyarakat, pemeliharaan kualitas lingkungan hidup serta keadilan dan pelaksanaan

tata kelola yang terjamin agar kualitas hidup dari generasi ke generasi meningkat.

Berdasarkan Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menyatakan bahwa dekade aksi (decade of action) pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah memasuki 10 (sepuluh) tahun sehingga diperlukan upaya percepatan pencapaian target oleh seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah, maka Indonesia mengadopsi dan menjadikan TPB/SDGs sebagai agenda pemerintah dalam perencanaan pembangunan nasional. Pada tingkat nasional, agenda TPB/SDG telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi 17 tujuan, 92 target dan 209 indikator, sebagai hasil penyesuaian agenda TPB/SDGs dengan indikator pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Adapun pelaksanaan SDGs yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota terbagi sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilandaskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.

Gambar 2.110
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals
(TPB/SDGs)



Sumber : Seknas SDGs

Program TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

Rencana Rencana Aksi (RAD) untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019-2023, yang mencakup 17 tujuan dengan 91 target dan 252 indikator. Indikator-indikator yang terkandung di dalamnya merupakan hasil penyelarasan agenda TPB/SDGs dengan indikator-indikator pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

Merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemantauan dan evaluasi merupakan langkah penting untuk memastikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tercapai seiring berjalannya waktu. Bagian integral dari siklus implementasi bagi seluruh pemangku kepentingan SDGs.

Kegiatan monitoring atau pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksanaan TPB/SDGs. Hal ini telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 dalam pasal 7 butir b tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan dalam hal pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs telah diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut yang menyatakan bahwa setiap Menteri atau Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN atau Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional.

Pemantauan dan Evaluasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dilaksanakan oleh instansi pelaksana dan termasuk program dan kegiatan yang dibiayai baik oleh APBN maupun APBD. Pemantauan dan Evaluasi RAD TPB/SDGs ini mencakup 17 tujuan dengan 95 target yang diukur dengan 249 indikator. Kemudian keseluruhan tujuan target dan indikator ini dikategorikan ke dalam empat pilar, yaitu Pilar Sosial sebanyak 32 target dan 95 indikator, Pilar Ekonomi sebanyak 25 Target dan 59 Indikator, Pilar Lingkungan sebanyak 29 target dan 69 indikator serta Pilar Hukum dan Tata Kelola sebanyak 9 target dan 23 indikator.

Pada penilaian capaian SDGs ini, diukur dengan tiga kategori dengan simbol warna sebagai berikut;

Tabel 2.135
Kategori Penilaian SDGs

Simbol	Keterangan
	Tercapai
	Akan Tercapai/ Membaik
	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus

Gambaran umum capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan per Pilar berdasarkan Laporan RAD SDGs tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut.

Tujuan 1.
Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Tabel 2.136
Capaian per Indikator TPB Tanpa Kemiskinan Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	12,84 (Mar 2021) 12,79 (Sept 2021)	11,94% - 12,77%	11,90 (Mar 2022) 12,95 (Sept 2022)	
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansi bagi kelompok miskin dan rentan.							
1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS; Dinas Kesehatan	%	80	90.00	85.2	
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS Ketenagakerjaan	%	n.a	64.00	-	
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	Orang	330	275	-	
1.3.1.(d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan	Dinas Sosial	Keluarga	331.351	317,215	-	

	bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.		Penerima Manfaat (KPM)				
1.3.1.(e)	Presentase Masyarakat Miskin Menerima Rastra/BPNT	BPS	%	20,92	65.70	-	▼
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan. (40% Terbawah)	BPS	%	66	71.27	82,92	●
1.4.1.(b)	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. (40% Terbawah)	DINAS KESEHATAN	%	62,7	52.80	71.3	●
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (40% Terbawah)	BPS	%	71,38	73.82	70,88	●
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. (40% Terbawah)	BPS	%	73,85	60.87	75,85	●
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (40% Terbawah)	BPS	%	66,54	62.14	78,46	●
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (40% Terbawah)	BPS	%	60,45	57.09	57,95	●
1.4.1.(j)	Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran (40% Terbawah)	BPS	%	87,98	85.22	87,99	●
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (40% Ke Bawah)	BPS	%	98,64	100.00	98,87	▶
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000.	Badan Penanggulangan	Jiwa	-	PM	5.788	●

		Bencana Daerah					
1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten / Kota	17	17	17	●
1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial/ BPBD	Orang	PM	1000	6215	●
1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Dinas Sosial/ BPBD	Orang	PM	50	PM	●
1.5.1 (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Dinas Pendidikan/ BPBD	Kabupaten / Kota	PM	8	PM	●
1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks resiko	139,24	118.11	137.31	●
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	2	●
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.							
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BAPPEDA	Rupiah	170M	1.882T	70.048.608.059	▶
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BAPPEDA	Rupiah (Juta Fungsi Pendidikan)	3.457.560	3,314,721	-	▼
			Rupiah (Juta Fungsi Kesehatan)	709.757	996,26	-	
			Rupiah (Fungsi Perlindungan Sosial)	-	116,440	-	
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 1.c Peningkatan Aset Masyarakat Miskin							
1.c.1	Kepemilikan Aset (emas, perahu, motor)	BDT	RT	PM	PM	-	▼
1.c.2	Rumah Tangga Layak Huni penduduk miskin	BDT	RT	PM	PM	-	▼
Target 1.d Peningkatan Daya Beli Masyarakat Miskin							
1.d.1	Pengeluaran konsumsi perkapita per tahun	BPS	Rp (Ribu)	12.434 (Mar 2020) 11.894	11,134	13,157	●

				(Sept 2020)			
1.d.2	Besaran Garis Kemiskinan	BPS	Rp	439.041 (Mar 2020) 441.259 (Sept 2020)	451,368	457.455 (Mar 2021) dan 463.251 (Sept 2021)	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 27 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 17 indikator atau 63 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 3 indikator atau 11 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (▶), dan 7 indikator atau 26 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau perubahan negative atau memburuk (▼).

Tabel 2.137
Capaian TPB Tanpa Kemiskinan Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	27	17	3	7

Tujuan 2.
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 2 Tanpa Kelaparan yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.138
Capaian Per Indikator TPB Tanpa Kelaparan Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>Base line</i>) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	SSGI 2022	%	15.7	16.4	14.8	●
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	BPS	%	-	4.01	-	Tidak relevan
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	SSGI 2022	%	24.8	26	18.6	●
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Dinkes	%	20.8	7.6	2.6	Belum rilis SSGI
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/wasting(berat badan/tinggi badan)anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	SSGI 2022	%	7.6	7.4	6.9	●
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan	%	7.85	18.9	6.25	●
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	BPS; Dinas Kesehatan	%	59,17	68		
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan Tingkat konsumsi ikan	Dinas Ketahanan Pangan	skor	86,1	97.8		
Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang telah disepakati secara internasional.							
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Varietas/Bibit	2	2		Tidak relevan

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 2 Tanpa Kelaparan di atas, semua indikator sudah tercapai dan diatas target Provinsi. Dari 9 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 4 indikator atau 44 persen yang dilaksanakan tercapai (●), sedangkan 5 indikator perlu perhatian khusus (▼) karena tidak ada data capaian dan 1 indikator belum rilis data tahun 2022.

Tabel 2.139
Capaian TPB Tanpa Kelaparan Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai / Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	9	4	0	5

Tujuan 3.
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 3 Kehidupan sehat dan Sejahtera yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.140
Capaian Per Indikator TPB Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian Ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Jumlah Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	Kasus	131	112	131	●
3.1.2*	Proporsi Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses melahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga esehatan terlatih	BPS; Dinas Kesehatan	%	93.87	98		
3.1.2.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	%	94	94,00		
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.2.1*	Jumlah Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Kasus	31	42	552	▼
3.2.2*	Jumlah Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Kasus	411	525	430	●

3.2.2.(a)	Jumlah Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Orang	502	416	513	▼
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	%	88.9	95	100	●
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	%	0,24	0,20	0,18	●
3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	%	162/ 100.000 penduduk	341/ 100.000 penduduk	209/ 100.000 penduduk	●
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	API per 1000 penduduk	0,0000034	<0,25	0.004	●
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Kabupaten/Kota	11	11	15	●
3.3.4 (a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	●
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan	Juta orang (Filariasis)	108	0	0	●
			Orang (Kusta)	223	0	0	
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Dinas Kesehatan	Kabupaten/ Kota	17	17	17	●
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	Kabupaten/ Kota	17	17	17	●
3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	PSG 2017; RISKESDAS 2018	%	25	9,1	1,5	●
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	Kabupaten/ Kota	17	17	17	●
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.							
3.5.1.(a)	Jumlah penyalah guna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitas medis.	BNNP Sumatera Selatan	Orang	1282	435	891	●
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	BNNP Sumatera Selatan	Orang	25	146	80	▶
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	BNNP Sumatera Selatan	Orang	828	195	775	●

3.5.1 (d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahguna-an NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	BNNP Sumatera Selatan	Lembaga	11	12	14	●
3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNNP Sumatera Selatan	%	1,95*	1,2	5	▼
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	SUSENAS BPS	Liter per Kapita	-	PM	-	-
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	SDKI 2017; BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	%	-	39,17	-	
3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	SDKI 2017; BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	%	-	23,47	62,60	●
3.7.1 (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	SDKI 2017; BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	%	-	69,65	-	
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	SDKI 2017; BKKBN Perwakilan Prov Sumsel	Kelahiran per 1000 perempuan 15 - 19 Tahun	-	21	32,60	▼
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	SDKI 2017; BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah anak per WUS (15 - 49 tahun)	-	2,27	2,38	▼
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
3.8.1 (a)	Unmet need pelayanan kesehatan	BPS	%	3,32	10,59	4,7	●
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk.	Dinas Kesehatan; BPJS	%	100	100	89,39	▼
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan; BPJS	%	85,2	95,00	89,39	▶
Target 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.							
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	%	30,65	PM	30,49	●

Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								
3.b.1 (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Dinas Kesehatan	%	84	PM	95	●	

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 33 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 20 indikator atau 60,61 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 3 indikator atau 9,09 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (▶), dan 10 indikator atau 30,30 persen yang perlu perhatian khusus karena tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai (▼), sedang terdapat 3 indikator yang tidak tersedia datanya.

Tabel 2.141
Capaian TPB Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2022

No	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk / Perlu Perhatian Khusus
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	33	20	3	10

Tujuan 4.
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayati

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.142
Capaian Per Indikator TPB Pendidikan Berkualitas Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1 (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Kemendikbud	%	62,8	PM	75,10	●
4.1.1 (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Kemendikbud	%	42,04	PM	66,01	●
4.1.1 (c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Kemendikbud	%	35,89	84,60	73,20	►
4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	BPS	%	111,39	PM	112	●
4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	BPS	%	89,44	PM	89,41	●
4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.	BPS	%	82,30	89,12	81,11	▼
4.1.1 (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	Tahun	8,78	8.88	8,82	►
4.1.1 (h)	Angka Harapan Lama Sekolah	BPS	Tahun	12,54	13.19	12,55	►
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Kemendikbud	%	24,24	PM	25,08	●
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.							
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.	BPS	%	82,30	89,12	81,11	▼
4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS	%	26,32	36,50	26,31	▼
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.							
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS	% remaja (15-24)	90,45	71,15	92,77	●
			% remaja (15-59)	62,59	39,90	69,12	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak- anak dalam kondisi rentan.							
4.5.1*	Rasio Angka Parti- sipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/sedera jat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/ SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/ laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	BPS					●
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SD/ MI/ sederajat		%	99,66	102,49	99,71	►
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SMP/ MTs/ sederajat		%	101,86	101,00	104,24	●
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SMA/ SMK/MA/ sederaja		%	110,89	103,5	104,95	●
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/ laki-laki di (4) Perguruan Tinggi		%	107,98	116	135,61	●
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	%	98,78	98.94	98,12	▼
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.						►
		BPS	Persen (umur 15-24 tahun)	99,95	100.00	99,95	►
			Persen (umur 15-59 tahun)	99,65	99,67	99,5	▼
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
4.c.1	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	Kemendikbu d					►
	(1) Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik.		%	1,6	PM	1,80	●
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	(2) Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik.			31,3	PM	29,00	▼
	(3) Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik.			30,5	PM	28,70	▼
	(4) Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik.			34,8	99,30	32,90	▼
	(5) Persentase guru SMK yang bersertifikat pendidik.			24,2	95,20	75,80	►
	(6) Persentase guru PLB yang bersertifikat pendidik.			27,3	91.70	23,50	▼

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 4 Pendidikan yang Berkualitas pada tahun 2022 di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 16 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 7 indikator atau 43,75 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 5 indikator atau 31,25 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►), dan 4 indikator atau 25,00 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai (▼).

Tabel 2.143
Capaian TPB Pendidikan Berkualitas Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai /Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	16	7	5	4

Tujuan 5
Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Perempuan

Secara umum capaian indikator TPB untuk tujuan ke-5 Kesenjangan Gender yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.144
Capaian Per Indikator TPB Kesenjangan Gender Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base Line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DPPPA	Dokumen	62 (Perda, Pergub, Edaran Terkait PPPA)	55	67	●
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DPPPA	%	0,006	Menurun	0.008	▼
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							

5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	SUSENAS BPS;	% (sebelum umur 18 thn)	12,24 (Susenas, BPS)	Menurun	11,42	•
			% (sebelum umur 15 thn)	0,00	Menurun	0,00	
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	BKKBN dan BPS	Thn	-	>20	21,3 (2017 20,6 (2022,BKKBN Sumsel)	•
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).	BPS	kelahiran per 1000 perempuan umur 15-19 thn	-	21,00	36,50	▼
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	SUSNES ;BPS	%	82,30	88,12	81,11	▼
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	BPS	%	21,33 (DPRD PROV)	Meningkat	21.33	•
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BPS	%	31,15 (BPS)	30	21.33	•
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.							
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base Line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	BPS	%	Data belum tersedia karena sumber data hanya melalui SDKI (SDKI baru akan dilaksanakan tahun 2022)	39,17	61,40	N/a
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	BKKBN dan BPS	%	12,6 (Hasil Estimasi menggunakan <i>baseline</i> data trend <i>unmet need</i> SKAP 2016 - 2019)	7.51	14,0 (2022, BKKBN Sumsel)	▼
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	BPS	%	Data belum tersedia karena sumber	98.8	99,70	N/a

				data hanya melalui SDKI (SDKI baru akan dilaksanakan tahun 2022)			
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	KEMHU KHAM; BKKBN; Kementrian Kesehatan; kpppa; Kemdikbud	Dokumen	0 (Sumber website peraturan.go.id yang dikelola Kemkumham RI)	1,00	1,00	●
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base Line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	BPS	%	64,53	66,00	66,25	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB tujuan kelima Kesetaraan Gender di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 13 (tiga belas) indikator yang dilaksanakan, sebanyak 7 (tujuh) indikator atau 53,84 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 6 (enam) indikator atau 46 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai (▼).

Tujuh indikator dari tujuan kelima Kesetaraan Gender yang tercapai adalah: Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan Perempuan, Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun, Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun, Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah, Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial, Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan

reproduksi dan indikator Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.

Empat indikator yang perlu perhatian khusus atau tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai, adalah: Prevalensi kekerasan terhadap anak Perempuan, Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR), Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat dan indikator Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). Sedangkan 2 (dua) indikator yang data capaian Tahun 2022 tidak tersedia adalah: Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi dan Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. Capaian kedua indikator tersebut tersedia terakhir di Tahun 2017 dan diperoleh berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang diselenggarakan oleh BPS. Selanjutnya, BPS tidak menyelenggarakan SDKI untuk periode berikutnya sehingga capaian kedua indikator tersebut tidak tersedia.

Tabel 2.145
Capaian TPB Kesetaraan Gender Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	13	7	0	6

Tujuan 6.
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.146
Capaian Per Indikator TPB Air Bersih dan Sanitasi Layak
Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2022	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	BPS	%	86,35	86,91	87,19	●
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	%	-	PM	-	▶
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2022	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Susenas Kor, BPS	%	75,28	PM	75,24	▼
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Susenas Kor, BPS	%	70,82	90,26	78,62	▶
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Desa/Kelurahan	2.854	3.008	285	▼
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan(SBS).	Dinas Kesehatan	Desa/ Kelurahan	2.077	1.741	2.216	●
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kab/ Kota	7	7	16	●
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	%	2,28	PM	1,35	▶
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kab/ Kota	9	12	9	▶
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	%	3,91	4.91	0,48	▶
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	DLHP	Danau Prioritas	1	1	1 (Danau Ranau)	●

6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DLHP	% Sungai Kelas II	52	30	51,3	●
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.							
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	BPDAS dan Dinas Kehutanan	RPDAST	1 DAS (DAS Musi)	148	1 DAS (DAS Musi)	►
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2022	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	PSDA, BMKG	Stasiun	53 (25 Stasiun Hidrologi, 28 Stasiun Klimatologi)	2	49 (23 Stasiun Hidrologi, 26 Stasiun Klimatologi)	●
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	DLHP	Unit (Onlimo)	2	1	2	●
6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara/Lintas Provinsi/Lintas Kabupaten.	DLHP		3	27	3	►
6.5.1.(g)	Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	DLHP	Lembaga	3	3	3	●
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	DLHP	DAS	4	6	0	▼
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.							
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	DLHP	Danau	1	1	1 (Danau Ranau)	●
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kuraang dari 1%.	DLHP	Danau	1	1	1 (Danau Ranau)	●
6.6..1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	DLHP	Danau	3 (Danau Ranau, Danau Suji, Danau Rayo)	3	3	●
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Kehutanan	ha	-	250.000	0	▼
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	DLHP	DAS	4	6	0	▼

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 23 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 12 indikator atau 52,17 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 4 indikator atau 17,39 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau memperbaiki (►), dan 7 indikator atau 30,43 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau perubahan negative atau memburuk (▼). Dari 7 indikator yang

memerlukan perhatian khusus terdapat 4 indikator yang tidak ada data capaian.

Tabel 2.147
Capaian TPB Air Bersih dan Sanitasi Layak Tahun 2023

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai / Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	23	12	4	7

Tujuan 7
Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.148
Capaian Per Indikator TPB Energi Bersih dan Terjangkau Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	DESDM	%	98.71	99,79	99,90	●
7.1.1(a)	Konsumsi listrik per kapita.	DESDM	Kwh	1.401	1.687	1.470,77	►
7.1.1.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	DESDM	%	94,16	93,67	96,44	●
Target 7.2. Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.							
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	DESDM	%	20.82	21,00	23,14	●
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.							
7.3.1*	Intensitas Energi Primer.	DESDM	SBM (setara barrel minyak)	PM	PM	PM	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 5 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 4 indikator atau 80,00 persen yang dilaksanakan tercapai (●), dan 1 indikator atau 20,00 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►)

Tabel 2.149
Capaian TPB Energi Bersih dan Terjangkau Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	5	4	1	0

Tujuan 8.
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.150
Capaian Per Indikator TPB Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan
Ekonomi Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>Base line</i>) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
8.1.1.*	Laju pertumbuhan PDRper kapita.	BPS	%	2,28	7,26	3,94	►
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	Rp.	54.487	59.087	68.338	●
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	1,39	5,2	2,53	►
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1 *	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS	%	48,20	42,8	45,10	●
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	BPS	%	35,84	49.15	36,72	►
8.3.1 .(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	BPS	%	83,70	75	84,24	●
Target 8.5: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki- laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	Rupiah	15.072	14.104.65	15.978	●
8.5.2*	Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok :						●
	- laki-laki	BPS	%	4.84	PM	4,53	●
	- Perempuan			5.2	PM	4,80	●
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	BPS	%	10,93	8,36	7,08	●
8.5.2 .(b)	Tingkat Pengangguran Terbuka.	BPS	%	4,98	3,75	4,63	►

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>Base line</i>) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS	%	25,38	14.93	25,32	►
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.							
8.8.1 .(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase Perusahaan	43,35	40%	1,65%	►
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	BPS	%	5,89	5	-	▼
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	BPS (Statistik Pariwisata)	Orang	2.297	86.200	1.130	►
8.9.1 .(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	BPS (Statistik Pariwisata)	Orang	sedang konfirmasi ke BPS pusat	9.993.727	n.a	►
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	DISBUDPAR	jumlah	57.189	PM	56.388	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 16 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 7 indikator atau 43,75 persen yang dilaksanakan tercapai (●), dan 8 indikator atau 50,00 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►), dan 1 indikator atau 6,25 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai (▼).

Tabel 2.151
Capaian TPB Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai / Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/Perlu Perhatian Khusus
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh,serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	16	7	8	1

Tujuan 9.
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri
Inklusif dan Berkelanjutan, serta mendorong Inovasi

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada **tabel berikut ini :**

Tabel 2.152
Capaian TPB Per Indikator Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>Baseline</i>) 2022	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan Provinsi.	Dinas PUBM	km	86,24	80	88,15	●
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Dinas PUBM	km	202	101,83	64,5	●
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Dinas Perhubungan	Km	80	58,2	80	●
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Dinas Perhubungan	unit	4 (PGA, LLG, MUBA, PLG)	6 (PGA, LLG, MUBA, PLG, Lahat, PALI)	4 (PLG, LLG, MUBA,PL G)	►
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga Penyeberangan	Dinas Perhubungan	unit	3 (Pelabuhan Boom Baru, Penyeberangan TAA dan Laut Regional TAA)	3 (Pelabuhan Boom Baru, Penyeberangan TAA dan Laut Regional TAA)	3 (Pelabuhan Boom Baru, Penyeberangan TAA dan Laut Regional TAA)	●

9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Perhubungan	lokasi	3 (Pelabuhan Laut Regional TAA, Pelabuhan Boom Baru, Pelabuhan Tanjung Carat)	3 (Pelabuhan Laut Regional TAA, Pelabuhan Boom Baru, Pelabuhan Tanjung Carat)	3 (Pelabuhan Laut Regional TAA, Pelabuhan Boom Baru, Pelabuhan Tanjung Carat)	●
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita.	BPS	%	19,46%	22,57%	18,41%	►
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	BPS	%	2,18%	5,83%	4,39%	►
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas.	BPS	%	n.a	9,46	n.a	▼

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.							
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	%	17,60	1	49,57	●
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020							
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	-	30	96,2	►
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	BPS	%	64,53	66	66,25	●
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet.	BPS	%	56,89	29	62,57	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 13 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 7 indikator atau 53,85 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 4 indikator atau 30,77 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►), dan 2 indikator atau 15,38 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai (▼).

Tabel 2.153
Capaian TPB Industri, Inovasi dan Infrastruktur Tahun 2023

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	13	5	1	7

Tujuan 10.
Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.154
Capaian Per Indikator TPB Mengurangi Kesenjangan Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional							
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	indeks	0,340 (Sept 2020)	0,352	0,330	●
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	12,84 (Mar 2021) dan 12,79 (Sept 2021)	9,9-10,78	11,95 (Sept 2022)	►
10.1.1 .(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	BPS	kabupa ten	data tidak tersedia	1	1	►
10.1.1 .(c)	Jumlah desa tertinggal.	IDM	desa	357	1400	178	●
10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri	IDM	desa	15	20	29	●
10.1.1 .(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	BDT	%	2,39	7	4,47	►
10.1.1 .(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BDT	%	20,11 (Musi Rawas Utara)	13.6	18,45 (Musi Rawas Utara)	►

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
10.3.1.(a)	Aspek kebebasan sipil dalam indeks demokrasi Indonesia.	BPS	Indeks	85,08	93,91	86,78	►
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
10.4.1.(b)	proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan; BPS	formal (%)	data tidak tersedia	67.00	n.a	▼
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.							
10.7. 2.(a)	Jumlah dokumen kerja sama ketenaga kerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penambahan Dokumen	59	16	18	●
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitas pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Fasilitas TKLN	12	10	8	►

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 11 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 4 indikator atau 36,36 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 6 indikator atau 54,54 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►), dan 1 indikator atau 9,09 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau perubahan negative atau tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai (▼).

Tabel 2.155
Capaian TPB Mengurangi Kesenjangan Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus
10	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara	11	4	6	1

Tujuan 11.
Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.156
Capaian Per Indikator TPB Kota dan Pemukiman yang
Berkelanjutan Tahun 2023

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2022)	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan							
11.1.1 .(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS	%	59,96	PM	63,15	●
11.1.1 .(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)	DISPERKIM	KawasanPerkotaan Metropolitan	1 Kawasan	2 Kawasan	1 Kawasan	●
11.1.1'.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	DISPERKIM	Kota Seding & Kota Baru	3 (Kota sedang) dan 1 (kota baru)	3 (Kota sedang) dan 1 (kota baru)	3 (Kota sedang) dan 1 (kota baru)	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2022)	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.							
11.2.1 .(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan	%	34	35	54,59	●
11.2.1 .(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Dinas Perhubungan	Kota Besar	2	2	2	●
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.							
11.3.1 .(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	DISPERKIM	Kota Seding	1 Kota	1 Kota	1 Kota	●
11.3.1 .(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	DISPERKIM	Metropolita n baru	1	1 metropolitan	1 metropol itan	●
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.							
11.4.1 .(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	DISPERKIM	Kota Pusaka	n.a	4 Kota	4 Kota	●
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara secara global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal hilang dan terkena dampak bencana per 100.000.	BPBD	Jiwa	21.311	Menurun	26.950	▼
11.5.1 .(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB).	BPBD	Indeks	132,99	104,36	131,24	▶
11.5.1. (b)	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD	Desa Tangguh	12	3	23	●
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	Sistem Peringatan Dini	1	1	1	●
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	%	43,26	85	47,39	▶
11.6.1. (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Kota Hijau	1 Kota	1 Kota	1 Kota	●
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	%	100	100	100	●

11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	1	1	1	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan di atas ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 16 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 11 indikator atau 68,75 persen yang dilaksanakan Tercapai (●), 4 indikator atau 25 persen yang dilaksanakan Akan Tercapai/Membaik (►) dan 1 indikator atau 6,25 persen yang dilaksanakan mengalami Perubahan Negatif/Memburuk/Perlu Perhatian Khusus (▼).

Tabel 2.157
Capaian TPB Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Tahun 2023

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai i	Akan Tercapai / Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	16	11	4	1

Tujuan 12.
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.158
Capaian TPB Per Indikator Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan Tahun 2023

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2022	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.4.1. (a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Peserta Proper	138	135	143	●
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhdap pembangunan berklanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.							
12.8.1.(a)	Julmlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Fasilitas Publik	n.a	15	n.a	▼

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan di atas, didapatkan bahwa dari 2 indikator hanya 1 indikator yang dilaksanakan dengan status terpenuhi dengan capaian yang melebihi dari target, sementara untuk indikator kedua tidak tersedia data baik dari baseline awal, target pencapaian dan pencapaian di Tahun 2022. Hal ini perlu pendekatan untuk memastikan ketidaktersediaan data apakah berasal dari data yang tidak tercatat atau diakibatkan dari indikator yang tidak dilaksanakan (▼).

Tabel 2.159
Capaian TPB Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai / Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	2	1	0	1

Tujuan 13
Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.160
Capaian Per Indikator TPB Penanganan Perubahan Iklim Tahun 2023

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (base line) 2022	Target SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2023	Status
13.1.1*	Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov Sumsel	Dokumen	2	1	2	●
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov Sumsel	Jiwa	21.311	Menurun	26.950	▼
13.1.3*	Penurunan jumlah hotspot dikawasan hutan	Dinas Kehutanan Prov. Sumsel	Titik Hotspot	899	389	4661	▼
13.1.4*	Penurunan luas kebakaran hutan	Dinas Kehutanan Prov. Sumsel	Ha	1.253.72	5.984,60	1.678,02	●

13.2.1. (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	Dokumen	14	18	5	▼
13.2.2	Jumlah Penurunan emisi GRK sektor lahan dan gambut	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	Ton CO2 eq/tahun	14,462,700	4.355.678	14.420.903	●
13.2.3	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	indeks	89.1	96,45	90,25	▶

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 7 indikator yang semuanya telah dilaksanakan, artinya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Komitmennya dalam berkontribusi dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Penanganan Perubahan Iklim.

Tabel 2.161
Capaian TPB Per Indikator Penanganan Perubahan Iklim Tahun 2023

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai / Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	7	3	1	3

Tujuan 14.
Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 14 Ekosistem Lautan yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.162
Capaian Per Indikator TPB Ekosistem Lautan Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	Integrasi RZWP-3-K Prov. SS ke RTRW	Materi Teknis RZWP-3-K Prov Sumsel	Materi Teknis RZWP-3-K Prov Sumsel	●
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	WPP	1 WPP Laut (WPP 711) 1 WPP Perairan Darat (WPP 438)	Optimalisasi 1 WPP, 1 Prop	1 (WPPNRI 711)	●
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.							
14.5.1 *	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ha	976,03 Ha	2,200 Ha	976 Ha	►
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)							
14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	50	80	80	►
Target 14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua Negara							
14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	-	5	0.005	▼
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	4	1	4	●

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Lokasi	0	1	Na	▼
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Orang	0	11.400 org	Na	▼

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 14 Ekosistem Lautan di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 8 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 3 indikator atau 37,50 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 2 indikator atau 25,00 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►), dan 3 indikator atau 37,50 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau perubahan negative atau memburuk (▼).

Tabel 2.163
Capaian TPB Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus
14	Melestarikan dan Memanfaat kan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan	8	3	2	3

Tujuan 15.
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 15 Ekosistem Daratan yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2.164
Capaian Per Indikator TPB Ekosistem Daratan Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
15.1.1.(a)	Tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Kehutan an	%	9,17*	9,77	9,22	►
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.							
15.2.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Kehutan an	%	0,07*	2,2	0,067	●
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Dinas Kehutan an	Ha	-	-	-	●
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Dinas Kehutan an	Ha	60.470*	1.926	60.470	●
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Balai Konserv asi Sumber Daya Alam	KK	-	2 KK	3 KK	●
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Dinas Kehutan an	Unit	-	-	-	●
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yango direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Kehutan an	%	0,045*	0,04	0,028	▼
Target 15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.							
15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	Balai Konserv asi Sumber Daya Alam	%	-	Harim au Sumat era (8); Gajah Sumat era (125)	Harimau Sumatera (21); Gajah Sumatera (237)	●
Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.							
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Dinas Kehutan an	Peratur an	-	-	-	
Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.							

15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Dinas Kehutan an	Kasus	3	3	3	●
15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	Balai Konserv asi Sumber Daya Alam	spesies	-	1	0	▼
Target 15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.							
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Dinas ketahan an pangan dan peternak an; Dinas kehutan an	dokume n	Bidang OKKPD: Registra si PSAT /Sertifik asi Prima (25 Sertifika t/tahun)	3	Bidang OKKPD: Registrasi PSAT /Sertifikasi Prima (336 Sertifikat/t ahun)	●
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				Bidang Keswan dan Kesmav et: SKPAH (Surat Keterangan Produk Pangan Asal Hewan) produk berupa telur dan daging; pengeluaran /pemas ukan melalui jalan darat (22 surat keterang an/bula n)		Bidang Keswan dan Kesmavet: SKPAH (Surat Keterangan Produk Pangan Asal Hewan) produk berupa telur dan daging; pengeluaran /pemasuk an melalui jalan darat (480 surat keterangan /bulan)	

				UPTD Rumah Sakit Hewan: Surat SKKH (Surat Keterang an Kesehat an Hewan) dan Rekome ndasi Hewan; pengelu aran/pe masuk an hewan melalui udara (bandara) (22 surat keterangan/ bulan)		UPTD Rumah Sakit Hewan: Surat SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) dan Rekomend asi Hewan ; pengeluara n/pemasu kkan hewan melalui udara (bandara) (370 surat keterangan /bulan)	
15.c.1.(a))	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Dinas Lingku ngan hidup dan pertahan an	%	0 (tidak sampai P21 karena penerapan terhadap penegakan hukum)	5	0	▼

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 15 Ekosistem Daratan di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 13 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 9 indikator atau 69,23 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 1 indikator atau 7,69 persen yang dilaksanakan akan tercapai/membaik (►), dan 3 indikator atau 23,08 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai (▼).

Tabel 2.165
Capaian TPB Ekosistem Daratan Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	13	9	1	3

Tujuan 16.
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2.166
Capaian Per Indikator TPB Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Tahun 2022

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	BPS, Kepolisian	kasus	Meningkat (2019 : 136)	Menurun	-	●
16.1.3 (b)	Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan	BPS	%	Menurun (2019 : 169)	Menurun	-	●
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	BPS	%	Meningkat (2020 : 70,82)	Menurun	belum diolah dari mikro data	►
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.							
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DPPPA	%	Menurun (0,01)	Menurun	0.01	►
16.3 Menggalakan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi.	Biro Hukum	%	n.a.	14	43	●
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparansi di semua tingkat.							
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD	%	88,17	100	-	
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi; Kabupaten/Kota).	BPK	%	Provinsi : 100 Kab/Kota : 94,11	Provinsi : 100%, Kab/Kota : n.a.	Provinsi : 100%, Kab/Kota : n.a.	●
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Biro Organisasi	Nilai	BB (79,76)	A (84-85)	BB (78,06)	▼
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Biro pengadaan barang dan jasa	%	n.a.	100%	70%	▼
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota)	Ombudsman RI	%	90%	Provinsi : 95% Kab/Kota : 95%	-	
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DPPPA	%	21,33	21,33	-	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	16,36	20	19,5	▼
16.7.2 (a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS	Indeks	72,41	73,11	74,15	●

16.7.2 (b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS	Indeks	85,08	93,91	86,78	►
16.7.2 (c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS	Indeks	78.51	84,92	80,86	►
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1*	Proporsi anak umur 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS	%	PM	PM	-	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DISDUK CAPIL	%	90,00	92,50	91,33	▼
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							
16.10.2 (a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dinas Kominfo	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Sumsel	87	88	-	
16.10.2 (b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi non litigasi.	Dinas Kominfo	%	80	85	-	
16.10.2 (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Dinas Kominfo	%	8	9	-	
Target 16.a Memperkuat lembaga lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.							
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	KEMEN KUMHAM	Lembaga	PM	PM	-	

Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional.	Biro Hukum	Kebijakan Dokumen	0	0	-	

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 23 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 7 indikator atau 30 persen yang dilaksanakan tercapai (●), 3 indikator atau 13 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►), dan 13 indikator atau 57 persen yang dilaksanakan perlu perhatian khusus (▼) karena tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai serta 10 indikator atau sebesar 41,67 yang belum tersedia datanya untuk tahun 2022.

Tabel 2.167
Capaian TPB Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai / Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, penyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	23	7	3	13

Tujuan 17.
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.165							
Capaian Per Indikator TPB Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Tahun 2022							
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPS	%	7,88	1.94	0,91	▼
17.7.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	BPKAD	%	0,72	0.72	0,68	▼
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKAD	%	52.77	35.23	38,38	●
Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.							
17.3.1.(a)	Rata-rata pertumbuhan investasi PMA dan PMDN.	DPMPSTP	%	-9,62%	2.52	18,12%	●
Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota/Kabupaten/Kota (IKK)	KOMINFO	%	-	100	93	▼
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di perkotaan dan di perdesaan.	KOMINFO	%	-	25	93	●
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	BPS	%	56,89	29	62,57	●
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	KOMINFO	%	-	75	93%	●
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.							
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas.	BPS	%	51,58	5.8	30,37	●
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%	99,31	PM	PM	
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Base line) 2021	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan	BPS	%	95,83	PM	PM	

	informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.						
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	pengunjung	74.756	PM	PM	
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	100	PM	PM	
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	BPS	%	100	PM	PM	

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Provinsi. Dari 14 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 6 indikator atau 66,66% yang dilaksanakan tercapai (●), dan 8 indikator atau 57% perlu perhatian khusus (▼) karena tren capaian turun dari tahun sebelumnya, target tahun berjalan tidak tercapai dan 5 indikator tidak ada data capaian.

Tabel 2.169
Capaian TPB Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai / Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk /Perlu Perhatian Khusus
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	14	6	0	8

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD

Salah satu bagian dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah dengan pelaksanaan evaluasi realisasi baik kinerja maupun keuangan untuk masing-masing Perangkat Daerah. Hal itu perlu dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Secara umum hasil evaluasi realisasi fisik maupun keuangan

pelaksanaan program dan kegiatan untuk masing-masing instansi telah menunjukkan kinerja yang baik.

Pelaksanaan program RKPD sampai dengan tahun 2024 dan realisasi RPD provinsi Sumatera Selatan pada masing-masing Urusan secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Secara umum, indikator program telah mencapai target, bahkan ada yang melampaui target yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPD Provinsi Sumatera Selatan, meskipun ada indikator yang belum mencapai target, baik yang telah mendekati 100% maupun yang masih relatif jauh dari target.

Secara detail capaian indikator program RKPD sampai dengan tahun 2024 dan realisasi RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yaitu belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah, tingginya alih fungsi/konversi lahan, produktivitas sektor pertanian masih rendah, ketahanan pangan pangan yang rentan, adanya kesenjangan infrastruktur antar wilayah, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, masih lambatnya transformasi ekonomi, dan reformasi birokrasi yang rendah.

2.3.1.1 Kerentanan dan Risiko Kondisi Geografi

A. Kondisi Geografi Sumatera Selatan Rentan terhadap Risiko Bencana Alam

Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial dengan total luas 4.976.818 hektar atau sekitar 57% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tanah *aluvial* umumnya subur karena memiliki kandungan air yang cukup. Selanjutnya ada jenis tanah *histosol* 1.802.458 hektar atau 21% yang lebih populer dikenal sebagai tanah gambut. Tanah gambut cenderung kurang subur karena memiliki kandungan unsur hara yang rendah. Terdapat 11 jenis potensi bahaya bencana di berbagai wilayah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi: Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan, Gempa Bumi, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Letusan Gunung Api, Gelombang ekstrem dan Abrasi, Kegagalan teknologi, dan Epidemi dan Wabah Penyakit. Adapun kerentanan dan risiko bencana alam karena kondisi geografis termasuk kelas Tinggi adalah bahaya banjir, secara total potensi luas keseluruhan adalah 6.476.932,00 Ha; potensi luas bahaya tanah longsor adalah seluas 906.740,00 Ha; potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 8.851.703,00 Ha; dan bahaya cuaca ekstrem luas secara keseluruhan adalah 6.339.456,00 Ha.

Selain itu, permasalahan geografi lain terkait adalah perubahan iklim, seperti musim kemarau yang terjadi setiap tahun meningkatnya ancaman bencana kebakaran terutama di lahan Gambut, bahkan kebakaran lahan Gambut yang besar ini terjadi setiap 4 tahunan. Adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran gambut dapat berdampak pada meningkatnya emisi GRK yang dihasilkan, sehingga berdampak pada semakin buruknya perubahan iklim. Hal ini mengingat Sumatera Selatan

merupakan rumah bagi ekosistem gambut terluas di Pulau Sumatera setelah Provinsi Riau. Lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 2,09 juta hektare dengan 36 KHG yang berlokasi di 7 kabupaten, atau sekitar 24,07% dari total wilayah provinsi.

B. Mitigasi Risiko Kebencanaan Belum Optimal

Data indeks risiko bencana Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 sebesar 131,3, angka ini relatif menurun jika dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 149,9 dengan kategori sedang. Dengan penurunan indeks risiko bencana tersebut, pencapaian tersebut masih perlu dioptimalkan dari aspek kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana. Tantangan kebencanaan akan semakin tinggi sebagai akibat semakin meningkatnya tekanan perubahan iklim yang berdampak pada kerentanan penghidupan masyarakat, terutama masyarakat rentan.

Daerah dengan indeks risiko bencana tertinggi di tahun 2024 adalah Lahat, Empat Lawang, Muara Enim dan Palembang. Meskipun data indeks risiko bencana Provinsi Sumatera Selatan tersebut relatif turun selama 7 tahun terakhir, namun potensi risiko bencana alam di Sumatera Selatan masih sangat tinggi, terutama adalah bencana Banjir yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: (1) Faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi dan letak geografis yang berada di daerah aliran Sungai; (2) Faktor manusia, seperti alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan industri, serta pembuangan sampah sembarangan.

2.3.1.2 Pengelolaan Sumberdaya Air Belum Berkelanjutan

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 87,23%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 87,19 persen pada 2023, angka tersebut relatif masih lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 92,64 persen pada 2024. Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak terendah adalah Kabupaten Empat Lawang (65,94%). Jumlah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Provinsi Sumatera Selatan masih belum memenuhi standar Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 91,32% pada 11 dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Keterbatasan ketersediaan air bersih yang aman untuk diminum yaitu: (a) kurangnya kuantitas Air, disebabkan oleh keterbatasan kapasitas infrastruktur dan sistem pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat; keterbatasan dalam ketersediaan air bersih yang aman untuk diminum seiring dengan peningkatan kebutuhan air di berbagai sektor dan rumah tangga; degradasi lahan, seperti erosi dan sedimentasi, dapat menyebabkan berkurangnya kapasitas tampungan air di sungai dan danau; Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan menjadi tidak menentu yang dapat menyebabkan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan. (b) rendahnya kualitas Air, disebabkan adanya pencemaran air oleh berbagai faktor, seperti limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian; kerusakan lingkungan, seperti penebangan hutan dan pembakaran lahan, dapat menyebabkan berkurangnya cadangan air tanah dan pencemaran air permukaan, sehingga ada keterbatasan dalam ketersediaan air bersih yang aman untuk diminum.

2.3.1.3 Tingginya Alih Fungsi Lahan dan Gambut

Pertumbuhan penduduk meningkat dari tahun ke tahun sementara lahan terbatas dan terbagi habis sesuai peruntukan. Kecepatan pertumbuhan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pemanfaatan ruang untuk perumahan dan perkantoran. Perkembangan wilayah terutama perkotaan memerlukan lahan yang luas untuk penyediaan sarana dan prasarana, pembangunan industri, akibatnya lahan semakin menyempit. Selain itu, berkurangnya tutupan lahan akibat dari alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan seperti sawit baik skala kecil maupun besar. Pemanfaatan lahan gambut tidak sesuai fungsinya (fungsi budidaya dan fungsi lindung ekosistem) akan berdampak pada meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, meningkatnya biaya hidup dan kerentanan penghidupan masyarakat. Ketidaktepatan dalam pemanfaatan lahan gambut sesuai fungsinya (fungsi budidaya dan fungsi lindung ekosistem) akan berdampak pada seringnya bencana alam seperti banjir, kekeringan, meningkatnya biaya hidup masyarakat sehingga merugikan pembangunan, banjir, dan kemacetan. Permasalahan alih fungsi lahan sering menimbulkan konflik aturan seperti tumpang tindih peraturan perundang-undangan, dan tumpang tindih perizinan.

2.3.1.4 Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah belum Optimal

A. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya didominasi Sektor Primer

Sumatera Selatan merupakan daerah terkaya ke-5 di era otonomi daerah dengan sektor unggulan yaitu sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor pertambangan, industri manufaktur dan perdagangan. Pemanfaatan potensi sumberdaya yang potensial masih didominasi oleh sektor primer yaitu sebesar 40%. Sektor primer sebagai komoditas ekspor belum optimal, ini terlihat dari pertumbuhan sektor primer stagnan pada interval 2%-3%. Dilihat dari Indeks ketergantungan sumber daya alam (NRDI) Sumatera Selatan sebesar 9,52, menempati posisi ke-8, angka ini relatif cukup tinggi. Semakin tinggi nilai NRDI berarti semakin tinggi juga tingkat ketergantungan terhadap SDA. Umumnya wilayah yang memiliki NRDI tinggi tidak cukup mampu menciptakan kinerja pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang sebanding dengan kekayaan SDA tambang yang selama ini sudah ada dieksploitasi. Selain itu, *Indeks Natural Resource Curse* (NRC) Sumatera Selatan sebesar 9,50 (peringkat 8 tertinggi). Semakin tinggi nilai indeks NRC di suatu wilayah, artinya memiliki ketergantungan tinggi pula terhadap SDA tambang, terutama wilayah penghasil utama minyak bumi, gas bumi, mineral dan batu bara.

B. Pengembangan Potensi Daerah Belum Optimal

Pengembangan potensi daerah belum optimal yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi ekonomi daerah masih cenderung bersifat *business as usual*, kondisi ini terlihat masih terfokusnya kegiatan di sektor primer sehingga transformasi sektoral relatif lambat, dan hilirisasi produk untuk menciptakan nilai tambah masih terbatas. Potensi perkebunan di Sumatera Selatan cukup beragam mulai dari karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, dan kakao. Potensi perkebunan khususnya produksi komoditi karet terbesar untuk produksi karet alam di Indonesia. Sumatera Selatan menyumbang 34% produksi karet alam nasional pada 2016. Perkembangan produksi karet pada tahun 2024 produksi karet mencapai 1.008.362 ton, Secara rill pertumbuhan produksi karet selama 2020-2024 turun yaitu sebesar -1,99%. Permasalahan menurunnya produksi karet karena adanya serangan penyakit akar putih, penyakit gugur daun yang disebabkan jamur yang menyerang daun berakibat kurangnya jumlah produksi dan kualitas latex atau getah. Selain itu, harga komoditas karet yang tidak stabil bahkan

cenderung turun disebabkan kualitas karet yang rendah atau kurang baik, adanya praktek alih fungsi dan konversi lahan menjadi penyebab luas lahan berkurang. Demikian juga produksi tanaman lainnya selama 2020-2024 mengalami penurunan. Secara Riil tumbuh negatif sebesar -12,37%. Penyebabnya adalah cuaca ekstrem, serangan hama, penyakit tanaman, dan usia tanaman semakin tua. Selain itu, praktik budidaya yang kurang tepat juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas, konflik lahan, serta harga jual yang rendah juga dapat mempengaruhi keputusan petani dalam melakukan produksi.

Tanaman perkebunan yang tumbuh positif adalah tanaman kelapa sawit yang secara riil tumbuh sebesar 85,53 persen selama periode 2020-2024, demikian juga tanaman kakao yang tumbuh sebesar 3,86 persen dalam periode yang sama. Tanaman kopi dan kelapa yang secara riil masing-masing tumbuh sebesar 3,73 dan 1,47 persen pada periode 2020-2024. Sementara untuk tanaman perkebunan Lada di Sumatera Selatan masih cukup jarang dikembangkan hanya beberapa wilayah di Sumatera Selatan yang cocok untuk budidaya lada.

Permasalahan pengembangan sektor unggulan seperti perkebunan yaitu: (a) belum optimalnya pertumbuhan produksi tanaman perkebunan yang disebabkan oleh tingginya alih fungsi lahan menjadi lahan peruntukkan lainnya; (b) nilai tambah tanaman perkebunan relatif masih kecil dibandingkan sektor lainnya disebabkan oleh pengelolaan inefisien, oleh karena itu, hasil produksi tanaman perkebunan diarahkan pada kegiatan hilirisasi (*on farm*), artinya industrialisasi produk pertanian terutama tanaman perkebunan akan mendorong produktivitas sektor pertanian secara menyeluruh, dan (c) belum optimalnya penerapan ekonomi hijau, termasuk penyelarasan tataguna lahan yang adil dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan lahan, peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan, peningkatan produktivitas dan diversifikasi, perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil, peningkatan konektivitas dan skala ekonomi, restorasi lahan dan hutan terdegradasi, dan pemanfaatan insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan.

2.3.1.5 Kerentanan Ketahanan Pangan

A. Distribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Menurun Setiap Tahun

Share sektor pertanian terhadap PDRB terus mengalami penurunan, sementara disisi lain, sektor jasa menunjukkan tren yang

meningkat. Data tahun 2024 menunjukkan pangsa sektor jasa sudah melampaui sektor pertanian yaitu 43,56% sedangkan sektor pertanian sebesar 13,56%. Isu pangan global semakin menguat seiring perubahan iklim yang ekstrem sehingga berdampak produksi sektor pertanian. Sektor pertanian sebagai sektor andalan dalam menopang ketahanan pangan cenderung mengalami penurunan kontribusinya terhadap PDRB. Dalam dua dekade kontribusi sektor pertanian menurun sebesar 6 persen. Sektor perkebunan sebagai *leading* sektor pertanian menghadapi kendala volatilitas harga komoditas. Harga komoditas unggulan seperti Kelapa Sawit, Karet dan Kopi sangat ditentukan oleh permintaan dari luar negeri. Dilihat dari tingkat produktivitas, sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki produktivitas terendah di antara sektor lainnya dan cenderung menurun. Output yang dihasilkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang melambat.

B. Produktivitas Padi di Sumatera Selatan Meningkat Pesat

Produktivitas tanaman padi menunjukkan tren peningkatan baik di tingkat Sumatera Selatan maupun nasional selama periode 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, produktivitas padi di Sumsel berada di angka 48,27 kuintal/hektar, masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 51,14 kuintal/hektar. Namun, produktivitas di Sumsel mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, Sumsel mencatatkan angka 51,44 kuintal/hektar dan untuk pertama kalinya melampaui angka nasional yang saat itu berada di 52,26 kuintal/hektar. Peningkatan yang paling mencolok terjadi antara tahun 2021 dan 2022, di mana Sumsel melonjak dari 51,44 menjadi 54,06 kuintal/hektar. Peningkatan ini berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 56,19 kuintal/hektar, sebelum sedikit menurun menjadi 55,83 kuintal/hektar di tahun 2024. Sementara itu, angka produktivitas nasional juga mengalami kenaikan, namun dengan laju yang lebih lambat. Dari 51,14 kuintal/hektar pada 2019, angka tersebut naik menjadi 52,90 kuintal/hektar pada tahun 2024. Dari uraian ini menunjukkan bahwa Sumsel tidak hanya berhasil meningkatkan produktivitas padi secara konsisten, tetapi juga berhasil melampaui angka produktivitas nasional sejak tahun 2022. Hal ini mengindikasikan keberhasilan berbagai upaya peningkatan pertanian yang dilakukan di wilayah tersebut.

Sementara itu, pertumbuhan produktivitas tanaman palawija pada tahun 2024 seperti komoditi Jagung juga mengalami peningkatan dari 62,36 kuintal/hektar pada tahun 2023 menjadi 65,89 kuintal/hektar pada tahun 2024, meningkat 5,67%; Kedelai meningkat 2,30%; Kacang Tanah mengalami penurunan 9,72%; Kacang Hijau turun 15,88%; Ubi Kayu turun 1,52%; dan Ubi Jalar turun 1,77% jika dibandingkan tahun sebelumnya pada 2023. Sebaran komoditas pangan seperti padi, dan jagung masih terkonsentrasi di beberapa wilayah yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Timur. Selain itu, adanya perubahan iklim memberikan ancaman pada potensi gagal panen dengan adanya perubahan curah hujan dan potensi cuaca ekstrem. Oleh karena itu perlu dilakukan diversifikasi sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan.

C. Produktivitas Perikanan Budidaya Belum Optimal

Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya perairan sungai dan laut yang cukup besar, namun produksi perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Selatan masih belum dikembangkan secara optimal. Tercatat dari Tabel 2.25 yang disajikan menunjukkan bahwa pertumbuhan riil produksi perikanan budidaya mengalami penurunan yaitu sebesar -4,90 persen selama periode 2020-2024. Produksi perikanan budidaya di beberapa wilayah di Sumatera Selatan juga mengalami penurunan cukup besar, seperti Kabupaten Musi Rawas yang turun sebesar -38,77 persen, diikuti oleh Kota Prabumulih (-23,20%), Lubuklinggau (-20,24%), Musi Banyuasin (-15,76 %), Lahat (-38,77%).

Sementara wilayah yang produksi perikanan budidayanya tumbuh signifikan yaitu OKU Selatan yang tumbuh sebesar 18,79 persen, diikuti oleh Kabupaten Empat Lawang (9,28%), PALI (9,10%), Ogan Ilir (9,06%), Pagar Alam (5,87%), OKU Timur (3,86%) dan Kabupaten Banyuasin (2,46%). Peningkatan dan penurunan produksi perikanan budidaya dipengaruhi faktor yang beragam, seperti kondisi geografis, teknologi dan informasi pendukung, kualitas air, bibit, lahan, cuaca, dan peralihan tambak menjadi lahan pertanian atau pemukiman serta pengetahuan Pembudidaya tentang cara budidaya ikan yang baik.

D.Ancaman Ketahanan Pangan

Tingkat aksesibilitas (keterjangkauan) pangan dan pemanfaatan tahun 2022 masih cukup rendah yaitu sebesar 74,11 dan 61,29, kedua indeks ini menjadi yang terendah di Pulau Sumatera. Secara regional IKP Sumatera Selatan tahun 2024 masih jauh di bawah Provinsi Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Jambi.

Menurunnya produktivitas ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan disebabkan oleh: (1) Produktivitas lahan yang mengalami *leveling off* sebagai akibat akumulasi pemupukan secara terus menerus sehingga untuk memperoleh tingkat produktivitas yang sama diperlukan input yang lebih. Ini terlihat dari nilai NTP yang cenderung tetap; (2) Ketersediaan lahan pertanian yang semakin terbatas mendorong peningkatan jumlah rumah tangga petani gurem; (3) Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian akibat persaingan penggunaan lahan terutama dengan sektor perumahan dan industri, perkebunan, dan pertambangan; (4) Ketersediaan air yang tidak merata di masing-masing wilayah; (5) Tingginya *food loss* dan *food waste* (kehilangan pangan dan sisa makanan) akibat belum maksimalnya teknologi pascapanen; (6) Perubahan iklim (kekeringan, banjir, dan perubahan pola tanam); (7) Serangan hama, penyakit tanaman, dan gulma; (8) Investasi dalam pengembangan penelitian di sektor pertanian masih rendah; (9) Gejolak pangan global menyebabkan terganggunya mata rantai pangan dan pupuk berdampak pada terbatasnya akses pangan sehingga mendorong tingginya Inflasi pangan; (10) Harga pakan ikan yang tinggi dan tidak berkualitas, harga ikan yang relatif rendah dan penggunaan teknologi perikanan budidaya yang tidak tepat, serta penyakit ikan menyebabkan produksi perikanan budidaya turun; dan 11) masih tingginya tingkat kemiskinan, dan masih tingginya balita *stunting*.

2.3.1.6 Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah masih Tinggi

Disparitas infrastruktur antar wilayah berdampak pada kesenjangan ekonomi. Infrastruktur yang buruk menyebabkan ketidakefisienan dalam ekonomi. Ketidak efisienan tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Perkembangan yang baik pada infrastruktur di Sumatera Selatan terutama jalan, seperti jalan tol lintas Sumatera, dan infrastruktur lainnya seperti Bandara, Pelabuhan dan *light*

rail transit (LRT) namun secara spasial masih terdapat kesenjangan infrastruktur antarwilayah.

A. Masih Terdapatnya Jalan yang Berkualitas Kurang Mantap

Panjang jalan di Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori jalan negara, provinsi dan kabupaten pada setiap kabupaten/kota, pada umumnya tidak mengalami penambahan sejak tahun 2019. Jalan pada Provinsi Sumatera Selatan, terdapat dua jenis permukaan jalan yang belum permanen dengan kategori tidak diaspal dan lainnya dengan angka yang relatif besar dari total panjang jalan yang ada; permukaan jalan tidak diaspal sepanjang 14,46 km dengan lokasi pada Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir, dan permukaan jalan dengan kategori lainnya sepanjang 58,06 km dengan Sebagian besar berada di Kabupaten Muara Enim dan 0,06 km di Kabupaten Banyuasin. Jumlah panjang jalan dan jenis permukaan jalan menunjukkan terhadap upaya peningkatan aksesibilitas yang lebih besar pada wilayah di Provinsi Sumatera Selatan.

Jalan di Provinsi Sumatera Selatan masih terdiri dari komposisi jalan dengan kondisi belum maksimal. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumsel (2023), pada tahun 2022, jalan di Provinsi Sumatera Selatan dalam kondisi baik 76,12%, dalam kondisi sedang 10,54%, kondisi rusak 2,68% dan 10,66% dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini juga memberikan tantangan terkait dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yang terus meningkat setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut 277,24 ribu mobil penumpang, 1,68 ribu bus, 42,42 ribu truk, dan 898,92 ribu sepeda motor. Kondisi jalan dan jumlah kendaraan memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat keamanan dalam berlalu lintas dan kemudahan aksesibilitas.

B. Konektivitas dan Aksesibilitas yang belum Merata

Sumatera Selatan memiliki beberapa wilayah yang masih sulit dijangkau moda transportasi dan memiliki indeks aksesibilitas yang masih rendah. Konektivitas di beberapa kawasan terutama kawasan Timur Sumatera Selatan/pesisir belum sepenuhnya memiliki jaringan jalan yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer II. Ketersediaan sarana jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar akses ke wilayah-wilayah yang terisolir. Sementara itu, wilayah Koridor Timur masih perlu peningkatan jaringan Pelayanan Angkutan Umum.

Permasalahan konektivitas lainnya belum tersedianya terminal multimoda untuk angkutan barang dan penumpang kawasan metropolitan Patungraya Agung.

Selain itu, pelayanan dari jaringan Kereta Api masih terbatas pada wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Penambahan jalur Kereta Api yang diintegrasikan dengan ruas Lubuklinggau-Bengkulu, dan Muara Enim-Tanjung Api-API sebagai *outlet* memasarkan produk hasil pertanian, pertambangan, batubara, minyak bumi perlu segera direalisasikan sebagai upaya untuk mendorong perkembangan wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan. Angkutan Kereta Api diharapkan mampu menarik gerbong kemakmuran bagi masyarakat Sumatera Selatan, namun menghadapi beberapa kendala seperti daya dukung rel yang masih terbatas dimana jaringan rel rawan anjlok, dan belum terealisasinya pembangunan konektivitas rencana Kereta Api trans Sumatera (Palembang-Jambi dan Palembang-Lampung).

Sumatera Selatan juga memiliki LRT yang mampu mengatasi kemacetan di Kota Palembang, akan tetapi masih menghadapi kendala yaitu: (1) Jaringan pelayanan (*trunk/feeder*) dan fasilitas fisik (stasiun/halte) belum sepenuhnya terintegrasi. (2) Tarif angkutan umum belum terintegrasi sehingga perjalanan (asal-tujuan) dengan angkutan umum dirasakan mahal. (3) Fasilitas pelayanan angkutan umum belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penumpang (barang bawaan, sepeda, dan lain-lain) belum terakomodasi dengan baik.

C. Fasilitas Transportasi Air Belum Kondusif

Transportasi sungai dan laut belum optimal dalam pengelolaan jalur sungai untuk angkutan barang, penumpang dan wisata. Hal ini karena belum tersedianya pelabuhan internasional yang berfungsi sebagai outlet dan inlet angkutan barang dan hasil hilirisasi menjadi faktor penghambat dalam pengembangan moda transportasi laut.

D. Fasilitas Angkutan Udara Masih Relatif belum Merata

Saat ini Sumatera Selatan memiliki 4 (empat) bandara yaitu: Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) di Kota Palembang, Bandar Udara Silampari di Kota Lubuklinggau, Bandar Udara Atung Bungsu yang terletak di Kabupaten Pagar Alam, dan Bandar Udara Pangeran Abdul Hamid di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Namun, belum tersedianya fasilitas angkutan udara untuk pergerakan penumpang di Kawasan Selatan pada Provinsi Sumatera Selatan.

Pergerakan penumpang hanya dilakukan melalui akses darat sehingga mobilitas penumpang dari wilayah Selatan relatif terbatas. Sebagian besar mobilitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dilakukan di luar Wilayah Sumatera Selatan seperti Provinsi Lampung. Fenomena ini menyebabkan terjadinya kebocoran wilayah. Transaksi komoditas unggulan Wilayah Selatan seperti Kopi dilakukan di kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan.

E. Belum Optimalnya Sarana Energi Kelistrikan dan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi seluler di wilayah Provinsi Sumatera Selatan masih dengan kualitas dan jangkauan yang belum merata sehingga masih terdapat wilayah yang belum terlayani jaringan listrik dan tidak terdapat jangkauan sinyal Telepon. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumsel (2023), pada 11 dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih terdapat desa yang tidak terjangkau dengan jaringan sinyal internet seluler. Masih terdapat 38 desa yang belum sama sekali terjangkau jaringan komunikasi dan sebanyak 145 desa belum terjangkau jaringan internet. Desa-desa yang paling banyak belum terjangkau jaringan internet yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir.

F. Kondisi Lingkungan belum Mendukung Derajat Kesehatan

Sanitasi yang baik akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, demikian pula tersedianya sarana pengelolaan limbah dan pembuangan sampah. Sumatera Selatan telah berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan, prasarana pembuangan tinja pada lingkungan belum seluruhnya pada fasilitas tempat akhir pembuangan tinja yang sesuai dengan standar kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2022, sebagian besar pemakaian tempat akhir pembuangan tinja menggunakan tangki septik tank/IPAL *Sewage System* sebanyak 82,68%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 84,39%. Selain itu, yang masih menggunakan kolam/ sawah/ sungai/ danau/ laut sebanyak 4,35%, bahkan masih dijumpai pembuangan tinja di lubang tanah sebesar 11,66%, serta di pantai/tanah lapang/kebun/lainnya sebanyak 1,04 %. Permasalahan dalam sanitasi, limbah dan persampahan di Sumatera Selatan yaitu: Lemahnya penegakan Perda Kebersihan, beberapa SPAL-T skala kawasan telah terbangun namun kondisinya kurang baik, beberapa kabupaten/kota

belum memiliki SPALD-S skala kawasan atau IPLT, dan yang sudah memiliki tetapi kondisinya kurang baik, masih terdapat daerah yang belum memiliki TPA yaitu Kabupaten PALI dan Kabupaten Musi Rawas.

2.3.1.7 Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah

A. Tenaga Kerja Terampil di Sumatera Selatan Masih Rendah

Sektor tenaga kerja di Sumatera Selatan di bidang ketrampilan tinggi masih rendah, Ini disebabkan oleh kualitas SDM masih rendah dilihat dari angkatan kerja didominasi lulusan SD dan SMP. Degradasi pendidikan dalam dunia kerja terus terjadi, beberapa jenis pekerjaan mengharuskan lulusan perguruan tinggi sehingga pekerjaan yang semestinya dapat dilakukan oleh pekerja lulusan sekolah menengah beralih ke jenjang yang lebih tinggi. Adaptasi terhadap perubahan yang cepat akan berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran pada jenjang sekolah menengah dan perguruan tinggi.

B. Capaian IPM Sumatera Selatan masih Relatif Rendah

Tahun 2024 sebesar 73,84 masih berada di bawah capaian IPM nasional sebesar 75,02. Komponen yang menyebabkan IPM masih relatif rendah yaitu angka harapan hidup sebesar 74,26, dan rata-rata lama sekolah sebesar 8,57. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya pemerataan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum optimal. Pemerataan kualitas pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh tersedianya fasilitas kesehatan di desa-desa. Jarak antar desa dan permukiman yang masih jarang penduduk menyebabkan pelayanan kesehatan dan pendidikan kurang terlayani dengan baik.

C. Sumber Daya Manusia yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Masih Terbatas

Penyerapan tenaga kerja dilihat dari kualifikasi pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah. Pada tahun 2024 penduduk bekerja berdasarkan kualifikasi pendidikan, masih didominasi tenaga kerja yang berpendidikan SLTA sederajat yaitu sebanyak 31,26 persen. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebanyak 8,4 persen. Selain disebabkan oleh rata-rata tingkat pendidikan masih rendah, SDM yang kompeten dalam jumlah minim juga disebabkan oleh terbatasnya keberadaan sarana prasarana maupun tenaga pelatih BLK yang tersertifikasi.

D.Persentase Standar Kompetensi Minimum Satuan Pendidikan Belum Tercapai

Rendahnya persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk rerata kompetensi Literasi dan Numerasi. Masing-masing rerata tersebut adalah 58,41% dan 50,37% (pada satuan Pendidikan SMA); 56,59 dan 49,16 (pada satuan Pendidikan SMK); 51,87% dan 48,48% (pada satuan Pendidikan SMALB); 56,30% dan 52,17% (pada satuan Pendidikan SMPLB); 56,88% dan 44,78% (pada satuan Pendidikan SDLB). Penilaian AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) ini dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu Literasi dan Numerasi. Kemampuan Literasi dan Numerasi dapat membantu siswa mempelajari bidang ilmu lainnya dengan membentuk cara berpikir dan melatih siswa mencerna informasi baik dalam bentuk tertulis atau angka-angka. Sistem Pendidikan sebagai sumber masalahnya sehingga sudah menjadi hal yang umum istilah seperti: kesenjangan keterampilan di kalangan dunia usaha dan industri.

E.Keterkaitan antara Lulusan Pendidikan dan Dunia Kerja Masih Rendah

Keterkaitan (*link and match*) yang lemah antara lulusan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan dunia kerja diindikasikan oleh tingginya tingkat pengangguran terbuka yang disumbang oleh lulusan SMK yaitu sebesar 16,64 persen. Belum adaptifnya kurikulum SMK dengan kebutuhan pasar kerja dan rendahnya potensi kemandirian wirausaha menjadi beberapa faktor penyebab hal ini.

F.Pekerja Berpendidikan Tinggi yang Bekerja di bidang Keahlian Masih Rendah

Rendahnya jumlah pekerja berpendidikan tinggi dan bekerja di bidang keahlian menengah tinggi. Hanya terdapat 12,86 persen pekerja berpendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi. Kondisi tersebut menjadi permasalahan serius, karena lulusan pendidikan menengah dan tinggi pada beberapa bidang memiliki supply semakin banyak. Pekerjaan di bidang keahlian menengah tinggi yang tidak secara langsung berhubungan dengan bidang pendidikan yang diikuti tersebut terpaksa menjadi pilihan bagi para lulusan yang kesulitan untuk memanfaatkan pengetahuan dan keahlian yang dipelajarinya.

G. Kualitas Keluarga Masih Rendah

Kualitas keluarga berperan penting dalam pembangunan manusia. Capaian indeks kualitas keluarga di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 yaitu sebesar 76,73 masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 77,64. Permasalahan kualitas keluarga Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari beberapa indikator capaian yang rendah diantaranya kepemilikan Buku Nikah mengalami penurunan sebesar -1,25. Kemudian terjadi peningkatan pada persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok mengalami peningkatan sebesar 0,39. Sementara itu, persentase rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi mengalami penurunan sebesar -0,18. Persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial mengalami penurunan -0,28.

H. Tingginya Ketimpangan Gender

Nilai Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2018 -2024 memiliki posisi IKG Provinsi Sumatera Selatan masih berada pada kategori “Tinggi” menjadi kategori “Menengah Atas”. namun bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera, Sumatera Selatan berada pada posisi nomor dua tertinggi ketimpangan gendernya setelah Provinsi Jambi.

Penyebab tingginya ketimpangan gender di Sumatera Selatan adalah Sebagian besar akibat kontribusi dari Dimensi Pemberdayaan dengan indikator Persentase Penduduk Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA yang masih rendah dan memiliki GAP yang cukup besar dari laki-laki serta Persentase Anggota Legislatif Perempuan yang persentasenya masih sangat kecil dan GAP nya sangat besar jika dibandingkan dengan laki-laki, Penyebab lainnya adalah dari Dimensi Pasar Tenaga Kerja dengan indikator TPAK perempuan yang capaiannya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki.

Selain itu yang berkontribusi terhadap ketimpangan gender di Sumatera Selatan adalah akibat kontribusi komponen Indeks Pembangunan Gender bidang Pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah Perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dan Harapan Lama Sekolah Perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Untuk Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami ketimpangan gender, dimana AHH perempuan lebih tinggi dari AHH Laki-

laki. Begitu juga dengan Pengeluaran Perkapita perempuan lebih rendah dan GAP nya sangat besar dibandingkan dengan laki-laki.

Dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, terdapat 5 kabupaten/ kota yang capaian IKG nya lebih baik dibandingkan capaian provinsi yang mencapai 0,479 pada tahun 2024. Sementara 12 kabupaten/kota lainnya masih kesulitan untuk mencapai angka provinsinya. Hal ini menunjukkan masih adanya disparitas ketimpangan gender antar kabupaten/kota.

2.3.1.8 Transformasi Ekonomi belum Optimal

Sumatera Selatan masih **mengandalkan sektor primer dalam pembangunan terutama sektor pertambangan batubara** dengan kontribusi yang cenderung meningkat. Sementara itu, kontribusi sektor industri pengolahan/manufaktur cenderung stagnan dalam dua dekade yaitu berkisar 17%. Kontribusi terbesar dalam industri pengolahan adalah industri pulp dan kertas sedangkan kontribusi UMKM masih relatif terbatas. Terhambatnya sektor manufaktur terutama industri pengolahan pada UMKM mengindikasikan terjadinya proses “deindustrialisasi” di Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: (1) terbatasnya kemampuan mengadopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, (2) keterbatasan dukungan ekosistem industri dari luar Jawa, (3) terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat peningkatan biaya, seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, energi, logistik dan tingkat bunga, dan (4) adanya penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan pergeseran permintaan terhadap barang impor yang lebih murah.

Mega tren dunia menunjukkan telah terjadinya transformasi ekonomi dari ekonomi coklat menuju ekonomi hijau. Paradigma pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan ketergantungan pada sumber energi dengan emisi karbon tinggi, bergeser menjadi pendekatan berkelanjutan, yaitu menuju sumber energi terbarukan dan rendah karbon. Melalui Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan, diharapkan ekonomi Sumatera Selatan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, mencapai ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, mewujudkan ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan dan menurunkan emisi GRK. Transformasi ekonomi yang mengarah ke ekonomi hijau memerlukan hilirisasi SDA unggulan untuk meningkatkan produktivitas dan melakukan inovasi-

inovasi di sektor prioritas terutama sektor berbasis lahan untuk mendukung upaya mencapai *net zero emission*.

2.3.1.9 Ancaman Stabilitas Daerah Masih Tinggi

a) Tingkat Demokrasi Daerah

Terdapat potensi permasalahan stabilitas demokrasi daerah. Walaupun nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 yaitu sebesar 78,17, berada pada kategori tinggi, namun relatif masih belum maksimal. IDI Sumatera Selatan tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan IDI nasional yang mencapai 79,51. Tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas, antara lain: (1) Kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya konflik sosial dan politik. Hal ini karena masyarakat yang miskin dan tertinggal secara ekonomi cenderung lebih rentan terhadap provokasi dan propaganda dari pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas daerah. (2) Rendahnya ruang demokrasi terbuka dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat memicu terjadinya protes dan demonstrasi yang dapat berujung pada konflik sosial.

b) Tingkat Kriminalitas

Risiko penduduk terkena tindak pidana di Sumatera Selatan sama dengan nasional yang sebesar 137,00 pada tahun 2023. Berdasarkan data BPS, risiko penduduk terkena tindak pidana (*crime rate*) per 100.000 penduduk di Sumatera Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar 214,00. Angka ini berarti bahwa setiap 100.000 penduduk di Sumatera Selatan, terdapat 10,473 kasus tindak pidana yang terjadi. Adapun potensi permasalahan stabilitas daerah dari aspek tingkat kriminalitas antara lain: (1) Potensi rawan terhadap tindak pidana terorisme karena memiliki perbatasan dengan negara Malaysia, yang merupakan salah satu negara asal jaringan terorisme internasional. (2) Potensi rawan terhadap tindak pidana narkoba, karena Sumatera Selatan merupakan daerah transit dan tujuan peredaran narkoba dari berbagai wilayah di Indonesia. (3) Potensi rawan terhadap tindak pidana premanisme di dorong oleh tingkat urbanisasi yang tinggi, yang dapat memicu terjadinya kriminalitas akibat persaingan antar kelompok masyarakat.

2.3.1.10 Inovasi Daerah Masih Belum Optimal

Provinsi Sumatera Selatan berhasil menjadi salah satu provinsi dengan predikat Provinsi Sangat Inovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) pada tahun 2020 - 2024. Tetapi pelaksanaan Inovasi Daerah belum optimal karena : (1) Kurang tersedianya sumber daya manusia yang kompeten seperti kurangnya jumlah peneliti, perekayasa, analis kebijakan. (2) Kurang tersedianya dana yang memadai dalam mendorong inovasi dan riset, serta insentif bagi pelaku inovasi. (3) Terbatasnya jumlah pengembangan inovasi dan teknologi . (4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendorong inovasi dan apresiasi terhadap hasil-hasil inovasi. (5) Persaingan global dan antar wilayah yang semakin ketat menuntut daerah untuk terus berinovasi agar dapat bersaing dengan daerah lain. (6) Perubahan teknologi yang semakin cepat menuntut daerah untuk terus mengikuti perkembangan teknologi agar dapat memanfaatkannya secara optimal. (7) Ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga dapat berdampak negatif terhadap inovasi.

2.3.1.11 Reformasi Birokrasi yang Belum Optimal

Kebijakan reformasi birokrasi akan mendukung capaian pembangunan daerah melalui perbaikan indikator pembangunan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan dapat diprediksi (*predictability*). Reformasi birokrasi Provinsi Sumatera Selatan belum optimal terlihat dari Indeks Keterbukaan Informasi dan Integritas di bawah nasional. Dari 17 kabupaten/kota hanya Kabupaten Muara Enim yang terkategori B sedangkan kabupaten/kota lainnya masih terkategori C atau CC. Sementara itu, indeks pelayanan publik masih belum merata di pemerintah kabupaten/kota. Permasalahan dalam meningkatkan tata kelola yang baik yaitu: (1) kebijakan tata kelola pada tingkat pemerintah pusat masih terkesan belum terintegrasi (*fragmented*), tumpang tindih dan cenderung cepat berubah seperti aturan SKP. Fungsional dan aturan rentang kendali antara pejabat struktural dan pejabat fungsional sehingga berdampak pada kebijakan yang inkonsisten di pemerintah daerah. (2) Kualitas sumberdaya ASN yang belum merata, dan fungsional di setiap daerah.

2.3.2. Isu Strategis

Penetapan isu strategis didasarkan pada isu strategis global, nasional, regional, isu strategis KLHS RPJMD 2025-2029 yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka Isu strategis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan dan Stunting yang masih tinggi;
2. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal;
3. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal;
4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal;
5. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal;
6. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal;
7. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah;
8. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan;
9. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial.

Tabel 2.170
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2024

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPD Tahun 2024 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Kinerja	Rp. Juta	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp. Juta)	
1	2		3	4	5		6		7		8		(9) = (8) / (7) x 100%		(10) = (6) + (8)		(11) = (10) / (5) x 100%		12
1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar		0														
1	1		Pendidikan		0														
1	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	100%		99,79%	1.295.226	100,0%	1.575.662	97,00%	1.523.383	97,00	97,00	1,97	2.818.609	100%	8.160.823	Dinas Pendidikan
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	%	90%		100%	804.151	100,00%	1.147.336	90%	1.033.834	90,00	90,00	1,90	1.837.986	90%	2.571.786	Dinas Pendidikan
1	1	3	Program Pengembangan Kurikulum		1		100%	457	100%	2.709	84%	2.270	84,00	84,00	1,84	2.727	100%	377	Dinas Pendidikan
1	2		Kesehatan												0,00			-	
1	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%			94%	376.651	100%	201.488	97%	195.637	97%	97%	191%	195.637	100%	782.062	Dinas Kesehatan
				%					100%	45.472	97%	42.652	97%	94%	97%	42.652			RS ERBA
				%					100%	183.814	102%	190.655	102%	104%	102%	190.655			RS Siti Fatimah
									100%	15.677	95%	14.857	95%	95%	95%	14.857			RS Gigi Mulut
				%					100%	48.920	95%	44.227	95%	90%	95%	44.227			RS Mata
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		1		84,81%	387.482	90%	263.898	97%	256.552	108,02	97,22	1,82	644.034	100%	931.416	Dinas Kesehatan
				%					100%	2.933	100%	2.926	100%	100%	100%	2.926			- RS Ernaldi Bahar
				%					80%	145.178	98%	139.863	123%	96%	98%	139.863			- RS Siti Fatimah
				%					100%	300	100%	300	100%	100%	100%	300			- RS Gigi Mulut
				%					100%	1.153	99%	1.137	99%	99%	99%	1.137			- RS Mata
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	-		82,1%	722	100%	493	87,37%	431	87,37	13.163	1,69	1.153			- Dinas Kesehatan
				%					100%	23.957	97%	22.751	97%	95%	97%	22.751			- RS Siti Fatimah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPD Tahun 2024 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)	
1	2			3	4	5		6		7		8		(9) = (8) / (7) x 100%		(10) = (6) + (8)		(11) = (10) / (5) x 100%		12
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memiliki Izin Edar yang memenuhi Persyaratan Kesehatan	%	-		94%	441	80%	118	74%	88	92,76	13.163	1,68	529			- Dinas Kesehatan
1	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	0%		92,72%	6.297	75%	1.823	89%	1.625	118,85	89,14	1,82	7.923			- Dinas Kesehatan
				Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%					100%	468	79%	272	79%	58%	79%	272			- RS Siti Fatimah
				Persentase terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%					100%	238	63%	75	63%	32%	63%	75			- RS Ernaldi Bahar
1	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	-
1	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			0%		100,00%	107.831	100%	52.763	87,52%	46.107	87,52	87,52	1,38	100.023			-
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%		100%	25.998	100%	75.890	87,20%	66.182	87,20	87,21	0,87	66.182			- Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%		100%	81.833	100%	29.636	87,84%	26.033	87,84	87,84	1,88	133.864			- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase kawasan bebas bencana banjir dan longsor	%	0%		98,24%	68.716	100,00%	67.635	93,60%	63.309	93,60	93,60	1,94	89.307			- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	%	0%		97,69%	784.276	89%	739.382	92,52%	685.343	104,18	93	1,90	784.380			- Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
1	3	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi			0	-		2.130	89%	1.880		1	-	1.880		#DIV/0!			- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah instruktur/asesor/penyenggara pelatihan yang disiapkan	orang			30 orang		89%		n/a	n/a	#VALUE!						-
				Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi yang dilaksanakan	orang			160 orang		89%		n/a	n/a	#VALUE!						-
				Jumlah Sertifikasi tenaga ahli konstruksi yang difasilitasi	orang			40 orang		89%		n/a	n/a	#VALUE!						-
				Jumlah SDM Jasa Konstruksi	Orang	0	-	750		89%		0	#DIV/0!	0,13		#DIV/0!	#DIV/0!			-
				Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	-	-	-		89%		#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!		#VALUE!	#DIV/0!			-
1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	0%		100%	2.118	20%	5.556	35%	1.947	174	35,04	1,35	4.065			- Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
1	4		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											-						-
1	4	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%		100%	26.652	100,00	34.513	89%	30.574	0,89	25.039					- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPD Tahun 2024 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp. Juta)	
1	2	3	4	5		6		7		8		(9) = (8) / (7) x 100%		(10) = (6) + (8)		(11) = (10) / (5) x 100%		12
1	4	2 Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0,000%	-	1.310	82%	413	97%	401	-	1.171					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0%	-	-	82%				-		#DIV/0!	#DIV/0!			
1	4	3 Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	0	100%	21.311	11%	12.593	92%	11.587	820,87	20.391					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	5 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan permukiman yang sudah dilengkapi PSU	%	0	100%	25.953	34%	59.590	95%	56.645	279,42	24.617					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	6 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah di wilayah provinsi yang tersertifikasi	%	0	-	-	1%	164	89,2%	146	8.919,00		#DIV/0!	#DIV/0!			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah dokumen air minum regional yang tersusun	Dokumen				1	950	89,0%	845							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%				1%										Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	4 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen pendukung pembangunan infrastruktur persampahan regional yang tersusun	Dokumen				2	390	93,9%	366							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	%				1%	400	85,4%	342							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Mengoperasikan IPLT	Kab/Kota				10										Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah dokumen sanitasi regional yang tersusun	Dokumen				1										Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	6 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang Dibangun	Meter				200	2.391	97,3%	2.325							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah dokumen pendukung pembangunan infrastruktur drainase regional dan daerah strategis provinsi yang tersusun	Dokumen				1										Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	8 Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang	%				31%	1.509	96,3%	1.453							Dinas Perumahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPD Tahun 2024 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)	
1	2		3	4	5		6		7		8		(9) = (8) / (7) x 100%		(10) = (6) + (8)		(11) = (10) / (5) x 100%		12
1 3 9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan yang tertangani	%					31%	4.431	84,9%	3.761							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 3 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	%					0,46%	4.076	90,7%	3.696							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				0														-
1 5 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								100%	27.006	95,53%	25.203	96%	94%	96%	25.203			-
			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%				100%	34.455	96,2%	31.862	96%	92%	96%	31.862			- Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%				100%	19.558	94,8%	18.544	95%	95%	95%	18.544			- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	0%				100%	1.984	94,3%	1.980	94%	100%	94%	1.980			- Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 3	Program Penanggulangan Bencana			%	0%		97%	9.207	100%	13.173	96,9%	12.759	96,86	97%	1,94	21.966			- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%					50%	381	99,9%	380	200%	100%	100%	380			- Satuan Polisi Pamong Praja
1 6	Sosial																		-
1 6 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%		90,45%	20.600	100%	20.190	91%	18.437	91%	91%	182%	20.601			- Dinas Sosial
1 6 2	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di berdayakan	%	0				100,00%	450	96%	431	96%	96%	0%	431			- Dinas Sosial
1 6 3	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase PMKS yang mendapatkan program rehabilitasi sosial		0%				100%	8.077	99%	8.012	99%	99%	99%	8.012			- Dinas Sosial
1 6 4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Korban Bencana dan kelompok rentan yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	KK	0		84,93%	7.743	100%	27.632	100%	27.528	100%	100%	185%	35.272			- Dinas Sosial
1 6 5	Program Penanganan Bencana		Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat provinsi	%	0%		71,73%	907	100%	873	98%	853	98%	98%	170%	1.761			- Dinas Sosial
1 6 6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Sumse	%	0%		98,71%	107	100%	108	81%	88	81%	81%	180%	195			- Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPD Tahun 2024 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)	
1	2		3	4	5		6		7		8		(9) = (8) / (7) x 100%		(10) = (6) + (8)		(11) = (10) / (5) x 100%		12
1	6	7	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	%	0%	0%	-	100%	33	95,36%	31,47	95,36%	95%	95%	31,47			- Dinas Sosial
			Layanan Urusan Wajib Non Dasar			0													-
2	7		Tenaga Kerja			0													-
2	7	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%	99,88%	28.855	100%	29.339	96%	28.200	96%	96%	196%	57.055			- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	0%	-	100%	100%	100	66%	99	66%	99%	166%	159			- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			0,00%	99,6%	49,8	100%	50	44%	44	44%	87%	143%	93			- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0,00%	-	0,15%											-
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	-	-	72.800.000											-
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	0%	100%	109,8	100%	226	63%	117	63%	52%	163%	227			- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	Program Hubungan Industrial			0%	91,61%	416	100%	98	0,64295	0		215					- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	6	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	%	0%	96,48%	313,6	100	66	100	0	100,00	66					- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	8		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			0													-
2	8	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%	98%	9.191	100%	8.980	98%	8.547	98%	95%	196%	17.738			- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada BL APBD	%	0,00%	100%	1.858	100%	999	96%	962	96%	96%	196%	2.820			- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	Indeks Kepuasan Masyarakat PPA	%	0,00%	95%	310	100%	315	90%	285	90%	90%	185%	594			- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan peningkatan Ketahanan Keluarga		0,00%	100%	309	59%	182	99%	180	168%	99%	199%	489			- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		0,00%	100%	245	100%	140	93%	130	93%	93%	193%	246			- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPD Tahun 2024 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp. Juta)	
1	2	3	4	5		6		7		8		(9) = (8) / (7) x 100%		(10) = (6) + (8)		(11) = (10) / (5) x 100%		12
2 8 6	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan upaya peningkatan pemenuhan hak anak		0%		100%	338	100%	303	99%	299	99%	99%	101%	636			- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 8 7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Peningkatan Perlindungan Khusus Anak		-		92%	440	50%	650	98%	635	196%	98%	190%	1.075			- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 9	Pangan																	-
2 9 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%			94,60%	22.138	100,00%	26.724	95%	24.110	95%	90%	190%	46.248			- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2 9 3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat						100,00%	1.290	100%	1.289	100%	100%	100%	1.289			
2 9 3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah pangan segar asak tumbuhan yang bersertifikasi	KK					100,00%	75	100%	1.289	100%	1719%	100%	1.289			- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2 10	Pertanahan																	-
2 10 2	Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Peningkatan Pengawasan Internal	%	-		100%	183	100	160	100	1	100,00	160					- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 10 3	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Surat Keputusan Penetapan Tanah Lokasi	%	-		100%	287	100%	110	91%	101	91%	91%		388			- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 10 4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Peningkatan Pengawasan Internal	%	-		100%	270	100	330	100	1	100,00	330	191%				- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 10 5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan	%	-		100%	9.037	100	3.270	100	0	100,00	3.270					- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 11	Lingkungan Hidup																	-
2 11 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%		100%	39.631	100%	47.097	98%	45.702	98%	97%	198%	85.333			- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 11 2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	0,00		100%	298	83%	270	100%	269	119,6%	99,7%	200%	568			- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 11 3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			0,00		100%	2.476	87%	1.953	98%	1.884	112%	96%	198%	4.360			- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	0,00			70,79		72			-						
		Persentase Penurunan Emisi GRK	%	0			6,18		8%									
2 11 4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terbangunnya taman kehati Provinsi Sumatera Selatan	Taman	0		100%	196	98%	265	87,4%	207	89,6%	78,1%	187%	403			- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPD Tahun 2024 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)	
1	2	3	4	5		6		7		8		(9) = (8) / (7) x 100%		(10) = (6) + (8)		(11) = (10) / (5) x 100%		12
2 11 5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah Kab/Kota	%	0%		100%	139	51%	100	53%	100	105%	100%	153%	239			- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 11 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		-		100%	501	56%	200	58%	198	104%	100%	158%	699			- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 11 7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisasi	Masyarakat Hukum Adat	0		100%	47	98%	30	97%	28	99%	94%	197%	75			- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 11 8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	0,00		100%	567	83%	259	85%	253	169%	98%	185%	820			- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 11 9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	0,00		100%	623	83%	556	86%	549	103%	99%	186%	1.172			- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 11 10	Program Pengelolaan persampahan	persentase pengurangan timbulah sampah rumah tangga	%	-		100%	49	66%	201	66%	191	100%	95%	166%	240			- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	-
2 12 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%			86%	8.553	100%	10.232	94%	9.788	94%	96%	180%	18.342			- Dinas Kependudukan dan Pencatatan
2 12 2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Terlaksananya Program Pendaftaran Penduduk	%			80%	80	100%	54	79%	54	79%	100%	159%	134			- Dinas Kependudukan dan Pencatatan
2 12 3	Program Pencatatan Sipil	Prosentase Terlaksananya Program Pencatatan Sipil	%			86%	80	100%	45	99%	44	99%	97%	185%	124			- Dinas Kependudukan dan Pencatatan
2 12 4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun	%			100%	26	100%	32	99%	44	99%	137%	198%	70			- Dinas Kependudukan dan Pencatatan
2 12 5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%			96%	72	100%	74	100%	32	100%	43%	196%	104			- Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1 13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	-
2 13	Pemberdayaan Masyarakat Desa																	-
2 13 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%					100%	12.885	91%	10.582	91%	82%	91%	10.582			- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPD Tahun 2024 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)	
1	2	3	4	5		6		7		8		(9) = (8) / (7) x 100%		(10) = (6) + (8)		(11) = (10) / (5) x 100%		12
2 13	2 Program Penataan Desa	Persentase Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Desa	%					100%	11	76%	6	76%	52%	76%	6			- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13	3 Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	%					100%	270	97%	255	97%	94%	97%	255			- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13	4 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	%					100%	1.409	98%	1.346	98%	95%	98%	1.346			- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13	5 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%					100%	4.359	89%	3.430	89%	79%	89%	3.430			- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 15	Perhubungan																	-
2 15	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi	%	0%		97,62%	33.595	100%	42.706	95%	40.577	94,67	25.706					- Dinas Perhubungan
2 15	2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 Juta Keberangkatan	Rasio	0,00%		100%	2.451	100,00	3.777	94	3.542	93,77	3.943					- Dinas Perhubungan
2 15	3 Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah trip perjalanan kapal	Trip	-		100%	4.475	100	2.822	91	2.569	91,03	2.053					- Dinas Perhubungan
2 15	5 Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah Penumpang Kereta Api	Orang	-		100%	164	-	223	89%	198	#DIV/0!	539					- Dinas Perhubungan
2 16	Komunikasi dan Informatika																	-
2 16	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%	-	90%	13.561	90%	15.758	91%	14.432	101%	92%	181%	27.993	0%	#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16	2 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	0%	-	90%	10.692	80%	6.520	99%	6.481	124%	99%	189%	17.173	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0%	-	70%	1.478	70%	1.511	98%	1.478	140%	98%	168%	2.956	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16	3 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase jenis pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	%	0%		91%	5.338	90%	3.312	97%	5.338	108%	161%	187%	10.676	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	-
2 17	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%		95,63%	13.631	100%	10.337	98%	9.887	98%	96%	193%	23.517			- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2 17	3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	Unit	-		99%	198	100%	50	100%	50	100%	100%	199%	248			- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2 17	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					99%	99	100%	20	100%	20	100%	100%	199%	119			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPD Tahun 2024 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)	
1	2	3	4	5		6		7		8		(9) = (8) / (7) x 100%		(10) = (6) + (8)		(11) = (10) / (5) x 100%		12
2 17 5	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian			-		94%	3.657	100%	1.343	96%	1.238	96%	92%	190%	4.895			- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2 17 6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			0%		96%	576	100%	175	99%	171	99%	97%	195%	747			- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2 17 7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirasusaha		-		93%	124	100%	2.654	95%	2.393	95%	90%	188%	2.517			- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2 17 8	Program Pengembangan UMKM	Prosentase kenaikan omset UMKM	persen	-		91%	3.908	100%	629	89%	486	89%	77%	179%	4.394			- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2 18	Penanaman Modal																	-
2 18 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%					100%	15.855	96%	15.838	96%	100%	96%	15.838			- Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tersedianya peta digital dan dokumen kajian peta potensi dan peluang investasi	Dokumen	0				7%	470	99%	458	1410%	97%	99%	458			- Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 3	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Investasi	%	0%				100%	290	99%	284	99%	98%	99%	284			- Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Tercapainya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan	%					100%	700	97%	656	97%	94%	97%	656			- Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tercapainya nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Trilyun	0		100%	1.042	100%	1.320	95%	1.141	95%	86%	195%	2.183			- Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan nilai investasi PM	%	0%		100%	268	100%	55	98%	53	98%	97%	198%	321			- Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 19	Kepemudaan dan Olahraga			0														-
2 19 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%				100%	22.200	98%	21.216	98%	96%	98%	21.216			- Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			0%				100%	4.761	98%	4.548	98%	96%	98%	4.548			- Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan			0%				100%	64.448	99%	63.401	99%	98%	99%	63.401			- Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Aktifitas Kepramukaan	%					100%	5.700	100%	5.691	100%	100%	100%	5.691			- Dinas Pemuda dan Olahraga
2 20	Statistik																	-
2 20 2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	0%		95%	359	100%	213	100%	150	100%	71%	195%	510	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	0%	-	100%	27	100%	33	100%	27	100%	82%	200%	54	#DIV/0!	#DIV/0!	
2 21	Persandian																	-

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPD Tahun 2024 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp. Juta)	
1	2	3	4	5		6		7		8		(9) = (8) / (7) x 100%		(10) = (6) + (8)		(11) = (10) / (5) x 100%		12
2 21	2 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0%		93%	228	100%	77	82%	77	82%	100%	175%	305	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 22	Kebudayaan																	-
2 22	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%	-	89%	24.622	100%	25.150	95%	22.591	95%	90%	184%	47.212			- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22	2 Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	0		96%	6.732	100%	2.654	98%	2.564	98%	97%	194%	9.296			- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22	3 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	0		99%	396	100%	130	100%	130	100%	100%	199%	526			- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22	5 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	-		96%	313,1	100%	100	100%	100	100%	100%	196%	413			- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22	6 Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Kunjungan Museum	Orang	0		91%	4.662	100%	4.040	94%	3.566	94%	88%	185%	8.228			- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 23	Perpustakaan			0														-
2 23	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%					100%	19.306	93%	18.156	93%	94%	93%	18.156			- Dinas Perpustakaan
2 23	2 Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yangterkelola sesuai Standar	%					100%	1.687	99%	1.662	99%	98%	99%	1.662			- Dinas Perpustakaan
2 23	3 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian Koleksi Naional yang Terhimpun	%					100%	362	98%	350	98%	97%	98%	350			- Dinas Perpustakaan
2 24	Kearsipan																	-
2 24	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%		86,35%	10.877	100%	11.917	98%	11.370	98%	95%	184%	22.247			- Dinas Kearsipan
2 24	2 Program Pengelolaan Arsip	Persentase Tercapainya Program Pengelolaan Arsip	%	0%		93,02%	581	100%	530	98%	504	98%	95%	191%	1.086			- Dinas Kearsipan
2 24	3 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		0%		99%	174	100%	155	97%	153	97%	98%	197%	326			- Dinas Kearsipan
3	Layanan Urusan Pilihan																	-
3 25	Kelautan dan Perikanan																	-
3 25	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%			93%	20.140	100%	25.258	97%	23.583	97%	93%	190%	43.723			- Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25	2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Orang yang Dibina dalam Rangka Penurunan Illegal Fishing dan Lulas Kawasan Konservasi				100%	154	100%	850	95%	770	95%	91%	195%	925			- Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25	3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton), Nilai Tukar Nelayan/NTN				92%	10.227	100%	5.073	99%	4.979	99%	98%	191%	15.206			- Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25	4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				97%	3.840	100%	5.628	100%	5.580	100%	99%	196%	9.419			- Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25	5 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Rangka Penurunan Illegal Fishing	Orang			98%	410	100%	900	100%	894	100%	99%	197%	1.304			- Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25	6 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Sampel yang Teruji (sampel), Penerbitan Sertifikasi Produk Hasil Perikanan				99%	978	100%	2.630	98%	2.507	98%	95%	197%	3.486			- Dinas Kelautan dan Perikanan
3 26	Pariwisata																	-

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPD Tahun 2024 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp. Juta)	
1	2	3	4	5		6		7		8		(9) = (8) / (7) x 100%		(10) = (6) + (8)		(11) = (10) / (5) x 100%		12
3 26	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%		61%	2.502	100,00%	1.931	100%	1.926	100%	100%	161%	4.428			- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 26	3	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pemasaran Pariwisata	%		97%	7.116	100,00%	2.180	99%	2.136	99%	98%	196%	9.252			- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	27	Pertanian																-
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%				100,00%	13.117	96%	12.161	96%	93%	96%	12.161			Dinas Perkebunan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%				100,00%	48.543	95%	46.054	95%	95%	95%	46.054			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3 27	2	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	Persentase Peningkatan Luas Tanaman Menghasilkan	%				100,00%	6.787	100%	6.778	100%	100%	100%	6.778			-
			produksi daging, susu dan telur	%				100,00%	512	99%	505	99%	99%	99%	505			
			Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura					100,00%	9.352	96%	8.786	96%	94%	96%	8.786			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Persentase Peningkatan Luas Tanaman Menghasilkan	%				100,00%	59	100%	59	100%	99%	100%	59			Dinas Perkebunan
3 27	3	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana Perkebunan Yang Dimanfaatkan	%				100,00%	1.169	97%	1.168	97%	100%	97%	1.168			-
			Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam	%				100,00%	2.699	92%	2.256	92%	84%	92%	2.256			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3 27	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Ternak	%				100,00%	225	100%	224	100%	99%	100%	224			- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3 27	7	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan program penyuluhan pertanian	%				100,00%	4.882	100%	4.881	100%	100%	100%	4.881			- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	%				100,00%	340	96%	313	96%	92%	96%	313			- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	1 Dokumen				100,00%	30.108	100%	30.025	100%	100%	100%	30.025			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3 28	Kehutanan																	-
3 28	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%	95,71%	48.380	100%	52.327	94,36%	49.910	94%	95%	190%	98.291			Dinas Kehutanan
3 28	3	Program Pengelolaan Hutan	Persentase Pengelolaan Hutan	%	0%	92,15%	3.498	100%	5.628	82,28%	4.060	82%	72%	174%	7.558			Dinas Kehutanan
3 28	4	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	%	0%	96,52%	82	100%	72	99,10%	70	99%	98%	196%	152			Dinas Kehutanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPD Tahun 2024 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)	
1	2	3	4	5		6		7		8		(9) = (8) / (7) x 100%		(10) = (6) + (8)		(11) = (10) / (5) x 100%		12
3 28	5 Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	%	0%		89,06%	1.064	100%	437	97,95%	419	98%	96%	187%	1.483			Dinas Kehutanan
3 28	6 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	0%		99,52%	100	100%	40	97,63%	38	98%	95%	197%	138			Dinas Kehutanan
3 29	Energi dan Sumber Daya Mineral																	-
3 29	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%		88,61%	22.613	100%	22.685	97,15%	21.392	97%	94%	186%	44.005			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29	2 Program Pengelolaan Aspek Geogeologian	Persentase Sumur Bor Air Tanah yang Mendapatkan Rekomendasi Teknis dan Diperolehnya Data Teknis Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah	%	0%		99,50%	298	100%	200	99,56%	198	100%	99%	199%	497			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29	3 Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Meningkatkan Permohonan WIUP	%	0%		97,02%	1.164	100%	450	96,55%	419	97%	93%	194%	1.583			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29	5 Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Meningkatnya Pemanfaatan EBT	%	0%		99,70%	50	100%	50	99,78%	50	100%	100%	199%	100			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29	6 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Desa Berlistrik	%	0%		54,37%	1.653	100%	1.419	99,54%	1.406	100%	99%	154%	3.059			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 30	Perdagangan																	-
3 30	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%					100%	11.156	94%	10.438	94%	94%	94%	10.438			- Dinas Perindustrian
3 30	2 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Tertib Usaha	%					100%	50	92%	46	92%	92%	92%	46			- Dinas Perindustrian
3 30	3 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan	Unit					452	500	452	496	100%	99%	452	496			- Dinas Perindustrian
3 30	4 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	% (≤5%)				325	100%	200	100%	198	100%	99%	100%	523			- Dinas Perindustrian
3 30	5 Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%					2,5% - 5%	280	99%	277	99%	99%	99%	277			- Dinas Perindustrian
3 30	6 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen							100%	731	97%	705	97%	96%	97%	705			- Dinas Perindustrian
		Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	%					70%										
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	%					90%										
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%					100%										
3 31	Perindustrian																	-
3 31	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%				100%	10.815	95%	9.756	95%	90%	95%	9.756			- Dinas Perindustrian
3 31	2 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Terlaksananya Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan baik	%	0%				100%	1.204	93%	1.043	93%	87%	93%	1.043			- Dinas Perindustrian
3 31	3 Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Terlaksananya Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan baik	Industri	0%				230	200	261	192	113%	96%	261	192			- Dinas Perindustrian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPD Tahun 2024 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)	
1	2	3	4	5		6		7		8		(9) = (8) / (7) x 100%		(10) = (6) + (8)		(11) = (10) / (5) x 100%		12
3 31	4 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Terlaksananya Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Industri	0%				230	175	261	171	113%	98%	261	171			- Dinas Perindustrian
3 32	4 Transmigrasi																	-
3 32	4 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pembangunan Transmigrasi Sumsel		-		n/a	80	n/a	64	n/a	1		64					- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	-
4 1	4 Sekretariat Daerah																	-
4 1 1	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%					100%	285.902	81%	260.796	81%	91%	81%	260.796			Sekretariat Daerah
4 1 2	2 Program Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	%					100%	1.082	94%	948	94%	88%	94%	948			Biro Organisasi
4 1 3	3 Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	%					100%	22.523	99%	22.219	99%	99%	99%	22.219			Sekretariat Daerah
4 1 4	4 Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	%					100%	37.338	78%	35.563	78%	95%	78%	35.563			Sekretariat Daerah (Biro Kesra)
4 1 5	5 Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Penetapan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku	%					100%	1.664	72%	1.550	72%	93%	72%	1.550			Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
4 1 6	6 Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang difasilitasi	%					100%	2.288	69%	2.033	69%	89%	69%	2.033			Sekretariat Daerah
4 1 7	7 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa	%					100%	4.265	97%	4.049	97%	95%	97%	4.049			Biro PBJ
4 1 8	8 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	%					100%	750	76%	570	76%	76%	76%	570			Sekretariat Daerah (Biro Adpem)
4 2	4 Sekretariat DPRD																	-
4 2 1	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan yang terlayani	%	0%		100%	198.204	100,00	213.457	100	195.746	99,87	165.493					- Sekretariat DPRD
4 2 2	2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Administrasi DPRD yang terlayani	%	0%		100%	107.993	100,00	185.786	89	164.780	88,69	104.926					- Sekretariat DPRD
5	5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																	-
5 1	5 Perencanaan Pembangunan																	-
5 1 1	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%		93%	32.350	100%	25.362	98%	24.893	98%	98%	191%	57.242			- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 1 2	2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	%	0%		92%	4.613	80%	2.732	96%	2.703	120%	99%	188%	7.316			- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 1 3	3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen	%	0%		90%	3.399	90%	2.677	89%	2.593	99%	97%	179%	5.992			- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 2	5 Keuangan																	-
5 2 1	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			0%														-
		Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	0%		82%	188.735	100%	43.627	96%	42.001	96%	96%	179%	230.736			- Badan Pendapatan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPD Tahun 2024 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)	
1	2		3	4	5		6		7		8		(9) = (8) / (7) x 100%		(10) = (6) + (8)		(11) = (10) / (5) x 100%		12
			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%		95%	36.274	100%	234.583	90%	212.147,11	90%	69.624	185%	248.421			- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	APBD yang Tepat Waktu	Nilai Deviasi (%)	0%	82%	3.519.169	100%	4.581.410	0	4.308.041	94,03	2.869.290	82%	7.827.210			- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlayani	%	0%		93%	176	100%	220	95%	209	95%	95%	188%	386			- Badan Pendapatan Daerah
5	2	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	0%	92%	5.598	100%	5.823	82%	4.750	82%	4.240	174%	10.348			- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengembangan Pendapatan Daerah yang tercapai	nilai deviasi	-	80%	10.364	100%	6.933	67%	4.657	67%	67%	147%	15.021			- Badan Pendapatan Daerah
5	3	Kepegawaian																	-
5	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%	94%	18.222	100%	18.887	88%	16.528	88%	15.350	181%	34.750			- Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Manajemen ASN	%	0%	86%	3.190	100%	3.525	88%	3.111	88%	1.826	174%	6.301			- Badan Kepegawaian Daerah
5	4	Pendidikan dan Pelatihan																	-
5	4	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%	86%	29.687	100%	36.759	98%	36.148	98%	37.000	184%	65.835			- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	4	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Tercapainya program pengembangan sumber daya manusia	%	0%	100%	1.643	100%	1.214	97%	1.181	97%	2.034	197%	2.823			- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	5	Penelitian dan Pengembangan																	-
5	5	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%		91%	65	100%	15.425	93%	14.392	93%	93%	2	14.457			- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan	%	0%	82%	3.415	100%	1.187	91%	1.084	91%	91%	2	4.500			- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	7	Pengelolaan Penghubung																	-
5	7	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%	100%	14.316	100%	15.045	94%	14.195	94%	94%	194%	28.511	0%	#DIV/0!	Badan Penghubung
5	7	2	Program Pengelolaan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	%	0%	99%	975	100%	1.601	96%	1.536	96%	96%	195%	2.511	0%	#DIV/0!	Badan Penghubung
6		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																	-
6	1	Inspektorat Daerah				0													-
6	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%			100%	28.307	96%	27.056	0	95,6	1	27.056			- Inspektorat
6	1	2	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah	%	0%			100%	3.957	96%	3.792	0	95,8	1	3.792			- Inspektorat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPD Tahun 2024 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)	
1			2	3	4	5		6		7		8		(9) = (8) / (7) x 100%		(10) = (6) + (8)		(11) = (10) / (5) x 100%		12
6	1	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	%	0%				100%	1.003	96%	966	0	96,4	1	966			Inspektorat
8			Urusan Pemerintahan Umum																	-
8	1		Kesatuan Bangsa dan Politik																	-
8	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	0%	-	97%	152.155	100%	13.519	84%	11.329	83,80	84	181%	163.484	0%	#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Mengimplementasi dan Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila	%	0,0%		90%	3.195	99%	3.943	93%	3.685	94,41	93	184%	6.881	0%	#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik	%	0%		100%	136.333	99%	198.793	100%	198.283	100,75	100	200%	334.616	0%	#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Berkinerja	%	0%		78%	659	99%	512	73%	372	73,40	73	151%	1.031	0%	#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Mitra yang Mendukung Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	0%		61%	1.336	99%	1.409	84%	1.189	85,25	84	146%	2.524	0%	#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (Zero Conflict)	%	0%		93%	1.289	99%	72.728	69%	49.994	69,43	69	162%	51.284	0%	#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah saling berkaitan. Setiap terjadi perubahan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya atau menurunnya pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, dan prospek perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, perkiraan keuangan daerah serta kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2026.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 diselaraskan dengan:

- 1). Arahana Pusat yang terdiri dari Tema, Sasaran dan Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
- 2). Arahana RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045.
- 3). Arahana Tata Ruang, yaitu Arahana Kawasan Strategis dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044.
- 4). Arahana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
- 5). Kebijakan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang:
 - a. Berkualitas,
 - b. Berkesinambungan,
 - c. Berkelanjutan,
 - d. Berkeadilan,
 - e. Inklusif,

- f. Mengedepankan penurunan jumlah penduduk miskin,
- g. Pengelolaan inflasi,
- h. Pengelolaan Sektor UKM dan UMKM,
- i. Perluasan lapangan kerja, dan
- j. Peningkatan pertumbuhan investasi.

Kerangka ekonomi daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 menjelaskan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah juga memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2024 serta memperhitungkan pengaruh perkembangan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kesenjangan.

3.1.1. Analisis Perekonomian Nasional

3.1.1.1. Perekonomian Nasional Tahun 2024

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5 (lima) persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2023. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2024 di antaranya adalah intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum di tahun 2024, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif.

Kinerja ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan ketahanan yang kuat dalam mengatasi dampak rambatan global. Pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2024 cukup baik, dengan permintaan domestik menjadi pendorong utama pertumbuhan Indonesia sejalan investasi yang tetap membaik, terutama di sektor bangunan seiring dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN)). Konsumsi rumah tangga, khususnya dari kelompok menengah ke atas, tetap baik, dan ekspor nonmigas mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi.

Selanjutnya, Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 4,65 persen, menjadi US\$4.960,3 atau setara dengan Rp78,617 juta di tahun 2024. Dengan realisasi ini, *Gross National Income* per kapita

Indonesia tahun 2024 diperkirakan sebesar US\$4.810 mempertahankan predikat kategori *upper-middle income country* di tahun 2023.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat.

Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga tahun 2024 tumbuh mencapai 7,42 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini.

Pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto/investasi tumbuh sebesar 4,20 persen secara keseluruhan tahun 2024, menurun 0,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto terutama didorong oleh investasi pada pembangunan perumahan, serta infrastruktur jalan tol dan bendungan. Secara keseluruhan, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto tersebut didukung terutama oleh komponen bangunan, diikuti kendaraan, serta mesin dan perlengkapan. Konsumsi pemerintah tumbuh positif di tahun 2024 sebesar 3,37 persen, setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Realisasi ini didukung oleh pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif di tahun 2024.

Ekspor barang dan jasa mencatatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 19,15 persen di tahun 2024. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa di tahun 2024 sebesar 14,18 persen, mengalami perlambatan yaitu sebesar 1,96 persen utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas. Namun demikian, neraca perdagangan barang masih mengalami surplus sebesar US\$ 36,93 miliar di tahun 2024 yang didorong oleh peningkatan surplus neraca barang nonmigas seperti karet dan barang dari karet dan bubur kayu/ pulp. Karet dan Barang dari karet serta Bahan bakar mineral menjadi komoditas utama dengan nilai ekspor tertinggi. Berdasarkan subkomponen, ekspor barang terkontraksi dipengaruhi oleh adanya penurunan harga 10 besar ekspor

komoditas berdasarkan *Harmonized System Code* selain komoditas nikel. Sementara itu, subkomponen ekspor jasa tumbuh tinggi didukung oleh peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan devisa masuk dari luar negeri. Sementara itu, kinerja impor di tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 46,90 % yang disebabkan oleh adanya peningkatan impor komoditi antara lain Mesin untuk keperluan khusus (142,47%), Mesin untuk keperluan umum (96,96%), dan Generator uap, bukan ketel pemanas (22,70%) yang tumbuh positif.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan realisasi pertumbuhan positif di tahun 2024. Beberapa sektor mampu tumbuh mencapai dua digit, di antaranya sektor Jasa Kesehatan sebesar 13,62 persen, akan tetapi hanya mendistribusikan 0,67 persen dari keseluruhan sektor lapangan usaha.

Transportasi, Real Estate, Jasa Pendidikan, Administrasi Pemerintahan, dan penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing sebesar 3,27 persen, 8,91 persen, 9,43 persen, 8,83 persen dan 9,05 persen. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman masih terus sejalan dengan sektor Jasa Pendidikan, Administrasi pemerintahan, Transportasi, dan real estate mengingat faktor tingginya mobilitas masyarakat, peningkatan kinerja sektor pariwisata, serta persiapan pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kedua sektor tersebut.

Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sektor ekonomi yang cenderung padat modal, dan karenanya sektor ekonomi yang padat tenaga kerja (padat karya) perlu lebih didorong ke depan. Perkembangan ini tecermin pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan sebagai hasil dari hilirisasi sumber daya alam seperti Pertambangan dan Penggalan, serta Industri Pengolahan yang tumbuh relatif tinggi. Sektor-sektor yang mencerminkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas seperti Konstruksi, serta Transportasi dan Perdagangan juga mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sektor-sektor yang sejalan dengan kenaikan konsumsi masyarakat dan digitalisasi seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Makanan-Minuman (Akmamin), serta Informasi dan Komunikasi, juga

makin tumbuh tinggi. Demikian pula berbagai sektor jasa seperti Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang terus

menunjukkan peningkatan. Perkembangan berbagai lapangan usaha ini menunjukkan pola pemulihan ekonomi Indonesia pasca-Covid-19 yang makin kuat, dari sektor-sektor yang makin pulih dari dampak memar (scarring effect) Covid-19 pada periode 2021-2022 ke sektorsektor yang berorientasi ekspor pada periode 2022-2024, dan selanjutnya ke sektorsektor untuk makin mendorong permintaan domestic ke depan. Ke depan, perkembangan sektorsektor seperti Pertanian, Perdagangan khususnya eceran, makan minum, Informasi dan Komunikasi khususnya digitalisasi, serta berbagai sektor jasa, perlu terus didorong karena tidak saja penting untuk pertumbuhan berkelanjutan, tetapi juga untuk penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Pola pertumbuhan dengan keseimbangan antara sektor padat modal dan padat tenaga kerja seperti inilah yang perlu ditingkatkan dan diperluas untuk memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi nasional yang lebih tinggi ke depan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks dan normalisasi harga komoditas dunia, industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 3,91 persen di tahun 2024. Kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 2024 pun menunjukkan gejala *maturity* walaupun masih sangat terbatas, yakni mencapai 24,69 persen atau turun 6.02 persen dibandingkan tahun 2023 (18,67 persen).

Pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 4,04 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Aktivitas konstruksi secara keseluruhan meningkat, tecermin dari realisasi pertumbuhan konsumsi semen domestik dan meningkatnya penanaman modal asing dan dalam negeri. Sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 7,88 persen, sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik pada subkomponen perdagangan besar dan eceran, serta peningkatan penjualan sepeda motor pada subkomponen perdagangan mobil dan sepeda motor.

Kinirja pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang solid, tumbuh positif walaupun ada perlambatan pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03% sama dengan pertumbuhan ekonomi Nasional. Kondisi ini menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 berdasarkan trend diperkirakan tumbuh sebesar 4,80 – 5,60 persen walaupun ditargetkan secara optimis oleh Bappenas sebesar 7,1 persen.

Inflasi selama tahun 2024 menurun dan berada dalam rentang sasaran $2,5\pm 1\%$ didukung kebijakan moneter Bank Indonesia yang konsisten serta koordinasi yang erat dengan Pemerintah terutama adanya koordinasi yang saling bersinergis dari TPID Provinsi Sumatera Selatan. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap terjaga sebesar 1,57% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level 2,26% (yoy)

1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Agenda Transformasi Ekonomi berdampak positif pada pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,54 persen dari 5,86 persen di tahun 2022 menjadi 5,32 persen. Pada tahun 2023, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta cukup besar, yaitu mencapai 4,55 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,12 juta orang. Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada tahun 2024, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,0-5,7 persen. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah melakukan program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian antara lain melalui pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pelatihan vokasi, dan Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja akan meneruskan skema awal yang dimulai

sejak tahun 2023, yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan vokasi.

2) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 9,36 persen dari 9,57 persen di September 2022. Penurunan kemiskinan dalam satu semester ini dikarenakan beberapa faktor baik dari stabilitas makro maupun program-program afirmasi. Selain penurunan inflasi periode Maret 2022-Maret 2023 dan konsumsi rumah tangga yang meningkat pada triwulan I 2023, penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan sembako juga sudah melebihi 85 persen di triwulan I 2023. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,5–7,5 persen dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, namun dengan mempertimbangkan perkembangan saat ini pemerintah memprakirakan angka kemiskinan tahun 2024 masih berada di kisaran 8,5–9,0 persen.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sehingga upaya penurunan kemiskinan yang dilakukan pemerintah memerlukan pendekatan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Sebagian dari Reformasi Sistem Perlindungan Sosial sudah dilakukan, yaitu melalui pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi dengan pemanfaatan telah dilakukan di 161 kabupaten/kota. Hal ini untuk menjamin perencanaan dan penganggaran program, khususnya untuk pengurangan kemiskinan dilakukan berdasarkan data yang akurat. Beberapa hal lainnya masih terus dilanjutkan, antara lain (1) penyiapan regulasi berupa Instruksi Presiden Registrasi Sosial Ekonomi untuk mengatur pemanfaatan dan pemutakhiran data secara berkala; (2) perluasan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk implementasi skema perlindungan sosial adaptif; (3) finalisasi instrumen graduasi program bantuan sosial dan komplementaritas program melalui pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dilakukan lintas sektor; (4) peningkatan Standar Pelayanan Minimum khususnya di bidang sosial; dan (5) penjangkauan aktif terhadap kelompok miskin dan rentan, seperti anak telantar, lanjut

usia, penyandang disabilitas, dan korban bencana yang memerlukan bantuan dan layanan pemerintah.

3) Rasio Gini

Angka rasio gini cukup terkendali karena pemerintah memberikan banyak bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara masyarakat berpenghasilan tinggi tertahan pertumbuhannya akibat dari lesunya perekonomian. Namun setelah pandemi berakhir dan ekonomi mulai tumbuh, masyarakat berpenghasilan tinggi mulai merasakan dampak positif dari pulihnya ekonomi sehingga pengeluaran penduduk tersebut mengalami kenaikan. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah terlambat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi setelah pandemi sehingga pengeluaran mereka relatif tidak bertumbuh. Hal tersebut mengakibatkan rasio gini mengalami kenaikan setelah pandemi berakhir.

Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2024, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diprediksi terus membaik setelah pandemi berakhir. Kemudian, dampak dari perbaikan kondisi perekonomian Indonesia dirasakan secara berbeda oleh kedua kelompok masyarakat tersebut, sehingga ketimpangan antarkedua kelompok masyarakat tersebut tetap lebar. Akan tetapi, angka rasio gini di tahun 2024 diprediksi akan lebih baik dibandingkan dengan angka rasio gini di Maret 2023. Menurut penghitungan proyeksi, angka rasio gini tahun 2024 akan berada pada angka 0,381–0,384.

4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 0,64 poin dari nilai 72,91 pada tahun 2022 menjadi 73,55 di tahun 2023. Capaian ini disumbangkan khususnya pada aspek standar hidup layak dan pengetahuan yang ditunjang oleh akselerasi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2024, diperkirakan kinerja pelayanan kesehatan dan aktivitas pembelajaran akan meningkat sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bidang kesehatan dan pendidikan. Pemanfaatan teknologi yang menunjang kedua pelayanan dasar tersebut perlu terus ditingkatkan dan

dikembangkan dalam rangka perluasan akses dan perbaikan kualitas layanan yang berdampak pada peningkatan capaian indikator pembangunan ke depannya.

3.1.1.2. Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2025

Prospek perekonomian Indonesia akan terus membaik. Penguatan sinergi kebijakan transformasi ekonomi nasional yang mendukung implementasi berbagai program strategis yang telah dirancang oleh Pemerintah diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari 4,7–5,5% pada 2025 menjadi 4,8–5,6% pada 2026 dan terus meningkat hingga 6,7–7,5% pada 2030. Stabilitas harga juga diperkirakan tetap terjaga dengan inflasi yang terkendali pada kisaran $2,5 \pm 1\%$, disertai dengan defisit transaksi berjalan yang terjaga rendah sekitar 1,1–1,9% dari PDB pada tahun 2030. Sejalan dengan itu, kredit/pembiayaan dari perbankan akan tumbuh optimal dengan rata-rata 11–13% sampai 2030 dan defisit fiskal tetap terjaga di bawah 3% dari PDB pada 2030.

Tahun 2025 akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan terus memperkuat sinergi dengan kebijakan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini akan tetap fokus pada mitigasi dampak rambatan global terhadap kenaikan inflasi, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan moneter akan diarahkan untuk menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-stability and growth*), dengan sasaran utama yakni inflasi yang terjaga dalam rentang target dan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (*pro-growth*). Kebijakan makroprudensial yang longgar akan dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan di sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM, inklusi ekonomi, dan keuangan hijau, guna menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran akan terus

didorong sesuai BSPI 2030 untuk memperkuat industri jasa pembayaran dan mendukung makin berkembangnya Ekonomi Keuangan Digital (EKD).

Selain itu, kerja sama sistem pembayaran antarnegara akan diperluas dan pengembangan Rupiah Digital terus dilanjutkan. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran akan terus diperkuat dengan kebijakan pendukung yakni pendalaman pasar keuangan, pengembangan ekonomi-keuangan inklusif untuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, serta kebijakan internasional. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan kebijakan Pemerintah, KSSK, industri keuangan, dunia usaha, dan asosiasi, yang diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

3.1.1.3. Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2026

Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8,0 persen di tahun 2029 yang dilandasi dengan stabilitas ekonomi makro yang kuat. Perbaikan kualitas pembangunan akan menjadi modal bagi Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan inklusif dicerminkan melalui penurunan tingkat kemiskinan, dan rasio gini sebagai indikator ketimpangan, seiring dengan peningkatan Indeks Modal Manusia yang dicapai melalui pemenuhan gizi dan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi tinggi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan antara lain melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai sumber-sumber pertumbuhan baru untuk mencapai target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui

akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

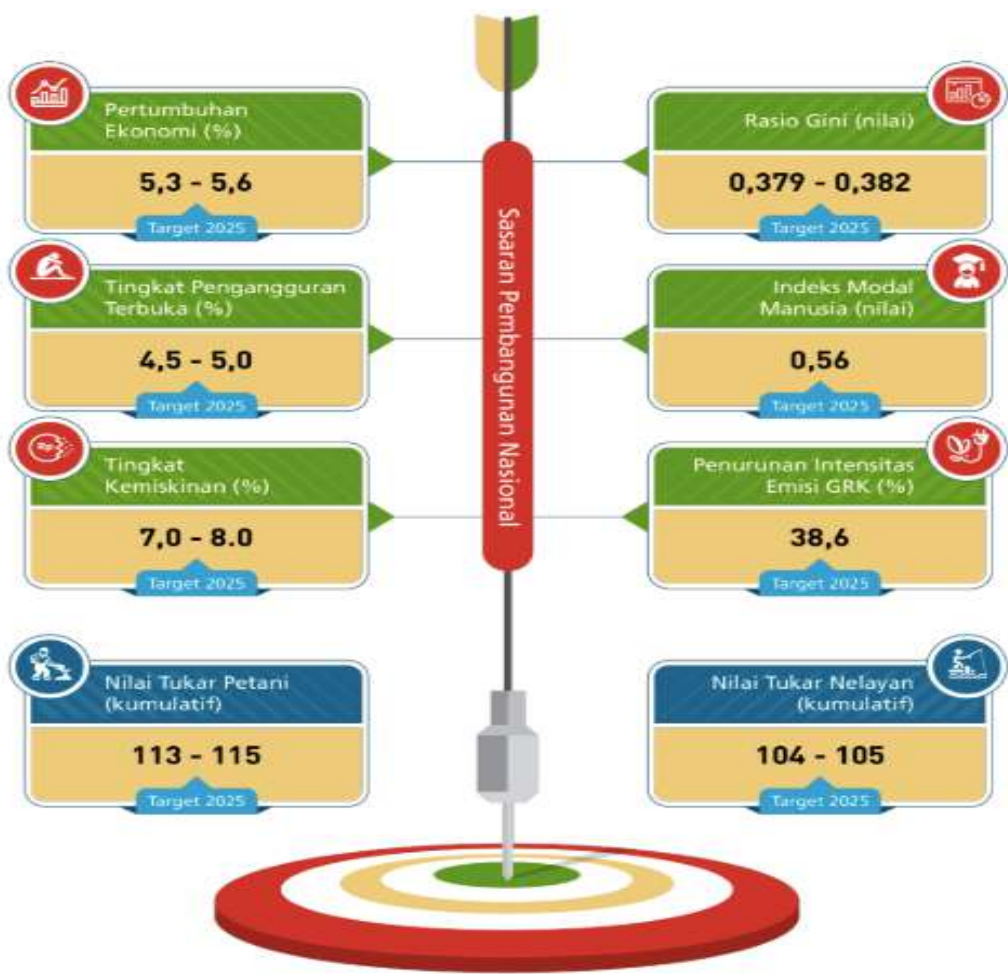
Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,6 persen pada tahun 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 4,5–5,0 persen. Demikian pula Rasio Gini akan turun menjadi 0,379–0,382. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia menjadi 0,56 dan penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi pada kisaran 7,0–8,0 persen. Kesejahteraan petani dan nelayan diharapkan akan meningkat dan terjaga dengan capaian Nilai Tukar Petani pada kisaran 113–115 dan Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 104–105.

Fokus Kebijakan Makro Tahun 2026

1. Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui (a) penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; (b) restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; (c) penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting; (d) penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; (e) peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi dan lulusan *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* berkualitas; (f) pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*; serta (g) penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (pendidikan budi pekerti).
2. Infrastruktur Berkualitas melalui (a) penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, (b) penguatan infrastruktur digital, (c) pengembangan infrastruktur transisi energi, (d) Percepatan

- infrastruktur Ibu Kota Nusantara, serta (e) penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui (a) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) pengembangan skema graduasi bantuan sosial; (c) peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (d) peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; (e) peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; (f) percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; (g) peningkatan produksi industri pengolahan; (h) dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta (i) penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

Tabel 3.1
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024

Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan berada di kisaran 7,0-8,0 persen. Hal ini mempertimbangkan banyak hal antara lain kondisi dan capaian tingkat kemiskinan sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen bahwa target ini dapat tercapai sehingga tidak mengganggu Visi Indonesia Emas 2045 menuju kemiskinan 0 persen. Beberapa hal diupayakan pemerintah antara lain melalui penyusunan peta jalan pengurangan kemiskinan dengan melakukan analisis per provinsi untuk mengkaji permasalahan di masing-masing daerah yang berpotensi memengaruhi capaian tingkat nasional. Berdasarkan dua strategi besar pengurangan kemiskinan, yaitu strategi makro dan mikro, maka dibutuhkan kondisi yang optimal di masing-masing strategi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dijaga inklusif serta stabilitas inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebijakan makro penurunan kemiskinan. Hal ini didorong dengan pemenuhan sarana dan prasarana dasar; akses terhadap informasi; layanan dasar; serta kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Arah kebijakan mikro atau program-program afirmasi disempurnakan dalam payung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui beberapa fokus, yaitu (1) perluasan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi oleh seluruh kementerian/lembaga/daerah untuk melakukan pensasaran program; (2) peningkatan kapasitas pemerintah hingga tingkat desa/kelurahan dalam melakukan perencanaan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti; (3) penguatan dan pelaksanaan skema graduasi program-program bantuan sosial dan komplementaritasnya dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti kewirausahaan dan akses lapangan kerja; (4) integrasi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan dengan pendekatan adaptif dan penyaluran nontunai; (5) penyempurnaan sasaran program utamanya untuk pilar peningkatan pendapatan masyarakat sehingga secara tepat menysasar kelompok miskin dan rentan; (6) penguatan kapasitas pendamping pembangunan

untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku penerima manfaat; serta (7) penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan terutama yang berada di luar keluarga.

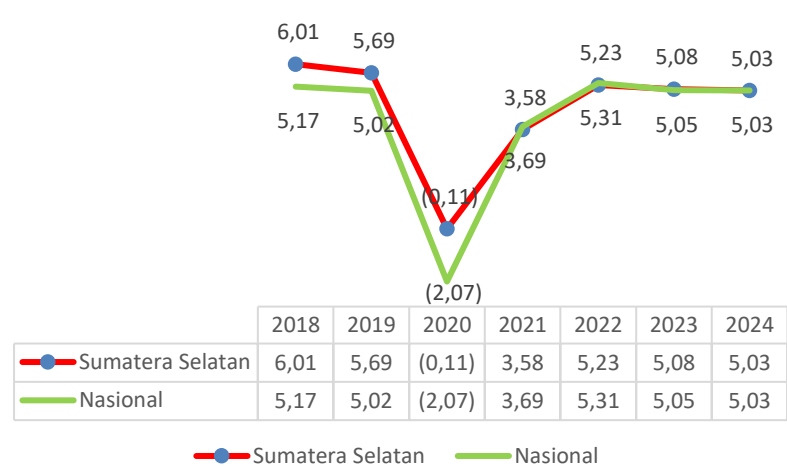
Arah kebijakan untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Kedua masyarakat tersebut membutuhkan arah kebijakan dan strategi yang berbeda. Kebijakan yang tepat untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah kebijakan yang dapat mempertahankan daya beli dan meningkatkan pendapatan. Sementara, untuk masyarakat berpenghasilan tinggi, kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan yang dapat menciptakan redistribusi yang merata.

3.1.2.Kondisi Ekonomi Daerah
3.1.2.1. Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2024

Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen tetap tumbuh kuat kendati melambat dibandingkan dengan tahun 2023 yang tumbur sebesar 5,08 persen. Hal ini sejalan dengan peningkatan mobilitas yang signifikan pada tahun 2023 setelah kondisi pandemic COVID-19 mulai terkendali. Pertumbuhan tahun 2024 ini berada sama denganc capaian nasional yang juga sebesar 5,03 persen.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2024



Sumber: BPS Tahun 2025

Terlihat hampir seluruh kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan sektoral tertinggi terjadi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencapai 9,39 persen walaupun secara umum mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 13,14 persen. Kategori yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sektoral adalah kategori jasa Kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi -0,02 persen pada tahun 2023, akan tetapi pada tahun 2024 ini bertumbuh positif menjadi sebesar 7.34 persen.

Pada kategori yang mendominasi perekonomian sebesar 24,6 persen yakni kategori pertambangan dan penggalian memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 3,33 persen yang turun dari tahun 2024 sebesar 7,89 persen. Pada kategori sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang menyumbang kontribusi ekonomi daerah terbesar kedua yaitu 13,85 persen, memiliki pertumbuhan ekonomi yang relative stabil diangka 7.42 persen, naik 0,14 persen dari tahun 2024 yang sebesar 7,28 persen.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2024

Lapangan Usaha	Pertumbuhan							Distribusi						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, kehutanan, Perikanan	2.33	3.34	1.75	2.91	3.82	2.16	2.59	14.84	14.48	15.17	14.71	13.08	13.1	13.56
B. Pertambangan dan Penggalian	9.09	8.11	-4.08	5.47	6.28	7.89	3.33	20.17	20.33	18.32	21.03	27.71	26.6	24.6
C. Industri Pengolahan	5.4	4.82	0.72	2.18	4.52	3.91	4.39	19.51	19.37	19.73	19.09	17.51	17.91	18.27
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8.85	10.29	14.67	5.76	1.46	4.4	8.48	0.13	0.13	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	7.96	7.46	4.83	-4.69	0.66	0.33	2.66	0.12	0.12	0.13	0.12	0.1	0.1	0.1
F. Konstruksi	5.59	3.34	-0.01	-0.02	1.27	3.55	5.89	12.99	12.55	12.53	11.92	10.67	10.69	10.8
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.09	8.22	-1.34	5.79	10.27	7.28	7.42	12.95	13.54	13.71	13.47	12.97	13.4	13.85
H. Transportasi dan Pergudangan	7.36	8.3	-5.91	-2.2	11.63	7.49	3.44	2.37	2.48	2.35	2.12	2.21	2.46	2.5
I. Penyediaan Akomodasi Makan Minum	13.15	15.34	-7.21	4.43	14.67	13.14	9.39	1.76	1.97	1.87	1.81	1.77	1.91	2.01
J. Informasi dan Komunikasi	7.73	8.15	12.79	6.04	8.12	6.35	8.84	2.85	2.91	3.29	3.21	2.91	2.9	3
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.78	-1.44	1.64	4.19	-0.6	4.6	7.09	2.54	2.36	2.39	2.38	2.08	2.07	2.13
L. Real Estate	7.95	8.03	2.24	5.81	5.23	4.28	8.17	3.08	3.19	3.34	3.24	2.9	2.87	2.94
M,N. Jasa Perusahaan	9.51	9.57	-2.08	0.6	2.9	2.03	5.18	0.13	0.14	0.14	0.13	0.11	0.11	0.11
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.7	1.09	4.17	3.88	3.7	3.73	9.35	2.85	2.67	2.9	2.77	2.45	2.42	2.51
P. Jasa Pendidikan	2.72	4.73	-1.5	6.57	2.24	2.23	6.76	2.36	2.35	2.4	2.37	2.06	2.03	2.15
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.56	9.57	10.14	5.63	4.15	-0.02	7.34	0.59	0.62	0.72	0.7	0.63	0.6	0.63
R,S,T,U. Jasa lainnya	9.06	7.77	5.23	0.93	2.05	1.95	4.12	0.76	0.79	0.86	0.8	0.71	0.69	0.7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6.01	5.69	-0.11	3.58	5.24	5.08	5.03	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Pada tahun 2024, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah:

- 1) Pertambangan dan Penggalian sebesar 24,6 persen;
- 2) Industri Pengolahan sebesar 18.27 persen;
- 3) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,85 persen
- 4) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,56 persen; dan
- 5) Konstruksi sebesar 10,8 persen.

Pergeseran lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2024

Ranking	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terbesar Tahun 2018-2024						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Pertambangan dan Penggalian (20,17%)	Pertambangan dan Penggalian (20,33%)	Industri Pengolahan (19,81%)	Pertambangan dan Penggalian (19,92%)	Pertambangan dan Penggalian (27,64%)	Pertambangan dan Penggalian (26,61%)	Pertambangan dan Penggalian (24,6 %)
II	Industri Pengolahan (19,51%)	Industri Pengolahan (19,37%)	Pertambangan dan Penggalian (18,35%)	Industri Pengolahan (19,46%)	Industri Pengolahan (17,50%)	Industri Pengolahan (17,84%)	Industri Pengolahan (18.27 %)
III	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,84%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,48%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,22%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,12%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,23%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,45%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,85%)
IV	Konstruksi (12,99%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,54%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,65%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,52%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,10%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,56%)
V	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Konstruksi (12,55%)	Konstruksi (12,50%)	Konstruksi (12,00%)	Konstruksi (10,64%)	Konstruksi (10,69%)	Konstruksi (10,8%)

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Berdasarkan Tabel di atas, pertumbuhan ekonomi dan distribusi menurut lapangan usaha Tahun 2018-2024, dimana dari tahun 2018 sampai dengan 2019 posisi tertinggi berada di sektor pertambangan dan penggalian dan sempat tergantikan menjadi sektor industri pengolahan pada tahun 2020 yang dikarenakan gejolak ekonomi global pada masa Pandemi COVID-19. Adapun pada tahun 2021-2024, kontribusi sektor

pertambangan dan penggalian juga meningkat signifikan akan tetapi di tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami penurunan samapi menjadi sebesar 24,6 persen pada tahun 2024.

Tabel 3.4
PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024 (Milyar Rupiah) (ADHB)

Lapangan Usaha per Sub Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	65661.8	68961.2	72602.3	77172.25	82399.82	90046.53
B. Pertambangan dan Penggalian	92166.1	83283	103810.2	163520.9	167372.9	163335
C. Industri Pengolahan	87834.5	89705.8	94212.9	103317.4	112694.8	121330.2
D. Pengadaan Listrik dan Gas	575.1	673	727.7	751.15	800.02	876.5
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	558	606	595	604.09	614.14	640.95
F. Konstruksi	56906.6	56977.9	58864.4	62954.78	67278.81	71717.14
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	61412.8	62324.5	66480.8	76530.69	84297.46	91958.7
H. Transportasi dan Pergudangan	11223.4	10668.9	10471.9	13043.41	15483.89	16579.86
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8937.5	8519.4	8933.4	10470.48	12044.55	13370.89
J. Informasi dan Komunikasi	13177.4	14936.5	15852.3	17142.47	18257.14	19905.37
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10716	10878.3	11728.2	12283.33	13028.56	14166.1
L. Real Estat	14462.1	15202.6	15984.2	17127.44	18072.53	19502.51
M,N. Jasa Perusahaan	615.1	616.5	623.1	663.62	698.52	747.94
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	12100.9	13181.3	13653.4	14473.67	15216.34	16669.52
P. Jasa Pendidikan	10636.7	10928.2	11676.2	12164.87	12746.35	14304.86
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2820.4	3254.9	3473.5	3691.86	3799.28	4154.71
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3598.1	3889.3	3947.4	4166.98	4363.52	4654.93
Produk Domestik Regional Bruto	453402.7	454607.4	493636.9	590079.4	629168.7	663961.7

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Jika dilihat dari perkembangan PDRB sektoral atas dasar harga berlaku dari tahun 2019-2024, dari sisi nilai terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tujuh belas sektoral lapangan usaha. Tahun 2019 nilai PDRB ADHB sebesar 453.402,71 Miliar Rupiah meningkat menjadi Miliar 663.961,7 Rupiah tahun 2024.

Tabel 3.5
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2018-2024 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran dengan rincian Net Ekspor	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	277771	296905	295605	308635	347794	381441	410002
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6358.15	7240.99	6748.58	7130.46	8067.44	8983.35	10660.6
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	32460.3	36686.9	31995	34055.6	34163.9	37333.9	40973
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	157635	160153	162651	165436	182083	191037	205916
5. Perubahan Inventori	-972.55	-731.37	-1972.3	380.65	-6.06	3.76	7.56
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-53859	-46851	-40420	-22001	17976.7	10369.8	-3597.6
Produk Domestik Regional Bruto	419392	453403	454607	493637	590079	629169	663962

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Selatan tahun 2018-2024 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 277.771,06 miliar rupiah dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 410.002 miliar rupiah.

Komponen penyumbang terbesar kedua adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang pada tahun 2018 sebesar 157.634,55 miliar rupiah dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 205.916 miliar rupiah namun komponen ini kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Tabel 3.6
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran, 2018-2024 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	183421	190641.5	186943.1	190560.7	201978.4	212618.5	222564.2
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4563.1	5009.23	4710.91	4806.55	5067.13	5419.47	6261.17
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21604.63	22801.46	19869.06	20444.95	20691.85	21900.25	23736.29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	111301.2	113186.3	114605.2	111007.1	108306.9	110986.6	115876
5. Perubahan Inventori	-227.6	-319.38	-1331.43	54.85	-2.07	1.88	3.75
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-22178.2	-15854.4	-9667.59	-468.99	7461.35	10040.73	10678.19
Produk Domestik Regional Bruto	298484.1	315464.8	315129.2	326405.2	343503.6	360967.4	379119.6

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sumatera Selatan tahun 2018-2024 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, sama seperti halnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB juga adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 183.420,98 miliar rupiah pada tahun 2024 meningkat menjadi 222.564,2 miliar rupiah. Begitu juga dengan komponen penyumbang terbesar kedua yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto dimana pada tahun 2018 sebesar 111.301,18 miliar rupiah dan pada tahun 2024 menjadi 115.876 miliar rupiah

Ekspor

Ekspor Sumatera Selatan pada Desember 2024 naik US\$24 juta (3,73 persen) disbanding November 2024, yaitu dari US\$642,88 juta menjadi US\$666,88 juta. Peningkatan ekspor Desember 2024, disebabkan oleh nilai ekspor non migas yang meningkat sebesar 5,03 persen. Sebaliknya ekspor migas mengalami penurunan signifikan sebesar 14,75 persen. Peningkatan ekspor non migas dikarenakan bertambahnya nilai ekspor komoditas pulp dari kayu.

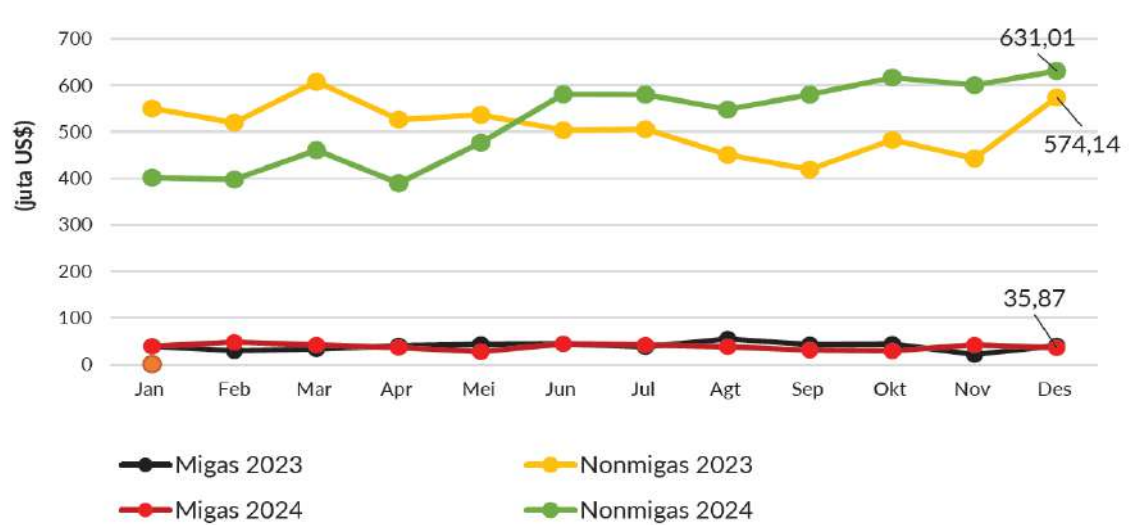
Hal serupa juga terlihat jika nilai ekspor dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ekspor pada Desember 2024 meningkat sebesar 8,53 persen jika dibandingkan Desember 2023. Hal ini disebabkan peningkatan ekspor nonmigas sebesar 9,91 persen. Begitu juga jika dibandingkan secara kumulatif, nilai ekspor mengalami peningkatan 2,09 persen. Hal ini juga dikarenakan adanya peningkatan ekspor nonmigas 2,33 persen. Dan peran dari komoditas ini mencapai 93 persen terhadap nilai ekspor selama periode Januari-Desember 2024.

Tabel 3.7
Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan
Desember 2024

Uraian	Nilai FOB (juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd total ekspor Jan-Des 2024 (%)
	Des ^r 2023	Nov 2024	Des 2024	Jan-Des ^r 2023	Jan-Des 2024	Des'24 thd Des'23 (y-on-y)	Des'24 thd Nov'24 (m-to-m)	Jan-Des 24 thd Jan-Des 23 (c-to-c)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Total Ekspor	614,46	642,88	666,88	6.585,52	6.723,04	8,53	3,73	2,09	100,00
Migas	40,32	42,08	35,87	463,15	458,10	-11,04	-14,75	-1,09	6,81
- Minyak mentah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil minyak	40,32	42,08	35,87	463,15	458,10	-11,04	-14,75	-1,09	6,81
- Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nonmigas	574,14	600,80	631,01	6.122,37	6.264,94	9,91	5,03	2,33	93,19

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 3.2
Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan, Desember 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Ekspor non migas mengalami peningkatan pada Desember 2024 jika dibandingkan November 2024. Peningkatan terjadi karena bertambahnya nilai ekspor yang signifikan untuk komoditas Pulp dari Kayu (33,59%), Lemak dan Minyak Hewan/Nabati (6,87 persen) serta karet dan barang dari karet (1,74 persen). Selanjutnya jika dilihat dari nilai y on y, nilai ekspor non migas juga mengalami peningkatan sebesar 9,91 persen. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada komoditas yang sama yaitu karet dan barang dari karet, pulp dari kayu (bubur kertas), lemak&minyak hewan/nabati, buah-buahan serta baubara dan lignit. Begitu juga jika dilihat secara kumulatif, ekspor mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023. Komoditas yang mengalami peningkatan signifikan pada periode ini yaitu batubara dan lignit, karet dan barang dari karet, buah-buahan,pupuk dan sisa industri makanan.

Jika dilihat secara komposisi, ekspor nonmigas masih sama seperti periode sebelumnya yang masih didominasi oleh Bahan Bakar Mineral hingga 46 persen. Komoditas utama selanjutnya yaitu Karet & Barang dari karet serta Pulp dari kayu dimana nilai keduanya masing-masing sebesar 21,54 persen dan 19,95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas unggulan ekspor dari Sumatera Selatan masih berasal dari sumber daya alam dan industri pengolahan.

Tabel 3.8
Nilai Ekspor Sepuluh Golongan Barang Utama Nonmigas
Sumatera Selatan, Desember 2024

Golongan Barang (HS 2 Diji)	Nilai FOB (juta US\$)		Perubahan (%)			Nilai FOB (juta US\$)		Peran thd total ekspor Nonmigas Jan-Des 2024 (%)
	Nov 2024	Des 2024	m to m	c to c	y on y	Jan-Des 2023	Jan-Des 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Bahan Bakar Mineral [27]	302,40	305,22	0,93	1,28	2,11	2.872,50	2.909,23	46,44
2. Karet dan Barang dari Karet [40]	134,56	136,90	1,74	23,21	44,54	1.095,46	1.349,77	21,54
3. Pulp dari Kayu [47]	93,79	125,30	33,59	-2,56	15,02	1.282,92	1.250,06	19,95
4. Lemak & Minyak He- wan / Nabati [15]	32,13	34,34	6,87	-38,80	22,41	432,46	264,65	4,22
5. Kertas/Karton [48]	8,30	7,50	-9,69	-2,28	-30,06	111,91	109,36	1,75
6. Kayu, Barang dari kayu [44]	10,69	6,68	-37,55	4,94	-37,51	99,60	104,52	1,67
7. Pupuk [31]	0,04	0,00	-100,00	19,74	-100,00	47,55	56,94	0,91
8. Residu, dan Sisa Industri Makanan [23]	2,42	1,26	-48,06	24,35	-73,37	42,71	53,11	0,85
9. Buah-buahan [08]	7,91	6,45	-18,40	62,62	225,77	30,01	48,81	0,78
10. Bahan Kimia Anorganik [28]	0,55	2,20	301,09	-5,01	179,08	26,40	25,08	0,40
Total 10 Golongan Barang	592,79	625,84	5,58	2,15	9,75	6.041,52	6.171,52	99,18
Lainnya	8,01	5,16	-35,52	15,54	32,46	80,85	93,42	0,82
Total Ekspor Non Migas	600,80	631,01	5,03	2,33	9,91	6.122,37	6.264,94	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan ekspor Sumatera Selatan menurut sektor pada Desember 2024 menunjukkan fenomena yang berbeda jika dibanding November 2024. Pada bulan lalu, peningkatan ekspor non migas hanya terjadi pada sektor pertanian. Sebaliknya, pada bulan ini peningkatan terjadi pada komoditas industri pengolahan dan pertambangan. Ekspor untuk komoditas industri pengolahan bertambah US\$31,39 juta atau sebesar 11,04 persen. Kemudian ekspor hasil tambang meningkat US\$2,82 juta atau 0,93 persen. Kemudian jika dilihat secara kumulatif (c to c), terjadi peningkatan untuk seluruh komoditas. Peningkatan signifikan terjadi pada komoditas sektor hasil industri pengolahan yaitu US\$ 70,29 juta atau 2,20 persen.

Tabel 3.9
Nilai Ekspor Sumatera Selatan Menurut Sektor, 2024

Uraian	Nilai FOB (juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd total ekspor Jan-Des 2024 (%)
	Des ^r 2023	Nov 2024	Des 2024	Jan-Des ^r 2023	Jan-Des 2024	Des'24 thd Nov'24 (m-to-m)	Des'24 thd Des'23 (y-on-y)	Jan-Des'24 thd Jan-Des'23 (c-to-c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	614,46	642,88	666,88	6 585,52	6 723,04	3,73	8,53	2,09	100,00
Migas	40,32	42,08	35,87	463,15	458,10	-14,75	-11,04	-1,09	6,81
Nonmigas	574,14	600,80	631,01	6 122,37	6 264,94	5,03	9,91	2,33	93,19
- Pertanian	3,51	13,99	9,99	55,24	90,78	-28,63	184,19	64,35	1,35
- Industri pengolahan	271,72	284,41	315,80	3 194,64	3 264,92	11,04	16,22	2,20	48,56
- Pertam- bangan dan lainnva	298,90	302,40	305,22	2 872,50	2 909,23	0,93	2,11	1,28	43,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Impor

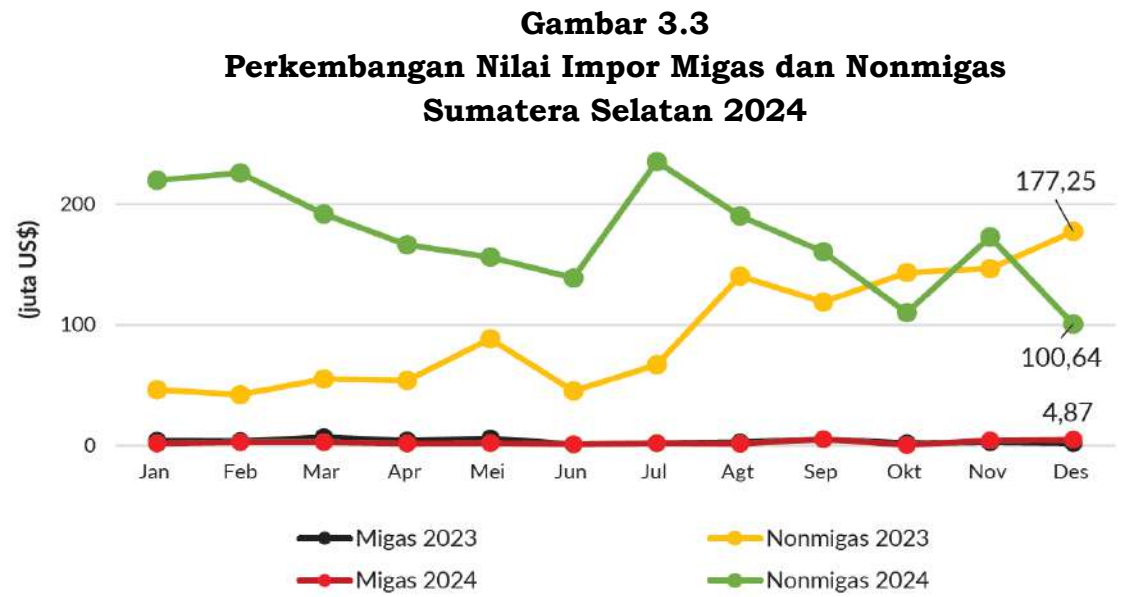
Nilai impor Sumatera Selatan terus menurun sejak Agustus 2024, kemudian meningkat pada bulan November dan kembali menurun pada Desember 2024. Nilai impor mencapai US\$105,51 juta atau berkurang US\$71,33 juta (40,34 persen) dibanding November 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan signifikan pada impor komoditas nonmigas. Impor nonmigas berkurang hingga 41,75 persen sedangkan impor migas meningkat sebesar 20 persen. Hal ini juga serupa jika nilai impor dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai impor juga menurun

secara y on y. Impor di bulan Desember menurun 41 persen (y on y) karena berkurangnya impor non migas 43,22 persen. Sebaliknya nilai impor secara kumulatif meningkat hingga 80 persen. Hal ini disebabkan nilai impor non migas yang terus meningkat hingga 84 persen jika dibandingkan 2023. Dan jika dilihat dari distribusinya, impor nonmigas masih mendominasi yaitu sebesar 98 persen.

Tabel 3.10
Nilai Impor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan
Januari-Desember 2023

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)					Perubahan (%)			Peran Jan-Des 2024 (%)
	Des ^r 2023	Nov 2024	Des 2024	Jan-Des ^r 2023	Jan-Des 2024	m-to-m	y-on-y	c-to-c	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total	179,13	176,84	105,51	1 164,40	2 097,15	-40,34	-41,10	80,11	100,00
Migas	1,88	4,06	4,87	41,14	29,32	20,02	159,61	-28,72	1,40
- Minyak Mentah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Minyak	1,88	4,06	4,87	41,14	29,32	20,02	159,61	-28,72	1,40
- Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nonmigas	177,25	172,79	100,64	1 123,26	2 067,83	-41,75	-43,22	84,09	98,60

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Nilai impor nonmigas Sumatera Selatan Desember 2024 yang mencapai US\$100,64 juta, didominasi oleh mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya US\$56,80 juta (66 persen). Dilihat perkembangannya terhadap November 2024, impor nonmigas mengalami penurunan US\$67,93 juta (42,71 persen), yang disebabkan oleh penurunan

signifikan pada komoditas Mesin serta barang dari besi dan baja. Begitu juga jika dibandingkan jika dengan Desember 2023, nilai impor juga menurun. Berkurangnya nilai impor disebabkan oleh penurunan signifikan pada komoditas mesin, karet dan barang dari karet.

Tabel 3.11
Nilai Impor Sepuluh Golongan Barang Nonmigas Sumatera Selatan

Golongan Barang (HS 2 Digit)	Nilai CIF (Juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Impor Nonmigas Jan-Des 2024 (%)
	Des ^r 2023	Nov 2024	Des 2024	Jan-Des 2023	Jan-Des 2024	m-to-m	y-on-y	c-to-c	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Mesin dan Pera- latan Mekanis dan Bagiannya [84]	121,70	120,86	56,80	628,54	1.376,49	-53,01	-53,33	119,00	66,57
2. Mesin dan Perlengkapan Elektris serta Bagiannya [85]	4,96	5,63	2,29	23,19	121,25	-59,32	-53,81	422,81	5,86
3. Pupuk [31]	2,95	11,27	10,50	73,81	87,79	-6,83	256,23	18,94	4,25
4. Barang dari Besi dan Baja [73]	3,92	2,72	0,48	47,03	63,60	-82,40	-87,82	35,24	3,08
5. Karet dan Barang dari Karet [40]	20,14	1,25	3,07	82,79	62,87	144,65	-84,76	-24,05	3,04
6. Kayu & Barang dari kayu [44]	0,00	11,37	7,72	0,53	62,64	-32,11	-	-	3,03
7. Serealia [10]	10,22	0,00	5,08	50,81	61,51	-	-50,33	21,05	2,97
8. Kereta Api, Trem dan Bagiannya [86]	2,10	2,95	3,83	40,18	35,63	29,61	82,64	-11,31	1,72
9. Pulp dari Kayu [47]	0,88	3,02	1,39	20,46	28,61	-54,19	56,64	39,82	1,38
10. Penjata dan Amunisi serta bagiannya [93]	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	-	-	-	1,35
Total 10 Golongan Barang	166,86	159,07	91,14	967,34	1.900,40	-42,71	-45,38	96,46	90,56
Lainnya	10,39	13,71	9,50	155,93	167,43	-30,72	-8,58	7,37	9,44
Total Impor Non Migas	177,25	172,79	100,64	1.123,26	2.067,83	-41,75	-43,22	84,09	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Total nilai impor dari 12 negara utama pada Desember 2024 mencapai US\$89,12 juta atau turun US\$53,80 juta (37,64 persen) dibandingkan November 2024. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan nilai impor yang signifikan dari negara Tiongkok dan Vietnam. Nilai impor dari Tiongkok berkurang hingga US\$ 50,78 juta, dari Vietnam berkurang US\$9,58 juta. Fenomena serupa juga terjadi ketika nilai impor dibandingkan dengan tahun 2023. Impor dari 12 negara utama mengalami peningkatan jika dihitung secara kumulatif. Nilai impor dari 12 negara utama meningkat hingga dua kali lipat dimana pada

Januari-Desember 2023 sebesar US\$841,38 juta menjadi US\$1.921,02 juta pada periode yang sama di tahun 2024.

Dilihat dari peranannya terhadap total impor Januari-Desember 2024, kontribusi tertinggi masih didominasi oleh Tiongkok dengan nilai US\$1.225,72 juta (58,45 persen), diikuti oleh Finlandia sebesar US\$243,96 juta (11,63 persen) dan dari Vietnam sebesar US\$107,85 juta (5,14 persen). Kemudian jika dilihat menurut benua, kontribusi yang cukup tinggi berasal dari kelompok negara Uni Eropa sebesar US\$400,63 juta (19,10 persen) dan ASEAN sejumlah US\$282,89 juta (13,49 persen). Komoditas impor yang dikirim dari Tiongkok yaitu Mesin untuk keperluan khusus dan umum, serta peralatan listrik; dari Finlandia yaitu mesin untuk keperluan khusus dan umum serta generator uap; kemudian dari Vietnam yaitu kayu olahan, makanan olahan lainnya dan pupuk.

Laju Inflasi

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2024 secara umum y-on-y menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sumatera Selatan di 4 kabupaten/kota, pada Desember 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,20 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,74 pada Desember 2023 menjadi 107,01 pada Desember 2024. Secara m-to-m perkembangan harga menunjukkan adanya kenaikan indeks dengan tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,50 persen. Sementara secara kumulatif sampai dengan Desember 2024 tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,20 persen.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 0,15 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 109,96 pada Desember 2023 menjadi 110,50 pada Desember 2024. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,15 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: daging ayam ras sebesar 0,17 persen; minyak goreng sebesar 0,13 persen; bawang merah sebesar 0,11 persen; bawang putih sebesar 0,10 persen; kopi bubuk sebesar 0,08 persen.

Kelompok pakaian dan alas kaki pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,48 persen atau terjadi penurunan indeks dari 103,11 pada Desember 2023 menjadi 102,62 pada Desember 2024. kelompok ini pada Desember 2024 tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi m-to-m.

Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 0,61 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 101,96 pada Desember 2023 menjadi 102,58 pada Desember 2024. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,09 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07 persen.

Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,67 persen atau terjadi penurunan indeks dari 101,54 pada Desember 2023 menjadi 100,86 pada Desember 2024. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y sebesar 0,04 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu pengharum cucian/pelembut sebesar 0,04 persen, pembersih lantai sebesar 0,02 persen, dan detergen cair sebesar 0,01 persen.

Kelompok kesehatan pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,81 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 101,56 pada Desember 2023 menjadi 103,40 pada Desember 2024. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,04 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu obat dengan resep sebesar 0,01 persen.

Kelompok transportasi pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,60 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 108,41 pada Desember 2023 menjadi 109,87 pada Desember 2024. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,18 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: pemeliharaan/service dan mobil sebesar 0,06 persen; tarif angkutan

udara sebesar 0,04 persen; mobil sebesar 0,06 persen; tarif jalan tol dan perbaikan ringan kendaraan sebesar 0,03 persen; dan pelumas/ oli mesin dan sepeda motor masing-masing sebesar 0,02 persen.

Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,37 persen atau terjadi penurunan indeks dari 99,90 pada Desember 2023 menjadi 99,53 pada Desember 2024. Dari 4 subkelompok pada kelompok ini, 1 subkelompok mengalami deflasi y-on-y dan 3 subkelompok tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami deflasi y-on-y, yaitu subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 1,41 persen. Sementara subkelompok yang tidak mengalami perubahan, yaitu, subkelompok layanan informasi dan komunikasi subkelompok asuransi dan subkelompok jasa keuangan.

Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,27 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 104,27 pada Desember 2023 menjadi 105,59 pada Desember 2024. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,02 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu tas sekolah sebesar 0,01 persen.

Kelompok pendidikan pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,87 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 104,36 pada Desember 2023 menjadi 106,31 pada Desember 2024. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,10 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: bimbingan belajar sebesar 0,05 persen dan taman kanak-kanak sebesar 0,03 persen.

Kelompok penyediaan makanan dan minuman pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,52 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 104,40 pada Desember 2023 menjadi 105,99 pada Desember 2024. Kelompok ini terdiri dari 1 subkelompok, yaitu subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman yang mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,52 persen. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,13 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan

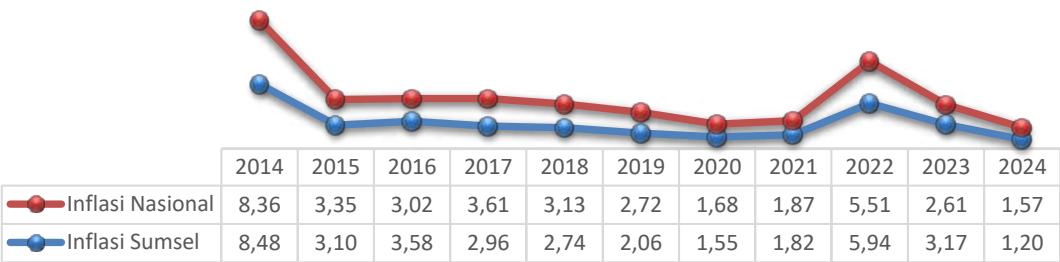
inflasi y-on-y, yaitu pempek dan nasi dengan lauk masing-masing sebesar 0,02 persen dan roti bakar dan sate masing-masing sebesar 0,01 persen.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya pada Desember 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi y-on-y sebesar 8,09 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 105,75 pada Desember 2023 menjadi

114,31 pada Desember 2024. Subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 20,89 persen. Sedangkan subkelompok perawatan pribadi mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,63 persen. Sementara subkelompok jasa lainnya tidak mengalami perubahan indeks dibanding Desember 2023. Kelompok ini pada Desember 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,58 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu emas perhiasan sebesar 0,62 persen.

Tren inflasi Provinsi Sumatera Selatan mayoritas selalu berada di bawah inflasi nasional tetapi di tahun 2022 dan 2023 angka inflasi berada diatas nasional. Puncak inflasi tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,48 persen (yoy), khusus tahun 2014 kenaikan inflasi Sumsel meningkat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi di pertengahan triwulan IV 2014. Pada tahun 2015 inflasi menurun menjadi 3,10 persen hingga tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup pesat dari tahun 2021 sebesar 1,82 persen hingga mencapai angka 5,94 dan pada tahun 2024 sebesar 1,20 persen Angka Inflasi Sumatera Selatan berada dibawah angka Inflasi di Nasional.

Gambar 3.4
Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2014-2024



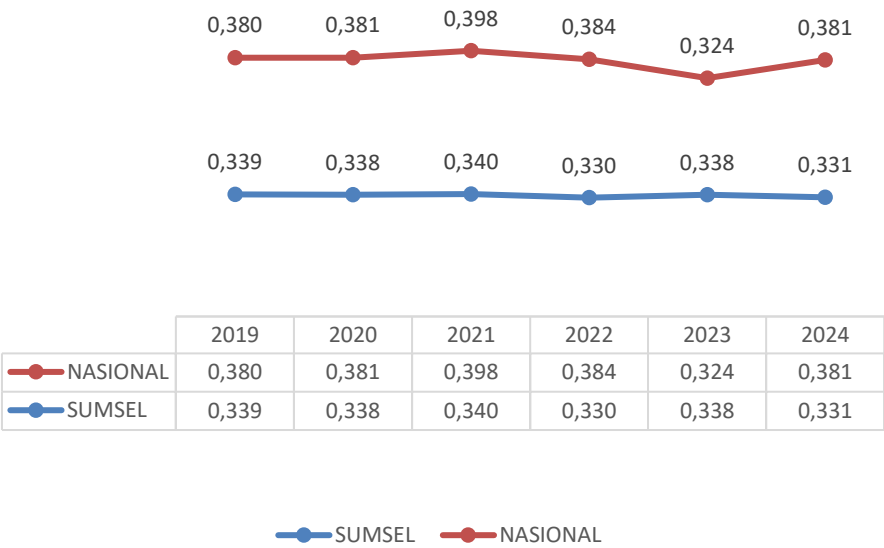
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Gini Ratio

Gini Ratio Sumatera Selatan pada kurun waktu 2019-2024 mengalami fluktuasi dan masih tergolong tinggi, tetapi dalam satu tahun

terakhir atau pada periode September 2021-September 2024 angka gini ratio mengalami penurunan menjadi sebesar 0,331.

Gambar 3.5
Gini Ratio Sumatera Selatan Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

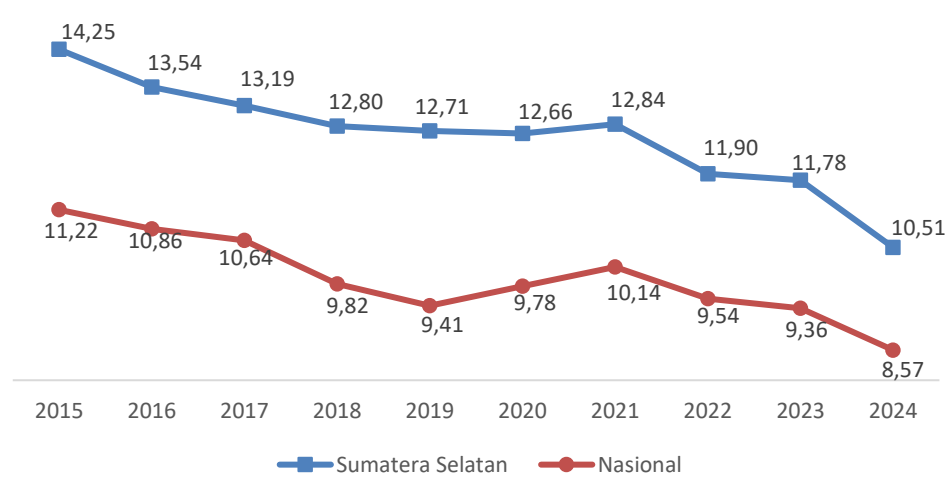
Gini Ratio Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 0,338 keadaan September 2024 menjadi 0,331 keadaan September 2024 atau turun 0,007 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Sumatera Selatan melalui program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat telah mulai menampakkan hasil walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan.

Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan cukup berfluktuatif dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari 12,66 persen pada tahun 2020 menjadi 10,51 persen pada tahun 2024. Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,081 juta penduduk pada tahun 2020 menjadi 0,948 juta penduduk pada tahun 2024. Meskipun angka kemiskinan menurun, upaya pengentasan kemiskinan masih terus dilakukan agar Provinsi Sumatera Selatan terlepas dari masalah kemiskinan. Dalam target RPD (Rencana Pembangunan Daerah)

Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026, pada tahun akhir periodisasi RPD persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ditargetkan menurun menjadi satu digit. Sehingga, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus bersinergi untuk menjalankan berbagai program dalam upaya pengentasan kemiskinan agar tercapai target “zero poverty”.

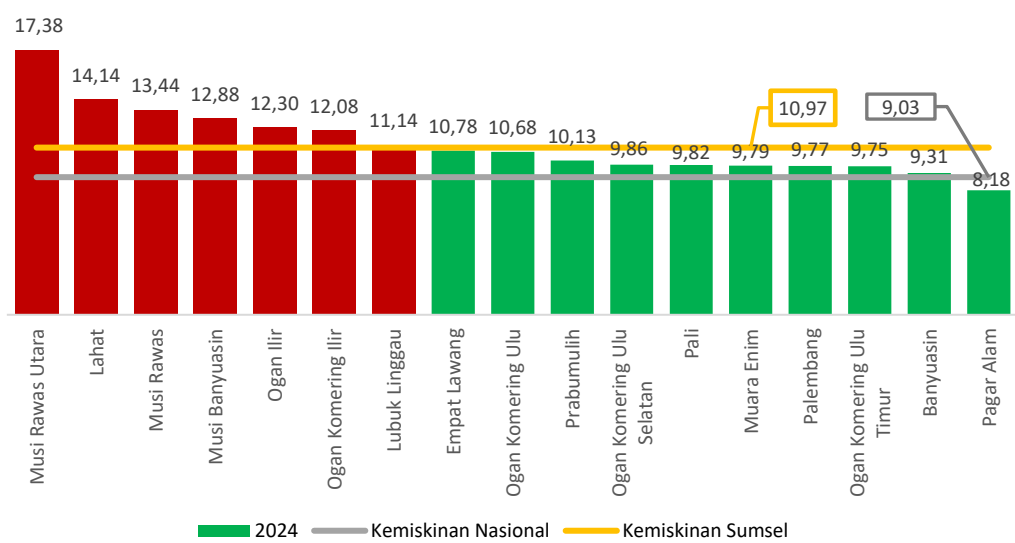
Gambar 3.6
Perkembangan Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Berdasarkan data BPS, terdapat 7 (tujuh) kabupaten/ kota yang tingkat kemiskinannya dibawah 1 digit pada tahun 2024 yaitu Kabupaten OKU Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir, Muara Enim, Palembang, OKU Timur, Banyuasin dan Pagar Alam. Tingkat kemiskinan kabupaten Musi Rawas Utara menjadi yang tertinggi yaitu 17,38 persen. Sedangkan kabupaten/ kota yang tingkat kemiskinan lebih baik dari capaian Nasional dan Provinsi adalah Kota Pagar Alam yaitu 8,18 persen.

Gambar 3.7
Perkembangan Tingkat Kemiskinan per- Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 tercatat sebanyak 948,84 ribu jiwa mengalami penurunan sebanyak 61,44 ribu jiwa dibandingkan tahun 2023. Angka ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi terjadi pada tahun 2020 yang tercatat sebesar 1.081,58 ribu jiwa. Sedangkan persentase penduduk miskin pada tahun 2024 mengalami penurunan setelah dua tahun sebelumnya mengalami peningkatan akibat pandemi *coronavirus disease* 2019 (covid- 19). Persentase penduduk miskin pada awal *covid-19* pada tahun 2020 sebesar 12,66 persen dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 12,84 persen. Tetapi dengan adanya pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan penularan *Covid-19*, memicu perekonomian daerah kembali menggeliat sehingga pada tahun 2022 persentase penduduk miskin menjadi 11,90 persen dan mengalami penurunan kembali sebesar 10,97persen pada tahun 2024.

Tabel 3.12
Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan
menurut Tempat Tinggal Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2020	387,80	693,78	1.081,58	12,16	12,96	12,66
2021	402,25	711,51	1.113,76	12,36	13,12	12,84
2022	371,50	673,18	1.044,69	11,23	12,31	11,90
2023	371,75	673,93	1.045,68	11,07	12,21	11,78
2024	310,04	638,81	948,84	9,02	11,43	10,51

Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Persentase kemiskinan di perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan perkotaan baik sebelum dan saat terjadinya covid-19. Pada periode satu tahun terakhir persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,03 persen poin, begitu pula di perdesaan penduduk miskinnya menurun sebesar 0,68 persen poin. Pada tahun 2020 persentase kemiskinan di perdesaan sebesar 12,96 persen menjadi 11,43 persen pada tahun 2024, sedangkan persentase kemiskinan di perkotaan sebesar 12,16 persen pada tahun 2020 menjadi 9,02 persen pada tahun 2024.

Pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19 mampu memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa pandemi covid-19 lebih berpengaruh terhadap aktivitas dan pemulihan ekonomi di perkotaan daripada di perdesaan. Kebijakan pengetatan mobilitas dan kebijakan lainnya yang berkenan dengan mitigasi penularan covid-19 lebih terasa di perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis daripada di perdesaan.

Upaya penanggulangan kemiskinan secara Nasional sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dengan berbagai pendekatan dan kebijakan. Sebagaimana amanat konstitusi demi terciptanya masyarakat adil dan makmur, program-program pembangunan

yang telah terlaksana juga selalu memberikan perhatian besar dalam pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan itu, pembangunan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan pun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Distribusi penduduk miskin menurut kabupaten/kota tidak kalah penting untuk ditelaah. Hal tersebut sangat krusial untuk melihat bagaimana sebaran penduduk miskin serta ketimpangan kemiskinan antar kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin terbesar di Kota Palembang dengan jumlah mencapai 173,59 ribu jiwa. Angka tersebut menurun sebesar 5,86 ribu dibanding tahun 2023. Persoalan kemiskinan di Kota Palembang memang terbilang lebih kompleks karena sebagai ibukota provinsi, tentu kota ini menjadi daerah tujuan migrasi dari berbagai kabupaten/ kota di Sumatera Selatan bahkan dari luar Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.13
Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024

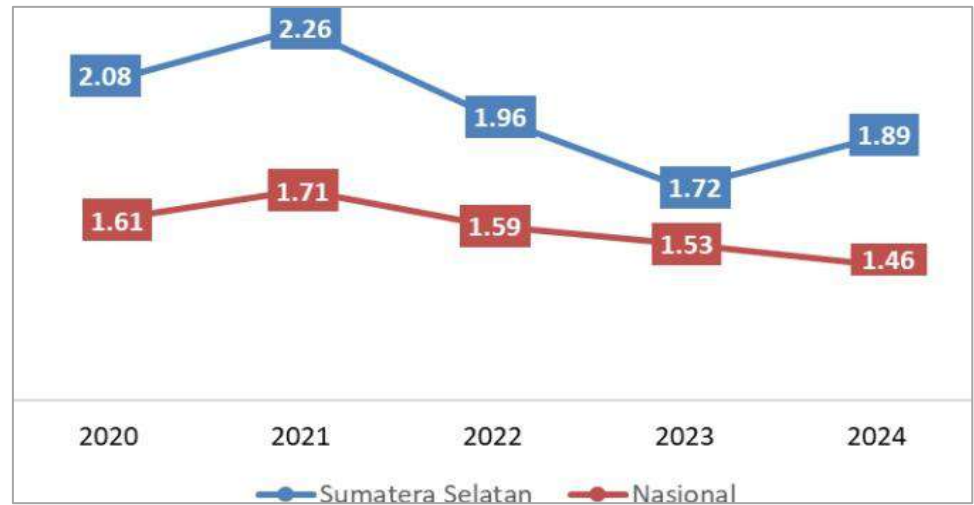
Kabupaten/Kota 17	Jumlah Penduduk Miskin Maret Menurut Kab/Kota (RibU Jiwa)		Persentase Penduduk Miskin Maret Menurut Kab/Kota (RibU Jiwa)	
	2023	2024	2023	2024
Ogan Komering Ulu	44,11	41,54	11,46	10,68
Ogan Komering Ilir	114,48	106,37	13,15	12,08
Muara Enim	73,24	66,42	10,93	9,79
Lahat	63,36	60,19	15,00	14,14
Musi Rawas	59,75	57,44	14,13	13,44
Musi Banyuasin	101,63	88,94	14,90	12,88
Banyuasin	85,88	84,36	9,58	9,31
Ogan Komering Ulu Selatan	39,3	37,81	10,36	9,86
Ogan Komering Ulu Timur	69,91	68,74	9,99	9,75
Ogan Ilir	59,33	55,49	13,28	12,30
Empat Lawang	30,78	28,42	11,80	10,78
Pali	21,72	19,79	10,91	9,82
Musi Rawas Utara	36,68	35,49	18,26	17,38
Palembang	179,45	173,59	10,22	9,77
Prabumulih	22,33	20,41	11,23	10,13
Pagar Alam	12,73	11,82	8,88	8,18
Lubuk Linggau	31,02	27,65	12,65	11,14
Sumatera Selatan	1.045,68	984,24	11,78	10,97
Nasional	25.898,55	25.219,20	9,36	9,03

Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Selanjutnya ditinjau dari signifikansi penurunan persentase penduduk miskin antar kabupaten/ kota tidaklah sama. Hal tersebut menjadi suatu gambaran bahwa ada ketidakmerataan kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan hendaknya ditempuh melalui perbaikan ketiga komponen secara tersinergi yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Persoalan kemiskinan tidak hanya seputar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparagan dari kemiskinan. Secara umum, indeks P1 pada periode 2020- 2024 berfluktuasi. Indeks P1 mengalami penurunan dari sebesar 2,08 di tahun 2020 menjadi 1,89 di tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan P1 di tahun 2024, namun tren indeks P1 pasca adanya pandemi Covid-19 cenderung membaik. Penurunan nilai indeks P1 ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk miskin sudah mulai membaik pasca terjadi pandemi yang melanda Indonesia dan dunia.

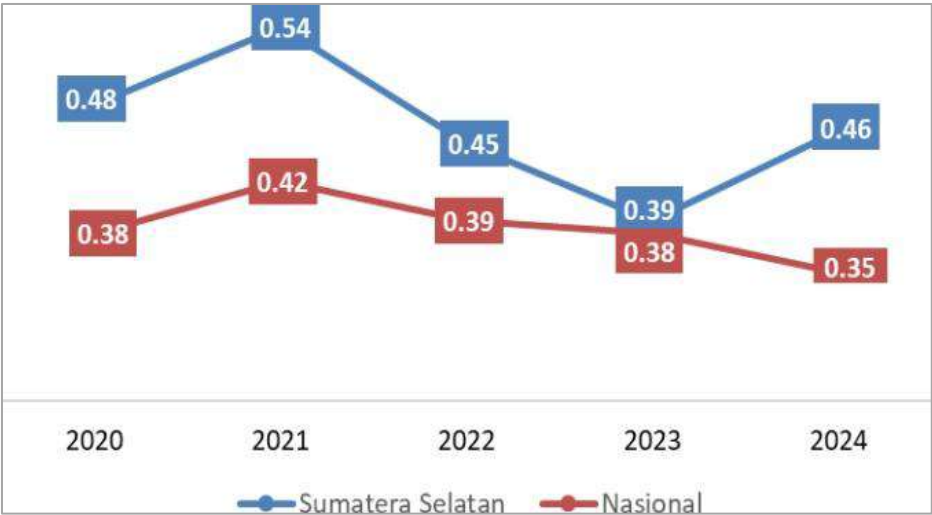
Gambar 3.8
Tren Perkembangan Indeks Kedalaman (P1)
Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Demikian pula dengan indeks keparahan (P2) yang turut menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu dari 0,48 menjadi 0,46 di tahun 2024. Sama hal nya dengan indeks P1, meskipun indeks P2 Provinsi Sumatera Selatan juga menunjukkan peningkatan di tahun 2024 ini, namun sudah menunjukkan perbaikan dibandingkan pada saat adanya pandemi. Penurunan indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin semakin menurun. Fenomena itu dapat mengindikasikan bahwa intervensi program pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan cukup dinikmati secara merata di antara penduduk miskin sehingga ketimpangan pendapatan/pengeluaran di antara mereka semakin mendekat. Namun memang masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengingat penurunan Indeks Keparahana Kemiskinan yang relatif lambat turun.

Gambar 3.9
Tren Perkembangan Indeks Keparahana (P2)
Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Keadaan maret 2024, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,69

sedangkan di daerah perdesaan sebesar 2,02. Sementara itu nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) untuk perkotaan sebesar 0,39 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,49. Fenomena ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap GK di perkotaan relatif lebih jauh dibandingkan daerah perdesaan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perdesaan. Dengan demikian dibutuhkan intervensi program pengentasan kemiskinan yang lebih intensif di daerah perkotaan khususnya dalam menjaga daya beli penduduk miskin.

Peningkatan nilai P1 dan P2 tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga cenderung meningkat. Fenomena ini mengungkapkan bahwa meskipun secara persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan namun jika kita melihat lebih detil bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat miskin di dalamnya masih perlu perbaikan.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu : kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

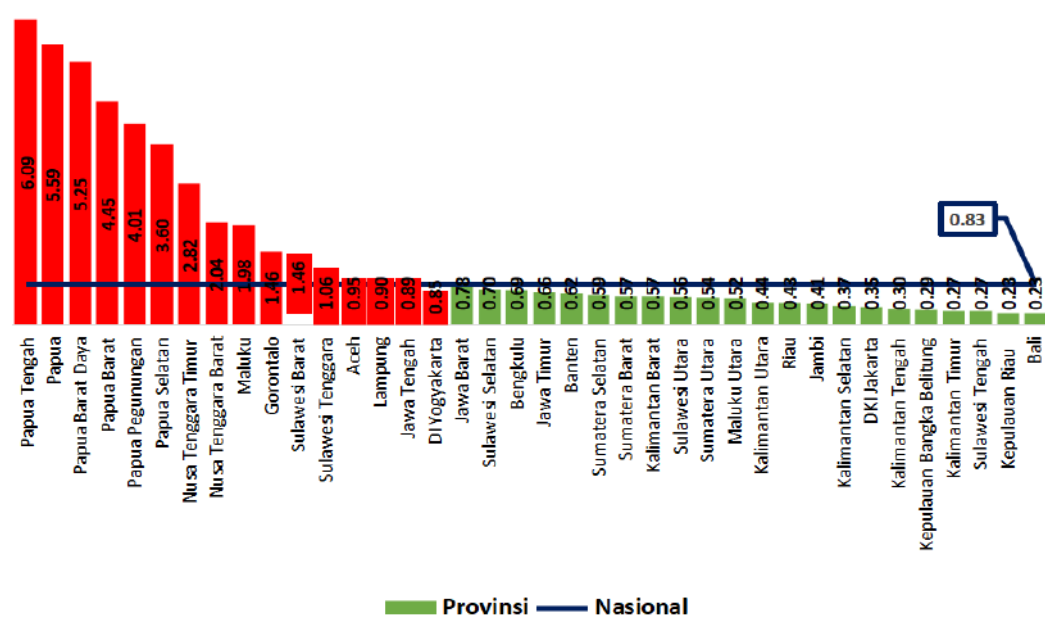
Gambar 3.10
Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Untuk mengetahui jumlah dan angka miskin ekstrem setiap tahunnya digunakan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Tingkat kemiskinan ekstrem Nasional terus mengalami penurunan yang cukup baik yaitu dari tahun 2020 sebesar 2,25 persen menjadi 0,83 persen pada tahun 2024. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem per Provinsi juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Untuk Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan cukup besar yaitu 4,72 persen poin dari tahun 2020 sebesar 5,31 persen menjadi 0,59 persen pada tahun 2024. Dengan demikian, tingkat kemiskinan ekstrem baik Nasional maupun Provinsi Sumatera Selatan sudah dibawah satu persen dan telah sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di Indonesia pada tahun 2024.

Gambar 3.11
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Per Provinsi di
Indonesia Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Jika dibandingkan dengan provinsi penurunan kemiskinan ekstrem tercepat perpulau di Indonesia pada tahun 2023 sampai tahun 2024 yaitu di kawasan Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Selatan (0,70 persen poin), di kawasan Pulau Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Selatan (0,10 persen poin), di kawasan Pulau Jawa adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,39 persen poin), di kawasan Pulau Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Tengah (1,17 persen poin), di kawasan Pulau Maluku dan Papua adalah Provinsi Papua (2,08 persen poin), dan di kawasan Pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (1,11 persen poin).

Tabel 3.14
Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Ekstrem Per Provinsi Tahun 2023 – 2024

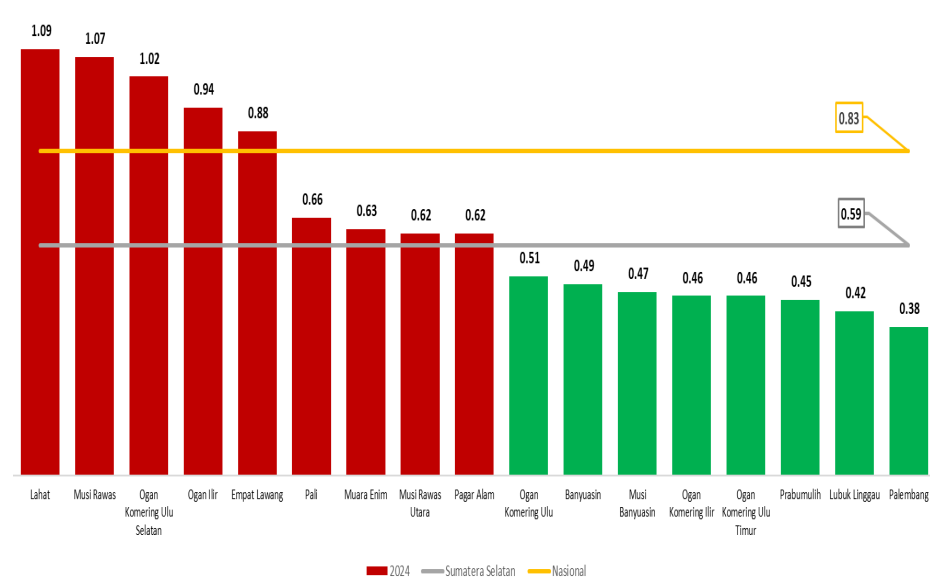
Provinsi	Maret 2023	Maret 2024	Provinsi	Maret 2023	Maret 2024
Papua Tengah		6,09	Sumatera Selatan	1,29	0,59
Papua	7,67	5,59	Sumatera Barat	0,41	0,57
Papua Barat Daya		5,25	Kalimantan Barat	0,99	0,57
Papua Barat	6,43	4,45	Sulawesi Utara	0,78	0,56
Papua Pegunungan		4,01	Sumatera Utara	0,78	0,54
Papua Selatan		3,60	Maluku Utara	0,67	0,52
Nusa Tenggara Timur	3,93	2,82	Kalimantan Utara	0,34	0,44
Nusa Tenggara Barat	2,64	2,04	Riau	0,67	0,43
Maluku	2,59	1,98	Jambi	0,81	0,41
Gorontalo	2,44	1,46	Kalimantan Selatan	0,47	0,37
Sulawesi Barat	0,75	1,46	DKI Jakarta	0,57	0,35
Sulawesi Tenggara	1,65	1,06	Kalimantan Tengah	0,35	0,30
Aceh	1,83	0,95	Kepulauan Bangka Belitung	0,24	0,29
Lampung	1,32	0,90	Kalimantan Timur	0,10	0,27
Jawa Tengah	1,11	0,89	Sulawesi Tengah	1,44	0,27
DI Yogyakarta	1,24	0,85	Kepulauan Riau	0,35	0,23
Jawa Barat	0,79	0,78	Bali	0,19	0,23
Sulawesi Selatan	1,01	0,70	Indonesia	0,83	0,83
Bengkulu	2,08	0,69			
Jawa Timur	0,82	0,66			
Banten	1,12	0,62			

Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Provinsi Sumatera Selatan masuk kedalam 26 (dua puluh enam) Provinsi yang tingkat kemiskinan ekstrem di bawah satu persen atau sekitar 68,42 persen dari total Provinsi di Indonesia dan 12 (dua belas) Provinsi yang berada diatas 1 persen kemiskinan ekstrem atau sekitar 31,58 persen total Provinsi di Indonesia.

Pada tahun 2024 hampir semua kabupaten/ kota yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari tahun 2023 kecuali Kabupaten OKU Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir, OKU Timur, Prabumulih, yang mengalami peningkatan tingkat kemiskinan ekstrem. Ada 9 kabupaten/ kota yang berada di atas capaian Nasional dan Provinsi yaitu Kabupaten Lahat, Musi Rawas, OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, Muara Enim, Musi Rawas Utara dan Pagar Alam. Sedangkan 8 Kabupaten/Kota lainnya, tingkat kemiskinan ekstremnya sudah berada di bawah capaian Nasional dan Provinsi yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Kota Prabumulih, Lubuk Linggau dan Palembang.

Gambar 3.12
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem per- Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

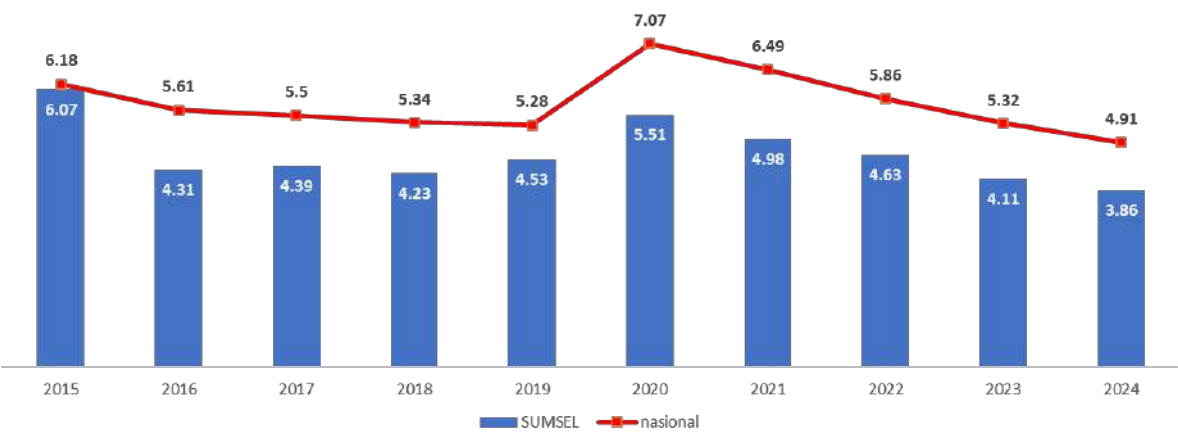


Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara keseluruhan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan bila dilihat dari tahun 2010 hingga tahun 2024 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, angka pengangguran di Sumsel mencapai 4,53 persen, berkurang sebesar 2,17 persen dibandingkan angka pengangguran di tahun 2010. Namun di tahun 2020, tingkat pengangguran meningkat menjadi 5,51% sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Di tahun 2021, Sumsel berhasil menurunkan angka TPT menjadi 4,98%. Angka TPT berhasil diturunkan kembali menjadi 4,63 % di tahun 2022 serta 4,11% di tahun 2023 dan 3,86 di tahun 2024. Hal tersebut seiring dengan capaian TPT nasional di tahun 2023 dan 2024 yang juga mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2011-2024 capaian TPT Sumsel lebih rendah dibandingkan capaian TPT nasional.

Gambar 3.13
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Selatan
Tahun 2015-2024



Sumber: BPS, 2024

Secara absolut jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2024 sebanyak 179,71 ribu orang atau berkurang sebanyak 8,80 ribu orang dari Agustus 2023 sebesar 188,51 ribu orang.

7.2. Kondisi Angkatan Kerja

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri atas 4,48 ribu orang penduduk yang bekerja dan 179,71 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 71,64 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 80,44 ribu orang sedangkan pengangguran juga mengalami penurunan sebanyak 8,80 ribu orang. Sementara itu apabila dibandingkan kondisi Agustus 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 161,85 ribu orang. Penduduk bekerja bertambah sebesar 190,4 ribu orang dan pengangguran berkurang sebesar 28,55 ribu orang.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 mengalami peningkatan sebanyak 71,64 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2023. Seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat menjadi 70,82 persen pada Agustus 2024 dibandingkan Agustus 2023 (70,72 persen). Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi

peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur.

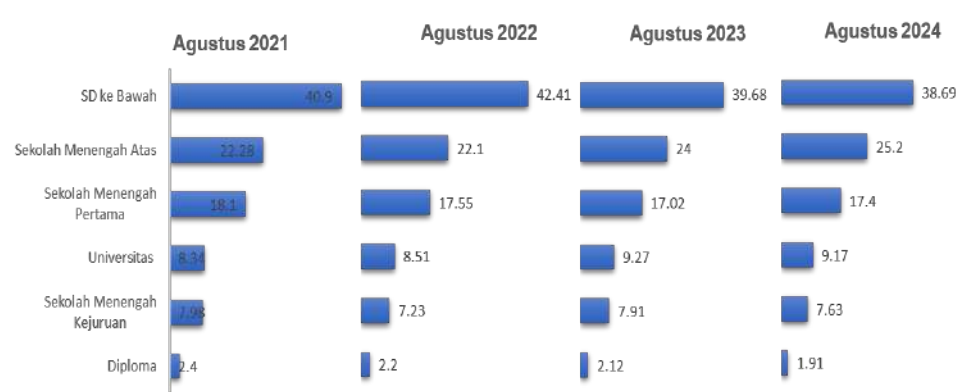
Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 85,79 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,35 persen. Apabila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,40 persen poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin.

7.3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 38,69 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 11,08 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022 dan Agustus 2023.

Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III, dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,99 persen poin, 0,28 persen poin, 0,21 dan 0,10 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (1,20 persen poin).

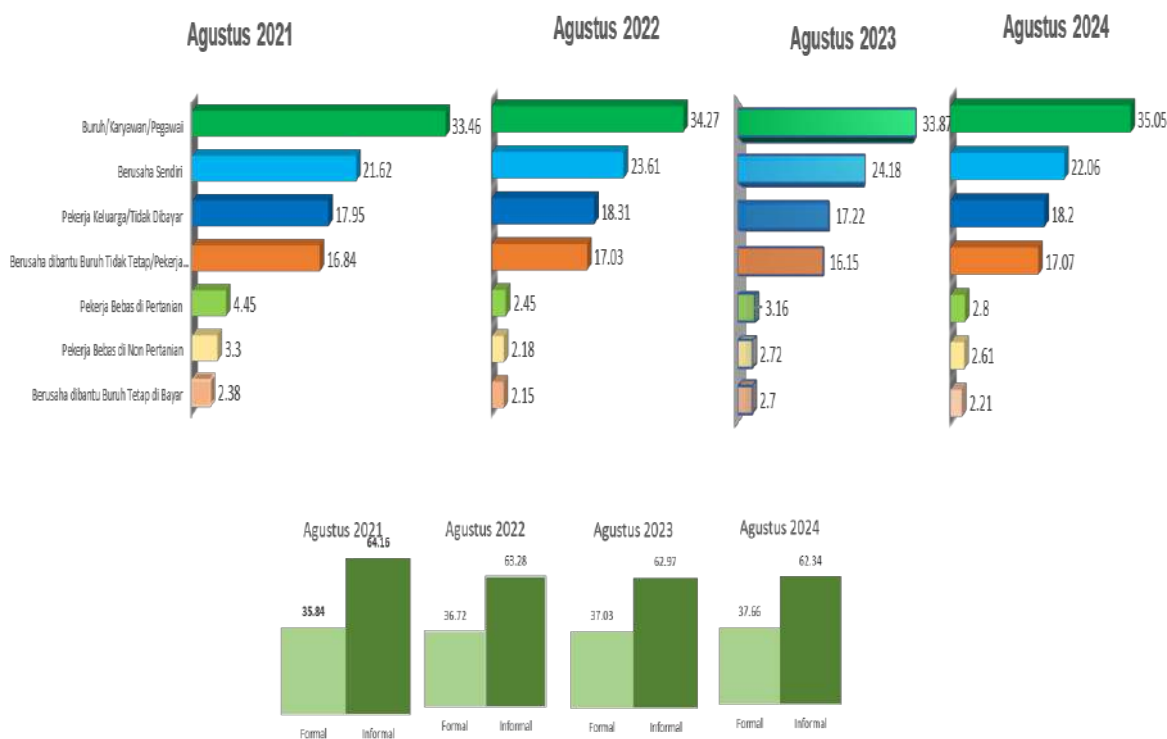
Gambar 3.14
Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Sumsel, 2024

Selain itu kurangnya keterampilan pencari kerja juga menyebabkan persentase penduduk yang bekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan penduduk yang bekerja di sektor formal. Berdasarkan status pekerjaan utamanya tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Gambar 3.15
Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Formal dan Informal
Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Sumsel, 2024

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu

buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2,79 juta orang (62,34 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,69 juta orang (37,66 persen). Dibandingkan Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 0,63 persen.

7.4. *Tingginya Jumlah Pengangguran Terdidik*

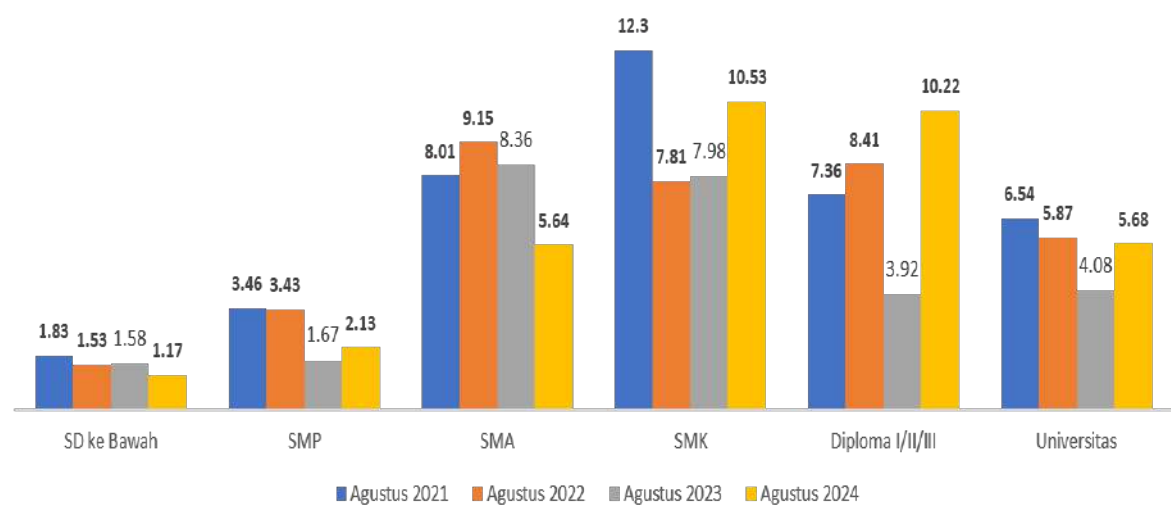
Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, pengangguran di Sumatera Selatan didominasi oleh pengangguran terdidik terutama di daerah perkotaan. TPT menurut kategori pendidikan mempunyai pola yang hampir sama dari Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, kecuali tahun 2022. TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan pada Agustus 2024 yaitu sebesar 10,53 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 1,17 persen

Dibandingkan Agustus 2023, penurunan TPT terjadi hanya pada tingkat pendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Atas. Penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 2,72 persen poin. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami kenaikan TPT. Kenaikan terbesar pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III yaitu sebesar 6,30

Beberapa penyebab yang mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran terdidik adalah terbatasnya lapangan kerja yang tidak diminati oleh tenaga kerja terdidik. Dengan pendidikan yang relatif tinggi menyebabkan para pencari kerja merasa enggan untuk bekerja di kegiatan ekonomi informal. Pilihan utama biasanya adalah bekerja di sektor formal atau sektor ekonomi produktif. Padahal lapangan kerja di sektor tersebut sangat terbatas sehingga

mereka terpaksa menganggur. Tingginya angka pengangguran terdidik lebih disebabkan faktor eksternal pendidikan misalnya budaya priyayi, atau pola pikir masyarakat yang menganggap pekerjaan formal lebih bonafit dibandingkan pekerjaan informal.

Gambar 3.16
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan



Sumber: BPS Sumsel 2024

Dalam mengatasi fenomena tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk menurunkan angka pengangguran terdidik, antara lain melalui pengembangan informasi pasar kerja dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. Dalam penyebarluasan informasi bursa kerja, pemerintah daerah membangun sistem informasi pasar kerja karena dilatarbelakangi oleh minimnya akses informasi lowongan kerja bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja tersebut belum mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya penyebarluasan informasi bursa kerja tersebut diharapkan para pencari kerja mendapatkan akses lowongan kerja dengan cepat. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja juga telah melaksanakan pelatihan-pelatihan kerja bagi para pencari kerja. Kedepan, Balai Latihan Kerja harus diperkuat peran dan fungsinya agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, bukan

hanya mampu menciptakan tenaga kerja yang handal, tetapi juga fokus sesuai dengan kebutuhan pasar.

3.1.2.2. Proyeksi Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat ke kisaran 4,8-5,6% (yoy), mencerminkan resiliensi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dengan sinergi, inovasi, dan optimisme yang terjaga, potensi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap besar untuk terus dimanfaatkan. Inflasi pada tahun 2025 juga diperkirakan akan berada dalam kisaran rentang target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ terutama dari kelompok inflasi inti dan inflasi pada kelompok harga diatur Pemerintah. Untuk memperkuat ketahanan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Sumatera Selatan ke depan, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, mengakselerasi investasi, mendorong digitalisasi, serta hilirisasi komoditas unggulan Sumatera Selatan.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh meningkat seiring dengan stabilnya daya beli masyarakat yang didukung oleh inflasi yang terkendali. Namun, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berpotensi menghadapi tantangan dengan adanya risiko pelemahan harga komoditas unggulan di 2025 seperti kelapa sawit dan karet, yang memberikan dampak pada pendapatan masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor perkebunan. Aktivitas investasi di Sumatera Selatan diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan berakhirnya masa wait and see para investor. Di sisi lain, berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) serta dimulainya pembangunan proyek tol Junction Palembang turut menjadi pendorong investasi. Selain itu, berlanjutnya, perbaikan hasil pertanian seiring dengan cuaca yang kondusif dan optimalisasi produksi melalui pengairan yang baik (beroperasinya bendungan) berpotensi mendorong kinerja ekspor, terutama ekspor antar daerah didukung oleh optimalisasi ekspor batu bara pasca beroperasinya hauling road. Namun, konsumsi pemerintah diperkirakan termoderasi seiring

normalisasi pasca tingginya aktivitas belanja daerah saat periode Pemilu dan Pilkada 2024.

Dari sisi sektoral, pada tahun 2025, sektor lapangan usaha di Sumatera Selatan diproyeksikan tumbuh positif, meskipun dengan dinamika yang bervariasi di setiap sektor. Sektor pertambangan diperkirakan menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang signifikan, seiring dengan membaiknya harga komoditas batu bara di pasar global. Kebijakan energi di Amerika Serikat oleh pemerintahan baru yang mendukung bahan bakar fosil diperkirakan memberikan sentimen positif terhadap sektor ini. Selain itu, keberadaan infrastruktur logistic yang semakin mendukung, seperti jalur transportasi baru, memperkuat daya saing sektor pertambangan di Sumatera Selatan. Sektor pertanian juga diperkirakan tumbuh lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh cuaca yang lebih kondusif dan selesainya pembangunan infrastruktur irigasi serta bendungan strategis.

Peningkatan produktivitas pertanian, terutama pada komoditas unggulan seperti karet dan kelapa sawit, menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ini. Sektor konstruksi diperkirakan terus mencatatkan pertumbuhan yang solid, terutama didorong oleh penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berbagai proyek pembangunan infrastruktur baru. Pembangunan pabrik pulp di Kabupaten Ogan Komering Ilir juga memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas konstruksi.

Di sisi lain, sektor industri pengolahan diproyeksikan tumbuh lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya, karena normalisasi aktivitas ekonomi pasca-Pemilu dan Pilkada. Namun, selesainya pembangunan pabrik di OKI akan turut memberikan dampak positif terhadap sektor ini, khususnya melalui peningkatan nilai tambah komoditas lokal. Sektor perdagangan, meskipun tetap tumbuh, diperkirakan turut mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Normalisasi konsumsi masyarakat pasca-Pemilu menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi sektor ini. Namun demikian, perdagangan kendaraan bermotor tetap menjadi pendorong utama

pertumbuhan sektor ini, seiring dengan peningkatan daya beli konsumen domestik.

Secara keseluruhan, perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2025 diproyeksikan tetap resilien, dengan dukungan dari permintaan domestik, investasi, dan kontribusi sektor-sektor unggulan. Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sector non-komoditas, seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan penguatan sektor jasa, akan menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dengan implementasi kebijakan yang tepat dan pengelolaan risiko yang baik, Sumatera Selatan diharapkan mampu mempertahankan perannya sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Dengan melihat kondisi capaian tahun 2024 ini maka **pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan akan tetap tumbuh kuat di tahun 2025** serta di perkirakan tumbuh sebesar **4,8 – 5,6%** didukung oleh inflasi yang melandai dan masuk ke kisaran target. Inflasi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2025 diperkirakan masih terkendali dan akan kembali ke kisaran target inflasi nasional sebesar **2,5 ± 1% (yoy)**.

Ke depan, inflasi pada tahun 2025 diperkirakan akan berada dalam kisaran rentang target inflasi nasional sebesar 2,5±1%. Tekanan inflasi pada 2025 diperkirakan berasal dari kelompok inflasi inti dan inflasi pada kelompok harga diatur Pemerintah. Potensi risiko inflasi impor akibat kebijakan proteksionis di berbagai negara menjadi salah satu faktor pendorong inflasi, meskipun dampaknya relatif terjaga. Selain itu, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di awal tahun 2025 juga memberikan dampak langsung pada peningkatan harga barang dan jasa.

Sinergi Pemerintah Daerah dalam TPID kota maupun kabupaten di Sumatera Selatan menjadi kunci menjaga inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau. Hal tersebut utamanya difokuskan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan penyaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Keluarga Rawan Stunting (KRS) guna menjaga pasokan komoditas bahan pangan dan

daya beli masyarakat. Selain itu, penguatan rantai pasok untuk komoditas lokal diperkirakan mampu mengurangi tekanan harga pada beberapa komoditas pangan strategis.

Tekanan inflasi kelompok inti di 2025 diperkirakan berasal dari implementasi kenaikan PPN di awal tahun. Selain itu, risiko inflasi impor (imported inflation) akibat ketidakstabilan pasokan pangan global juga menjadi tantangan, terutama dalam konteks harga barang yang dipengaruhi pasar internasional. Inflasi pada kelompok harga diatur Pemerintah diperkirakan didorong oleh kenaikan biaya energi global dan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi yang memengaruhi harga barang dan jasa yang bergantung pada energi. Namun, tarif cukai rokok yang relatif tetap diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan inflasi lebih lanjut pada komponen ini.

Dengan berbagai perkembangan diatas serta berbagai koordinasi, inovasi dan sinergi dalam pengendalian inflasi termasuk Tim Pengendalian Inflasi dan Satgas Pangan, inflasi Sumatera Selatan tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran $2,5 \pm 1$ persen.

Strategi Perekonomian Daerah Tahun 2025

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di level global, nasional, dan Sumatera Selatan di 2024 dan prospek di 2025, seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Selatan perlu memperkuat sinergi dalam memanfaatkan peluang dan mengantisipasi peluang dan tantangan perekonomian. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan antara lain:

1. Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi Pangan

Sumatera Selatan merupakan salah satu pusat lumbung pangan nasional, yang terlihat dari produksi padi 2,83 juta ton di 2023 (tertinggi kelima se-nasional). Pada saat yang sama, beras menjadi penyumbang andil inflasi tahunan tertinggi di Sumatera Selatan. Adapun peluang dan tantangan dari sisi produksi antara lain masih kurangnya infrastruktur untuk pengembangan lahan rawa untuk pertanian; tingginya biaya produksi terutama dari harga dan ketersediaan pupuk; dan hambatan pada akses pembiayaan dan

asuransi usaha tani padi (AUTP) untuk mendukung kegiatan produksi petani. Dari sisi distribusi, maraknya sistem ijon dengan tengkulak ditengarai menyebabkan panjangnya rantai distribusi beras di Sumsel yang melibatkan hingga 5 pedagang perantara serta belum optimalnya pemanfaatan kerja sama antardaerah (KAD) untuk stabilisasi harga dan memperkuat ketahanan pangan.

2. Pengentasan Kemiskinan

Untuk memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan, pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan harus diterapkan. Pertama, menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dapat dilakukan dengan memperkuat jaring pengaman sosial, seperti program bantuan sembako dan bantuan tunai. Program ini harus disertai dengan mekanisme penyaluran yang tepat sasaran, khususnya bagi kelompok miskin ekstrem yang paling rentan. Selain itu, operasi pasar murah dapat diadakan secara rutin di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tinggi, guna menekan harga kebutuhan pokok yang berkontribusi signifikan terhadap garis kemiskinan, terutama beras. Namun, intervensi ini harus diiringi dengan upaya mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan, dengan cara memperkuat daya beli melalui program-program yang mendorong kemandirian ekonomi. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat miskin harus menjadi fokus utama dalam jangka panjang. Ini dapat dicapai melalui pemberdayaan ekonomi lokal, yang melibatkan pelatihan keterampilan, penyediaan akses modal, dan pendampingan usaha bagi UMKM. Pemerintah daerah dapat mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha, sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

Di samping itu, pengembangan inklusi keuangan perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang memadai terhadap layanan keuangan, seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi, yang dapat membantu mereka mengelola risiko ekonomi dan memanfaatkan peluang usaha. Sinergi lintas sektor dan

koordinasi antarperangkat daerah dan instansi vertical sangat penting untuk memastikan implementasi strategistrategi ini berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

3. Mengakselerasi Investasi

Untuk meningkatkan investasi, Sumatera Selatan perlu mengoptimalkan soft infrastructures dan hard infrastructures yang menjadi penopang iklim investasi. Dari sisi soft infrastructures, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dan pendampingan dalam penyusunan RTRW dan RDTR, serta memastikan monitoring berkala terhadap progress persetujuan RTRW di DPRD dan prioritas pembahasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Penyusunan regulasi turunan insentif fiskal di level provinsi dan kabupaten/kota juga dapat dipercepat untuk meningkatkan daya tarik investasi. Kemudian, sinergi kebijakan antarlembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu diperkuat untuk mengatasi kendala birokrasi dan meningkatkan efisiensi proses perizinan. Selain itu, peningkatan kualitas layanan dan kapabilitas aplikasi Online Single Submission (OSS) berbasis risiko (RBA) sangat penting untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan investasi di daerah. Selain itu, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam mempercepat pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri, a.l. melalui pendidikan vokasi (SMK).

Sedangkan dari sisi hard infrastructures, pembangunan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas terutama jalan antarkota dan pelabuhan, ketersediaan lahan yang clean and clear serta kawasan industri, dan pasokan energi dan air memadai juga memegang peranan penting dalam menarik investasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan daya tarik Sumatera Selatan sebagai tujuan investasi dapat semakin meningkat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4. Mengembangkan Ekonomi Digital

Untuk meningkatkan ekonomi digital di Sumatera Selatan, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, perluasan infrastruktur digital perlu diprioritaskan, dengan fokus pada blank spot di daerah-

daerah yang belum terjangkau layanan internet yang memadai. Kolaborasi antara pemerintah daerah melalui TP2DD, pemerintah pusat, dan operator telekomunikasi, sangat penting untuk memastikan akses internet yang merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah pedesaan dan terpencil. Kedua, peningkatan literasi digital perlu digalakkan melalui program pelatihan yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, terutama sektor UMKM yang memiliki potensi besar untuk didigitalisasi. Selain itu, penguatan perda yang mendorong penggunaan layanan pembayaran nontunai untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran pemda juga berperan penting dalam mendorong akseptasi masyarakat terhadap pembayaran nontunai. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing digital dan mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Selatan.

5. Mendorong Hilirisasi Komoditas Unggulan Sumatera Selatan

Kinerja ekonomi Sumsel cukup rentan dengan gejolak global karena dominasi komoditas unggulan ekspor yang berbasis SDA mentah. Ketergantungan yang tinggi pada ekspor komoditas mentah membuat perekonomian Sumatera Selatan cenderung rentan terhadap fluktuasi harga internasional dan perubahan kebijakan di negara tujuan ekspor.

Hilirisasi komoditas berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah produk sehingga ekonomi Sumatera Selatan lebih resilien terhadap kondisi perekonomian global. Namun, masih terdapat tantangan dalam hilirisasi komoditas unggulan Sumatera Selatan, seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet. Masih belum optimalnya ketersediaan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri hilir menjadi kendala signifikan. Keterbatasan dalam pendidikan dan pelatihan yang relevan menyebabkan rendahnya kesiapan tenaga kerja lokal untuk mendukung proses hilirisasi. Selain itu, akses terhadap teknologi modern dan inovasi dalam proses pengolahan masih terbatas, yang mengakibatkan rendahnya efisiensi dan daya saing produk olahan Sumatera Selatan di pasar global. Kendala logistik dan infrastruktur dalam mendukung industri

hilir, seperti tingginya biaya transportasi akibat infrastruktur pelabuhan yang sudah tidak memadai perlu turut ditangani.

Untuk mendorong hilirisasi di Sumatera Selatan, beberapa langkah strategis dapat diambil. Dari sisi ketenagakerjaan, penting untuk memperkuat sektor pendidikan dan pelatihan dengan menciptakan program link and match antara institusi pendidikan dan kebutuhan industri, sehingga tenaga kerja lokal lebih siap dan mampu memenuhi permintaan industri hilir. Pemerintah daerah dapat bermitra dengan industri dalam mendorong pendirian sekolah vokasional yang mendukung kebutuhan industri hilir ketiga komoditas tersebut. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat, diperlukan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi hilirisasi dan pemberian dukungan dalam bentuk kebijakan yang mendorong investasi di sektor ini. Penguatan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga penelitian juga penting untuk mengembangkan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, yang dapat diterapkan pada komoditas unggulan seperti karet dan kelapa sawit. Terakhir, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dapat memfokuskan upaya pada pengembangan kawasan industri yang didedikasikan untuk hilirisasi, seperti kawasan industri Tanjung Enim untuk batu bara dan pengembangan pelabuhan New Palembang Port untuk mendukung pelabuhan eksisting (Boom Baru) terutama untuk menampung kapal-kapal dengan tonase besar.

Strategi peningkatan ekonomi di Sumatera Selatan dibeberapa sector untuk tahun 2025, sebagai berikut:

Sektor	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
Pertanian	- Stabil dengan peningkatan efisiensi input cost dan program perluasan lahan tanam. - Infrastruktur irigasi dan bendungan mendukung produktivitas padi dan hortikultura. - kebutuhan kelapa sawit untuk kebutuhan domestik seperti adanya program biodiesel (B35)	- Tumbuh positif karena permintaan domestik komoditas (biodiesel B35) dan dukungan pemerintah. - Lanjutan bantuan pemerintah untuk pengembangan tanaman pangan dan perkebunan.
Industri Pengolahan	- Tumbuh lebih tinggi, didorong oleh permintaan domestik terkait pemilu. - Kontribusi pembangunan pabrik tisu di Kabupaten OKI.	- Pertumbuhan kuat dalam pengolahan kelapa sawit, minyak goreng, dan energi terbarukan.
Pertambangan	- Pertumbuhan melambat karena target produksi batu bara lebih rendah dan penurunan permintaan ekspor. - Fenomena El-Nino memengaruhi produktivitas tambang. - Pasokan batu bara dari India dan Tiongkok turut menahan permintaan ekspor	- Stabil dengan peningkatan permintaan domestik dan pasokan batu bara yang cukup.
Konstruksi	- Pertumbuhan positif berkat percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti jalan tol, pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, preservasi jalan dan jembatan nasional, dan pembangunan jaringan irigasi.	- Stabil, didukung oleh kelanjutan PSN dan peningkatan belanja barang modal pemerintah.
Perdagangan & Transportasi	- Tumbuh dengan dinamika permintaan domestik dan global, dipengaruhi pemulihan ekonomi pasca-pandemi.	- Stabil, dengan tantangan inflasi dan volatilitas harga yang berpotensi memengaruhi konsumsi.

Sumber: Laporan Perekonomian Sumatera Selatan, 2024

3.1.2.3 **Perkiraan Makro Ekonomi Sumsel 2026**

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2026 dengan fokus pada pemantapan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Tema pembangunan tahun 2026 adalah "Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan".

Salah satu prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur unggulan, termasuk proyek strategis seperti New Palembang Port Tanjung Carat. Pelabuhan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mempercepat distribusi logistik di Sumatera Selatan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, upaya sinkronisasi program dan kegiatan di bidang kebinamargaan dan tata ruang juga menjadi fokus. Rapat teknis yang diselenggarakan bertujuan memastikan kesiapan

pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota, dengan harapan dapat mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kebijakan pembangunan Sumatera Selatan tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat konektivitas antar wilayah, dan memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Tantangan dan Peluang Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2026

Perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2026 dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang yang memerlukan perhatian khusus.

Tantangan:

1. Ketidakpastian Ekonomi Global: Fluktuasi ekonomi global dapat memengaruhi ekspor komoditas utama Sumatera Selatan, seperti minyak dan gas, serta produk pertanian.
2. Perubahan Iklim: Perubahan iklim dapat memengaruhi sektor pertanian dan perkebunan, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak masyarakat di Sumatera Selatan.
3. Keterbatasan Infrastruktur: Meskipun ada upaya peningkatan infrastruktur, beberapa daerah di Sumatera Selatan masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan dalam kualitas dan kuantitas SDM yang terampil dapat menghambat perkembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih maju.

Peluang:

1. Pengembangan Sektor Pariwisata: Sumatera Selatan memiliki potensi wisata alam dan budaya yang kaya. Pengembangan

sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.

2. Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas dengan mengembangkan sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi informasi, dan ekonomi kreatif dapat meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.
3. Peningkatan Infrastruktur: Proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan, seperti pembangunan pelabuhan dan jalan tol, dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi: Adopsi teknologi baru dalam sektor pertanian, perikanan, dan industri dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal di pasar global.

Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menghadapi tantangan dan peluang tersebut maka diperlukan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai sasaran makro pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas

- Fokus pada Pembangunan Infrastruktur: Mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi, seperti jalan tol, pelabuhan (misalnya Pelabuhan Tanjung Carat), dan bandara, untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, mempermudah distribusi barang, serta menarik investasi.
- Penguatan Infrastruktur Digital: Mengembangkan infrastruktur digital untuk mendukung sektor ekonomi berbasis teknologi, seperti e-commerce dan fintech, serta meningkatkan akses internet di daerah terpencil untuk memperluas partisipasi ekonomi digital.

2. Diversifikasi Ekonomi

- Pengembangan Sektor Pariwisata: Mengoptimalkan potensi pariwisata Sumatera Selatan, seperti wisata alam, budaya, dan sejarah, melalui pembangunan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan, serta mempromosikan destinasi wisata lokal baik di tingkat nasional maupun internasional.
- Transformasi Sektor Pertanian dan Perkebunan: Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan dengan penerapan teknologi tepat guna, program pelatihan untuk petani, serta memperkenalkan pertanian berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan.
- Inovasi di Sektor Industri Kreatif dan Manufaktur: Mendukung pengembangan industri kreatif, seperti seni, kerajinan, dan desain, serta sektor manufaktur dengan memfasilitasi pembentukan pusat inovasi dan pengembangan produk lokal.

3. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di pasar kerja global, terutama dalam sektor teknologi, industri, dan pariwisata.
- Program Kewirausahaan: Mengembangkan program-program kewirausahaan yang mendukung anak muda dan masyarakat untuk memulai usaha, dengan memberikan akses kepada pelatihan, modal usaha, serta memperkenalkan model bisnis baru.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

- Pengelolaan Lingkungan Hidup: Meningkatkan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, dengan mendorong sektor kehutanan dan pertanian yang ramah lingkungan.
- Pengembangan Energi Terbarukan: Investasi dalam pengembangan energi terbarukan (seperti energi surya dan

bioenergi) untuk mendukung ketahanan energi lokal serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi fosil.

5. Peningkatan Kemitraan dan Kerjasama dengan Swasta dan Investor

- **Fasilitasi Investasi:** Meningkatkan kemudahan berusaha dan memberikan insentif bagi investor yang tertarik mengembangkan usaha di Sumatera Selatan, terutama di sektor infrastruktur, teknologi, dan pariwisata.
- **Kerja Sama Antar Daerah dan Pemerintah Pusat:** Mengoptimalkan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat untuk memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai rencana dan terintegrasi dengan baik.

6. Memperkuat Sektor Ekonomi Digital

- **Program Digitalisasi UMKM:** Mendorong UMKM untuk bertransformasi ke platform digital guna meningkatkan daya saing mereka di pasar global dan lokal. Program digitalisasi dapat mencakup pelatihan, pemberian fasilitas dan akses internet yang lebih baik, serta integrasi sistem pembayaran digital.
- **Pendanaan untuk Startups:** Mendorong pendanaan bagi startup lokal, khususnya yang bergerak dalam sektor teknologi dan inovasi, dengan memberikan akses mudah kepada venture capital dan program inkubator bisnis.

7. Pemulihan dan Ketahanan Ekonomi Pasca Pandemi

- **Penyediaan Bantuan untuk Sektor Terdampak:** Menyediakan bantuan atau stimulus ekonomi bagi sektor-sektor yang terdampak pandemi, seperti sektor pariwisata, perhotelan, dan transportasi, untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
- **Program Infrastruktur Hijau:** Menyusun program pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan ekonomi, seperti pembangunan fasilitas publik ramah lingkungan dan pengelolaan sampah yang lebih efisien.

8. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

- Program Pengurangan Kemiskinan: Mengimplementasikan kebijakan yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan dengan menyediakan akses pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan.
- Penyediaan Jaringan Pengaman Sosial: Memperkuat jaringan pengaman sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap perubahan ekonomi dan krisis, serta meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok marginal.

9. Peningkatan Daya Saing dan Konektivitas Global

- Peningkatan Ekspor dan Impor: Memfasilitasi peningkatan ekspor produk-produk unggulan Sumatera Selatan dan membuka akses pasar internasional untuk produk lokal, melalui pembenahan proses logistik dan kebijakan perdagangan.
- Membangun Kemitraan Internasional: Meningkatkan hubungan internasional dengan negara-negara mitra untuk membuka peluang investasi dan kerjasama di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi, dan pendidikan.

Dengan implementasi kebijakan yang tepat, Sumatera Selatan dapat mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2026.

Dengan berbagai strategi arah kebijakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan maka **Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2026 ditargetkan sebesar 5,8 – 6,3%**.

Inflasi pada tahun 2026 diharapkan tetap terjaga pada kisaran **1,5 – 3,5%** dengan menjaga ketersediaan pasokan dengan melakukan perhitungan kebutuhan wilayah dan kebutuhan wilayah sekitar, dan peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap bahan pangan strategis. Serta dengan tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi

termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumsel (GPISS).

Kondisi **Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan menjadi 3,75–3,90% dan kemiskinan ditargetkan pada kisaran 9,07–10,07%.** Salah satu indikator untuk mengukur penduduk yang menganggur yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Untuk itu diperlukan penciptaan lapangan kerja yang cukup agar dapat menampung tenaga kerja yang menganggur tersebut. Selain itu, adanya program pembekalan keterampilan juga dapat menjadi modal bagi pencari kerja untuk membuka lapangan usaha baru.

Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi (a) memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial, (b) konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial, (c) intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan, (d) meningkatkan kesejahteraan petani, dan (e) meningkatkan kualitas konsumsi pangan.

Gini Ratio ditargetkan sebesar 0,312 – 0,316 dimana Kondisi perekonomian Sumssel yang terus pulih semenjak masa pandemi COVID-19 berpengaruh positif pada berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang terjadi sempat membuat kegiatan perekonomian dari pemerintah, swasta, dan masyarakat mengalami kelesuan, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Dampak yang berbeda antarkelompok pendapatan masyarakat tersebut mengakibatkan ketimpangan meningkat yang ditunjukkan oleh indikator rasio gini meningkat. Rasio gini sendiri merupakan indikator yang sensitif dan kompleks sehingga untuk menurunkan ketimpangan membutuhkan kebijakan yang menysasar pada semua lapisan pendapatan masyarakat serta pendistribusian kesejahteraan yang merata.

Tabel 3.15
Kerangka Ekonomi Makro Sumatera Selatan

INDIKATOR MAKRO	2023			2024			2025		2026
	Target RKPD	Capaian	Capaian Nasional	Target RKPD	Capaian	Capaian Nasional	Target RKPD	Target P-RKPD	Target RKPD
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8-6,5	5,08	5,05	4,70 - 5,50*	5,03	5,03	5,3 - 5,5	5,30 - 5,50	5,8-6,3
Inflasi (%/tahun)	2-4	3,17	2,61	2,5 ± 1*	1,2	1,57	2,5 ± 1*	1,5 - 3,5*	1,5 - 3,5*
Tingkat Kemiskinan (%)	11,59-12,66	11,78	9,36	10,95	10,51	8,57	9,37 - 10,37	9,37 - 10,37	9,07 - 10,07
Tingkat Pengangguran (%)	3,06-4,22	4,11	5,32	4,14	3,86	4,91	3,83 - 3,95	3,82 - 3,93	3,75 - 3,90
Gini Ratio	0,350	0,338	0,388	0,324	0,331	0,381	0,316-0,320	0,316-0,320	0,312 - 0,316
Indeks Pembangunan Manusia	73,09	74,39	73,55	71,63	73,84	75,02	71,96	74,4	74,95
Indeks Modal Manusia (IMM)	-	-	-	-	-	-	-	0,53	0,55

Sumber : RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan Laporan Perekonomian Sumsel Tahun 2024

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Kolaborasi berbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan di berbagai bidang dengan tetap memperhatikan koridor pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah.

Melalui RKPD Tahun 2026, pemerintah Sumsel berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan daerah melalui (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam penentuan proyeksi kerangka pendanaan tahun 2026 maka akan dilihat dulu bagaimana kinerja keuangan periode sebelumnya sehingga penetapan target juga melihat hasil capaian pada periode sebelumnya. Secara umum, kerangka pendanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.11.175.807.580.572,80 mengalami penurunan dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp10.060.185.345.574,40, naik sebesar Rp.1.115.622.234.998,38 atau 11,08 persen.

1.1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menjadi obyek PAD adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Penetapan Target PAD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2026 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Melalui berbagai upaya untuk mempertahankan penerimaan Pendapatan Daerah khususnya PAD, maka diharapkan target PAD Provinsi Sumatera Selatan dapat tercapai. Proyeksi PAD Tahun Anggaran 2026 diperkirakan sejumlah Rp.4.819.449.619.379,62 mengalami penurunan bila dibanding APBD Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp. 4.459.311.556.974,42 atau berkurang sejumlah Rp.360.138.062.405,20 atau 8,07 persen. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Pajak Daerah dialokasikan sejumlah Rp.4.012.860.825.379,62.
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah dialokasikan sejumlah Rp.5.536.107.400,00.
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dialokasikan sejumlah Rp.148.107.513.275,00.
- 4) Lain-lain PAD yang Sah dialokasikan sejumlah Rp.652.945.173.325,00.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mempertahankan penerimaan PAD, antara lain:

a. Pajak Daerah:

1. Optimalisasi Sistem Pemungutan Pajak

- Implementasi Sistem Digital (e-Pajak): Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan sistem e-Pajak untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik. Ini meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi pemungutan pajak, serta meminimalkan potensi kebocoran pajak.
- Sistem Pembayaran Pajak Online: Pengembangan aplikasi pembayaran pajak secara online mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor pajak, yang meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat.

2. Peningkatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak

- Edukasi kepada Wajib Pajak: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyuluhan intensif tentang pentingnya pembayaran pajak daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, sosialisasi di media sosial, dan kegiatan yang melibatkan masyarakat.
- Program Kesadaran Pajak: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah melalui kampanye publik yang efektif.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Pajak

- Layanan Pajak yang Cepat dan Mudah: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan kualitas pelayanan pajak dengan mempercepat proses

administrasi dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam hal pengurusan administrasi dan pembayaran.

- Peningkatan Fasilitas Pelayanan: Menyediakan layanan konsultasi pajak untuk membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka dan cara pembayaran yang tepat, yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan.

4. Penyederhanaan dan Perbaikan Proses Administrasi

- Penyederhanaan Proses Administrasi Pajak: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk menyederhanakan prosedur administrasi pajak, mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta mempercepat proses verifikasi dan pemrosesan pembayaran.
- Audit dan Pengawasan Ketat: Melakukan audit dan pengawasan yang ketat terhadap wajib pajak untuk memastikan bahwa pajak yang terutang dibayar dengan benar dan tepat waktu. Hal ini juga untuk mengidentifikasi potensi potensi penerimaan pajak yang belum tergali.

5. Penguatan Sektor Pajak Berbasis Potensi Daerah

- Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Dengan mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor, khususnya melalui pembaruan data kendaraan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan penerimaan dari sektor ini.
- Pemanfaatan Potensi Pajak dari Sektor Perdagangan dan Perhotelan: Sumatera Selatan, dengan sektor pariwisatanya yang berkembang, juga berusaha memaksimalkan pajak dari sektor ini dengan

meningkatkan jumlah wisatawan dan memperbaiki fasilitas umum.

6. Penerapan Insentif dan Kemudahan untuk Wajib Pajak

- Diskon atau Pengurangan Pajak: Dalam beberapa kasus, Pemprov Sumatera Selatan memberikan diskon atau pengurangan pajak untuk mendorong wajib pajak membayar tepat waktu atau lebih banyak dari yang dibutuhkan, misalnya dengan memberikan pengurangan pajak untuk kendaraan bermotor yang diperpanjang masa pajaknya lebih awal.
- Insentif untuk Pembayaran Tepat Waktu: Pemerintah juga menerapkan kebijakan insentif untuk pembayaran pajak tepat waktu, seperti pemberian potongan tertentu bagi wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo.

7. Peningkatan Pengawasan dan Penindakan terhadap Pajak yang Belum Terbayar

- Penindakan terhadap Penghindaran Pajak: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan tindakan tegas terhadap penghindaran atau penggelapan pajak dengan meningkatkan pengawasan dan melakukan penindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemanfaatan Data untuk Pengawasan Pajak: Penggunaan teknologi dan big data untuk memonitor dan mengidentifikasi potensi wajib pajak yang belum membayar atau yang membayar kurang dari kewajiban yang ditentukan.

8. Kolaborasi dengan Instansi Terkait

- Kerja Sama dengan Kepolisian dan Pengadilan: Pemprov Sumatera Selatan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan pengadilan,

untuk memastikan bahwa tindakan hukum dapat diterapkan terhadap mereka yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

- Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat: Koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan sistem dan kebijakan perpajakan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

9. Inovasi dalam Pengelolaan Pajak

- Penerapan Teknologi dalam Pengelolaan Pajak: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berinvestasi dalam teknologi untuk mempermudah pengumpulan, pemantauan, dan pelaporan pajak daerah. Penggunaan perangkat lunak dan aplikasi yang canggih memungkinkan pemantauan pajak yang lebih akurat dan efektif.
- Pemanfaatan Data Elektronik untuk Pengelolaan Pajak: Meningkatkan pengumpulan data elektronik dari berbagai sektor untuk memastikan bahwa semua potensi pajak dapat dipungut secara maksimal.

b. Retribusi Daerah:

1. Peningkatan Pengawasan dan Penataan Retribusi

- Pengawasan yang Ketat: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat pengawasan terhadap pemungutan retribusi di berbagai sektor, seperti retribusi pasar, parkir, layanan publik (rumah sakit, puskesmas), dan lain-lain. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan dapat mengurangi kebocoran dan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran retribusi.
- Penataan Ulang Tarif Retribusi: Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi dan penataan ulang tarif retribusi untuk memastikan bahwa tarif yang diterapkan sesuai

dengan potensi daerah dan daya beli masyarakat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Retribusi

- Digitalisasi Retribusi: Pemprov Sumatera Selatan mengembangkan sistem pembayaran retribusi secara elektronik untuk mempermudah proses pembayaran oleh masyarakat. Melalui sistem digital ini, wajib retribusi dapat membayar secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah, yang meningkatkan kenyamanan dan efisiensi.
- Penerapan Sistem e-Retribusi: Penerapan sistem e-Retribusi untuk retribusi layanan publik (misalnya pasar, tempat parkir, dan pasar swalayan) guna mengurangi potensi kebocoran dan meningkatkan transparansi. Sistem ini juga mempermudah pemantauan dan pelaporan yang lebih akurat.

3. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

- Sosialisasi kepada Wajib Retribusi: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan berbagai program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban retribusi dan manfaatnya untuk pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban mereka dalam membayar retribusi.
- Penyuluhan tentang Pentingnya Retribusi: Menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai mekanisme pembayaran retribusi serta fasilitas atau layanan yang didapatkan sebagai imbalan dari pembayaran retribusi tersebut.

4. Optimalisasi Potensi Retribusi Daerah

- Peningkatan Retribusi Parkir dan Pasar: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengoptimalkan sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk retribusi, seperti tempat parkir dan pasar. Dengan meningkatkan

pemantauan dan penataan tempat parkir serta pengelolaan pasar yang lebih profesional, diharapkan penerimaan retribusi dapat meningkat.

- **Peningkatan Retribusi Pelayanan Publik:** Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik yang dikenakan retribusi, seperti rumah sakit, puskesmas, dan layanan lainnya, dengan memberikan fasilitas yang lebih baik agar masyarakat lebih tertarik untuk membayar retribusi.

5. Penyederhanaan dan Transparansi Proses Retribusi

- **Penyederhanaan Proses Administrasi:** Mempercepat dan mempermudah prosedur administrasi terkait pembayaran retribusi, sehingga wajib retribusi dapat melakukan pembayaran dengan lebih cepat dan tanpa hambatan.
- **Transparansi Penggunaan Dana Retribusi:** Meningkatkan transparansi mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari retribusi, agar masyarakat lebih memahami manfaat langsung yang mereka terima, sehingga dapat meningkatkan keinginan untuk membayar retribusi.

6. Penerapan Insentif dan Penghargaan untuk Kepatuhan

- **Insentif untuk Pembayaran Tepat Waktu:** Untuk mendorong pembayaran retribusi tepat waktu, Pemprov Sumatera Selatan memberikan insentif atau penghargaan bagi mereka yang membayar retribusi secara tepat waktu. Ini dapat berupa pengurangan tarif atau fasilitas lain yang mendukung.
- **Penghargaan bagi Pelaku Usaha yang Taati Retribusi:** Memberikan penghargaan atau sertifikat kepada pelaku usaha yang patuh membayar retribusi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pelaku usaha lainnya untuk ikut serta dalam kewajiban ini.

7. Evaluasi dan Peninjauan Berkala Tarif Retribusi

- **Evaluasi Tarif Retribusi Secara Berkala:** Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan evaluasi berkala terhadap tarif retribusi yang berlaku, memastikan bahwa tarif yang dikenakan sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah dan kebutuhan untuk pembangunan.
- **Penyesuaian Tarif Berdasarkan Kebutuhan Daerah:** Menyesuaikan tarif retribusi dengan kebutuhan pembangunan daerah, misalnya, jika ada proyek infrastruktur baru atau fasilitas pelayanan publik yang memerlukan dana tambahan, tarif retribusi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

8. Peningkatan Kerjasama dengan Sektor Swasta

- **Kolaborasi dengan Pelaku Usaha:** Mengajak pelaku usaha untuk bekerja sama dalam meningkatkan pemungutan retribusi, khususnya di sektor yang memiliki potensi besar, seperti sektor pariwisata, pasar, atau parkir. Kemitraan ini bisa mencakup kerjasama dalam sistem pembayaran atau penyediaan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat.
- **Bekerja Sama dengan Bank untuk Memudahkan Pembayaran:** Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan lembaga keuangan atau bank untuk mempermudah proses pembayaran retribusi melalui berbagai kanal pembayaran yang tersedia.

9. Pemanfaatan Retribusi untuk Pembangunan Daerah

- **Penggunaan Retribusi untuk Meningkatkan Layanan:** Pemerintah Provinsi memastikan bahwa dana yang diperoleh dari retribusi digunakan secara efisien untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang berhubungan langsung dengan retribusi tersebut, misalnya memperbaiki fasilitas umum, memperbaharui infrastruktur, atau menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik.

- Pembangunan Infrastruktur untuk Menarik Pengunjung: Pemprov juga memfokuskan sebagian dana retribusi untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata, seperti membangun jalan, tempat wisata, dan fasilitas lainnya yang akan meningkatkan minat pengunjung dan menghasilkan retribusi lebih besar.

10. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Retribusi

- Tindakan Tegas terhadap Penghindaran Retribusi: Pemprov Sumatera Selatan meningkatkan penegakan hukum terhadap individu atau badan usaha yang menghindari atau tidak membayar retribusi dengan benar. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh wajib retribusi memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sanksi Administratif: Memberikan sanksi administratif seperti denda atau pembatasan akses fasilitas bagi mereka yang tidak membayar retribusi, sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan meningkatkan kepatuhan.

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- 1) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
- 2) Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- 3) Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan.
- 4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah melalui :
 - a) Melakukan penyehatan internal perusahaan baik dengan cara perampingan jumlah tenaga kerja dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia perusahaan, serta melakukan efisiensi pengeluaran rutin perusahaan;
 - b) Memperluas cakupan pelayanan perusahaan dengan membuka kantor cabang di Kabupaten/Kota yang potensial;
 - c) Memperluas cakupan bidang usaha dari perusahaan, antara lain BPR Sriwijaya juga berpotensi untuk melakukan pembiayaan disektor pertanian atau agrobisnis dan PDPDE berpotensi untuk memperluas usaha di sektor hulu migas;
 - d) Menyusun Rencana Pengembangan Usaha (Business Plan) perusahaan untuk jangka menengah;
 - e) Memperkuat pengawasan dan pembinaan BUMD oleh Pemerintah Provinsi melalui Biro Perekonomian;
 - f) Menambah stimulan pembiayaan untuk perusahaan yang baru berdiri atau stimulan untuk perusahaan yang memiliki rencana pengembangan usaha yang layak secara ekonomi dan finansial;
 - g) Mendorong BUMD untuk melakukan kerjasama usaha dengan investor baik dalam maupun luar negeri.

d. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah:

- 1) Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis

pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya.

- 2) Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam mengali pendapatan asli daerah.
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah seperti gedung, asrama, aula dan aset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan aset tersebut;
- 4) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
 - a) Membenahi sistem administrasi menjadi sistem online dan tersentral pusat kontrolnya.
 - b) Memaksimalkan pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

1.2. Pendapatan Transfer

Kebijakan Tranfer ke Daerah tahun 2026 secara umum diarahkan untuk:

1. Mendukung pembangunan daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diantaranya melalui:
 - a) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk penanganan stunting;
 - c) penguatan daya saing usaha dan peningkatan investasi di daerah;
 - d) pembangunan rendah karbon dan transisi energi untuk mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
 - e) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;

- f) peningkatan kualitas belanja daerah dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
- 2. Mendorong pengalokasian TKD berdasarkan kinerja pemerintah daerah;
- 3. Meningkatkan sinergi pendanaan TKD dengan sumber pendanaan lainnya;
- 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan melalui penguatan monitoring dan pemanfaatan teknologi informasi oleh daerah.

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sejumlah Rp.6.352.173.149.473,18. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

A.1 Dana Perimbangan terdiri dari:

- 1) Pendapatan dari DBH-Pajak/Bukan Pajak dialokasikan sejumlah Rp.2.201.133.636.520,00 mengalami penurunan bila dibanding APBD tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp.2.244.308.873.000,00 atau berkurang Rp.43.175.236.480,00.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sejumlah Rp.1.791.801.192.580,00. Arah Kebijakan DAU di Tahun 2026 meliputi, sebagai berikut:
 - a) menentukan skema penggunaan DAU berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah;
 - b) mengutamakan pemanfaatan DAU dalam memenuhi SPM sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
 - c) menyempurnakan formula DAU berdasarkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik kewilayahan, seperti letak geografis dan perekonomian daerah; dan
 - d) mengalokasikan DAU untuk mendukung pembangunan

sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp.1.368.183.879.815,00. Berdasarkan RKP maka Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 2026 antara lain:
- a) mendorong pencapaian target PN berbasis MP terpilih, khususnya untuk memperkuat daya saing usaha melalui penguatan destinasi pariwisata prioritas dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan;
 - b) mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mengurangi kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengentasan kawasan kumuh; mengurangi angka stunting melalui pembangunan infrastruktur dasar; mempercepat pembangunan infrastruktur untuk penataan kota/kabupaten serta konektivitas di daerah afirmasi.
 - c) Mengurangi kesenjangan layanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan;
 - d) memfokuskan kegiatan DAK Fisik dalam menuntaskan target prioritas tematik atau bidang yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya;
 - e) mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan agar DAK lebih berdampak signifikan;
 - f) mengukur capaian hasil jangka pendek(immediate outcome) sebagai salah satu instrumen monitoring dan evaluasi DAK Fisik;
 - g) mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi DAK;
 - h) mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan DAK serta kolaborasi kegiatan di APBD

Adapun arah kebijakan DAK Nonfisik Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

- a) mendukung operasionalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- b) memperkuat daya saing usaha dan investasi serta pengurangan kemiskinan;
- c) mendorong penuntasan target PN;
- d) mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan DAK Nonfisik;
- e) meningkatkan kualitas data dalam proses perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik.

Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2026 tidak dialokasikan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengupayakan mempertahankan pendapatan daerah dari sektor penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Melakukan rekonsiliasi antara pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota penghasil sebagai dasar penyaluran dana perimbangan;
- b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan, antara lain melalui:
 - i. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
 - ii. Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI

di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;

- iii. Realisasi dari semua kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman dan patokan terhadap besarnya pembagian Pendapatan Transfer yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan jatah/porsinya masing-masing.
- d. Mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK).

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sejumlah Rp.4.184.811.720,00 lebih besar dibandingkan dengan alokasi APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.743.253.000,00. Upaya optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain dari sektor Pendapatan Hibah dari beberapa perusahaan BUMN maupun perusahaan BUMS yang berada dan beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun upaya-upaya optimalisasi atau intensifikasi Pendapatan Daerah dari sektor pendapatan ini dapat dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan

Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 – 2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Realisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	9.611.291.244.667,17	10.036.955.961.132,70	9.547.779.371.502,99	10.962.497.244.934,50	10.060.185.345.574,40	11.175.807.580.572,80
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.865.463.033.085,17	4.930.954.855.677,74	4.875.950.557.289,99	5.309.757.143.255,46	4.459.311.556.974,42	4.819.449.619.379,62
A.	Pendapatan Pajak Daerah	3.523.785.342.246,24	4.461.152.465.008,25	4.287.466.538.999,46	4.744.634.642.741,87	3.739.026.413.140,42	4.012.860.825.379,62
B.	Pendapatan Retribusi Daerah	9.313.749.306,00	12.185.155.716,25	12.477.067.295,00	8.552.046.241,00	5.213.358.400,00	5.536.107.400,00
C.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	65.714.183.659,07	153.032.882.582,11	223.885.947.856,00	138.824.929.544,35	173.213.785.434,00	148.107.513.275,00
D.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	266.649.757.873,86	304.584.352.371,13	352.121.003.139,53	417.745.524.728,24	541.858.000.000,00	652.945.173.325,00
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	5.712.683.072.712,00	5.090.093.999.526,00	4.667.946.127.537,00	5.648.721.133.679,00	5.597.130.535.600,00	6.352.173.149.473,18
A.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.712.683.072.712,00	5.090.093.999.526,00	4.667.946.127.537,00	5.648.721.133.679,00	5.200.304.650.600,00	5.367.705.341.310,00
A.1	Dana Perimbangan	5.712.683.072.712,00	5.029.223.442.526,00	4.667.946.127.537,00	5.642.095.592.679,00	5.200.304.650.600,00	5.361.118.708.915,00
A.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak		2.442.737.296.896,00	1.854.967.347.879,00	2.645.802.349.840,00	765.459.964.000,00	895.310.741.220,00
A.1.2	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak					1.478.848.909.000,00	1.305.822.895.300,00
A.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)		1.563.041.287.000,00	1.653.766.188.000,00	1.806.673.215.634,00	1.750.244.931.000,00	1.791.801.192.580,00
A.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)		1.023.444.858.630,00	1.159.212.591.658,00	1.189.620.027.205,00	1.205.750.846.600,00	1.368.183.879.815,00
A.2	Dana Insentif Daerah		60.870.557.000,00	-	6.625.541.000,00	-	6.586.632.395,00
B.	Kurang Salur DBH SDH dan Pajak					396.825.885.000,00	984.467.808.163,18
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	33.145.138.870,00	15.907.105.929,00	3.882.686.676,00	4.018.968.000,00	3.743.253.000,00	4.184.811.720,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	28.268.138.866,00	15.907.105.929,00	3.882.686.676,00	4.018.968.000,00	3.743.253.000,00	4.184.811.720,00
1.3.2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		-	-			
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	4.877.000.004,00					

Sumber: TAPD Provinsi Sumatera Selatan, 2025 (data diolah)

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dan jenis belanja.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar

pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka membiayai kegiatan operasional pemerintahan. Belanja operasi pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.6.144.844.195.355,00 mengalami kenaikan sebesar 10,63% dibanding tahun 2025 yang sebesar 5.554.243.851.496,00 belanja operasi tahun 2026 tersebar dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai sebesar Rp.3.333.057.936.012,00,- belanja barang dan jasa sebesar Rp.2.363.919.482.520,00 serta belanja hibah sebesar Rp.444.516.776.823,00.

Belanja Modal

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan pengeluaran dalam bentuk belanja modal yang menghasilkan aset dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal tersebut tersebar untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya. Alokasi anggaran belanja modal selama periode 2021 sampai dengan tahun 2024 cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2026 Belanja Modal diproyeksikan menjadi Rp.1.271.633.562.637,00.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Alokasi belanja tidak terduga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cenderung fluktuatif, yaitu mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2024. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sejumlah Rp.270.421.980.137,00 yang diperuntukkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah, yang digunakan untuk bantuan sosial penanganan dampak inflasi, bantuan sosial korban bencana alam, serta pengembalian kesalahan/kelebihan setor kepada pihak ketiga.

Belanja Transfer

Belanja transfer/bantuan keuangan merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan. Belanja transfer Provinsi Sumatera Selatan digunakan untuk belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa, serta belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota, dari provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Proyeksi Belanja Transfer Tahun 2026 menjadi Rp.3.597.402.493.651,00 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2025, yaitu sebesar Rp.3.361.338.855.299,00 bertambah sebesar Rp. 236.063.638.352,00.

Tahun 2026 proyeksi belanja sejumlah Rp.11.284.302.231.780,00. Dimana kebutuhan belanja ini diarahkan untuk pembiayaan dan pemenuhan pembangunan provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 sesuai dengan tema pembangunan tahun 2026 yaitu “Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang berkelanjutan”.

Arah kebijakan Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Meningkatkan alokasi fungsi pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total belanja daerah sesuai peraturan perundangan.
- d. Mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;
- e. Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan atau desa.
- f. Mengalokasikan belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
- 1) hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30%;
 - 2) hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%;
 - 3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%;
 - 4) hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50%; dan
 - 5) khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan pajak air permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80%.
- h. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bertanggung jawab penuh secara fisik dan keuangan atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangannya.
- i. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus diusulkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Desa kepada Gubernur untuk diverifikasi oleh perangkat daerah provinsi sesuai kriteria yaitu:
- 1) Sesuai kemampuan keuangan daerah
 - 2) Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penurunan angka kemiskinan
 - 3) Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Dasar/ Publik kabupaten/kota

- 4) Mendukung peningkatan/pembangunan yang menjadi Prioritas Daerah kabupaten/kota
 - 5) Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur di kabupaten/kota antara lain: Jalan, Jembatan, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan kebutuhan daerah lainnya
 - 6) Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur kabupaten/kota yang mengalami kendala dalam penyelesaiannya
 - 7) Keterbatasan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian target RPJMD, dan/atau
 - 8) Aspirasi masyarakat hasil kunjungan kerja Gubernur di kabupaten/kota.
- j. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- k. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
- 1) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - 2) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- l. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Sumatera Selatan.
- m. Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
- n. Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan;
- o. Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Pengalokasian belanja untuk membiayai 4 prioritas daerah RKPD 2025 yang dijabarkan ke dalam program prioritas daerah.

Uraian realisasi anggaran tahun 2021 - 2024 serta dan belanja daerah tahun 2025 dan 2026 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2021 – 2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Realisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)
2	BELANJA DAERAH	10.589.755.500.535,40	9.663.575.726.750,69	9.698.252.360.233,98	10.899.989.950.243,70	10.349.496.422.262,00	11.284.302.231.780,00
1.	BELANJA OPERASI	5.365.031.503.749,49	4.499.276.793.174,07	4.975.235.925.372,77	5.311.081.939.178,72	5.554.243.851.496,00	6.144.844.195.355,00
A.	Belanja Pegawai	1.923.290.549.742,00	2.092.571.068.579,00	2.190.116.137.939,00	2.528.391.380.267,00	2.731.880.497.202,00	3.333.057.936.012,00
B.	Belanja Barang dan Jasa	1.811.885.209.417,49	2.042.275.862.382,07	2.405.532.045.847,87	2.259.380.999.928,72	2.410.319.440.644,00	2.363.919.482.520,00
C.	Belanja Bunga	382.096.916,00	13.227.699.524,00	8.817.133.280,00	2.786.684.555,00		
D.	Belanja Subsidi			-	510.541.824.428,00	5.000.000.000,00	3.350.000.000,00
E.	Belanja Hibah	1.629.473.647.674,00	351.202.162.689,00	370.770.608.305,90	9.981.050.000,00	407.043.913.650,00	444.516.776.823,00
F.	Belanja Bantuan Sosial	-		-			
	Belanja Biaya Provinsi						
	Pengelolaan Pinjaman						
2.	BELANJA MODAL	1.836.834.114.021,94	1.536.370.414.095,28	1.206.711.898.808,99	1.292.420.009.833,96	1.383.913.715.467,00	1.271.633.562.637,00
A.	Belanja Tanah	70.853.405.527,00	8.708.743.955,00	1.743.753.503,00	701.091.453,00	4.419.000.000,00	2.910.000.000,00
B.	Belanja Peralatan dan Mesin	288.834.883.969,24	342.811.302.542,00	345.465.230.996,00	282.043.992.981,25	315.057.021.819,00	355.212.329.396,00
C.	Belanja Bangunan dan Gedung	289.050.835.757,28	361.568.165.909,82	266.624.790.389,12	259.121.500.988,71	428.370.418.326,00	322.077.058.402,00
D.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.107.398.086.860,42	747.812.255.898,46	541.178.479.003,87	699.082.171.086,00	555.925.433.822,00	545.483.550.245,00
E.	Belanja Aset Tetap Lainnya	80.696.901.908,00	75.469.945.790,00	50.703.578.417,00	48.066.059.521,00	73.450.541.500,00	39.272.483.100,00
F.	Belanja Modal Aset Lainnya			996.066.500,00	3.405.193.804,00	6.691.300.000,00	6.678.141.494,00
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.055.098.162,00	19.553.804.801,00	16.000.000.000,00	82.301.295,00	50.000.000.000,00	270.421.980.137,00
4.	BELANJA TRANSFER	3.373.834.784.602,00	3.608.374.714.680,34	3.500.304.536.052,22	4.296.405.699.936,00	3.361.338.855.299,00	3.597.402.493.651,00
A.	Belanja Bagi Hasil Kpd ProwKabKota	1.849.505.412.624,00	1.914.984.234.448,00	2.179.118.758.571,00	2.399.428.901.098,00	1.627.156.556.949,00	1.982.610.588.683,00
B.	Belanja Bantuan Keuangan kepada ProwKabKota dan Pemerintah Desa	1.524.329.371.978,00	1.693.390.480.234,34	1.321.185.777.481,22	1.896.976.798.838,00	1.734.182.298.350,00	1.614.791.904.968,00

Sumber: TAPD (data diolah), 2025

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

daerah dalam 2 (dua) tahun, proyeksi/target tahun berkenaan serta 2 (dua) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dimana Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2026 tidak dianggarkan, dan dituangkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Realisasi	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)
3	PEMBIAYAAN	701.159.551.422,81	354.251.259.039,14	436.744.445.834,19	257.986.372.616,46	289.311.076.688,00	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	615.159.551.422,81	151.894.033.565,14	322.922.821.755,19	154.808.667.409,91	289.311.076.688,00	108.494.651.207,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	86.000.000.000,00	202.357.225.474,00	113.821.624.079,00	103.177.705.206,55	-	

Sumber: TAPD (data diolah), 2025

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Non APBD Provinsi Sumatera Selatan

Pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan didukung juga dari program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten/Kota, APBN, CSR, dan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha, selain dari APBD Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri.

3.3.1. APBD Kabupaten/Kota

Total APBD 17 Kabupaten/Kota sangat signifikan bila dibandingkan dengan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Optimalisasi pemanfaatan APBD 17 Kabupaten/Kota amatlah penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di 17 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Arah kebijakan pembangunan daerah terkait optimalisasi APBD di 17 Kabupaten/Kota adalah sinkronisasi dan sinergi RKPD provinsi dengan RKPD 17 kabupaten/kota. Dengan demikian, target-target makro pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dapat dikawal pencapaiannya melalui tahapan evaluasi RKPD yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Sebaliknya, pencapaian target-target RPJMD Kabupaten/Kota juga dapat didukung dana APBD Provinsi karena RKPD Kabupaten/Kota

telah sinkron dengan RKPD Provinsi. Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom yang berhak dan mempunyai wewenang untuk menyusun RKPD masing-masing sesuai dengan RPJMD masing-masing. Namun demikian, tersedia tahapan untuk sinkronisasi RKPD Kabupaten/Kota dengan RKPD Provinsi melalui mekanisme yang telah diatur Permendagri nomor 86 tahun 2017 yaitu tahapan evaluasi RKPD Kabupaten/Kota oleh Provinsi.

Realisasi APBD 17 Kabupaten/Kota pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab/Kota se-Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kabupaten / Kota	2023	
	Pendapatan	Belanja
Ogan Komering Ulu	Rp 1.443.040.462,01	Rp 1.233.792.104,52
Ogan Koomering Ilir	Rp 2.483.624.534,02	Rp 2.134.483.098,50
Muara Enim	Rp 2.852.960.415,80	Rp 2.535.788.020,96
Lahat	Rp 2.440.902.177,87	Rp 1.994.495.505,02
Musi Rawas	Rp 1.693.391.505,69	Rp 1.698.725.332,52
Musi Banyuasin	Rp 3.594.442.133,05	Rp 3.285.531.945,66
Banyuasin	Rp 2.220.194.953,50	Rp 1.950.409.320,57
OKU Selatan	Rp 1.198.013.341,56	Rp 1.239.752.929,38
OKU Timur	Rp 1.912.099.117,74	Rp 1.883.635.002,96
Ogan Ilir	Rp 1.273.705.291,93	Rp 1.108.497.402,46
Empat Lawang	Rp 1.144.459.693,23	Rp 908.458.408,16
Penukal Abab Lematang Ilir	Rp 1.164.073.152,65	Rp 1.288.612.743,51
Musi Rawas Utara	Rp 1.043.184.864,41	Rp 1.038.440.785,82
Palembang	Rp 3.726.045.316,97	Rp 3.471.088.556,81
Prabumulih	Rp 878.307.964,38	Rp 891.269.371,00
Pagar Alam	Rp 740.022.718,49	Rp 720.087.414,55
Lubuk Linggau	Rp 871.238.278,38	Rp 876.387.520,29

Sumber: Sumsel Dalam Angka 2023

APBD 17 Kabupaten/Kota tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
APBD 17 Kabupaten/Kota Tahun 2024-2025
di Provinsi Sumatera Selatan

NO	Kab/Kota	APBD-P TA 2024	APBD TA 2025
1	Ogan Komering Ilir	3.478.970.781.967,00	2.593.929.723.727,00
2	Ogan Ilir	1.924.326.969.130,00	1.637.292.019.436,00
3	Banyuasin	2.970.945.623.746,15	2.990.879.772.913,75
4	Musi Banyuasin	4.762.205.290.507,58	3.436.353.775.772,00
5	Palembang	4.986.748.529.728,00	4.820.360.447.056,00
6	Lubuklinggau	1.324.873.204.282,00	1.010.013.052.730,00
7	Pali	1.636.460.423.181,00	1.550.919.412.362,00
8	Musi Rawas	2.170.675.474.247,00	1.907.408.361.312,00
9	Musi Rawas Utara	1.712.026.130.851,83	1.375.371.069.749,00
10	Empat Lawang		1.287.210.971.566,00
11	Muara Enim	4.357.997.788.128,21	3.622.786.525.848,00
12	OKU Selatan		1.411.712.775.863,00
13	Pagar Alam	1.127.429.497.872,00	906.573.559.595,00
14	Prabumulih	1.364.585.516.540,00	1.172.636.419.816,00
15	OKU Timur	2.381.500.719.146,00	2.274.236.117.282,00
16	Lahat	4.060.292.328.863,00	3.539.334.575.650,00
17	Ogan Komering Ulu		1.615.314.605.452,00

Sumber: BPKAD Prov. Sumsel,2025

3.3.2. APBN

3.3.2.1. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Terdapat beberapa jenis APBN yang dialokasikan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu APBN Dekonsentrasi yang pengelolaannya diserahkan kepada Perangkat Daerah Provinsi, APBN Tugas Pembantuan dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun oleh Perangkat Daerah Provinsi. Besaran APBN yang dialokasikan untuk Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi.

Untuk memantau realisasi APBN dan permasalahan yang mungkin timbul dan dapat menghambat realisasi, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menciptakan inovasi aplikasi online e-monev yang diupdate tiap bulan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.3.2.2. APBN pada Proyek Infrastruktur di K/L

Proyek infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 dengan menggunakan dana APBN diantaranya yaitu:

Tabel 3.24
Rincian Kegiatan Infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

No	Rincian Output (RO)	Keterangan	Lokasi (Kab/Kota)	Volume	Satuan	Pendanaan	Indikasi K/L	OPD
1	009 - Pembangunan SPAM	Pembangunan SPAM Air Sugihan, Kab. OKI	Kab. Ogan Komering Ilir	60	Literdetik	89.884.800.000	145 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Dinas Perkim
2	019 - Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR	BSPS Peningkatan Kualitas (PK) sebanyak 14,704 Unit	Kab. Muba, OKU, Muara Enim, Lahat, Mura, Banyuasin, OKUS, OI, PALI, Kota Prabumulih, Pagar Alam, Lubuk Linggau	14.704	Unit	294.080.000.000	146 - KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perkim
3	003 - Pendayagunaan Dokter Spesialis	Pembinaan Dokter Internship	Provinsi Sumatera Selatan	7	Orang	1.680.000.000	024 - KEMENTERIAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
4	491 - SMA yang Direvitalisasi	1. SMA Negeri 11 Palembang (10 RKB) (Rp. 5.000.000.000) 2. SMA 1 Banyuasin 3 (4 Paket toilet) (Rp. 550.000.000) 3. SMA 1 Kikim tengah (1 Lab. Biologi) (Rp. 489.000.000)	Kab. Lahat, Kab. Banyuasin dan Kota Palembang	3	Lembaga	6.039.000.000	138 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Dinas Pendidikan

Sumber: Hasil Pembahasan Desk Tematik Musrenbangnas, 2025

3.3.3. Pendanaan Alternatif Lainnya

Menurut UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan. Sinergi pendanaan yaitu dengan melakukan pengembangan instrument pembiayaan pembangunan daerah, yaitu untuk membiayai proyek-proyek infratsruktur dengan mekanisme KPBU/Sawasta, maupun pembiayaan utang daerah dengan obligasi/ sukuk daerah. KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data dari website [http.kpbu.kemenkeu.go.id](http://kpbu.kemenkeu.go.id) proyek pembangunan yang ada di Sumatera Selatan yang didanai dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.25
Rekapitulasi Pendanaan KPBU di Provinsi Sumatera Selatan

No	Sektor	Nama	Kabupaten	Status
1	Sumber Daya Air & Irigasi	Optimalisasi Saluran Irigasi Komering	Ogan Komering Ulu Timur	Penyiapan
2	Minyak dan gas bumi dan energi terbarukan termasuk bio energi	Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dengan Skema KPBU Kota Palembang	Palembang	Penyiapan
3	Jalan	Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Penyiapan

Sumber: [http.kpbu.kemenkeu.go.id](http://kpbu.kemenkeu.go.id)

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menggambarkan proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah, hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selain itu dinarasikan pula bagaimana implementasi dan keterkaitan dengan Prioritas Nasional dalam RKP yang diterjemahkan dalam RKPD dalam rangka merumuskan sasaran dan prioritas serta target yang akan dicapai.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang secara bersamaan dalam proses penyusunan. Sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017: "*Rancangan awal RKPD provinsi disusun berpedoman pada RPJMD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD*", maka penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Rancangan RKP 2026, Program Strategis Nasional Tahun 2026, serta pedoman penyusunan RKPD 2026.

Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2026 juga tetap mempertimbangkan dokumen *Sustainable Development Goal's* (SDG's), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan dokumen perencanaan lainnya. Dengan demikian secara teknokratis RKPD ini sudah dapat mengakomodir apa yang diharapkan dari dokumen perencanaan tersebut.

Sebagaimana proses penyusunan perencanaan tahun-tahun sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 juga melihat capaian pembangunan tahun 2024 yang lalu sebagai *baseline*/dasar perencanaan ke depan yang dalam

pelaksanaannya masih ada beberapa capaian yang belum tercapai secara optimal, serta memperhatikan isu strategis yang akan dihadapi di tahun 2026.

Isu-isu yang bersifat lokal, seperti penurunan kemiskinan, optimalisasi kualitas SDM, penguatan ekonomi kerakyatan dan sektor unggulan, peningkatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan, pengelolaan lingkungan dan penanganan bencana, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta kelanjutan proyek strategis nasional dan integrasi pendanaan pembangunan menjadi perhatian khusus di Sumatera Selatan. Hal ini karena selain isu tersebut menjadi atensi publik, bukan hanya di Sumatera Selatan dan nasional, juga karena masih terbatasnya anggaran pembangunan yang tersedia.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, merupakan implementasi dari tahun kedua RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sekaligus sebagai penjabaran dari periode pertama RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD untuk periode ini sangat penting karena merupakan langkah lanjutan dalam mencapai target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD, dalam hal ini Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang sedang disusun secara simultan. Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2026, RKPD Provinsi Sumatera Selatan mengacu tujuan dan sasaran dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Adapun Tujuan dan Sasaran serta target yang akan dicapai pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Prioritas Daerah/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Prioritas Daerah 1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas				
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		1. Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,5475
		2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74.95
		3. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	69,41 - 69,42
	1.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM	1. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,27 - 9,29
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,89-12,90
		3. Persentase kabupaten/ kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi Membaca - Numerasi	% %	8,82 – 13,23 1,47 – 7,35
		4. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi Membaca - Numerasi	% %	93,34 54,11
		5. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan	%	82,59
		6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	73,50
	1.2 Meningkatkan Derajat Kesehatan	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,71
		2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	13,80
	1.3 Meningkatkan Pembangunan Sektor Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	56,89
	1.4 Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	1. Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,453
		2. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,99-94,10
		3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,00

Prioritas Daerah/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Prioritas Daerah 2: Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat				
2. Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah		1. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8 - 6,3
		2. PDRB per Kapita	Rp (Juta)	94,00
		3. Kontribusi PDRB Provinsi	%	3,09
		4. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	%	1,42
		5. Indeks Entropy Theil	Indeks	1,28
		6. Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,50
	2.1 Meningkatnya Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,82
		2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	3,330
		3. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	%	2,10
	2.2 Meningkatnya Investasi dan Perdagangan Daerah	1. Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	%	31,16
		2. Persentase Pertumbuhan Investasi	Nilai	7,50
		3. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	13,99
		4. Ekspor Barang dan Jasa (PDRB %)	%	21,58
		5. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	7,00
		6. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,58
	2.3 Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1. Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5
		2. Inklusi Keuangan	%	94,93
		3. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,75
Prioritas Daerah 3: Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru				
3. Terwujudnya keterkaitan ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air		1. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	62,63
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	21,99
	3.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi, dan Air	1. Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,79
		2. Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	23,70
		3. Rasio Elektrifikasi	%	100
		4. Persentase Desa Berlistrik	%	100
		5. Kapasitas air baku	m3/detik	2,46
		6. Indeks Ketahanan Air Provinsi	Indeks	3,65

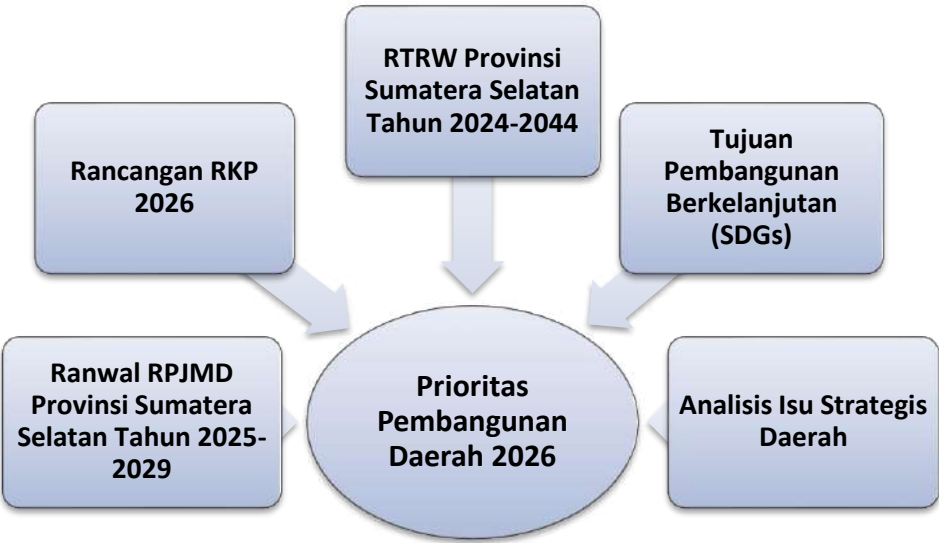
Prioritas Daerah/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	3.2 Meningkatnya Pengembangan Hilirisasi Berbasis Sektor Unggulan	1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	19,53
		2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	5,16
		3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	%	2,39
4. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan		1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,44
		2. Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	65,48-68,68
		3. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,469
	4.1 Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1. Persentas Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	19,41
		2. Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	34,50
Prioritas Daerah 4: Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan				
5. Meningkatkan Kualitas Konektivitas Daerah		Rasio Konektivitas	%	0,660
	5.1 Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang Berkualitas	1. Waktu Tempuh Jalan Provinsi	jam/100 km	2,50
		2. V/C Rasio Jalan	Rasio	0,388
		3. Rata-Rata <i>Load Factor</i> Penumpang Angkutan Umum	%	71,50
6. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Masyarakat		Persentase Bangunan Gedung, Hunian dan Permukiman dengan akses layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	43,14
	6.1 Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi	1. Akses Air Minum Layak	%	90,35
		2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	82,43
		3. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	38,00
	6.2 Meningkatnya Hunian dan Permukiman yang Layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	68,60
7. Meningkatkan Pengelolaan Bencana		Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks	129,78
	7.1 Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,40

Prioritas Daerah/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Prioritas Daerah 5: Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan				
8. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1. Tingkat Kemiskinan	%	9,07 - 10,07
		2. Rasio Gini	Indeks	0,312 - 0,316
	8.1 Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Berusaha	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,75-3,90
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,84
		3. Rasio Kewirausahaan	%	2,6
		4. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	%	0,42
	8.2 Meningkatkan Upaya Perlindungan Sosial	1. Persentase Kemiskinan Ekstrem	%	0,20
		2. Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,32
Prioritas Daerah 6: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas				
9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (76-77)
	9.1 Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi	1. Nilai SAKIP	Indeks	BB (78,75)
		2. Opini BPK	Indeks	WTP
		3. Manajemen Risiko Indeks	Indeks	2,982
		4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	2,02 (Sedang)
		5. Indeks Integritas Daerah	Indeks	75,13
	9.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A (4,65)
		2. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6,08
Prioritas Daerah 7: Kehidupan Beragama, Seni dan Budaya Dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi Pada Kearifan Lokal				
10. Terwujudnya Stabilitas Sosial		Indeks Harmoni Indonesia (Sumatera Selatan)	Indeks	6,60
	10.1 Memperkuatnya Ketentraman di Masyarakat	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	78,15
		2. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	71,69
	10.2 Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	59,81

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mencapai target pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026, perlu dilakukan perumusan prioritas pembangunan daerah yang bertujuan untuk memfokuskan rencana pembangunan di Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan dengan melakukan telaah Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, telaah Rancangan RKP Tahun 2026, telaah RTRW Provinsi Sumatera Selatan, telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan Analisis Isu Strategis Daerah sesuai gambar berikut.



Gambar 4.1.
Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Untuk menentukan program, kegiatan, sasaran, indikator dan target maka dalam penyusunan Prioritas Daerah RKPD tahun 2026, Pemerintah Provinsi melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:



Gambar 4.2.
Rangkaian Kegiatan Penyusunan RKPD Tahun 2026

Dengan mempertimbangkan arahan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, tema pembangunan pada RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, Rancangan RKP Tahun 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Isu Strategis, maka ditetapkanlah tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 yaitu **“Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang berkelanjutan melalui Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”** dengan 7 (tujuh) Prioritas Daerah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, yaitu :

1. Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas;
2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan;
6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas;
7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal.

Adapun keterkaitan dan konsistensi antara isu strategis dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.

Isu Strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Isu Strategis	Prioritas Daerah RKPD 2026
Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Belum Optimal	PD5: Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang dengan jumlah penduduk sebanyak 8.837 (ribu) jiwa pada tahun 2024. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi hingga akhir abad ke-14 dengan luas wilayah 9,1 juta hektar atau 4,7 persen dari total luas daratan Indonesia.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kamajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkisinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera

Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan, sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah.

Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, yaitu:

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.

Misi 2 : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Misi 3 : Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 7 : Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Selain Visi dan Misi di atas terdapat 12 (dua belas) program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur yang berkaitan dengan setiap Misi yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.3.
 Keterkaitan Misi dan Program Strategis HDCU RPJMD Provinsi
 Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

No	Misi	12 Program Strategis HDCU
1	Misi 1: Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.	PS 2: Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP) - Bebas Iuran BPJS untuk Kelas 3 dengan Berkat Plus - Penyediaan Rumah Singgah bagi Keluarga Pasien - Meningkatkan Layanan Primer Kesehatan dengan Memperluas Ketersediaan Dokter Keluarga - Insentif Nakes Terutama di Daerah Terpencil - Pengembangan Investasi dalam Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional - Meningkatkan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan di Daerah dengan Merevitalisasi Puskesmas PS 4: Pendidikan Yang Berkeadilan - Melanjutkan Program Sekolah yang Berkualitas dan Berkeadilan - Meningkatkan Sumber Daya Pendidikan dan Mendorong Kurikulum Bermuatan Lokal - Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru-Penyediaan Beasiswa Kuliah Bagi Siswa Berprestasi - Melanjutkan Program Literasi Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan PS 11: Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak - Mendukung Program Makan Siang Gratis. - Meningkatkan Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak - Mendukung Peningkatan Prestasi Akademik-Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga - Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal-Penguatan Ekosistem untuk Kebijakan Inklusif Guna Peningkatan Pemenuhan Hak dan Penyandang Disabilitas
2	Misi 2: Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan	PS 1: Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat PS 9: Sumsel Wonderfull 2030 - Meningkatkan Wisata Olahraga (Sport Tourism) dengan menjadi tuan rumah event internasional, event nasional, event iconic Sumsel antara lain seperti Sriwijaya Ranau Grand Fondo, Sriwijaya Dempo Run, Festival Bidar Musi terbesar dan event-event besar lainnya. - Meningkatkan Wisata Kuliner (Food Tourism) dengan cara mempromosikan dan menggalakan kuliner-kuliner lokal yang ada di Sumatera Selatan. - Meningkatkan Wisata Budaya (Culture Tourism) dengan menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Sumatera Selatan. - Membangun Wisata Kesehatan (<i>Health Tourism</i>) PS 12: Revitalisasi Pasar Tradisional

No	Misi	12 Program Strategis HDCU
	pendapatan masyarakat.	- Melanjutkan Revitalisasi Pasar Tradisional untuk Menjadi Sentra Pertumbuhan Ekonomi. - Meningkatkan Kapasitas Pasar-Pasar Rakyat untuk Memperkuat Ekonomi Kerakyatan - Membangun Pusat-Pusat Ekonomi Baru yang Dapat Menciptakan Lapangan Kerja dan Daya Saing Daerah untuk menghapus kemiskinan ekstrem
3	Misi 3: Mewujudkan keterkaitan (<i>nexus</i>) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.	PS 3: Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) - Mempertahankan Swasembada Beras dan Meningkatkan Produksi Pangan Lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional) - Melanjutkan Program Satu Desa Satu Penyuluh Pertanian - Ketersediaan Pupuk yang Mudah Terjangkau - Mendukung Program Food Estate - Melanjutkan Program 10 Juta Stek (Sambung Pucuk) Kopi - Meningkatkan Produksi Tanaman Lainnya
4	Misi 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/ kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.	PS 5: Infrastruktur Tuntas Merata - Mempertahankan Sumatera Selatan pada Kategori Jalan Rusak Terendah di Indonesia - Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dalam Wilayah dalam Keadaan Mantap - Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten dan Kota melalui BANGUBSUS (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus) PS 6: Sumsel Interkoneksi - Melanjutkan Konektivitas Antar Daerah - Penyediaan Internet Desa, Terutama bagi Daerah yang Masih Blank Spot - Mewujudkan 100% Desa Teraliri Listrik - Menggalakan Program Listrik Masuk Sawah - Bantuan Operasional Desa/Kelurahan Sampai Dengan 150 Juta Tahunan
5	Misi 5: Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.	PS 3: Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) - Mempertahankan Swasembada Beras dan Meningkatkan Produksi Pangan Lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional) - Melanjutkan Program Satu Desa Satu Penyuluh Pertanian - Ketersediaan Pupuk yang Mudah Terjangkau - Mendukung Program Food Estate - Melanjutkan Program 10 Juta Stek (Sambung Pucuk) Kopi - Meningkatkan Produksi Tanaman Lainnya

No	Misi	12 Program Strategis HDCU
		PS 7: 100.000 Sultan Muda Sumsel - Bantuan Operasional Desa/Kelurahan Sampai Dengan 150 Juta Per tahun - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terampil dengan Memperbanyak Pelatihan Skill - Meningkatkan Promosi Usaha Kecil dan Menengah Para Wirausaha Muda Sumatera Selatan. PS 12: Revitalisasi Pasar Tradisional - Melanjutkan Revitalisasi Pasar Tradisional untuk Menjadi Sentra Pertumbuhan Ekonomi. - Meningkatkan Kapasitas Pasar-Pasar Rakyat untuk Memperkuat Ekonomi Kerakyatan - Membangun Pusat-Pusat Ekonomi Baru yang Dapat Menciptakan Lapangan Kerja dan Daya Saing Daerah untuk menghapus kemiskinan ekstrem
6	Misi 6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.	PS 10: Sumsel Berintegritas dan Melayani - Melanjutkan dan Meningkatkan Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih (Good and Clean Government), Responsive dan Melayani. - Mengembangkan Meritokrasi, dengan memberikan kesempatan seseorang memimpin berdasarkan kemampuan dan prestasi. - Menerapkan Sistem Berbasis Elektronik, Keamanan Cyber dan Transformasi Digital dalam Pengembangan SDM. - Membangun Pendidikan Anti Korupsi, Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi.
7	Misi 7: Mewujudkan kehidupan beragama, seni, dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.	PS 8: Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya - Melanjutkan Program 1 Desa 1 Rumah Tahfiz - Mempermudah Pendirian Rumah-Rumah Ibadah di Daerah Sumatera Selatan - Melanjutkan Program Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) dan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kelurahan (P2UKK) - Meningkatkan Upaya Program Moderasi Umat Beragama - Mewujudkan Pembangunan Masjid Raya Sumatera Selatan - Meningkatkan pendidikan agama, dan mengembangkan toleransi beragama. - Melaksanakan Program Rumah Layak Huni - Mendirikan ISBI Sumsel, membangun Taman Seni Budaya, Melestarikan Aksara Ulu, dan Menguatkan nilai-nilai kebangsaan serta kearifan lokal

Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi di atas dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang disertai indikator dan

target setiap tahunnya seperti yang telah disajikan pada Tabel 4.1 pada Subbab 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah di atas.

Arah Kebijakan Pembangunan

Setiap misi dirumuskan menjadi arah kebijakan pembangunan untuk setiap tahunnya. Adapun sinkronisasi antara arah kebijakan pembangunan RPJMD 2025-2029 untuk tahun 2026 dan tema beserta Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.4.

Sinkronisasi Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2026 dan Tema serta Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2026

Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 untuk Tahun 2025	Prioritas RKPD Tahun 2026
Tema untuk tahun 2026: “Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang berkelanjutan”	Tema RKPD 2026: “Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang berkelanjutan melalui Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”
• Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Kuratif, Preventif dan Promotif • Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. • Meningkatkan akses, partisipasi, dan motivasi masyarakat atau peserta didik dalam menempuh pendidikan • Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kurikulum dan sarana-prasarana pendidikan • Meningkatkan layanan perpustakaan sesuai standar perpustakaan nasional • Meningkatkan kualitas kompetensi pemuda	PD1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas
• Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Petani • Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Peningkatan Penerimaan dan Pendapatan Daerah dari Sektor ESDM • Peningkatan Kemudahan Berinvestasi • Meningkatkan Promosi Penanaman Modal • Peningkatan Ekspor ke Luar Negeri • Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah • Upaya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis • Peningkatan Efektivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) • Optimalisasi upaya Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	PD2: Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 untuk Tahun 2025	Prioritas RKPD Tahun 2026
• Peningkatan Ketersediaan Pangan • Peningkatan Keterjangkauan Pangan • Peningkatan Pemanfaatan Pangan • Peningkatan Ketersediaan Energi • Peningkatan Aksesibilitas Energi • Peningkatan Keterjangkauan Energi • Peningkatan Konservasi Sumberdaya Air • Peningkatan Pendayagunaan Air • Peningkatan Kemitraan dalam Hilirisasi • Peningkatan Fasilitas Pendukung Industri Hilir • Peningkatan Daya Saing Produk Hilir • Peningkatan Akses Pasar Produk Hilir • Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan kedaulatan air di Sumatera Selatan • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menurunkan emisi Gas Rumah kaca untuk mendukung pembanguna yang berkelanjutan	PD3: Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
• Meningkatkan Infrastruktur Konektivitas yang terintegrasi antar kawasan untuk mendukung pergerakan orang dan barang dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan • Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, merata, dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat. • Meningkatkan kualitas tata kelola bencana dan ketahanan Daerah	PD4: Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
• Memperluas Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja • Memperkuat Perlindungan Sosial yang Terintegrasi dan Berkesinambungan • Meningkatkan Intervensi Terpadu untuk Penanganan Kemiskinan dan Stunting	PD5: Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan
• Penerapan Sistem Pemerintahan Digital Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik • Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik Digital • Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas data dan informasi	PD6: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
• Penguatan Identitas Budaya dan Moderasi Keagamaan • Revitalisasi Seni dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal	PD7: Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

4.2.1.2. Telaah Rancangan RKP Tahun 2026

Tema Pembangunan

Tema pembangunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dirumuskan berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, Direktif Presiden, evaluasi pembangunan tahun 2024, kerangka ekonomi makro, serta kondisi dan isu strategis baik domestik maupun global. Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 dan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan beserta *highlight* sasaran yang telah ditentukan. Terdapat 5 (lima) Direktif Presiden yang menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dalam menyusun tema pembangunan tahun 2026, yaitu 1) penguatan ekonomi lokal melalui koperasi desa/kelurahan merah putih; 2) penerapan digitalisasi pendidikan; 3) pengentasan kemiskinan dengan perlindungan sosial melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif; 4) pengelolaan sampah terpadu; 5) dan sekolah rakyat dengan memberikan fasilitas pendidikan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Untuk itu, tema Rancangan RKP Tahun 2026 yang ditetapkan yaitu **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**.

Sasaran Pembangunan

Terdapat 3 (tiga) sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam Rancangan RKP Tahun 2026 yaitu untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, terdapat 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan beserta *highlight* sasaran pada Rancangan RKP Tahun 2026, yaitu:

1. Gender dan Inklusi Sosial
 - a. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup, dan Peran Perempuan di Berbagai Bidang, serta Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan.
 - b. Terwujudnya inklusivitas Lansia dan Penyandang Disabilitas dalam Kehidupan Bermasyarakat.
2. Transformasi Digital
 - a. Meningkatnya Pembangunan TIK di Tingkat Nasional.
 - b. Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Digital yang Transparan, Inklusif dan Efisien.

3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
Menguatnya Pelaksanaan SDGs melalui Integrasi Perencanaan, Pelaporan, serta Rekognisi.
4. Pembangunan Rendah Karbon
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
5. Pembangunan Berketahanan Iklim
Menurunnya Potensi Kerugian Ekonomi akibat Perubahan Iklim pada Empat Sektor Pertanian Prioritas (Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian, dan Kesehatan).

Adapun sasaran dan indikator pembangunan nasional pada Rancangan RKP 2026 dan pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5.
Sasaran Pembangunan RKP dan RKPD Tahun 2026

Indikator Pembangunan	Target Nasional pada RKP 2026	Target Sumatera Selatan pada RKP 2026	Target Sumatera Selatan pada RKPD 2026
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 6,3	5,8 – 6,3	5,8 – 6,3
PDRB per Kapita (Rp Juta)	US\$ 5.870 (GNI per Capita)	85,1 – 87,5	94,00
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	-	3,0	3,09
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	9,07 – 10,07	9,07 – 10,07
Rasio Gini	0,377 – 0,380	0,309 – 0,312	0,312 – 0,316
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,57	0,55	0,5475
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	37,14	65,48-68,68	65,48-68,68
IKLH	76,67	68,44	68,44
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96	3,29 – 3,83	3,75 – 3,90

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2026, diolah

Target sasaran makro pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 secara umum telah selaras dan masuk dalam range target sasaran makro untuk Provinsi Sumatera Selatan pada RKP Tahun 2026. Bahkan, untuk target PDRB per Kapita dan Kontribusi PDRB provinsi yang ditetapkan di RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 lebih optimis dari target yang ditetapkan pusat.

Prioritas Nasional

Dalam rangka menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) pada Rancangan RKP Tahun 2026 seperti pada gambar berikut.

Gambar 4.3.
Prioritas Nasional RKP Tahun 2026



Sumber : Rancangan RKP Tahun 2026

Keterkaitan Prioritas Nasional Rancangan RKP Tahun 2026 dengan Prioritas Daerah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6.
Keterkaitan Prioritas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2026

PRIORITAS NASIONAL RKP 2026	PRIORITAS DAERAH RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2026
PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

PRIORITAS NASIONAL RKP 2026	PRIORITAS DAERAH RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2026
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas PD7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal
PN3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan
PN4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PD1. Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
PN6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta

PRIORITAS NASIONAL RKP 2026	PRIORITAS DAERAH RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2026
Pemberantasan Kemiskinan	Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal

Sumber: Rancangan RKP 2026, diolah

Sebagai suatu kebijakan yang sistematis dan terarah, masing-masing PN memiliki sasaran pembangunan. Adapun sasaran pembangunan dari setiap PN yang disandingkan dengan sasaran pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang merujuk pada Sasaran Pembangunan Daerah pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.7.
Sandingan Indikator Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional RKP Tahun 2026 dengan Indikator Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Sasaran Pembangunan PN pada RKP 2026	Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2026
PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	

Sasaran Pembangunan PN pada RKP 2026	Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2026
Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia ^{b)}
Indeks HAM	Persentase Capaian Aksi HAM ^{b)}
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	Indeks Daya Saing Daerah ^{a)}
Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	Indeks Entropi Theil ^{a)}
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
<i>Global Cybersecurity Index</i>	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) ^{b)}
Indeks Keamanan Laut Nasional	-
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan
Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ^{b)}
Indeks Ketahanan Energi	- Konsumsi Listrik per Kapita ^{b)} - Intensitas Energi Primer ^{b)}
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Porsi EBT dalam bauran energi primer
Indeks Ketahanan Air Nasional	Kapasitas air baku
Kapasitas tampungan air	
Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman ^{b)}
Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat)	- Jumlah Produk Tersertifikasi Halal ^{b)} - Aset Perbankan Syariah/PDRB ^{b)} - Indeks Zakat Nasional ^{b)}
<i>Indonesia Blue Economy Index</i> (IBEI)	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) ^{a)}
Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi
Indeks Ekonomi Hijau	Indeks Ekonomi Hijau Daerah ^{a)}
Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) ^{b)}

Sasaran Pembangunan PN pada RKP 2026	Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2026
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) ^{b)}
Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif
Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ^{a)}
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ^{a)}
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	
Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	- Rasio Konektivitas - Persentase Bangunan Gedung, Hunian dan Permukiman dengan akses layak, terjangkau dan berkelanjutan
Total Aset Sektor Keuangan/PDB	Aset Dana Pensiun/PDRB ^{b)}
Aset Perbankan/PDB	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ^{b)}
Aset Dana Pensiun/PDB	Aset Dana Pensiun/PDRB ^{b)}
Aset Asuransi/PDB	-
Kapitalisasi Pasar Modal/PDB	Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Provinsi ^{b)}
Total Kredit/PDB	Total Kredit/PDRB ^{b)}
Inklusi Keuangan	Inklusi Keuangan
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal ^{b)}
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi
Rasio Kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan
Rasio PDB Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman
Devisa Pariwisata	
Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif ^{b)}
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan,	

Sasaran Pembangunan PN pada RKP 2026	Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2026
Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas
Harapan lama sekolah	Harapan Lama Sekolah
Rata-rata nilai PISA (a) Membaca (b) Matematika (c) Sains	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi
Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: (a) Literasi Membaca (b) Numerasi	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ^{b)}
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	
Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi ^{b)}
Usia Harapan Hidup	Usia Harapan Hidup
Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR) Per wanita usia subur 15-49 Tahun ^{b)}
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) ^{b)}
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	- Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) ^{b)} - Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) ^{b)}
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional ^{b)}

Sasaran Pembangunan PN pada RKP 2026	Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2026
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga ^{a)}
Indeks Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak
Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda
Indeks Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender
Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender
Mobilitas Penduduk Lanjut Usia	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti ^{b)}
Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti ^{b)}
Peringkat Indeks Inovasi Global	Indeks Kapabilitas Inovasi ^{b)}
Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka
Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	Indeks Inovasi Daerah ^{b)}
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan ^{b)}
Peringkat pada Asian Games	Indeks Pembangunan Olahraga ^{b)}
Peringkat pada Asian Para Games	
Peringkat pada ASEAN Para Games	
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga	
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
Rasio PDB Industri Pengolahan	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Biaya Logistik (% PDB)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)
Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	
Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan ^{a)}
Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persentase Kemiskinan Ekstrem

Sasaran Pembangunan PN pada RKP 2026	Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2026
Proporsi Penduduk Kelas Menengah	PDRB per Kapita ^{a)}
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ^{b)}
Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ^{b)}
Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Persentase desa mandiri	Persentase desa mandiri ^{b)}
Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional ^{a)}
Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional	
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
Indeks Pembangunan Hukum	- Persentase Penegakan Perda ^{b)} - Persentase Capaian Aksi HAM ^{b)}
Indeks Persepsi Korupsi	Indeks Integritas Daerah
Indeks Integritas Partai Politik	
Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	Indeks Reformasi Birokrasi ^{a)}
Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	-
Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	-
<i>Return on Asset (RoA) BUMN</i>	<i>Return on Asset (RoA) BUMD^{b)}</i>
Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	- Indeks Kapasitas Fiskal Daerah - <i>Revenue Mobilization</i> Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD ^{b)}
Rasio Perpajakan terhadap PDB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ^{b)}
Tingkat Inflasi	Tingkat Inflasi
PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks Harmoni Indonesia (Sumatera Selatan) ^{a)}
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan ^{b)}
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama

Sasaran Pembangunan PN pada RKP 2026	Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2026
Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	Indeks Risiko Bencana ^{a)}

Keterangan: ^{a)}Indikator tingkat Tujuan;
^{b)}Indikator tingkat Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Kunci

Selanjutnya, selain mendukung Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional, seluruh program daerah di dalam RKPD Tahun 2026 yang mengacu berdasarkan Program Prioritas Daerah di RPJMD Tahun 2025 – 2029 diharapkan berkontribusi dalam mendukung Program Prioritas Nasional. Adapun sandingan keterkaitan Program Prioritas Nasional pada RKP dengan Program Prioritas Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8.
Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional RKP 2026

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKPD Tahun 2026	Indikator Program
PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	
PPN 1.1. : Memperkokoh Ideologi Pancasila	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
PPN 1.2. : Penguatan Demokrasi	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
PPN 1.3. : Penegakan Hak Asasi Manusia	
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi pengelolaan peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi/Kab/Kota, penyelesaian hukum, dan penyelenggaraan HAM yang dilaksanakan

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKPD Tahun 2026	Indikator Program
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif
Program Perlindungan Khusus Anak	- Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) - Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memapatkan Layanan Komprehensif
PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
PPN 2.1. : Penguatan Sistem Keamanan Negara	
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan - Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat
PPN 2.2. : Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)
PPN 2.3. : Diplomasi Ekononomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	- Efektivitas Kerjasama Daerah
PPN 2.4. : Swasembada Pangan	
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	- Produksi Tanaman Pangan - Luas Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	- Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B - Luas Lahan Siap Tanam Padi
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	- Persentase Penanganan Bencana Pertanian - Persentase Penanganan DPI terhadap Pertanian - Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program penyuluhan pertanian	- Persentase Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan - Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKPD Tahun 2026	Indikator Program
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan
Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
Program pengawasan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	- Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis - Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Luasan Kawasan Konservasi
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan
Program Pengelolaan Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB
Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati
PPN 2.5. : Swasembada Energi	
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi
PPN 2.6. : Swasembada Air	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Debit air baku yang dihasilkan
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKPD Tahun 2026	Indikator Program
PPN 2.7. : Ekonomi Syariah	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
PPN 2.8. : Ekonomi Digital	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
PPN 2.9. : Ekonomi Hijau	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	- Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) - Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola
Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pegelolaan Sampah (IKPS)
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	'Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional
PPN 2.10. : Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Penhela Pertumbuhan Ekonomi (Prime Mover) dan Sumber Pertumbuhan Baru	
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB
Program pengelolaan pelayaran	Konektivitas Laut
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKPD Tahun 2026	Indikator Program
PPN 3.1. : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur	
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah
PPN 3.2. : Mendorong Kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Dalam Negeri
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya - Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
PPN 3.3. : Mengembangkan Industri Kreatif	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual
Program pemasaran pariwisata	- Jumlah wisatawan mancanegara - Jumlah wisatawan nusantara
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	- Angka Kumulatif Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan - Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
PPN 3.4. : Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi Aktif

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKPD Tahun 2026	Indikator Program
Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas
Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam
PPN 3.5. : Pendalaman Sektor Keuangan	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital
PN 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	
PPN 4.1. : Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	
Program pengelolaan pendidikan	- Persentase Angka Partisipasi Sekolah - Persentase SPM Pendidikan - Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) - Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus
Program Pengembangan Kurikulum	- Jumlah pengembangan Kurikulum - Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Persentase PTK berkualifikasi S-1 - Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	- Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) - Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan
Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja
Program Hubungan Industrial	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan Yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKPD Tahun 2026	Indikator Program
	- Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
PPN 4.2. : Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi	
Program pengelolaan pendidikan	- Persentase Angka Partisipasi Sekolah - Persentase SPM Pendidikan - Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) - Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus
Program Riset dan Inovasi Daerah	- Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan - Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan
PPN 4.3. : Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar - Angka Kematian Ibu (AKI) - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi - Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	- Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar - Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL - Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	- Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKPD Tahun 2026	Indikator Program
	- Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Akses Air Minum Layak
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
PPN 4.4. : Memperkuat Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif
Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	- Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) - Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
PPN 4.5. : Meningkatkan Prestasi Olahraga	
Program pengembangan daya saing keolahragaan	Persentase atlet yang masuk pelatnas
PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
PPN 5.1. : Pengembangan Hilirisasi sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB - Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan - Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKPD Tahun 2026	Indikator Program
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
PPN 5.2. : Penguatan Industri Padat Karya Berkelanjutan, Industri Dasar, dan Industri Strategis Nasional	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini
PPN 5.3. : Keberlanjutan Hilirisasi dan Industrialisasi	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB - Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan - Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi
Program Pengendalian izin usaha industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan
PPN 5.4. : Pengembangan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
Program Pengendalian Pelaksanaan Modal	Presentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
Program pengembangan ekspor	Nilai Ekspor Barang
PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
PPN 6.1. : Membangun Desa dan Membangun dari Desa	
Program Administrasi Pemerintahan Desa	- Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya - Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,	- Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKPD Tahun 2026	Indikator Program
lembaga adat dan masyarakat hukum adat	- Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat
Program Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa
Program perencanaan kawasan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi Yang Dilaksanakan
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan
PPN 6.2. : Pemerataan Ekonomi	
Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani
Program Pengembangan Perumahan	- Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni - Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	- Konektivitas Darat - Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhdap Kondisi Ideal
PPN 6.3. : Memberantas Kemiskinan	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Warga Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat pendapatannya
Program Pemberdayaan Sosial	- Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin - Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar - Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKPD Tahun 2026	Indikator Program
Program Rehabilitasi Sosial	- Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya - Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
PPN 7.1. : Reformasi Politik	
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
Program Pendaftaran Penduduk	- Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital - Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
Program Pencatatan Sipil	- Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan - Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	- Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun - Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan
PPN 7.2. : Reformasi Hukum	
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi pengelolaan peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi/Kab/Kota, penyelesaian hukum, dan penyelenggaraan HAM yang dilaksanakan
Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	- Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan - Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
PPN 7.3. : Reformasi Tata Kelola Pemerintahan	
Program Kepegawaian Daerah	- Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKPD Tahun 2026	Indikator Program
	- Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya - Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional - Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi - Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis - Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	- Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah - Indeks SPBE - Indeks Pemdi.
Program Penataan Organisasi	Indeks Kematangan Organisasi
PPN 7.4. : Pemberantasan Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan
PN 8: Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
PPN 8.1. : Masyarakat Adil, Makmur, dan Harmonis	
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKPD Tahun 2026	Indikator Program
PPN 8.2. : Melestarikan Budaya	
Program pengembangan kebudayaan	- Indeks Pembangunan Kebudayaan - Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan - Angka Kumulatif Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	- Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang dilestarikan - Angka Kumulatif Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan - Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	- Angka Kumulatif Jumlah Pergelaran Seni - Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan
PPN 8.3. : Penanganan Bencana	
Program Penanggulangan Bencana	- Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana - Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana - Persentase Penanganan Pasca Bencana - Persentase Penanganan Pra Bencana
Program Penanganan Bencana	- Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran - Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025, Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, diolah.

4.2.1.3. Telaah RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

Salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan mengacu pada arahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan khususnya wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi untuk dapat diprioritaskan. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat

penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Deliniasi kawasan strategis provinsi berbentuk poligon dan bersifat indikatif.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis.

Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah provinsi;
- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penanganan kawasan;
- d. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah provinsi;
- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional yang berada di wilayah provinsi;
- h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/ kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang jelas;
- i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah provinsi untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
- j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah provinsi;
- k. Dapat berupa kawasan yang berada pada satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota; dan
- l. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, kawasan strategis yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan sebagai berikut.

a. Kawasan Strategis Nasional yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Kawasan strategis nasional yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:

1. KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat;
2. KSN Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang;
3. KSN Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; dan
4. KSN Kawasan Perkotaan Palembang – Betung – Indralaya – Kayuagung.

b. Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan Kawasan strategis di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan sudut kepentingan terdiri dari 2 (dua) kawasan strategis yang meliputi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

• Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:

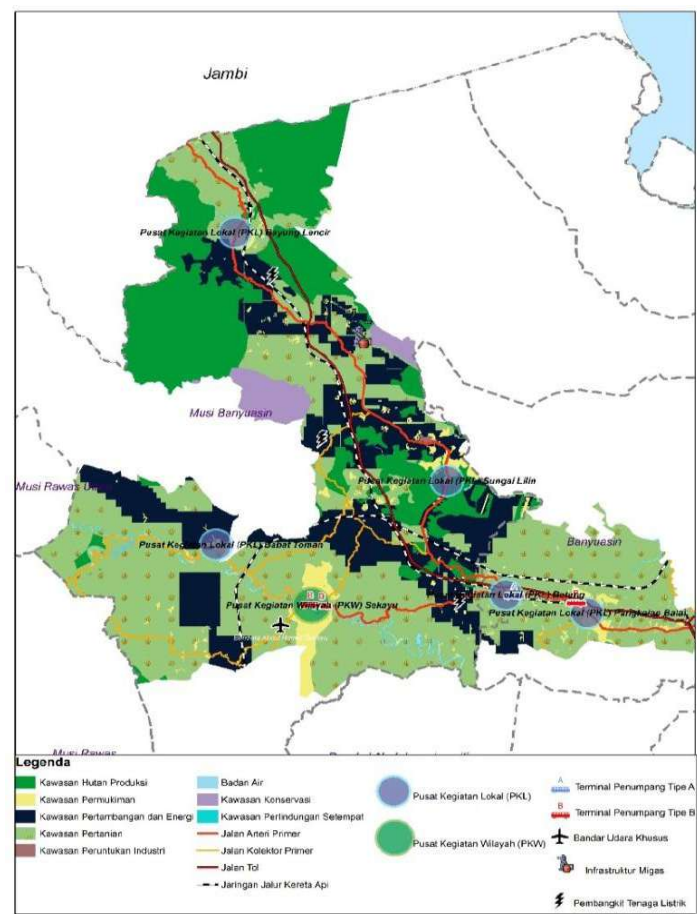
1. KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya;
2. KSP Kawasan Lubuklinggau dan sekitarnya;
3. KSP Kawasan Pagar Alam dan sekitarnya;
4. KPS Kawasan Muara Enim dan sekitarnya;
5. KSP Kawasan Martapura dan sekitarnya.

A. KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya

KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya meliputi 2 wilayah administrasi kabupaten yaitu:

1. Kawasan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Sekayu,

- Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang, Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya; dan
2. Kawasan wilayah Kabupaten Banyuasin meliputi seluruh kecamatan.



Gambar 4.4 KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya adalah mengembangkan pusat kegiatan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam terintegrasi dengan KSN Patungraya Agung.

Arah pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

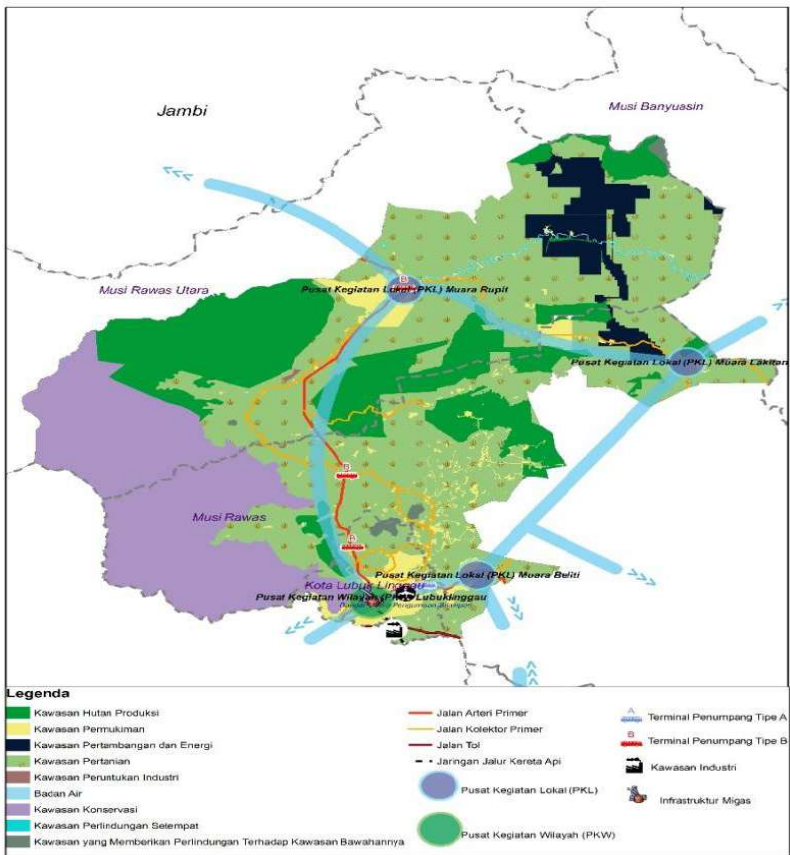
- a. pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mendukung fungsi PKN Patungraya Agung dan PKW di sekitarnya;
- b. pengembangan kawasan industri hijau desa Mulyo Rejo Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas di Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. pengembangan food estate sentra produksi padi di Kabupaten Musi Banyuasin;

- e. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik;
- f. mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya; dan
- g. menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

B. KSP Kawasan Lubuklinggau dan sekitarnya

Kawasan Lubuk Linggau dan sekitarnya meliputi 3 wilayah administrasi kabupaten/kota yaitu:

1. Kawasan wilayah Kota Lubuklinggau meliputi seluruh kecamatan;
2. Kawasan wilayah Kabupaten Musi Rawas meliputi Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu, Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan Megang Sakti; dan
3. Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo.



Gambar 4.5 KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya adalah untuk mendukung percepatan peningkatan ekonomi dalam mendorong pertumbuhan kawasan tertinggal.

Arah pengembangan KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

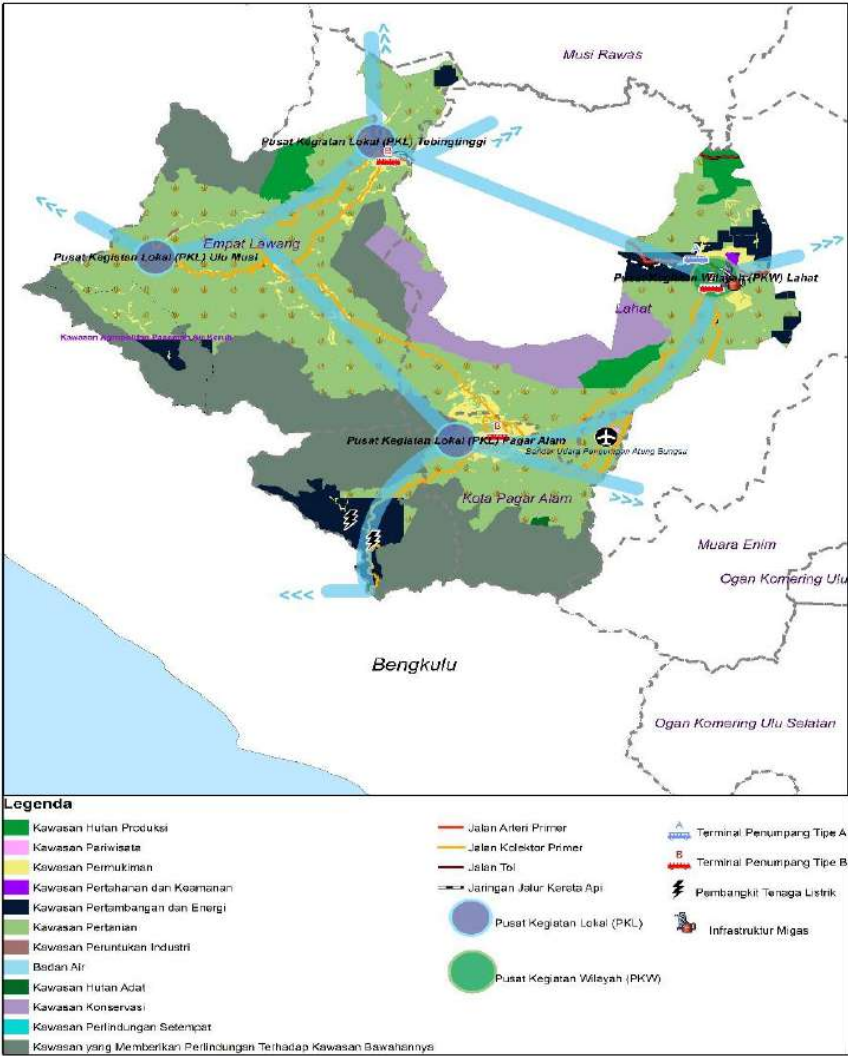
- a. pengembangan Kawasan Perkotaan Lubuklinggau yang dapat mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
- b. pengembangan kawasan agropolitan Musi Rawas;
- c. pengembangan kawasan yang mendukung PKW Lubuklinggau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;
- d. pengembangan desa tertinggal di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e. pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, batu bara dan timah hitam di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- f. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;
- g. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan Kawasan serta pelayanan publik;
- h. menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; dan
- i. peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.

C. KSP Kawasan Pagar Alam dan sekitarnya

KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya meliputi 3 wilayah administrasi yaitu:

1. Kawasan wilayah Kota Pagar Alam meliputi seluruh kecamatan;
2. Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Sukamerindu, Kecamatan Lahat, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Lahat Selatan; dan

3. Kawasan wilayah Kabupaten Empat Lawang meliputi Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Tebing Tinggi.



Gambar 4.6 KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah untuk mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru berbasis pariwisata dan sumber daya energi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

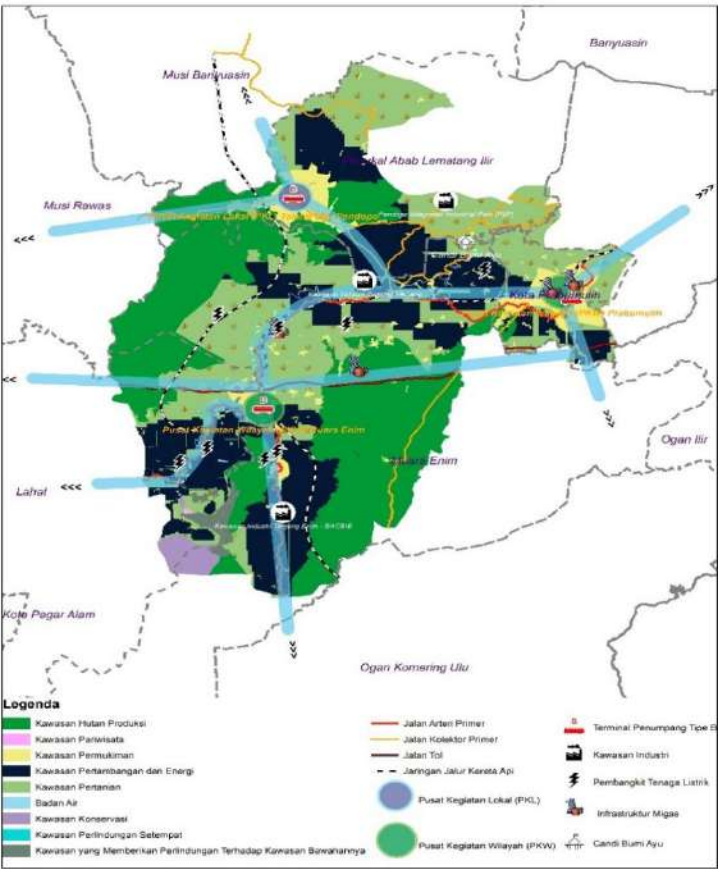
Arah pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu;
- b. Pengembangan kawasan agropolitan Pasemah Air Keruh di Kabupaten Empat Lawang;
- c. pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith yang terdapat di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam;
- d. pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan di Kabupaten Empat Lawang, Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- e. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan;
- f. peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; dan
- g. menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung.

D. KSP Kawasan Muara Enim dan sekitarnya

KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya meliputi 4 wilayah administrasi yaitu:

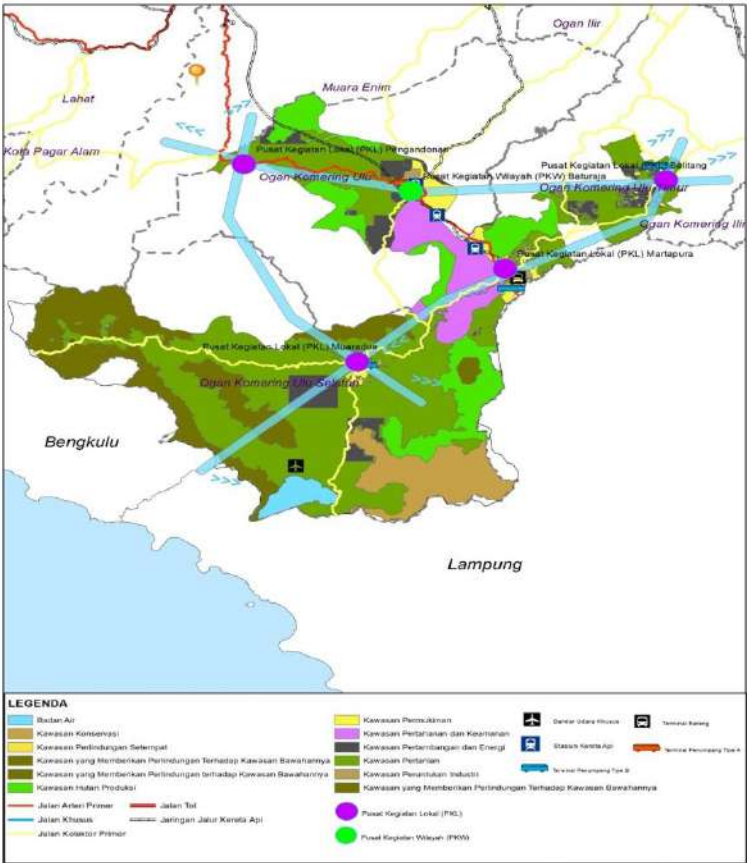
1. Kawasan wilayah Kabupaten Muara Enim meliputi Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Benakat, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku;
2. Kawasan wilayah Kota Prabumulih meliputi seluruh kecamatan;
3. Kawasan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meliputi Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Tanah Abang; dan
4. Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Selatan dan Kecamatan Merapi Timur.



Gambar 4.7 KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

E. KSP Kawasan Martapura dan sekitarnya



Gambar 4.8 KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya meliputi 3 wilayah administrasi yaitu:

1. Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi Kecamatan Martapura, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Jaya Pura, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Belitang Madang Raya, dan Kecamatan Belitang;
2. Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat; dan
3. Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Sindang Danau dan Kecamatan Sungai Are.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan berbasis pertanian, energi dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- b. pengembangan kawasan ekonomi terpadu Danau Ranau;
- c. pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten OKU Timur;
- d. pengembangan kawasan wisata Goa Harimau dan Goa Puteri di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- e. pengembangan kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam Danau Ranau berupa

pengembangan pelabuhan dermaga Danau Ranau dan dermaga wisata

- f. pengembangan energi panas bumi Ulu Danau sebagai salah satu energi terbarukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- g. pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biodiesel/ biofuel berbasis kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- h. pengembangan potensi sumber daya mineral logam bijih besi sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- i. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- j. peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan melalui pengembangan jaringan jalan dan Bandar Udara Banding Agung; dan
- k. menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

- **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Penetapan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan meliputi wilayah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kecamatan Sungai Menang, Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Cengal, Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Air Sugihan) dan Kabupaten Banyuasin (Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Makarti Jaya dan Kecamatan Air Salek).

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah untuk mengendalikan ruang di Pesisir Timur Sumatera Selatan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati, dan menjaga iklim makro, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana;
- b. penerapan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas;
- d. optimalisasi lahan gambut fungsi budidaya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan;
- e. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- f. pengembangan kawasan kerbau rawa Pampangan dan Itik Pegagan di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- g. percepatan pertumbuhan kawasan tertinggal yaitu kawasan Tulung Selapan – Cengal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- h. melindungi kawasan pesisir dan pantai;
- i. menjaga keterpaduan fungsi kawasan di darat dan pesisir;
- j. peningkatan kerjasama kawasan perbatasan provinsi; dan
- k. pengembangan kawasan pariwisata pesisir (*coastal ecotourism*) berbasis *zero-waste*, terintegrasi dan mandiri energi.

4.2.1.4. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan kemajuan yang merata, inklusif, dan ramah lingkungan, sehingga dapat menjamin kesejahteraan bagi generasi sekarang dan masa depan. Untuk itu, pada tahun 2015, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, *Sustainable Developments Goals* (TPB/SDGs). SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". Tujuan ini diharapkan

dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya di tingkat global, nasional, dan daerah.



Gambar 4.9.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Sumber : Seknas SDGs, diolah

Untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut berkontribusi melalui upaya-upaya yang memastikan bahwa pencapaian SDGs dapat berjalan seiring dengan visi pembangunan daerah serta kebutuhan dan tantangan lokal yang ada. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan ketahanan pangan dan energi, optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tetap berwawasan lingkungan (*Green Growth South Sumatra*) merupakan rangkaian upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, terdapat 249 indikator yang harus dicapai pada TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan, dimana sebanyak 98 indikator pada Pilar Pembangunan Sosial, 59 indikator pada Pilar Pembangunan Ekonomi, 69 indikator pada Pilar Pembangunan Lingkungan dan 23 indikator pada Pilar Hukum dan Tata Kelola.



Gambar 4.10

Pemetaan Goals, Target dan Indikator TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, diolah

Gambaran umum capaian TPB/SDGs Sumatera Selatan berdasarkan laporan RAD SDGs terakhir diketahui bahwa dari 249 total indikator yang ada, sebanyak 131 indikator atau 52,21 persen yang dilaksanakan tercapai, 57 indikator atau 22,89 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik dan 62 indikator atau 24,90 persen yang dilaksanakan mengalami perubahan negatif atau perlu perhatian khusus/tidak tersedia data.

Memperhatikan analisis terhadap masing-masing capaian SDGs, berikut adalah rumusan isu strategis berdasarkan capaian SDGs yang dibagi dalam empat pilar yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan serta pilar hukum dan tata kelola. Rumusan isu strategis merupakan capaian SDGs dalam kelompok yang belum mencapai target dan yang belum memiliki data. Sedangkan untuk indikator SDGs yang telah mencapai target maka perlu untuk tetap dipertahankan kinerja agar tidak turun.

Tabel 4.9

Isu Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
Pilar Sosial		
Tujuan 1 mengentaskan	Persentase Penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) di	Perlunya meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
segala bentuk kemiskinan	Sumatera Selatan masih diatas rata-rata nasional; • Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan Komponen pembentuk GK yang memiliki peranan terbesar dibandingkan non makanan;	khususnya wilayah dengan kantong-kantong kemiskinan yang tinggi; • Diperlukan intensifikasi terhadap strategi pendekatan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin khususnya komponen makanan melalui Bantuan Sosial;
	• Komoditas sumbangan terbesar pada GK baik perkotaan maupun perdesaan pada beras dan rokok.	• Perlunya dilakukan pemberdayaan dan kegiatan ekonomi produktif lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan penduduk miskin serta membudayakan prilaku hidup sehat.
Tujuan 2 menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	• Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. • Prevalensi Stunting masih cukup tinggi dan adanya ketidakseimbangan dalam pencegahan stunting, terutama di daerah tertentu yang justru mengalami peningkatan angka stunting • Pola konsumsi pangan masyarakat masih tergantung pada konsumsi beras sebagai komoditas utama dan konsumsi pangan penting lainnya seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, dan buah-buahan masih rendah	• Memperkuat konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan dalam peningkatan cakupan dan kualitas intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive pada sasaran prioritas di lokasi fokus pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi; • Kampanye edukasi yang intensif mengenai pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), serta pentingnya pemberian ASI eksklusif dan pola asuh yang baik. • Program subsidi pangan atau pemberian bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah perlu diperluas untuk meningkatkan akses ekonomi terhadap pangan bergizi.

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia	- Jumlah kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi - Meningkatnya persentase penyalahgunaan narkoba - Meningkatnya Angka kelahiran pada Perempuan usia 15-19 tahun dan masih relative tinggi	- Menurunkan AKI dan AKB melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan reproduksi bagi Ibu dan remaja putri; - Peningkatan kesehatan masyarakat disetiap siklus hidup melalui peningkatan mutu posyandu aktif
		- Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif pemberdayaan masyarakat sehat melalui GERMAS - Peningkatan strategi yang komprehensif dan terpadu dalam pembinaan ketahanan remaja dan Pembangunan keluarga
Tujuan 4 menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat masih kurang - Persentase Harapan Lama sekolah masih lebih rendah menunjukkan bahwa banyak individu belum menyelesaikan pendidikan mereka hingga jenjang yang lebih tinggi - Persentase guru sekolah dan PLB yang bersertifikat pendidik masih kecil	- Meningkatkan akses dan layanan pendidikan - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan - Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, distribusi pendidik yang merata - Pemerataan pendidikan baik di daerah maupun di perkotaan karena masih terdapat kesenjangan pendidikan baik di kota maupun di desa - Mengoptimalkan Pendidikan Non Formal Bagi Masyarakat Usia Produktif yang Masih Berpendidikan Rendah
Tujuan 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua	- Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menunjukkan angka yang tinggi - Masih adanya praktik perkawinan dini yang	Memperluas Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak dengan meningkatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
perempuan dan anak perempuan	dapat berdampak pada kesehatan reproduksi Jumlah perempuan yang menduduki posisi managerial, keterlibatan perempuan dalam politik dan sosial masih terbatas	masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat - Memperkuat peran perempuan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang lebih komprehensif. - Melakukan sosialisasi terkait resiko perkawinan usia dini yang berdampak pada kesehatan reproduksi
Pilar Ekonomi		
Tujuan 7 menjamin akses energi terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	- Kebutuhan dan Konsumsi listrik terus meningkat; - Sumber energi masih bergantung pada Sumber Energi Fosil, belum ada bauran energi terbarukan.	- Menambah ketersediaan energi listrik untuk masyarakat, terutama di daerah terpencil (pesisir, pegunungan, perbatasan) melalui Pembangkit Listrik Berbasis EBT; - Optimalisasi penyediaan energi melalui alternatif energi non batubara/fosil dalam mendukung terwujud Energi Baru Terbarukan di Tahun 2060.
Tujuan 8 mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua	- Pertumbuhan ekonomi masih dibawah nasional; - PDRB daerah masih didominasi oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian; - Tenaga kerja formal masih rendah dibandingkan tenaga kerja informal; - TPT diwilayah perkotaan masih tinggi;	- Mengurangi hambatan investasi - Menyediakan prasarana dan sarana pendukung investasi - Penguatan Sektor Kesehatan untuk memberikan keyakinan kepada Investor. - Mengembangkan industri pengolahan (manufaktur) untuk hilirisasi SDA unggulan dengan memprioritaskan penggunaan sebesar-besarnya tenaga kerja lokal dan pemanfaatan sumber daya alam (resources)/ bahan baku lokal;

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
Tujuan 9 membangun infrastruktur yang Tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	• Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita cenderung menurun; dan • Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur meningkat namun lambat.	• Meningkatkan kondisi jalan mantap; • Pengembangan Kawasan industri dan Pelabuhan New Port Palembang; dan • Kemudahan dalam berinvestasi melalui Mall pelayanan publik dan Legalisasi Regulasi tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
Tujuan 10 mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara	• Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggal; dan • persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	• Perlu adanya inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua untuk mengurangi ketimpangan pendapatan; • Peningkatan jumlah pekerja kelompok menengah bawah pada sektor formal melalui penyediaan pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja untuk mengembangkan kesempatan kerja yang baik mencetak tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. • Pemerataan pembangunan yang berfokus pada proyek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi daerah • Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang merubah mindset masyarakat dari pembeli menjadi penghasil secara langsung dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat
Tujuan 17 menguatkan cara pelaksanaan	• Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	• Mengoptimalkan penggalan potensi sumber pajak dan efektivitas pengumpulannya,

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB Sumatera Selatan	- Meningkatkan kesadaran wajib pajak, - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi domestik yang diperkirakan masih sekitar 5 persen,
	- Rata-rata pertumbuhan investasi PMA dan PMDN. - Pertumbuhan ekspor produk non migas.	- Perlunya peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN - Perlunya upaya peningkatan ekspor khususnya produk non migas
Pilar Lingkungan		
Tujuan 6 menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak masih berada di bawah capaian - Persentase masyarakat berpendapatan rendah yang tidak memiliki akses fasilitas BAB masih rendah	- Memanfaatkan dana pihak ketiga terutama CSR dalam membangun infrastruktur dasar sanitasi - Membangun kerjasama dengan swasta, masyarakat di dalam pembangunan infrastruktur dasar sanitasi
Tujuan 11 membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan	- Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Sumsel masih tinggi; - Sampah perkotaan yang tertangani masih sedikit; - Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) masih tinggi;	- Perlu upaya kolaborasi dan terintegrasi berupa kajian dan peta resiko bencana, pembangunan basis data bencana dan perubahan iklim, menindak upaya-upaya yang berdampak pada pencemaran udara, meningkatkan kualitas air sungai dan danau serta pengendalian karhutla. - Pengelolaan sampah terpadu. - Emisi gas rumah kaca yang terus meningkat, penanganan karhutla, dan persentase rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau masih perlu mendapat perhatian khusus ke depannya.

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	• Jumlah Perusahaan Peserta Proper yang mencapai minimal rangking Biru masih rendah; • Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister masih belum terlaksana	• Mendorong seluruh pelaku usaha besar untuk melaksanakan Program Proper • Mendorong perubahan gaya hidup yang ramah lingkungan tindak hanya melalui edukasi di pendidikan formal tetapi juga di fasilitas publik • Peningkatan mutu dan kualitas Pelayanan Publik
Tujuan 13 membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya	• Penurunan jumlah hotspot dan luas kebakaran hutan dan lahan; • Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang;	• Pemberian edukasi dan penegakan hukum untuk pembukaan lahan dengan bakar dan pengeringan lahan gambut; • Memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan tata ruang; • Meningkatkan kapasitas dan akses terhadap sarana kedaruratan untuk MPA dalam penanganan kebakaran;
Tujuan 14 melakukan konservasi sumber daya laut, samudera dan maritime untuk pembangunan yang berkelanjutan	• Jumlah luasan kawasan konservasi laut • Rehabilitasi mangrove • Jumlah kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK)	• Meningkatkan status kawasan konservasi dari Pencadangan ke Penetapan • Penanaman mangrove (Konservasi spesies yang terancam punah, lokal dan bernilai ekonomi tinggi) • Meningkatkan jumlah kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK)
Tujuan 15 melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan,	• Masih rendahnya tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan • Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan masih belum mencapai target	• Mengidentifikasi dan pemetaan lahan kritis • Penanganan pemanfaatan/ eksploitasi berlebihan dan peredaran /perdagangan tumbuhan dan satwaliar;

2. Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan: Meningkatkan infrastruktur dasar seperti akses jalan, energi, dan transportasi yang ramah lingkungan perlu terus diupayakan, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang;
3. Tantangan Perubahan Iklim: Perubahan iklim yang semakin nyata memerlukan tindakan lebih konkret untuk mengurangi dampaknya, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan terhadap ekosistem yang ada.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian SDGs di tahun mendatang:

1. Kolaborasi yang Lebih Kuat, Pencapaian SDGs yang lebih cepat dan merata hanya dapat terwujud dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini harus lebih terstruktur dan terkoordinasi dalam berbagai program Pembangunan;
2. Peningkatan Infrastruktur di Daerah Tertinggal, Pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, termasuk akses ke air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi. Ini penting agar ketimpangan pembangunan dapat dikurangi dan masyarakat lebih merasakan manfaat dari Pembangunan;
3. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi, Teknologi digital dan inovasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat proses pengumpulan data, analisis, serta implementasi kebijakan yang berbasis pada bukti;
4. Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan, Untuk mencapai SDG yang terkait dengan pendidikan dan pekerjaan yang layak, perlu ada peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan vokasional, dan pelatihan kerja untuk memastikan generasi muda siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif;
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Masyarakat perlu dilibatkan lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Program pemberdayaan yang berbasis pada pengelolaan alam secara berkelanjutan akan membantu mewujudkan SDG yang berfokus pada kelestarian lingkungan.

4.2.1.5. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Rekomendasi kebijakan dari DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran diarahkan untuk selaras dengan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Hasil telaah pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan Sumber Daya Manusia
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan seperti kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, kurangnya bahan literasi perpustakaan, perlunya pembangunan/perbaikan gedung sekolah, kelas belajar, dan fasilitas gedung/lapangan olahraga, pembangunan fasilitas laboratorium, penyediaan mobiler kelas, peralatan seni, dan bantuan beasiswa.
 - b. Belum optimalnya penegakan kebijakan dan regulasi seperti sistem zonasi pendidikan, bantuan biaya pendaftaran pendidikan, dan seleksi penempatan guru.
 - c. Kurangnya akses pelayanan kesehatan seperti peningkatan akses berobat gratis.
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan seperti bantuan renovasi puskesmas dan bantuan gizi untuk bayi.
 - e. Kurangnya pembinaan dan pengembangan olahraga seperti kurangnya sarana dan prasarana olahraga.
 - f. Kurangnya pengembangan daya saing keolahragaan.
2. Permasalahan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana pertanian seperti bantuan bibit, pupuk, obat-obatan, dan alat mesin pertanian diantaranya traktor dan *combine harvester*.
 - b. Kurangnya sarana perkebunan seperti bantuan sarana prasarana, bibit, dan pembangunan jalan usaha.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana peternakan seperti bantuan untuk ternak sapi dan pengolahan pupuk organik.

- d. Kurang optimalnya pengelolaan perikanan budidaya seperti bantuan bibit perikanan, peralatan, pakan, lahan, dan kelompok organisasi sektor perikanan.
 - e. Belum optimalnya penyuluh pertanian sehingga perlunya pelatihan yang berkualitas agar pendampingan dan pembinaan kepada kelompok tani lebih intensif.
 - f. Kurangnya akses permodalan bagi petani termasuk bantuan penyediaan pupuk dan bibit.
 - g. Jaringan irigasi belum tersedia atau dalam kondisi rusak sehingga perlunya pembangunan/perbaikan irigasi pertanian/sawah, revitalisasi sawah, siring, dan normalisasi sungai.
 - h. Kurang optimalnya pengembangan UMKM seperti bantuan peralatan, pemasaran dan pemodalan.
 - i. Belum optimalnya kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti harga jual gabah yang menurun, pengelolaan koperasi dan pembangunan pasar yang belum optimal.
 - j. Kurang optimalnya pengelolaan daya tarik destinasi pariwisata
 - k. Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata.
3. Permasalahan Pangan, Energi, Air
- a. Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah termasuk stabilitas harga dan pemasaran produk.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana kelistrikan seperti bantuan pemasangan lampu penerangan jalan.
 - c. Kurangnya akses air minum/air bersih sehingga perlunya penyediaan air bersih melalui penyediaan tanki air, instalasi pipa, pembuatan sumur bor, dan pembuatan embung (waduk) penampungan air.
4. Permasalahan Infrastruktur, Pelayanan Dasar, dan Lingkungan
- a. Kurangnya akses infrastruktur jalan seperti perlunya pembangunan/perbaikan jalan, baik jalan provinsi, jalan poros/lingkungan/lingkar desa, jalan lingkungan, jalan permukiman, jalan/jalur lalu lintas pertanian, jalan menuju perkebunan, jalan menuju sekolah, dan jalan produksi.

- b. Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) seperti penerangan jalan umum dan bantuan pembuatan *Zebra Cross*.
 - c. Kurangnya akses infrastruktur jembatan seperti perlunya pembangunan/perbaikan akses jembatan penghubung antar desa dan jembatan gantung.
 - d. Belum optimalnya penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta kurangnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman seperti sumur bor.
 - e. Kurangnya akses air minum/air bersih sehingga perlunya penyediaan air bersih melalui penyediaan tanki air, instalasi pipa, pembuatan sumur bor, dan pembuatan embung (waduk) penampungan air.
 - f. Kurangnya akses sanitasi layak.
 - g. Kurangnya Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang salah satunya mengakibatkan banjir sehingga perlu pembuatan/perbaikan siring/gorong-gorong, talud, dan embung.
 - h. Kurangnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik.
 - i. Tingginya potensi bencana longsor sehingga perlunya pembangunan tembok penahan.
 - j. Tingginya potensi bencana banjir sehingga perlunya pembangunan siring dan DAM.
 - k. Kurangnya sarana dan prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana seperti pembangunan talud.
 - l. Tingginya potensi genangan di jalan yang rawan banjir sehingga perlunya pembuatan siring pasang dan siring lingkungan.
 - m. Penyempitan badan sungai dan sedimentasi tinggi sehingga perlunya normalisasi anak sungai.
 - n. Kurangnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Persampahan Regional termasuk kurangnya penyediaan bak sampah.
5. Permasalahan Kemiskinan dan Lapangan Kerja
 - a. Kurang optimalnya perlindungan dan jaminan sosial.
 - b. Kurangnya akses lapangan pekerjaan.
 6. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

- a. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - b. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM khususnya untuk pelayanan publik.
 - c. Kurang Optimalnya Penataan Desa seperti pembangunan dan bantuan sarana dan prasarana kantor desa.
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi seperti pembangunan tower untuk signal internet.
7. Permasalahan Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya
- a. Kurangnya sarana dan prasarana Keagamaan seperti pembangunan/renovasi tempat ibadah.
 - b. Kurangnya pengembangan kebudayaan.
 - c. Kurangnya pengembangan kesenian tradisional termasuk pembangunan gedung kesenian dan peralatan kesenian.
 - d. Kurangnya bantuan biaya operasional (kegiatan keagamaan).
 - e. Terjadinya sengketa kepemilikan lahan sehingga perlunya bantuan untuk penyelesaian.

Seluruh permasalahan dari pokok-pokok pikiran tersebut termuat di dalam Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2026 yang keterkaitannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10.
 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2026 dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2026
➤ Kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan ➤ Kurangnya sarana dan prasarana Kesehatan ➤ Kurangnya akses pelayanan kesehatan ➤ Kurangnya pembinaan dan pengembangan Olahraga ➤ Kurangnya pengembangan daya saing keolahragaan ➤ Belum optimalnya penegakan kebijakan dan regulasi di bidang Pendidikan	PD1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2026
➤ Belum optimalnya kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat ➤ Belum optimalnya penyuluh pertanian ➤ Kurangnya akses permodalan bagi petani ➤ Kurangnya sarana prasarana pertanian ➤ Kurangnya prasarana peternakan ➤ Kurangnya sarana perkebunan ➤ Kurang optimalnya pengelolaan perikanan budidaya ➤ Jaringan Irigasi belum tersedia atau dalam kondisi rusak ➤ Kurang optimalnya pengembangan UMKM ➤ Kurang optimalnya pengelolaan daya tarik destinasi pariwisata ➤ Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata	PD2: Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
➤ Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah ➤ Kurangnya sarana dan prasarana kelistrikan ➤ Kurangnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Persampahan Regional ➤ Penyempitan badan sungai dan sedimentasi tinggi	PD3: Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
➤ Belum optimalnya penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ➤ Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ➤ Kurangnya akses infrastruktur jalan ➤ Kurangnya akses infrastruktur jembatan ➤ Kurangnya akses air minum/air bersih ➤ Kurangnya akses sanitasi layak ➤ Kurangnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	PD4: Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2026
➤ Kurangnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman ➤ Kurangnya Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase ➤ Kurangnya sarana dan prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana ➤ Tingginya potensi bencana longsor ➤ Tingginya potensi bencana banjir ➤ Tingginya potensi genangan di jalan yang rawan banjir	
➤ Kurang optimalnya perlindungan dan jaminan sosial ➤ Kurangnya akses lapangan pekerjaan	PD5: Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan
➤ Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik ➤ Kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi ➤ Kurang Optimalnya Penataan Desa ➤ Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur	PD6: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
➤ Kurangnya bantuan biaya operasional (kegiatan keagamaan) ➤ Kurangnya pengembangan kebudayaan ➤ Kurangnya pengembangan kesenian tradisional ➤ Kurangnya sarana dan prasarana Keagamaan ➤ Terjadinya sengketa kepemilikan lahan	PD7: Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal

4.2.1.6. Telaah Isu Strategis Daerah

Perumusan isu strategis didasarkan pada permasalahan hasil evaluasi pembangunan dan pencapaian indikator pembangunan tahun 2024 dalam RPD dan RKPD, arah kebijakan RPJMD dan RPD, arah kebijakan Rancangan RKP Tahun 2026, RPJPD, serta perkembangan isu terkini yang akan dihadapi sebagaimana tercantum pada Bab II buku RKPD ini. Berdasarkan perumusan tersebut, terdapat 7 (tujuh) isu strategis Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan sosial dan pemberdayaan peningkatan pendapatan masyarakat belum optimal;
2. Hilirisasi sektor unggulan daerah belum optimal;
3. SDM berbasis kompetensi belum optimal;
4. Kinerja pelayanan publik berbasis digital belum optimal;
5. Akses, Kualitas, dan Kuantitas Infrastruktur Layanan Pendidikan dan Kesehatan belum optimal;
6. Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Dasar belum optimal; dan
7. Pengelolaan SDA dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung.

Seluruh isu strategis tersebut dilakukan penelaahan dan dirumuskan menjadi prioritas pembangunan daerah. Adapun konsistensi antara isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11.
Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2026 dengan Isu Strategis Tahun 2026

Isu Strategis Tahun 2026	Prioritas Daerah RKPD 2026
Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Belum Optimal	PD5 : Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan
Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah Belum Optimal	PD2 : Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD3 : Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

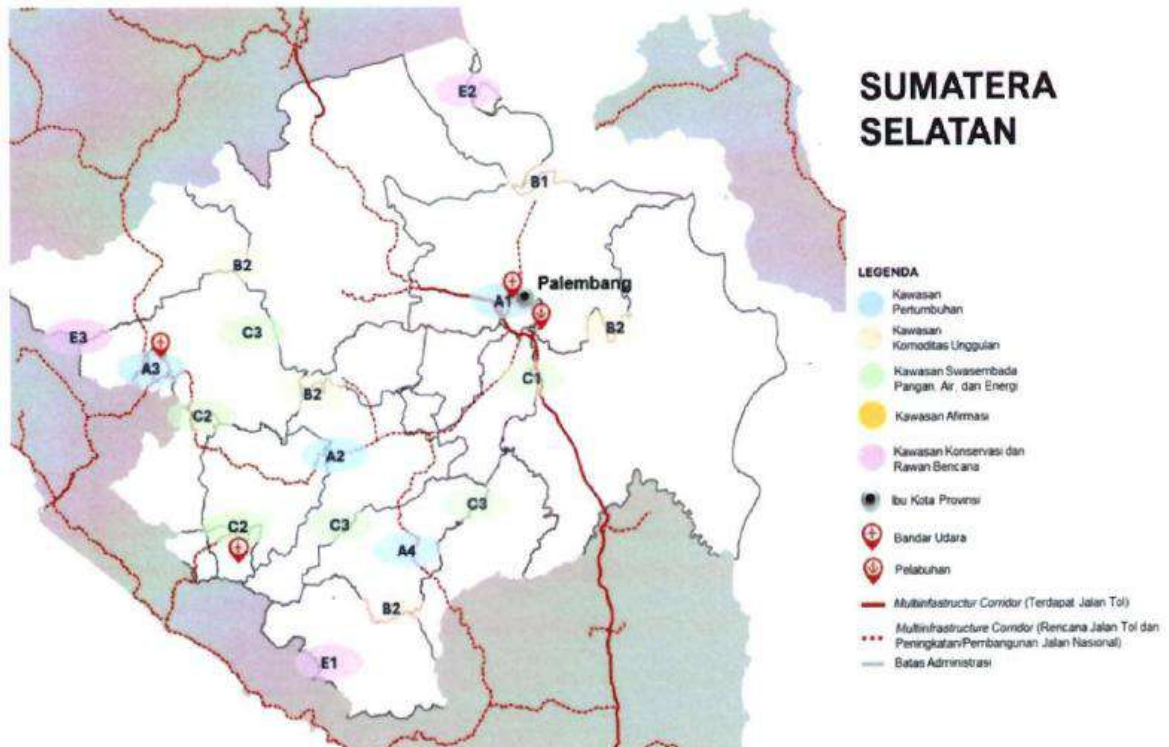
Pengembangan wilayah merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang sejalan dengan visi-misi serta program prioritas daerah guna mencapai target pembangunan daerah. Pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan mempertimbangkan berbagai faktor penting. Oleh karena itu, penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2026 mengacu pada berbagai pedoman perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, proyek strategis nasional yang berlangsung di Sumatera Selatan, serta dokumen perencanaan pembangunan nasional, yaitu RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Selain itu, sinkronisasi dalam perencanaan dan keselarasan antara perencanaan serta penganggaran menjadi aspek penting untuk memastikan keberhasilan prioritas pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial. Strategi kewilayahan Provinsi Sumatera Selatan mencakup strategi pembangunan per kawasan baik perdesaan-perkotaan disertai dengan rencana intervensi pembangunan di tiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Berlandaskan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk pengembangan Pulau Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai **Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan**. Peran Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian jangka menengah wilayah untuk mengurangi kesenjangan dilaksanakan melalui perspektif pembangunan kewilayahan yaitu penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah yang terdiri dari tata ruang, pertanahan, informasi geospasial, layanan dasar, infrastruktur dasar, otonomi dan keuangan daerah.

Gambar 5.1

Peta Kawasan di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

A. Kawasan Pertumbuhan

1. Wilayah Metropolitan Palembang dan Kawasan Pengembangan Industri Palembang-Banyuasin
2. Kawasan Perkotaan Muara Enim dan Kawasan Pengembangan Industri Tanjung Enim
3. Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau
4. Kawasan Perkotaan Baturaja

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Ekonomi Biru

1. Banyuasin

Sawit, Karet, Kelapa, Kopi

2. Cekungan Musi (Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir).

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi

Swasembada Pangan

1. Ogan-Komering-Banyuasin (Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur)
2. Musi Hulu (Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir)

D. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
2. Taman Nasional Sembilang
3. Taman Nasional Kerinci-Seblat

5.1.1 Proyek Strategis Nasional

Perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian Proyek-Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional. Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan pembangunan.

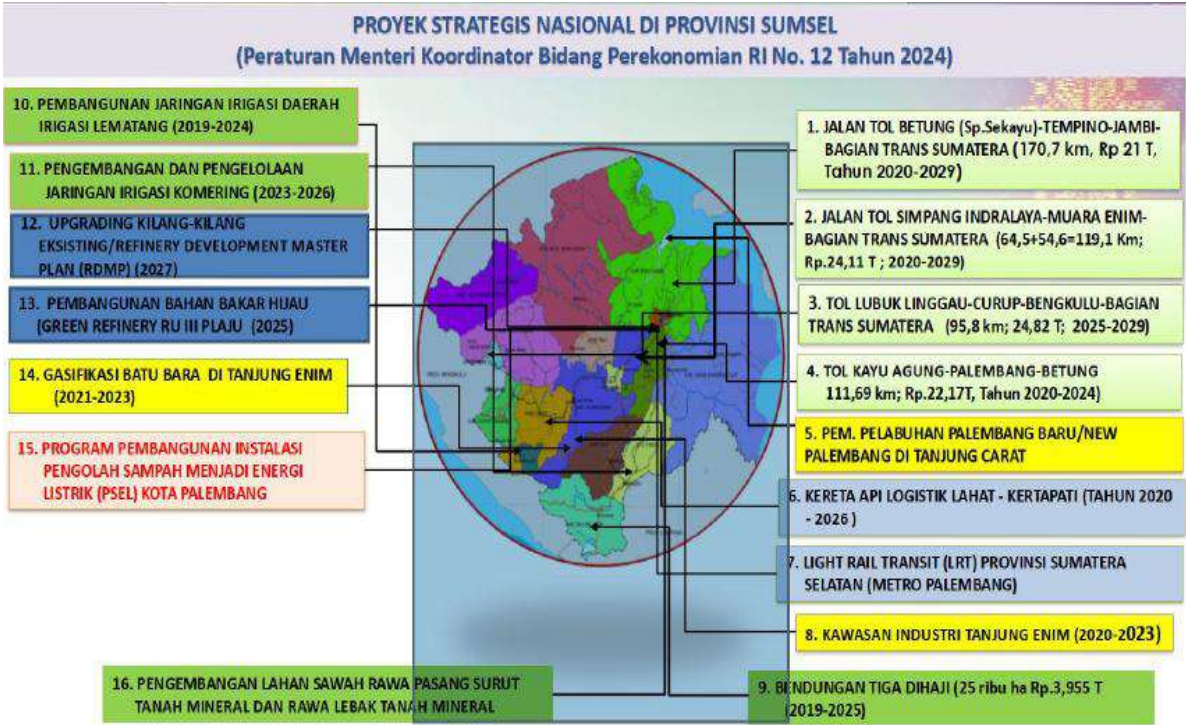
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan beberapa Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 5.1

No	PROYEK	LOKASI	PELAKSANA
	<i>Makan Bergizi Gratis</i>		
1	Program Makan Bergizi Gratis	17 Kabupaten/Kota	• Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
	<i>Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>		
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	17 Kabupaten/Kota	• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	17 Kabupaten/Kota	• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	17 Kabupaten/Kota	• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
5	Program Penuntasan TBC	17 Kabupaten/Kota	• Kementerian Kesehatan (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
	Swasembada Pangan		
6	Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan <i>Food Estate</i>	Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Musi Rawas dan Kab. Muara Enim	• Kementerian Pertanian, Swasta (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota

No	PROYEK	LOKASI	PELAKSANA
7	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan	Kabupaten/Kota Sumatera Selatan	- Kementerian Pekerjaan Umum - Pemerintah Kab/Kota
8	<i>Biorefinery</i> Sumatera	PT. Pertamina	- Kementerian Kesehatan (koordinator) - Pemerintah Kab/Kota
9	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan	Kota Palembang	- PT. Pertamina/PGN - Pemerintah Kota Palembang
	<i>Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital</i>		
10	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Kabupaten/Kota Sumatera Selatan	- Swasta - Pemerintah Kab/Kota
11	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	17 Kabupaten/Kota	- Kemen PAN RB (koordinator) - Pemerintah Kab/Kota
12	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia	17 Kabupaten/Kota	- Badan Informasi Geospasial - Pemerintah Kab/Kota
13	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas	Kabupaten/Kota	BUMN (Penugasan)
14	Pembangunan 3 Juta Rumah	17 Kabupaten/Kota	- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator) - Pemerintah Kab/Kota
15	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Kota Palembang	- Pemerintah Kota Palembang - Swasta

Gambar 5.2
Peta Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No.12 Tahun 2024



Sumber: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 12 Tahun 2024, terdapat 16 Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas Sektor Jalan dan Jembatan berupa Proyek Jalan Tol, Sektor Pelabuhan berupa Pembangunan Pelabuhan, Sektor Kereta berupa Kereta Api Logistik dan *Light Rail Transit* (LRT), Sektor Kawasan berupa Kawasan Industri (KI), Sektor Bendungan dan Irigasi berupa Pembangunan Jaringan Irigasi, dan Sektor Energi berupa *Upgrading* Kilang-kilang Eksisting, *Green Refinery* (Bahan Bakar Hijau) dan Gasifikasi Batu Bara, serta sektor pertanian berupa pengembangan lahan sawah.

Tabel 5.2
Progres Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
1	Jalan Tol Betung (SP. Sekayu)-Tempino-Jambi-Bagian Trans Sumatra (170,7 Km,	Betung Kab.Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin,Tempino dan Jambi	Seksi Betung-Tungkal Jaya (62,38km) progres 16,97%, Seksi Tungkal Jaya-Bayung Lencir (56,76km) progres 0,28%, Seksi Bayung Lencir-

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
	Rp. 21 T, Tahun 2020-2029)		Tempino (34km) 100% telah diresmikan pada 16 Oktober 2024, Seksi Tempino-Jambi(18km) progres 40,26%
2	Jalan Tol Samping Indralaya-Muara Enim-Bagian Trans Sumatra (64,5+54,6=119,1 Km; Rp.24,11 T ; 2020-2029)	Indralaya Kab.Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Kab.Muara Enim	• Seksi Indralaya-Prabumulih (63,5 Km) Progres 100% Operasional 31 Juli2023, • Seksi Prabumulih-Muara Enim (56,85 Km) Progres Fisik 8,69% (Ditangguhkan). • Penambahan <i>Junction</i> Palembang (8,26km) progres 47%.
3	Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu-Bagian Trans Sumatra (95,8 Km; 24,82 T; 2025-2029)	Kota Lubuk Linggau, Kab. Rejang Lebong, Kab.Kepahiang, dan Kota Bengkulu	• Seksi 1 Lubuk Linggau-Kepahiang 54,5 Km dan Seksi 2 Kepahiang-Taba Penanjung 23,7 Km ditangguhkan • Seksi 3 Taba Penanjung-Bengkulu (17,6 Km) sudah Operasional.
4	Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (111,69 Km; Rp. 22,17 T, Tahun 2020-2024)	Kab.Muara Enim, Kab.Lahat, Kab.Musi Rawas dan, Kota Lubuk Linggau	Tahap 1: Seksi Kayu Agung – Kramasan (Palembang) (42,5 Km) telah beroperasi. Tahap 2: - Seksi Kramasan – Sungai Rengas (21,5km) progres 89,06% - Seksi Sungai Rengas – Pangkalan Balai (33 Km) progress 4,24%
5	Pembangunan Pelabuhan Palembang	Kab. Banyuasin	• Terkait Lahan: SK Menteri KLHK No. 1259 Tahun

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
			oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. c. Setelah sertifikat lahan selesai selanjutnya lahan akan diserahkan/dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan untuk dibangun Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang.
6	Kereta Api Logistik Lahat – Kertapati (Tahun 2020-2026)	Kab. Lahat, Kab.Muara Enim, Kota Prabumulih, Tarahan Lampung	• <i>Milestone</i> KA Logistik Segmen I Lahat-Kertapati sedang berproses. • Terminal Bongkar Batubara (TBB)/Terminal <i>Unloading System (TULS)</i> Stasiun Kramasan, Sumatera Selatan progres 13,90% • Pembangunan <i>Flyover</i> Koridor Ujan Mas beserta kebutuhan pembebasan lahan dibiayai oleh PT. Kereta Api (Persero)
7	Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Kota Palembang	Status : Operasi 1) Total <i>Ridership LRT</i> Sumatera Selatan di tahun 2023 mencapai 4,08 Juta penumpang 2) Mekanisme Subsidi (PSO) dilakukan melalui Subsidi KA Perintis di Kementerian Perhubungan 3) Terdapat 2 eskalator yang belum terpasang

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
			(Blok I and J) progres 18,67% • <i>Package 3 Belintang Secondary Canal</i> (BB.15-BB.25), Lempuing <i>Secondary and Sub Secondary Canal and Tertiary Development</i> (Blok K) progress 18,10%
12	<i>Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/ Refinery Development Master Plan (RDMP) (2027)</i>	Kota Palembang	Tahap transaksi <i>Bidding FEED, BEDP</i>
13	Pembangunan Bahan Bakar Hijau (<i>Green Refinery</i> RU III Plaju (2025)	Kota Palembang	• Pekerjaan Pra FS, Dokumen <i>Basic Engineering Design Package (BEDP)</i>, Dokumen <i>Front End Engineering Design (FEED)</i> sudah selesai.
14	Gasifikasi Batu Bara di tanjung Enim (2021-2023)	Kab. Muara Enim	• PTBA telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri berlaku Efektif pada Lahan Kawasan Industri 585,4 Ha di Tanjung Enim sejak tanggal 24 Mei 2021. • Proses mendapatkan mitra strategis pendanaan.
15	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi	Kota Palembang	• Progres pembangunan sudah tahap tiang pancang dan diharapkan ada <i>Ground Breaking</i>.

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
	Energi Listrik (PSEL) Kota Paalembang		• Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dengan PT. PLN pada 21 Desember 2023. • Jaminan pelaksanaan kegiatan sudah ada dan diserahkan dari PT. IGP.
16	Pengembangan Lahan Sawah Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawah Lebak Tanah Mineral	Berlokasi di 7 Kabupaten: Kab. OKI, Kab. Ogan Ilir, Kab. MUBA, Kab. OKU Timur, Kab. PALI, Kab. Banyuasin, Kab. Muara Enim.	• Cetak Sawah seluas 2.000 Ha • Pembangunan Pabrik Penggilingan Padi Skala besar (1 unit) berlokasi di Desa Kota Bumi, Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir. • Progres : a. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Belitang Panen Raya (BPR) tentang Implementasi Cetak Sawah dan Pembangunan Penggilingan Padi Modern pada tanggal 13 Januari 2025. b. Rencana <i>Groundbreaking</i> Cetak Sawah seluas 2.000 Ha dan Pembangunan Penggilingan Padi Modern di Desa Kota Bumi Kec. Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
			pada pertengahan April 2025. c. Survei Investigasi Desain (SID) Cetak Sawah untuk luasan 75.000 Ha dan Konstruksi Cetak Sawah seluas 50.000 Ha di 5 (lima) kabupaten yaitu Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur dan Penukal Abab Lematang Ilir pada Tahun Anggaran 2025 sedangkan seluas 25.000 Ha akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dengan sumber dana APBN Kementerian Pertanian

(Progres kemajuan fisik per Januari-Februari 2025)

Sumber: Kementerian PUPR (BBPJN Sumsel, BBWSS VIII), Hutama Karya Trans Sumatera, Bappeda Prov. Sumsel, Dishub Prov. Sumsel, 2025

5.1.2 Kawasan Strategis Nasional di Wilayah Provinsi

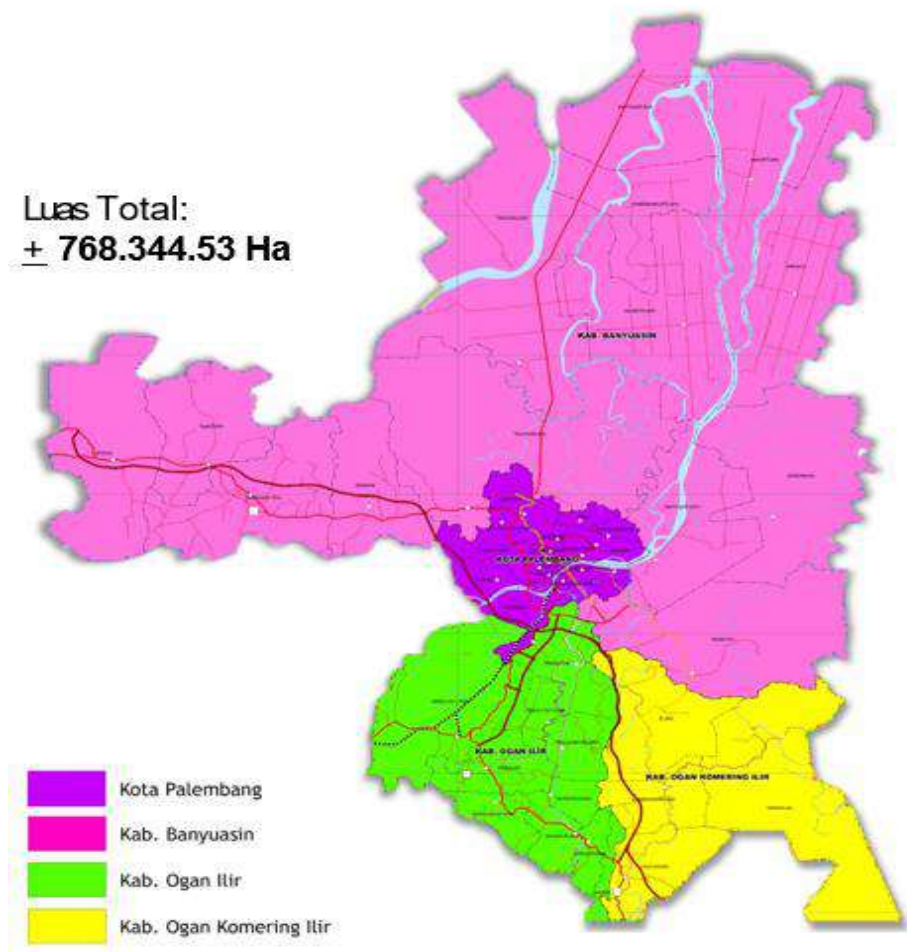
Kawasan strategis nasional (KSN) yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:

- a. KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat;
- b. KSN Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang;
- c. KSN Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; dan
- d. KSN Kawasan Perkotaan Palembang – Betung – Indralaya – Kayuagung (Patungraya Agung).

5.1.2.1 KSN Kawasan Perkotaan Patungraya Agung

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang ditetapkan untuk diprioritaskan penataan ruangnya. KSN memiliki pengaruh penting secara nasional, baik dalam bidang kedaulatan, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Gambar 5.3 Lingkup Wilayah Patungraya Agung



Sumber: Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Palembang Betung Indralaya dan Kayu Agung (Patungraya Agung), wilayah delineasi meliputi:

- 1) Kawasan Seluruh wilayah Kota Palembang dengan luasan sebesar ±36,647.94 Ha, meliputi 18 Kecamatan;
- 2) Sebagian Wilayah Kabupaten Banyuasin dengan luasan sebesar ±516,025.4 Ha, meliputi 14 Kecamatan;

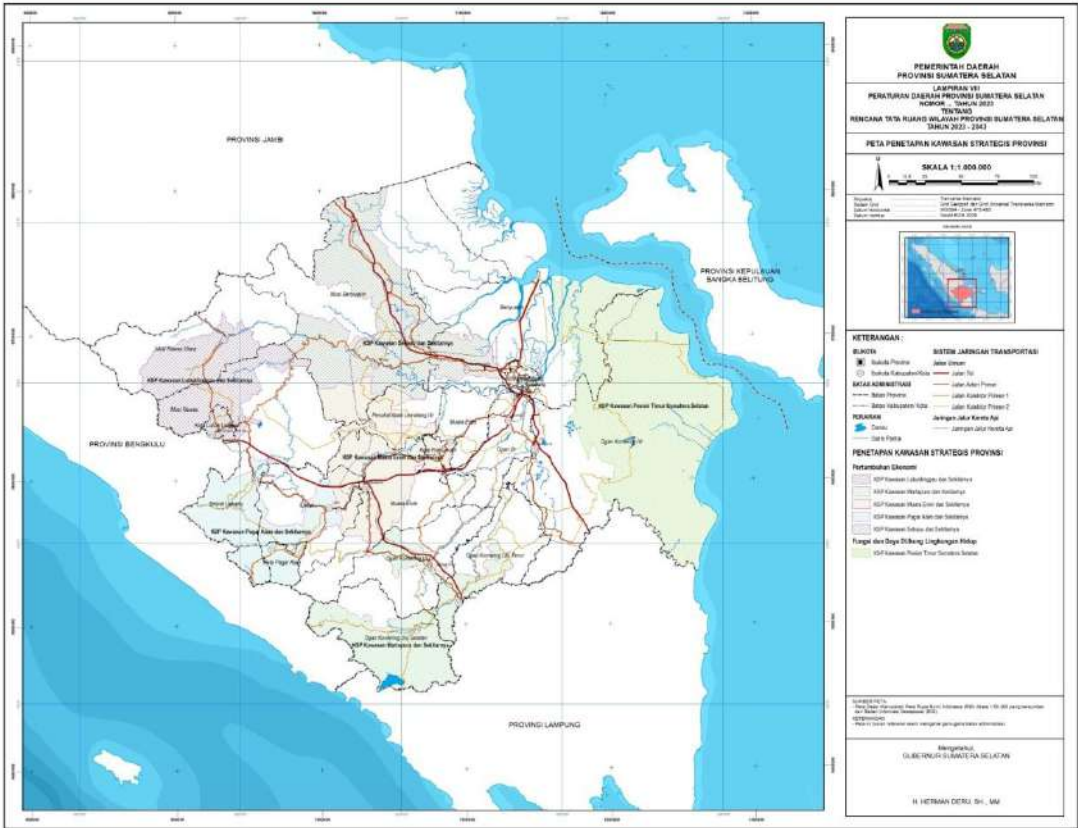
- 3) Sebagian Wilayah Kabupaten Ogan Ilir dengan luasan sebesar ±87,747.29 Ha, meliputi 10 Kecamatan;
- 4) Sebagian Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luasan sebesar ±88,396.94 Ha, meliputi 4 Kecamatan.

5.1.3 Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:
 - a. KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya;
 - b. KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya;
 - c. KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya;
 - d. KSP Kawasan Muara Enim dan sekitarnya; dan
 - e. KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya.

Gambar 5.4
Peta Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan

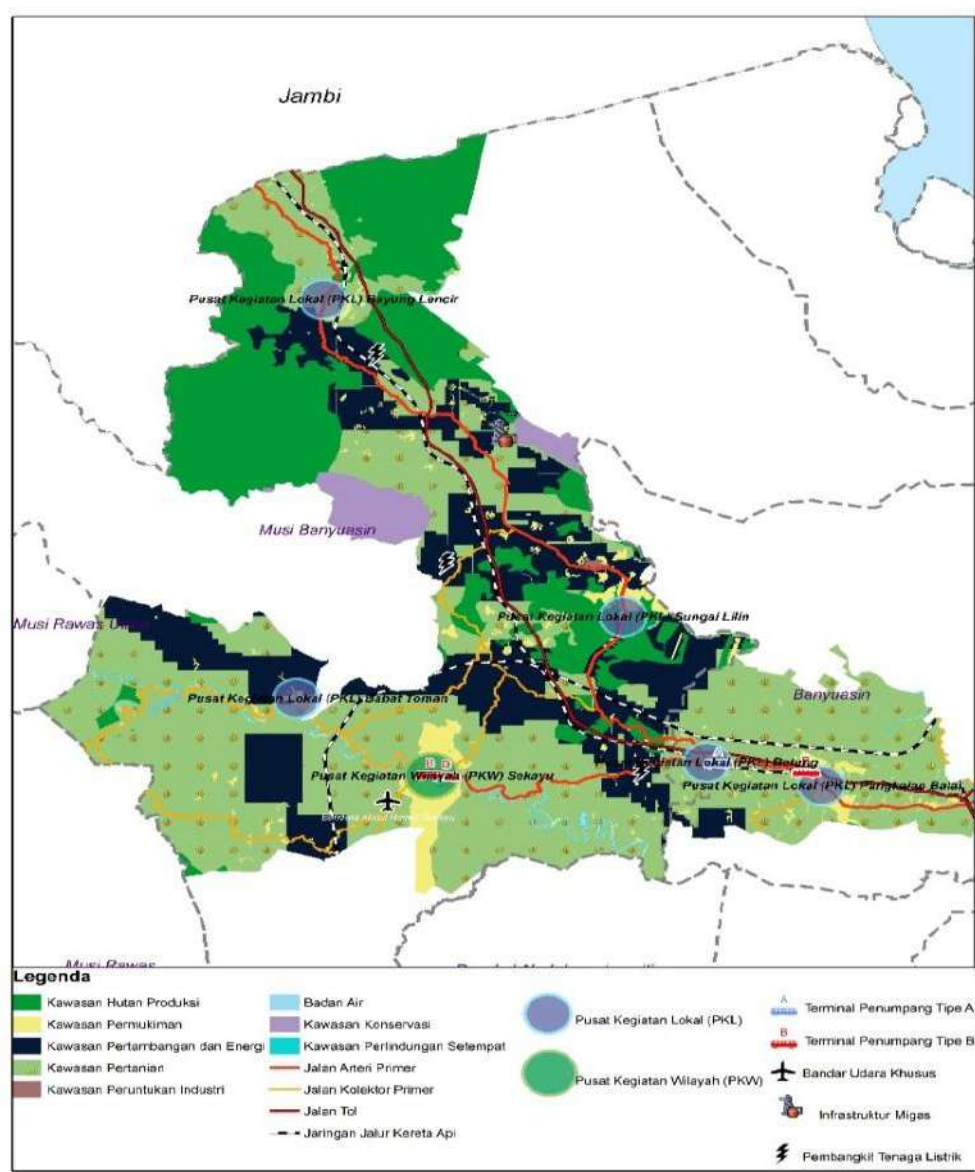


Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

5.1.3.1 KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya

KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya meliputi 2 (dua) wilayah kabupaten antara lain Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin.

- 1) Kawasan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang, Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya; dan
- 2) Kawasan wilayah Kabupaten Banyuasin meliputi seluruh kecamatan.



Gambar 5.5 KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya adalah mengembangkan pusat kegiatan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam terintegrasi dengan KSN Patungraya Agung.

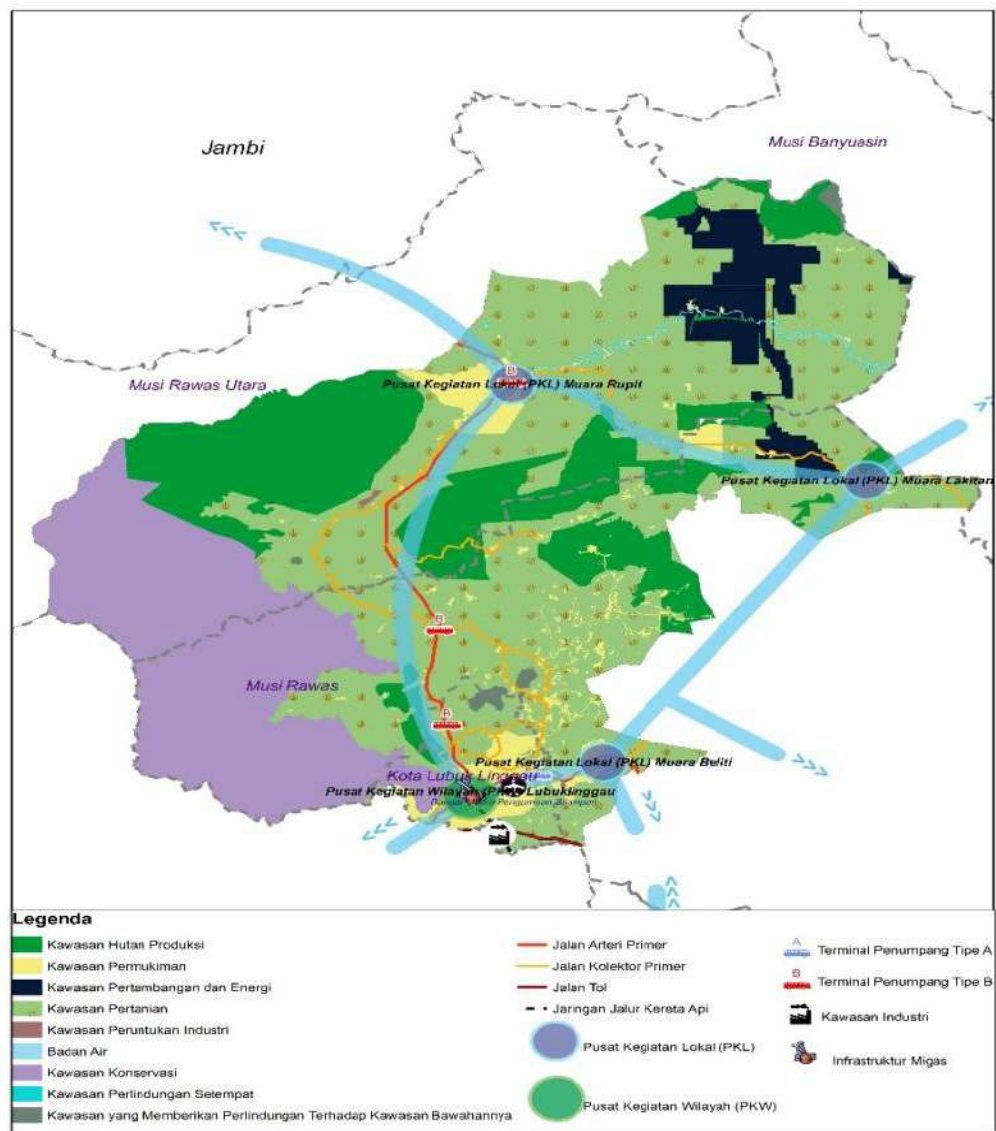
Arah pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan Kawasan-Kawasan yang dapat mendukung fungsi PKN Patungraya Agung;
- b. pengembangan Kawasan Industri Hijau di Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin;
- d. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik;
- f. pencegahan dan pengendalian kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya; dan
- g. pengendalian Kawasan yang berfungsi lindung.

5.1.3.2 KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya

KSP Kawasan Lubuklinggau dan sekitarnya meliputi 3 (tiga) wilayah kabupaten/kota antara lain Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

- 1) Kawasan wilayah Kota Lubuklinggau meliputi seluruh kecamatan;
- 2) Kawasan wilayah Kabupaten Musi Rawas meliputi Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu, Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan Megang Sakti; dan
- 3) Kawasan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo.



Gambar 5.6 KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

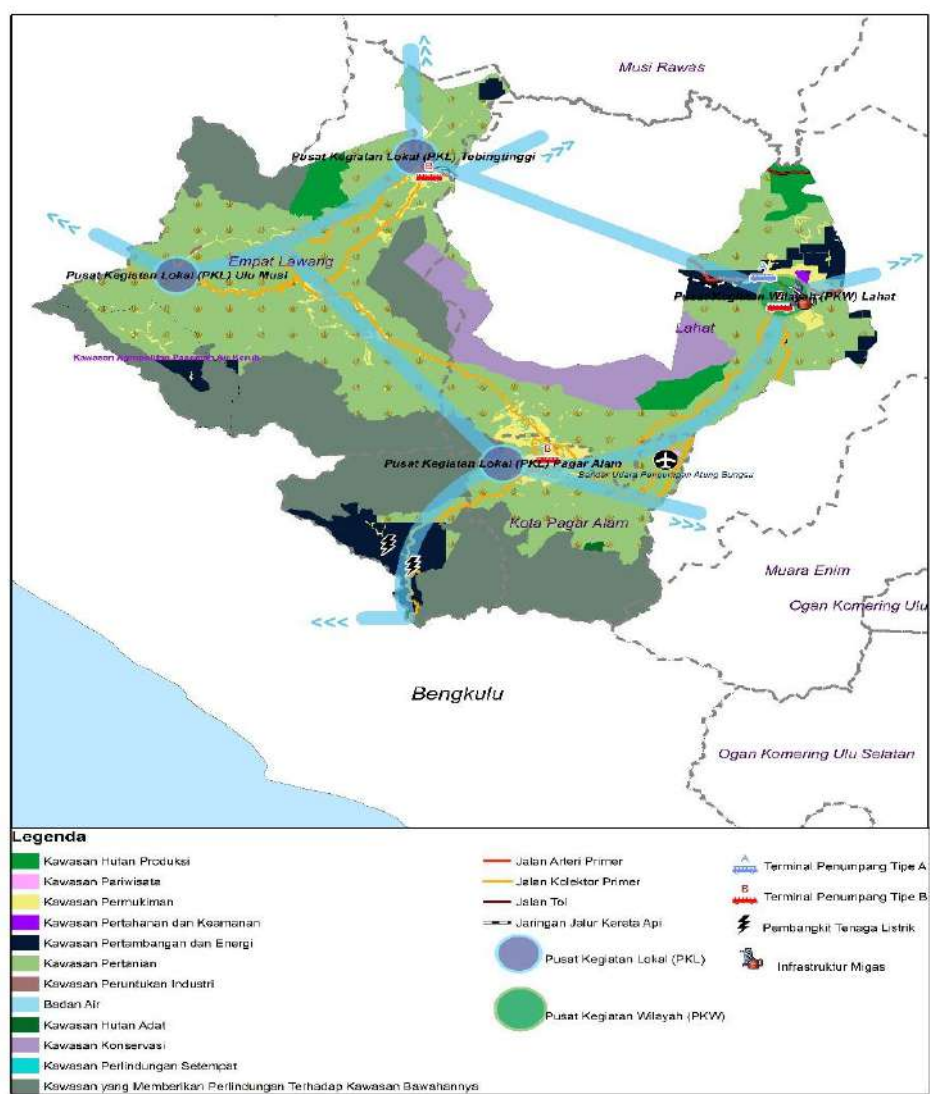
Tujuan pengembangan KSP Kawasan Lubuk Linggau dan Sekitarnya adalah mendukung percepatan peningkatan ekonomi dalam mendorong pertumbuhan Kawasan tertinggal.

Arah pengembangan KSP Kawasan Lubuk Linggau dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- pengembangan Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau dalam mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
- pengembangan Kawasan agropolitan Musi Rawas;
- pengembangan Kawasan yang mendukung PKW Lubuk Linggau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;

- d. pengembangan desa tertinggal di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e. pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng , timah hitam dan batu bara di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- f. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;
- g. penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan;

5.1.3.3 KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya



Gambar 5.7 KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

KSP Kawasan Pagar Alam dan sekitarnya meliputi 3 (tiga) wilayah kabupaten antara lain Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Empat Lawang.

- 1) Kawasan wilayah Kota Pagar Alam meliputi seluruh kecamatan;
- 2) Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Sukamerindu, Kecamatan Lahat, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Lahat Selatan
- 3) Kawasan wilayah Kabupaten Empat Lawang meliputi Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Tebing Tinggi.

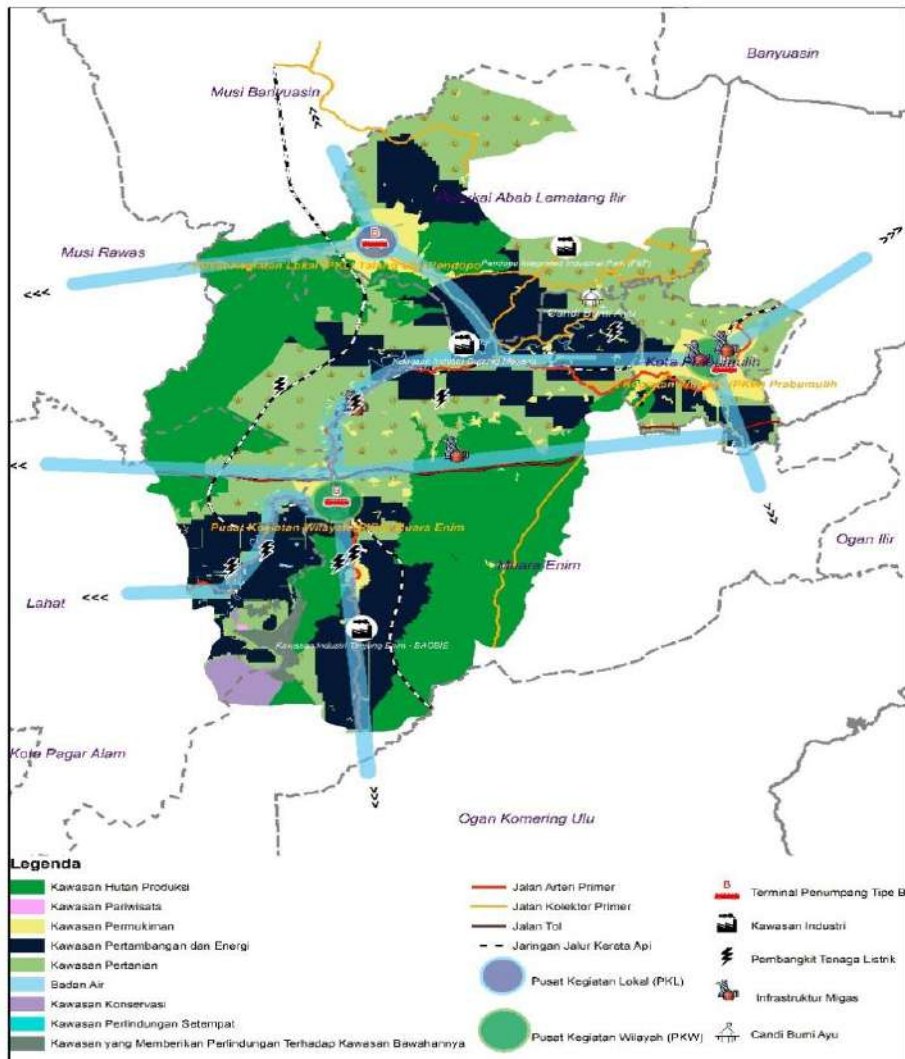
Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru berbasis pariwisata dan sumber daya energi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu;
- b. pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith yang terdapat di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam;
- c. pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan di Kota Pagar Alam;
- d. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan;
- e. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; dan
- f. menjaga dan melestarikan Kawasan yang berfungsi lindung.

5.1.3.4 KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya

KSP Kawasan Muara Enim dan sekitarnya meliputi 4 (empat) wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kabupaten Lahat.



Gambar 5.8 KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

- 1) Kawasan wilayah Kabupaten Muara Enim meliputi Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Benakat, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku;
- 2) Kawasan wilayah Kota Prabumulih meliputi seluruh kecamatan;
- 3) Kawasan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meliputi Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Tanah Abang; dan
- 4) Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Selatan dan Kecamatan Merapi Timur.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya adalah mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam secara

berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

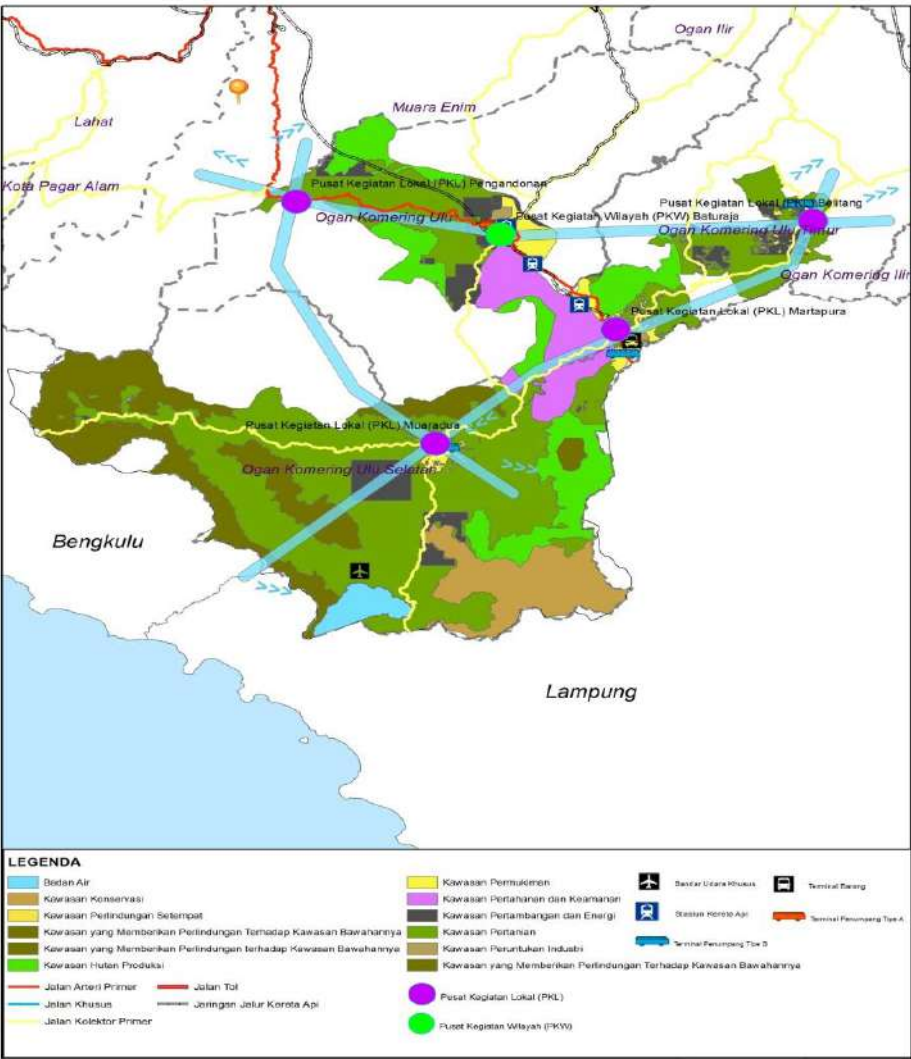
- a. pengembangan Kawasan Perkotaan Muara Enim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;
- b. pengembangan potensi sumber daya alam berupa batu bara dan migas di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan Kawasan industri di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- d. pengembangan Kawasan wisata Candi Bumi Ayu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- e. pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan dan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional di Kabupaten Muara Enim;
- f. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;
- g. penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan Kawasan.

5.1.3.5 KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya

KSP Kawasan Martapura dan sekitarnya meliputi 3 (tiga) wilayah kabupaten antara lain Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- 1) Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi Kecamatan Martapura, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Jaya Pura, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Belitang Madang Raya, dan Kecamatan Belitang;
- 2) Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat; dan

- 3) Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Sindang Danau dan Kecamatan Sungai Are.



Gambar 5.9 KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan berbasis pertanian, energi dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- b. pengembangan Kawasan agropolitan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. pengembangan kawasan wisata Goa Harimau dan Goa Puteri di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- d. pengembangan Kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam Danau Ranau dan pelabuhan dermaga Danau Ranau serta dermaga wisata;
- e. pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- f. pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biodiesel/biofuel berbasis kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- g. pengembangan potensi sumber daya mineral logam bijih besi sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- h. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- i. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan melalui pengembangan jaringan jalan dan Bandar Udara Banding Agung;
- j. pengendalian Kawasan yang berfungsi lindung.

- **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Penetapan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan meliputi wilayah daerah Kabupaten Banyuasin (Kecamatan Air Salek, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Muara Sugihan), dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kecamatan Air Sugihan, Kecamatan Cengal, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kecamatan Sungai Menang dan Kecamatan Tulung Selapan).

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah untuk mengendalikan ruang di Pesisir Timur Sumatera Selatan untuk mendukung peningkatan ekonomi hijau dan menjamin pembangunan berkelanjutan.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati, dan menjaga iklim makro, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana;
- b. penerapan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas;
- d. perlindungan pada Kawasan pesisir dan pantai;
- e. perwujudan untuk keterpaduan fungsi Kawasan di darat dan pesisir;
- f. optimalisasi lahan gambut fungsi budidaya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan;
- g. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- h. pengembangan Kawasan kerbau rawa Pampangan dan itik Pegagan di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- i. percepatan pertumbuhan Kawasan tertinggal yaitu Kawasan Tulung Selapan – Cengal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- j. peningkatan kerjasama Kawasan perbatasan provinsi; dan
- k. pengembangan Kawasan Pariwisata pesisir (*coastal ecotourism*) berbasis *zero-waste* terintegrasi dan mandiri energi.

5.2 Indikator Makro dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota. Arah kebijakan pembangunan di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan kabupaten/kota dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Patungraya Agung berdasarkan arahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Palembang, Betung, Indralaya dan Kayu Agung (Patungraya Agung), dan juga Kabupaten/Kota dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP), memperhatikan Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044.

Dalam hal pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan bahwa masih adanya kesenjangan baik ekonomi maupun sosial. Kesenjangan ini bisa dilihat dari kondisi makro pembangunan kabupaten/kota saat ini yang dijabarkan dalam enam indikator utama yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per Kapita dan Gini Ratio. Untuk penjelasan secara lebih rinci mengenai arahan pengembangan wilayah, potensi dan keunggulan wilayah dan arah kebijakan pengembangan wilayah tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Kota Palembang

Pembangunan di Kota Palembang diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kota Palembang sebagai berikut:

Tabel 5.3
Capaian dan Target Indikator Makro Kota Palembang

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	4,95 - 5,00	5,1 – 5,5
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	121,15	134,45	139,67
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	30,75	30,65*	30,54*
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,77	8,9-9,9	8,5-9,5
5	Gini Ratio	0,35	0,350-0,355	0,330-0350
6	Indeks Pembangunan Manusia	82,29	82,82	83,37
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	10.144,83 ton co2-e	14.207,22 ton co2-e
8	IKLH Daerah	N/A	61,46	61,71
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,98	6,08	5,57

Sumber: Capaian 2024 (BPS Prov Sumsel), target 2025 & 2026 (Kesepakatan Pramusrenbang Tahun 2025)

Kota Palembang juga memiliki Kawasan Konservasi yaitu Taman Wisata Alam Punti Kayu.

Dilihat dari Distribusi PDRB sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 79,30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Industri Pengolahan sebesar 31,68%; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 18,78%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 15,36%; 4) Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 7,74%; 5) Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,74%.

Pembangunan Kota Palembang akan menentukan sejauh mana wilayah Sumatera Selatan mendapatkan manfaat dari percepatan pembangunan Koridor Ekonomi Sumatera. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi Kota Palembang juga harus melakukan penanganan untuk mengatasi kemiskinan.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kota Palembang pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Pembangunan jaringan gas perkotaan.
- 10) Program pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kota Palembang (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung–Palembang– Betung Tahap 2 Keramasan-Betung sepanjang 111,69 Km.
- 2) *LRT* Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang).

- 3) Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati
- 4) *Upgrading* kilang-kilang *eksisting/refinery development master plan (RDMP)*.Pembangunan bahan bakar hijau (Green Refinery) RU III Plaju.
- 5) Pembangunan bahan bakar hijau/ *Green Refinery* di Plaju.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, prioritas pembangunan wilayah Kota Palembang pada tahun 2026 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 6,27% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,00% yang difokuskan pada ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan) dan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 7,26%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 80,88.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 94,53%, akses sumber air minum layak sebesar 95,00%, akses sanitasi layak sebesar 94,29%.
- 6) Pengembangan dan penataan WM Palembang, antara lain melalui:
 - Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Palembang;
 - Penyusunan *masterplan* penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu;
 - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau;
 - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan;
 - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan;
 - Penyusunan *metropolitan statistical area*;
 - Penataan Kawasan Strategis dan Penyediaan Perumahan Publik Vertikal Perkotaan Terpadu di Wilayah Metropolitan Palembang.
- 7) Pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) dan *Urban Renewal* Kawasan Stasiun Ampera.
- 8) Pengembangan Jalan Lingkar Timur Palembang.

- 9) Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Palembang.
- 10) Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Palembang.
- 11) Pengembangan SPAM Regional Palembang-Banyuasin.
- 12) Pembangunan TPST Regional Palembang-Banyuasin.
- 13) Percepatan pengembangan Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati, khususnya pada pengembangan Terminal Bongkar Batubara (TBB)/ *Terminal Unloading System* (TULS) Stasiun Keramasan.
- 14) Percepatan proyek *Upgrading* Kilang-Kilang Eksisting/*Refinery Development Masterplan* (RDMP) Plaju.
- 15) Pengembangan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Palembang (PHTC).
- 16) Pengembangan koridor industri Palembang-Banyuasin dengan prioritas: industri kimia, industri energi, industri pengolahan hasil kelapa, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri manufaktur.
- 17) Optimalisasi pengelolaan kawasan industri terpadu berbasis pusat logistik berikat dan pelabuhan serta kawasan industri prioritas publik Pusri III-D.
- 18) Pengembangan *Fly Over* Sudirman dan *Underpass* Charitas.
- 19) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan /peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.
- 20) Revitalisasi Pasar Cinde
- 21) Pembangunan Masjid Raya
- 22) Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA) khusus bagi anak miskin, dengan *output* berupa Sekolah Rakyat Berasrama
- 23) Pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, dengan *output* berupa penyediaan peralatan digital bagi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- 24) Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrument penyaluran bantuan secara terintegrasi.
- 25) Pendayagunaan Dokter Spesialis
- 26) Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 27) Pemberian bantuan pembangunan rumah Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya.

Dengan demikian berdasarkan arahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Pengembangan Kota Palembang diarahkan menjadi **kota metropolitan modern yang terintegrasi, berdaya saing, dan berkelanjutan**, dengan fokus utama pada penguatan industri, infrastruktur, ekonomi hijau, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.2.2 Kabupaten Banyuasin

Pembangunan di Kabupaten Banyuasin diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Banyuasin sebagai berikut :

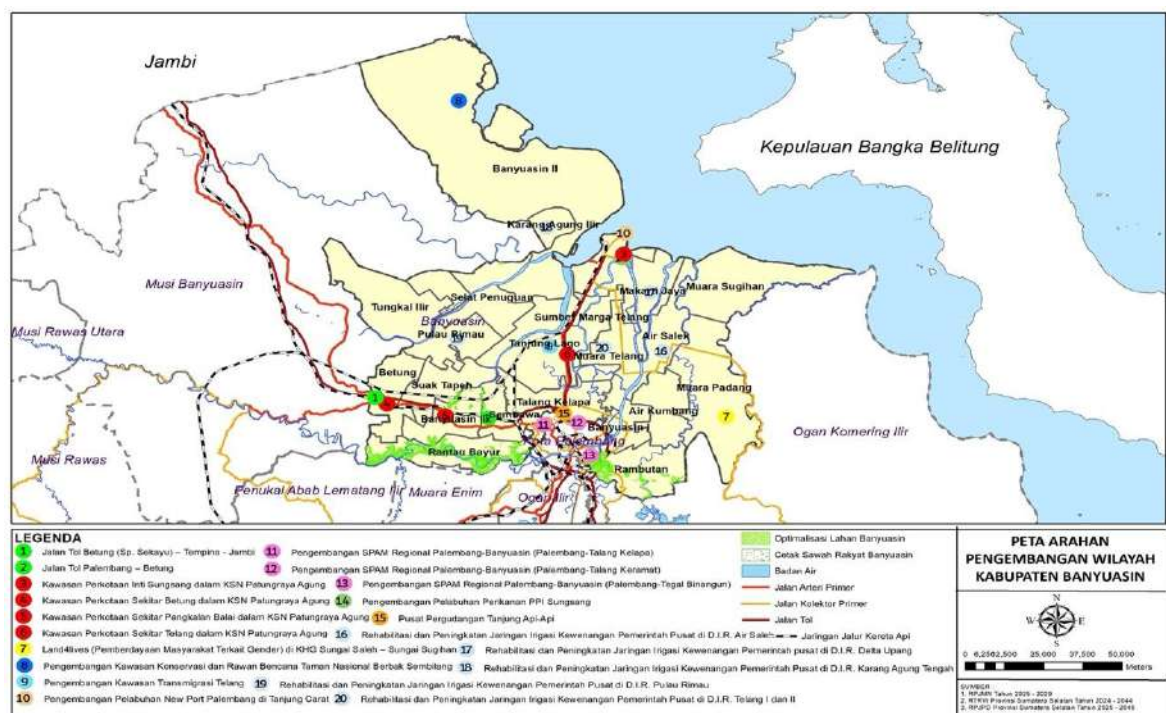
Tabel 5.4
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Banyuasin

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14	5,0-5,5	5,23-5,88
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	44,73	47,00 - 57,00	55,00-65,00
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	5,85	5,82*	5,80*
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,31	8,5-9,0	8,44-8,92
5	Gini Ratio	0,27	0,265-0,290	0,265-0,290
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,55	70.35	72.00
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	5.010.054,71	5.580.437,78
8	IKLH Daerah	N/A	67,11	67,36
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,24	3,5	3,13-3,28

Sumber: Capaian 2024 (BPS Prov Sumsel), target 2025 & 2026 (Kesepakatan Pramusrenbang Tahun 2025)

Gambar 5.11

Peta Arahkan Pengembangan Wilayah Kabupaten Banyuasin



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Banyuasin memiliki 2 KSN mencakup Kawasan Perkotaan Patungraya Agung (Palembang–Betung–Indralaya–Kayu Agung) dan Taman Nasional Berbak Sembilang dan 2 PKL (Pangkalan Balai dan Sungsang), serta termasuk juga ke dalam KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin dikembangkan terutama dalam sektor perdagangan jasa, kawasan pertanian, perikanan dan pariwisata. Arah pengembangan Kabupaten Banyuasin yaitu, pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mendukung fungsi KSN Patungraya Agung dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di sekitarnya, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik, mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya, dan menjaga Kawasan yang berfungsi lindung. Selain itu, dikembangkan Kawasan Perkotaan Inti Sungsang dalam Metropolitan Patungraya Agung sebagai pusat pengembangan ekonomi skala nasional, pusat kegiatan industri, kawasan peruntukan pengembangan sistem logistik terpadu (multimoda), pusat pelayanan transportasi laut skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan perikanan, dan pusat distribusi logistik.

Kawasan Perkotaan Sekitar dalam Metropolitan Patungraya Agung yang meliputi Betung, Pangkalan Balai, dan Telang juga dikembangkan. Betung sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat permukiman, pusat pelayanan transportasi darat skala nasional dan regional, dan pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, Pangkalan Balai sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan transportasi darat skala regional, pusat permukiman, dan pusat pelayanan kesehatan regional, serta Telang sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengembangan pertanian terpadu, pusat pengembangan perkebunan, pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, dan pusat kegiatan perikanan.

Kabupaten Banyuasin yang juga sebagai bagian dari KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan diarahkan untuk perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati, dan menjaga iklim makro, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana; penerapan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan; pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas; optimalisasi lahan gambut fungsi budidaya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan; pengembangan *food estate* sentra produksi padi, pengembangan kawasan kerbau rawa Pampangan dan Itik Pegagan; melindungi kawasan pesisir dan pantai; menjaga keterpaduan fungsi kawasan di darat dan pesisir; peningkatan kerjasama kawasan perbatasan provinsi, dan pengembangan kawasan pariwisata pesisir (*coastal ecotourism*) berbasis *zero-waste*, terintegrasi dan mandiri energi.

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan ekonomi sebanyak 4 (empat) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 85,46% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 31,25%; 2) Sektor Industri Pengolahan sebesar 25,42%; 3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,60%; 4) Sektor Konstruksi sebesar 13,19%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Banyuasin pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 11) Pembangunan 3 juta rumah.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Banyuasin (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Jalan Tol Kayu Agung-Palembang_Betung sepanjang 111,69 Km.
- 2) Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi bagian dari Trans Sumatera sepanjang 170,7 km.
- 3) Pembangunan Pelabuhan Baru/New Palembang di Tanjung Carat.
- 4) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2026:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 6,36% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,98% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,13%.
- 4) Peningkatan IPM.
- 5) Peningkatan infrastruktur, meliputi jalan mantap provinsi sebesar 84,20%, akses air minum layak Kabupaten Banyuasin sebesar

81,42%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Banyuasin sebesar 61,51%.

- 6) Pengembangan SPAM Regional Palembang-Banyuasin.
- 7) Pembangunan TPST Regional Palembang-Banyuasin.
- 8) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Telang.
- 9) Pengembangan koridor industri Palembang-Banyuasin dengan prioritas: industri kimia, industri energi, industri pengolahan hasil kelapa, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri manufaktur.
- 10) Hilirisasi sawit untuk produk turunan dengan nilai tambah tinggi (*biofuel, fatty acid, fatty alcohol, biofertilizer, green diesel, green jet fuel, dan bioplastik biodegradable*).
- 11) Hilirisasi karet untuk produk lateks, ban, dan produk *value-added rubber* lainnya.
- 12) Hilirisasi komoditas rumput laut untuk asam alginat, kosmetik, farmasi, dan pupuk hayati.
- 13) Hilirisasi mineral tambang yang terintegrasi dengan industri hilir logam.
- 14) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/ peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.
- 15) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat di D.I.R. Air Saleh, D.I.R. Delta Upang, D.I.R. Karang Agung Tengah, D.I.R. Pulau Rimau, D.I.R. Telang I dan II.
- 16) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 17) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 18) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 19) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 20) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 21) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 22) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 23) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung

perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.

- 24) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 25) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 26) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 27) Pengembangan Lokasi Prioritas Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Musi.
- 28) Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Betung-Kenten.
- 29) Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Betung-PLTU MT Sumsel 1.
- 30) Pembangunan infrastruktur sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Kenten-Sungsang-Muntok (Interkoneksi 275 kV Sumatera-Bangka).
- 31) Pengembangan Lokasi Prioritas Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, Kopi, dan Kelapa Cekungan Musi.

- 32) Pengembangan Lokasi Prioritas Kawasan Komoditas Unggulan Banyuasin Ekonomi Biru.
- 33) Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Sungsang.
- 34) Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap.
- 35) Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya.
- 36) Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat.
- 37) Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan.
- 38) Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan.
- 39) Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan.
- 30) Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya Air Tawar, serta pengolahan dan pemasaran ikan di Sungsang.
- 31) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- 32) Pusat pergudangan Tanjung api-api.
- 33) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Berbak Sembilang.
- 34) Peningkatan produksi pertanian padi dan komoditas pangan lainnya melalui pendekatan pengembangan pertanian *holistic close loop model*, pengelolaan dengan *sytem integrated farm management* yang modern dan digital dan penyediaan irigasi dan/atau irigasi presisi/*smart irrigation* sesuai kebutuhan komoditas.
- 35) Optimalisasi industri dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pengolahan produk unggulan daerah.
- 36) Peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia.
- 37) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata.
- 38) Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
- 39) Optimalisasi penurunan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

- 40) Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantong kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*.
- 41) Optimalisasi Iklim investasi dan penanaman modal.
- 42) Pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mendukung fungsi KSN Patungraya Agung dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di sekitarnya.
- 43) Pencegahan dan pengendalian dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya.
- 44) Menjaga kawasan yang berfungsi lindung.
- 45) Melindungi Kawasan pesisir.
- 46) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi.
- 47) Land4lives (Pemberdayaan Masyarakat Terkait Gender).
- 48) Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA) khusus bagi anak miskin, dengan output berupa Sekolah Rakyat Berasrama
- 49) Pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, dengan output berupa penyediaan peralatan digital bagi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- 50) Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrument penyaluran bantuan secara terintegrasi.
- 51) Pendayagunaan Dokter Spesialis
- 52) Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 53) Pemberian bantuan pembangunan rumah Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RKP Tahun 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Pengembangan Kabupaten Banyuasin diarahkan menjadi **pusat pertumbuhan ekonomi dan logistik yang strategis di Sumatera Selatan** dengan fokus pada sektor ekonomi unggulan, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

5.2.3 Kabupaten Ogan Ilir

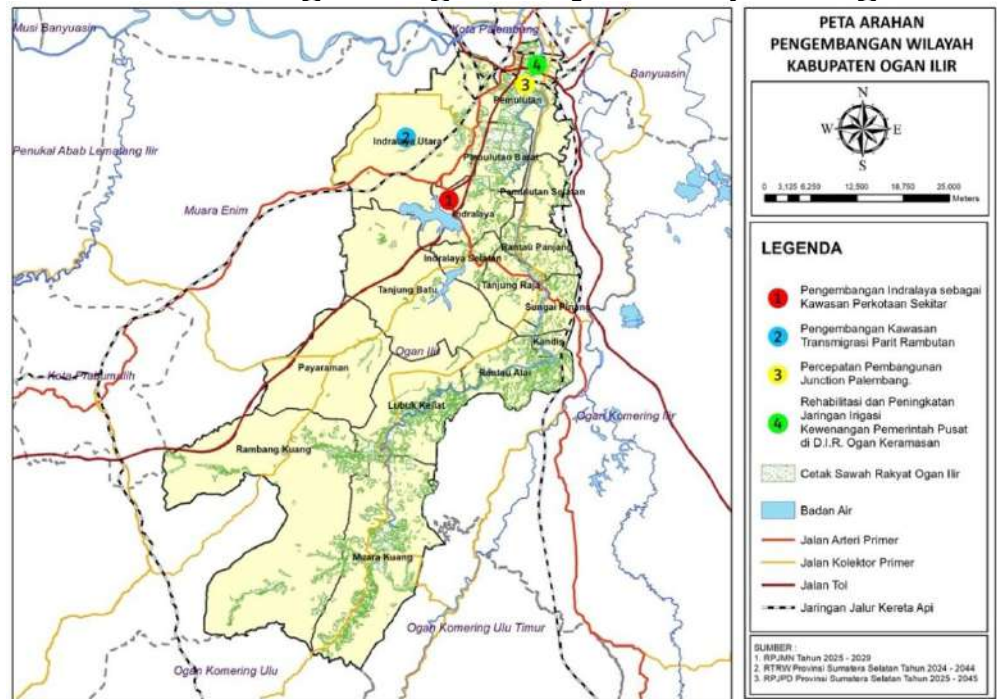
Pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut :

Tabel 5.5
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Ilir

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,81	4,95-5,45	5.00-5,50
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	34,94	36,5179	38,24624
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	2,25	2,27*	2,28*
4	Tingkat Kemiskinan (%)	12,3	10,5-11,0	9,5-10,0
5	Gini Ratio	0,30	0,290-0,292	0,287-0,290
6	Indeks Pembangunan Manusia	72,67	73,62	73,87
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	80.979,57	90.066,16
8	IKLH Daerah	N/A	65,44	65,69
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,65	2,12-2,02	2,01-1,98

Sumber: Capaian 2024 (BPS Prov Sumsel), target 2025 & 2026 (Kesepakatan Pramusrenbang Tahun 2025)

Gambar 5.12
Peta Arahan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Ilir



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Ogan Ilir memiliki 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Indralaya. Kawasan Indralaya dikembangkan sebagai Kawasan Perkotaan Sekitar dalam Metropolitan Patungraya Agung, yang berperan sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan tinggi dan riset skala nasional, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan transportasi nasional dan regional, pusat kegiatan industri dan pusat pelayanan kesehatan regional. Kabupaten Ogan Ilir diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai sentra produksi pangan dan daerah penyangga perkotaan Palembang dan Prabumulih. Komoditi unggulan daerah adalah hortikultura buah-buahan, sayur-sayuran, padi dan ternak sapi.

Berdasarkan Distribusi PDRB Kabupaten Ogan Ilir menurut lapangan usaha tahun 2024, terdapat tiga sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,41%; 2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,46%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 16,62%. Hal ini menggambarkan besarnya pengaruh kegiatan di daerah kota tetangga yaitu Kota Palembang dan Kota Prabumulih.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Ilir pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 11) Pembangunan 3 juta rumah.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Ogan Ilir (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Jalan Tol Samping Indralaya-Muara Enim-Bagian Trans Sumatera (119,1 Km).
- 2) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2026 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,05% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 11,37%, yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 1,98%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 69,46.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi jalan mantap sebesar 80,76%, akses air minum layak sebesar 73,69%, dan akses sanitasi layak sebesar 75,12%.
- 6) Pengembangan sektor perdagangan jasa, kawasan pertanian, perikanan dan pariwisata.
- 7) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan.

- 8) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat di Daerah Irigasi Rawa (DIR) Ogan Keramasan.
- 9) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 10) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 11) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 12) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 13) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 14) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 15) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 16) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 17) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 18) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.

- 19) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 20) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan.
- 21) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan.
- 22) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit,karet,kopi dan kelapa).
- 23) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet dan kelapa).
- 24) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa).
- 25) Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa).
- 26) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa.
- 27) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 28) Pengembangan Indralaya sebagai Kawasan Perkotaan Sekitar.
- 29) Pengembangan Pusat Pendidikan.
- 30) Percepatan Pembangunan *junction* Palembang.
- 31) Pengembangan Daerah Perbatasan Palembang-Ogan Ilir.
- 32) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- 33) Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA) khusus bagi anak miskin, dengan output berupa Sekolah Rakyat Berasrama
- 34) Pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, dengan output berupa penyediaan peralatan digital bagi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- 35) Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrument penyaluran bantuan secara terintegrasi.
- 36) Pendayagunaan Dokter Spesialis

- 37) Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 38) Pemberian bantuan pembangunan rumah Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RKP Tahun 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Ilir diarahkan untuk menjadi **pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, industri, dan jasa yang berkelanjutan**, serta sebagai **daerah penyangga utama Kota Palembang dan Prabumulih**. Dengan arah pengembangan ini, Kabupaten Ogan Ilir diharapkan menjadi **daerah yang maju secara ekonomi, unggul dalam sektor pertanian, kuat dalam infrastruktur dan konektivitas, serta berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan kawasan metropolitan sekitarnya**.

5.2.4 Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut:

Tabel 5.6
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ilir

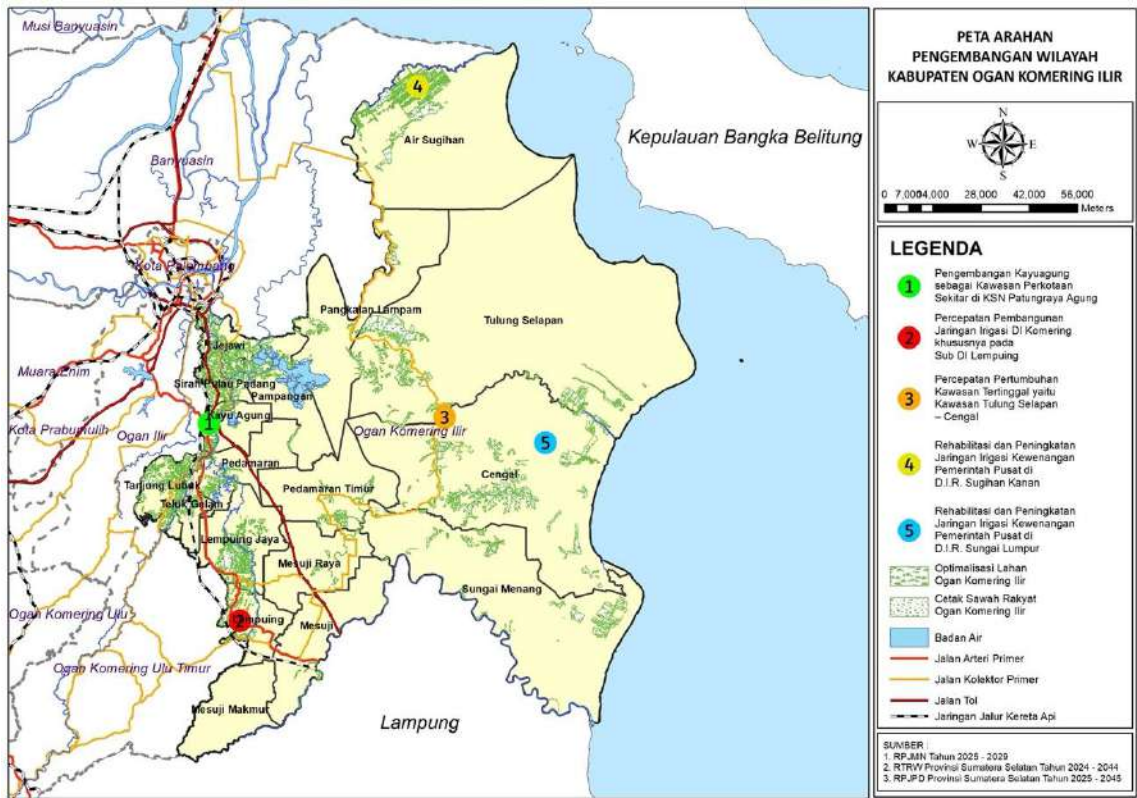
No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	5,25	5,38
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	57,80	51,57	54,24
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	6,89	6,66	6,43
4	Tingkat Kemiskinan (%)	12,08	11,60	10,40
5	Gini Ratio	0,31	0,278	0,273
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,48	71,60	72,20

7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	2.121.264,43	2.354.169,22
8	IKLH Daerah	N/A	69,10	69,36
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,38	3,20	3,05

Sumber: Capaian 2024 (BPS Prov Sumsel), target 2025 & 2026 (Kesepakatan Pramusrenbang Tahun 2025)

Gambar 5.13

Peta Arahan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki 1 (satu) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kayu Agung, 3 (tiga) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Sungai Lumpur, Air Sugihan, dan Tugumulyo, serta juga termasuk ke dalam KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan. Kawasan Kayu Agung dikembangkan sebagai Kawasan Perkotaan Sekitar dalam Metropolitan Patungraya Agung, yang berperan sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa, pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pusat kegiatan industri, dan pusat pelayanan transportasi darat skala regional.

Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai bagian dari KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan diarahkan untuk perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati, dan menjaga iklim makro, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana; penerapan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan; pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas; optimalisasi lahan gambut fungsi budidaya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan; pengembangan *food estate* sentra produksi padi, pengembangan kawasan kerbau rawa Pampangan dan Itik Pegagan; percepatan pertumbuhan kawasan tertinggal yaitu kawasan Tulung Selapan–Cengal; melindungi kawasan pesisir dan pantai; menjaga keterpaduan fungsi kawasan di darat dan pesisir; peningkatan kerjasama kawasan perbatasan provinsi, dan pengembangan kawasan pariwisata pesisir (*coastal ecotourism*) berbasis *zero-waste*, terintegrasi dan mandiri energi.

Dilihat distribusi PDRB, ada sebanyak 4 (empat) sektor dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar pada tahun 2024, yaitu 1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 44,71%; 2) Sektor Industri Pengolahan sebesar 22,09%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 12,22%; dan 4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,09%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 8) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.

- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 11) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (111,69 Km).
- 2) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI Komering.
- 3) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2026 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sekitar 6,19% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 11,93% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,46%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 69,02.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi sebesar 93,27%, akses air minum layak Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 78,41%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 65,54%.
- 6) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat di D.I.R. Sugihan Kanan dan D.I.R. Sungai Lumpur
- 7) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
- 8) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan
- 9) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi)
- 10) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
- 11) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
- 12) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura

- 13) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
- 14) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
- 15) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
- 16) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 17) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 18) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering
- 19) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering
- 20) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, dan kelapa).

- 21) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet dan kelapa).
- 22) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa).
- 23) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa).
- 24) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa.
- 25) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 26) Peningkatan produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan menuju kedaulatan pangan.
- 27) percepatan pertumbuhan kawasan tertinggal yaitu kawasan Tulung Selapan–Cengal di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 28) Melindungi kawasan pesisir dan pantai.
- 29) Melindungi Kawasan lindung gambut.
- 30) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- 31) Penurunan *Stunting*.
- 32) Pengembangan Kayuagung sebagai Kawasan Perkotaan Sekitar.
- 33) Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA) khusus bagi anak miskin, dengan output berupa Sekolah Rakyat Berasrama
- 34) Pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, dengan output berupa penyediaan peralatan digital bagi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- 35) Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrument penyaluran bantuan secara terintegrasi.
- 36) Pendayagunaan Dokter Spesialis
- 37) Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 38) Pemberian bantuan pembangunan rumah Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RKP Tahun 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di

Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ilir diarahkan untuk menjadi **sentra produksi pangan dan perkebunan berkelanjutan, kawasan industri berbasis hasil pertanian dan perkebunan, serta pusat perdagangan dan jasa di wilayah pesisir timur Sumatera Selatan**. Secara keseluruhan, Kabupaten Ogan Komering Ilir diarahkan menjadi **wilayah yang maju di sektor pertanian, industri, dan perdagangan berbasis sumber daya alam berkelanjutan, serta memiliki ketahanan lingkungan yang kuat terhadap perubahan iklim dan bencana alam**.

5.2.5 Kabupaten Musi Banyuasin

Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

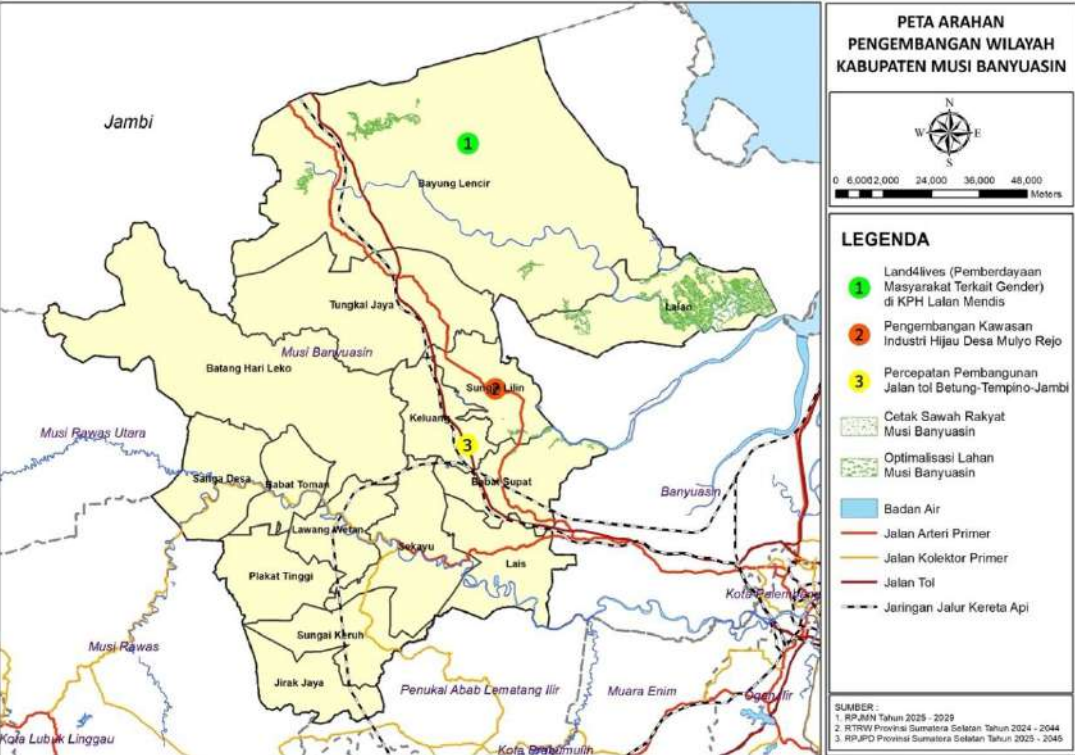
Tabel 5.7

Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,94	4,5-5,0	5,0-5,2
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	142,14	145,00-159,00	160,00-167,00
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	13,69	13,48*	13,27*
4	Tingkat Kemiskinan (%)	12,88	12,7-12,8	12,0-12,5
5	Gini Ratio	0,31	0,324	0,319
6	Indeks Pembangunan Manusia	72,27	72,67	73,07
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	1.828.335,80	2.012.452,45
8	IKLH Daerah	N/A	64,44	64,69
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,13	2,08	2,03

Sumber: Capaian 2024 (BPS Prov Sumsel), target 2025 & 2026 (Kesepakatan Pramusrenbang Tahun 2025)

Gambar 5.14
Peta Arahlan Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 1 KSN (Taman Nasional Berbak Sembilang), 1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) (Sekayu), dan 3 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) (Bayung Lencir, Sungai Lilin, dan Babat Toman). Arah pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu, pengembangan kawasan industri hijau desa Mulyo Rejo Kabupaten Musi Banyuasin, pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas, pengembangan *food estate* sentra produksi padi, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik, mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya, serta menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

Dilihat distribusi PDRB, ada sebanyak 5 (lima) sektor dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar pada tahun 2024 yaitu 1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 49,79%, 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,09 %, 3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 11,92%, 4) Sektor Konstruksi sebesar 8,20% dan 5) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,90%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- Jalan Tol Betung (SP.Sekayu)-Tempino-Jambi-Bagian Trans Sumatera ((170,7 Km).
- Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2026 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,10% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 14,08%.
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,06%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 69,58%.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 82,12%, akses air minum layak Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 86,11%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 79,03%.
- 6) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 7) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.

- 8) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 9) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 10) Program penuntasan TBC.
- 11) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 12) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 13) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 14) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 15) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 16) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 17) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 18) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 19) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 20) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.

- 21) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 22) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi.
- 23) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada DAS Musi.
- 24) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, dan kelapa).
- 25) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet dan kelapa).
- 26) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa).
- 27) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa).
- 28) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa.
- 29) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 30) Peningkatan akses energi.
- 31) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir serta longsor.
- 32) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Berbak Sembilang.
- 33) Peningkatan produksi pertanian padi dan komoditas pangan lainnya melalui pendekatan pengembangan pertanian *holistic close loop model*, pengelolaan dengan *system integrated farm management* yang modern dan digital, dan penyediaan irigasi dan/atau irigasi presisi/*smart irrigation* sesuai kebutuhan komoditas.
- 34) Optimalisasi industri dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pengolahan produk unggulan daerah.
- 35) Peningkatan daya saing dan kualitas SDM.
- 36) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata

- 37) Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
- 38) Optimalisasi penurunan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat
- 39) Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantong kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*.
- 40) Optimalisasi Iklim investasi dan penanaman modal.
- 41) Pengembangan kawasan industri hijau Desa Mulyo Rejo.
- 42) Pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas.
- 43) *Land4lives* (Pemberdayaan Masyarakat Terkait Gender).
- 44) Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA) khusus bagi anak miskin, dengan output berupa Sekolah Rakyat Berasrama
- 45) Pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, dengan output berupa penyediaan peralatan digital bagi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- 46) Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrument penyaluran bantuan secara terintegrasi.
- 47) Pendayagunaan Dokter Spesialis
- 48) Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 49) Pemberian bantuan pembangunan rumah Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RKP 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Musi Banyuasin diarahkan untuk menjadi **pusat industri hijau dan energi berkelanjutan berbasis sumber daya alam, serta sentra produksi pertanian dan perkebunan berdaya saing tinggi di Sumatera Selatan**. Dengan arah pengembangan ini, Kabupaten Musi Banyuasin diposisikan sebagai **kawasan industri hijau dan energi terbarukan yang berorientasi pada keberlanjutan, pertanian maju berbasis teknologi, serta pusat konektivitas dan infrastruktur strategis di Sumatera Selatan**.

5.2.6 Kota Lubuk Linggau

Pembangunan di Kota Lubuk Linggau diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kota Lubuk Linggau sebagai berikut:

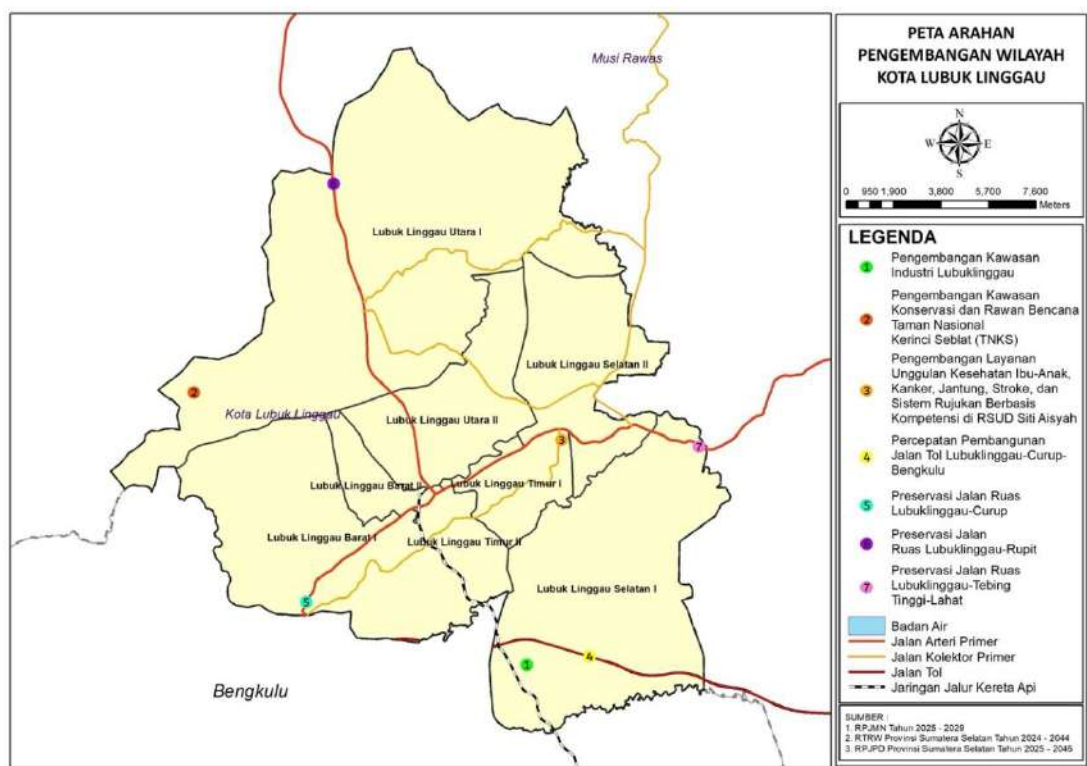
Tabel 5.8
Capaian dan Target Indikator Makro Kota Lubuk Linggau

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,62	4,5-5,0	5,0-5,5
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	35,43	40,36507	45,10414
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	1,29	1,30*	1,30*
4	Tingkat Kemiskinan (%)	11,14	10,2-10,7	9,7-10,2
5	Gini Ratio	0,35	0,332-0,350	0,315-0,345
6	Indeks Pembangunan Manusia	78,98	79,28	79,57
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	21.780,11	24.718,70
8	IKLH Daerah	N/A	68,74	68,99
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,29	4,62-5,30	4,25-5,10

Sumber: Capaian 2024 (BPS Prov Sumsel), target 2025 & 2026 (Kesepakatan Pramusrenbang Tahun 2025)

Gambar 5.15

Peta Arahkan Pengembangan Wilayah Kota Lubuk Linggau



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kota Lubuk Linggau memiliki 1 KSN Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), 1 PKW (Lubuklinggau). Arah pengembangan Kota Lubuk Linggau yaitu, pengembangan Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau yang dapat mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang, pengembangan kawasan yang mendukung PKW Lubuk Linggau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya, peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan Kawasan serta pelayanan publik; menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; serta peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.

Berdasarkan Distribusi PDRB, sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 67,00% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 23,67%, 2) Sektor Konstruksi sebesar 21,09%; 3) Sektor Real Estat sebesar 8,58%; 4) Sektor Industri

Pengolahan sebesar 7,16%; 5) Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,50%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kota Lubuk Linggau pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 8) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.

Arahan proyek strategis lainnya di Kota Lubuk Linggau (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu terkait pembangunan Jalan Tol Lubuklinggau-Curup-Bengkulu yang merupakan bagian dari Trans Sumatera sepanjang 94,9 km.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kota Lubuk Linggau pada tahun 2026 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sekitar 5,39% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 11,70%
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5,26%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 76,80.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 83,33%, akses air minum layak sebesar 97,18%, akses sanitasi sebesar 86,84%.
- 6) Penyusunan *masterplan* penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.
- 7) Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau.

- 8) Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
- 9) Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.
- 10) Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Lubuklinggau dalam Progran Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
- 11) Pengembangan SPAM Perkotaan Lubuklinggau.
- 12) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau (PHTC).
- 13) Preservasi jalan ruas Lubuklinggau-Tebing Tinggi-Lahat, Lubuklinggau-Rupit, Lubuklinggau-Curup.
- 14) Pengembangan kota agropolitan Lubuklinggau.
- 15) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
- 16) Pengembangan destinasi wisata.
- 17) Pengembangan Kawasan Industri Lubuklinggau.
- 18) Pengembangan Pusat Pendidikan Perkotaan dan Kesehatan.
- 19) Pengembangan konektivitas wilayah.
- 20) Pemenuhan amenities perkotaan (antara lain ruang terbuka hijau, ruang terbuka publik, jalur pedestrian, *landmark* kota).
- 21) Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan perkotaan.
- 22) Optimalisasi kerjasama antar kabupaten/kota.
- 23) Penguatan promosi pariwisata.
- 24) *Scaling-up* UMKM dan wirausaha muda.
- 25) Optimalisasi investasi sektor swasta.
- 26) Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA) khusus bagi anak miskin, dengan output berupa Sekolah Rakyat Berasrama
- 27) Pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, dengan output berupa penyediaan peralatan digital bagi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- 28) Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrument penyaluran bantuan secara terintegrasi.
- 29) Pendayagunaan Dokter Spesialis

- 30) Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 31) Pemberian bantuan pembangunan rumah Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RKP 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kota Lubuk Linggau diarahkan untuk menjadi **Pusat Perdagangan, Jasa, dan Konektivitas Regional Berbasis Perkotaan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan di Sumatera Selatan.**

5.2.7 Kabupaten Musi Rawas

Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut:

Tabel 5.9
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,95	5,3	5 – 6
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	61,86	62,871	65,592
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	3,76	3,76*	3,77*
4	Tingkat Kemiskinan (%)	13,44	10,85 - 11,90	9,9
5	Gini Ratio	0,29	0,256	0,252
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,21	71,35	72,4
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	654.108,15	710.739,54
8	IKLH Daerah	N/A	71,14	71,40

Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi, Kabupaten Musi Rawas harus melakukan penanganan untuk mengatasi kemiskinan.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Rawas pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 11) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Musi Rawas (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Jalan Tol Betung (SP.Sekayu)-Tempino-Jambi-Bagian Trans Sumatera ((170,7 Km).
- 2) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2026 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 4,85% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 12,30%.
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 1,84%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 69,40.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi saat ini sebesar 95,87%, akses air minum layak Kabupaten Musi Rawas sebesar 91,39%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Musi Rawas sebesar 70,98%.

- 6) Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan Musi Hulu.
- 7) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat di Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo dan Daerah Irigasi Air Lakitan.
- 8) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 9) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 10) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 11) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 12) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 13) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 14) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 15) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.

- 16) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 17) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* DAS Musi.
- 18) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada DAS Musi.
- 19) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 20) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 21) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 22) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 23) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa.
- 24) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 25) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci Seblat.
- 26) Percepatan pembangunan Jalan Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu.
- 27) Mendorong realisasi investasi pada sektor rill terutama yang berfokus pada industri peningkatan nilai tambah dari sektor unggulan daerah (pertanian/perkebunan/ pertambangan).
- 28) Menyusun strategi diversifikasi ekonomi dalam rangka peningkatan inklusivitas dan keberlanjutan ekonomi ke depan.
- 29) Pemerataan jumlah fasilitas sarana dan prasarana layanan kesehatan terutama peningkatan jumlah faskes tingkat I.
- 30) Pemerataan kualitas pelayanan dasar (kesehatan dan Pendidikan) khususnya melalui penguatan kapasitas SDM baik untuk tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik serta standarisasi sarana prasarana antar sekolah dan fasilitas kesehatan.
- 31) Pemanfaatan data Regsosek sebagai upaya peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial ke depan.

- 32) Peningkatan kerjasama perdagangan antardaerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu.
- 33) Pengembangan konektivitas jalan intra kecamatan dan desa.
- 34) Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA) khusus bagi anak miskin, dengan output berupa Sekolah Rakyat Berasrama
- 35) Pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, dengan output berupa penyediaan peralatan digital bagi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- 36) Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrument penyaluran bantuan secara terintegrasi.
- 37) Pendayagunaan Dokter Spesialis
- 38) Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 39) Pemberian bantuan pembangunan rumah Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RKP 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Pengembangan Kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk menjadi **pusat pertanian dan perkebunan yang maju, berkelanjutan, serta terintegrasi dengan agroindustri dan konektivitas regional di Sumatera Selatan.**

5.2.8 Kabupaten Musi Rawas Utara

Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

Tabel 5.10
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Utara

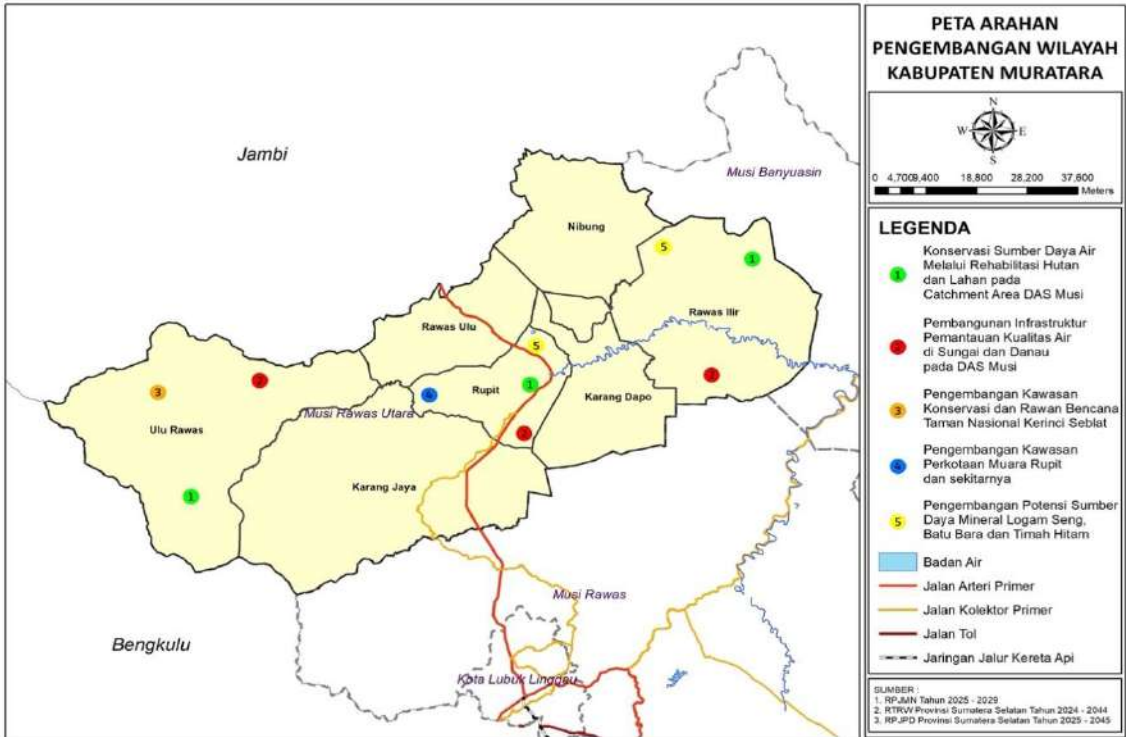
No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,52	4,3-4,6	4,4-4,6

2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	48,87	51,36267	53,90924
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	1,43	1,36*	1,29*
4	Tingkat Kemiskinan (%)	17,38	16,00-17,00	15,70-16,00
5	Gini Ratio	0,25	0,290-0,286	0,286-0,282
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,45	71	71,5
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	639.336,12	699.233,51
8	IKLH Daerah	N/A	71,37	71,63
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	3,84-4,5	3,8-4,6

Sumber: Capaian 2024 (BPS Prov Sumsel), target 2025 & 2026 (Kesepakatan Pramusrenbang Tahun 2025)

Gambar 5.17

Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Pengembangan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai daerah otonomi baru memiliki 1 KSN (Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat), 1 PKL (Muara Rupit). Arah pengembangan

Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu, pengembangan desa tertinggal, pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, batu bara, dan timah hitam, peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah, menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; dan peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.

Berdasarkan Distribusi PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara menurut lapangan usaha tahun 2024, terdapat 2 (dua) sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 47,77% dan 2) Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 21,54%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Rawas Utara pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2026 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,34% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 16,33%.
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,68%.

- 4) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 98,83%, akses air minum layak sebesar 88,41%, dan akses sanitasi layak sebesar 69,95%.
- 6) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
- 7) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
- 8) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
- 9) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
- 10) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
- 11) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
- 12) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
- 13) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

- 14) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
- 15) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* DAS Musi
- 16) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada DAS Musi
- 17) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 18) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 19) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 20) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa)
- 21) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa
- 22) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
- 23) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci Seblat.
- 24) Menjadi indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
- 25) Pengembangan kawasan perkotaan Muara Rupit dan sekitarnya.
- 26) Pengembangan desa tertinggal.
- 27) Pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, batu bara dan timah hitam
- 28) Peningkatan kerjasama antarkawasan perbatasan
- 29) Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan
- 30) Perluasan akses internet dan digitalisasi
- 31) Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan (pertanian/Perkebunan/perikanan/peternakan *high value*)
- 32) Dukungan promosi dan kemudahan investasi penyediaan
- 33) Implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas, seperti pelatihan modal keterampilan, usaha, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

- 34) Mengembangkan program pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar, terutama bagi pemuda dan lulusan sekolah
- 35) Mengembangkan potensi pariwisata dengan mempromosikan objek wisata alam dan budaya, serta membangun infrastruktur pendukung penginapan dan aksesibilitas
- 36) Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA) khusus bagi anak miskin, dengan output berupa Sekolah Rakyat Berasrama
- 37) Pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, dengan output berupa penyediaan peralatan digital bagi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- 38) Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrument penyaluran bantuan secara terintegrasi.
- 39) Pendayagunaan Dokter Spesialis
- 40) Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 41) Pemberian bantuan pembangunan rumah Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya.

Berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RKP 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Pengembangan Kabupaten Musi Rawas Utara diarahkan untuk menjadi **pusat pertanian berkelanjutan, pertambangan yang terintegrasi, serta ekonomi berbasis potensi lokal yang inklusif dan berkelanjutan di Sumatera Selatan.**

5.2.9 Kota Pagar Alam

Pembangunan di Kota Pagar Alam diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kota Pagar Alam sebagai berikut:

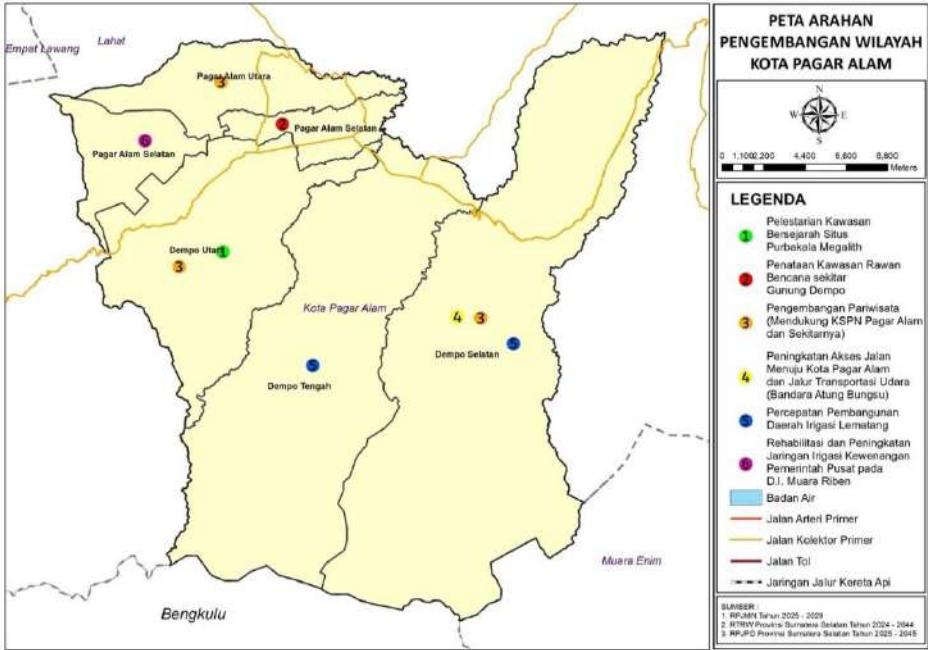
Tabel 5.11
Capaian dan Target Indikator Makro Kota Pagar Alam

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,65	5,89

2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	25,54	23,43	24,03
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	0,56	0,55*	0,53*
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,18	7,48 - 7,60	7,00 - 7,23
5	Gini Ratio	0,28	0,278	0,273
6	Indeks Pembangunan Manusia	74,00	70,91	71,40
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	51.487,98	56.982,06
8	IKLH Daerah	N/A	72,02	72,27
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,34	3,41	3,34

Sumber: Capaian 2024 (BPS Prov Sumsel), target 2025 & 2026 (Kesepakatan Pramusrenbang Tahun 2025)

Gambar 5.18
Peta Arahkan Pengembangan Wilayah Kota Pagar Alam



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kota Pagar Alam merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Arahkan pengembangan Kota Pagar Alam yaitu, pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith, pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu, pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan, menjaga dan

melestarikan kawasan yang berfungsi lindung, serta sebagai pengembangan Kawasan pariwisata dataran tinggi karena dikelilingi oleh bentang alam pegunungan dan daerah pertanian yang indah, sehingga potensi pengembangan pariwisata sangat menjanjikan.

Berdasarkan Distribusi PDRB, sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 75,28% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,84%; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,61%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 15,33%; 4) Sektor Jasa Pendidikan sebesar 10,12%; 5) Sektor Real Estat sebesar 5,38%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kota Pagar Alam pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kota Pagar Alam (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu Bendungan Tiga Dihaji (25 ribu Hektar)

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kota Pagar Alam pada tahun 2026, antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,89% melalui sektor unggulan.

- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,14% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,34%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 71,40.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 100%, akses air minum layak sebesar 89,81%, akses sanitasi sebesar 53,94%.
- 6) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah pusat pada D.I. Muara Riben.
- 7) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 8) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 9) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 10) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 11) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, Peternakan dan hortikultura.
- 12) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi and revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 13) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas' mitigasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan Infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 14) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan Kelembagaan koperasi dan korporasi

petani, pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani, perluasan akses asuransi usaha tani: peningkatan Infrastruktur logistic dan perluasan akses layanan system resi Gudang, pengelolaan penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

- 15) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 16) Pengembangan pariwisata (mendukung KSPN Pagar Alam dan sekitarnya).
- 17) Peningkatan ekonomi kreatif serta UMKM dengan skema kerja sama swasta dan komunitas lokal.
- 18) Pelestarian Kawasan Bersejarah Situs Purbakala Megalith.
- 19) Peningkatan akses jalan menuju Kota Pagar Alam dan jalur transportasi udara (Bandara Atung Bungsu).
- 20) Peningkatan produktivitas dan hilirisasi hasil perkebunan dan hortikultura.
- 21) Penataan Kawasan Rawan Bencana sekitar Gunung Dempo.
Pengembangan Pusat Kesehatan Perkotaan.
- 22) Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan.
- 23) Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan.
- 24) Menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung.
- 25) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan, pariwisata, serta perdagangan.
- 26) Peningkatan daya saing dan kualitas SDM.
- 27) Beasiswa daerah untuk mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
- 28) Optimalisasi pemberdayaan sosial, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah.
- 29) Pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan.
- 30) Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA) khusus bagi anak miskin, dengan output berupa Sekolah Rakyat Berasrama

- 31) Pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, dengan output berupa penyediaan peralatan digital bagi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- 32) Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrument penyaluran bantuan secara terintegrasi.
- 33) Pendayagunaan Dokter Spesialis
- 34) Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 35) Pemberian bantuan pembangunan rumah Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RKP 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Pengembangan Kota Pagar Alam diarahkan untuk menjadi **pusat pariwisata dataran tinggi berbasis sejarah dan alam, sentra hortikultura berkelanjutan, serta kota hijau yang mendukung ekonomi kreatif dan inklusif di Sumatera Selatan.**

5.2.10 Kabupaten Lahat

Pembangunan di Kabupaten Lahat diharapkan untuk mendukung capaian makro provinsi sumatera selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupten Lahat sebagai berikut :

Tabel 5.12
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Lahat

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11	7,91	8,25
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	66,58	63,27	66,83
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	4,43	4,36*	4,30*
4	Tingkat Kemiskinan (%)	14,14	13,18 - 13,99	12
5	Gini Ratio	0,31	0,32	0,315
6	Indeks Pembangunan Manusia	72,83	73,33	73,78
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	187.024,11	203.554,28

terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 52,78%; 2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,97%; 3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,88%; 4) Sektor Konstruksi sebesar 6,41%; 5) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,62%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Lahat pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Lahat (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (111,69 Km Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.
- 2) Kereta Api Logistik Lahat – Kertapati

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Lahat pada tahun 2026 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 8,25% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 13,82% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,71%

- 4) Peningkatan IPM menjadi 69,57.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 88,22%, akses air minum layak Kabupaten Lahat sebesar 84,86%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Lahat sebesar 69,27%.
- 6) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 7) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 8) Peningkatan produktivitas perternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 9) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 10) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan dan hortikultura.
- 11) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi and revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 12) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/ benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas' mitigasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan Infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 13) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan Kelembagaan koperasi dan korporasi petani: pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani: perluasan akses asuransi usaha tani: peningkatan Infrastruktur logistic dan perluasan akses layanan sistem resi gudang. pengelokaan penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 14) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal,

peningkatan produktivitas petani serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.

- 15) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kikim.
- 16) Pengembangan gasifikasi batubara.
- 17) Pembangunan infrastruktur PLTA Tanjungsakti.
- 18) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 19) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 20) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 21) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 22) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi, dan kelapa.
- 23) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 24) Melindungi Kawasan konservasi.
- 25) Pengembangan Pariwisata Megalith dan Pariwisata Alam.
- 26) Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup (Galian C) dan Pasca Tambang.
- 27) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana longsor.
- 28) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan peningkatan daya tarik pariwisata di Kabupaten Lahat melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas lokal.
- 29) Pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan sebagai upaya peningkatan ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan.
- 30) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata.
- 31) Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan tenaga Kesehatan.
- 32) Mendorong efisiensi iklim investasi di Kabupaten Lahat.
- 33) Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA) khusus bagi anak miskin, dengan output berupa Sekolah Rakyat Berasrama

- 34) Pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, dengan output berupa penyediaan peralatan digital bagi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- 35) Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrument penyaluran bantuan secara terintegrasi.
- 36) Pendayagunaan Dokter Spesialis
- 37) Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 38) Pemberian bantuan pembangunan rumah Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RKP 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Lahat diarahkan untuk menjadi **pusat pengembangan agribisnis, energi terbarukan, dan pariwisata berbasis sejarah dan alam, dengan infrastruktur modern serta lingkungan yang berkelanjutan.**

5.2.11 Kabupaten Empat Lawang

Pembangunan di Kabupaten Empat Lawang diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut:

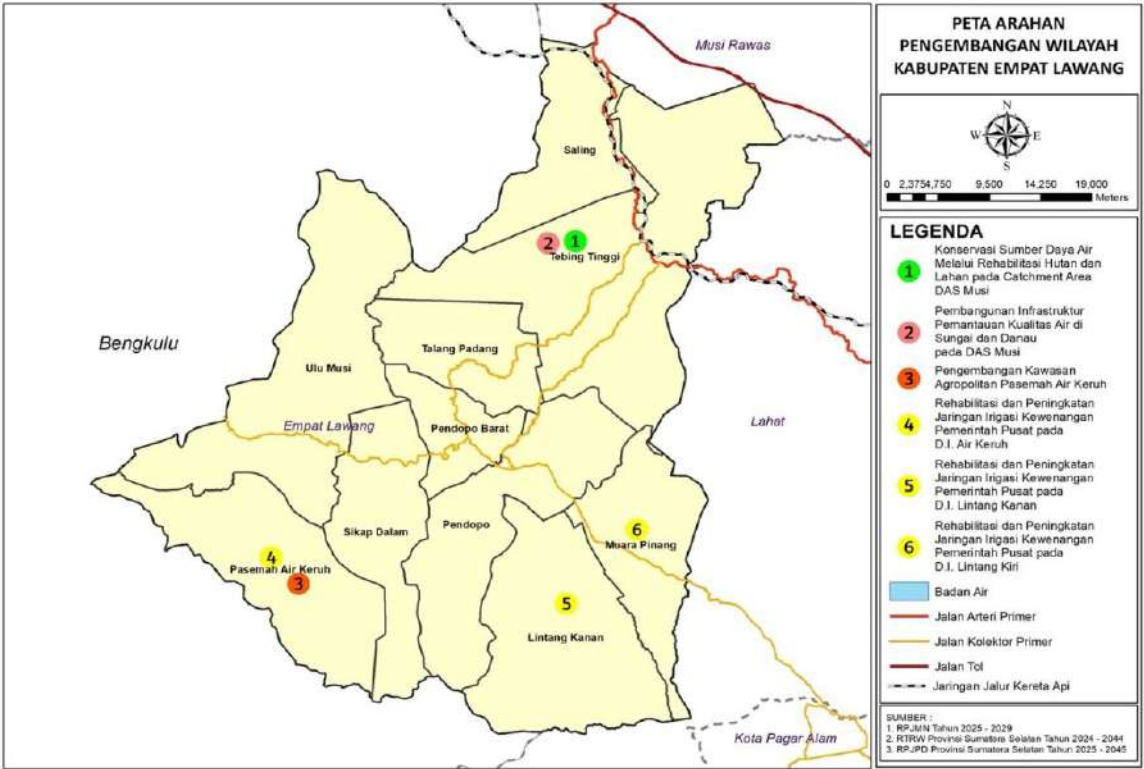
Tabel 5.13
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Empat Lawang

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,44	4,95 - 5,00	5,00 - 5,20
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	19,45	17,67	18,14
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	0,99	0,98*	0,96*
4	Tingkat Kemiskinan (%)	10,78	10,25 - 10,92	9,5 - 10,73
5	Gini Ratio	0,40	0,318	0,313

6	Indeks Pembangunan Manusia	69,63	69,80	70,00
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	183.631,33	199.855,46
8	IKLH Daerah	N/A	66,67	66,92
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,84	2,80 - 3,20	2,70 - 3,00

Sumber: Capaian 2024 (BPS Prov Sumsel), target 2025 & 2026 (Kesepakatan Pramusrenbang Tahun 2025)

Gambar 5.20
Peta Arahan Pengembangan Wilayah Kabupaten Empat Lawang



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Empat Lawang memiliki 2 PKL (Tebing Tinggi dan Ulu Musi). Arahan pengembangan Kabupaten Empat Lawang yaitu, pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perdagangan jasa dan pariwisata, diarahkan sebagai pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan, pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu, Pengembangan kawasan agropolitan Pasemah Air Keruh, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk

mendukung fungsi kawasan; dan menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung.

Berdasarkan Distribusi PDRB Kabupaten Empat Lawang menurut lapangan usaha tahun 2024, terdapat tiga sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan *share* sebesar 34,04%, 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparaasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 22,61%, 3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 12,21%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Empat Lawang pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Empat Lawang (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Jalan Tol Betung (SP.Sekayu)-Tempino-Jambi-Bagian Trans Sumatera ((170,7 Km).
- 2) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2026 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,92% melalui sektor unggulan

- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 11,10% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,31%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 67,14.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi saat ini sebesar 74,36%, akses air minum layak sebesar 69,33%, dan akses sanitasi layak sebesar 39,84%.
- 6) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah pusat pada D.I. Air Keruh, D.I. Lintang Kanan, dan D.I. Lintang Kiri.
- 7) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah daerah.
- 8) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 9) Peningkatan produktivitas perternakan/panagn hewani (termasuk pengembangan Kawasan Peternakan).
- 10) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 11) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, Peternakan dan hortikultura.
- 12) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi and revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 13) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/ benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas' mitigasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan Infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 14) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen

- poktan/gapoktan, penguatan Kelembagaan koperasi dan korporasi petani, pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani, perluasan akses asuransi usaha tani: peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang, pengelolaan penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 15) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
 - 16) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi.
 - 17) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada DAS Musi.
 - 18) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
 - 19) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
 - 20) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
 - 21) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
 - 22) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
 - 23) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
 - 24) Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC).
 - 25) Pengembangan destinasi wisata.
 - 26) Pengembangan Kawasan Agropolitan Pasemah Air Keruh.
 - 27) Peningkatan penanganan dan pelayanan kesehatan melalui pemenuhan fasilitas kesehatan khususnya fasilitas kesehatan tingkat I.
 - 28) Peningkatan kapasitas pengelolaan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintah daerah terutama dalam mendukung percepatan pelayanan publik berbasis digital.
 - 29) Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM penanggulangan bencana.

- 30) Inklusivitas pembangunan di antara berbagai kelas ekonomi.
- 31) Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA) khusus bagi anak miskin, dengan output berupa Sekolah Rakyat Berasrama
- 32) Pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, dengan output berupa penyediaan peralatan digital bagi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- 33) Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrument penyaluran bantuan secara terintegrasi.
- 34) Pendayagunaan Dokter Spesialis
- 35) Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 36) Pemberian bantuan pembangunan rumah Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya.

Berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RKP 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Empat Lawang diarahkan untuk menjadi **pusat pengembangan pertanian terpadu, agribisnis berkelanjutan, dan ekowisata berbasis sumber daya alam, dengan dukungan infrastruktur modern serta pelayanan publik berbasis digital.**

5.2.12 Kabupaten Muara Enim

Pembangunan di Kabupaten Muara Enim diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

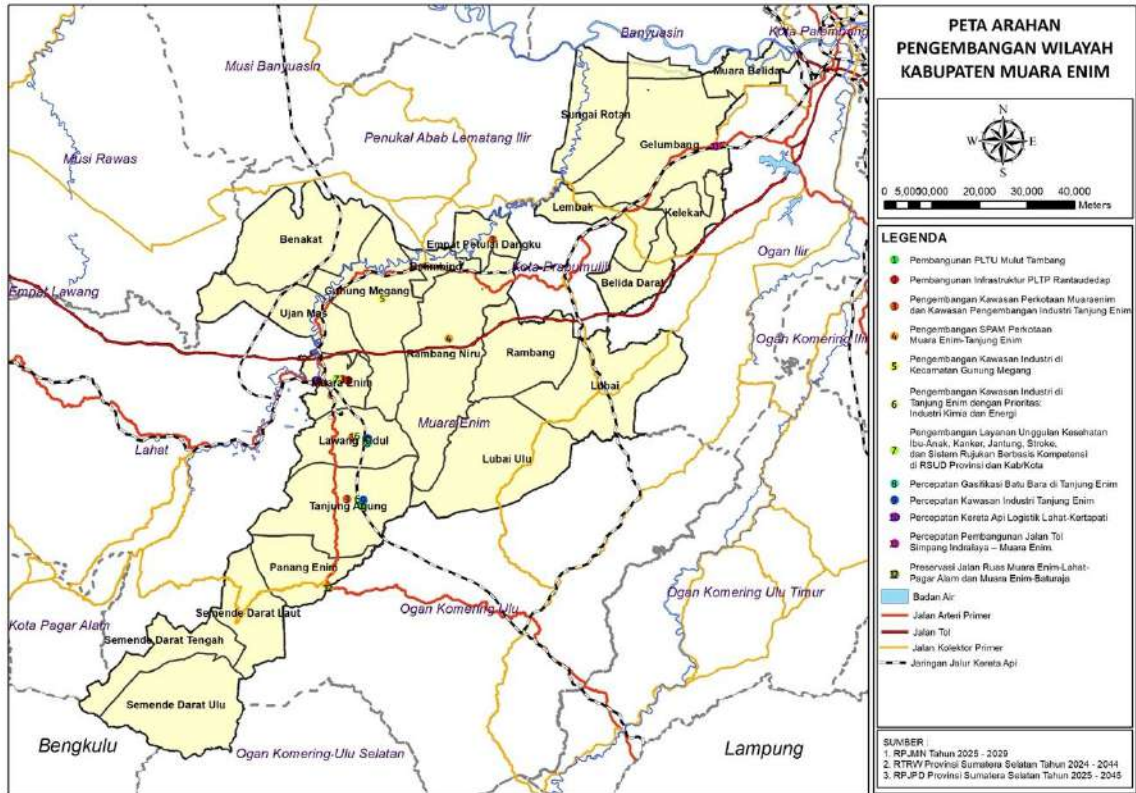
Tabel 5.14
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Muara Enim

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,89	9,62	10,03
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	182,11	202,84	210,00

3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	17,24	18,04*	18,84*
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,79	9,49	9,19
5	Gini Ratio	0,31	0,305	0,30
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,10	71,96	70,61
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	8.005.066,77	8.702.814,79
8	IKLH Daerah	N/A	66,74	67,00
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,09	3,76	3,70 - 3,76

Sumber: Capaian 2024 (BPS Prov Sumsel), target 2025 & 2026 (Kesepakatan Pramusrenbang Tahun 2025)

Gambar 5.21
Peta Arahan Pengembangan Wilayah Kabupaten Muara Enim



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Muara Enim memiliki 1 PKW, yaitu Muara Enim. Arah pengembangan Kabupaten Muara Enim yaitu, pusat industri pertambangan batubara dan turunannya, sebagai lumbung energi, pengembangan kawasan perkotaan Muara Enim untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan disekitarnya, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan industri di kecamatan Gunung Megang, Pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan mendukung keberlanjutan energi nasional, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan, dan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan.

Dilihat distribusi PDRB, sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 94,73% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 69,59%; 2) Sektor Industri Pengolahan sebesar 9,7%; 3) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,26%; 4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,87%; dan 5) Sektor Konstruksi sebesar 3,31%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Muara Enim pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 11) Pembangunan 3 juta rumah.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Muara Enim (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Kawasan Industri Tanjung Enim.

- 2) Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim bagian dari Trans Sumatera sepanjang 119 km.
- 3) Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati.
- 4) Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2026 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 10,03% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 10,26%
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,65%.
- 4) Peningkatan IPM sebesar 70,61.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan Provinsi Sumatera Selatan saat ini jalan mantap sebesar 93,52%, akses air minum layak sebesar 91,18%, dan akses sanitasi layak sebesar 86,54%.
- 6) Pengembangan Kawasan Perkotaan Muaraenim dan Kawasan Pengembangan Industri Tanjung Enim.
- 7) Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Muara Enim, antara lain melalui:
 - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.
 - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau.
 - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
 - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.
- 8) Pengembangan industri hilirisasi/industrialisasi di Tanjung Enim.
- 9) Hilirisasi hasil tambang batubara, termasuk produk-produk turunan, seperti briket, gasifikasi batubara, dan karbon aktif.
- 10) Pengembangan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, gen z, dan gen milenial di Kawasan Perkotaan Muara Enim (PHTC).
- 11) Pengembangan SPAM Perkotaan Muara Enim-Tanjung Enim.
- 12) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD

Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim (PHTC).

- 13) Preservasi jalan ruas Muara Enim-Lahat-Pagar Alam dan Muara Enim-Baturaja.
- 14) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan /peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.
- 15) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 16) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intesifikasi).
- 17) Peningkatan produktivitas perternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan Kawasan Peternakan).
- 18) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 19) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, Peternakan dan hortikultura.
- 20) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi and revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 21) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/ benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas' mitigasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 22) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan Kelembagaan koperasi dan korporasi petani, pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani, perluasan akses asuransi usaha tani: peningkatan Infrastruktur logistic dan perluasan akses layanan system resi Gudang, pengelolaan penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.

- 23) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 24) Pembangunan infrastruktur PLTP Rantau Dedap.
- 25) Pembangunan PLTU Mulut Tambang.
- 26) Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Muaraenim-Tarahan-Kalianda.
- 27) Pembangunan infrastruktur sistem jaringan transmisi listrik 275 kV Lumutbalai-Muaraenim-Gumawang-GITET 275 kV Lampung 1.
- 28) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 29) Pengembangan dan perlindungan Kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 30) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 31) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industry (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 32) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
- 33) Pengembang produksi bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 34) Indikasi daerah prioritas intervensi program Makan Bergizi Gratis, bantuan pangan, dan penanganan rawan pangan (PHTC).
- 35) Pengendalian kualitas lingkungan hidup.
- 36) Pengembangan destinasi pariwisata.
- 37) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- 38) Penurunan *stunting*.
- 39) Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gunung Megang.
- 40) pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional.
- 41) peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan.

- 42) Optimalisasi verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui pemanfaatan data regsosek.
- 43) Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur *high value economy & industry*.
- 44) Penguatan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- 45) Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan tenaga kesehatan.
- 46) Peningkatan pengetahuan sumber daya manusia terkait dengan mitigasi bencana.
- 47) Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA) khusus bagi anak miskin, dengan output berupa Sekolah Rakyat Berasrama
- 48) Pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, dengan output berupa penyediaan peralatan digital bagi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- 49) Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrument penyaluran bantuan secara terintegrasi.
- 50) Pendayagunaan Dokter Spesialis
- 51) Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 52) Pemberian bantuan pembangunan rumah Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Muara Enim diarahkan untuk menjadi **pusat pengembangan industri berbasis energi dan sumber daya alam, dengan fokus pada hilirisasi sektor pertambangan, penguatan infrastruktur, serta pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata.**

5.2.13 Kota Prabumulih

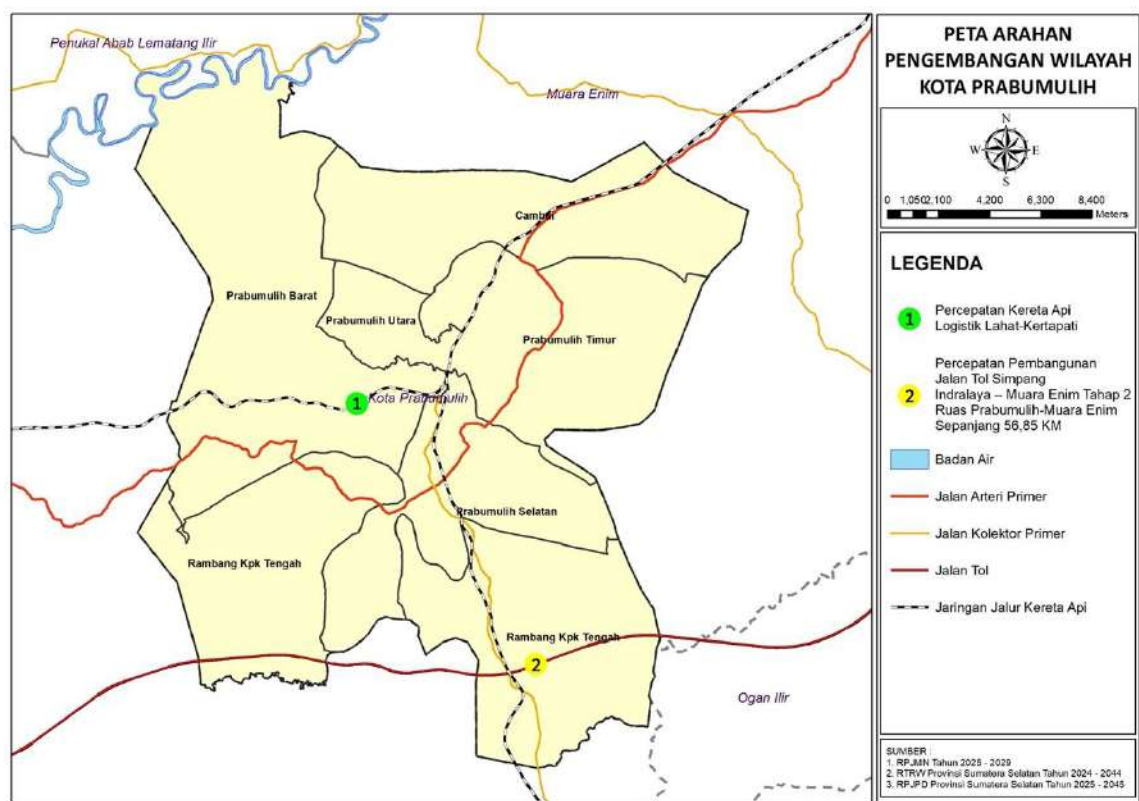
Pembangunan di Kota Prabumulih diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kota Prabumulih sebagai berikut:

Tabel 5.15
Capaian dan Target Indikator Makro Kota Prabumulih

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01	5,30	5,50
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	51,81	54,03	56,54
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	1,56	1,57*	1,57*
4	Tingkat Kemiskinan (%)	10,13	10,10	9,70
5	Gini Ratio	0,35	0,347	0,345
6	Indeks Pembangunan Manusia	78,68	79,05	79,30
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	26.375,98	30.122,55
8	IKLH Daerah	N/A	63,00	63,50
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,94	4,85	4,75

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

Gambar 5.22
Peta Arah Pengembangan Wilayah Kota Prabumulih



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kota Prabumulih digolongkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Selain itu, Kota Prabumulih memiliki 2 (dua) kegiatan PSN meliputi pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim bagian dari Trans Sumatera sepanjang 119 km dan Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati. Arah pengembangan Kota Prabumulih yaitu, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan, dan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan.

Berdasarkan Distribusi PDRB, sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan daerah di Kota Prabumulih pada tahun 2024 berdasarkan sektor lapangan usaha terdapat 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi sebesar 70,90% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 27,15%; 2) Sektor Konstruksi sebesar

17,12%; 3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,85%; 4) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,20%; dan 5) Sektor Real Estate sebesar 7,58%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kota Prabumulih pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kota Prabumulih (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Pembangunan jalan tol Simpang Indralaya–Muara Enim tahap 2 Ruas Prabumulih-Muara Enim sepanjang 56,85 km.
- 2) Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kota Prabumulih pada tahun 2026 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 6,05% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 10,40% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,65.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 76,64.

- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 86,24%, akses air minum layak sebesar 94,94%, akses sanitasi sebesar 95,83%.
- 6) Peningkatan produktivitas perkebunan menuju kedaulatan pangan.
- 7) Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- 8) Pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional.
- 9) Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan.
- 10) Optimalisasi industri dan UMKM pengolahan produk unggulan daerah seperti hilirisasi produk nanas.
- 11) Peningkatan daya saing dan kualitas SDM.
- 12) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata.
- 13) Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data regsosek.
- 14) Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantung kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*.
- 15) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesadaran masyarakat terkait lingkungan.
- 16) Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA) khusus bagi anak miskin, dengan output berupa Sekolah Rakyat Berasrama
- 17) Pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, dengan output berupa penyediaan peralatan digital bagi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- 18) Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrument penyaluran bantuan secara terintegrasi.
- 19) Pendayagunaan Dokter Spesialis
- 20) Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 21) Pemberian bantuan pembangunan rumah Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RKP 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera

Selatan. Kota Prabumulih diarahkan untuk menjadi **kota industri, energi, dan agroindustri berwawasan lingkungan dengan konektivitas tinggi serta kualitas hidup yang baik.**

5.2.14 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

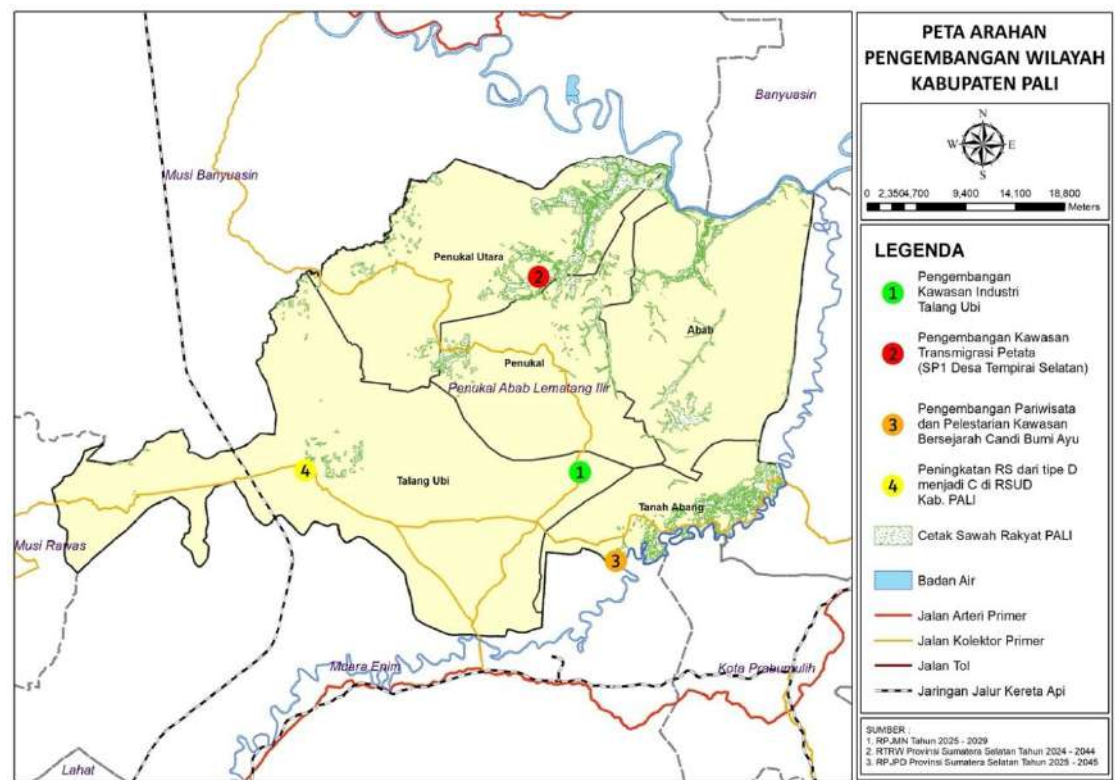
Pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai berikut:

Tabel 5.16
Capaian dan Target Indikator Makro
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,98	5,20	5,40
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	45,70	47,56	49,83
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	1,39	1,33*	1,27*
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,82	9,3	9,0
5	Gini Ratio	0,29	0,290	0,285
6	Indeks Pembangunan Manusia	69,63	70,99	71,56
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	287.342,64	318.319,90
8	IKLH Daerah	N/A	67,95	68,20
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,72	3,65	3,45

Sumber: Capaian 2024 (BPS Prov Sumsel), target 2025 & 2026 (Kesepakatan Pramusrenbang Tahun 2025)

Gambar 5.23
Peta Arahan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki 1 PKL (PKL Talang Ubi/Pendopo). Arahan pengembangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai bagian dari KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya yaitu, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan industri di Kawasan Industri Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pengembangan kawasan wisata Candi Bumi Ayu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan, dan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan.

Berdasarkan Distribusi PDRB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menurut lapangan usaha tahun 2024, terdapat 4 (empat) sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 38,94%, 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar

17,26%, 3) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 15,68% dan 4) Sektor Konsruksi dengan *share* sebesar 14,91%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Jalan Tol Betung (SP.Sekayu)-Tempino-Jambi-Bagian Trans Sumatera ((170,7 Km).
- 2) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2026 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,29% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 10,12% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,98%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 68,08.

- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi saat ini sebesar 95,99%, akses air minum layak sebesar 94,09%, dan akses sanitasi layak sebesar 95,72%.
- 6) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Petata (SP1 Desa Tempirai Selatan).
- 7) Peningkatan RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.
- 8) Peningkatan Produktivitas Perkebunan dan kualitas produksi (sawit dan karet).
- 9) Pengembangan dan perlindungan Kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit dan karet).
- 10) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit dan karet).
- 11) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas peoduksi industri (sawit dan karet).
- 12) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit dan karet.
- 13) Pengembang produksi bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 14) Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan untuk mendukung kedaulatan pangan.
- 15) Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Kawasan Bersejarah Candi Bumi Ayu.
- 16) Pengembangan Kawasan Industri Talang Ubi.
- 17) Melindungi Kawasan lindung gambut.
- 18) Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- 19) Pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional.
- 20) Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan.
- 21) Diversifikasi ekonomi melalui optimalisasi hilirisasi sektor unggulan daerah seperti pertanian dan perkebunan.
- 22) Peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia.

- 23) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan peningkatan daya tarik pariwisata melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas lokal.
- 24) Pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan
- 25) Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data Registrasi Sosial EKonomi (Regsosek).
- 26) Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantung kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*.
- 27) Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA) khusus bagi anak miskin, dengan output berupa Sekolah Rakyat Berasrama
- 28) Pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, dengan output berupa penyediaan peralatan digital bagi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- 29) Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrument penyaluran bantuan secara terintegrasi.
- 30) Pendayagunaan Dokter Spesialis
- 31) Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 32) Pemberian bantuan pembangunan rumah Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RKP 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten PALI diarahkan untuk menjadi **pusat industri berbasis perkebunan dan energi berkelanjutan, dengan konektivitas tinggi dan ekonomi inklusif yang berbasis budaya lokal**.

5.2.15 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

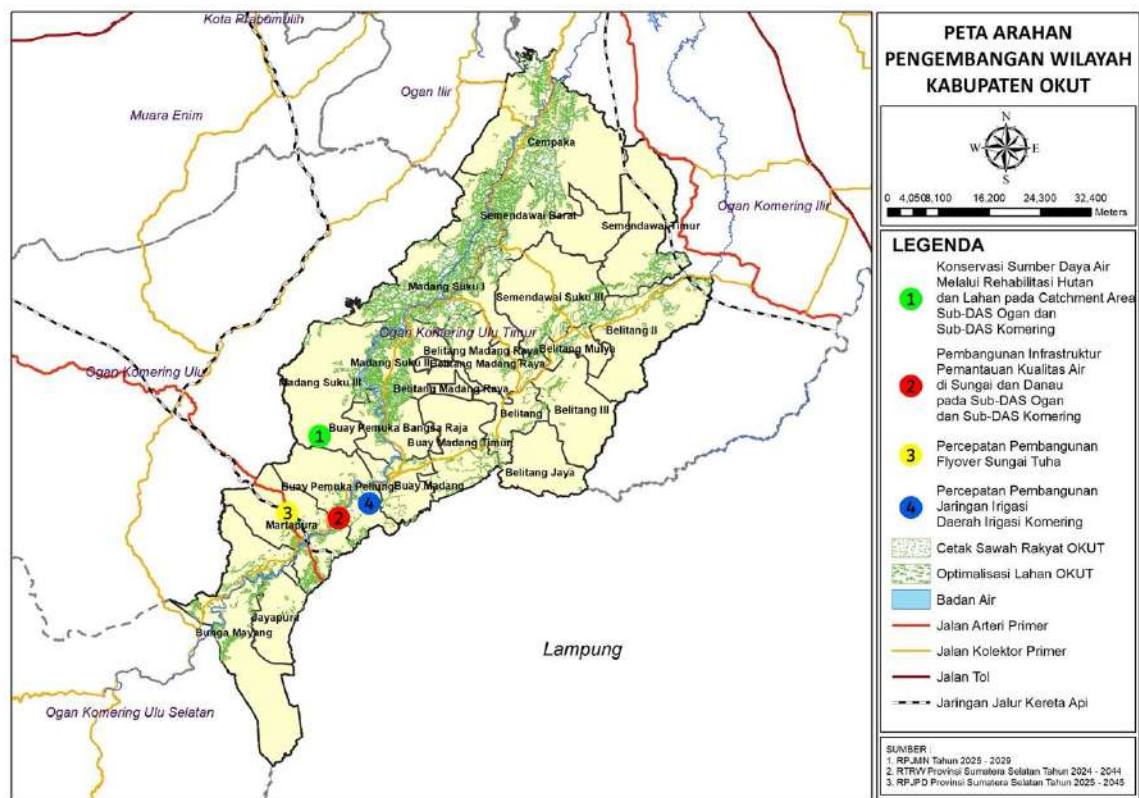
Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut:

Tabel 5.17
Capaian dan Target Indikator Makro
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,12	5,1 - 5,6	5,1 - 5,6
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	31,50	31,98	32,57 - 33,40
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	3,14	3,15*	3,17*
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,75	9,60	8,4 - 9,4
5	Gini Ratio	0,30	0,240 - 0,290	0,230 - 0,280
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,64	74,00	74,82
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	273.154,65	300.005,31
8	IKLH Daerah	N/A	66,30	66,55
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,45	3,30	3,10 - 3,30

Sumber: Capaian 2024 (BPS Prov Sumsel), target 2025 & 2026 (Kesepakatan
Pramusrenbang Tahun 2025)

Gambar 5.24
Peta Arahan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki 2 Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu di Gumawang dan Martapura. Arahan pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai bagian dari KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya yaitu, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan *biodiesel/ biofuel* berbasis kelapa sawit, pengembangan *food estate* sentra produksi padi, dan menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

Dilihat Distribusi PDRB, sumber utama pertumbuhan sebanyak 5 (lima) sektor pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 32,35%; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,66%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 17,92%; 4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,01%; dan 5) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,80%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 11) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati khususnya proyek *flyover* Sungai Tuha.
- 2) Pembangunan Jaringan Irigasi DI Komering.
- 3) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun 2026 antara lain diarahkan pada:

- 11)Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 6,50% melalui sektor unggulan.
- 12)Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,46% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 13)Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,42%.
- 14)Peningkatan IPM sebesar 71,91%.
- 15)Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap provinsi sebesar 94,11%, akses air minum layak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 96,19%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 88,91%.

- 16) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 17) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 18) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 19) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 20) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 21) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 22) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 23) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida /pakan organik.
- 24) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 25) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 26) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal,

- peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 27) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
 - 28) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
 - 29) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi dan kelapa).
 - 30) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
 - 31) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi dan kelapa).
 - 32) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa)
 - 33) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
 - 34) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
 - 35) Menjaga kawasan yang berfungsi lindung.
 - 36) Pendekatan pengembangan pertanian holistik melalui model *closed-loop*.
 - 37) Peningkatan kerjasama perdagangan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.
 - 38) Mendorong realisasi investasi sektor rill dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan daerah.
 - 39) Pemanfaatan data Regsosek sebagai upaya peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial.
 - 40) Pemerataan kualitas pelayanan dasar dan kapasitas SDM tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik.
 - 41) Standarisasi sarana prasarana antar sekolah dan fasilitas kesehatan. Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA) khusus bagi anak miskin, dengan output berupa Sekolah Rakyat Berasrama
 - 42) Pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, dengan output berupa penyediaan peralatan digital bagi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB

- 43) Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrument penyaluran bantuan secara terintegrasi.
- 44) Pendayagunaan Dokter Spesialis
- 45) Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 46) Pemberian bantuan pembangunan rumah Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RKP 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diarahkan untuk menjadi **pusat ketahanan pangan dan agribisnis unggulan berkelanjutan, dengan infrastruktur pendukung yang kuat serta daya saing ekonomi berbasis inovasi dan investasi.**

5.2.16 Kabupaten Ogan Komering Ulu

Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) diharapkan dapat mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten OKU sebagai berikut:

Tabel 5.18

Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu

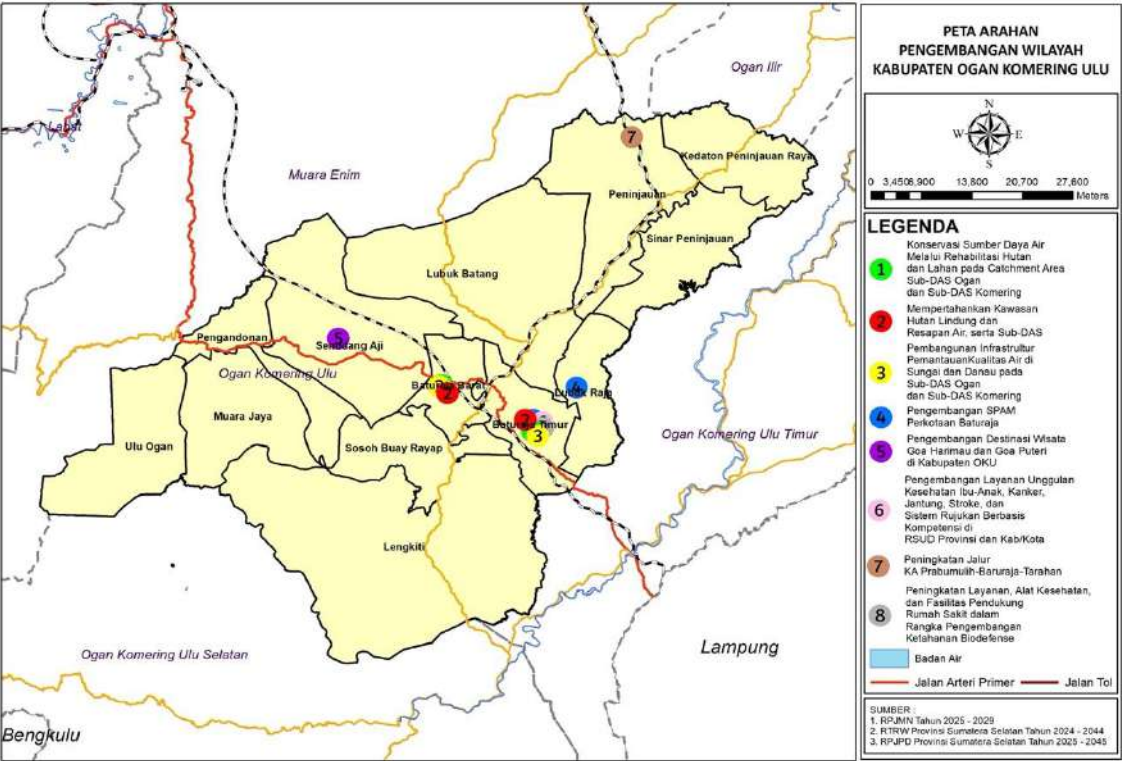
No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,06	6,42	6,69
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	53,43	52,53	54,79
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	3,02	2,98*	2,94*
4	Tingkat Kemiskinan (%)	10,68	10,93	9,73 - 10,30
5	Gini Ratio	0,33	0,332	0,327
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,70	74,20	74,50
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	204.268,67	220.775,86

8	IKLH Daerah	N/A	68,75	69,00
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,05	4,01	3,89

Sumber: Capaian 2024 (BPS Prov Sumsel), target 2025 & 2026 (Kesepakatan Pramusrenbang Tahun 2025)

Gambar 5.25

Peta Arahan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki 1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Baturaja, dan 2 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pengandoran dan Peninjauan. Arah pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai bagian dari KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya diantaranya, pengembangan kawasan wisata Goa Harimau dan Goa Puteri, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dan menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

Dilihat distribusi PDRB, sumber pertumbuhan wilayah sebanyak 4 (empat) sektor dengan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB pada tahun 2024 adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,70%, 2) Industri pengolahan sebesar 19,30%, 3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,07%, dan 4) Pertambangan dan penggalian sebesar 13,36%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 7) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2026, antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 6,69% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 10,71% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,89%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 71,44%.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi sebesar 95,78%, akses air minum sebesar 82,55%, dan akses sanitasi layak sebesar 82,72%.
- 6) Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Baturaja, antara lain melalui:
 - Penyusunan *masterplan* penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
 - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau

- Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
 - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
- 7) Pengembangan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, gen z, dan gen milenial di Kawasan Perkotaan Baturaja (PHTC).
 - 8) Pengembangan SPAM Perkotaan Baturaja.
 - 9) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja (PHTC).
 - 10) Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RS Tk-III dr. Noesmir Baturaja.
 - 11) Preservasi jalan ruas Baturaja-Martapura, Baturaja-Prabumulih, dan Baturaja-Muaradua.
 - 12) Pengembangan kota agropolitan Baturaja.
 - 13) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
 - 14) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
 - 15) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
 - 16) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
 - 17) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
 - 18) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
 - 19) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
 - 20) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida /pakan organik.
 - 21) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit

berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.

- 22) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 23) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
- 24) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 25) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 26) Peningkatan Jalur KA Prabumulih-Baturaja-Tarahan.
- 27) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 28) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi dan kelapa)
- 29) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 30) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 31) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
- 32) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.

- 33) Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC).
- 34) Pengembangan destinasi wisata Goa Harimau dan Goa Puteri di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 35) Mempertahankan Kawasan Hutan Lindung dan resapan air, serta Sub-DAS.
- 36) Pengembangan Kawasan Industri.
- 37) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- 38) Mempercepat hilirisasi dari sektor-sektor unggulan daerah.
- 39) Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kemudahan berusaha guna menjaga momentum pergeseran struktur ekonomi menuju sektor sekunder.
- 40) Peningkatan daya saing dan kualitas SDM.
- 41) Mengadakan program pelatihan spesifik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam rangka meningkatkan *employability* dari para tenaga kerja.
- 42) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat pelayanan dasar melalui pembangunan unit sekolah baru dan puskesmas pembantu.
- 43) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
- 44) Intensifikasi kegiatan pemeriksaan *Antenatal Care (ANC)* terutama di daerah dengan akses kesehatan yang cenderung terbatas.
- 45) Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA) khusus bagi anak miskin, dengan output berupa Sekolah Rakyat Berasrama
- 46) Pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, dengan output berupa penyediaan peralatan digital bagi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- 47) Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrument penyaluran bantuan secara terintegrasi.
- 48) Pendayagunaan Dokter Spesialis
- 49) Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 50) Pemberian bantuan pembangunan rumah Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RKP 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu diarahkan untuk menjadi **pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri, agribisnis, dan perkotaan yang berkelanjutan, dengan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang unggul serta daya saing yang tinggi.**

5.2.17 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

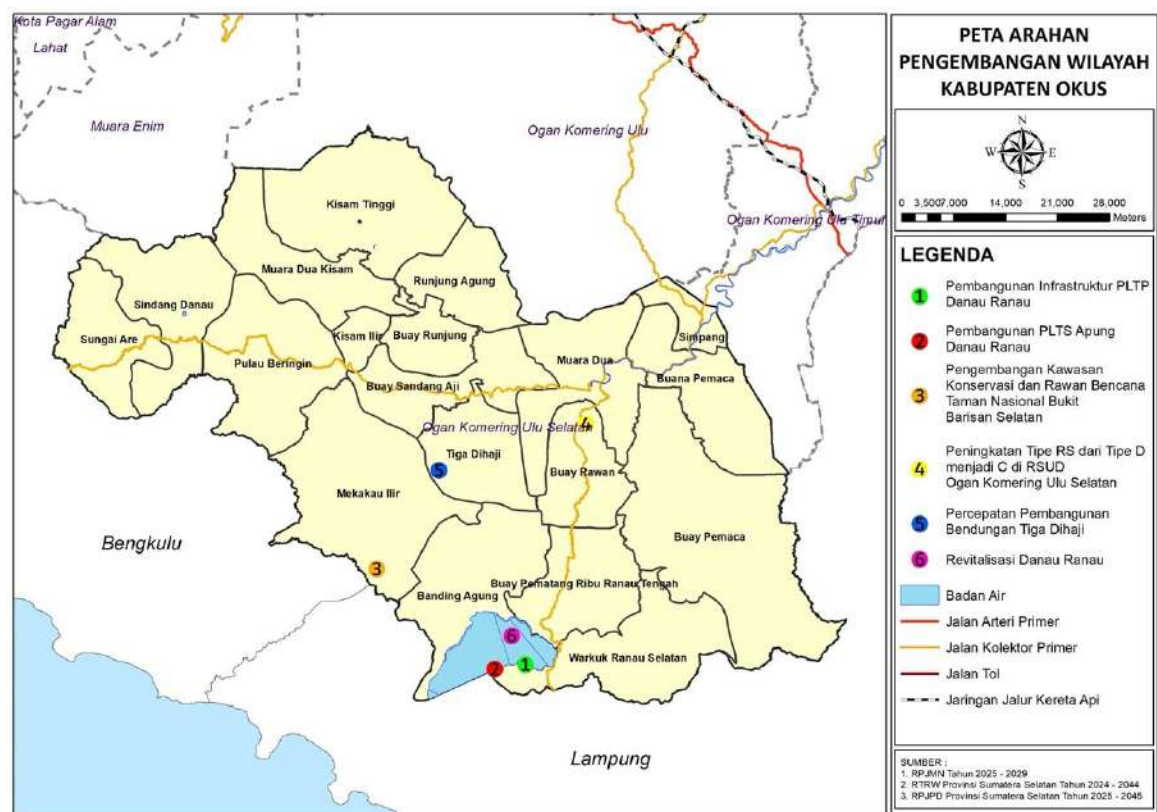
Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai berikut :

Tabel 5.19
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten OKU Selatan

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target	
			2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,58	4,65	5,0-5,3
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	27,72	24,44	25,27
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	1,76	1,75*	1,74*
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,86	9,0-9,5	9,0-9,3
5	Gini Ratio	0,36	0,344	0,327
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,00	72,4	74,8
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	155.181,23	168.302,39
8	IKLH Daerah	N/A	69,60	69,86
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,80	1,79	1,78

Sumber: Capaian 2024 (BPS Prov Sumsel), target 2025 & 2026 (Kesepakatan Pramusrenbang Tahun 2025)

Gambar 5.26
Peta Arahkan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



Sumber : Hasil Analisis Bappeda Sumsel (Peta RTRW Sumatera Selatan 2024-2044)

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki 1 (satu) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Muaradua. Arah pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai bagian dari KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya yaitu, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan ekonomi terpadu Danau Ranau, pengembangan kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam Danau Ranau berupa pengembangan pelabuhan dermaga Danau Ranau dan dermaga wisata, Pengembangan energi panas bumi Ulu Danau sebagai salah satu energi terbarukan, pengembangan potensi sumber daya mineral logam bijih besi, pengembangan *food estate* sentra produksi padi, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan melalui pengembangan jaringan jalan dan bandara udara Banding Agung, serta menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

Dilihat Distribusi PDRB, sumber pertumbuhan wilayah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 84,36% terhadap

Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024 adalah 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 29,77 %; 2) Perdagangan sebesar 24,43%; 3) Konstruksi sebesar 17,42%; 4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 8,19%; dan 5) Sektor *Real Estate* sebesar 4,55 %.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 11) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu Bendungan Tiga Dihaji.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2026, antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,78% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,74% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 1,76%.
- 4) Peningkatan IPM sebesar 67,15.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi sebesar 97,20%, akses air minum layak Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 82,60%, akses sanitasi layak Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 59,80%.

- 6) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 7) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 8) Revitalisasi Danau Ranau.
- 9) Pembangunan infrastruktur PLTP Danau Ranau.
- 10) Pembangunan PLTS Apung Danau Ranau.
- 11) Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Ogan Komering Ulu Selatan.
- 12) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 13) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 14) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 15) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 16) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
- 17) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 18) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
- 19) Pelestarian Kawasan Situs Bersejarah.
- 20) Peningkatan kerjasama dengan kawasan perbatasan.
- 21) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, serta longsor.
- 22) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- 23) Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi.
- 24) Menjaga kawasan yang berfungsi lindung.
- 25) Perluasan akses internet dan digitalisasi.
- 26) Mempercepat industrialisasi dan pemberdayaan aktivitas ekonomi dari sektor-sektor unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.
- 27) Dukungan promosi dan kemudahan investasi.

- 28) Mengadakan program pelatihan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
- 29) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan dasar melalui pembangunan unit sekolah baru dan penguatan peran puskesmas pembantu.
- 30) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan serta standarisasi kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- 31) Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, SMA) khusus bagi anak miskin, dengan output berupa Sekolah Rakyat Berasrama
- 32) Pemanfaatan platform digital pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, dengan output berupa penyediaan peralatan digital bagi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- 33) Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan sebagai instrument penyaluran bantuan secara terintegrasi.
- 34) Pendayagunaan Dokter Spesialis
- 35) Revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 36) Pemberian bantuan pembangunan rumah Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya.

Dengan demikian, berdasarkan arahan RPJMN 2025-2029, RKP 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diarahkan untuk menjadi **kawasan ekonomi hijau berbasis agribisnis, energi terbarukan, dan konservasi lingkungan, dengan infrastruktur berkelanjutan serta ketahanan bencana yang tangguh.**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Tema Pembangunan RKPD Tahun 2026 yaitu **“Peningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing melalui kesehatan, pendidikan, IPTEK, dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta Penguatan kehidupan beragama, seni, dan budaya yang toleran berbasis kearifan lokal”** yang terdiri dari 7 (tujuh) Prioritas Daerah, yaitu:

1. Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas.
2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.
3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru.
4. Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
5. Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan.
6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas.
7. Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, dan Berorientasi Pada Kearifan Lokal.

Berdasarkan tema dan Prioritas daerah tersebut, disusun program/kegiatan masing-masing perangkat daerah untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan rekapitulasi per perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Pagu Renja (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.866.880.713.669
2	Dinas Kesehatan	493.358.555.875
	RSUD Siti Fatimah	486.671.503.945
	RS Mata	39.029.861.300
	RS Gigi dan Mulut	15.772.153.000
3	RS. Dr. Ernaldi Bahar	45.933.756.860
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	107.381.209.173
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	629.044.232.327
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	115.167.281.327
7	Satuan Polisi Pamong Praja	42.054.212.432
8	Dinas Sosial	44.376.686.512
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.258.537.120
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36.304.259.124
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.951.896.860
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	45.872.305.661
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	51.920.073.911
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.437.400.850
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	44.082.962.475
16	Dinas Perhubungan	65.359.606.532
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	40.205.835.359
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.774.842.260
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.600.889.242
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	91.871.713.016
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	51.045.927.798
22	Dinas Perpustakaan	21.515.608.798
23	Dinas Kearsipan	13.042.006.830
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.997.619.060
25	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	118.329.350.730
26	Dinas Perkebunan	30.504.539.564
27	Dinas Kehutanan	81.179.600.210
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	27.727.228.447
29	Dinas Perdagangan	18.759.606.874
30	Dinas Perindustrian	21.285.146.797
31	Sekretariat Daerah	496.715.886.053
A	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	89.847.231.507
B	Biro Hukum dan HAM	3.618.422.840
C	Biro Kesejahteraan Rakyat	44.927.173.856
D	Biro Perekonomian	3.459.661.619
E	Biro Administrasi Pembangunan	1.810.627.269
F	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6.767.345.204
G	Biro Organisasi	2.099.063.400

Selanjutnya, total pagu anggaran untuk Prioritas Daerah dan untuk masing-masing Prioritas Daerah serta masing-masing Program Prioritas Daerah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.2.
 Pagu Anggaran per Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah
 Tahun 2026

No	Prioritas Daerah	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
1.	Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas.	1.137.670.000.000	1. Dinas Pendidikan 2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6. Dinas Pemuda dan Olahraga 7. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi 8. Dinas Perpustakaan 9. Dinas Sosial 10. Dinas Kesehatan 11. RS. Ernaldi Bahar (OBK) 12. RS. Gigi dan Mulut (OBK) 13. RS. Mata (OBK) 14. RS. Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
2.	Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	210.718.000.000	1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Dinas Pendidikan 9. Dinas Perdagangan 10. Dinas Perindustrian 11. Dinas Perkebunan 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.	Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	262.919.000.000	1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Dinas Kehutanan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Prioritas Daerah	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
			4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
4.	Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/ Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	2.473.050.000.000	1. Dinas dan Energi Sumber Daya Mineral 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang 5. Dinas Pendidikan 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	4.629.280.000.000	1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Pemuda dan Olahraga 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6.	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas	1.711.690.000.000	1. Badan Kepegawaian Daerah 2. Badan Pendapatan Daerah 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Biro Administrasi Pembangunan 7. Biro Hukum 8. Biro Humas dan Protokol 9. Biro Kesejahteraan Rakyat 10. Biro Organisasi 11. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 12. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 13. Biro Perekonomian 14. Biro Umum 15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 16. Dinas Kearsipan 17. Dinas Kehutanan 18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 19. Dinas Komunikasi dan Informatika 20. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 21. Dinas Pemuda dan Olahraga 22. Dinas Pendidikan 23. Dinas Perhubungan 24. Dinas Perkebunan 25. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 26. Dinas Sosial 27. Inspektorat 28. Satuan Polisi Pamong Praja 29. Sekretariat DPRD

No	Prioritas Daerah	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
7.	Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, dan Berorientasi Pada Kearifan Lokal	105.427.000.000	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 4. Biro Kesejahteraan Rakyat 5. Dinas Pendidikan 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Total		10.530.754.000.000	

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

Untuk memberikan kepastian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan maka perlu ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan 2026.

Untuk itu, sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya maka dapat dijelaskan beberapa indikator kinerja pembangunan Sumatera Selatan yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu:

7.1. Indikator Makro Pembangunan

Tabel 7.1
Indikator Makro Pembangunan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8-6,3*
2	PDRB per Kapita	Rp (Juta)	94,00
3	Tingkat Kemiskinan	%	9,07-10,07*
4	Rasio Gini	Indeks	0,312-0,316*
5	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,5475
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	65,48-68,68
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,44
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,75-3,90

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Keterangan: Target Disesuaikan dengan Kesepakatan pada Pembahasan Rakortekrenbangnas Penyusunan RKP Tahun 2026

7.2. Indikator Kinerja Utama

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target
1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,5475
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,95
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	13,8
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8 - 6,3
5	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp (Juta)	94,00
6	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,50
7	Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5
8	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	62,63
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	21,99
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,44
11	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	65,48-68,68
12	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,79
13	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks	129,78
14	Tingkat Kemiskinan	%	9,07-10,07
15	Rasio Gini	Indeks	0,312-0,316
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,75-3,90
17	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (76-77)
18	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,453

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

7.3. Indikator Kinerja Daerah

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Daerah RKPD Tahun 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
I	Aspek Geografi dan Demografi		
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79.79
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	5.36
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	972,01
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	90,35
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	68,44
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	11,40
7	Pengelolaan Sampah (Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah) (%)	%	21,5
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	44
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	65,48-68,68
10	Indeks Risiko Bencana	Indeks	129,78
11	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,40
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,05
13	Rasio Penduduk	%	103,50
14	Kepadatan Penduduk	Orang/km	104,5
	Indeks Akses Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,469
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8 - 6,3
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,07 - 10,07
3	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp (Juta)	94,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,75-3,90
5	Indeks Gini	Indeks	0,312-0,316
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,5475
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,95
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,71
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,345
9	Prevalensi Stunting	%	13,8
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,27 – 9,29
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,89-12,90
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	73,50
13	Indeks Literasi Digital	Angka	3,50
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	50
15	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78,15
16	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	59,81
17	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	66

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
18	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	69,41-69,42
19	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,453
20	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	56,89
21	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	66,10
22	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	60
23	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	8,90
	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Jumlah	40.773
	Aset Perbankan Syariah/PDRB	%	3,17
	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,51
	PDRB per Kapita (ADHK)	Rp (Juta)	46,40
III	Aspek Daya Saing Daerah		
1	Angka Ketergantungan	%	47,09
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	19,53
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,1
4	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	3.060.300.000
5	Rasio Kewirausahaan	%	2,60
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,84
7	Indeks Inovasi Daerah	Skor	77,31
8	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	62,63
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	21,99
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	23,70
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6,08
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp. Miliar	232.903,53
13	Ekspor Barang dan Jasa	Juta US\$	7.006
14	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	71 (puas)
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,6
16	Persentase Desa Mandiri	%	20,56
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,252
18	Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5
19	Inklusi Keuangan	%	94,93
20	Persentase Kemiskinan Ekstrem	%	0,20
21	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	17,90
22	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	0,74
23	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi	Rupiah	13.338.639,98
24	Total Kredit/PDRB	%	18,69
25	Kontribusi PDRB Provinsi	%	3,09
	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	%	1,42
	Indeks Entrophy Theil	Indeks	1,28
	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	2,82

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian	%	3,330
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,75
	Persentase Bangunan Gedung, Hunian dan Permukiman dengan akses layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	43,14
IV	Aspek Pelayanan Umum		
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	81,5
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,09
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A (4,65)
4	Indeks Integritas Daerah	Indeks	75,13
5	Persentase Penegakan Perda	%	100
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	100
7	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	82,48
8	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	77,5
9	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,50
	Manajemen Risiko Indeks	Indeks	2,982
III	Aspek Pelayanan Umum		
III.1	Layanan Urusan Wajib Dasar		
1	Urusan Pendidikan		
1.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,89-12,90
1.2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,27-9,29
1.3	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :		
	Literasi Membaca	%	8,82 – 13,23
	Numerasi	%	1,47 – 7,35
1.4	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :		
	Literasi Membaca	%	93,34
	Numerasi	%	54,11
1.5	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan	%	82,59
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	8,90
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	74,987
2	Urusan Kesehatan		
2.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,71
2.2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	109

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
2.3	Angka Kematian Balita	%	13,8
2.4	Prevalensi Stunting	%	13,8
2.5	Angka Keberhasilan pengobatan tuberculosis (<i>treatment success rate</i>)	%	95
2.6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,62
2.7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (<i>treatment coverage</i>)	%	90
2.8	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	12
2.9	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	95
2.10	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	25
2.11	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,345
3	<i>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>		
3.1	Waktu Tempuh Jalan Provinsi	Jam/100 Km	2,50
3.2	Index Penyelenggaraan Penataan Ruang	Index	67,5
3.3	Kapasitas air baku	m ³ /detik	2,46
3.4	Indeks Ketahanan Air Provinsi	Indeks	3,65
3.5	Akses Air Minum Layak	%	90,35
3.6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	82,43
3.7	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	38,00
4	<i>Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman</i>		
4.1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	68,60
5	<i>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</i>		
5.1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,40
5.2	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Angka	71,69
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	62,17
	<i>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi</i>	%	100
6	<i>Urusan Sosial</i>		
6.1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,32
III.2	<i>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</i>		
1	<i>Urusan Tenaga Kerja</i>		
1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,84
1.2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	84.800.000

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
1.3	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak- Hak Dasarnya	%	72
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	Persen	57,30
2.2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,453
2.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,99 - 94,10
2.4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66
3	Urusan Pangan		
3.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79.79
3.2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	5.36
4	Urusan Pertanian		
4.1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	%	95
5	Urusan Lingkungan Hidup		
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,44
5.2	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	19,41
5.3	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	34,50
5.4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	52
5.5	Pengelolaan Sampah (Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah) (%)	%	21,5
5.6	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	% RT	44
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Rasio	88,06
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	9,50
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	57,71
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	99, 059
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	50,55
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	53,05
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	53,57

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
7.1	Persentase Desa Mandiri	%	20,56
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8.1	Angka Kelahiran Total (Total Fertilly Rate/TFR) Per wanita usia subur (15-49 Tahun	Angka	2,30
8.2	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Mcpr)	%	87,50
8.3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specitif Fertility Rate (ASFR 15-19)	Angka	29,33
9	Urusan Perhubungan		
9.1	Rasio Konektivitas	Rasio	0,660
9.2	V/C Rasio	Rasio	0,388
9.3	Rata - rata <i>Load Factor</i> Angkutan Umum	%	71,50
10	Urusan Komunikasi dan Informatika		
10.1	Indeks IPTIK	Indeks	6,08
10.2	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	56,05
10.3	Indeks SPBE	Indeks	3,09
11	Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		
11.1	Rasio Kewirausahaan	%	2,60
11.2	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	%	0,42
11.3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,58
12	Urusan Penanaman Modal		
12.1	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	%	31.16
12.2	Persentase Pertumbuhan Investasi	%	7,5
13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
13.1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	56,89
13.2	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,357
14	Urusan Statistik		
14.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,74
15	Urusan Persandian		
15.1	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	377 (metode perhitungan baru)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
16	Urusan Kebudayaan		
16.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	59,81
17	Urusan Perpustakaan		
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	88,06
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	71,00
18	Urusan Kearsipan		
18.1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	91,8
18.2	Indeks Pengelolaan Arsip Elektronik	Indeks	85,5
III.3	Layanan Urusan Pilihan		
1	Urusan Kelautan dan Perikanan		
1.1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	117,87
1.2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Nilai	94,47
2	Urusan Pariwisata		
2.1	Rasio PDRB Penvediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persentase	2,1
2.2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	2.209
2.3	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	20.002.788
2.4	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	3.060.300.000
3	Urusan Pertanian		
3.1	Nilai Tukar Petani	%	123,25
3.2	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :		
	- Padi	%	5,00
	- Jagung	%	2,50
3.3	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura		
	- Cabai Merah	%	10,00
	Persentase peningkatan produksi Karet	%	0,110
		Ton	1.010.571,59
	Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit	%	0,447
		Ton	3.430.391,22
	Persentase peningkatan produksi Kopi	%	3,715
		Ton	235.211,76
	Persentase peningkatan produksi Kelapa	%	1,445
		Ton	63.439,17
4	Urusan Kehutanan		
4.1	Persentase Tutupan Lahan	%	19,10

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
5	<i>Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral</i>		
5.1	Rasio Elektrifikasi	%	100
5.2	Persentase Desa Berlistrik	%	100
5.3	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	23,70
5.4	Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp Juta	190
5.5	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/kapita	972,01
6	<i>Urusan Perdagangan</i>		
6.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,99
6.2	Ekspor Barang dan Jasa (PDRB %)	%	21,58
6.3	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi		7,00
7	<i>Urusan Perindustrian</i>		
7.1	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%)	%	19,53
7.2	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	5,16
7.3	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	%	2,39
8	<i>Urusan Transmigrasi</i>		
8.1	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi	Indeks	57,40
III.4	Penunjang Urusan		
1	<i>Sekretariat Daerah</i>		
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (76-77)
1.2	Nilai SAKIP	Nilai	BB (78,75)
1.3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A (4,65)
1.4	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2,10
1.5	Indeks Reformasi Hukum	Angka	81,5
2	<i>Sekretariat DPRD</i>		
2.1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	87
3	<i>Perencanaan</i>		
3.1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	96,6
4	<i>Keuangan</i>		
4.1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
4.2	Revenue Mobilization		6,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD		
4.3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,252
4.4	Indeks Kapasitas Fiskal	Indeks	2,02 (Sedang)
5	Kepegawaian		
5.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	77
6	Pendidikan dan Pelatihan		
6.1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	28
7	Penelitian dan Pengembangan		
7.1	Indeks Inovasi Daerah	Skor	77,31
7.2	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,02
7.3	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	60
8	Pengawasan		
8.1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,16
9	Pemerintahan Umum		
9.1	Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	Indeks	6,6
9.2	Indeks kerukunan Umat Beragama IKUB)	Indeks	78,15
9.3	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	82,48
10	Pengelolaan Penghubung		
9.1	Indeks Kepuasan terhadap layanan penghubung	Indeks	88

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024, serta memperhatikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 mengemban tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

RKPD Tahun 2026 harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penyusunan KUA dan PPAS, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan RKPD dengan APBD, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan APBD. Prioritas pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah:

1. Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas
2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
3. Ketangguhan Daerah Dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru
4. Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
5. Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan

6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas
7. Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi Pada Kearifan Lokal

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sangat ditentukan oleh koordinasi dan sinergi yang solid antar Perangkat Daerah, kerjasama yang saling mengisi dan menguatkan antara Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, serta pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat, sehingga sangat diharapkan setiap program dan kegiatan benar-benar bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan perlu diterapkan manajemen risiko yang berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan prinsip antara lain yaitu: terintegrasi, kolaboratif, transparan dan inklusif, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, memperhitungkan ketidakpastian (*uncertainty*), dan perbaikan terus-menerus.

Sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan melalui sinergitas perencanaan pembangunan maka pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 akan ditempuh melalui kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan dasar Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
2. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 digunakan sebagai dasar dalam pengendalian pembangunan jangka menengah dalam RPD tahun pelaksanaan 2026.
3. Seluruh kebijakan dan program yang tercantum dalam RKPD Tahun 2026 selanjutnya akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dengan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu, berbasis kinerja dan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabilitas dan partisipasi.

4. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 memuat daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan menjadi instrumen utama bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan administrasi pemerintahan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada masyarakat.
5. Berbagai tantangan pembangunan harus dihadapi dengan bekerja lebih keras dan lebih cerdas, memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Pusat maupun dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dan membangun kerjasama yang saling memberikan manfaat dengan para pelaku usaha.
6. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dalam bentuk laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan evaluasi pelaksanaan program RKPD.
7. RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sehingga harus menjadi perhatian bagi seluruh *stakeholders* untuk bekerja secara aktif dan efektif dalam mencapai target kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
8. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 harus dipedomani oleh 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota dalam menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
9. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengendalian pembangunan di Provinsi

Sumatera Selatan dan antar kewilayahan Kabupaten/Kota Tahun 2026.

10. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 digunakan sebagai dasar bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam memantau pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Dengan kaidah pelaksanaan seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagai tujuan dari pembangunan daerah.



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU